



SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI 16 NEGARA



Diterbitkan oleh:

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

ISBN:**Penasehat:**

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

Pengarah Materi:

Prof. Dr. Ainun Naim

Penanggung jawab:

Dr. Ir. Ananto Kusuma Seta

Penyunting:

Prof. Dr. Ir. T. A. Fauzi Soelaiman, M.S.M.E.
Dr. Ir. Ananto Kusuma Seta
Son Kuswadi, Dr. Eng.
Chaerun Anwar, S.Pd., M.Pd.
R. Raditya Yudha Wiranegara, S.T., M.Sc.
dr. Ratri Wulandari, M.Sc.

Penulis:

Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.
Dr. Basuni Imamuddin, S.S., M.A.
Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Sc.
Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, M.U.P.M.Sc., Ph.D.
Chaerun Anwar, S.Pd., M.Pd.
Dr. Ir. Paristyanti Nurwardani
Son Kuswadi, Dr. Eng.
Prof. Dr. Ir. T. A. Fauzi Soelaiman, M.S.M.E.
Ir. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. rer.nat. Agus Rubiyanto
Prof. Drs. Rusdi, M.A., Ph.D.
Dr. Drs. Fahmy Lukman, M.Hum.
Didik Wisnu Widjajanto, Ph.D.
Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.
Prof. Dr. Ismunandar
Dr. Ir. Yunardi, M.Sc.

Tata Letak:

Zainuddin, S.Kom.

Sumber Gambar/Illustrasi Cover:

<http://www.globaleducation.edu.au> dan <http://www.wikimedia.org>

Jenis Huruf Cover/Isi:

Minion Pro

SAMBUTAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nyalah, maka buku yang memaparkan tentang **Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara** yang ditulis oleh para Atase Pendidikan RI di masing-masing negara tersebut, telah dapat diselesaikan dengan baik. Kami sangat menghargai terbitnya buku ini yang kaya dengan informasi tentang bagaimana negara-negara lain mengembangkan pendidikannya, yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua dalam menata pendidikan nasional, utamanya pendidikan dasar dan menengah. Pengalaman dari berbagai negara tersebut dalam melaksanakan reformasi dan penyempurnaan sistem pendidikannya adalah masukan berharga dan cermin dalam menentukan arah kebijakan pendidikan kita.

Semua negara di dunia mengakui peran sentral penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) suatu bangsa yang akan meningkatkan kemampuan daya saing dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan suatu bangsa dalam tataran global. Karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa kita agar mampu menghadapi tantangan jamannya yang bukan semakin ringan. Pendidikan merupakan aspek fundamental dari kehidupan suatu bangsa, maka telah menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan tersebut kepada peserta didik. Melalui pendidikan, generasi penerus akan dapat memetik manfaat dari perbaikan kualitas mutu pendidikan saat ini dalam mengembangkan kompetensi mereka dalam membangun peradaban bangsa.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kita menghadapi tantangan besar untuk menata diri menjadi negara maju. Sebesar apapun tantangan yang menghadang, kita harus secara konsisten mendidik lulusan yang mampu mengatasi tantangan yang makin kompleks dan seringkali dalam bentuk yang belum ada sebelumnya tersebut. Karena itu kontribusi lulusan tersebut dapat menempatkan negara pada posisi yang lebih kuat untuk bersaing dengan bangsa lainnya dan meningkatkan kehidupan berkeadaban pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Indonesia telah membuktikan perubahan yang signifikan berkat upaya aktif menata pendidikannya. Laporan terbaru *World Economic Forum* mengenai *Global Competitiveness Report 2013/2014* mendasarkan pada penilaian 9 indikator yang 4 indikator di antaranya merupakan ranah pendidikan yaitu *Health and Primary Education, Higher Education and Training, Technological Readiness*, dan *Innovation*. Indonesia menduduki urutan ke-3 dari 148 negara di dunia yang mengalami kenaikan peringkat tertinggi, yaitu naik 12 peringkat dari peringkat ke-50 pada 2012/2013 menjadi peringkat ke-38 pada tahun 2013/2014. Kenaikan peringkat tersebut terkait dengan laporan yang diluncurkan pada 8 Oktober 2013 di Brussels oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) bahwa penduduk dewasa dengan tingkat keaksaraan yang memadai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

Penyiapan secara sungguh-sungguh SDM sangat disadari oleh bangsa-bangsa lain. Hal tersebut dapat kita baca pada buku ini bagaimana negara lain mengembangkan pendidikannya, sehingga bisa dihasilkan SDM handal untuk kemajuan bangsanya. Tiongkok misalnya, sejak tahun 2011 telah meluncurkan kurikulum baru yang lebih menekankan pada pemenuhan tuntutan “peradaban berbasis pengetahuan” (*knowledge-driven civilization*) sebagai jawaban terhadap tantangan di Abad 21. Pemerintah Tiongkok mengubah tujuan kurikulum sesuai harapan masyarakat Tiongkok. Contoh dari perubahan tujuan kurikulum adalah dengan menciptakan generasi berwawasan luas, yang memungkinkan setiap individu untuk menemukan, menggali dan memperkaya potensi kreatif-nya, serta menemukan kelebihan individualnya. Hal ini berarti melampaui pandangan instrumen pendidikan yang selama ini tunduk

kepada tujuan tertentu (dalam hal keterampilan, kemampuan atau potensi ekonomi) menjadi ke arah yang menekankan pengembangan manusia seutuhnya.

Sementara itu, menarik disimak bagaimana Inggris juga tengah memperbaiki kurikulumnya yang akan mulai diimplementasikan pada musim gugur 2014. Beberapa perbaikan telah diusulkan termasuk perbaikan dimana untuk kemampuan teknologi informasi lebih ditekankan kepada aspek pemrograman, bukan sekedar pada menggunakan perangkat lunak aplikasi. Artinya, mereka menekankan pengembangan pikiran kreatif melalui pemrograman, daripada sekedar penggunaan perangkat lunak aplikasi. Sama dengan kita, penggunaan perangkat lunak aplikasi diasumsikan sudah dikuasai siswa. Kurikulum 2014 ini direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap.

Malaysia juga melakukan hal serupa dalam memajukan pendidikannya. Dua kebijakan strategis pada akhir 2013 diambil, pertama menggabungkan Kementerian Pelajaran yang menangani pendidikan dasar hingga menengah, dengan Kementerian Pengajian Tinggi yang mengelola pendidikan tinggi; menjadi Kementerian Pendidikan. Kedua, peluncuran *Malaysia Education Blueprint 2013-2015* yang bertumpu pada 5 kebijakan strategis: akses, mutu, persamaan, kebersamaan, dan efisiensi. Target yang ingin dicapai untuk akses, misalnya, adalah sebelum 2020, semua anak mendapatkan akses pendidikan. Dari aspek kualitas, Malaysia mentargetnya sebagai 3 besar dunia pada 2025 pada penilaian internasional seperti PISA dan TIMSS. Dalam bidang kurikulum, Malaysia sejak tahun 2011 telah melaksanakan kurikulum baru yang berlandaskan pada *Tazkiyah* (*attitude*), *Tilawah* (pengetahuan) dan *Ta'lim* (keterampilan). Tujuannya, agar dapat dihasilkan peserta didik yang seimbang, berpikir kreatif, kritis, dan inovatif melalui jalur komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fisik dan estetika, ketrampilan diri, kemanusiaan, dan kerohanian, serta sikap dan nilai.

Perkembangan ekonomi India termasuk spektakuler, dari negara yang memprihatinkan ketika merdeka, sekarang berada pada ranking ke-11 perekonomian dunia dengan GDP nominal terbesar keempat (dilihat dari *purchasing power parity*). Hal itu terjadi berkat reformasi ekonomi

berbasis pasar pada tahun 1991, dengan menekankan akan keunggulan SDM India, melalui strategi pengembangan pendidikan yang sejarahnya jauh sebelum dijajah Inggris. Atmosfir akademik di Perguruan Tinggi demikian baik sehingga di tengah segala keterbatasannya, jumlah publikasi dan patennya jauh melebihi negara kita. Menarik kita ketahui, bahwa reformasi pendidikan India dimulai sejak merdeka, di mana Jawaharlal Nehru, sebagai Perdana Menteri pertama telah menekankan pentingnya sains dan teknologi dengan mendirikan beberapa *Indian Institute of Technology* (IIT) (sekarang sudah berjumlah 18 buah). Pendidikan dasar dan menengahnya secara rutin terus dikembangkan (terakhir dilakukan pada 2005) dengan melibatkan para pakar India (baik yang ada di dalam dan juga di luar India) dengan menekankan pada aspek keseimbangan antara pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Kurikulumnya sudah mengarah kepada integratif, meski dalam skala yang amat terbatas dibandingkan dengan Kurikulum 2013 kita. Banyak hal menarik yang dapat kita pelajari dari negara yang terkenal unggul dalam bidang IT-nya ini.

Indonesia sendiri telah melakukan penataan kurikulum pendidikan dengan diluncurkannya kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan-tantangan internal dan eksternal. Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tatakelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal di bidang pendidikan. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia di masa depan. Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama yaitu bahwa standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan.

Saya berharap buku ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan pendidikan di sektor pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat luas. Fakta yang dimuat dalam buku ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat, juga sebagai bahan advokasi bidang pendidikan dan pencerahan bagi masyarakat. Informasi dari 16 negara di dunia yang tertuang dalam buku ini juga dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya penyempurnaan secara terus menerus dalam tata kelola pendidikan kita.

Kepada semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas Saudara-saudara adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi emas untuk dapat bersaing di pasar global.

Jakarta, Oktober 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Mohammad NUH

INTISARI

Buku ini membahas tentang Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah dari 16 negara yang mempunyai Atase Pendidikan di Kedutaan Besar RI. Pembahasan meliputi sistem pendidikan secara umum; kurikulum; sistem penjaminan mutu siswa, guru, dan sekolah; serta pendanaan pendidikan.

Pada umumnya, sistem pendidikan di suatu negara, sebagai suatu sub-sistem, mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut. Negara dengan bentuk Kesatuan (*Unitary*), sistem pendidikannya cenderung bersifat terpusat baik dalam sistem kurikulum maupun evaluasinya. Contohnya adalah negara **Perancis, Tiongkok, Mesir, dan Jepang**. Negara yang bersifat Federal, seperti **Amerika Serikat, Jerman, India, dan Inggris**, cenderung menerapkan sistem pendidikan terdesentralisasi, di mana Pemerintah Pusat hanya mengatur norma umum, sedangkan kurikulum dan evaluasi ditetapkan oleh masing-masing daerah (*State*). Untuk negara yang sistem pemerintahan merupakan gabungan antara sistem Monarki dan Kesatuan, sistem pendidikannya cenderung menganut sistem kombinasi, misalnya **Malaysia dan Arab Saudi**.

Sistem penjaminan mutu pendidikan umumnya dilakukan mengikuti program wajib belajar yang diberlakukan di negara yang bersangkutan. Seperti di **Tiongkok**, dengan program wajib belajar 9 tahun, ujian nasionalnya mulai diberlakukan dari SMP (bahkan, ujian nasional juga diberlakukan hingga program master). Untuk negara yang memiliki program wajib belajar 12 tahun seperti **Amerika Serikat**, ujian nasional diberlakukan pada Kelas 12. Sedangkan di **Inggris** dilakukan setiap kenaikan *stage* yaitu setelah Kelas 2, Kelas 6, Kelas 9, dan Kelas 11.

Di **Jerman**, ujian dilaksanakan di masing-masing negara bagian, dengan kisi-kisi dari Pemerintah Pusat.

Di samping sebagai untuk mengetahui capaian kurikulum, di **Malaysia, India, Jerman**, dan **Tiongkok**, hasil ujian nasionalnya dapat digunakan sebagai alat seleksi untuk masuk ke Perguruan Tinggi (Di **Jerman** dan sebagian Pendidikan Tinggi di **India**, hasil ujian dipakai sebagai saringan awal untuk masuk ke Perguruan Tinggi). Sedangkan di **Amerika Serikat, Inggris**, dan **Australia**, ujian nasional hanya dipakai untuk mengukur capaian ketuntasan belajar siswa.

Di banyak negara, reformasi kurikulum dalam menjawab tantangan jaman menjadi isu utama, dengan menekankan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di **India**, misalnya, kurikulum dikembangkan dengan pendekatan lingkungan, di mana pengajaran ditujukan untuk meningkatkan keinginan tahu siswa melalui strategi pembelajaran alamiah. Pengetahuan diajarkan bukan sebagai sekedar informasi atau hafalan, namun pengalaman yang bermakna. Di lain pihak, **Tiongkok** berpandangan bahwa perubahan kurikulum bertujuan untuk menciptakan generasi berwawasan luas yang memungkinkan setiap individu untuk menemukan, menggali dan memperkaya potensi kreatifnya serta menemukan kelebihan individualnya. Sedangkan di **Perancis**, kurikulum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan yang diperlukan, ketrampilan yang digunakan, serta kemampuan mengambil sikap yang berguna sepanjang hidup dengan semangat keterbukaan terhadap orang lain, rasa ingin tahu, kreatifitas, serta penghormatan atas diri sendiri dan orang lain. **Papua New Guinea** menekankan kurikulum yang menumbuhkembangkan pribadi masing-masing individu untuk membentuk karakter yang dilandasi dengan nilai-nilai Kristen/tradisional dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran bangsa. Pengembangan kurikulum di **Arab Saudi**, menekankan pada aspek pembentukan kepribadian: akal, fisik, psikis, dan sosial untuk mempersiapkan diri beradaptasi dengan realita kontemporer dan masa depan yang penuh perubahan dan dinamika. **Malaysia** telah melakukan reformasi sejak 2011 untuk Pendidikan Dasar dengan menekankan empat prinsip utama yaitu bersifat terpadu (holistik), perkembangan individu secara menyeluruh, pendidikan untuk

semua murid dan pendidikan seumur hidup. Kurikulum di **Malaysia** bertujuan untuk membentuk “insan seimbang” yang berlandaskan pada pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dengan melalui pengembangan kemampuan sikap dan nilai kerohanian, komunikasi, fisik dan estetika, sains dan teknologi, kemanusiaan serta ketrampilan diri. Kurikulum sekolah di **Inggris** bertujuan untuk mendorong sikap pengembangan kerohanian, moral, kebudayaan, mental, dan fisik dari siswa di sekolah dan lingkungannya; serta membekali siswa sehingga mampu mengambil kesempatan, tanggung jawab, dan pengalaman untuk hidup di masa depan.

Secara umum, pendidikan dasar dan menengah disediakan oleh negara secara gratis sesuai dengan program wajib belajar di masing-masing negara tersebut. Tentu saja, untuk sekolah swasta ada iuran tambahan, meski pemerintah juga memberikan bantuan, karena mereka memiliki program-program/kegiatan tambahan. Di **Belanda**, misalnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya membiayai pendidikan dasar dan menengah, kecuali kebutuhan tambahan seperti karyawisata. Sedangkan di **Thailand** bahkan bukan hanya biaya pendidikannya saja yang gratis, namun pada tingkat SD mendapatkan susu dan makan siang gratis, serta baju seragam dan tas sekolah. Bahkan sejak 2013, Pemerintah **Thailand** memberikan komputer tablet yang berisi materi pembelajaran secara gratis melalui program *One Tablet Per Child* (OTPC) kepada peserta didik tingkat SD baik negeri maupun swasta. Sementara itu, Pemerintah **Singapura** selain membebaskan biaya pendidikan, juga memberikan subsidi terhadap keluarga yang berpenghasilan rendah yang digunakan untuk membiayai keperluan sekolah lainnya seperti sarapan pagi di sekolah, seragam, buku tambahan, dan alat tulis. Kondisi serupa juga dipraktekkan di **Arab Saudi** di mana negara mendanai pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi negeri, sehingga praktis pendidikan dapat dinikmati secara gratis, bahkan peserta didik diberi uang saku. Sedangkan untuk swasta, bertumpu pada kemampuan lembaga dan orang tua masing-masing sedangkan pemerintah memberikan subsidi saja. Di **Amerika Serikat** juga demikian tetapi proporsi terbesar pendanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah lokal (*State* hingga *County*). Peran masyarakat juga signifikan terutama

untuk pendidikan swasta. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendanai pendidikan, maka di beberapa negara seperti **Amerika Serikat, India, dan Belanda**, memberlakukan sistem pajak pendidikan (*education tax*) pada setiap transaksi pembelian barang dan jasa sehari-hari.

Berbagai informasi yang disampaikan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagaimana suatu negara memajukan pendidikannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi kita dalam mengembangkan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	v
INTISARI	xi
DAFTAR ISI	xv
I Sistem Pendidikan di Amerika Serikat	1
<i>oleh: Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.</i>	
II Sistem Pendidikan di Arab Saudi	35
<i>oleh: Dr. Basuni Imamuddin, S.S., M.A.</i>	
III Sistem Pendidikan di Australia	95
<i>oleh: Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Sc.</i>	
IV Sistem Pendidikan di Belanda	153
<i>oleh: Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, M.U.P.M.Sc., Ph.D.</i>	
V Sistem Pendidikan di Filipina	187
<i>oleh: Dr. Ir. Paristyanti Nurwardani</i>	
VI Sistem Pendidikan di India	243
<i>oleh: Son Kuswadi, Dr. Eng.</i>	
VII Sistem Pendidikan di Inggris	291
<i>oleh: Prof. Dr. Ir. T. A. Fauzi Soelaiman, M.S.M.E.</i>	
VIII Sistem Pendidikan di Jepang	367
<i>oleh: Ir. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D.</i>	

IX	Sistem Pendidikan di Jerman	425
	<i>oleh: Prof. Dr. rer.nat. Agus Rubiyanto</i>	
X	Sistem Pendidikan di Malaysia	499
	<i>oleh: Prof. Drs. Rusdi, M.A., Ph.D.</i>	
XI	Sistem Pendidikan di Mesir	547
	<i>oleh: Dr. Drs. Fahmy Lukman, M.Hum.</i>	
XII	Sistem Pendidikan di Papua New Guinea	591
	<i>oleh: Didik Wisnu Widjajanto, Ph.D.</i>	
XIII	Sistem Pendidikan di Perancis	617
	<i>oleh: Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.</i>	
XIV	Sistem Pendidikan di Singapura	701
	<i>oleh: Prof. Dr. Ismunandar</i>	
XV	Sistem Pendidikan di Thailand	789
	<i>oleh: Dr. Ir. Yunardi, M.Sc.</i>	
XVI	Sistem Pendidikan di Tiongkok	845
	<i>oleh: Chaerun Anwar, S.Pd., M.Pd.</i>	

I

Sistem Pendidikan di Amerika Serikat



Sumber foto gedung US Capitol: Wikipedia

Oleh:

Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.
Atase Pendidikan di Washington DC

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pendidikan di Amerika Serikat

Amerika dengan penduduk sebanyak 310 juta merupakan salah satu negara terbesar di Dunia; Negara Federal dengan 50 negara bagian dan 1 federal distrik tersebar di daratan yang sangat luas. Dengan kapasitas ekonomi dan pendapat perkapita yang tinggi, Amerika mampu memberikan pendidikan yang hamper merata ke seluruh penduduknya. Pada tahun 2013 terdapat sekitar 50,1 juta anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA, serta 21,8 juta mahasiswa. Jumlah guru *full time* di Amerika adalah 3,3 juta guru. Dana untuk pendidikan sampai dengan tingkat SMA mencapai 591 Milliar USD.

Sistem Pendidikan pada jenjang *Primary* dan *Secondary* di AS terdiri dari 12 kelas selama 12 tahun, melalui jenjang *Primary* (setara SD) dan *Secondary* (setara SMP dan SMA) sebelum masuk ke Pendidikan Tinggi. Pembagian kelas di jenjang *Primary* dan *Secondary* pada beberapa *State* tidak sama. Sebagian *State* mempunyai sistem 6+3+3, sebagian yang lain mempunyai sistem 5+3 +4. Namun, secara umum sebagian besar *State* menganut pembagian jenjang *Primary* 5 tahun (K5), *Middle School* (SMP) 3 tahun, dan *High School* (SMA) 4 tahun.

Meskipun tidak ada kurikulum nasional di AS, *State* bersama sekolah dan asosiasi sekolah maupun asosiasi keahlian merekomendasikan standar tertentu untuk memandu kurikulum yang digunakan di sekolah. Oleh karena itu, setiap *State* memiliki standar dan kurikulum yang berbeda-beda. Pada umumnya, siswa diberikan pelajaran Aritmatika

dan Matematika, bahasa Inggris, terutama *Basic Grammar, Spelling*, dan *Vocabulary*, Ilmu Sosial, Sains, Pendidikan Jasmani dan *Fine Art and Reading*. Kemampuan berbahasa Inggris mendapat penekanan yang tinggi di AS, walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengatakan bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa nasional. Mengeja dan membaca mendapat perhatian sejak SD. Olah raga merupakan pelajaran pilihan wajib dan standar sekolah. Baik SD, SMP, dan SMA harus mempunyai fasilitas olah raga yang baik. Dipercaya bahwa olahraga memupuk sportifitas dan solidaritas yang sehat.

Sekolah wajib secara teratur mengevaluasi siswa dan melaporkan hasil evaluasi secara periodik. Secara umum, para siswa dan prestasi belajarnya secara teratur dinilai oleh sekolah dengan menggunakan berbagai tes. Secara nasional, kemampuan belajar siswa K12 dievaluasi oleh institusi yang disebut *National Assessment of Educational Progress* (NAEP) yang merupakan program dari Departemen Pendidikan. Program ini merupakan satu-satunya program yang secara menerus mengevaluasi kemampuan siswa secara nasional untuk berbagai bidang studi. Hasil dari evaluasi dimasukkan dalam laporan yang disebut sebagai *Nation's Report Card* yang memungkinkan perbandingan dari kualitas pendidikan di berbagai *State*. Laporan ini juga digunakan untuk perbandingan kualitas sekolah yang dievaluasi terhadap kualitas nasional, atau perbandingan antar *State*. Penilaian dilakukan secara periodik dalam mata pelajaran Matematika, Membaca, Ilmu Pengetahuan, Menulis, Seni, Kewarganegaraan, Ekonomi, Geografi, dan Sejarah AS.

Evaluasi belajar nasional maupun lokal tidak digunakan untuk menentukan naik atau tidaknya anak dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, Evaluasi digunakan untuk melihat kualitas pembelajaran di sekolah dalam tingkat lokal dan nasional. Sedangkan untuk penilaian untuk masuk universitas, semua anak harus mengikuti tes yang bersifat nasional, yaitu SAT atau *Scholastic Assessment Test*. SAT dikembangkan oleh lembaga swasta yang bernama *College Board*, yang digunakan untuk menilai kesiapan siswa untuk masuk universitas. Pada mulanya tes ini, dengan singkatan yang sama, bernama *Scholastic Aptitude Test* dan sudah digunakan sejak tahun 1926. SAT digunakan oleh semua universitas di

AS untuk seleksi penerimaan. Pada perkembangannya, SAT digunakan bersama dengan tulisan esai untuk seleksi masuk ke universitas.

Di AS tidak ada peraturan secara nasional mengenai sertifikasi guru, walaupun secara nasional guru harus bersertifikat. Sertifikasi guru berbeda di tiap *State*. Peraturan dan prosedur sertifikasi ditentukan oleh *State Department of Education* (Kantor Wilayah Pendidikan). Guru-guru untuk K12 minimum adalah Sarjana Pendidikan pada subjek yang bisa mendapatkan sertifikat, misalnya Bahasa Inggris, Seni, Ilmu Pengetahuan, Matematika, dan sebagainya.

Penjaminan mutu sekolah dari *Kindergarten* hingga Perguruan Tinggi dilakukan oleh lembaga independen yang diakui pemerintah, Pemerintah *Federal* mempunyai aturan untuk pelaksanaan akreditasi. Namun, undang-undang dan peraturan mengenai akreditasi, sebagai salah satu cara untuk penjaminan mutu, ada di hampir semua *States*. Penjaminan mutu juga dilaksanakan dengan tes-tes yang secara teratur dilakukan oleh pemerintah *Federal* dan *State* untuk mengetahui kualitas seolah *Primary* dan *Secondary*.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	7
1. Pengantar	9
2. Tingkatan Pendidikan	13
3. Kurikulum	17
4. Evaluasi Belajar	21
5. Kualitas Guru	25
6. Pendanaan Pendidikan	29
7. Sistem Penjaminan Mutu	31
DAFTAR REFERENSI	33

1

Pengantar

Amerika Serikat (*United States of America*) adalah negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian (*States*) dan 1 distrik federal (Washington, DC). Peta Amerika Serikat beserta negara bagiannya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Amerika Serikat (AS) merupakan negara daratan yang luas 9,83 juta kilometer persegi, dengan penduduk sekitar 310 juta. Amerika merupakan ”negara imigran” yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang bermigrasi ke Amerika. Pada tahun 2013, negara ini mempunyai *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 16,7 triliun USD dengan pendapatan perkapita sekitar 50 ribu USD.



Gambar 1.1 Negara-negara bagian di Amerika Serikat (1)

AS menerapkan wajib belajar sampai usia 18 tahun secara gratis. Pada jenjang pendidikan tinggi juga disediakan pendidikan yang murah dengan beragam jurusan yang dilayani oleh *Community Colleges*.

Sistem pendidikan di AS terbagi dalam 4 jenjang :

1. *Pre-elementary (pre-school)*
2. *Elementary (kindergarten-Grade 5)*
3. *Secondary (Grade 6- Grade 12)*
4. *Post Secondary (college-university)*

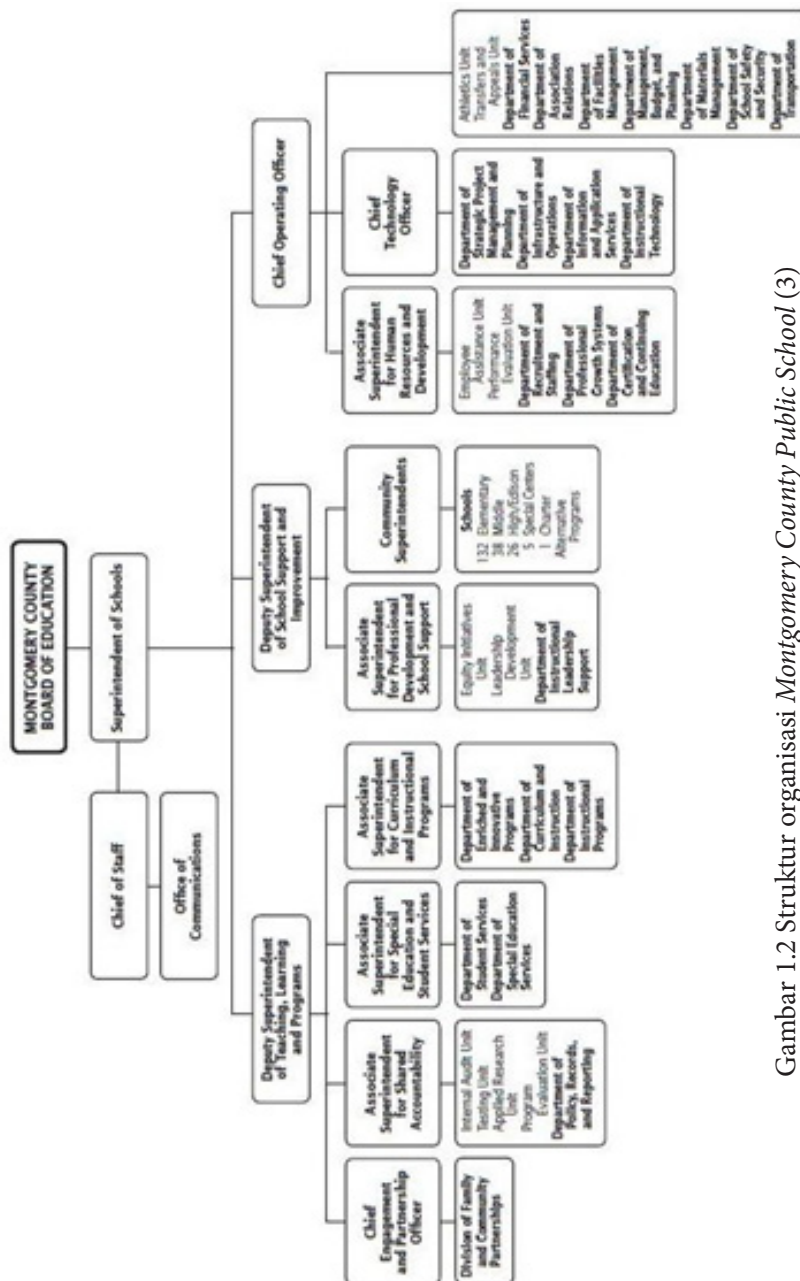
Jenjang pendidikan *Pre-elementary* sampai dengan *Secondary* disebut sebagai K12. Di AS tidak mempunyai sistem pendidikan nasional, namun diserahkan kepada setiap *State* termasuk standar pendidikan dan ujian untuk K12. Kebijakan untuk kurikulum, guru, pendanaan, tenaga kerja, dan kebijakan lainnya bahkan dapat dibuat oleh *County* melalui *School Board* yang anggotanya dipilih secara lokal. Sedangkan, *College* dan *Universitas* mempunyai standar pendidikan sendiri yang dibuat oleh asosiasi pendidikan dan badan akreditasi independen yang diakui pemerintah.

AS mempunyai sekitar 130 ribu sekolah yang terdiri dari 98 ribu sekolah pemerintah (negeri) dan 30 ribu sekolah swasta dengan jumlah siswa sebanyak 50,1 juta anak yang diajar oleh 3,3 juta guru *full time equivalent* (FTE), sehingga rasio guru berbanding siswa sebesar 1:15.

Pada jenjang pendidikan tinggi, tercatat sekitar 21,8 juta mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi pada tahun 2013 dengan jumlah mahasiswa perempuan sebanyak 13,4 juta dan 8,3 juta laki laki. Setiap tahun Perguruan Tinggi di AS diperkirakan meluluskan 943 ribu *Associate's Degree*, 1,8 juta *Bachelor's Degree*, 778 ribu *Master's Degree*, dan sekitar 177 ribu *Doctor's degree*.

Organisasi pendidikan di tiap *State* dan *County* berbeda-beda. Satu *State* biasanya mempunyai *State Department of Education* yang membawahi *County Public School* di tiap *County*. Contoh struktur organisasi pendidikan di tingkat *County* dapat dilihat dalam Gambar 1.2.

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS FY 2013 ORGANIZATION



Gambar 1.2 Struktur organisasi Montgomery County Public School (3)

2

Tingkatan Pendidikan

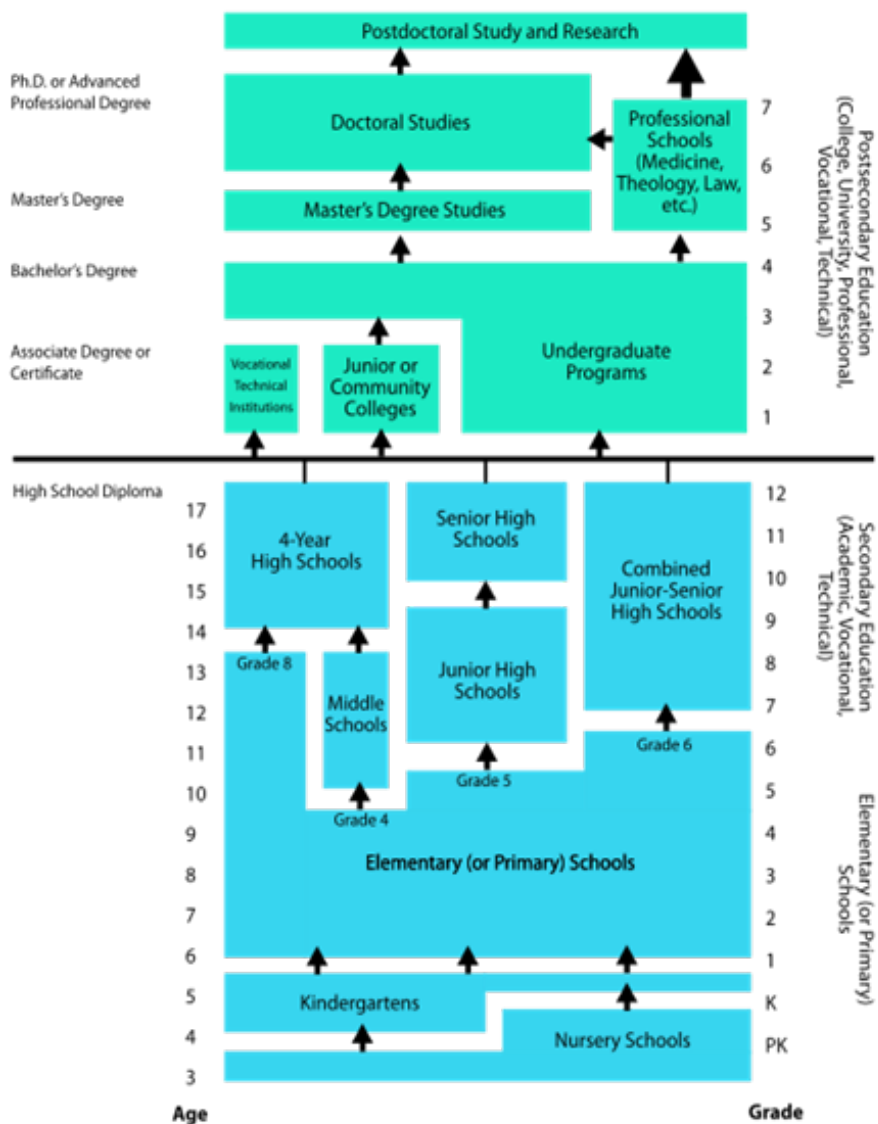
Sistem Pendidikan di AS terdiri dari 12 kelas selama 12 tahun, melalui jenjang *Primary* (setara SD) dan *Secondary* (setara SMP dan SMA) sebelum masuk ke Pendidikan Tinggi. Namun, anak-anak dapat mulai sekolah sejak usia 3 tahun dijenjang *pre-school* sampai usia 5 tahun.

Pembagian kelas di jenjang *Primary* dan *Secondary* pada beberapa *State* tidak sama. Sebagian kecil *State* mempunyai sistem 6+3+3 (6 tahun *Primary School*, 3 tahun *Middle School*, dan 3 tahun *High School*), namun sebagian besar *State* mempunyai sistem 5+3+4 (5 tahun *Primary School*, 3 tahun *Middle School*, dan 4 tahun *High School*). Sebagai tambahan informasi, di AS juga dikenal istilah *Elementary School* yang dimulai dari *Kindergarten* sampai *Grade 5*. Tahun ajaran sekolah biasanya dimulai pada bulan September (*Fall*).

Umumnya siswa dikelompokkan dalam kelas berdasarkan usia. Apabila sampai 31 Juli tahun berjalan siswa telah berusia 5 tahun, maka siswa tersebut dapat masuk sekolah mulai bulan September di tahun yang sama. Namun, apabila siswa tersebut baru berusia 5 tahun setelah 31 Juli tahun berjalan, maka siswa tersebut dapat mulai sekolah pada bulan September tahun berikutnya. Pembagian jenjang pendidikan menurut kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1

Tabel 2.1 Kelompok Usia pada Masing-masing Jenjang Pendidikan di AS

Jenjang Pendidikan	Usia (Tahun)
<i>Preschool</i>	
<i>Pre-kindergarten 3</i>	3-4
<i>Pre-kindergarten 4</i>	4-5
<i>Elementary School</i>	
<i>Kindergarten</i>	5-6
<i>1st Grade</i>	6-7
<i>2nd Grade</i>	7-8
<i>3rd Grade</i>	8-9
<i>4th Grade</i>	9-10
<i>5th Grade</i>	10-11
<i>Middle School</i>	
<i>6th Grade</i>	11-12
<i>7th Grade</i>	12-13
<i>8th Grade</i>	13-14
<i>High School</i>	
<i>9th Grade</i>	14-15
<i>10th Grade</i>	16-17
<i>11th Grade</i>	17-18
<i>12th Grade</i>	18-19
<i>Post-Secondary Education</i>	
<i>Tertiary Education (College or University) (Freshman, Sophomore, Junior dan Senior Years)</i>	Bervariasi, tapi biasanya 18-22
<i>Vocational Education</i>	Bervariasi
<i>Graduate Education</i>	Bervariasi
<i>Adult Education</i>	Bervariasi



Gambar 2.1 Pembagian lengkap jenjang pendidikan di AS (4)

3

Kurikulum

3.1. Penggunaan Standar

Di AS tidak ada kurikulum yang diberlakukan secara nasional. Kurikulum yang digunakan di sekolah ditetapkan oleh masing-masing *State* bersama sekolah, asosiasi sekolah dan asosiasi keahlian. Oleh karena itu, setiap *State* memiliki standar dan kurikulum yang berbeda-beda. Bagi sekolah yang ingin mendapatkan dana Federal melalui program Undang-Undang *No Child Left Behind*, pemerintah AS mengharuskan sekolah tersebut memberlakukan standar kualifikasi tertentu.

Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memastikan bahwa semua anak diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya, mengembangkan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk memenuhi tantangan belajar di abad 21. Kurikulum ini memberikan perhatian yang tinggi pada anak sebagai pembelajar dan menggunakan berbagai metodologi pengajaran. Selain itu, kurikulum ini bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan utama dalam berkomunikasi (melalui tulisan ataupun lisan), pemecahan masalah dan berpikir analitis. Secara khusus, penekanan dilakukan pada keterampilan membaca dan berhitung.

Pada umumnya, siswa diberikan pelajaran Aritmatika dan Matematika, bahasa Inggris, terutama *basic grammar*, *spelling*, dan *vocabulary*, Ilmu Sosial, Sains, Pendidikan Jasmani, dan *Fine Art and Reading*. Kemampuan berbahasa Inggris mendapat penekanan yang

tinggi di AS, walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa nasional. Mengeja dan membaca mendapat perhatian sejak SD. Terdapat juga kompetisi mengeja yang sangat terkenal di AS yang disebut *Spelling Bee*.

Kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh siswa sejak dini adalah membaca, menulis dan berhitung. Ketiga kemampuan ini dinilai sangat berpengaruh untuk memahami Ilmu Sosial, Sains dan mata pelajaran lainnya. Ilmu Sosial secara umum mengajarkan pengetahuan mengenai cara membuat dokumentasi, sejarah Amerika, dan geografi. Sedangkan dalam Sains, ilmu pengetahuan yang diajarkan mencakup pengetahuan mengenai Fisika, Kimia, Biologi, Ekologi, dan Fisiologi. Kedalaman dan durasi dari mata pelajaran tersebut diberikan berbeda di tiap *State*.

Standar kurikulum dasar dikeluarkan oleh *State* yang disebut *Common Core State Standard* (CCSS). Standar ini mengatur mata pelajaran yang diberikan serta capaian kemampuan pelajar di tiap jenjang. Informasi tentang CCSS tersedia di situs web tertentu, misalnya <http://www.corestandards.org/> sehingga memudahkan orang tua dan guru untuk membantu siswa dalam belajar.

Salah satu *State* yang mengeluarkan CCSS adalah Maryland. CCSS harus dipakai oleh semua sekolah di Maryland mulai tahun ajaran 2013-2014. Kurikulum dasar ini menetapkan kualitas pendidikan di bidang *English/Language Arts* (ELA) dan Matematika. Standar ini menentukan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa di akhir tiap kelas agar lulusan *high school* siap untuk masuk ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja.

Pada umumnya di tingkat *high school*, siswa mengambil berbagai macam kelas tanpa penekanan khusus pada mata pelajaran tertentu. Siswa diminta untuk mengambil sejumlah kredit minimal dari mata pelajaran wajib. Pada saat di *middle school* dan *high school*, siswa diberi sedikit kebebasan supaya lebih mandiri, misalnya dengan pindah ke kelas yang berbeda untuk mata pelajaran yang berbeda (*moving class*) dan diperbolehkan untuk memilih beberapa mata pelajaran pilihan asalkan memenuhi jumlah jam belajar per minggu yang disyaratkan. Biasanya, mulai di kelas 9, nilai menjadi bagian dari transkrip resmi siswa.

Penggunaan bahasa Inggris dalam mengajar masih merupakan masalah. Bahasa Inggris dituturkan oleh lebih dari 95% penduduk AS. Namun demikian, ada sekitar 9,7 juta anak usia 5 sampai 17 tahun yang berbicara dalam bahasa lain, seperti Spanyol, Cina, Korea, Vietnam, dan sebagainya di rumah-rumah mereka. Sekitar 1,3 juta anak diantaranya, tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik atau tidak bisa sama sekali.

Oleh karena itu, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang sangat penting dari *Grade* 1 sampai 12. Mata pelajaran ini tidak dalam bentuk tata bahasa Inggris, tetapi dalam bentuk mengarang dan membuat laporan. Sejak dini (bahkan dari *kindergarten*) anak-anak dibiasakan membuat jurnal atau laporan dari apa yang mereka lihat dan kerjakan. Mata pelajaran bahasa kedua (bahasa selain Bahasa Inggris) mulai diberikan di *middle school*.

3.2. Mata Pelajaran

Pelajaran utama yang merupakan pelajaran wajib di hampir semua *high school* di AS adalah:

1. Sains (biasanya minimal tiga tahun, mencakup biologi, kimia, dan fisika)
2. Matematika (biasanya minimal empat tahun, mencakup aljabar, geometri, pra-kalkulus, statistik, dan kalkulus)
3. Bahasa Inggris (biasanya minimal empat tahun, mencakup sastra, humaniora, komposisi, bahasa lisan, dan lain-lain)
4. Ilmu Sosial (biasanya minimal tiga tahun, mencakup berbagai sejarah, pemerintahan atau ekonomi)
5. Pendidikan Jasmani (minimal satu tahun)

Banyak *State* memberikan mata pelajaran kesehatan sebagai pelajaran wajib. Pada mata pelajaran ini, siswa belajar tentang anatomi, gizi, pertolongan pertama pada kecelakaan, pendidikan seks, dan kesadaran akan bahaya narkoba (NAPZA). Bahasa asing dan beberapa bentuk pendidikan seni juga merupakan bagian wajib dari kurikulum di beberapa sekolah.

Beberapa mata pelajaran pilihan antara lain adalah:

1. Komputer (*word processor*, pemrograman, desain grafis)
2. Atletik (marathon, sepak bola, *baseball*, bola basket, atletik, renang, tenis, senam, polo air, sepak bola, *softball*, gulat, *cheerleader*, bola voli, *lacrosse*, hoki es, hoki lapangan, tinju, ski atau *snowboarding*, golf, bersepeda gunung, *marching band*)
3. Karir dan Pendidikan Teknik (pertanian/*agriscience*, bisnis/pemasaran, keluarga dan ilmu konsumen, pekerjaan kesehatan dan pendidikan teknologi termasuk penerbitan (koran jurnalisme/mahasiswa, buku alumni, majalah sastra))
4. Seni Pertunjukan/Seni Visual (paduan suara, *band*, orkestra, drama, keramik, fotografi, dan tari)
5. Bahasa asing (Spanyol dan Perancis yang umum dipelajari; Cina, Latin, Yunani Kuno, Jerman, Itali, Arab, dan Jepang yang kurang umum dipelajari)

Olah raga merupakan mata pelajaran pilihan yang wajib di sekolah sehingga *elementary*, *middle*, dan *high school* harus mempunyai fasilitas olah raga yang baik. Olahraga dipercaya dapat memupuk sportifitas dan solidaritas yang tinggi. Kompetisi olah raga dari berbagai macam cabang olah raga dilakukan sejak *middle school* dan lebih beragam di *high school*. Para juara kompetisi dapat memperoleh beasiswa untuk masuk perguruan tinggi.

Olah raga dan kesenian merupakan bagian dari kurikulum yang penting bagi siswa di *high school*. Semua anak diwajibkan memilih salah satu cabang olah raga dan cabang musik. Sekolah-sekolah mengidentifikasi diri dengan olah raga dan grup musik. Siswa yang terpilih mewakili sekolah untuk cabang olah raga tertentu dan grup musik dapat memperoleh penghargaan yang istimewa.

Kurikulum juga menekankan perlunya perhatian yang lebih besar kepada siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Di AS anak dengan kebutuhan khusus dapat belajar di sekolah yang sama dengan anak yang normal.

4

Evaluasi Belajar

4.1. Evaluasi Belajar Nasional

Sekolah wajib secara teratur mengevaluasi siswa dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada para siswa dan orang tua mereka. Secara umum, para siswa dan prestasi belajarnya secara teratur dinilai oleh sekolah dengan menggunakan berbagai tes. Tes-tes ini diselenggarakan oleh sekolah secara desentralisasi. Secara nasional, kemampuan belajar siswa K12 dievaluasi oleh institusi yang disebut *National Assessment of Educational Progress* (NAEP) yang merupakan program dari Departemen Pendidikan. Program ini merupakan satu-satunya program yang secara terus menerus mengevaluasi kemampuan siswa secara nasional untuk berbagai bidang studi.

Hasil dari evaluasi dimasukkan dalam laporan yang disebut sebagai *Nation's Report Card* yang memungkinkan perbandingan dari kualitas pendidikan di berbagai *State*. Laporan ini juga digunakan untuk membandingkan kualitas sekolah yang dievaluasi terhadap kualitas nasional, atau antar *State*. Penilaian dilakukan secara periodik dalam mata pelajaran matematika, membaca, ilmu pengetahuan, menulis, seni, kewarganegaraan, ekonomi, geografi, dan sejarah AS .

NAEP bekerja sama dengan ETS (*Educational Testing Service*), sebuah lembaga privat yang melakukan evaluasi secara nasional. Hasil tes dimasukkan ke dalam statistik pendidikan di Amerika, tapi tidak digunakan untuk terminal penilaian.

4.2. Evaluasi Belajar Lokal

Secara lokal, *State* juga melakukan evaluasi terhadap siswa di berbagai sekolah di *district* atau *County* di wilayah *State*. Evaluasi tidak merupakan kewajiban, tetapi sangat disarankan dan didorong dengan adanya *No Child Left Behind Act*. Berdasarkan undang-undang ini, maka sekolah yang baik akan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Federal.

Dalam melakukan evaluasi pembelajaran *State* juga dapat menggunakan lembaga swasta seperti ETS. Independensi lembaga swasta seperti ETS ini sangat dijamin. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan internal dan menentukan sekolah yang akan mendapat penghargaan atau masih harus terus diperbaiki oleh *State* dan *County*.

4.3. Evaluasi masuk Perguruan Tinggi

Evaluasi belajar nasional maupun lokal tidak digunakan untuk menentukan naik atau tidaknya anak dari *elementary* ke *middle school* atau dari *middle school* ke *high school*, Evaluasi hanya digunakan untuk melihat kualitas pembelajaran di sekolah dalam tingkat lokal dan nasional.

Di lain pihak, untuk penilaian masuk universitas, semua siswa harus mengikuti tes yang bersifat nasional, yaitu *Scholastic Assessment Test* (SAT). SAT dikembangkan oleh lembaga swasta yang bernama *College Board*, yang digunakan untuk menilai kesiapan siswa untuk masuk universitas. Pada mulanya, tes ini bernama *Scholastic Aptitude Test* dan sudah digunakan sejak tahun 1926. SAT digunakan oleh semua universitas di AS untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada perkembangannya, SAT digunakan bersama dengan tulisan esai untuk seleksi masuk ke universitas.

Secara nasional, nilai SAT rata-rata adalah 1500 untuk nilai total tiga mata uji: *Critical Reading*, *Mathematics*, dan *Writing*. Universitas yang baik akan menerima siswa dengan nilai SAT di atas 1700. Princeton dan MIT misalnya, akan menerima siswa yang SAT di atas 1800. Penerimaan

di universitas tidak hanya SAT, tetapi juga dengan esai dan di beberapa universitas dengan wawancara.

Selain SAT, ada juga yang menggunakan *American College Testing* (ACT) atau bahkan keduanya. ACT sudah digunakan sejak tahun 1959 dan menilai mata uji yang lebih banyak dari SAT. Mata pelajaran yang diujikan, antara lain bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. ACT dan SAT adalah tes untuk menilai kemampuan siswa, namun keduanya berbeda dalam konstruksi soalnya. ACT menilai kemampuan yang sesuai dengan kurikulum *high school*, sedangkan SAT menilai berdasarkan pengetahuan umum dan penalaran kuantitatif.

5

Kualitas Guru

Di AS tidak ada peraturan sertifikasi guru secara nasional, namun demikian guru harus bersertifikat. Sertifikasi guru berbeda di tiap *State*. Peraturan dan prosedur sertifikasi ditentukan oleh *State Department of Education*.

Guru-guru untuk K12 minimal adalah guru yang memperoleh gelar sarjana pendidikan pada subjek yang bisa mendapatkan sertifikat, misalnya bahasa inggris, seni, ilmu pengetahuan, matematika, dan sebagainya.

Beberapa *State* mengutamakan bahwa guru harus mempunyai kemampuan mengajar dan sudah lulus tes standar untuk keahlian mengajar. Para guru bisa mendapatkan sertifikat mengajar dari universitas yang menyediakan jurusan pendidikan dan dari beberapa lembaga swasta yang diakui, karena tidak ada lembaga pemerintah yang memberikan sertifikat mengajar. Guru-guru harus memiliki *license* atau ijin untuk mengajar berupa *Certificate of Eligibility* (CE) yang dapat diperoleh dengan mengambil sejumlah kredit tertentu di perguruan tinggi ataupun di lembaga yang memberikan sertifikat. Salah satu contoh adalah di New Jersey (NJ) yang merupakan *State* pertama memberikan cara alternatif untuk menjadi guru, bisa dilihat pada <http://www.ocean.edu/campus/osr/alternate.htm>.

Sebagaimana lulusan *high school*, guru bisa juga mengambil tes yang dilaksanakan oleh *Educational Testing Service* (ETS) khusus untuk

sertifikasi mengajar. Di banyak *State*, sebelum mendapat sertifikat, seorang guru harus mengetahui cara mengajar yang baik dan lulus ujian paedagogi, pengetahuan umum, dan pengetahuan mengenai materi subyek yang diajarkan. Tes ETS dilakukan setiap 4 – 6 tahun.

Pada tingkat nasional dikenal adanya *National Board for Professional Teaching Standards* (NBPTS). Lembaga independen ini memberikan sertifikasi bagi guru yang ingin meningkatkan standar kualifikasinya. NBPTS bertujuan untuk menjaga kualitas guru dengan memberikan standar terkait apa yang harus diketahui dan harus dilakukan oleh seorang guru. NBPTS juga memberi sertifikat bagi guru yang memenuhi standar tersebut dengan mengembangkan sistem sertifikasi sukarela.

Sistem sertifikasi sukarela yang dilakukan oleh swasta berjalan dengan baik karena guru membutuhkan sertifikat untuk meningkatkan karir jabatan dan gaji yang diterimanya. Secara umum, dapat dikatakan kualitas guru ditentukan oleh sertifikat yang didupakannya.

Sertifikat di beberapa *State* bisa berbeda, namun pada umumnya terdapat 3 macam sertifikat, yaitu:

1. *Initial Certificate*, diberikan setelah 3 tahun mengajar pelajaran umum
2. *Transformation Certificate*, diberikan setelah 5 tahun
3. *Professional Certificate*

Biasanya, setelah 5 tahun guru akan kembali belajar di universitas untuk mendapatkan sertifikat yang lebih tinggi lagi (*Professional Certificate*). Sertifikat ini dapat diberikan oleh universitas yang diakui oleh pemerintah. Contoh tahapan sertifikasi guru yang berlaku di Florida dapat dilihat pada Gambar 5.1.

ROUTES TO A FLORIDA PROFESSIONAL CERTIFICATE

Teacher Preparation Programs		Certificate Reciprocity	Other Alternative Routes
Initial Teacher Preparation Program <ul style="list-style-type: none"> Florida state-approved initial teacher preparation program at the undergraduate or graduate level AND passing scores on the General Knowledge Test, the Professional Education Test, and the Subject Area Examination http://www.flboe.org/profile/teachprep/teachprep.asp 		Out-of-State Certificate <ul style="list-style-type: none"> A valid standard certificate issued by another U.S. state or territory http://www.flboe.org/ekcert/ekcert.asp 	College Teaching Experience <ul style="list-style-type: none"> Two (2) semesters of full-time college teaching experience AND A passing score on the Subject Area Examination.
District Alternative Certification Program <ul style="list-style-type: none"> Florida state-approved District Alternative Certification Program provided by Florida public school districts AND passing scores on the General Knowledge Test, the Professional Education Test, and the Subject Area Examination Participants must hold a valid Florida Temporary Certificate and be employed as a classroom teacher in a Florida public school district. http://www.alicertflorida.org/ 		National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) <ul style="list-style-type: none"> A valid certificate issued by the National Board for Professional Teaching Standards http://www.nbtpt.org/ 	Professional Training Option <ul style="list-style-type: none"> Professional Training Option at the undergraduate or graduate level AND all of the following: <ul style="list-style-type: none"> An approved Professional Education Competence (PEC) demonstration program at a Florida state-supported, public, or state approved private school while employed as a teacher under a valid Temporary Certificate One year of full-time teaching experience in an elementary or secondary public or state-approved private school OR six semester hours earned in a college student teaching or supervised internship Passing scores on the General Knowledge Test, the Professional Education Test, and the Subject Area Examination
Educator Preparation Institute <ul style="list-style-type: none"> Florida state-approved Educator Preparation Institute (EPI) program at the post-baccalaureate level AND passing scores on the General Knowledge Test, the Professional Education Test, and the Subject Area Examination www.teachinstitute.org 		American Board for Certification of Teacher Excellence (ABCTE) <ul style="list-style-type: none"> A valid certificate issued by the American Board for Certification of Teacher Excellence AND An approved Professional Education Competence (PEC) demonstration program at a Florida state-supported, public, or state approved private school while employed as a teacher under a valid Temporary Certificate http://www.abcte.org/teachfl/florida 	Professional Preparation- College Coursework Option <ul style="list-style-type: none"> A minimum of 15 semester hours of education courses as specified in State Board of Education Rule 6A.440 at an accredited college or university An approved Professional Education Competence (PEC) demonstration program at a Florida state-supported, public, or state approved private school while employed as a teacher under a valid Temporary Certificate One year of full-time teaching experience in an elementary or secondary public or state-approved private school OR six semester hours earned in a college student teaching or supervised internship Passing scores on the General Knowledge Test, the Professional Education Test, and the Subject Area Examination
Out-of-State Teacher Education Program <ul style="list-style-type: none"> Teacher preparation program from an out-of-state accredited or approved institution Passing scores on the General Knowledge Test, the Professional Education Test, and the Subject Area Examination 			

Gambar 5.1 Tahapan sertifikasi guru yang berlaku di Florida (5)

Untuk menjaga kualitas guru dalam mengajar, secara berkala diadakan penyegaran untuk para guru yang diselenggarakan oleh *County*. Sementara itu, sekali dalam satu minggu para guru diminta mempresentasikan cara mengajar dan dievaluasi bersama. Pada saat itu evaluasi akan diberikan oleh guru senior, kepala sekolah atau penilik sekolah yang hadir, dalam acara mingguan tersebut.

Tidak ada guru yang berstatus pegawai negeri, semua berstatus guru kontrak. Namun ada yang bersifat *tenure* atau dikontrak dengan jangka panjang. Perpanjangan kontrak bergantung pada kualitas kinerja. Karir guru dimulai dari guru junior, kemudian meningkat menjadi guru senior, kemudian bisa menjadi kepala sekolah atau penilik sekolah.

6

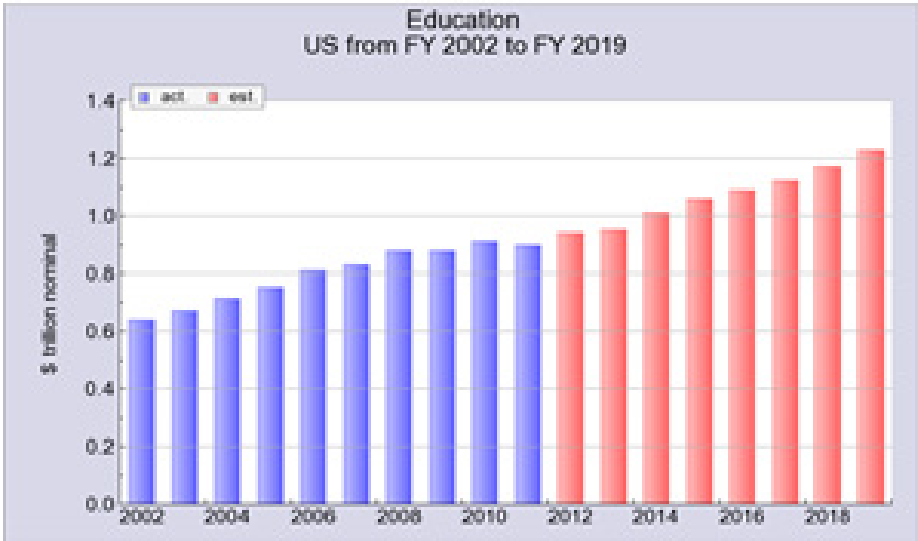
Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan di AS berasal dari 3 sumber: Pemerintah Pusat (*Federal*), Pemerintah Negara Bagian (*State*), dan Pemerintah Lokal (*Local/County/City*) yang bersifat *non profit*. Selain itu, pendanaan pendidikan juga disediakan oleh swasta yang bersifat *for profit*. Pendanaan oleh pemerintah *Federal* hanya diberikan pada sekolah yang mengimplementasikan undang-undang *No Child Left Behind*. Sebagian besar dana pendidikan bersumber dari *State* dan *County*. Proporsi pendanaan sekolah di AS dari berbagai sumber dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Proporsi pendanaan sekolah di AS

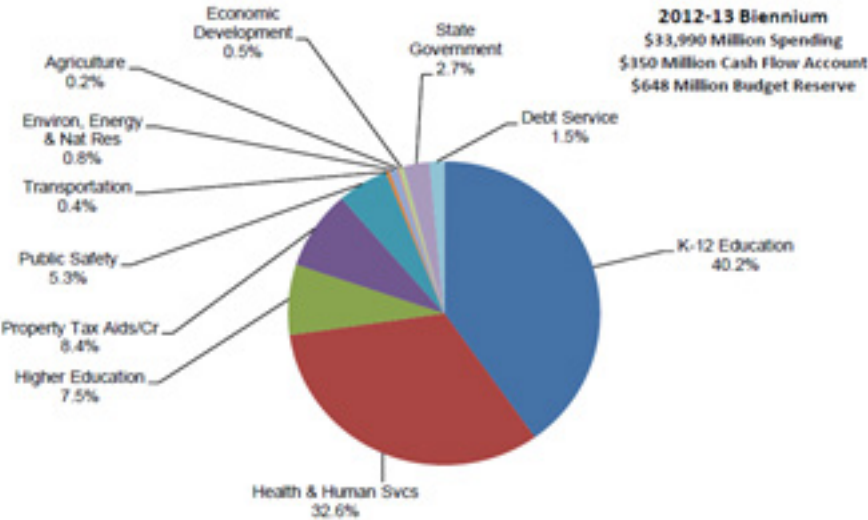
Sumber	Persen (%)
<i>County</i>	70 – 75
<i>State</i>	10 – 15
Federal	1
Lain-lain	1
Proyek	7 – 15

Total pendanaan pendidikan di AS yang disediakan oleh pemerintah rata-rata meningkat 3,6% per tahun yang pada tahun 2014 mencapai 1,01 triliun USD dan diperkirakan pada tahun 2019 mencapai 1,22 triliun USD (lihat Gambar 6.1.)



Gambar 6.1. Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah AS (13)

Proporsi besarnya pendanaan pendidikan oleh *State/County* dibanding sektor yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh, *State Minnesota* mengalokasikan pendanaan pendidikan untuk K-12 sebesar 40,2%, tertinggi dibanding sektor yang lain (lihat Gambar 6.2.)



Gambar 6.2 Pendanaan berbagai sektor di *state Minnesota* tahun 2012-2013 (14)

7

Sistem Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui tes tingkat *Federal* dan *State* yang dilaksanakan secara teratur oleh pemerintah, serta melalui sistem akreditasi. Khusus untuk akreditasi, mengingat sistem pendidikan di AS terdesentralisasi, tidak ada aturan mengenai akreditasi untuk tingkat *Primary* dan *Secondary School* pada tingkat *federal*. Semua sekolah pemerintah harus diakreditasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga akreditasi independen yang diakui oleh pemerintah *State*. Pemerintah hanya mengeluarkan panduan (*guideline*) untuk *State School Accreditation Standard State-level Policies Regarding Accreditation in Public Schools*. Beberapa lembaga akreditasi yang diakui *State* diantaranya adalah:

- *Middle States Association Commission on Elementary Schools (MES-CES)*
- *Middle States Association Commission on Secondary Schools (MES-CSS)*
- *Middle States Association Commission on Institution-Wide Accreditation (MES-CIWA)*
- *New England Association Commission on American and International Schools Abroad (NEASC-CAISA)*
- *New England Association Commission on Independent Schools (NEASC-CIS)*
- *New England Association Commission on Public Elementary and Middle Schools (NEASC-CPEMS)*

- *New England Association Commission on Public Secondary Schools (NEASC-CPSS)*
- *North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCACASI)*
- *Northwest Association of Accredited Schools (NAAS)*
- *Southern Association Commission on Accreditation and School Improvement (SACSCASI)*
- *Western Association Accrediting Commission for Schools (ACSWASC)*

DAFTAR REFERENSI

1. The Fifty States. [online]. Available from: <http://www.factmonster.com/states.html>
2. NATIONAL CENTRE FOR EDUCATIONAL STATISTICS. Fast Facts. [online]. Available from: <http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=372>
3. MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS. MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS FY 2013 ORGANIZATION. [online]. Available from: <http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/>
4. WIKIPEDIA. Education in the United States. [online]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Education_in_the_United_States.svg
5. FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION. Routes to Florida Professional Certificate. [online]. Available from: <https://www.fldoe.org/edcert/pdf/routesChart.pdf>
6. <http://www.forumea.org/UnderstandingtheUSEducationalSystem.cfm>
7. <http://www.fldoe.org/asp/ftce/>
8. <http://mdk12.org/instruction/curriculum/>
9. <http://www.marylandpublicschools.org/msde/programs/ccss/>
10. <http://www.ocean.edu/campus/osr/alternate.htm>

11. Justin Yifu and Baris Pleskovic. (2008), Annual World Bank Conference on Development Economics Regional: Higher Education and Development.
12. Education Commission of the States, State-level Policies Regarding Accreditation in Public Schools, ECS Information Clearinghouse, 1998 diunduh dari <http://www.ecs.org/clearinghouse/14/38/1438.htm>
13. <http://www.usgovernmentpending.com/>
14. <http://Intellectualltakeout.org/library/chart-graph/where-general-fund-dollar-go-november-2011-forecast>

-o0o-

II

Sistem Pendidikan di Arab Saudi



Sumber foto menara Burj Al Mamlaka: archiwellow.blogspot.com

Oleh:

Dr. Basuni Imamuddin, S.S., M.A.

Atase Pendidikan di Riyadh

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Arab Saudi

Kebijakan sistem pendidikan di Arab Saudi mulai dikembangkan sejak 1/9/1344 H (14/3/1926 M), dengan didirikannya Departemen Pendidikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Secara umum strategi pengembangan pendidikan di Saudi Arabia terdiri dari tiga fase yaitu: 1). Fase Perintisan (*marhalatut ta'siis*), yang menitikberatkan kepada pengokohan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, pendidikan bagi kaum wanita dan terbangunnya sistem, aturan dan kebijakan pendidikan; 2). Fase Perluasan (*marhalatut tawassu'*), yang menitikberatkan kepada pemberian kesempatan belajar bagi semua warga, kesetaraan dalam kesempatan belajar bagi semua warga, penghapusan buta aksara; dan 3). Fase Peningkatan Kualitas (*marhalatul jawdah*), yang menitikberatkan kepada pembangunan masyarakat berpengetahuan, fokus terhadap hasil, pengokohan mutu dan evaluasi yang mengacu kepada indikator kinerja dan pengembangan berkesinambungan.

Pengelolaan pendidikan yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dibuat sistematis dengan mengatur aspek-aspek penting pendidikan modern seperti penetapan anggaran pendidikan, pengangkatan guru, pembangunan sekolah formal, evaluasi pendidikan, penyiapan buku-buku pegangan, dan aturan-aturan lainnya. Melalui peraturan yang disetujui oleh Wakil Raja pada tahun 1355 H (1936 M), penyelenggaraan pendidikan juga di tempuh dengan mengirim para siswa untuk menempuh studi di luar negeri (*ibti'aats*).

Sistem pendidikan di Arab Saudi dikembangkan dengan menganut prinsip-prinsip kebijakan mendasar yang meliputi Prinsip Keimanan, Prinsip Kemanusiaan, Prinsip Keadilan, Prinsip Pembangunan, Prinsip Keilmuan, Prinsip Belajar untuk diamalkan (kerja), Prinsip Pendidikan untuk membentuk kekuatan dan untuk pembangunan, Prinsip Pendidikan integral dan berkesinambungan, Prinsip Orisinalitas dan Pembaharuan, serta terakhir Prinsip Pendidikan untuk kehidupan.

Sistem pendidikan di Arab Saudi diawali dengan pra perguruan tinggi yang terdiri dari *Play Group* dan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun. Pada tiap jenjang dikembangkan sekolah-sekolah khusus seperti SD untuk menghafal Al Qur'an, SMP Percontohan, SMA dengan sistem SKS, dan lain-lain. Pada jenjang SMA di tahun kedua dan ketiga mulai diterapkan spesialisasi ilmu antara lain: 1). Ilmu agama dan bahasa Arab, 2). Ilmu manajemen dan sosial, 3). Ilmu alam, dan 4). Ilmu teknologi. Di mulai pada tingkat SD, pemerintah Arab Saudi menerapkan pemisahan sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan dimana sekolah perempuan memiliki kurikulum khusus. Ujian kenaikan kelas pada jenjang SD dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pada setiap semester, nilai maksimal untuk satu semester adalah 50% dengan rincian: 15% untuk ujian tengah semester dan 35% untuk ujian akhir semester. Untuk ujian kelulusan, Komite Pusat Kebijakan Pendidikan pada tanggal 10/4/1401 H (14/2/1981 M) telah menghapus sentralisasi ujian kelulusan SD, dan dilimpahkan pelaksanaannya kepada pihak sekolah sebagai penyelenggara ujian kelulusan, penyiapan naskah soal, pengoreksian dan pengumuman hasil ujian. Ujian kelulusan untuk Pendidikan Menengah diselenggarakan di bawah supervisi Kementerian Pendidikan dan Direktorat Pengajaran Perempuan.

Disamping pengembangan yang terus menerus dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan pengajar pun mendapat perhatian serius. Pemerintah Arab Saudi memiliki usaha yang sangat besar demi meningkatkan jumlah guru dan pendidik yang berkualitas dari dalam negeri di semua disiplin ilmu. Diantara tantangan terbesar yang dihadapi Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Arab Saudi adalah keterbatasan jumlah guru yang

memiliki kapasitas tinggi. Untuk itu, Dirjen Ilmu Pengetahuan Umum bekerjasama dengan negara-negara Arab di kawasan berusaha menjalin kerjasama untuk mengirimkan tenaga pendidik yang mumpuni. Selain itu, pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dari dalam negeri, seperti Institut Ilmu Pengetahuan Saudi, Sekolah Pendidikan Guru, dan lain-lain.

Terkait pendanaan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan yang meringankan kepada setiap pelajar. Pada Undang-undang Pendidikan tahun 1390 H (1970 M) disebutkan bahwa negara memperhatikan penambahan persentase anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya anggaran negara. Karenanya, sekolah dan kampus negeri hingga sekarang tidak memungut biaya sekolah, bahkan para siswa/mahasiswanya mendapatkan uang saku (*mukafa'ah*) setiap bulannya, termasuk mahasiswa asing dalam bentuk beasiswa.

Perhatian pemerintah Saudi Arabia pada aspek pendidikan memang semakin serius. Pada beberapa tahun terakhir ini, beberapa pihak penyelenggara pendidikan tinggi mengembangkan sistem wakaf dalam meningkatkan peran swasta, seperti yang tengah dilakukan King Saud University di Riyadh, dengan membentuk sebuah badan yang dinamakan "*university endowments*" (*awqaaf jaami'ah*) yang tugasnya menghimpun dana wakaf dan mengembangkannya dalam bentuk investasi berupa beberapa gedung multi fungsi dan hasilnya nanti akan kembali digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	37
DAFTAR ISI	41
1. Sistem Pendidikan di Arab Saudi	43
2. Pengembangan dan Pembinaan Guru	53
3. Pendanaan Pendidikan	59
4. Evaluasi Pendidikan dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan	63
5. Kurikulum Pendidikan Umum di Arab Saudi	77
DAFTAR REFERENSI	93

1

Sistem Pendidikan di Arab Saudi

1.1 Pendidikan Pra Perguruan Tinggi

1.1.1 Play Group dan Taman Kanak-Kanak

Pemerintah Arab Saudi memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan anak pra SD, meskipun tidak mensyaratkan anak-anak yang akan masuk SD untuk melalui jenjang ini. Hal ini dilatar belakangi oleh masyarakat Arab Saudi yang beragama Islam dan menjadikan ajaran Islam sebagai ideologi negara dimana agama sangat memperhatikan pendidikan setiap anak meskipun belum berbentuk pendidikan formal.

Pada tahun 1386 H (1965 M), Kementerian Pendidikan Arab Saudi membuka lembaga pendidikan anak usia dini yang pertama di kota Riyadh. Kemudian pada tahun berikutnya juga dibuka lembaga serupa di kota Damam dan kota Ahsa'. Pada tahun 1400 H (1979 M) lembaga-lembaga ini dimasukan kebawah pengawasan Direktorat Jendral Pendidikan Perempuan karena anak-anak pada usia dini sangat membutuhkan para pendidik perempuan sebagai pengganti sementara posisi para ibu. Pada tahun yang sama, Dirjen Pendidikan Perempuan juga membuka sekolah baru di kota Makah, dan kemudian pada tahun berikutnya membuka 10 sekolah lagi di kota Riyadh.

Selain dibawah pengawasan Dirjen Pendidikan Perempuan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini juga mendapat pengawasan dari berbagai instansi seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan terhadap sekolah anak usia dini mendorong pemerintah Arab Saudi untuk membuka sekolah-sekolah baru di kota-kota seluruh Kerajaan Arab Saudi.

Beberapa faktor yang mendorong suburnya sekolah-sekolah anak usia dini di Kerajaan Arab Saudi adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, dimana para orang tua sibuk dengan pekerjaan dan karir mendorong mereka untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah anak.
2. Faktor sosial, dimana sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab Saudi zaman sekarang bahwa setiap keluarga baru akan memisahkan diri dengan orang tua untuk tinggal di rumah mereka sendiri. Sehingga ketika mereka memiliki anak maka terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka sedini mungkin supaya mereka dapat segera bekerja.
3. Faktor kesehatan anak, dimana para orang tua menginginkan anak-anak mereka dapat aktif bermain dan belajar di luar rumah sehingga menjadi cepat dewasa.
4. Sebagai persiapan masuk SD, dimana para orang tua ingin agar anak-anak mereka terbiasa bersosialisasi dan bergaul dengan anak-anak lain.

Berbagai kendala yang dihadapi sekolah-sekolah untuk anak usia dini di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua, dimana para orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan kurang peduli dengan anaknya. Hal ini menyebabkan pendidikan anak usia dini di sekolah kurang memberikan hasil yang maksimal.
2. Kurangnya sumber pendanaan sekolah, dikarenakan para orang tua anak terlambat membayar SPP atau terlambatnya kucuran dana dari instansi pemerintah yang menaungi.
3. Dikarenakan sekolah-sekolah untuk anak usia dini berada di bawah payung beberapa instansi yang berbeda yang menyebabkan

terjadinya kerancuan dalam koordinasi sehingga memberikan dampak yang negatif.

4. Kurangnya kemampuan manajerial pihak sekolah.

1.1.2 Sekolah Dasar (SD)

Pemerintah Arab Saudi memandang bahwa pendidikan dasar adalah pondasi dari seluruh pendidikan yang akan dikenyam oleh setiap warga, sehingga perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar sangatlah besar. Dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun, sebelum tahun 1373 H (1952 M), SD di Arab Saudi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu:

1. Sekolah Desa

Bertempat di desa-desa dengan jumlah siswa kurang dari 60 anak. Bila terdapat lebih dari 60 siswa, maka sekolah ini menjadi Sekolah Dasar. Sekolah ini hanya ditangani oleh dua orang sebagai guru dan pengurus administrasi. Apabila jumlah siswa kurang dari 30 anak maka sekolah ini hanya akan ditangani oleh satu orang sebagai guru yang sekaligus mengurus administrasi.

Jenjang pendidikan di Sekolah Desa ini hanya selama 4 tahun. Dalam satu tahun, hanya 9 bulan aktif bersekolah. Dalam tiap pekan ada 24 jam pelajaran yang terbagi dalam 6 hari, dimana dalam setiap harinya ada 4 jam pelajaran. Setelah menamatkan jenjang pendidikan ini, setiap anak akan langsung melanjutkan ke kelas lima Sekolah Dasar.

2. Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (SD) adalah sekolah yang bertempat di perkotaan dengan siswa lebih dari 60 anak dan dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun.

Pada tahun 1381 H (1960 M) Dirjen Pendidikan Perempuan membuka SD untuk anak-anak perempuan, karena pemerintah Arab Saudi menerapkan pemisahan sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan sejak di SD dan jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Kemudian pada tahun 1387 H (1966 M) diterapkan kurikulum khusus untuk anak-anak perempuan.

Beberapa kendala yang dihadapi lembaga-lembaga SD di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya siswa didik yang bolos sekolah sehingga menyebabkan gagal ujian dan tinggal kelas. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 1000 siswa SD pada tahun 1417 H (1996 M) hanya 384 siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, 297 siswa lulus dalam 7 tahun, dan lebih dari 180 siswa lulus setelah 8 tahun. Secara umum, hanya 861 siswa dari 1000 siswa yang berhasil menyelesaikan SD, sedangkan 139 siswa gagal.
2. Kurangnya tenaga pengajar yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai.
3. Kurangnya pemerataan pendidikan khususnya pendidikan untuk anak-anak perempuan. Meskipun Dirjen Pendidikan Perempuan sudah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan untuk anak-anak perempuan namun hal ini masih belum mencapai hasil maksimal.
4. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan keluarga siswa di rumah sehingga capaian target pendidikan pada siswa kurang maksimal.

Demi menunjang hasil pendidikan yang bagus, pemerintah berupaya untuk membuat SD yang berkualitas, diantaranya:

1. SD untuk menghafal Al Qur'an

Sudah menjadi tradisi umat muslim bahwa pendidikan Al Qur'an mendapatkan perhatian yang sangat besar. Sehingga pemerintah Arab Saudi melihat bahwa sekolah-sekolah formal juga harus melihat aspek ini agar mampu menciptakan kualitas pendidikan yang maksimal. SD penghafal Al Qur'an pertama didirikan di kota Riyadh pada tahun 1347 H (1926 M), di kota Makah pada tahun 1371 H (1950 M), dan di kota Madinah pada tahun 1376 H (1955 M). Kemudian pada tahun 1400 H (1979 M) Dirjen Pendidikan Perempuan membuka SD menghafal Al Qur'an untuk anak perempuan di kota Riyadh, kota Qosim, dan kota Madinah. Pemerintah juga memberikan beasiswa penuh untuk menunjang keberhasilan program ini.

2. SD non kelas

Diantara upaya pemerintah Arab Saudi dibidang peningkatan kualitas pendidikan SD adalah dengan memperhatikan keistimewaan setiap siswa dimana setiap siswa bisa mengikuti kelas yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus berurutan dari kelas satu ke kelas berikutnya. Akan tetapi, siswa dapat lompat kelas ataupun pindah kelas, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan belajar di atas rata-rata bisa mempersingkat waktu belajarnya.

1.1.3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah lanjutan tingkat pertama di Arab Saudi pada awalnya menyatu dengan tingkat SMA dengan nama Kafaah Tsanawiyah atau persiapan kemampuan untuk masuk SMA. Kemudian pada tahun 1378 H (1957 M) sekolah ini dipisah sebagai jenjang tersendiri dengan jumlah 20 buah sekolah untuk anak laki-laki dengan 5015 orang siswa dan 173 orang guru. Kemudian Dirjen Pendidikan Perempuan membuka sekolah untuk anak-anak perempuan pada tahun 1384 H (1963 M) di kota Riyadh, Makah, dan Jeddah. Hingga pada tahun 1410 H (1989 M) jumlah sekolah untuk anak-anak perempuan mencapai 1058 buah.

Berbagai pola pendidikan yang dipakai di jenjang ini adalah:

1. Sekolah-sekolah khusus menghafal Al Qur'an.
2. Institut-institut pendidikan menengah cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh.
3. SMP biasa/umum. Jenis ini banyak yang menyebar di wilayah Arab Saudi.
4. SMP kelas malam.

Kemudian pemerintah juga membuat inovasi-inovasi baru demi meningkatkan mutu pendidikan SMP dengan membuka SMP-SMP unggulan, diantaranya:

1. SMP Percontohan

SMP Percontohan mulai dikembangkan pada tahun 1381 H (1960 M), yang diawali dengan berdirinya tiga sekolah di kota Riyadh, kota Hufuf, dan kota Damam. Dengan kualitas pendidik yang mumpuni, waktu belajar sehari penuh serta penyediaan makanan bergizi,

diharapkan SMP jenis ini dapat meningkatkan mutu pendidikan.

2. SMP Modern

SMP modern didirikan pemerintah pada tahun 1398 H (1977 M) di kota Riyadh, kota Jedah, kota Madinah, dan kota Hufuf. Keunggulan sekolah ini adalah dengan dimasukkannya kurikulum ilmu teknologi, baik itu dalam tahapan teori maupun praktek. Namun pada tahun 1401 H (1980 M) pemerintah menutup sekolah ini karena kurangnya minat siswa yang masuk.

3. SMP khusus menghafal Al Qur'an

Minat masyarakat Arab Saudi terhadap ilmu agama yang begitu besar mendorong pemerintah untuk membuka sekolah-sekolah khusus menghafal Al Qur'an yang berkualitas pada tahun 1384 H (1963 M). Sekolah-sekolah berkembang begitu pesat hingga pada tahun 1410 H (1989 M) mencapai 78 buah: 62 sekolah untuk anak laki-laki dan 16 sekolah untuk anak perempuan. Pada tahun 1422 H (2001 M) jumlah sekolah ini meningkat menjadi 337 buah sekolah: 190 sekolah untuk anak laki-laki dan 148 sekolah untuk anak perempuan.

1.1.4 Sekolah Menengah Atas (SMA)

Jenjang pendidikan SMA di Arab Saudi adalah selama 3 tahun, dimana di tahun kedua dan ketiga mulai diterapkan spesialisasi ilmu. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan ini sejak tahun 1412 H (1991 M) dengan spesialisasi ilmu sebagai berikut:

1. Ilmu agama dan bahasa Arab.
2. Ilmu manajemen dan sosial.
3. Ilmu alam.
4. Ilmu teknologi.

Aturan ini diterapkan Pemerintah agar para siswa lulusan SMA siap melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai minat dan bakatnya. Walaupun mereka tidak melanjutkan belajar ke perguruan tinggi, mereka akan memiliki kemampuan untuk terjun kerja.

Berbagai pola pendidikan yang dipakai di jenjang ini adalah sebagai berikut:

1. Sekolah-sekolah khusus menghafal Al Qur'an.
2. Institut-institut pendidikan menengah cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh.
3. SMA biasa/umum. Jenis ini banyak menyebar di wilayah Arab Saudi.
4. SMA kelas malam.

Beberapa program unggulan pemerintah untuk sekolah SMA di Arab Saudi adalah sebagai berikut:

1. SMA komprehensif

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMA yang sejalan dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan sosial serta perkembangan teknologi, maka Kementerian Umum Arab Saudi membuka SMA komprehensif pada tahun 1396 H (1975 M) di kota Riyadh. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya disusul dengan pendirian sekolah-sekolah serupa di kota Makah, kota Damam, dan kota Jeddah.

Spesialisasi yang ditawarkan pada jenjang ini adalah program ilmu agama, program ilmu sosial, program ilmu bahasa (bahasa Arab dan bahasa Inggris/asing), program ilmu alam (fisika, kimia, biologi, dan matematika), program ilmu umum, dan program ilmu perdagangan.

Program ini sangat memperhatikan keistimewaan setiap siswa sehingga para siswa bisa memilih program yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Siswa juga diperbolehkan untuk pindah program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

2. SMA dengan sistem SKS

Sistem ini menargetkan penyelesaian semua mata pelajaran sesuai dengan kemampuan siswa tanpa terikat oleh kelas. Artinya, siswa diperkenankan untuk mengambil beberapa mata pelajaran saja selama satu semester sesuai dengan kemampuan dengan jumlah jam pelajaran yang sama dengan biasanya. Dengan mata pelajaran yang lebih sedikit diharapkan keberhasilan siswa dalam belajar lebih besar. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

- Mengurangi angka kegagalan dalam belajar, serta memungkinkan siswa yang gagal dalam satu mata pelajaran untuk mengulangi

mata pelajaran tersebut di semester berikutnya tanpa harus mengulangi keseluruhan semester, seperti yang diterapkan di perguruan tinggi.

- Perhatian yang besar terhadap capaian kemampuan siswa secara nyata dalam bentuk praktik bukan sekedar kemampuan teori disesuaikan dengan jenis kelamin siswa.
- Siswa dapat memilih sendiri mata pelajaran yang diminatinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- Siswa memiliki keleluasaan untuk mempercepat maupun mengakhirkan kelulusannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

1.1.5 Lembaga Pendidikan Swasta

Selain lembaga pendidikan negeri, terdapat pula lembaga-lembaga pendidikan swasta yang dimiliki oleh perseorangan maupun lembaga non pemerintah Arab Saudi, diantaranya:

1. Di kota Makkah

- Sekolah Shoulatiyah
Sekolah ini dibangun oleh Syaikh Rahmatulloh bin Kholilirahman Al Hindy pada tahun 1292 H (1871 M) yang dibiayai oleh seorang perempuan kaya asal India bernama Shoulatunnisa. Pada mulanya, sekolah ini terletak disamping Masjid Harom, namun seiring perluasan masjid, maka sekolah ini dipindahkan ke tempat lain. Sekolah ini masih berdiri dan berfungsi sampai sekarang. Di sekolah inilah salah satu tokoh besar Indonesia pernah menimba ilmu, yaitu K. H. Hasyim Asy'ari.
- Sekolah Fakhriyah Utsmaniyah
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Abdul Haq Qory pada tahun 1296 H (1875 M) karena sambutan masyarakat yang luar biasa terhadap Sekolah Shoulatiyah yang didirikan 4 tahun sebelumnya.
- Sekolah Khoiriyah
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Muhamad Hasan Khoyath pada tahun 1326 H (1905 M).

- Sekolah Dar Faizin
Sekolah ini didirikan oleh Abdul Kholid Muhammad Husni Al Banggaly pada tahun 1304 H (1881 M). Beliau adalah salah satu alumni dari Sekolah Shoulatiyah. Atas arahan Syaikh Rahmatulloh bin Kholilirahman Al Hindy, sekolah ini dibangun dengan tujuan untuk membantu Sekolah Shoulatiyah.
- Sekolah Throblusy
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Abdul Karim At Throblusy Asy Syamy pada tahun 1327 H (1906 M).
- Sekolah Mahy
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Muhammad Amin Al Mahy pada tahun 1339 H (1918 M).
- Sekolah Turqy Al Ilmiyah
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Ahmad Al 'Ujaimy pada tahun 1342 H (1921 M).
- Sekolah Indonesia Makah
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Jinan Muhammad Thoyib pada tahun 1346 H (1925 M).
- Sekolah Najah Al Lailah
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Abdulloh Ahmad Khoujah pada tahun 1350 H (1929 M).
- Sekolah Darul Hadits
Sekolah ini didirikan oleh para ulama Masjid Harom dan yang paling menonjol adalah Syaikh Abdu Dhohir Abu Samah pada tahun 1353 M (1932 M).
- Sekolah Ulum Ad diniyah
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Muhsin Ali Al Misawy pada tahun 1353 H (1932 M).
- Sekolah Dar Aitam
Sekolah ini didirikan oleh Syaikh Mahdy Al Mushlih pada tahun 1355 H (1934 M).
- Sekolah Khoiriyah Al 'Arifiyah
Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Arif Al Banggaly pada tahun 1358 H (1937 M).
- Sekolah Dar Salam

Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Salamatulloh pada tahun 1365 H (1944 M).

- Sekolah Tauhidiah

Sekolah ini didirikan oleh Maulawy Shodiq Amad Muthi'urrohmaan pada tahun 1370 H (1949 M).

- Sekolah Muhajirin As Salafiyah

Sekolah ini didirikan oleh Abdulloh Qohthony pada tahun 1375 H (1954 M).

2. Di kota Jedah

- Sekolah An Najah, pada tahun 1317 H (1896 M).
- Sekolah Abdurrohim Troblusy.
- Sekolah Syaikh Syahain.
- Sekolah Syaikh Syams.

3. Di kota Madinah

- Sekolah Jalilah.
- Sekolah Hamidiyah.
- Sekolah Basyir Agha.
- Sekolah Asy Syifa.
- Sekolah Ulum Asy Syar'iyah.

2

Pengembangan dan Pembinaan Guru

Perkembangan dan kemajuan sebuah masyarakat bergantung kepada kesesuaian sistem pendidikannya dengan tuntutan zaman seiring dengan kemajuan ekonomi sosial dan budaya. Sistem pendidikan yang baik juga perlu ditunjang oleh kualitas guru yang memadai, karena guru adalah pemegang kendali keberhasilan sebuah pendidikan yang senantiasa bersentuhan dengan para siswa dan membentuk karakter mereka. Guru juga sangat bertanggung jawab terhadap perkembangan para siswa baik itu perkembangan fisik, ilmu pengetahuan, maupun perkembangan akhlaknya.

Untuk itulah setiap negara di dunia ini senantiasa berupaya untuk menyediakan guru-guru yang memiliki kredibilitas tinggi bagi para generasi penerusnya, dan selalu berupaya mencari unsur-unsur penting dari negara-negara yang lebih maju dalam pendidikan untuk bisa ditiru dan diterapkan di masing-masing negara.

Pemerintah Arab Saudi memiliki usaha yang sangat besar demi meningkatkan jumlah guru dan pendidik yang berkualitas dari dalam negeri disemua disiplin ilmu karena guru yang berkualitas akan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan. Diantara tantangan terbesar yang dihadapi Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Arab Saudi adalah keterbatasan jumlah guru yang memiliki kapasitas tinggi. Di saat sekolah-sekolah baru menjamur, maka kebutuhan jumlah guru dengan

kualitas tinggi semakin besar. Untuk itu, Dirjen Ilmu Pengetahuan Umum bekerjasama dengan negara-negara Arab di kawasan berusaha menjalin kerjasama untuk mengirimkan tenaga pendidik yang mumpuni.

Penerimaan tenaga pengajar dari luar negeri bukanlah solusi final, melainkan hanya sekedar solusi sementara. Untuk itu, pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dari dalam negeri. Diantaranya, sekolah-sekolah pendidikan guru yang didirikan adalah:

2.1 Institut Ilmu Pengetahuan Saudi

Institut ini didirikan pada tahun 1345 H (1924 M) di kota Makah, dengan jumlah siswa sekitar 40 orang, untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah yang diberikan setiap bulan. Syarat untuk mendaftar di sekolah ini adalah harus warga negara Arab Saudi karena tujuannya adalah untuk mendongkrak jumlah guru dalam negeri.

Di awal pendiriannya, institut ini berjenjang pendidikan selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1365 H (1944 M) masa pendidikan diubah menjadi 5 tahun. Institut ini dihapuskan pada tahun 1381 H (1960 M) untuk kemudian dilebur dengan Institut Pendidikan Guru Pemula.

2.2 Sekolah Pendidikan Guru

Sekolah ini didirikan pada tahun 1373 H (1952 M) untuk anak-anak lulusan SD dengan jenjang pendidikan 3 tahun. Setelah mereka selesai pendidikannya, mereka akan ditempatkan untuk mengajar di berbagai sekolah. Namun dikarenakan para alumni institut ini masih terlalu muda untuk mengajar, mereka mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Pada akhirnya, pada tahun 1389 H (1969 M), institut ini dihapuskan setelah meluluskan 9600 orang guru.

2.3 Sekolah Pendidikan Guru (kelas malam)

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik adalah dengan membuka kelas malam untuk para guru dengan jenjang pendidikan selama 3 tahun. Melalui kelas malam, mereka memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1375 H (1954 M), dan dihapuskan pada tahun 1385 H (1964 M) setelah terpenuhi semua target yang diinginkan selama 10 tahun beroperasi.

2.4 Training-Training Musim Panas

Training musim panas ini diberikan untuk para guru, dan diadakan oleh Kementerian Pendidikan selama 100 hari yang terbagi menjadi 2 kali musim panas, disetiap musim panas dilaksanakan selama 50 hari. Program ini dilaksanakan seiringan dengan program pendidikan untuk guru yang dilaksanakan selama 10 tahun dari tahun 1375 H (1954 M) hingga tahun 1385 H (1964 M).

2.5 Sekolah Guru Olah Raga

Dikarenakan minimnya jumlah guru olah raga, maka Kementerian Pendidikan membuka Sekolah Pendidikan Guru Olah Raga pada tahun 1385 H (1964 M) di kota Riyadh. Dengan jenjang pendidikan selama 3 tahun, para lulusan sekolah ini mendapatkan ijazah setingkat SMA. Namun setelah berdirinya fakultas pendidikan olah raga pada 1412 H (1991 M), maka institut ini dihapuskan.

2.6 Pendidikan Guru Agama dan Al Qur'an

Kebutuhan terhadap guru agama dan guru tahfidz Al Qur'an mendorong pemerintah untuk membuka sekolah khusus tahfidz Al Qur'an di kota Riyadh pada tahun 1385 H (1964 M). Sekolah ini menerima para siswa lulusan SD untuk belajar selama 3 tahun, Setelah

lulus mereka akan mendapatkan ijazah setingkat SMP. Kemudian, pada tahun 1397 H (1976 M), dibuka sekolah tahfidz Al Qur'an untuk tingkat SMA di kota Makah.

2.7 Pendidikan Guru Teknik

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap guru teknik, pemerintah Arab Saudi mendirikan sekolah pendidikan guru teknik. Sekolah ini pertama kali didirikan di kota Riyadh pada tahun 1386 H (1987 M) dengan jenjang pendidikan selama 3 tahun dan para lulusan sekolah ini akan mendapatkan ijazah setingkat SMA. Institut ini resmi ditutup pada tahun 1401 H (1990 M).

2.8 Program Pendidikan Guru Bahasa Inggris

Kebutuhan terhadap guru bahasa Inggris mendorong Kementerian Pendidikan Arab Saudi untuk mendirikan program pendidikan guru bahasa Inggris pada tahun 1393 H (1972 M). Program ini untuk para lulusan SMA dan sederajat atau mereka yang telah mengajar selama 3 tahun. Para alumni yang bisa menyelesaikan program akan dikirim ke Inggris untuk belajar bahasa Inggris selama 100 pekan. Setelah pulang dari Inggris mereka akan mendapatkan ijazah diploma dan diterjunkan untuk menjadi guru bahasa Inggris di tingkat SMP.

2.9 Pusat Ilmu Umum Dan Matematika

Pusat ini didirikan demi memenuhi kebutuhan guru ilmu umum dan matematik pada tahun 1394 H (1973 M) di kota Riyadh. Dengan jenjang pendidikan selama 3 tahun, para siswa yang telah lulus akan mendapatkan ijazah setingkat SMA Jurusan Ilmu Pengetahuan Umum atau Jurusan Matematika.

2.10 Fakultas Pendidikan

Perkembangan pendidikan untuk meningkat kualitas guru di Arab Saudi semakin pesat sehingga pada akhirnya dibukalah Fakultas Pendidikan pada tahun 1409 H (1980 M) untuk memasok kebutuhan guru SD. Kemudian pada tahun 1419 H (1990 M) beberapa Fakultas membuka dua jurusan baru yaitu jurusan ilmu pengetahuan umum dan jurusan matematik untuk mensuplai kebutuhan terhadap guru SMP dan SMA' Setelah itu, dibuka juga jurusan bahasa Arab.

Beberapa fakultas pendidikan juga mengadakan pelatihan untuk para kepala sekolah dan beberapa pelatihan lainnya seperti pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Pada tahun 1427 H (2006 M) dikeluarkan peraturan bahwa fakultas pendidikan baik untuk mahasiswa maupun mahasiswi dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, fakultas pendidikan di kota Makah dimasukkan ke Universitas Ummul Quro, fakultas pendidikan di kota Riyadh dimasukkan ke Universitas Malik Saud, dan fakultas pendidikan di kota Jeddah dimasukkan ke Universitas Malik Abdul Aziz.

3

Pendanaan Pendidikan

3.1 Pendanaan Sekolah dan Universitas Negeri, serta Peran Pemerintah Dalam Pendanaannya

Pada Undang-undang Pendidikan tahun 1390 H (1970 M) disebutkan bahwa negara memperhatikan penambahan persentase anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional yang terus bertambah. Penambahan persentase anggaran akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya anggaran negara. Karenanya, sekolah dan kampus negeri hingga sekarang tidak memungut bayaran, bahkan para siswa/mahasiswanya mendapatkan uang saku (*mukafa'ah*) setiap bulannya, termasuk mahasiswa asing dalam bentuk beasiswa.

Pada beberapa tahun terakhir, ada beberapa perguruan tinggi negeri yang membuka kelas/kuliah sore tanpa beasiswa bahkan mahasiswanya dipungut bayaran, seperti di *Islamic University (Jami'ah Islamiyah)* di Madinah yang membuka kelas sore untuk mahasiswa pascasarjana non beasiswa.

3.2 Pendanaan Sekolah dan Universitas Swasta serta Peran Swasta Dalam Pendanaan Pendidikan

Dalam Undang-undang Pendidikan terdapat peraturan tentang pendidikan swasta antara lain mengenai tujuan diaturnya sekolah

swasta, dan adanya perhitungan yang adil dan seimbang dalam bantuan pendanaan pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta.

Pendanaan sekolah dan universitas swasta umumnya bertumpu pada lembaga masing-masing dimana negara hanya membantu dan bukan sebagai sumber utama.

Dalam sebuah riset desertasi yang dilakukan pada tahun 2005, diperoleh kesimpulan bahwa peran swasta dalam pendidikan secara umum dinilai masih lemah. Ada beberapa bentuk peran yang paling banyak dilakukan, seperti: memberikan hadiah bagi para siswa/mahasiswa, mencetak brosur/buku pendidikan, mendirikan bangunan sekolah/kampus, mengadakan pelatihan bagi siswa/mahasiswa, dan memberikan hibah tunai (uang).

Pihak swasta merasakan adanya keterbatasan mereka dalam memberikan peran dalam pendanaan pendidikan. Di samping itu, ada beberapa kendala yang biasa dijumpai, antara lain:

1. Lemahnya hubungan antara pihak instansi pendidikan umum dengan pihak swasta.
2. Tidak adanya sistem/aturan yang mengatur dan mengikat kedua belah pihak.
3. Tidak adanya kejelasan peran serta pihak swasta dalam grand design pembangunan.

Untuk meningkatkan peran pihak swasta dalam pendanaan pendidikan, lembaga riset tersebut menyarankan hal-hal berikut:

1. Mengaitkan program pendidikan dengan kebutuhan pihak swasta.
2. Pembaharuan aturan dan proses terkait masalah keuangan dan administrasi pada institusi pendidikan.
3. Dibentuknya lembaga tinggi pendidikan yang di dalamnya dipilih perwakilan dari pihak swasta.

Dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2008 M, disebutkan beberapa hasil studi terkait dengan investasi pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta, sebagaimana terangkum sebagai berikut:

1. Bahwa investasi pendidikan yang dilakukan pihak swasta masih kurang memadai.

2. Studi menemukan adanya korelasi yang cukup baik antara aktifitas pendidikan dan investasi pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta.
3. Kebutuhan yang dirasakan oleh pendidikan di Arab Saudi akan adanya investasi pendidikan dari pihak swasta adalah terbangunnya basis pendidikan yang kuat dan sanggup menyiapkan dan melahirkan siswa-siswa unggul.
4. Di antara penghambat investasi pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta adalah minimnya studi ilmiah seputar peluang investasi di dunia pendidikan umum.
5. Di antara sarana yang dapat memacu berkembangnya investasi pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta adalah adanya kerjasama antara para investor dengan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dalam sebuah institusi pendidikan.

Pada beberapa tahun terakhir ini, beberapa pihak penyelenggara pendidikan tinggi mengembangkan sistem wakaf dalam meningkatkan peran swasta, seperti yang tengah dilakukan King Saud University di Riyadh, dengan membentuk sebuah badan yang dinamakan “University Endowments” (*awqaaf jaami'ah*). Badan ini tugasnya menghimpun dana wakaf dan mengembangkannya dalam bentuk investasi berupa beberapa gedung multi fungsi dan hasilnya akan kembali digunakan untuk kepentingan universitas.

4

Evaluasi Pendidikan dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan

4.1 Evaluasi Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 779, tahun 1389 H (1969 M) tentang kebijakan pendidikan di Kerajaan Arab Saudi, disebutkan tiga hal berikut mengenai evaluasi pendidikan:

1. Pihak-pihak penyelenggara pendidikan mengadakan ujian untuk mengetahui – secara detail dan jujur – sejauh mana peserta didik memenuhi tuntutan kurikulum, baik pada sisi: pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Ada aturan khusus yang menjelaskan tentang cara-cara penyelenggaraannya, sarana-sarannya (SOP) yang dapat menjamin terselenggaranya ujian ini secara baik dan professional.
2. Pihak-pihak penyelenggara terkait penyelenggara ujian yang mengukur kemampuan, bakat, kecenderungan, dan kesiapan peserta didik, dengan berbagai sarana, untuk memberikan perhatian khusus dengan menyiapkan pendahuluan yang dapat mengarahkan kepada prestasi yang lebih baik.
3. Proses pengajaran dievaluasi pada semua sisinya: kurikulum, guru, buku ajar, metodologi pengajaran, dan sarana bimbingan teknis dan yang lainnya, melalui kajian terhadap hasil ujian dan penggunaan semua sarana evaluasi.

Ujian kenaikan kelas pada jenjang SD dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pada setiap semester, nilai maksimal untuk satu semester adalah

50% dengan perincian: 15% untuk ujian tengah semester dan 35% untuk ujian akhir semester. Untuk ujian kelulusan, Komite Pusat Kebijakan Pendidikan pada tanggal 10/4/1401 H (14/2/1981 M) telah menghapus sentralisasi ujian kelulusan SD, dan dilimpahkan pelaksanaannya kepada pihak sekolah sebagai penyelenggara ujian kelulusan, penyiap naskah soal, pengoreksian, dan pengumuman hasil ujian.

Ujian kelulusan untuk Pendidikan Menengah diselenggarakan di bawah supervisi Kementerian Pendidikan dan Direktorat Pengajaran Perempuan.

4.2 Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Umum (Dasar dan Menengah)

Untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan umum, maka pada tanggal 23 Syawal 1433 H (13 September 2012 M), Majelis/Dewan Menteri mengeluarkan keputusan terkait pembentukan Badan Evaluasi Pendidikan Umum (*Hai'ah Taqwiimit Ta'liimil 'Aam*) yang berisi beberapa butir keputusan sebagai berikut:

1. Dibentuk Badan Evaluasi Pendidikan Umum (*Hai'ah Taqwiimit Ta'liimil 'Aam*) yang bersifat independen secara kelembagaan, administrasi dan keuangan. Badan ini berpusat di Riyadh dan dipimpin oleh seorang kepala (*martabah mumtaazah*).
2. Secara struktural, Badan ini terkait langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Untuk Pendidikan (Raja). Tetapi pada saat ini secara insidentil Badan ini terkait dengan Ketua Majelis Menteri, sehingga kini Majelis Tinggi Untuk Pendidikan yang menjalankan tugas dan kewenangannya.
3. Badan ini memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - Membangun sistem yang mengevaluasi dan menjamin mutu pendidikan umum, mencakup standar, indikator dasar dan bingkai nasional untuk menentukan kelayakan/kualitas pendidikan umum dan semua yang terkait dengan hal tersebut, baik pada tahapan proses dan contoh/pelaksanaan.
 - Mengevaluasi kinerja sekolah-sekolah negeri dan swasta dan mengakreditasinya secara periodik sesuai standar yang

ditetapkan oleh Badan, baik yang dilakukan langsung oleh Badan atau melalui kontrak atau kerjasama dengan lembaga yang berkompeten di bidangnya.

- Merancang dan membuat ujian nasional yang memiliki dasar hukum pada setiap jenjang pendidikan umum.
4. Badan ini memiliki majelis administrasi/direksi yang terdiri dari seorang kepala (*muhafidh*) dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, Badan Nasional untuk Evaluasi dan Akreditasi Akademik, Pusat Nasional untuk Standar dan Evaluasi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Lembaga Nasional untuk Pelatihan Teknologi dan Profesi dan Organisasi Saudi untuk Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Kejiwaan, empat pakar dalam bidang yang dibutuhkan oleh Badan ini dan perwakilan dari pihak swasta.
 5. Memindahkan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi pendidikan umum dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran kepada Badan ini, dan kegiatan terkait dengan pendidikan umum swasta tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, hal tersebut karena keterkaitan yang penuh dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan umum negeri dan untuk menyatukan pengarahan dan pengawasan terhadap pendidikan umum di bawah satu koordinasi yaitu Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.
 6. Dewan pakar yang ada di Majelis/Dewan Menteri bersama perwakilan dari pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan Badan ini sesuai dengan aturan yang ada dalam keputusan dan melaporkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Beberapa bulan berikutnya, Majelis Menteri Menyetujui aturan organisasi Badan ini dalam poin-poin berikut:

1. Badan ini bersifat independen secara kelembagaan, administrasi dan keuangan dan dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon satu (*martabah mumtaazah*) yang ditunjuk melalui keputusan Raja. Badan ini memiliki anggaran tahunan yang independen.
2. Tujuan utama dari didirikannya badan ini adalah untuk melakukan

evaluasi terhadap pendidikan umum (negeri dan swasta) dalam mewujudkan hal-hal berikut:

- Meningkatkan kualitas pendidikan umum dan kapasitasnya.
 - Mendukung pembangunan dan ekonomi nasional melalui peningkatan keluaran dari pendidikan umum.
3. Tugas dan kewenangan Badan ini adalah:
- Melakukan evaluasi terhadap sekolah negeri dan swasta serta mengakreditasinya.
 - Mengevaluasi program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum (negeri dan swasta).
 - Menyiapkan standar profesi dan ujian kompetensi dan persyaratan-persyaratan/prosedur/mechanisme program sertifikasi profesi bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan umum.

Pada tanggal 15 Dzul Qa'dah 1434 H (21 September 2013 M) Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengangkat DR. Nayif bin Hasysyaal bin Abdul Muhsin Ar Ruumi sebagai kepala Badan Evaluasi Pendidikan Umum (*martabah mumtaazah*).

4.3 Sekilas Perkembangan Pendidikan Umum Di Arab Saudi

Secara singkat perkembangan pendidikan di Arab Saudi dapat dibagi menjadi tiga fase:

1. Fase Perintisan (*marhalatut ta'siis*), yang menitikberatkan kepada: pengokohan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, pendidikan bagi kaum wanita dan terbangunnya sistem, aturan, dan kebijakan pendidikan.
2. Fase Perluasan (*marhalatut tawassu'*), yang menitikberatkan kepada: pemberian kesempatan belajar bagi semua warga, kesetaraan dalam kesempatan belajar bagi semua warga, penghapusan buta aksara.
3. Fase Peningkatan Kualitas (*marhalatul jawdah*), yang menitikberatkan kepada: pembangunan masyarakat berpengetahuan, fokus terhadap

hasil, pengokohan mutu dan evaluasi yang mengacu kepada indikator kinerja dan pengembangan berkelanjutan.

4.4 Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Pendidikan Di Arab Saudi

Ada beberapa faktor pendukung pengembangan pendidikan di Arab Saudi, antara lain:

1. *Political will* dari pimpinan Kerajaan untuk mewujudkan pengembangan berkelanjutan di segala bidang dengan urutan pertama: pengembangan pendidikan.
2. Adanya visi ke depan dan proposal strategis pengembangan pendidikan di Arab Saudi.
3. Telah diluncurkan program Raja Abdullah untuk pengembangan pendidikan umum.
4. Tersedianya SDM dalam negeri dan adanya kemampuan untuk mendatangkan SDM terbaik dari luar negeri, baik sebagai individu maupun lembaga.
5. Tersedianya kemampuan finansial (anggaran).
6. Kemajuan teknologi yang dapat mendukung tersebarnya pemahaman tentang pengembangan pendidikan di Arab Saudi dan peningkatan kualitasnya secara efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

4.5 Visi Baru dan Peran Kepeloporan dalam Pengembangan Pendidikan di Arab Saudi

Visi baru dan peran kepeloporan dalam pengembangan pendidikan di Arab Saudi terangkum dalam keterangan berikut:

1. Siswa: sebagai warga yang berpegang teguh kepada aqidah Islam, nilai-nilainya dan akhlak perangnya, senang belajar, meraih sukses keilmuan, produktif secara pengetahuan, pembelajar sepanjang masa, berinteraksi secara positif dengan masyarakat dan lingkungannya, pemikirannya lurus dan kepribadiannya paripurna.
2. Sekolah masa depan: pusat perhatiannya adalah siswa, bertanggung-jawab secara sosial, memiliki kesiapan yang baik

untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, berkualitas tinggi, mengokohkan dan menarik (siswa) untuk belajar, sekolah yang terus belajar, mengembangkan diri, dan mendorong siswa untuk berinovasi dan berkreasi, memiliki pimpinan yang aktif dan para guru yang berkualitas.

3. Administrasi Pendidikan: memberikan kesempatan belajar bagi semua, mampu memimpin pengembangan pendidikan di wilayah kerjanya, memberikan peluang dan ruang bagi sekolah untuk berkembang, melaksanakan aturan menyeluruh yang evaluatif dan akuntabel, mendorong lahirnya penemuan dan inovasi baru, ikut terlibat bersama masyarakat.
4. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran: menyiapkan anggaran yang semestinya untuk melaksanakan garis kebijakan dan program yang ada, membuat garis kebijakan dan aturan yang mengarahkan peningkatan kualitas pendidikan, menjamin hak mendapatkan pendidikan unggul bagi semua, memberikan peluang kepada administrasi pendidikan di bawahnya untuk senantiasa belajar mengembangkan diri dan memimpin pengembangan pendidikan di wilayahnya masing-masing, mengangkat dan menempatkan pimpinan dan SDM yang berkualitas di semua tingkat, menempatkan profesi pendidikan pada tempatnya, mengangkatnya secara sosial dan menerapkan aturan menyeluruh yang memotivasi, mengembangkan kurikulum dan memperbaiki lingkungan pendidikan sesuai standar internasional, menyiapkan aturan dan sistem peningkatan kualitas yang memiliki standar dan akuntabel, mendukung penemuan baru, menciptakan keunggulan dan kompetisi yang sehat dalam pelaksanaan pendidikan, meneguhkan pengetahuan belajar masyarakat dan keterlibatan mereka, mendayagunakan teknologi untuk optimalkan komunikasi dan menopang keputusan yang akan dibuat dengan data yang akurat dan valid.
5. Masyarakat: keluarga, pendidikan tinggi, masjid, swasta, lembaga/ institusi pemerintah.

4.6 Kebijakan-Kebijakan Mendasar dalam Optimalisasi Pengembangan Pendidikan

4.6.1 Membuat prototipe pengembangan

Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan sekolah-sekolah di Arab Saudi yang berjumlah 33.000 buah dan administrasi pendidikan/pengajaran yang ada agar menjadi organisasi pengajaran yang memiliki tanggung jawab pengembangan secara mandiri guna menunaikan target-target berikut:

1. Berubah dari sentralistik menjadi non sentralistik yang seimbang melalui perubahan dan peneguhan kewenangan dan akuntabilitasnya terhadap administrasi pendidikan dan sekolah dengan menggunakan indikator kinerja untuk mengukur pengembangan dan optimalisasinya.
2. Semakin independen secara keuangan, administrasi dan organisasi yang meneguhkan aspek tanggung-jawab, merubah sekolah menjadi organisasi pengajaran.
3. Optimalisasi pemahaman bahwa sekolah adalah lembaga yang siap diperiksa/dievaluasi, bukan sosok tertentu yang berafiliasi kepada lembaga tersebut, dan berpindah dari fokus “mencari salah” menjadi “mencari solusi inovatif”.
 - Bertolak dari sekolah dan mengarahkan proses perubahan dari sekolah ke sistem pengajaran/pendidikan:
 - Penerapan prototipe sekolah baru yang bertujuan merubah cara kerja sekolah-sekolah yang ada dan fokus kepada perbaikan kinerja siswa.
 - Mengarahkan/memimpin penerapan prototipe baru secara bertahap bagi sekolah menuju perubahan dalam tugas dan peran administrasi pengajaran/pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Selain itu, menuju juga kepada pembuatan kebijakan yang menopangnya dan pada gilirannya membangun kembali sistem pendidikan secara integral.

- Bertolak dari sistem pengajaran/pendidikan ke sekolah:
 - Mengarahkan/memimpin pengembangan dari atas melalui standar-standar tertentu, kebijakan-kebijakan, kurikulum, referensi, tunjangan (*hawafiz*), evaluasi, akuntabilitas, dan lain-lainnya.
 - Meletakkan indikator kinerja (*performance targets*) untuk setiap administrasi pendidikan/pengajaran dan sekolah berdasarkan sasaran-sasaran belajar fundamental yang telah digariskan dalam kebijakan untuk mengarahkan/memimpin proses peningkatan di semua jenjang (nasional, administrasi pendidikan/pengajaran dan sekolah).
 - Membangun institusi-institusi yang efektif untuk memimpin proses perubahan dan kesinambungannya di semua jenjang yang ada.
- Secara horizontal:
 - Menjalin komunikasi untuk menyambungkan satu sekolah dengan sekolah lainnya dan juga untuk administrasi pendidikan/pengajaran yang akan memperkuat proses transfer pengalaman dan usaha-usaha yang telah berhasil yang ada di semua jenjang sistem pendidikan.
 - Membangun komunitas pendidikan yang profesional di sekolah, administrasi pendidikan/pengajaran dan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.
- 4. Membangun kemampuan untuk melakukan perubahan. Beberapa program dan proyek nasional dalam hal ini adalah:
 - Program pengembangan pengajaran pendidikan Islam.
 - Program pengembangan pengajaran bahasa Arab.
 - Pengembangan pengajaran ilmu-ilmu: teknik, sains dan matematika.
 - Program pengembangan pengajaran pada jenjang taman kanak-kanak.

- Program pengembangan pengajaran siswa berkebutuhan khusus.
 - Program klub-klub daerah untuk kegiatan pendidikan dan hiburan.
5. Pengembangan berkesinambungan melalui kebijakan-kebijakan dan lembaga/institusi. Beberapa contoh lembaga nasional dalam hal ini:
- Pusat pengembangan pendidikan umum-dasar dan menengah (usulan).
 - Badan evaluasi – penjaminan mutu-pendidikan umum (telah berdiri).
 - Pusat kepemimpinan pendidikan nasional (telah berdiri).
 - Pusat studi dan inovasi pendidikan nasional (usulan).
 - Proyek pembangunan pusat-pusat bakat dan keunggulan (usulan).

Beberapa contoh kebijakan:

- Proyek pengembangan infrastruktur sistem, jenjang dan kebijakan pendidikan dan pengajaran.
 - Proyek pembangunan sistem sertifikasi, standarisasi, levelisasi guru dan aturan tunjangan guru.
 - Proyek restrukturisasi dan reorganisasi bagian pengajaran.
6. Administrasi perubahan dan komunikasi. Beberapa contoh kegiatan dan program:
- Kampanye nasional untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan pembangunan komunikasi dalam skala Kerajaan Arab Saudi.
 - Dialog pendidikan dan pengajaran dengan semua lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.
 - Memperluas peran dan keterlibatan masyarakat.
 - Administrasi perubahan pada jenjang sekolah, administrasi

pendidikan dan pengajaran dan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.

Membuat sistem komprehensif untuk menjamin kualitas dan mutu pendidikan, di antara unsur-unsurnya:

- Standarisasi dan lingkup kerja, mencakup: kinerja, isi, proses, peningkatan kapasitas dan standarisasi profesi.
- Ujian nasional untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa.
- Indikator pendidikan: sistem evaluasi laporan pendidikan pada jenjang umum dan lembaga-lembaga yang berbeda-beda (administrasi pendidikan dan pengajaran, kantor-kantor pendidikan dan pengajaran, sekolah).
- Ujian dan pelaporan standar internasional (sepert: PISA, PIRL, TIMSS).
- Evaluasi internal sekolah dan administrasi pendidikan dan pengajaran.
- Evaluasi eksternal dan akreditasi hasil sistem pendidikan dan lembaga-lembaganya (Badan Evaluasi Pendidikan).

4.7 Pelaksanaan Strategi Pengembangan

4.7.1 Peneguhan Strategi:

1. Memastikan bahwa sekolah dan administrasi pendidikan/ pengajaran memimpin proses perubahan dan pengelolaannya.
2. Mengembangkan kurikulum, pengajaran dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
3. Memberikan kesempatan belajar secara merata dan menyiapkan sistem yang mendukungnya.
4. Memberikan kesempatan untuk dapat belajar sejak dini bagi semua.
5. Menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai dengan tuntutan abad 21 M.

6. Memastikan kesehatan, kesejahteraan dan kedisiplinan para guru dan membangun kepribadian mereka secara integral.
7. Melibatkan keluarga dan masyarakat dari semua lapisan untuk mendukung pengetahuan dan semangat belajar.
8. Mengembangkan sistem yang komprehensif bagi profesi guru.
9. Melakukan optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan efektifitas kinerja.
10. Mengembangkan nasionalisasi pendidikan, kepemimpinan, tunjangan dan kebijakan untuk pengembangan yang berkelanjutan.

4.7.2 Unsur-Unsur Fundamental yang Saling Terkait dalam Garis Pelaksanaan bagi Setiap Agenda Pengembangan

1. Unsur-unsur terkait:
 - Standar dan lingkup kerja: Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan dan alat/sarana untuk menjamin bahwa semuanya berjalan dengan baik dan sempurna, serta juga mampu mewujudkan administrasi terbaik untuk mensinergikan program-program yang dirancang.
 - Kepemimpinan: Berperan membangun kapasitas kepemimpinan para pemimpin di kalangan pegawai Kementerian (staf administrasi, para guru, dan yang lain) sehingga memegang kendali kepemimpinan perubahan secara profesional.
 - Peningkatan kapasitas personal dan kolektif: Meningkatkan kemampuan personal dan kolektif dan mengoptimalkan dampak dari kisah-kisah sukses (*success story*) melalui tim-tim kerja, unit-unit pengembangan sekolah dan komunitas-komunitas nasional yang melaksanakan hal ini hingga sampai pada tingkat yang unggul.
 - Teknologi: Sarana untuk menambah efektifitas dan kelayakan program melalui strategi penerbitan dan pengajaran online, mengaitkan para ahli teknologi dengan komunitas yang menjalankan kegiatan/program dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan.
 - Lembaga dan kebijakan: Bertujuan untuk mengembangkan

lembaga-lembaga yang ada, membangun lembaga-lembaga baru, menggabungkan dan mengembangkan kebijakan untuk optimalisasi dan kesinambungan pengembangan pada semua tingkatan program dan proyek.

- Keterlibatan: Menjadikan program dalam agendanya optimalisasi dan pelibatan masyarakat, institusi-institusi akademik dan pihak swasta untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia juga pengumpulan (tenaga) berpengalaman untuk mendukung proses belajar mengajar.
 - Integralitas: Pandangan yang menyeluruh melalui garis kebijakan strategis dan pada masa pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan harapan pihak-pihak terkait: wali, guru dan masyarakat yang pada gilirannya akan mendulang simpati dan dukungan.
2. Tertuang dalam bentuk program dan proyek, Garis Pelaksanaan Strategi meliputi:
- Visi pendidikan masa depan.
 - Visi siswa masa depan.
 - Visi sekolah masa depan.
 - Visi administrasi pendidikan dan pengajaran masa depan.
 - Visi Kementerian Pendidikan dan Pengajaran masa depan.
 - Kebijakan menuju pengembangan
 - Pengelolaan dan Administrasi
 - Rangkaian program: agenda dan proyek
 - Pemantauan dan Evaluasi:
 - Indikator kinerja program dan proyek, yang tercermin dalam:
 - Meningkatnya kemampuan siswa pada pelajaran tarbiyah Islamiyah dan mereka dapat memiliki nilai, prinsip, dan perilaku positif.
 - Meningkatnya kemampuan siswa pada pelajaran Bahasa

Arab dan mendayagunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

- Meningkatnya kemampuan siswa pada pelajaran umum: sains, teknik dan matematika.
- Bertambahnya jumlah anak yang belajar di taman kanak-kanak dan meningkatnya kemampuan dan kesiapan mereka untuk masuk jenjang berikutnya (sekolah).
- Semakin kokohnya nilai-nilai kebangsaan dan loyalitas kepada bangsa dan peradabannya.
- Bertambahnya kesempatan belajar bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, yang berbakat dan yang memiliki resiko tinggi.
- Meningkatnya kemampuan siswa dalam pelajaran bahasa Inggris.
- Semakin meningkatnya tahap kesiapan siswa untuk menghadapi kehidupan dan bursa/lapangan kerja dan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (setelah tsanawiyah: SMA/MA/SMK).
- Menurunnya persentase tidak naik kelas/gagal di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dan meningkatnya persentase mereka yang melanjutkan ke tingkat sekolah atas.
- Meningkatnya kesehatan dan kedisiplinan siswa dan berkurangnya perilaku negatif pada diri mereka.

5

Kurikulum Pendidikan Umum di Arab Saudi

Kurikulum dalam pengertian modern adalah rancangan tertulis dan legitimet dalam proses belajar-mengajar berisi semua komponen terkait yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pendidikan terhadap para peserta didik, baik di dalam kelas dan sekolah atau di luar kelas dan sekolah.

Pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan telah menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini tidak terlepas dari peran besarnya dalam pembentukan kepribadian peserta didik yang sedang tumbuh di semua sisi pertumbuhannya: akal, fisik, psikis dan sosial. Dengan demikian, peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan realita kontemporer dan masa depannya yang penuh dengan perubahan dan dinamika.

Pada Undang-undang nomor 779, tahun 1389 H (1969 M) tentang kebijakan pendidikan di Kerajaan Arab Saudi, disebutkan hal-hal berikut mengenai kurikulum:

- Negara memberikan perhatiannya kepada kurikulum pendidikan sebagai sarana penting dalam dunia pendidikan dan pengajaran.
- Kurikulum yang dimaksud hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Menjadikan Islam, aturan-aturan mendasar dan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat sebagai rujukan.
 2. Selaras dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan bertujuan

- untuk mewujudkan harapan-harapan mereka.
- 3. Sesuai dengan tingkat dan kemampuan para siswa.
- 4. Dapat merealisasikan tuntutan yang seharusnya dimiliki para siswa dari target pembelajaran.
- 5. Seimbang, fleksibel, sesuai dengan lingkungan belajar dan kondisinya.
- Kandungan kurikulum:
 1. Tujuan-tujuan umum pendidikan yang terkait erat dengan tujuan negara dalam pendidikan dan pengajaran.
 2. Tujuan-tujuan khusus pada setiap jenjang pendidikan dan setiap mata pelajaran.
 3. Batasan jenjang-jenjang keilmuan, keterampilan aplikatif, orientasi-orientasi pemikiran dan perilaku yang semestinya dimiliki para siswa
 4. Arahan dan bimbingan yang mengarahkan para guru untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan dan menerapkan kurikulum yang ada.
 5. Kegiatan-kegiatan pendamping yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan.
 6. Target-target pada setiap satuan dari kurikulum.
 7. Standar penilaian kecakapan para siswa.
- Buku ajar hendaknya sesuai dengan ajaran Islam, benar secara bahasa, memenuhi tuntutan kurikulum dan target-targetnya: keilmuan, praktek dan perilaku/akhlaq.
- Aturan tentang pembuatan buku ajar menjelaskan tentang spesifikasi buku dan prosedurnya (SOP) sehingga terbit dalam bentuk terbaik.
- Pihak-pihak terkait hendaknya memberikan perhatian khusus berkenaan dengan buku guru sesuai dengan kebutuhan, yang dapat membantu para guru untuk memahami kebijakan pendidikan pemerintah dan membantu mereka dalam proses belajar mengajar.

Pada bulan Februari tahun 1967 M, menteri-menteri pendidikan negara-negara Arab mengadakan konferensinya yang ketiga di Kuwait dengan agenda: evaluasi sistem pendidikan. Di antara poin kesepakatan yang dicapai adalah pengembangan kurikulum, buku-buku pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Pengembangan kurikulum pendidikan di Arab Saudi telah dimulai sejak dibentuknya badan pengembangan pendidikan bidang kurikulum dengan dibentuknya keluarga-keluarga nasional (usar wathaniyah). Kemudian dibentuk komite tinggi program dan kurikulum. Kemudian dibentuk komite strategis pengembangan kurikulum pada tahun 1419/1420 H (1998/1999 M) yang terwujud dalam program komprehensif untuk pengembangan kurikulum.

Pada tanggal 26/1/1428 H (13/2/2007 M) melalui keputusan Majelis/Dewan Menteri dibentuklah Proyek Nasional “Proyek Raja Abdullah untuk Pengembangan Pendidikan Umum”. Diantara program unggulannya adalah pengembangan kurikulum dan bahan pembelajaran.

Untuk tingkat pendidikan umum, kurikulum yang dipakai bertumpu kepada buku ajar yang digunakan di setiap jenjang. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran melalui Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan badan-badan terkait terus memantau dan mengembangkan buku ajar yang dipakai di semua jenjang pendidikan umum secara berkala.

5.1 Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Taman kanak-kanak dalam struktur kependidikan di Saudi Arabia, berada di bawah tanggung jawab langsung Direktorat Pendidikan Perempuan sejak tahun 1400 H (1979 M). Karenanya, kurikulum pendidikan pada jenjang ini, mengikuti kurikulum yang ada di Direktorat Pendidikan Perempuan. Ada beberapa hal penting yang menjadi acuan dalam kurikulum taman kanak-kanak:

1. Kesesuaiannya dengan karakter pertumbuhan anak-anak dari sisi fisik, akal, kejiwaan, sosial dan yang sejalan dengan karakter pembelajaran mereka pada jenjang ini.
2. Kaya dengan kegiatan dan pengalaman yang dapat diserap oleh peserta didik dan membantu tumbuh kembang kemampuan mereka pada jenjang ini.
3. Fokus terhadap masa kini, masa depan, pengalaman, kegiatan: praktek dan gerak anak dan tidak hanya mengandalkan sistem hafalan dan dikte.

Beberapa kegiatan penting yang terdapat dalam kurikulum ini adalah:

1. Pendidikan agama, dengan penekanan pada sisi penanaman nilai-nilai keimanan, pengakuan akan kekuasaan Allah dan kemampuan dasar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan akhlak yang terpuji.
2. Bahasa Arab, dengan penekanan pada kemampuan dasar berbahasa, cara berfikir dan mengungkapkan, persiapan untuk membaca dan menulis dan memperbaiki kesalahan dalam pengucapan. Juga pada penanaman rasa senang membaca dan menjaga buku yang dimiliki serta melatih untuk mendengarkan dengan baik.
3. Berhitung, dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan dasar untuk berfikir dalam kaitannya dengan angka.
4. Ilmu-ilmu sains, dengan tujuan agar peserta didik tumbuh rasa ingin tahunya, berfikir dan beres eksperimen secara sederhana.
5. Pendidikan seni, dengan tujuan agar peserta didik tumbuh kemampuan seninya, terlatih untuk berkreasi, berinovasi dan bernovasi, tersingkap bakat seninya, mengenal bahan-bahan yang digunakan dalam pelajaran juga kaitannya dengan rasa dan fikiran dan menumbuhkan kembangkan indera.
6. Pendidikan jasmani, agar peserta didik tumbuh dan berkembang fisiknya dengan baik dan seimbang, terbiasa dengan hal-hal yang baik dalam masyarakat, memberikan kesempatan untuk inovasinya dan memenuhi keinginannya untuk bermain.
7. Pendidikan kesehatan, agar peserta didik memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk berperilaku sehat, senang untuk selalu bersih serta membiasakan mereka untuk memperhatikan dan menghargai etika umum.
8. Pendidikan sosial, agar peserta didik terdorong untuk saling membantu dan bekerjasama dalam sebuah *team work*, menyatu dengan masyarakat dan dapat memahami peran dan kedudukannya dalam masyarakat, membiasakan diri agar memiliki kepedulian terhadap orang lain, mendorong untuk melaksanakan layanan umum bagi sekolah sesuai dengan kemampuan.

Proyek Raja Abdullah bin Abdul Aziz mengenai pengembangan kurikulum pendidikan umum, dan taman pendidikan kanak-kanak

mendapat banyak perhatian dan menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Kerajaan Saudi Arabia.

5.2 Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar

Kurikulum pendidikan sekolah dasar pertama lahir di Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1345 H (1926 M). Kurikulum ini menitikberatkan kepada pendidikan ilmu-ilmu agama dengan membekali siswa peserta didik kadar ilmu-ilmu agama yang cukup yang dapat mengantarkannya untuk memiliki rasa cinta dan pengabdian kepada tanah air.

Pada tahun 1399 H (1978 M), kurikulum ini mengalami perubahan dan perbaikan. Kurikulum tersebut tetap menitikberatkan pada pendidikan ilmu-ilmu agama namun disertai beberapa penambahan. Berikut tabel gambaran kurikulum tersebut:

Tabel 5.1. Gambaran Kurikulum

Mata Pelajaran		Kelas				
		Satu	Dua	Tiga	Empat	Lima
Ilmu-Ilmu Agama	Al Qur'anul Karim	7	7	7	6	4
	Tajwid	-	-	-	1	1
	Tauhid	1	1	1	1	2
	Fiqh	1	1	1	1	1
	Hadits	-	-	-	-	1
	Tafsir	-	-	-	-	1
Bahasa Arab	Huruf dan Menulis	7	7	-	-	-
	Membaca dan Menelaah	-	-	3	2	2
	Menyanyi dan Hafalan	2	2	2	2	1
	Dikte	-	-	2	2	1
	Kaligrafi	-	-	1	1	1
	Mengarang	-	-	1	1	1
Sosial	Nahwu (Kaedah Bahasa)	-	-	-	1	2
	Geografi	-	-	-	1	1
	Sejarah	-	-	-	1	1
		4	4	4	5	5
Matematika		2	2	2	2	3
Sains dan Pendidikan Kesehatan		2	2	2	1	1
Menggambar dan Keterampilan		2	2	2	2	2
Pendidikan Olahraga		28	28	28	30	30
Jumlah						

Pada tahun pelajaran 1415/1416 H (1994/1995 M) Kementerian Pendidikan mengujicobakan kurikulum baru untuk kelas satu Sekolah Dasar, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.2. Ujicoba Kurikulum Baru SD

Mata Pelajaran		Semester Satu	Semester Dua
Ilmu-ilmu Agama	Al Qur'an Kariim	7	7
	Tauhid	-	1
	Fiqih	-	1
	Jumlah	7	9
Bahasa Arab	Membaca, Menulis, Menyanyi	12	11
	Jumlah	12	11
Matematika		-	4
Sains		-	1
Pendidikan Seni		2	1
Akhlaq dan Moral		2	-
Pendidikan Olahraga dan Permainan		5	2
Jumlah		28	28

Kurikulum Sekolah Dasar mengalami puluhan kali perubahan dan perbaikan. Hanya saja perubahan-perubahan ini baru pada sisi teknis dan format, belum menyentuh pada substansi perubahan yang terjadi pada masyarakat Arab Saudi dan yang tak kalah pentingnya terkait dengan perkembangan dan tantangan global ke depan. Karenanya beragam upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan.

Kementerian Pendidikan dan Pengajaran merilis buku ajar yang sekarang dipakai di Sekolah-Sekolah Dasar Negeri di Saudi Arabia. Untuk kelas satu sampai dengan kelas tiga, ada lima buku ajar: 1. Lughati (bahasaku); 2. Pendidikan Seni; 3. Pendidikan Keluarga; 4. Fiqih dan Etika; serta 5. Tauhid. Untuk kelas empat dan enam, ada delapan buku ajar: 1. Bahasaku yang indah; 2. Pendidikan Seni; 3. Pendidikan Keluarga; 4. Fiqih dan Etika; 5. Hadits dan Sirah (sejarah Nabi SAW); 6. Pendidikan Sosial dan Kewarganegaraan; 7. Tajwid; serta 8. Tauhid. Untuk kelas lima, jumlah buku ajar sama dengan kelas empat dan enam, hanya dikurangi buku tajwid.

5.3 Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, mengacu kepada tujuan pendidikan pada jenjang ini, seperti yang telah digariskan dalam kebijakan pendidikan, yaitu menitikberatkan kepada hal-hal berikut:

1. Berkembangnya peserta didik secara komprehensif pada semua sisi pertumbuhannya: rohani, jasmani, akal, sosial dan perasaan.
2. Menyiapkan peserta didik secara keilmuan di lingkungan di mana ia hidup.
3. Memperkuat pengertian dan pemahaman “nasionalisme” pada peserta didik dan memberikan aktifitas yang semakin meneguhkan kebanggaan mereka kepada negaranya, sebagai negara Islam dan dunia Arab yang besar.
4. Menyiapkan peserta didik untuk berkontribusi kepada lingkungan dan sekolah.

Sekolah pada jenjang ini meliputi beberapa model: Sekolah Menengah Pertama Hafalan Al Qur'an (*Tahfidzul Qur'an*), Sekolah Menengah Pertama Ilmu-ilmu Pengetahuan Islam, dan Sekolah Menengah Pertama Umum.

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Pertama Hafalan Al Qur'an (*Tahfidzul Qur'an*):

Tabel 5.3. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Hafalan Al Qur'an (*Tahfidzul Qur'an*)

Bahan Ajar	Bidang studi	Kelas		
		Satu	Dua	Tiga
Pelajaran Agama (19 jam/pekan)	Al Qur'anul Karim	10	10	10
	Tauhid	2	2	2
	Tafsir	2	2	2
	Hadits	1	1	1
	Tajwid dan Ulumul Qur'an	2	2	2
	Fiqih	2	2	2

Bahasa Arab (6 jam/pekan)	Grammer	2	2	2
	Teks dan Hafalan	1	1	1
	Menelaah	1	1	1
	Mengarang	1	1	1
	Kaligrafi dan Dikte	1	1	1
Sosial (2 jam/pekan)	Sejarah	1	1	1
	Geografi	1	1	1
Pelajaran Lain (10 jam/pekan)	Sains dan kesehatan	2	2	2
	Bahasa Inggris	3	3	3
	Matematika	4	4	4
	Pendidikan Jasmani dan Seni	1	1	1

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Pertama Ilmu-Ilmu Pengetahuan Islam:

Tabel 5.4. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Ilmu-Ilmu Pengetahuan Islam

Mata Pelajaran		Kelas		
		Satu	Dua	Tiga
Ilmu-Ilmu Syariah (12 jam)	Al Qur'anul Karim	3	3	3
	Tafsir	2	2	2
	Hadits	2	2	2
	Tauhid	2	2	2
	Fiqih	3	3	3
Ilmu-Ilmu Bahasa Arab (10 jam)	Nahwu dan Sharf	4	4	4
	Mengarang	1	1	1
	Teks Sastra	2	2	2
	Menelaah	1	1	1
	Dikte	1	1	1
	Kaligrafi	1	1	1
Ilmu-Ilmu Sosial (4 jam)	Geografi	2	2	2
	Sejarah	2	2	2
Ilmu-Ilmu Lain	Matematika	2	2	2
		2	2	2
Jumlah Total		30	30	30

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Pertama Umum Kelas Siang:

Tabel 5.5. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Umum Kelas Siang

Mata Pelajaran ajaran	Jumlah Jam Dalam Sepekan		
	Kelas Satu	Kelas Dua	Kelas Tiga
Ilmu-Ilmu Agama	8	8	8
Ilmu-Ilmu Bahasa Arab	6	6	6
Ilmu-Ilmu Sosial	4	4	4
Ilmu-Ilmu Umum dan Kesehatan	4	4	4
Matematika	4	4	4
Bahasa Inggris	4	4	4
Pendidikan Seni	2	2	2
Pendidikan Olahraga	1	1	1
Jumlah	33	33	33

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Pertama Umum Kelas Malam:

Tabel 5.6. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Umum Kelas Malam

Mata Pelajaran ajaran	Jumlah Jam Dalam Sepekan		
	Kelas Satu	Kelas Dua	Kelas Tiga
Pendidikan Islam	5	5	5
Ilmu-Ilmu Bahasa Arab	4	4	4
Bahasa Inggris	3	3	3
Ilmu-Ilmu Sosial	2	2	2
Matematika	3	3	3
Sains	3	3	3
Jumlah	20	20	20

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Pertama Umum untuk Putri:

Tabel 5.7. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Umum untuk Putri

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Dalam Sepekan		
	Kelas Satu	Kelas Dua	Kelas Tiga
Ilmu-Ilmu Agama	8	8	8
Ilmu-Ilmu Bahasa Arab	6	5	5

Ilmu-Ilmu Sosial	4	4	4
Ilmu-Ilmu Umum dan Kesehatan	4	4	4
Matematika	4	4	4
Pendidikan Seni	2	2	2
Pendidikan Kewanitaan	2	2	2
Bahasa Inggris	4	4	4
Jumlah	34	33	33

Kementerian Pendidikan dan Pengajaran merilis buku ajar yang saat ini digunakan di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri di Saudi Arabia. Untuk kelas satu sampai dengan kelas tiga, ada sembilan buku ajar, yaitu: 1. Bahasaku yang Abadi; 2. Pendidikan Seni; 3. Komputer dan Teknologi Informasi; 4. Pendidikan Keluarga; 5. Fiqih; 6. Hadits; 7. Studi Sosial dan Kewarganegaraan; 8. Al Qur'anul Karim dan Tafsirnya; serta 9. Tauhid.

5.4 Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Kurikulum Sekolah Menengah Atas, mengacu kepada tujuan pendidikan pada jenjang ini, seperti yang telah digariskan dalam kebijakan pendidikan, menitikberatkan kepada hal-hal berikut:

1. Penyempurnaan tumbuh kembang peserta didik secara seimbang, sejalan dan komprehensif.
2. Menyiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan nyata.
3. Menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sekolah pada jenjang ini meliputi beberapa model yaitu Sekolah Menengah Atas Hafalan Al Qur'an, Sekolah Menengah Atas Ilmu-Ilmu Pengetahuan Agama, dan Sekolah Menengah Atas Umum.

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Pertama Hafalan Al Qur'an (*Tahfidzul Qur'an*):

Tabel 5.8. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Hafalan Al Qur'an (*Tahfidzul Qur'an*)

Mata Pelajaran	Cabang Mata Pelajaran	Kelas			Jumlah Jam Dalam Tiga Kelas
		Satu	Dua	Tiga	
Studi Al Qur'an	Bacaan dan Hafalan	5	5	5	35
	Qiraat dan Sejarahanya	3	4	4	
	Ulumul Qur'an	3	-	-	
	Tafsir Al Qur'an	2	2	2	
Ilmu-Ilmu Keislaman	Hadits dan Pengetahuan Islam, Tauhid	1	1	1	15
	Fiqh dan Ilmu Waris	1	1	1	
	Pengantar Ushul Fiqih dan Sejarah Hukum Islam	1	1	1	
	Pengantar Ilmu Hadits	-	-	3	
	Nahwu dan Sharf	-	3	-	
Bahasa Arab	Balaghah dan Naqd (Kritik)	3	3	3	27
	Sastra dan Teks	1	2	2	
	Mengarang dan Perpustakaan	3	2	2	
	Sejarah	2	2	2	
Sosial	Geografi	2	2	2	12
Bahasa Inggris		3	3	3	9
Pendidikan Jasmani		1	1	1	3
Jumlah		33	34	34	101

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Atas Hafalan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Islam:

Tabel 5.9. Kurikulum Sekolah Menengah Atas Hafalan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Islam

Mata Pelajaran		Kelas Satu	Kelas Dua	Kelas Tiga
Ilmu-Ilmu Syariah (14 jam/pekan)	Al Quranul Karim	3	3	3
	Tafsir dan Dasar-Dasarnya	2	2	2
	Hadits			
	Tauhid			
	Aqidah, Agama-agama dan Madzhab-Madzhab Kontemporer	-	-	2
	Fiqih	3	3	3
	Ilmu Waris	2	1	-
	Mushthalah Hadits	-	1	-
	Ushul Fiqih	-	-	2
Ilmu-Ilmu Bahasa Arab (10 jam/pekan)	Nahwu dan Sharf	4	4	4
	Balaghah dan Naqd (Kritik)	2	2	1
	Puisi dan Rima	-	-	1
	Sastra dan Sejarahnya	2	2	2
	Menelaah	1	1	1
	Mengarang	1	1	1
Sosial dan Bahasa Inggris (6 jam/pekan)	Sejarah	2	2	2
	Geografi	2	2	2
	Bahasa Inggris	2	2	2
Total		30	30	30

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Atas Umum:

Tabel 5.10. Kurikulum Sekolah Menengah Atas Umum

Mata Pelajaran	Cabang Mata Pelajaran	Kelas Satu	Jurusan Agama dan Bahasa			Jurusan Manajemen dan Sosial		Jurusan Ilmu Alam		Jurusan Ilmu-Ilmu Aplikatif (Teknologi)	
			Kelas Dua	Kelas Tiga		Kelas Dua	Kelas Tiga	Kelas Dua	Kelas Tiga	Kelas Dua	Kelas Tiga
Ilmu-Ilmu Syariah	Al Quranul Karim	1	3	3	2	2	1	1	1	1	
	Tafsir	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	Hadits	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	Tauhid	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	Fiqih	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah		5	12	12	6	6	5	5	5	5	5
Ilmu-Ilmu Bahasa Arab	Nahwu dan Sharf	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
	Balaghah dan Naqd (Kritik)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	Sastra	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	Menelaah	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
	Mengarang	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6	9	9	4	4	3	3	3	3	3
Ilmu-Ilmu	Ilmu Manejemen	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-

Administrasi	Ilmu Ekonomi	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Akutansi	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	5	6	-	-	-	-	-
Ilmu-Ilmu Sosial	Sejarah	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
	Geografi	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Ilmu Jiwa	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Sosiologi	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Jumlah		2	3	3	5	4	-	-	-	-	-
Sains	Fisika	2	-	-	-	-	4	4	Praktek		Praktek
	Kimia	2	-	-	-	-	4	4			
	Biologi	2	-	-	-	-	4	4			
	Geologi	-	-	-	-	-	1	1			
Jumlah		6	-	-	-	-	13	13			13
Matematika dan Statistik	Matematika	5	-	-	3	3	6	6	6	6	6
	Statistik	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Jumlah		5	-	-	4	4	6	6	6	6	6
Bahasa Inggris		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Komputer		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perpustakaan dan Penelitian		1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Pendidikan Olahraga		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total		32	32	32	32	32	34	34	34	34	34

Berikut ini adalah tabel kurikulum Sekolah Menengah Atas Umum Untuk Putri pada tahun 1414 H (1993 M):

Tabel 5.11. Sekolah Menengah Atas Umum Untuk Putri pada tahun 1414 H (1993 M)

Mata Pelajaran	Kelas Satu	Kelas Dua		Kelas Tiga	
		Sastra	Eksak	Sastra	Eksak
Ilmu-Ilmu Agama	4	4	4	3	3
Bahasa Arab	9	11	4	11	3
Ilmu-Ilmu Sosial	4	8	-	9	-
Matematika	5	-	7	-	7
Sains	6	-	11	-	11
Bahasa Inggris	4	4	4	4	4
Ekonomi Rumah Tangga dan Pendidikan Seni	2	2	2	-	-
Perpustakaan	1	1	-	1	-
Jumlah	35	30	32	28	28

DAFTAR REFERENSI

1. Education Policy in the Kingdom of Saudi Arabia (PhD thesis, King Saud University), Yahya Said Al-Qahtani englishe (میلعتل اقسایس)، (دوعس اكلمل اعماج قروتكد الاسر) ةيدوعسل اةيبرعل اكلمل ايف (يناطحقل احم ىيحي دي عس)
2. The contribution of the private sector in the financing of public education in the Kingdom of Saudi Arabia (message Dr. King Saud University), Fahd bin Abbas Al-Otaibi (يف صااال ااطقل اماهسا)، قروتكد الاسر) ةيدوعسل اةيبرعل اكلمل ايف ماعل ميلعتل ليومت (يبيعتل سابع نب دهف)، (دوعس اكلمل اعماج)
3. Strategy for the development of public education, and the Ministry of Education (ةيبرتل قرازو، ماعل ميلعتل ريوطت ةيجتارتسا) (ميلعتل او)
4. Future investments of the private sector in public education in the Kingdom of Saudi Arabia Alobeih (Message doctor Umm Al Qura University), Mohammed bin Said Abdullah Al-Qahtani (يف ماعل ميلعتل ايف صااال ااطقل ةيلبقتسملا تارامثتسال) نب دمحم، (يرقل اما اعماج قروتكد الاسر) ةيدوعسل اةيبرعل اكلمل ايف (يناطحقل اكلمل دب عدي عس)
5. The education system and policy, DZ Abdul Hamid Bin Abdul Majeed bin Abdul Hamid Majid (دب ع ز د، هتسايسو ميلعتل ماظن) (ديجم ديمل دب ع نب ديجمل دب ع نب ديمل)

6. The National Commission for Academic Accreditation and Assessment (www.ncaaa.org.sa) (يـمـدكـأـل دامتـعـال او ميـوقـتـلـل ةـيـنـطـولـا ةـئـيـهـلـا)
7. National Center for measurement and development in public education (www.qiyas.sa) (مـاعـال مـيـلـعـتـلـا يـف رـيـوطـتـلـا او سـاـيـقـلـل يـنـطـولـا زـكـرمـلـا)
8. The education system in Saudi Arabia, d. Abdul Aziz bin Abdullah Hyacinth and others, Dar Khuraiji for publication and distribution, Riyadh, Sixth Edition 0.1419 AH / 1998 AD (يـف مـيـلـعـتـلـا مـاـظـن) لـبـنـسـلـا هـلـل دـبـع نـب زـيـزـعـال دـبـع د. ةـيـدـوعـسـلـا ةـيـبـرـعـال ةـكـلـمـلـا ةـسـدـاسـلـا ةـعـبـطـلـا ةـضـاـيـرـلـا ةـيـزـوتـلـا او رـشـنـلـل يـجـيـرـخـلـا راد ةـنـورـخـا (مـ1419هـ / 1998م)
9. Education in Saudi Arabia, Mohammed bin Fahid Ahudaana, library, educational documents, Riyadh 1419/1999 (يـف مـيـلـعـتـلـا) قـئـاـثـولـا ةـبـتـكـم ةـيـنـاـيـدـهـلـا دـيـهـف نـب دـمـحـم ةـيـدـوعـسـلـا ةـيـبـرـعـال ةـكـلـمـلـا (مـ1419هـ / 1999م) ةـضـاـيـرـلـا ةـيـوـبـرـتـلـا
10. Project, King Abdullah bin Abdul Aziz for the development of public education (ريـوطـتـلـا زـيـزـعـال دـبـع نـب هـلـل دـبـع لـكـلـمـلـا عـورـشـم) (مـاعـال مـيـلـعـتـلـا) (<http://www.tatweer.edu.sa/>)

-o0o-

III

Sistem Pendidikan di Australia



Sumber foto gedung Opera House dan jembatan Sydney Harbour: viewallpaperhd.com

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Sc.
Atase Pendidikan di Canberra

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Australia

Sistem pendidikan di Australia meliputi pendidikan dasar, menengah, dan lanjut dimana pendidikan dasar dan menengah terdiri atas *primary* (6 tahun), *secondary* (4 tahun), dan *senior secondary* (2 tahun). Wajib belajar diperuntukkan bagi setiap warga negara berusia 6 sampai dengan 16 tahun. Sementara itu, pendidikan lanjut terdiri atas jalur pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Dalam sistem pendidikan di Australia tidak dikenal Sekolah Menengah Kejuruan. Siswa pada kelas 11 dan 12 diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan untuk memasuki jalur perguruan tinggi atau jalur vokasi.

Dalam menjamin kualitas pendidikan, pemerintah federal menetapkan kualifikasi pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi berdasarkan *learning outcomes* untuk setiap mata pelajaran yang meliputi: keahlian dasar, berpikir, dan keahlian personal. Implementasi, pengawasan, dan penilaian terhadap kualifikasi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing negara bagian atau *territory* dan diakreditasi oleh agen penjamin standar mutu pendidikan tinggi di masing-masing negara bagian atau *territory*. Dengan kewenangan otonomi ini, terjadi perbedaan kurikulum dan cara penilaian dari masing-masing negara bagian, meskipun kualitas tidak jauh berbeda.

Perbedaan kurikulum tersebut berdampak terhadap siswa yang ingin meneruskan studi di negara bagian lain. Sebagai catatan, Australia terdiri atas enam negara bagian dan dua wilayah *territory*, masing-

masing memiliki kurikulum pendidikan yang berbeda-beda. Sebagai antisipasi, pemerintah federal mengembangkan model kurikulum *Australian Baccalaureate* dan *International Baccalaureate* (untuk *Primary Years Program*, *Middle Years Program*, dan *IB Diploma*) yang diterapkan di beberapa sekolah maju di masing-masing negara bagian dan *territory*. Dengan kedua kurikulum ini, siswa tidak akan ada kesulitan untuk melanjutkan studi, baik di negara bagian lain atau di luar negeri.

Menyangkut penilaian ketuntasan belajar, sekolah-sekolah diberi kesempatan untuk melakukan ujian secara mandiri, khususnya untuk tingkat *Primary* dan *Secondary*. Sedangkan untuk *Senior Secondary* ujian dilaksanakan melalui 30% ujian sekolah dan 70% ujian yang dikoordinasikan oleh masing-masing negara bagian atau *territory*. Untuk mengetahui perbandingan mutu setiap sekolah, pemerintah federal melaksanakan ujian setahun sekali dengan sistem *sampling*. Hasilnya dapat diakses di website *My Way*. Selanjutnya untuk mengetahui ranking di antara negara-negara OECD dan internasional, Australia mengizinkan lembaga-lembaga assesmen internasional untuk melakukan penilaian, baik uji literasi, numerasi, maupun mata pelajaran eksak dan sosial.

Dari hasil analisis, terdapat beberapa perbedaan antara sistem pendidikan di Australia dan Indonesia, menyangkut: pengelolaan pendidikan vokasi, sistem evaluasi pendidikan, dan proses penyusunan kurikulum. Di Australia, pendidikan vokasi dilaksanakan sebagai jalur pendidikan lanjutan yang umumnya dibiayai oleh masing-masing negara bagian atau *territory* untuk memenuhi pasar kerja dan industri. Sehingga, sertifikasi pendidikan vokasi dilakukan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh kalangan industri. Untuk penilaian keberhasilan belajar, Australia tidak menerapkan ujian nasional, tetapi ujian negara bagian yang digabung dengan ujian sekolah untuk kelas 11 dan 12.

Dalam penyusunan kurikulum, pemerintah Australia melakukan secara bertahap dan sangat hati-hati. Kurikulum disusun melalui tahapan-tahapan uji coba dalam bentuk *pilot project*. Sebagai informasi, kurikulum yang sekarang masih dalam tahapan ujicoba tersebut telah disusun sejak tahun 2009. Disamping penyusunan kurikulum yang ketat, setiap sekolah juga dilengkapi fasilitas yang sangat memadai.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	97
DAFTAR ISI	99
1. Sistem Pendidikan di Australia	101
2. Kurikulum Pendidikan di Australia	105
3. Sistem Evaluasi dan Penilaian	115
4. Sekolah di Luar Sistem Negara Bagian dan Territory	119
5. Kurikulum pada Setiap Negara Bagian	123
6. Perbandingan Sistem Pendidikan di Australia dan di Indonesia	147
DAFTAR REFERENSI	151

1

Sistem Pendidikan di Australia

Benua Australia di bagi ke dalam 8 wilayah yang terdiri dari enam negara bagian, yaitu: New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, dan Western Australia; serta 2 *territory*, yaitu: *Australian Capital Territory* dan *the Northern Territory*.

Ditinjau dari segi pemerintahan, Australia memiliki tiga tingkat pemerintahan, yaitu pada tingkat tertinggi adalah pemerintahan pusat (*federal*), kemudian tingkat pemerintahan lainnya adalah negara bagian (*state*) dan *territory*. Dalam pengelolaan pendidikan, ketiga tingkat ini berperan dan bekerjasama dalam merancang dan membiayai pendidikan sesuai dengan perannya masing masing.

1.1 Sekilas Sistem Pendidikan di Australia

1.1.1 Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada umumnya, sistem pendidikan dasar dan menengah di seluruh Australia hampir sama dengan hanya ada sedikit perbedaan di beberapa negara bagian dan *territory*. Pemerintah menerapkan sistem wajib belajar untuk anak-anak berusia 6 sampai 16 tahun. Usia sekolah ini jika diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan adalah wajib belajar tahun 1 sampai tahun ke 9 atau ke 10 (tergantung dari negara bagian)

Sistem pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 3 tingkatan, yaitu *Primary School*, *Secondary School* dan *Senior Secondary school*. Siswa yang memasuki *primary school* pada umumnya berumur 7 atau 8 tahun. Dalam sistem *primary school* ini termasuk taman kanak-kanak (*kindergarten*) dan di beberapa negara bagian juga ada tahap persiapan sebelum masuk ke taman kanak-kanak.

Siswa akan menghabiskan waktunya selama 3 atau 4 tahun pada tingkat *Secondary School*, yaitu pada tahun ke 7-10 atau ke 8-11, sedangkan pada tingkat *senior secondary school* siswa menghabiskan waktunya selama 2 tahun, yaitu pada tahun ke 11 dan 12.

1.1.2 Pendidikan Lanjutan

Di dalam sistem pendidikan Australia, pendidikan lanjutan memiliki 2 jalur yang memungkinkan siswa lulusan pendidikan menengah dapat memilih pendidikan lanjutannya sesuai dengan keinginannya. Kedua jalur pilihan tersebut adalah pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Secara sistem, pendidikan vokasi (*Vocational Education Training*, VET) bukan termasuk ke dalam sistem pendidikan tinggi. Sistem pendidikan vokasi yang umumnya berupa *Technical and Further Education* (TAFE) lebih menekankan pada keahlian tertentu yang menyiapkan lulusannya untuk dapat langsung bekerja di dunia industri.

1.1.3 Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar yang digunakan di seluruh sekolah dan di perguruan tinggi adalah bahasa Inggris. Beberapa sekolah ada yang menerapkan sistem bilingual, yaitu bahasa Inggris dan salah satu pilihan bahasa internasional lainnya (bahasa Indonesia, Jepang, Korea, Hindi, Perancis, Jerman, dan lain-lain). Di beberapa sekolah tertentu digunakan juga bahasa lokal (Aborigin).

Pelajaran bahasa asing dimungkinkan dimulai pada tingkat *preschool*, akan tetapi pada umumnya mulai diterapkan pada tingkat *secondary school*. Bahasa internasional yang ditawarkan di sekolah-sekolah di

Australia adalah: bahasa Arab, Indonesia, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Mandarin, Yunani Modern dan Spanyol.

1.1.4 Tahun Akademik

Australia memakai sistem tahun akademik mulai dari Februari sampai dengan Desember. Biasanya periode tersebut dibagi lagi kedalam 3 atau 4 *term*. Pada umumnya negara bagian menerapkan sistem dengan 4 *term*, kecuali Tasmania yang menerapkan sistem 3 *term*.

Pada tingkat VET, tahun akademik dimulai pada akhir bulan Januari dan diakhiri pada pertengahan Desember. Di beberapa negara bagian dan territory, tahun ajaran ada yang dibagi ke dalam 2 semester dan ada juga yang menggunakan sistem tri-semester.

Sebagian besar perguruan tinggi menerapkan tahun akademik mulai dari bulan Februari dan diakhiri pada bulan November. Sebagian besar perguruan tinggi menerapkan sistem semester. Di beberapa universitas tertentu ada yang menggunakan sistem tri-semester. Beberapa institusi non universitas melaksanakan programnya sepanjang tahun.

1.1.5 Sistem Administrasi dan Pendanaan

Sistem administrasi dan pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pengaturannya tergantung pada sektor pendidikan dan legislasinya.

Pemerintah Federal dan negara bagian berkerjasama pada tingkat kementerian untuk merancang sistem pendidikan dan menjalankannya. Kerjasama ini dilakukan melalui *Standing Council* pada tingkat *tertiary education, skills and employment* (SCOTese) dengan melaporkannya kepada pemerintah Australia (COAG) dan didukung oleh sekretariat *National Tertiary Education, Skills and Employment* (NATESE). SCOTese menggantikan *Ministrial Council for Tertiary Education and Employment* (MCTEE) pada tahun 2011.

2

Kurikulum Pendidikan di Australia

2.1 Australian Qualification Framework (AQF)

Pada tahun 1995 pemerintah Australia merancang *Australian Qualification Framework* (AQF) dan menerapkannya secara penuh pada tahun 1999. Pada bulan Juli 2011, telah dilakukan revisi terhadap AQF. Perbedaan principal antara AQF yang lama dan yang telah direvisi adalah ditetapkan gelar Bachelor Honours sebagai gelar yang berdiri sendiri. Pada AQF yang lama, gelar ini merupakan bagian dari gelar *Bachelor*. Pada AQF yang telah direvisi terdapat 10 tingkat kualifikasi, lihat Gambar 2.1.

AQF merupakan kebijakan nasional yang mencantumkan kualifikasi mulai dari sektor *tertiary education* (pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi) sampai pada ijazah di tingkat sekolah (*the senior secondary certificate of education*). Dalam sistem AQF dicantumkan tingkatan dan kualifikasi untuk masing-masing tingkat. Pada satu tingkat dapat saja memiliki lebih dari satu macam kualifikasi,

Kementerian pendidikan, training dan tenaga kerja pada level pemerintah pusat, negara bagian dan *territory* bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan AQF. Dalam menjalankan tugasnya, AQF council melaporkan kepada *Standing Council on Tertiary Education Skills and Employment* (SCOIESE) tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan AQF.

Secara umum, AQF lebih menekankan pada fleksibilitas dan keterkaitan serta tahapan pada masing-masing sektor dan bentuk kualifikasinya yang disesuaikan dengan dunia kerja. Secara umum AQF menentukan *learning outcomes* pada setiap tingkat AQF, menentukan spesifikasi AQF untuk pengembangan dan akreditasi, menerbitkan kualifikasi AQF, menentukan keterkaitan masing masing kualifikasi, merevisi jenis kualifikasi dengan cara menambah dan menghilangkannya serta mendata *accrediting bodies*, *awarding bodies* and kualifikasi.

Pada Gambar 2.1 kesepuluh kualifikasi yang dicantumkan adalah kualifikasi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, pendidikan vokasi dan training (VET) dan pendidikan menengah. Beberapa kualifikasi ditawarkan baik oleh Perguruan tinggi maupun VET. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan yang erat antara perguruan tinggi dan VET. Pada tingkat VET terdapat jalur yang memungkinkan mahasiswanya memilih jalur khusus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Jika disimak lebih lanjut, tingkat yang ada pada AQF mengacu pada kompleksitas dan kedalaman ilmu dan keahlian yang diperlukan oleh para lulusan. Kedalaman ilmu ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam *learning outcome* pada tingkat tersebut (disebut sebagai kriteria tingkat). Setiap kualifikasi dijelaskan berdasarkan *learning outcomes*.



Gambar 2.1 Australian Qualification Framework (AQF) (Sumber: Australian Qualification Farmework, 2013)

Kriteria tingkat dan macam kualifikasi dibuat berdasarkan *generic learning outcomes* yang meliputi keahlian dasar, keahlian umum, keahlian berpikir dan keahlian personal dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengetahuan: meliputi apa yang diketahui dan dimengerti oleh lulusan. Pengetahuan dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat spesifik dalam bidang tertentu atau berbagai bidang serta dapat bersifat terpisah atau secara kumulatif.
2. Keahlian: meliputi apa yang dapat dilakukan oleh lulusan. Hal ini dapat berupa kognitif, kreatif, teknis, komunikasi, interpersonal dan atau bersifat umum.
3. Penerapan pengetahuan dan keahlian: dalam konteks bagaimana seorang lulusan dapat menerapkan pengetahuan dan keahliannya.

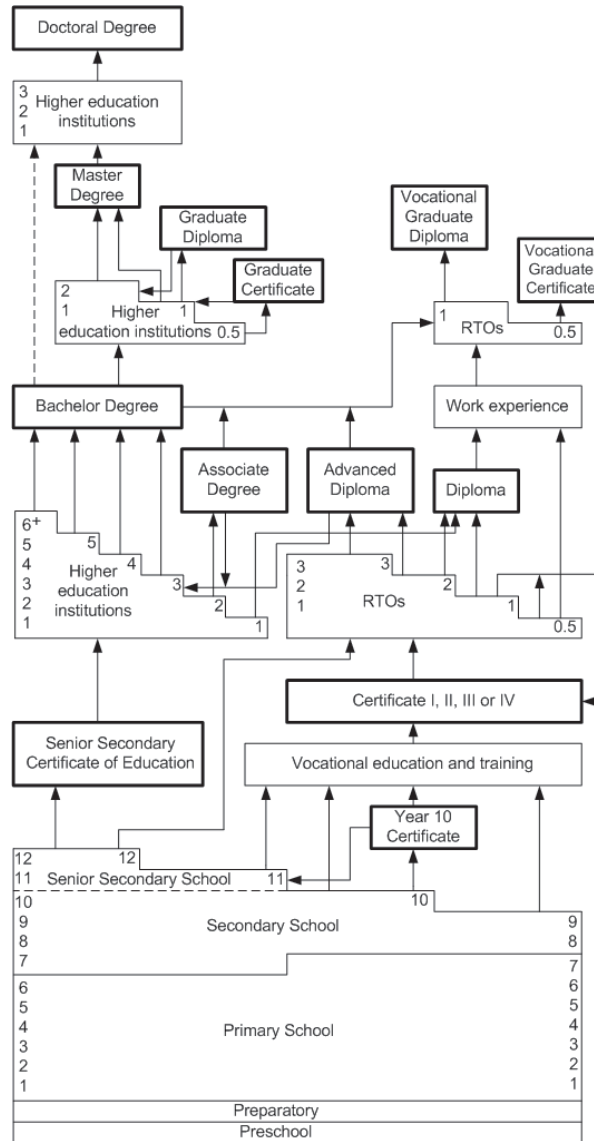
Hal ini didiskripsikan dalam bentuk tingkat kemandirian, tanggungjawab dan akuntabilitas.

Qualifikasi AQF dijamin dan diakreditasi oleh *Tertiary Education Quality and Standard Agency* (TEQSA), *Australian Skills Authority* (ASQA) atau otoritas akreditasi negara bagian dan territory yang meliputi juga sektor pendidikan menengah.

Perbedaan utama antara sistem pendidikan di Indonesia dan di Australia yang tercantum pada Gambar 2.2 adalah pada tingkat *secondary school*. Di Australia siswa pada umumnya menyelesaikan program *secondary school*-nya selama 4 tahun untuk selanjutnya selama 2 berikutnya melanjutkan ke tingkat *senior secondary*. Pada tingkat *senior secondary* siswa sudah diberikan mata ajaran pilihan yang mempersiapkan mereka masuk ke perguruan tinggi atau ke pendidikan vokasi. Melalui sistem ini, secara dini siswa sudah dapat menentukan pilihannya dan mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan pendidikannya sesuai dengan keinginannya.

Pada tingkat pendidikan lanjutan jalur perguruan tinggi perbedaan utama dengan sistem pendidikan di Indonesia terletak pada tingkat *bachelor*. Program ini ditempuh oleh mahasiswa selama tiga tahun untuk selanjutnya selama 1 tahun mahasiswa dapat mengikuti program *graduate diploma* atau *honors* sebelum melanjutkan ke tingkat S2 dan S3.

Keterkaitan antara pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi terletak pada tingkat *advanced diploma* yang ditawarkan di pendidikan vokasi. Melalui jalur ini lulusan pendidikan vokasi dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Sebaliknya banyak lulusan perguruan tinggi dengan gelar *bachelor* yang meneruskan pendidikannya di pendidikan vokasi untuk memperdalam keahliannya agar dapat bekerja di sektor industri yang memerlukan keahlian khusus.



Gambar 2.2 Diagram Sistem Pendidikan Australia (Sumber : Country Education Profile Australia 2013)

2.2 Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan dasar dan menengah di Australia meliputi *preschool*, *preparatory* (atau *kindergarten*), *primary school*, *secondary school* (atau *high*

school) dan *senior secondary school* (atau *college*). Secara keseluruhan pendidikan dasar dan menengah memerlukan waktu 13 tahun mulai yang meliputi tahap persiapan sampai pada *senior secondary*. Pemerintah Australia menerapkan sistem wajib belajar sampai siswa berumur 16 tahun.

Sebagaimana di Indonesia, terdapat beberapa macam sekolah. Secara umum sekolah di Australia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sekolah pemerintah dan sekolah non pemerintah (meliputi sekolah keagamaan seperti sekolah Katholik dan sekolah Islam). Di samping itu, terdapat pula sekolah yang berbasis pendidikan filosofi seperti Montessori dan Steiner. Seluruh sekolah di Australia harus terdaftar pada Departemen Pendidikan di negara bagian atau *territory*. Disamping itu semua sekolah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti infrastuktur dan pendaftaran guru. Kualitas infrastruktur dan guru harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.2.1 Kurikulum

Pada tahun 2008, *Ministerial Council for Education, Early Childhood Development and Youth Affairs* (MCEECDYA) memperkenalkan kurikulum nasional untuk sekolah mulai dari tingkat *foundation* (biasanya dikenal sebagai tahap persiapan atau taman kanak-kanak) sampai tahun ke 12. Kurikulum nasional yang diterapkan menggantikan berbagai kurikulum yang telah ada sebelumnya pada negara bagian dan *territory* untuk menjamin konsistensi dan kualitas pendidikan di Australia. Pengembangan kurikulum di Australia merupakan tanggung-jawab dari *Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority* (ACARA) yang merupakan organisasi independen dengan melakukan konsultasi dengan instansi pendidikan yang bertanggung-jawab di negara bagian dan *territory* masing-masing.

Pengembangan kurikulum nasional melalui beberapa tahapan berikut:

1. Fase 1: pengembangan mata ajaran Inggris, matematika, sains dan sejarah. Untuk tahun ke 10 telah dilakukan pada tahun 2008-2010 dan untuk tahun ke 11 dan ke 12 telah dilakukan pada tahun 2011

2. Fase 2: pengembangan mata ajaran geografi, bahasa dan kesenian. Untuk tahun ke 12 dilakukan pada tahun 2010-2012, dan
3. Fase 3: pengembangan mata ajaran kesehatan dan pendidikan olah raga, informasi dan teknologi informasi, desain dan teknologi, ekonomi, bisnis, kewarganegaraan. Untuk tahun ke 12 dilakukan pada tahun 2011-2013.

Sampai saat ini, penerapan kurikulum nasional di Australia masih dalam tahap transisi. Kebanyakan negara bagian dan territory masih menjadikannya sebagai *pilot project* di sekolah-sekolah tertentu saja, sebelum menerapkannya secara seluruhan pada semua sekolah. Implementasi kurikulum nasional pada tingkat *senior secondary* akan mulai tahun 2014.

Pada umumnya, kurikulum dalam setiap bidang pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, ruang lingkup, pencapaian standar (meliputi contoh kerja), kemampuan umum dan prioritas lintas kurikulum. Kesemuanya ini dikembangkan oleh para pakar yang tergabung dalam panel dan oleh staf kurikulum ACARA dengan mengacu pada kurikulum nasional dan *international assessment research*, kurikulum yang ada di tingkat negara bagian dan *territory* serta *Curriculum paper and shape of the Australian Curriculum* (dapat diakses di <http://www.acara.edu.au>).

2.2.2 Preschool

Program *Preschool* yang ditawarkan untuk anak-anak berumur 3-5 tahun tidak bersifat wajib. Program ini bersifat paruh waktu dan terdiri dari beberapa sesi setengah hari atau setara dengan sehari penuh dan mengkombinasikan antara pembelajaran terstruktur dan aktivitas kreatif individu.

2.2.3 Primary School

Periode *primary school* dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahun ke 6 atau 7. Program persiapan biasanya berlangsung selama 1 tahun dan dilakukan sebelum memasuki tahun ke 1. Program

persiapan ini dikenal sebagai taman kanak-kanak (*kindergarten*) dan sering disebut sebagai program transisi. Pada umumnya program ini merupakan bagian dari *primary school*. Program persiapan ini tidak bersifat wajib akan tetapi sebagian besar orang tua menginginkan anak-anaknya mengikuti program ini. Program ini memfokuskan pada unsur persiapan pengembangan anak secara umum agar dapat mengikuti pendidikan pada tahun berikutnya.

Pada tingkat *primary school* kurikulum pengajaran difokuskan pada pengembangan bahasa Inggris dan kemampuan literasi, matematika numerik yang sederhana, studi kemasyarakatan, kesehatan dan aktivitas kreatif serta kemampuan fisik dan sosial.

Pada tingkat ini tidak diterapkan ujian yang terstandarisasi untuk para siswa selama mengikuti program dan tidak ada kualifikasi formal yang diberikan pada lulusannya. Seluruh siswa lulusan *primary school* dapat melanjutkan ke tingkat *secondary school* tanpa melalui ujian.

2.2.4 Secondary School

Program *Secondary school* dimulai pada tahun ke 7 atau ke 8 sampai tahun ke 10. Pada dua tahun pertama siswa mengambil program umum dan selanjutnya pada tahun berikutnya siswa mengambil pelajaran pilihan. Mata ajaran inti biasanya meliputi bahasa Inggris, matematika, sains, kemasyarakatan dan lingkungan, bahasa selain bahasa Inggris (LOTE), teknologi dan studi terapan, seni kreatif dan pengembangan pribadi, kesehatan dan olah raga. Beberapa mata ajaran ditawarkan dengan berbagai tingkat kedalaman.

2.2.5 Senior Secondary School

Setelah menyelesaikan program *Secondary School*, siswa akan melanjutkan studinya ke tingkat *Senior Secondary school* yaitu tahun ke 11 dan 12. Pada tingkat *senior secondary school* siswa dapat memilih beberapa macam program untuk mempersiapkan dirinya melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja. Siswa yang berhasil menyelesaikan tahapan ini akan mendapatkan kualifikasi *Senior*

Secondary Certificate of Education yang diberikan pada tahun ke 12. Sertifikat ini termasuk ke dalam salah satu dari 10 tingkat kualifikasi AQF.

Sertifikat *Senior Secondary Certificate of Education* bersifat multi fungsi, yaitu dapat sebagai sertifikat telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan sebagai sertifikat untuk memasuki pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi, *Vocational Education and Training* (VET). Program yang diperuntukkan bagi siswa yang akan memasuki *tertiary education* dirancang lebih lebih spesifik dengan tujuan agar lulusan senior *high school* dapat langsung mengikuti pendidikan khusus di tingkat *tertiary education* tanpa harus mengambil lagi mata kuliah umum. Mata ajaran yang diberikan pada tahun ke 12 memiliki cakupan dan kedalaman tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada negara bagian yang berbeda terdapat keragaman nama sertifikat yang diberikan. Demikian juga dengan nama sertifikat yang diberikan untuk *senior secondary* yang diberikan oleh sekolah di luar sistem sekolah di negara bagian, seperti misalnya program *International Baccalaureate*.

2.2.6 Pendidikan Vokasi dan Training di Sekolah

Sistem pendidikan menengah di Australia tidak mengenal sekolah kejuruan, oleh sebab itu pendidikan vokasi diberikan pada sekolah menengah. *Vocational Education and Training* (VET) ditawarkan kepada siswa pada tingkat *secondary* dan *senior secondary* dan diberikan di sekolah oleh *Technical and Further Education, Registered Training Organization* (RTO) atau oleh pengusaha dan pebisnis lokal yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk bidang yang diajarkannya.

Dalam mengambil pendidikan vokasi di sekolah, siswa memiliki beberapa pilihan paket yang disediakan oleh sekolah. Pilihan pertama, siswa menyelesaikan paket training atau kursus terakreditasi pada VET yang diakui secara nasional pada AQF. Sebagian besar program yang ditawarkan ada pada tingkat sertifikat I dan II pada AQF. Pilihan kedua siswa dapat mengambil mata ajaran VET sebagai bagian dari program

secondary school yang mengarah pada sertifikat pendidikan di negara bagian atau *territory*. Pada pilihan ketiga siswa dapat mengambil training dan aprentis berbasis sekolah. Program-program ini biasanya menggabungkan *senior secondary study, employment* dan *training*.

Dalam prakteknya para siswa dapat mengkombinasikan beberapa pilihan ini. Sebagai contoh, seorang siswa dapat menerima kredit melalui kualifikasi AQF dan sertifikat pendidikan senior secondary untuk studi yang sama pada VET. Studi aprentis dapat juga dicantumkan dalam sertifikat pendidikan *senior secondary* yang dikeluarkan oleh negara bagian dan *territory*.

Bagi siswa yang telah menyelesaikan program ini hasilnya dilaporkan dalam bentuk *Record of Achievement* tanpa mencantumkan nilai yang diperoleh siswa dan hanya mencantumkan kualifikasi yang didapat berdasarkan AQF. *Statement of achievement* dapat juga dikeluarkan untuk siswa yang telah menyelesaikan sebagian dari kualifikasi AQF.

Program VET dinilai dan dievaluasi dengan menggunakan standar kompetensi industri dalam paket training yang dikembangkan oleh industri Australia dan direkomendasikan oleh *Australian Taining Framework* (AQTF).

3

Sistem Evaluasi dan Penilaian

Sampai dengan tahun ke 10, evaluasi dan penilaian kemajuan belajar siswa dilakukan oleh sekolah yang menggunakan berbagai metoda yang meliputi *project*, tugas tugas, penelitian kelompok dan investigasi, presentasi oral, tes kelas dan partisipasi di kelas. Pada sekolah sekolah tertentu penilaian dilakukan melalui ujian sekolah. Disamping ujian sekolah, terdapat juga ujian eksternal dari negara bagian dan *territory* pada sekolah-sekolah tertentu. Metode evaluasi yang paling umum dilakukan pada periode tahun pembelajaran ke 11 dan ke 12 adalah ujian eksternal, ujian sekolah dan tes eksternal yang terstruktur.

3.1 Evaluasi Nasional

Evaluasi secara nasional dilakukan oleh ACARA melalui tiga macam pengujian yang terpisah untuk mengukur *learning outcome*. Ketiga macam pengujian tersebut adalah:

1. *National Assessment Program-Literacy and Numeracy* (NAPLAN) – yang melakukan tes tahunan untuk mata ajaran *reading*, *writing*, *language convention* dan numerasi untuk siswa tahun ke ke 3, 5, 7 dan ke 9. Berdasarkan hasil ini dimungkinkan untuk melakukan perbandingan capaian siswa dan sekolah sebagai *benchmark national*
2. *NAP sample assessment* – yang dilakukan setiap tiga tahun sekali hanya untuk kelompok siswa terpilih pada tahun ke 6 dan tahun ke

10 yang meliputi mata ajaran *science literacy*, kewarganegaraan dan *information and communication technology* (ICT), dan,

3. *International assessment*:

- Asesmen ini dilakukan setiap tiga tahun sekali bagi siswa usia 15 tahun untuk berpartisipasi pada program OECD bagi *International Student Assessment* (PISA) dan
- Setiap 4 tahun sekali dilakukan ujian untuk siswa terpilih pada tahun ke 4 dan ke 8 untuk berparsipasi dalam *International Association for Evaluation of Education Achievement* (IEA) dan *Trend in International Mathematics and Science Study* (TIMSS).

3.2 My School

My school adalah website yang dikelola oleh ACARA yang memberikan informasi dan perbandingan data sekolah-sekolah di Australia dan kinerjanya berdasarkan hasil tes NAPLAN . Data yang ditampilkan bersumber dari sekolah dan otoritas negara bagian dan *territory*.

3.3 Sistem Penerimaan Siswa

Pemerintah negara bagian dan *territory* bertanggung-jawab terhadap organisasi, pendanaan serta pelaksanaan pendidikan. Pada setiap negara bagian dan *territory*, Departemen Pendidikan dan perangkatnya bertanggung-jawab untuk mempublikasikan pendidikan yang didanainya. Disamping itu, pemerintah negara bagian dan *territory* juga bertanggung jawab terhadap sekolah non pemerintah dalam hal registrasi, inspeksi dan pendanaan tambahan.

Di Australia, setiap negara bagian dan *territory* menentukan kebijakannya sendiri dalam hal organisasi sekolah, kurikulum, akreditasi mata ajaran, asesmen siswa dan sertifikasi. Kurikulum dan asesmen dirancang dengan mengacu pada *Melbourne Declaration on Education Goals for Young Australian's* yang memfokuskan pada kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan dan memperbaiki *learning outcomes*.

Pemerintah pusat tidak bertanggung jawab langsung terhadap sekolah, akan tetapi berkewajiban menyediakan pendanaan, melakukan koordinasi, melakukan penelitian dan analisis berbagai isu nasional yang berhubungan dengan pendidikan. Prioritas utama pemerintah pusat adalah menyediakan sistem sekolah secara nasional yang konsisten mulai masuk sekolah, ujian nasional untuk beberapa bidang, konsistensi kurikulum outcomes dan sistem informasi umum untuk mentransfer data siswa jika siswa pindah ke negara bagian lain.

4

Sekolah di Luar Sistem Negara Bagian dan Territory

4.1 Australian Baccalaureate

Pemerintah Australia berkomitmen untuk mengembangkan *Australian Baccalaureate* yang merupakan sekolah *national senior secondary* yang secara sukarela menerapkan standar internasional bagi capaian siswanya. *Australian Baccalaureate* membantu kesesuaian hasil yang dicapai oleh siswa dan membantu siswa yang akan pindah ke negara bagian lain atau ke luar negeri. *Australian Baccalaureate* bersama dengan kualifikasi *secondary school* yang ada akan dikembangkan oleh ACARA agar dapat bermitra dengan otoritas pendidikan dan sertifikasi negara bagian dan *territory*. *Australian Baccalaureate* mengembangkan kurikulum *senior secondary* melalui inisiatif kurikulum Australia. Diharapkan *Australian Baccalaureate* akan tersedia dan diimplementasikan pada fase pertama kurikulum Australia pada tingkat *secondary level*.

4.2 International Baccalaureate

International Baccalaureate Organization (IBO) menawarkan tiga program untuk *primary school* dan *secondary school* yang diterapkan secara terpisah dari sistem yang ada di negara bagian dan *territory*.

4.2.1 International Baccalaureate Primary Year Program (PYP)

Primary Year Program (PYP) ditawarkan pada siswa yang berumur 3 sampai 12 tahun. Kurikulum PYP meliputi 6 bidang: bahasa, studi sosial, matematika, seni, sains dan teknologi serta kepribadian, sosial dan olahraga. Mata ajaran ini diajarkan melalui pendekatan interdisiplin. Sistem asesmen yang dikembangkan oleh guru digunakan untuk melakukan asesmen sekolah berdasarkan *learning outcome*.

4.2.2 International Baccalaureate Middle Year Program (MYP)

Middle Year Program (MYP) ditawarkan untuk siswa umur 11 sampai 16 tahun. Kurikulum MYP terdiri dari 8 bidang yaitu: bahasa A, bahasa B, kemanusiaan, matematika, seni, sains, teknologi dan pendidikan olahraga. Asesmen dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk setiap mata ajaran. Asesmen dilakukan secara terus menerus dan berbasis sekolah.

4.2.3 International Baccalaureate Diploma Program (IBD)

International Baccalaureate Diploma (IBD) adalah program 2 tahun yang diperuntukkan bagi siswa senior secondary yang berumur 16-19 tahun. Akhir-akhir ini, program IBD semakin populer bagi siswa *secondary secondary* karena menyediakan sertifikat alternatif bagi sertifikat *senior secondary* yang ada. Sertifikat ini diberikan pada tahun 12 oleh otoritas negara bagian dan *territory*.

4.2.4 Kurikulum

Program IB diploma meliputi 6 kelompok mata ajaran:

1. Bahasa A1 – meliputi studi bahasa dan literatur.
2. Bahasa A2 – siswa dapat memilih beberapa bahasa modern dan ditambah dengan bahasa Latin atau Yunani Klasik. Program ini menawarkan berbagai tingkatan yaitu: pemula, menengah dan lanjut.
3. Individu dan kemasyarakatan - meliputi mata ajaran bisnis dan

manajemen, ekonomi, geografi, sejarah, teknologi informasi dalam masyarakat global, sejarah Islam, filosofi, psikologi dan sosial dan antropologi budaya.

4. Sains experimental – meliputi mata ajaran biologi, kimia, teknologi design, ilmu lingkungan dan fisika.
5. Matematika dan ilmu komputer.
6. Seni – meliputi mata ajaran musik, seni teater dan seni visual.

Seluruh siswa yang mengikuti program ini diwajibkan mengambil semua kelompok mata ajaran ini. Siswa diwajibkan untuk mengambil tiga mata ajaran pada tingkat dasar, dengan setiap subjek merepresentasikan 150 jam pengajaran. Tiga mata ajaran lainnya harus diambil oleh siswa pada tingkat yang lebih tinggi dengan jumlah jam pengajaran 240 jam untuk setiap mata ajaran.

4.2.5 Kualifikasi dan Asesmen

Program International Baccalaureate Diploma mewajibkan siswanya untuk menyelesaikan hal-hal berikut:

1. *Extended essay* – tugas penulisan sebanyak 4000 kata untuk topik yang dipilih siswa berdasarkan minatnya,
2. Teori pengetahuan – mata ajaran lintas disiplin yang mengembangkan kepedulian sinergi dan perspektif alternatif, serta
3. Kreativitas, aksi dan pelayanan – program yang mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam program ekstra kurikuler.

Evaluasi terhadap siswa dilakukan pada akhir program tahun kedua. Setiap mata ajaran telah ditetapkan standarnya dimana siswa dievaluasi berdasarkan asesmen sekolah dan eksternal. Standar yang telah ditetapkan tersebut harus dipenuhi oleh siswanya.

Evaluasi berbasis sekolah meliputi tes oral, proyek, kerja lapang, portfolio siswa, presentasi, kerja laboratorium, dan performans. Tugas-tugas dan esai dapat diselesaikan di sekolah untuk selanjutnya dievaluasi secara eksternal. Siswa-siswa yang berhasil menyelesaikan program ini akan mendapatkan sertifikat kelulusan berupa *diploma international baccalaureate* dari *International Baccalaureate Organization*.

5

Kurikulum pada Setiap Negara Bagian

Perbandingan sistem pendidikan di negara bagian dan territory di Australia dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perbandingan Sistem Pendidikan di Negara Bagian dan Territory di Australia
(Sumber: Country Education Profile Australia 2013)

Negara Bagian	Level	Nama/tahun	Kualifikasi	Pemberi sertifikat
Australian Capital Territory	<i>Primary</i>	<i>Kindergarten/ tahun ke 6</i>		
	<i>Secondary</i>	Tahun 7-10	<i>Australian Capital Territory Certificate tahun 10</i>	Sekolah
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	<i>Australian Capital Territory Certificate tahun 10</i>	<i>ACT board of senior Secondary Studies</i>

Negara Bagian	Level	Nama/tahun	Kualifikasi	Pemberi sertifikat
New South Wales	<i>Primary</i>	Kindergarten/ tahun ke 6		
	<i>Secondary</i>	Tahun 7-10	<i>School Certificate</i>	<i>Board of Studies New South Wales</i>
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	<i>Higher School Certificate (HCS)</i>	<i>Board of Studies New South Wales</i>
Northern Territory	<i>Early Years</i>	<i>Preschool – year 3</i>		
	<i>Primary Years</i>	<i>Year 4-6</i>		
	<i>Middle Years</i>	<i>Year 7-9</i>		
	<i>Senior Years</i>	<i>Year 10-12</i>	<i>Northern Territory Certificate of Education and Training (NTCET)</i>	<i>Northern Territory Board of Studies (NTBOS)</i>
Queensland	<i>Primary</i>	Persiapan – tahun 7		
	<i>Secondary</i>	Tahun 8-10		
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	<i>Queensland Certificate of Education</i>	<i>Queensland Studies Authority</i>
South Australia	<i>Primary</i>	<i>Reception – tahun 7</i>		
	<i>Secondary</i>	Tahun 8-10		
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	<i>South Australia Certificate of Education (SACE)</i>	<i>SACE Board of South Australia</i>

Negara Bagian	Level	Nama/tahun	Kualifikasi	Pemberi sertifikat
Tasmania	<i>Primary</i>	Persiapan – tahun 6		
	<i>Secondary</i>	Tahun 7-10		
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	<i>Tasmaniaan Certificate of Education</i>	<i>Tasmanian Qualifications Authority</i>
Victoria	<i>Primary</i>	Persiapan – tahun 6		
	<i>Secondary</i>	Tahun 7-10		
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	<i>Victorian Certificate of Education (VCE)</i>	<i>Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)</i>
Western Australia	<i>Primary</i>	<i>Kindergarten</i> – tahun 7		
	<i>Secondary</i>	Tahun 8-10		
	<i>Senior Secondary</i>	Tahun 11-12	Western Australia Certificate of Education	<i>Curriculum Council of Western Australia</i>

5.1 Australian Capital Territory (ACT)

Di *Australian Capital Territory*, sekolah umum berada di bawah tanggung-jawab ACT *Government Education and Training Directorate*.

Lama siswa menempuh pelajaran di sekolah di ACT adalah selama 13 tahun, yang terdiri dari 7 tahun di *primary school*, yaitu meliputi taman kanak-kanak sampai dengan tahun ke 6, empat tahun berikutnya di *secondary school*, yaitu tahun ke 7 sampai ke 10, serta 2 tahun pada *senior secondary*, yaitu tahun ke 11 dan ke 12.

Program *preschool* tidak bersifat wajib dan merupakan program paruh waktu yang diperuntukkan bagi siswa sebelum masuk ke taman kanak-kanak. Pemerintah ACT menetapkan 12 jam per minggu untuk pendidikan *preschool*. Pada tahun 2013, semua *preschool* akan

menawarkan jumlah jam pengajaran selama 16 jam per minggu. Siswa berumur kurang dari 4 tahun sebelum tanggal 30 April dapat mengikuti program ini.

Program *Primary school* merupakan periode awal pendidikan formal bagi siswa. Program ini meliputi taman kanak-kanak sampai dengan tahun ke 6. Program ini diperuntukkan bagi siswa yang berumur 5 tahun sebelum tanggal 30 April. Setelah lulus siswa tidak diberikan kualifikasi formal dan dapat memasuki *Secondary School*.

Program *Secondary School* berlangsung selama 4 tahun, yaitu mulai tahun ke 7 sampai dengan tahun ke 10. Pada level ini mata ajaran yang diberikan adalah: bahasa Inggris, matematika, kesehatan dan pendidikan olah raga. Disamping itu, mata ajaran lain yang diberikan adalah: seni, sains bahasa, studi kemasyarakatan dan lingkungan (SOSE) dan teknologi.

Sertifikat sekolah yang diberikan pada akhir tahun ke 10 dibuat berdasarkan hasil capaian siswa pada tahun ke 9 dan ke 10. Asesmen untuk mendapatkan sertifikat tahun ke 10 dilakukan berbasis sekolah yang meliputi performa akademik, kehadiran, dan tingkah laku. *High school report* diberikan bagi siswa yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, siswa yang memiliki sertifikat tahun ke 10, dapat melanjutkan studinya ke *Senior Secondary*.

Program *Senior Secondary* terdiri dari tahun ke 11 dan 12. Pelaksanaan pendidikan pada tahun ke 11 dan 12 merupakan tanggung-jawab dari *ACT Board of Senior Secondary Studies (BSSS)*.

Di wilayah ACT, mata ajaran dikembangkan oleh masing-masing sekolah berdasarkan *BSSS course framework*. Mata ajaran yang diberikan kepada siswa dikelompokkan ke dalam:

1. Mata ajaran minor yang terdiri dari 2-3 unit (setara dengan 110+ jam)
2. Mata ajaran mayor paling sedikit 3,5 sampai 5 unit (setara dengan 220+ jam)
3. Mata ajaran mayor minor terdiri dari 5,5 – 6,5 unit (setara dengan 330+ jam) dan
4. Mata ajaran mayor ganda yang terdiri 7-8 unit (setara 400+ jam)

Standar jumlah jam belajar untuk setiap unit mata ajaran adalah 55 jam per semester yang meliputi pertemuan di kelas, tugas, kunjungan dan ujian.

Mata ajaran yang diberikan diklasifikasikan ke dalam:

1. *T course* – Mata ajaran ini diakreditasi oleh BSSS dan ditujukan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. *T course* dapat dimasukkan dalam perhitungan dalam *Australian Tertiary Admission Rank* (ATAR).
2. *A course* – Mata ajaran ini diakreditasi oleh BSSS dan diberikan pada tahun ke 11 dan 12. Mata ajaran kelompok *A course* tidak masuk dalam perhitungan ATAR.
3. *H course* – Mata ajaran ini dirancang dan diakreditasi oleh universitas dan terdaftar di BSSS. Mata ajaran ini merupakan bagian dari program *senior secondary* dan dapat diakui sebagai bagian dari program *undergraduate* di universitas. *H course* dimasukkan dalam perhitungan ATAR.
4. *M course* – mata ajaran ini diakreditasi oleh BSSS dan disediakan untuk menyediakan pendidikan dan pengalaman bagi siswa yang memiliki keterbatasan khusus. *M course* tidak masuk dalam perhitungan ATAR.
5. *C course* - program pendidikan vokasi dan pelatihan (VET) yang terdaftar di BSSS dan diberikan oleh RTO. *C course* tidak masuk dalam perhitungan ATAR.
6. *R course* atau unit– mata ajaran ini terdaftar pada BSSS dan dirancang untuk pengembangan kepribadian siswa, rekreasi dan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. *R course* tidak masuk dalam perhitungan ATAR.
7. *Vocational course* - diakreditasi oleh BSSS dan ditujukan untuk memperoleh kualifikasi VET atau *Statement of Attainment*. Kandungan program ini dibuat berdasarkan kompetensi, dan selanjutnya diterjemahkan dalam paket training yang mengikuti persyaratan *Australian Quality Training Framework* (AQTF). Program vokasi dapat berupa *A*, *T* atau *M course*.

Selain paket-paket yang disebutkan di atas, siswa dapat juga mengambil mata ajaran di luar program BSSS yang meliputi *school*

based apprenticeships yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyelesaikan kualifikasi VET selama menjalani program *senior secondary*.

Sertifikat tahun ke 12 yang diberikan oleh BSSS bagi siswa yang telah menyelesaikan program tersebut mencantumkan semua unit dan mata ajaran yang diambil yang dengan mensyaratkan paling sedikit mengambil 17 unit yang meliputi tiga *course* dari bidang yang berbeda. Rapor *Secondary College* diberikan kepada siswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk sertifikat tahun 12.

Pada tahun ke 11 dan 12, asesmen dilakukan secara kontinu dan berbasis sekolah. Khusus untuk *A* dan *T course* dilakukan evaluasi oleh *peer reviewer*. *A* dan *T course* yang berorientasi pada pendidikan vokasi, evaluasinya dilakukan berdasarkan standard kompetensi industri. Hasil evaluasi dituangkan dalam huruf mutu yang terdiri dari huruf mutu *A* sampai *E*, dimana *A* adalah nilai tertinggi dan *E* adalah nilai terendah.

Siswa yang memenuhi semua persyaratan akan menerima *Tertiary Entrance Statement* (TES) dan *Australian Tertiary Admission Rank* (ATAR). Selanjutnya siswa dapat menggunakan skor ATAR untuk mendaftar ke universitas. Siswa yang memenuhi syarat untuk memperoleh TES harus menyelesaikan paket *tertiary* paling tidak 20 unit dan mengikuti *Australian Scaling Test* (AST). Sebanyak 18 unit harus berasal dari *A*, *T*, *M*, *H*, *C* dan *H course* dan 12,5 diantaranya harus berasal dari *T* dan *H course* dan paling tidak 3 mayor dan 1 minor yang masuk dalam klasifikasi *T* dan *H*.

Pada tahap selanjutnya BSS menggunakan *ACT Scaling Test* (AST) untuk melakukan pembobotan skor *T* di seluruh wilayah di ACT baik dalam maupun antar college dengan tujuan untuk menghitung ATAR. Nilai ATAR diperlukan untuk memasuki universitas di negara bagian *New South Wales* (NSW) dan ACT. Skor keseluruhan dihitung dengan menggunakan hasil terbaik siswa untuk 3 major *T* dan *H* ditambah dengan sebagian dari nilai terbaik berikutnya untuk skor *T* dan *H*.

5.2 New South Wales (NSW)

Sistem pendidikan di negara Bagian *New South Wales* (NSW) berada di bawah tanggung-jawab *Departement of Education and Communities*. Di negara bagian ini *Board of Study* bertanggung-jawab dalam hal pengembangan kurikulum mulai dari program kindergarten sampai tahun ke-12, melakukan asesmen, melaksanakan ujian serta pemberian sertifikat sekolah dan sertifikat *high school*. Di samping itu, dewan ini juga bertanggung-jawab untuk pendaftaran sekolah non pemerintah.

Di wilayah NSW, lama siswa menyelesaikan studinya di sekolah adalah 13 tahun, yang meliputi 7 tahun pada *primary school* yang meliputi kindergarten sampai tahun ke 6; 4 tahun pada *secondary school* yang meliputi tahun ke 7 sampai ke 10, serta 2 tahun pada *senior secondary* yaitu pada tahun ke 11 dan ke 12.

Seperti halnya di ACT, program *preschool* tidak bersifat wajib dan merupakan program paruh waktu sebelum masuk *kindergarten*. Sebagian besar *preschool* di negara bagian ini dijalankan oleh swasta dengan mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan oleh *Department of Community Services*. Beberapa *preschool* ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Program *primary school* dimulai sejak *kindergarten* sampai dengan tahun ke 6. Mata ajaran wajib pada *primary school* adalah: bahasa Inggris, matematika, sains dan teknologi, sosial kemanusiaan dan lingkungan, seni kreatif dan praktis, pengembangan pribadi, kesehatan dan pendidikan olah raga. Pada tingkat ini pembelajaran lebih difokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi.

Setelah menyelesaikan program ini, siswa tidak diberikan kualifikasi formal. Selanjutnya, siswa yang telah menyelesaikan program ini dapat melanjutkan ke *secondary school*.

Selama mengikuti program di *secondary school*, siswa diwajibkan mempelajari 5 bidang yaitu: bahasa Inggris, matematika, sains, sosial kemanusiaan dan lingkungan: sejarah dan geografi yang diberikan pada tahun ke 7-8, sejarah Australia dan geografi yang diberikan tahun ke 9-10, serta pengembangan pribadi, kesehatan dan pendidikan olah raga.

Di samping mata pelajaran tersebut, siswa juga diberikan kesempatan untuk mempelajari teknologi dan studi aplikasi, seni kreatif dan bahasa. Mata ajaran yang diberikan dikembangkan di sekolah harus mendapat persetujuan dari *Elective Board*.

Sertifikat sekolah diberikan kepada siswa yang telah memenuhi syarat setelah 4 tahun menempuh pendidikannya di *secondary school*. Sertifikat ini diberikan kepada siswa di sekolah yang terdaftar di *Board of Studies*, setelah menyelesaikan program dan secara serius mengikuti ujian untuk mendapatkan *school certificate* serta memenuhi syarat kehadiran sampai akhir tahun ke 10.

Program asesmen *school certificate* dilakukan dengan menggabungkan asesmen berbasis sekolah selama tahun ke 10 dengan ujian di tingkat negara bagian pada akhir tahun ke 10. Siswa akan menerima grade untuk setiap mata ajaran yang diambil dan juga huruf mutu untuk setiap ujian untuk mata ajaran literasi Inggris, matematika, sains, sejarah Australia, geografi, kewarganegaraan, dan komputer.

Pada akhir program siswa yang memenuhi persyaratan akan menerima sertifikat sekolah dan laporan capaiannya. Sertifikat ini mencantumkan semua mata ajaran yang diambil, jumlah jam belajar serta nilai yang diperolehnya yang mengacu pada kisaran performa (paling rendah 1 dan paling tinggi 6) yang diperoleh siswa berdasarkan hasil ujiannya. Selanjutnya semua siswa yang memiliki *school certificate* dapat melanjutkan pendidikan ke *senior secondary school* yang programnya berlangsung selama dua tahun, yaitu tahun ke 11 dan 12.

Siswa yang mengikuti program ini diwajibkan mengambil kelompok mata ajaran untuk mendapatkan *Higher School Certificate* (HSC). Terdapat dua macam kelompok mata ajaran yang ditawarkan, yaitu:

1. *Board developed courses* – kelompok mata ajaran yang dikembangkan oleh *board of studies*. Ujian dilaksanakan secara menyeluruh pada tingkat negara bagian. Hasil ujian ini termasuk ke dalam perhitungan ATAR untuk memasuki *tertiary education*.

2. *Board endorsed courses* – kelompok mata ajaran yang dirancang oleh sekolah, TAFE atau universitas dan telah disetujui oleh Board.

Mata ajaran ini tidak diujikan pada tingkat negara bagian dan hasilnya dimasukkan dalam perhitungan ATAR.

Setiap mata ajaran biasanya setara dengan 2 unit. Pada beberapa mata ajaran, unit dapat diambil melalui *extension course*. Setiap unit setara dengan 60 jam pengajaran per tahun atau setara dengan 2 jam kelas per minggu. Siswa diwajibkan paling tidak mengambil 2 unit mata ajaran yang dikembangkan oleh *Board Developed Course* untuk bahasa Inggris pada tahun ke 11 dan ke 12. Disamping mata ajaran ini *Board Developed Courses* dan *Board Endorsed Course* juga menawarkan mata ajaran untuk pendidikan vokasi dan training (VET).

Setelah menyelesaikan program ini, siswa akan mendapatkan sertifikat *higher school* yang diberikan pada akhir tahun ke 12. Dalam mendapatkan sertifikat ini siswa harus mengambil *HSC course* sebanyak 22 unit selama tahun ke 11 dan 12. Setelah selesai, siswa akan memperoleh *HSC Record of Achievement* yang mencantumkan semua mata ajaran yang telah diselesaikan, nilai dan *performance band* dari *Board Developed Course*.

Disamping itu, siswa juga akan menerima laporan hasil ujian untuk setiap mata ajaran. Laporan ini mencantumkan hasil asesmen, hasil ujian dan nilai akhir dari setiap mata ajaran yang diambil oleh siswa. Disamping itu, dicantumkan pula tingkat pengetahuan dan keahlian siswa dalam bentuk kisaran dan posisinya dalam ujian di tingkat negara bagian.

Asesmen mata ajaran yang dikembangkan oleh *Board* dilakukan melalui ujian di tingkat negara bagian dan asesmen berbasis sekolah. Asesmen berbasis sekolah dilakukan oleh sekolah masing-masing. Hasil dari setiap 2 unit mata ajaran ditampilkan dalam bentuk nilai sampai dengan maksimal 100, atau 50 dalam kasus mata ajaran yang memiliki 1 unit.

Para siswa yang telah memenuhi persyaratan akan menerima ATAR yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas di wilayah NSW dan ACT. Skala keseluruhan dihitung dengan menggunakan nilai terbaik siswa untuk 10 unit di HSC dan dua diantaranya adalah bahasa Inggris.

5.3 Northern Territory (NT)

Di wilayah ini pelaksanaan pendidikan berada di bawah tanggung jawab *Department of Education and Training*, sedangkan *learning outcome* mulai masa transisi sampai tahun ke 10 berada di bawah tanggung-jawab *the Northern Territory Curriculum Framework* (NTCF).

Lama siswa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya adalah 13 tahun, yang meliputi tahap persiapan yang dikenal sebagai masa transisi dan tidak bersifat wajib, serta tahap program *early*, *primary*, *middle* dan *senior year* yang masing-masing berjalan selama 3 tahun.

Program *preschool* tidak bersifat wajib dengan menggunakan sistem paruh waktu. Program ini merupakan program pendidikan sebelum memasuki sekolah resmi. Jumlah jam pengajaran yang diberikan di *preschool* adalah 4-5 setengah hari per minggu. Program transisi ini diperuntukkan bagi anak berumur 5 tahun dan biasanya ditawarkan sebagai bagian dari program *early year*.

Program *primary school* terdiri atas *early year* program ditambah dengan *primary years*. Setelah menyelesaikan program ini, siswa tidak diberikan kualifikasi formal. Semua siswa yang telah menyelesaikan program ini dapat melanjutkan ke *secondary school* yang terdiri dari *middle year* dan *senior year*.

Curriculum Framework di wilayah ini meliputi bahasa Inggris, kesehatan dan pendidikan olah raga, bahasa, matematika, sains, studi kemasyarakatan dan lingkungan, teknologi dan disain dan seni. Pada tahun ke 10 mata ajaran wajib adalah bahasa Inggris atau Inggris sebagai bahasa kedua (ESL), matematika, sains dan studi kemasyarakatan dan lingkungan. Pada tingkat ini tidak ada kualifikasi yang diberikan kepada siswa pada akhir tahun ke 10. Sekolah hanya menerbitkan rapor untuk siswa berdasarkan subjek yang telah diselesaikan pada tahun 10. Semua siswa yang telah menyelesaikan *secondary school* dapat melanjutkan ke *senior secondary*.

Pelaksanaan program *senior secondary* pada tahun ke 11 dan 12 merupakan tanggung jawab dari *Northern Territory Board of Studies* (NTBOS). Kurikulum, asesmen dan sertifikasi untuk *Northern Territory*

Certificate of Education and Training (NTCET) dilakukan berdasarkan *South Australian Certificate of Education* (SACE), yang dikelola oleh *the SACE Board of South Australia*.

Dalam mendapatkan sertifikat NTCET, siswa harus melakukan studinya dalam dua tahap. Tahap 1 yang umumnya diselesaikan pada tahun ke 11 dan Tahap 2 umumnya diselesaikan pada tahun ke 12.

Setiap satu mata ajaran yang diajarkan selama satu semester memiliki bobot 10 kredit. Ada beberapa tipe mata ajaran, yaitu tahap 1, tahap 2 dan VET. Siswa harus mengumpulkan sebanyak 200 kredit untuk mendapatkan sertifikat NTCE. Kredit tersebut harus meliputi: Mata ajaran wajib *stage 1* yang meliputi *personal learning plan* sebanyak 10 kredit, bahasa Inggris sebanyak 20 kredit dan matematika sebanyak 10 kredit dengan huruf mutu minimal C; Mata ajaran wajib *Stage 2* sebanyak 60 kredit dengan huruf mutu minimal C dan Mata ajaran elektif *Stage 1* atau *Stage 2* sebanyak 100 kredit.

Setelah siswa menyelesaikan seluruh persyaratan, siswa akan diberikan sertifikat NTCE oleh NTBOS. Disamping sertifikat NTCET siswa diberikan *Record of Achievement* yang mendeskripsikan hasil yang dicapainya secara lebih rinci.

Asesmen mata ajaran *stage 1* dilakukan berbasis sekolah, sedangkan asesmen mata ajaran *stage 2* 70% diantaranya dilakukan berbasis sekolah dan 30% berbasis eksternal. Hasil capaian siswa untuk setiap mata ajaran dinilai dengan kisaran huruf mutu A sampai E, dimana A merupakan nilai yang tertinggi dari pencapaian siswa.

Siswa yang telah memenuhi syarat akan menerima *Australian Tertiary Admission Rank* (ATAR) dan dapat menggunakannya untuk mendaftar ke universitas yang diinginkannya. Skala keseluruhan nilai dihitung dengan menggunakan nilai tiga mata ajaran tertinggi 20 kredit TAS ditambah dengan 20 kredit mata ajaran selanjutnya dari TAS.

5.4 Queensland

Sistem pendidikan di negara bagian Queensland berada di bawah tanggung jawab Sekolah *Queensland Department of Education and*

Training, sedangkan penyusunan dan pengembangan kurikulum berada di bawah tanggung jawab *Queensland Studies Authority* (QSA).

Seperti hanya di *Northern Territory*, lama sekolah di negara bagian ini adalah 13 tahun yang meliputi 8 tahun pada tingkat *primary school* mulai dari *preparation* sampai tahun ke 7, tiga tahun pada level *secondary school* mulai tahun ke 8 sampai tahun ke 10, serta 2 tahun pada level *senior secondary* yaitu tahun ke 11 dan tahun ke 12.

Di negara bagian ini, program *preschool* tidak bersifat wajib dan dilaksanakan paruh waktu sebelum memasuki sekolah formal. Mulai tahun 2013 semua siswa yang akan memasuki sekolah mendapatkan pendidikan usia dini selama 15 jam. Setelah menyelesaikan *preschool*, siswa akan memasuki tahap persiapan yang merupakan tahap awal memasuki pendidikan formalnya secara penuh. Tahap persiapan diperuntukkan bagi siswa yang berumur telah 5 tahun dan biasanya merupakan bagian dari *primary school*. Periode *primary school* meliputi tahap persiapan dan periode tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 7. Pihak sekolah tidak memberikan kualifikasi formal bagi siswa yang telah menyelesaikan tahapan ini. Setelah menyelesaikan program ini, siswa dapat melanjutkan studinya ke *secondary school*.

Pada *secondary school* siswa menghabiskan waktunya selama tiga tahun, yaitu mulai dari tahun ke 8 sampai dengan tahun ke 10. Mata ajaran yang diberikan pada tingkat ini adalah bahasa Inggris, kesehatan dan pendidikan olah raga, matematika, studi kemasyarakatan dan lingkungan (SOCE), sains, teknologi dan seni. Seperti halnya dengan *primary school*, setelah menyelesaikan tahapan ini, siswa tidak diberikan kualifikasi formal. Semua siswa yang telah menyelesaikan tingkat ini dapat melanjutkan studinya ke *senior secondary*.

Tingkat *senior secondary* terdiri dari tahun ke 11 dan 12. Setelah siswa menyelesaikan tingkat ini, mereka akan mendapatkan *Senior Education Profile* yang meliputi *Queensland Certificate of Education* (QCE), *Tertiary Entrance Statement* (TES) dan/atau *Queensland Certificate of Individual Achievement* (QCIA).

Selama menempuh studinya pada *secondary school* siswa diwajibkan mengambil mata ajaran yang dikategorikan kedalam 4 kelompok, yaitu:

- (a) *Authority subject* – yang meliputi mata ajaran berbasis silabus dan disediakan oleh QSA. Hasil evaluasi mata ajaran ini akan dimasukkan pada *Overall Position* (OP) atau *Field Position* (FP) sebagai syarat untuk memasuki *tertiary education*,
- (b) *Authority Registered Subject* – meliputi mata ajaran yang dikembangkan oleh sekolah berdasarkan *Study Area Specifications* (SAS) yang disediakan oleh QSA. Pada umumnya mata ajarannya adalah vokasi atau praktek. Hasil evaluasi mata ajaran ini tidak masuk dalam perhitungan QP atau FP,
- (c) *Recognised Studies* – mata ajaran yang dikembangkan oleh sekolah atau penyedia pendidikan lain yang diakui oleh QSA, serta
- (d) *Vocational Education and Training* (VET) *studies* – hasil evaluasi studi ini masuk dalam kategori *Australian Qualification Frame Work* (AQF).

Selanjutnya, keempat kelompok mata kuliah ini dibagi lagi ke dalam 4 macam mata ajaran, yaitu:

- (1) Mata ajaran Inti: merupakan mata ajaran yang terdaftar, mata ajaran yang masuk ke dalam sertifikat I, II dan IV, serta meliputi juga magang berbasis sekolah dan training lainnya.
- (2) Mata ajaran persiapan: mata ajaran ini dirancang untuk mempersiapkan siswa agar dapat melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Mata ajaran yang diberikan meliputi mata ajaran sertifikat I, program keahlian bekerja, kursus singkat literasi dan numerasi.
- (3) Mata ajaran pengayaan: mata ajaran ini ditujukan untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan siswa pada tingkat yang lebih tinggi yang meliputi dunia kerja atau *community learning*. Beberapa program VET dan pengembangan diri bersifat wajib.
- (4) Mata ajaran lanjutan: meliputi mata ajaran yang kedalamannya melebihi kedalaman pada *secondary senior* meliputi mata ajaran yang ditawarkan di perguruan tinggi, *diploma* atau *advanced diploma* atau mata ajaran lanjutan lainnya seperti musik, olah raga dan pengembangan masyarakat.

Di samping mata ajaran yang diberikan di atas, mata ajaran lain yang ditawarkan adalah seni, bisnis dan ekonomi, pengembangan karir,

bahasa Inggris, kesehatan dan pendidikan olah raga, kemanusiaan dan ilmu sosial, ICT dan design, bahasa, matematika serta sains.

Siswa diwajibkan mengambil sebanyak 20 kredit untuk mendapatkan sertifikat QCE, yang terdiri dari: minimal 12 kredit dari mata ajaran inti, 8 kredit dari kombinasi mata ajaran inti, persiapan dan pengayaan atau lanjutan, literasi dan numerasi. Sertifikat ini hanya diberikan kepada siswa yang lulus dengan nilai *minimum pass*, *sound achievement* atau lebih tinggi. Dalam sistem ini satu kredit merepresentasikan mata ajaran yang diambil selama 1 semester studi penuh.

Queensland Certificate of Education (QCE) diberikan bagi siswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan studinya tahun ke 11 dan 12. Disamping QCE, siswa akan diberikan *Senior Statement Record* untuk semua mata ajaran yang diambil dan hasil yang dicapainya. *Queensland Certificate of Individual Achievement* (QCIA) diberikan pada akhir tahun ke 12.

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan melalui dua tahap yaitu asesmen berbasis sekolah dan asesmen berbasis eksternal. Asesmen dilakukan berdasarkan kurikulum dan standar asesmen yang dikembangkan dan diakreditasi oleh QSA. Khusus untuk hasil capaian siswa untuk mata ajaran VET asesmennya dilakukan berdasarkan standar kompetensi nasional. Hasil asesmen seluruh mata ajaran pada tahun ke 11 dan ke 12 diberikan dalam bentuk 5 capaian, yaitu: *Very High Achievement*, *High Achievement*, *Sound Achievement*, *Limited Achievement*, dan *Very Limited Achievement*.

Siswa yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan *Tertiary Entrance Statement* yang merupakan rapor *Overall Position* (OP) dan *Field Position* (FP). Selanjutnya siswa dapat menggunakan OP dan FP untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Sistem penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi di Queensland dikelola oleh *Queensland Tertiary Admissions Center* (QTAC).

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, OP menunjukkan ranking siswa yang dibuat berdasarkan pencapaian secara keseluruhan pada mata ajaran wajib. OP yang memenuhi syarat adalah: (1) Paling tidak meliputi 20 unit semester untuk mata ajaran wajib, dan 3

diantaranya sudah dipelajari selama 4 semester, serta (2) Menyelesaikan ujian negara bagian untuk *Queensland Core Skill (QCS)*. Hasil ini akan digunakan untuk membuat parameter pembobotan untuk menggabungkan hasil capaian untuk membuat OP dan FP.

FP merupakan gambaran posisi rangking siswa berdasarkan pencapaian secara keseluruhan untuk mata ajaran wajib pada lima bidang. FP hanya akan dihitung apabila siswa telah memenuhi syarat OP.

5.5 South Australia (SA)

Pelaksanaan pendidikan di negara bagian South Australia (SA) merupakan tanggung-jawab dari *South Australia Department of Education and Children Services*, sedangkan learning outcome sampai dengan tahun ke 12 merupakan tanggung-jawab *South Australia Curriculum Standard and Accountability (SACSA)*.

Lama siswa menyelesaikan studinya di pendidikan dasar dan menengah di SA adalah selama 13 tahun, yang meliputi 8 tahun pada tingkat *primary school* (reception sampai tahun ke 7), 3 tahun pada tingkat *secondary school* (tahun ke 8 sampai ke 10) dan 2 tahun pada tingkat *senior secondary* (tahun ke 11 dan ke 12).

Sebagaimana di negara bagian lainnya, preschool tidak bersifat wajib dan merupakan program paruh waktu sebelum masuk tahun persiapan yang dikenal sebagai *reception*. Sebagian besar siswa menjalaninya program setengah hari selama 4 hari untuk setiap minggunya.

Program *primary school* dilaksanakan selama 8 tahun, yaitu mulai dari *reception* sampai dengan tahun ke 7. Sekolah tidak mengeluarkan kualifikasi formal bagi siswa yang telah menyelesaikan tahapan ini. Semua siswa yang telah menyelesaikan tingkat *primary school* dapat melanjutkan ke *secondary school* yang berlangsung selama 3 tahun, yaitu tahun ke 8 sampai tahun ke 10.

Mata ajaran yang diberikan di *secondary school* meliputi: seni, desain dan teknologi, bahasa Inggris, kesehatan dan pendidikan olah raga, bahasa, matematika, sains, kemasyarakatan dan lingkungan. Setelah menyelesaikan tahapan ini semua siswa dapat melanjutkan studinya ke

tingkat *senior secondary*, karena sekolah tidak mengeluarkan kualifikasi bagi siswa yang telah menyelesaikan tahapan ini.

Di negara bagian Queensland, pelaksanaan pembelajaran pada tahun 11 dan 12 berada di bawah tanggung-jawab *SACE Board of South Australia*. Siswa yang telah menyelesaikan *senior secondary* akan mendapatkan sertifikat *South Australia Certificate of Education (SACE)*. Studi untuk mendapatkan sertifikat SACE dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (umumnya diselesaikan pada tahun ke 11) dan Tahap 2 (umumnya diselesaikan tahun ke 12). Satu mata ajaran yang diajarkan secara penuh selama 1 semester memiliki bobot 10 kredit.

Siswa akan mendapatkan sertifikat SACE apabila telah mengumpulkan sebanyak 200 kredit, yang terdiri dari mata ajaran wajib Tahap 1 yang meliputi Rencana Studi Individu sebanyak 10 kredit, bahasa Inggris sebanyak 10 kredit dan matematika sebanyak 10 kredit pada Tahap 1 dengan nilai minimum C; Mata ajaran wajib Tahap 2 sebanyak 60 kredit dengan nilai minimal C dan proyek penelitian sebanyak 10 kredit ; serta mata ajaran elektif Tahap 1 dan Tahap II sebanyak 90 kredit.

Siswa akan menerima sertifikat SACE setelah menyelesaikan Tahap 1 dan Tahap 2 sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Di samping itu, siswa juga akan menerima *Record of Achievement* yang menggambarkan capaian mata ajaran yang diambil pada Tahap 1 dan Tahap 2.

Asesmen mata ajaran Tahap 1 dilakukan berbasis sekolah, sedangkan asesmen mata ajaran Tahap 2, dilakukan 70% berbasis sekolah dan 30% oleh pihak eksternal. Selanjutnya hasil asesmen dibuat dalam huruf mutu mulai dari A sampai E, dengan huruf mutu A yang tertinggi dan E yang terendah.

Siswa yang telah memenuhi persyaratan akan menerima ATAR untuk selanjutnya digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Sistem penerimaan mahasiswa baru dikelola oleh *South Australian Tertiary Admission Centre (SATAC)*. Skala keseluruhan dihitung menggunakan nilai terbaik siswa sebanyak 20 kredit dari *Tertiary Admission Subject (TAS)* ditambah dengan 20 kredit dari TAS atau mata ajaran *Recognised Studies*.

5.6 Tasmania

Sistem dan pelaksanaan pendidikan di Tasmania berada di bawah tanggung jawab *Tasmania Department of Education*.

Di negara bagian ini, siswa memerlukan waktu selama 13 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya yang meliputi 1 tahun pada tahap persiapan, 6 tahun pada *primary school* (tahun ke 1 sampai ke 6), 4 tahun pada *secondary school* (tahun ke 7 sampai ke 10) serta 2 tahun pada level *senior secondary* (tahun ke 11 dan ke 12).

Program *preschool* tidak bersifat wajib dan merupakan program paruh waktu sebelum masuk pada tahun persiapan. Jumlah jam yang diikuti oleh siswa pada *preschool* adalah selama 10 jam per minggu.

Siswa yang telah berumur 5 tahun wajib mengikuti tahap persiapan yang merupakan tahap awal dari pendidikan formalnya. Program *primary school* meliputi persiapan sampai tahun ke 6. Setelah menyelesaikan tahapan ini, siswa tidak memperoleh hasil kualifikasi formal. Karena itu, semua siswa yang telah menyelesaikan program ini dapat melanjutkan studinya ke *secondary school* yang berlangsung selama 4 tahun, yaitu tahun ke 7 sampai 10.

Mata ajaran yang diberikan pada tingkat ini adalah seni, bahasa Inggris, kesehatan, kemanusiaan, matematika, sains, kemasyarakatan dan sejarah dan belajar terapan. Sebagaimana pada tingkat *primary school*, pada akhir studinya pada tahun ke 10, siswa *secondary school* tidak menerima kualifikasi formal. Semua siswa yang telah menyelesaikan studinya dapat melanjutkan ke *senior secondary*.

Pada tingkat *senior secondary* yang meliputi pada tahun ke 11 dan 12 berada di bawah tanggung-jawab *Tasmanian Qualifications Authority* (TQA) yang merupakan institusi yang berwenang mengeluarkan *Tasmanian Certificate Education* (TCE). Pada tingkat ini semua mata ajaran yang diberikan telah diakreditasi oleh TQA. Mata ajaran yang ditawarkan meliputi : seni (visual dan pertunjukan), Inggris, kesehatan dan pendidikan olah raga, teknologi informasi, bahasa, matematika, sains, masyarakat dan lingkungan dan teknologi.

Pada tingkat ini mata ajaran dikategorikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat kompleksitasnya, yaitu : TQA level 1 – meliputi mata ajaran persiapan, keahlian dasar, mata ajaran yang diperkaya; TQA level 2 meliputi mata ajaran pertengahan untuk mempersiapkan siswa tahun ke 11 untuk mengambil mata ajaran yang lebih kompleks pada tingkat 3 tahun ke 12. Mata ajaran ini tidak masuk dalam perhitungan ATAR; TQA level 3 meliputi mata ajaran yang lebih kompleks untuk mempersiapkan siswa untuk masuk *tertiary education*. Mata ajaran yang masuk dalam kelompok ini dimasukkan dalam perhitungan ATAR.

Siswa harus mengumpulkan 120 kredit untuk mendapatkan sertifikat TCE yang biasanya memerlukan waktu selama 2 tahun, dengan total yang telah dikumpulkan sebanyak 80 kredit pada level 2 atau lebih tinggi. Siswa yang merencanakan melanjutkan ke pendidikan tinggi harus menyelesaikan paling tidak 4 mata ajaran TQA tingkat 3, yaitu sekitar 60 kredit .

Tasmanian Certificate of Education (TCE) akan diberikan kepada siswa yang telah memenuhi 5 standar yang meliputi literasi, numerasi, keahlian ICT, partisipasi dan capaian, dan perencanaan. Program ini dapat meliputi mata ajaran TQA, kursus VET dan pembelajaran resmi lainnya yang diakui oleh TQA.

Dokumen lain yang dikeluarkan oleh TQA meliputi Sertifikat Kualifikasi (QC) yang merupakan data hasil evaluasi mata ajaran yang telah diambil, dan *Tasmanian Certification of Education Achievement* (TCEA) yang merupakan laporan naratif yang dikeluarkan apabila QC atau TCE tidak memberikan gambaran lengkap tentang partisipasi dan pencapaian siswa.

Asesmen mata ajaran TQA tingkat 3 dilakukan secara eksternal, sedangkan untuk tingkat lainnya dilakukan berbasis sekolah. Asesmen eksternal yang meliputi ujian tertulis, hasil kerja siswa, performan dan test oral dikontrol oleh TQA.

Khusus untuk mata ajaran yang berbasis kompetensi biasanya diberikan kisaran nilai pass, dan satisfactory completion, sedangkan mata ajaran yang berbasis kriteria berdasarkan hasilnya berupa grade yang meliputi *Exceptional Achievement* (EA), *High Achievement* (HA),

Commendable Achievement (CA), *Satisfactory Achievement (SA)*, serta *Preliminary Achievement (PA)*.

Siswa yang telah memenuhi persyaratan akan menerima *Tertiary Admission Rank (ATAR)*. Selanjutnya siswa dapat menggunakan ATAR untuk mendaftar masuk ke perguruan tinggi. Skala keseluruhan dihitung berdasarkan 4 mata ajaran TQA tingkat 3 dengan nilai SA atau di atasnya.

5.7 Victoria

Pelaksanaan pendidikan di negara bagian Victoria merupakan tanggung-jawab dari *Victoria Department of Education and Early Childhood Development*. *Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)* bertanggung-jawab dalam hal standarisasi pendidikan, standarisasi kurikulum mulai tahap persiapan sampai tahun ke 10, *Victorian Certificate of Education (VCE)* serta *Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)*.

Sebagaimana di negara bagian lain, lama siswa menyelesaikan studinya di sekolah adalah 13 tahun, yang meliputi 1 tahun pada tahap persiapan, 6 tahun pada *primary school* (tahun ke 1 sampai ke 6), 4 tahun pada *secondary school* (tahun ke 7 sampai ke 10) dan 2 tahun pada *senior secondary* (tahun ke 11 dan ke 12).

Program *preschool* tidak bersifat wajib dan merupakan program paruh waktu sebelum masuk tahun persiapan. Pada program ini sebagian besar siswa menghabiskan waktunya selama setengah hari selama 4 hari dalam seminggu. Tahap persiapan yang merupakan permulaan dari studi formal diperuntukkan bagi siswa yang telah berumur 5 tahun dan merupakan bagian dari *primary school*.

Kurikulum *primary school* menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi pada tahun pertama, dan meliputi juga ICT, bahasa Inggris, matematika, seni dan pendidikan olah raga. Pada tahun ke 3 dan ke 4 siswa diajarkan mata ajaran sains, kemanusiaan, teknologi dan kewarganegaraan. Pada tahun ke 5 dan ke 6 mata ajaran yang diberikan adalah bahasa selain bahasa Inggris (LOTE), sejarah, geografi, ekonomi dan komunikasi. Siswa yang telah menyelesaikan tahapan ini

tidak diberikan kualifikasi formal, sehingga semua siswa yang telah menyelesaikannya dapat melanjutkan studinya ke *secondary school* yang berlangsung selama 4 tahun (tahun ke 7 sampai 10).

Pada tingkat *secondary school*, mata ajaran yang diberikan meliputi: seni, bahasa Inggris, kemanusiaan (ekonomi, geografi, dan sejarah), bahasa, matematika dan sains, serta mata ajaran lintas disiplin yang meliputi komunikasi, desain dan teknologi, ICT, pembelajaran fiskal, personal dan sosial. Semua siswa yang telah menyelesaikan studinya dapat melanjutkan ke *senior secondary*.

Studi pada tingkat *senior secondary* pada tahun ke 11 dan 12 berada di bawah tanggung-jawab *Victorian Curriculum and Assessment Authority* (VCAA) yang berwenang mengeluarkan *Victorian Certificate Education* (VCE).

Selama 2 tahun, siswa dapat mengambil sebanyak 20 sampai 24 mata ajaran. Setiap mata ajaran yang diberikan berbasis unit dan dapat diambil sepanjang semester. Pada program penuh mata ajaran yang diberikan mencakup unit 1 dan 2 pada tahun ke 11, dan unit 3 dan 4 pada tahun ke 12.

VCE memberikan kesempatan pada para siswa untuk mempersiapkan dirinya melanjutkan ke pendidikan tinggi dan juga mengembangkan kemampuan vokasinya. Mata ajaran yang diberikan meliputi bahasa Inggris, seni, bahasa selain bahasa Inggris (LOTE), Kesehatan dan pendidikan olah raga, Ilmu kemanusiaan dan sosial, matematika, sains dan teknologi. Siswa dapat memilih lebih dari satu subjek studi yang sepertiga diantaranya berasal dari pendidikan vokasi dan training yang mendapat pengakuan dan kualifikasi dari pihak industri. Siswa juga dapat mengambil training di dunia industri dalam bidang *hospitality*, pertanian, teknologi informasi atau keteknikan.

Victorian Certificate of Education (VCE) akan diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan paling sedikit 16 unit. Sebagian besar siswa menyelesaikan VCE program dengan mengambil sebanyak 22 sampai 24 unit. Dari jumlah unit yang diambil tersebut, paling tidak terdapat 3 unit dalam studi Inggris dengan satu unit diantaranya pada tingkat 3 dan 4.

Hasil studi siswa diberikan setelah siswa telah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Persyaratan ini meliputi jumlah unit yang diambil pada tahun ke 11 dan 12, hasil asesmen, skor VCE studi, *general achievement test* (GAT), pernyataan kehadiran, unit yang diakui oleh universitas dan VET.

Siswa yang mengambil unit 3 dan 4 untuk studi VCE diwajibkan mengikuti *General Achievement Test* (GAT), yang meliputi tes pengetahuan dan keahlian umum. Hasil GAT akan digabungkan dengan test yang dilakukan oleh sekolah. Ujian ini tidak ditujukan sebagai syarat masuk ke *tertiary education* dan tidak masuk dalam perhitungan VCE.

Asesmen unit 1 dan 2 dilakukan berbasis sekolah, sedangkan untuk unit 3 dan 4 dilakukan berbasis sekolah dan eksternal. Hasil capaian siswa untuk setiap unit akan diberikan dalam skala huruf mutu dari A+ sampai E, dimana A+ menunjukkan nilai tertinggi dari pencapaian siswa.

Siswa yang telah memenuhi persyaratan akan menerima *Tertiary Admission Rank* (ATAR). Selanjutnya siswa akan menggunakan ATAR untuk mendaftar masuk ke perguruan tinggi. Sistem masuk ke tertiary education dikelola oleh *Victorian Tertiary Admissions Centre* (VTAC). Skala gabungan dihitung dengan menggunakan 4 nilai tertinggi siswa untuk VCE, satu diantaranya harus Inggris ditambah 10% dua studi VCE berikutnya.

5.8 Western Australia (WA)

Pelaksanaan pendidikan di Western Australia (WA) merupakan tanggung-jawab *Departement of Education Western Australia*, *Catholic Education Office* di WA dan *Association of Independent School of Western Australia*. *Western Australia Curriculum Framework* bertugas menetapkan standar *learning outcome* dalam 8 area pembelajaran untuk *primary school*, yaitu seni, Inggris, kesehatan dan pendidikan olah raga, bahasa, matematika, sains, sosial dan lingkungan serta teknologi dan wirausaha.

Lama siswa menyelesaikan studinya di sekolah adalah 13 tahun, yang meliputi 8 tahun *primary school* (*kindergarten* sampai tahun ke 7), 3 tahun pada *secondary school* (tahun ke 8 sampai 10) dan 2 tahun pada *senior secondary* (tahun ke 11 dan 12).

Program *Primary School* dimulai pada saat anak berumur 4 tahun dan 6 bulan. Walaupun program dua tahun pertama (*kindergarten* dan *Pre Primary*) tidak bersifat wajib, sebagian besar anak anak mengikuti program ini. Waktu belajar di *kindergarten* paling sedikit 11 jam setiap minggunya dan pada *pre primary* selama 4 hari penuh dalam seminggunya. Pemerintah mewajibkan program pendidikan tahun ke 1 sampai ke 7 dan dimulai pada saat anak telah berumur 6 tahun dan 6 bulan. Semua siswa yang telah menyelesaikan *primary school* dapat melanjutkan ke *secondary school*.

Program *secondary school* erlangsung selama 3 tahun, yaitu tahun ke 8 sampai tahun ke 10. Mata ajaran yang diberikan meliputi: seni, bahasa Inggris, bahasa, matematika dan sains, kemasyarakatan dan lingkungan serta teknologi dan kewirausahaan. Kualifikasi formal tidak diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan program ini. Semua siswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat ini dapat melanjutkan ke *senior secondary*.

Program *secondary school* meliputi studi pada tahun ke 11 dan 12. Sertifikasi pada tingkat ini berada di bawah tanggung-jawab *Curriculum Council*.

Siswa harus mengambil mata ajaran yang digolongkan ke dalam dua kelompok untuk mendapatkan *Western Australia Certificate of Education* (WACE). Kedua kelompok mata ajaran tersebut adalah: *Council Developed* – berupa mata ajaran program WACE; *Council Endorsed* yang berupa *VET course* – meliputi mata ajaran yang berhubungan dengan industri spesifik dan pendidikan vokasi dan training yang berada diluar program WACE dan *Endorsed program* – meliputi mata ajaran univeristas, pembelajaran berbasis pengalaman kerja, pembelajaran berbasis kemasyarakatan dan pengayaan individu.

Mata ajaran yang disyaratkan untuk memperoleh WACE dikembangkan oleh *Curriculum Council*. Setiap mata ajaran dinilai 1

unit yang setara dengan 55 jam pertemuan di kelas yang diambil selama 1 semester. Sebagian besar mata ajaran yang ditawarkan adalah program dengan nilai 2 unit. Mata ajaran ditawarkan dalam 4 tingkat yang berbeda dan masing masing tingkat meningkat tingkat kesulitan yang berbeda, yaitu: (1) *Preliminary* – meliputi mata ajaran yang memfokuskan pada praktek dan pembelajaran yang mengembangkan keahlian untuk keperluan bekerja atau unit peralihan *Stage 1*. Unit unit ini tidak masuk dalam perhitungan *Australian Tertiary Admission Rank* (ATAR). (2) *Stage 1* merupakan mata ajaran pengantar untuk mempersiapkan siswa mengikuti pelatihan dan bekerja. Unit unit ini tidak masuk dalam perhitungan ATAR. (3) *Stage 2* merupakan unit pertengahan untuk mempersiapkan siswa memasuki tertiary education dan pelatihan atau masuk ke dalam dunia kerja. Unit ini masuk dalam perhitungan ATAR. Terakhir, (4) *Stage 3* merupakan mata ajaran yang kompleks untuk mempersiapkan siswa masuk ke *tertiary education*. Semua unit pada level ini masuk dalam perhitungan ATAR.

Western Australia Certificate of Education (WACE) diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan studinya pada tahun ke 12. Sertifikat ini diberikan oleh *Curriculum Council of Western Australia*. Siswa harus menyelesaikan jumlah unit tertentu untuk mendapatkan sertifikat ini. Jumlah unit yang harus diselesaikan oleh siswa adalah: 20 unit meliputi: 10 atau lebih unit dari mata ajaran WACE meliputi 3 atau lebih program 2 unit, 2 unit dari seni/bahasa/ilmu sosial, 2 unit dari matematika/sains/teknologi dan 4 unit dari Inggris atau memenuhi standar kompetensi bahasa. Ujian untuk mendapatkan sertifikat WACE dilakukan pada tingkat negara bagian dan dilakukan secara eksternal. Siswa yang telah lulus akan menerima hasil studi, hasil asesmen. Hasil studi ini juga diberikan pada siswa yang menyelesaikan paling tidak 1 unit.

Seluruh mata ajaran diuji secara eksternal. Hasil capaian siswa diberi huruf mutu A sampai E, dimana nilai A adalah yang tertinggi. Siswa tahun ke 12 juga menerima *grade* dengan nilai maksimal 100 untuk *Stage 1* dan 2. Mata ajaran yang berhubungan dengan praktek diberi nilai maksimal 100 untuk teori dan *grade* dengan nilai maksimal 100 untuk praktikum. Mata ajaran VET dinilai berdasarkan capaian kompetensi.

Siswa yang memenuhi persyaratan akan menerima *Tertiary Admission Rank* (ATAR). Selanjutnya siswa akan menggunakan ATAR untuk mendaftar masuk ke perguruan tinggi. Sistem masuk ke *tertiary education* dikelola oleh *Tertiary Institution Service Centre* (TISC).

6

Perbandingan Sistem Pendidikan di Australia dan di Indonesia

Sistem pendidikan di Australia meliputi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan lanjut dimana pendidikan dasar dan menengah terdiri atas *primary* (6 tahun), *secondary* (4 tahun), dan *senior secondary* (2 tahun). Wajib belajar diperuntukkan bagi setiap warga negara berusia 6 sampai dengan 16 tahun. Sistem pendidikan di Australia tidak mengenal sekolah kejuruan. Oleh sebab itu, siswa yang telah memasuki studinya pada tahun ke 11 dan ke 12 diberikan pilihan mata ajaran vokasi dan training. Pada umumnya mata kuliah vokasi dan pelatihan menawarkan tingkat keahlian yang tinggi bagi siswanya, karena mata ajaran ini disertifikasi oleh pihak industri dan hasil capaian siswa yang mengambilnya tercantum dalam salah satu kualifikasi AQF.

Dalam menjamin kualitas pendidikan, pemerintah federal menetapkan kualifikasi pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi berdasarkan *learning outcomes* untuk setiap mata pelajaran yang meliputi: keahlian dasar, berpikir, dan keahlian personal. Implementasi, pengawasan, dan penilaian terhadap kualifikasi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing negara bagian atau *territory* dan diakreditasi oleh agen penjamin standar mutu pendidikan tinggi di masing-masing negara bagian atau *territory*. Dengan kewenangan otonomi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan kurikulum dan cara penilaian dari masing-masing, meskipun kualitas tidak jauh berbeda.

Perbedaan kurikulum tersebut berdampak terhadap siswa yang ingin meneruskan studi di negara bagian atau *territory* lain. Sebagai catatan, Australia terdiri atas enam negara bagian dan dua wilayah *territory*, masing-masing memiliki kurikulum pendidikan yang berbeda-beda. Sebagai antisipasi, pemerintah federal mengembangkan model kurikulum *Australian Baccalaureate* dan *International Baccalaureate* untuk *Primary Years Program*, *Middle Years Program*, dan *IB Diploma* yang diterapkan di beberapa sekolah maju di masing-masing negara bagian dan *territory*. Dengan kedua kurikulum ini, tidak akan ada kesulitan siswa untuk melanjutkan studi, baik di negara bagian lain atau di luar negeri.

Menyangkut penilaian ketuntasan belajar, sekolah-sekolah diberi kesempatan untuk melakukan ujian secara mandiri, khususnya untuk tingkat *Primary* dan *Secondary*. Sedangkan untuk *Senior Secondary* ujian dilaksanakan melalui 30% ujian sekolah dan 70% ujian yang dikoordinasikan oleh masing-masing negara bagian atau *territory*. Untuk mengetahui perbandingan mutu setiap sekolah, pemerintah federal melaksanakan ujian setahun sekali dengan sistem *sampling*. Hasilnya dapat diakses di website *My Way*. Selanjutnya untuk mengetahui ranking di antara negara-negara OECD dan internasional, Australia mengizinkan lembaga-lembaga assesmen internasional untuk melakukan penilaian, baik uji literasi, numerasi, maupun mata pelajaran eksak dan sosial.

Dari hasil analisis, terdapat beberapa perbedaan antara sistem pendidikan di Australia dan Indonesia, yang menyangkut: pengelolaan pendidikan vokasi, sistem evaluasi pendidikan, dan proses penyusunan kurikulum. Di Australia, pendidikan vokasi dilaksanakan sebagai jalur pendidikan lanjutan yang umumnya dibiayai oleh masing-masing negara bagian atau *territory* untuk memenuhi pasar kerja dan industri. Sehingga, sertifikasi pendidikan vokasi dilakukan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh kalangan industri. Dalam penilaian keberhasilan belajar, Australia tidak menerapkan ujian nasional, tetapi ujian negara bagian yang digabung dengan ujian sekolah untuk kelas 11 dan 12.

Perbedaan lainnya adalah dalam hal pengelolaan pendidikan vokasi. Di Australia pendidikan vokasi tidak masuk ke dalam sistem pendidikan

tinggi, akan tetapi sistem pendidikan vokasi secara formal memberikan jalur tersendiri bagi mahasiswanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui pengambilan mata kuliah yang khusus dipersiapkan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.

Pembiayaan pendidikan vokasi umumnya ditanggung oleh masing-masing negara bagian dan didukung oleh pihak industri dalam menyediakan fasilitas praktek yang kualitasnya sama dengan kondisi di dunia kerja. Dengan cara ini, siswa dan mahasiswa yang mendapat pendidikan vokasi akan dapat langsung bekerja tanpa harus menjalani pelatihan terlebih dulu.

Sistem ujian nasional tidak diterapkan di Australia. Ujian hanya dilakukan pada tingkat negara bagian. Sebagian besar asesmen dilakukan pada tingkat sekolah dan hanya untuk tingkat *senior secondary* (setara dengan SMA di Indonesia) yang mengkombinasikan antara asesmen tingkat sekolah dan asesmen pihak eksternal (70%:30%).

Kurikulum Australia lebih menekankan pada *learning outcome* untuk setiap mata ajaran yang diberikan. *Learning outcome* menjadi fokus utama karena berhubungan dengan deklarasi yang tercantum pada *Melbourne Declaration on Education Goals for Young Australians*. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan di Australia adalah untuk mempromosikan kesetaraan dan keunggulan sehingga generasi muda Australia menjadi pembelajar yang sukses, percaya diri, kreatif, aktif, dan informatif.

Perlu dicatat bahwa pengembangan kurikulum nasional di Australia dilakukan secara bertahap dan penuh dengan kehati-hatian. Sampai saat ini kurikulum nasional masih dalam tahap uji coba dalam bentuk *pilot project* dan hanya diterapkan pada sekolah tertentu di negara bagian tertentu. Dari dokumen yang ada, tercatat bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Di samping kualitas pendidikan, kualitas infrastruktur pendidikan di Australia dinilai sangat baik. Setiap sekolah disyaratkan paling tidak memiliki fasilitas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Inspeksi kualitas infrastruktur dan kualitas pendidikan dilakukan secara

regular oleh pemerintah. Seluruh guru yang mengajar di sekolah harus memiliki kualifikasi tertentu dan telah melewati ujian sertifikasi yang diadakan secara regular oleh pemerintah. Di beberapa negara bagian, guru harus melewati uji tingkah laku untuk menjamin keamanan para murid yang diajarnya.

Secara umum kualitas pendidikan di Australia baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta memiliki kualitas yang tinggi. Oleh sebab itu, disarankan agar sekolah dan universitas di Indonesia dapat bermitra dengan sekolah dan universitas di Australia untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

DAFTAR REFERENSI

1. Australian Qualification Framework 2013.
<http://www.aqf.edu.au/aqf/in-detail/aqf-levels/>
2. Country Education Profile Australia 2013. Australian Government, Australian Education International
3. Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians, 2008.
http://www.mceecdya.edu.au/verve/_resources/national_declaration_on_the_educational_goals_for_young_australians.pdf
4. The Shape of the Australian Curriculum paper. v4.0, 2012.
http://www.acara.edu.au/verve/_resources/The_Shape_of_the_Australian_Curriculum_v4.pdf
5. Curriculum Design Paper, 2013.
http://www.acara.edu.au/verve/_resources/07_04_Curriculum_Design_Paper_version_3+1_%28June_2012%29.pdf
6. Curriculum Development Process. 2012.
http://www.acara.edu.au/verve/_resources/ACARA_Curriculum_Development_Process_Version_6.0_-_04_April_2012_-_FINAL_COPY.pdf
7. Sumber Gambar 1.1 Australian Qualification Framework, 2013
8. Sumber Gambar 2.1 dan Tabel 5.1: Country Education Profile Australia 2013

-o0o-

IV

Sistem Pendidikan di Belanda



Sumber foto kincir angin Belanda: royalelegacy.blogspot.com

Oleh:

Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, M.U.P.M.Sc., Ph.D.

Atase Pendidikan di Den Haag

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Belanda

Wajib belajar yang diterapkan di Belanda adalah mulai usia 4 hingga 18 tahun, yaitu mulai dari program pra-sekolah (usia anak 2-5 tahun), Sekolah Dasar (usia anak 5-12 tahun) hingga Sekolah Menengah (usia anak 12-16 tahun untuk VMBO; 12-17 tahun untuk HAVO; dan 12-18 tahun untuk VWO). Sebagian besar pendanaan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah umum (pemerintah) ditanggung oleh pemerintah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, siswa menempuh tes CITO, yaitu semacam Ujian Nasional, yang diselenggarakan oleh lembaga independen, dengan substansi test yang merupakan gabungan antara penilaian atas proses dan hasil. Hasil tes CITO lebih berupa arahan atau saran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah.

VMBO merupakan *pre-vocational secondary education*, terdiri dari pendidikan umum, berfokus pada pendidikan kejuruan. VWO merupakan pendidikan pra-universitas dengan tingkatan yang paling tinggi, yang bertujuan menyiapkan siswa untuk menempuh pendidikan akademik di jenjang universitas. Adapun lulusan dari HAVO memiliki akses untuk melanjutkan ke jenjang HBO atau pendidikan tinggi. Sistem penjurusan sekolah menengah tersebut terkait dengan adanya pembagian jurusan di tingkat pendidikan tinggi (*bachelor*) yang sudah jelas, antara pendidikan di *Research University*, yang lebih menekankan kepada kepentingan riset, dengan di *University of Applied Science*, yang lebih difokuskan kepada ilmu-ilmu terapan. Dengan demikian, jenjang

Sekolah Menengah sudah merupakan tahap persiapan yang lebih jelas untuk menuju ke tingkat pendidikan tinggi (MBO, HBO, dan WO). Lulusan dari MBO pun dimungkinkan untuk melanjutkan ke program HBO, yang kelak juga dapat melanjutkan hingga jenjang master. Adapun jalur WO (*research university*), merupakan satu-satunya jalur yang memungkinkan kelanjutan studi hingga tingkat master dan doktoral.

Penjaminan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah dilakukan oleh Inspektorat Sekolah. Karena terdapat hubungan antara mutu sekolah dengan prestasi akademik siswa, maka hasil test atau evaluasi oleh CITO juga merupakan masukan untuk penjaminan mutu sekolah. Pada tingkat Pendidikan Tinggi, guna menjaga mutu pendidikan, terdapat badan khusus yang menangani hal ini. Di dalam perkembangannya, sejumlah perguruan tinggi juga melakukan akreditasi bagi masing-masing program studinya sesuai dengan karakteristik dan tuntutan program studi tersebut. Beberapa organisasi akreditasi yang digunakan di Belanda adalah sebagai berikut: NVAO, AACSB, KNAW, AMBA, EQUIS, dan sejenisnya.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	155
DAFTAR ISI	157
1. Pendidikan di Belanda	159
2. Kurikulum Pendidikan	169
3. Guru	171
4. Ujian Nasional	175
5. Penjaminan Mutu	181
6. Pendanaan Pendidikan	183
DAFTAR REFERENSI	185

1

Pendidikan di Belanda

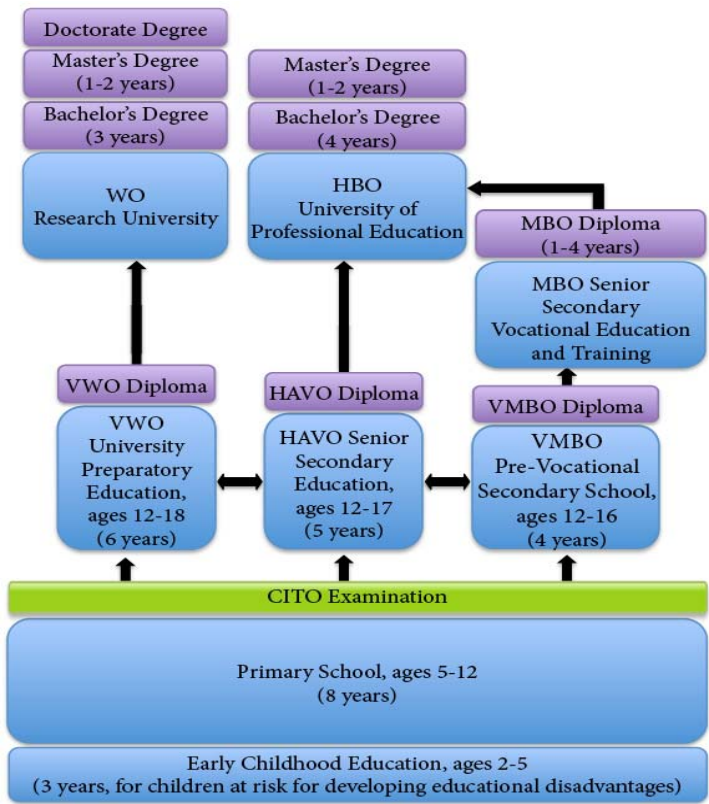
Sejarah perkembangan pendidikan di Belanda sudah berjalan cukup panjang. Sejak awal tahun 1800 M, Belanda sudah mempunyai sistem pendidikan yang baik dan berkembang terus. Undang-Undang (UU) pendidikan yang diberlakukan tahun 1806 merupakan tonggak dimulainya sekolah dasar di seluruh kota. Demikian pula dengan penentuan kurikulum wajib yang terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Belanda, membaca, menulis, dan aritmatika. Adapun sejarah, geografi, dan bahasa modern merupakan mata pelajaran tidak wajib.

Pada pertengahan abad ke sembilan belas, ditetapkan UU tentang Pendidikan Sekolah Dasar (*Lower Education Law*) yang juga berimplikasi pada perubahan isi kurikulum. Pada tahun 1901, wajib belajar bagi anak usia 6 – 12 tahun mulai diperkenalkan. Pendidikan Sekolah Menengah (*Secondary Education*) mulai diperkenalkan pada tahun 1863, baik yang berupa pendidikan umum (*Hogere Burgerschool*), maupun politeknik. Dalam beberapa hal, terdapat suatu perbedaan yang prinsip antara pendidikan menengah dengan gymnasium dan universitas.

Pada umumnya ijazah pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah di Belanda sangat dihargai di dunia internasional. Tentu saja hal tersebut sangat menguntungkan bagi para pelajar internasional yang bersekolah di Belanda. Seluruh kebijakan terkait pendidikan

dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan (*Onderwijs, Cultuur en Wetenschap*) bekerjasama dengan pemerintah di tingkat kota (*gemeente*).

Saat ini, UU Pemerintah Belanda mewajibkan setiap anak yang berusia antara 4 – 18 tahun yang bertempat tinggal di Belanda, dengan status kewarganegaraan manapun, untuk menempuh pendidikan. Adapun sekolah-sekolah yang tersedia untuk dapat melaksanakan pendidikan meliputi sekolah-sekolah negeri (pemerintah) dan sekolah swasta, baik yang berbasis agama-agama tertentu, maupun yang murni dikelola oleh swasta. Selepas dari pendidikan dasar, para siswa melanjutkan ke pendidikan menengah dan kemudian ke pendidikan tinggi (*higher education*). Secara diagram, sistem pendidikan di Belanda ditunjukkan melalui Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Jenjang pendidikan di Belanda.

1.1 Sekolah Dasar (Primary School)

Pendidikan dasar dimulai pada usia 5 tahun, baik untuk seluruh peserta didik dengan kondisi umum, maupun anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebelum memasuki usia Sekolah Dasar, tersedia fasilitas pendidikan untuk usia dini dalam bentuk *Kindergarten* atau *Early Childhood Education* (usia 2-5 tahun). Pendidikan dasar terdiri dari 8 (delapan) kelas, sesuai dengan kelompok usianya. Sekitar dua per tiga dari seluruh siswa Sekolah Dasar di Belanda bersekolah di sekolah – sekolah swasta. Sebagian besar di antara sekolah tersebut dikelola oleh yayasan yang berafiliasi pada satu agama tertentu, seperti Hindu, Islam, Katolik atau Protestan. Terdapat juga sejumlah sekolah yang menggunakan metode khusus, misalnya *Montessori*, *Steiner*, *Jena Plan*, *Dalton* atau *Freinet*.

Mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar yaitu: koordinasi sensorik, Bahasa Belanda, aritmatika, Bahasa Inggris, seni dan musik, ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam. Di beberapa sekolah, siswa juga diwajibkan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau pendidikan moral. Pada dasarnya sekolah disyaratkan untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial. Keragaman etnis warga Belanda juga merupakan hal yang menjadi dasar di dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran.

1.2 Sekolah Menengah (Secondary School)

Jenjang pendidikan ini diperuntukkan bagi siswa yang berusia 12 – 18 tahun atau setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar. Sejak tahun 2008, pendidikan Sekolah Menengah diwajibkan hingga usia 18 tahun.

MBO (*Middelbaar Beroepsonderwijs* atau Sekolah Menengah Kejuruan) diikuti lulusan VMBO (*Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs*) dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 4 tahun. Setelah lulus dari MBO, para siswa dapat melanjutkan ke HBO atau langsung bekerja. Kini, sekolah ini disebut *Regionaal Opleidingencentrum* (ROC atau Pusat Pendidikan Regional).

Terdapat beberapa pilihan jalur untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah, tergantung dari hasil tes CITO yang diambil oleh siswa di akhir Sekolah Dasar serta minat dan arahan dari orang tua siswa. Adapun penjelasan dari masing-masing pilihan arah pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

- **VMBO**
Pendidikan yang memiliki durasi 4 tahun ini merupakan pre-vocational secondary education, terdiri dari pendidikan umum, berfokus pada pendidikan kejuruan (misalnya, bidang teknik dan teknologi, ekonomika, pertanian) dengan pendidikan teoritik dalam bidang bahasa, matematika, sejarah, seni dan ilmu pengetahuan. Komponen teoritik dimaksudkan untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke MBO atau HAVO. Terdapat sekitar 60% siswa terdaftar sebagai siswa VMBO.
- **VWO (*Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs*)**
VWO merupakan pendidikan pra-universitas dengan tingkatan yang paling tinggi, yang harus ditempuh dalam waktu 6 tahun dan bertujuan menyiapkan siswa untuk menempuh pendidikan akademik di jenjang universitas (WO). Namun, sejumlah siswa juga melanjutkan menempuh pendidikan HBO.
Setelah menyelesaikan pendidikan VWO, siswa memiliki akses langsung untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi (Higher Education). Ujian VWO merupakan ujian matrikulasi. Di dalam sistem pendidikan VWO ini dikenal dua jenis, yaitu Gymnasium, yang mensyaratkan beberapa mata pelajaran tambahan di dalam kurikulum wajibnya dan Atheneum yang merupakan program VWO regular.
- **HAVO (*Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs*)**
HAVO merupakan jalur pendidikan yang harus ditempuh dalam waktu 5 tahun. Lulusan dari HAVO memiliki akses untuk melanjutkan ke jenjang HBO atau pendidikan tinggi. Selepas menyelesaikan HAVO, siswa-siswa tertentu juga dapat memilih untuk melanjutkan ke VWO atau MBO.
Tiga tahun pertama di HAVO merupakan program untuk menanamkan dasar-dasar, dimana semua siswa menempuh mata

pelajaran yang sama, yaitu: bahasa, matematika, sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan alam. Di tahun ketiga, siswa harus memilih salah satu dari empat profil pilihan atau spesialisasi yang telah dipilih oleh siswa. Di samping itu, setiap siswa juga harus mengambil satu sampai dengan tiga mata pelajaran tambahan, serta Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Di dalam semua profil, matematika merupakan mata pelajaran wajib, meskipun dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Sebagai mata pelajaran pilihan, siswa dapat mengambil mata pelajaran dari profil yang lain.

Dua tahun terakhir di HAVO (atau 3 tahun terakhir di VWO) merupakan tahun penjurusan untuk memilih bidang pilihan mereka. Dalam jurusan ini, mereka dapat memilih satu diantara empat jurusan sebagai berikut:

- a. *Science and Technology* (Ilmu Teknologi/Fisika)
- b. *Science and Health* (Ilmu Kesehatan)
- c. *Economic and Society* (Sosial Ekonomi)
- d. *Culture and Society* (Sosial Budaya).

Apabila terdapat keraguan pada pilihan jalur ke pendidikan Sekolah Menengah, tidak sesuai dengan minat siswa atau orang tua siswa merasa bahwa anaknya memiliki kemampuan untuk menempuh pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh hasil tes CITO, maka ditempuh tahap adaptasi selama satu tahun, baik untuk VMBO-HAVO, maupun HAVO-VWO. Di tahun berikutnya, siswa dapat melanjutkan pendidikan dengan kurikulum normal. Khusus HAVO-VWO, seringkali diperlukan tambahan satu tahun untuk orientasi, terutama apabila masih belum dapat ditentukan kemana arah pendidikan selanjutnya.

Siswa yang kurang berminat dan tidak berhasil di HAVO atau VWO dapat diturunkan ke VMBO, dengan tingkat kurikulum yang lebih rendah. Mereka yang mengikuti pendidikan universitas tapi belum menempuh sekolah lanjutan dapat mengikuti VAVO (*Voorgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs* atau Sekolah Lanjutan Atas Umum untuk Orang Dewasa).

Mengingat bahwa sistem pendidikan di Belanda tidak mengenal sekolah menengah pertama (*junior high schools*), tahun pertama untuk semua tingkatan di sekolah menengah disebut sebagai *brugklas* atau sebagai *bridging program*, yang menghubungkan antara Pendidikan Dasar dengan Pendidikan Menengah. Pada *brugklas* ini, siswa akan belajar secara bertahap untuk mengatasi adanya perbedaan karakteristik pendidikan pada jenjang yang berbeda, termasuk adanya tuntutan untuk memiliki tanggung-jawab yang lebih tinggi.

Dalam kondisi-kondisi khusus, dimungkinkan bagi siswa yang telah menyelesaikan (memiliki ijazah) VMBO untuk menempuh dua tahun terakhir HAVO dan mengikuti ujian HAVO. Demikian pula untuk siswa yang sudah menyelesaikan (memiliki ijazah) HAVO dapat menempuh dua tahun terakhir VWO dan mengikuti ujian VWO. Hal ini ditujukan agar siswa memiliki akses untuk mengikuti tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan perlunya menghindari kemungkinan akan munculnya dampak negatif akibat belum matangnya kejiwaan siswa atau belum mampunya siswa mengenal dirinya sendiri. Sebagai contoh, bilamana terdapat siswa yang sangat cerdas yang pada awalnya memilih untuk menempuh VMBO karena tidak memiliki motivasi yang cukup, lalu di kemudian hari ternyata menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki potensi untuk menempuh tingkatan yang lebih tinggi, maka siswa tersebut dapat dipindahkan ke HAVO.

Sebagian besar sekolah mensyaratkan rata-rata nilai tertentu untuk meyakinkan bahwa seorang siswa akan mampu menjalankan pembelajaran dengan beban yang lebih berat di tingkatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, seorang siswa dapat pula pindah ke tingkatan pendidikan yang lebih rendah pada saat siswa tersebut mengalami kesulitan sehingga berakibat pada kurang memuaskannya nilai-nilai mata pelajaran yang didapatkan. Contohnya, dapat dilakukan penurunan siswa dari VWO ke HAVO, atau dari HAVO ke VMBO. Untuk mendukung keberhasilan program pendidikan, Pemerintah Belanda juga memberikan tunjangan pendidikan kepada murid-murid (sekolah khusus, umum, dan kejuruan). Demikian pula untuk mahasiswa perguruan tinggi.

1.3 Pendidikan Tingkat Tinggi (*Higher Education*)

Pendidikan Tingkat Tinggi atau *Higher Education* di Belanda terdiri atas 2 jalur, yaitu:

- HBO (*Hogeschool/Universities of Professional Education*)
Merupakan jalur pendidikan tinggi yang bersifat vokasional, yang memberikan pendidikan yang bersifat siap-guna untuk siswa yang ingin langsung bekerja. Di setiap tahun pertama HBO dan WO dilakukan penyaringan yang disebut dengan masa *propedeuse*. Dalam proses ini, setiap siswa diwajibkan menyelesaikan mata pelajaran tahun pertama mereka dalam 2 tahun. Jika siswa tersebut gagal, maka dia akan dikeluarkan dari jurusanannya atau *drop out* (DO).

Syarat untuk dapat diterima di perguruan tinggi dengan jalur HBO adalah memiliki ijazah HAVO/MBO Level 4.

Sistem penilaian yang diberlakukan di perguruan tinggi berada dalam skala 1-10, dengan nilai lulus paling rendah adalah 6. Umumnya nilai 9 sangat jarang diberikan, nilai 10 dianggap aneh jika didapatkan dan 1-3 jarang sekali digunakan.

Sejak tahun 2002, pemerintah Belanda memberlakukan sistem Pendidikan Tingkat Tinggi yang baru. Pada sistem baru ini pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu:

a. *Bachelor's degree*

Ijazah untuk tingkat ini diperoleh setelah menyelesaikan program di *Hogeschool* dengan mengumpulkan kredit sebesar 240 ECTS (*European Credit Transfer System*) selama 4 tahun. Lulusan program *Bachelor* dari *Hogeschool* hanya berhak menggunakan gelar yang berkaitan dengan *Bachelor of Engineering* dan *Bachelor of Nursing*.

b. *Master's degree*

Ijazah untuk tingkat ini diperoleh setelah menyelesaikan program master di *Hogeschool* dengan mengumpulkan kredit sebanyak 120 ELTS (1 sampai dengan 2 tahun). Lulusan program Master dari *Hogeschool* hanya berhak menggunakan gelar yang sesuai dengan jurusanannya.

- WO (*Research Universities*)

Jalur pendidikan tinggi ini memberikan pendidikan yang bersifat spesifik dengan jurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni dan berorientasi pada riset/penelitian. Syarat untuk masuk ke WO adalah memiliki ijazah VWO. Terdapat tiga tingkat yang dapat ditempuh pada jenjang ini, antara lain:

a. *Bachelor's degree*

Ijazah untuk tingkat ini dapat diperoleh setelah mengumpulkan kredit sebanyak 180 ECTS selama 3 tahun. Lulusan program Bachelor dari universitas berhak menggunakan gelar *Bachelor of Science* atau *Bachelor of Arts*, tergantung dari jurusan yang diambil.

b. *Master's degree*

Ijazah untuk tingkat ini diperoleh setelah mengumpulkan kredit sebanyak 60, 90 atau 120 ECTS selama 1, 1,5 atau 2 tahun. Lulusan program Master dari universitas berhak menggunakan gelar *Master of Science* atau *Master of Arts* sesuai jurusan. Sebagian besar program master diakhiri dengan penulisan thesis, dengan bobot ECTS yang bervariasi antar program dan antar universitas.

c. *Doctoral degree*

Program doktoral di Belanda merupakan pendidikan yang paling cepat ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun, yang dilaksanakan melalui program penelitian, tanpa didahului dengan program perkuliahan. Pada umumnya program ini diawali dengan pematangan rencana penelitian dalam waktu antara 1-2 semester di bawah bimbingan *promotor* dan *co-promotor* (bisa lebih dari satu *co-promotor*, tergantung arahan *promotor* dan kompleksitas permasalahan penelitian). Selanjutnya kegiatan penelitian yang dilakukan dapat berupa penelitian lapangan yang berupa pengumpulan data lapangan, pengambilan sampel penelitian, dan/atau eksperimental di laboratorium. Pada tahap akhir setelah disertasi tersusun,

atas persetujuan tim promotor, maka seorang calon doktor (*promovendus*) menempuh ujian tertutup dan ujian terbuka (ujian promosi), yang melibatkan para penguji baik dari dalam universitas sendiri, maupun penguji eksternal.

Secara singkat keseluruhan jenjang pendidikan apabila dilihat dari waktu yang harus ditempuh dapat dilihat di Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Waktu Tempuh Jenjang Pendidikan di Belanda

Jenjang	Waktu yang harus ditempuh
VMBO-HBO (<i>Bachelor</i>)	21 tahun
HAVO-HBO (<i>Bachelor</i>)	21 tahun
VWO-WO (<i>Master</i>)	22 - 23 tahun

2

Kurikulum Pendidikan

Di Sekolah Dasar di Belanda, kurikulum inti pendidikan terdiri dari:

- Bahasa Belanda
- Bahasa Inggris
- Aritmatika dan matematika
- Ilmu sosial dan lingkungan (termasuk geografi, sejarah, ilmu pengetahuan alam, biologi), kewarganegaraan, *life skills* (termasuk pengetahuan umum tentang keselamatan lingkungan, lalu lintas, dll.), ilmu kesehatan, struktur sosial (termasuk pengetahuan umum tentang politik, agama dan ideologi negara).
- Ekspresi kreatif (termasuk seni musik, seni lukis, dan kerajinan tangan)
- Pendidikan olah raga.
- Beberapa sekolah juga dapat menawarkan mata pelajaran Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, dan pendidikan agama tertentu, sebagai mata pelajaran pilihan yang tidak wajib diambil oleh siswa.

Sejak dari mulai pendidikan di Sekolah Dasar hingga selesai, murid-murid yang rata-rata berusia 12 sampai dengan 13 tahun, setelah menempuh ujian akhir Sekolah Dasar akan mendapatkan informasi tentang hasil belajarnya, yang akan menentukan langkah selanjutnya. Ada di antara mereka yang harus masuk ke kelas campuran atau brugklas selama satu tahun, untuk memastikan sekolah lanjutan yang paling sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Adapun kurikulum dan materi pembelajaran untuk Sekolah Menengah di Belanda (VWO,

HAVO dan VMBO) telah dijelaskan secara rinci pada Sub Bab 1.2.

Di samping sekolah-sekolah lokal Belanda, juga terdapat sekolah-sekolah internasional.

Beberapa di antara sekolah internasional juga mendapat subsidi pendanaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Sekolah internasional tersebut merupakan pilihan lain yang mungkin dirasa lebih tepat dibandingkan sekolah lokal, terutama bagi siswa-siswa yang tinggal bersama orang tua mereka yang tinggal di Belanda hanya untuk sementara waktu. Pada umumnya sekolah-sekolah tersebut menggunakan kurikulum standar internasional, yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Di samping itu, juga terdapat sekolah-sekolah yang dikelola oleh kedutaan beberapa negara tertentu, termasuk Indonesia, yang memiliki Sekolah Indonesia Nederland di Wassenaar. Sekolah Indonesia Nederland ini menyelenggarakan pendidikan dari Sekolah Dasar, SMP hingga SMA, dan telah mengalami peningkatan status yang semula adalah *Embassy School* menjadi *Foreign School*, sehingga membuka peluang dapat menerima siswa asing yang bukan warna negara Indonesia.

Di perguruan tinggi, sistem penilaian yang berlaku sejak tahun 2002 adalah mengacu kepada system ECTS (*European Credit Transfer System*), dimana 1 kredit setara dengan 28 jam kerja akademik, dan satu tahun studi penuh waktu (*full-time*) pada umumnya setiap mahasiswa mencapai atau mengumpulkan 60 kredit. Penilaian berkisar dari angka 1 (sangat buruk) hingga 10 (*outstanding*). *Passing grade* terendah adalah 6. Adapun nilai 10 sangat jarang diberikan, nilai 9 kadang-kadang diberikan, dan nilai 1-3 juga sangat jarang diberikan. Sebagai sebuah catatan penting, khususnya bagi mahasiswa asal Indonesia, hingga kini belum terdapat suatu instrumen baku yang digunakan untuk melakukan konversi dan penyetaraan nilai yang didapatkan dengan system ECTS ke dalam nilai-nilai dengan sistem SKS, dengan kisaran nilai A-B-C-D-E, dan Indeks Prestasi 1-4.

3

Guru

Pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan atau *Onderwijs, Culture en Wetenschap* yang disingkat OCW, mewajibkan guru-guru yang mengajar di mulai dari di taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas untuk berijazah universitas (sarjana).

Sistem perencanaan, sertifikasi dan pembinaan karir dilakukan oleh sebuah lembaga organisasi guru (semacam PGRI di Indonesia) yang bersifat independen dan diberi kepercayaan oleh pemerintah, yaitu *Onderwijs Cooperatie*, disingkat OC. Setiap tahunnya, OC menyelenggarakan kongres untuk membicarakan peningkatan kualitas guru dan memberikan penilaian serta penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi baik (*Teachers of the Year*). Di samping itu juga diselenggarakan Internatioanl *Teacher's Day*.



Gambar 3.1 Logo dari OC

Cakupan tugas utama OC, antara lain:

- Menyiapkan instrumen penjaminan kualitas guru
- Menyelenggarakan registrasi dan sertifikasi guru
- Mengembangkan kewirausahaan guru
- Memberikan kesempatan bagi pengembangan profesionalitas guru secara berkelanjutan.

Adapun prinsip yang digunakan di dalam melakukan pengelolaan guru di Belanda adalah:

- *Freedom of education*, yang dijabarkan dalam bentuk pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar berbagai komponen/bagian. Dalam hal ini, pemerintah (kementerian) menyiapkan kerangka pengelolaan dan rambu-rambu umum, *School Boards* bertanggungjawab atas kualitas guru, sedangkan kelompok/organisasi guru profesional berperan sebagai aktor utama dalam penjaminan mutu guru.
- *Slow transition towards modern governance*, yang mencakup penerapan desentralisasi, deregulasi, menciptakan keragaman dan otonomi.
- Berbasis profesi, tanggung-jawab dan akuntabilitas, dan pelaksanaan supervisi secara proporsional oleh inspektorat.

Sertifikasi guru dilaksanakan oleh OC, melalui salah satu unitnya yang disebut dengan *registerleraar.nl*. Seorang guru layak bersertifikat profesional, karena memiliki kompetensi dan senantiasa melakukan pengembangan profesionalnya yang dimonitor secara periodik. Namun demikian, sertifikasi guru bersifat sukarela atau tidak wajib, meskipun berimplikasi pada remunerasi guru. Sertifikat berlaku selama 4 tahun untuk kemudian dievaluasi ulang dan diperbaharui. Adapun tujuan



Gambar 3.2 Logo registerleraar.nl

utama sertifikasi guru adalah lebih pada terbentuknya *critical mass* untuk membangun otoritas moral dari dalam.

Sejak dari proses pendidikan guru diberlakukan, persyaratan kompetensi yang jelas meliputi:

- Setiap guru harus memiliki wawasan pendidikan yang luas,
- Setiap guru harus bekerja untuk peningkatan kualitas akademik siswa, dan
- Setiap guru harus melakukan pengembangan diri secara menerus.

4

Ujian Nasional

Di dalam sistem pendidikan di Belanda, Ujian Nasional (UN) merupakan bagian dari upaya penyetaraan kompetensi siswa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan (OCW) memberikan kewenangan kepada lembaga independen untuk menyusun standar nasional pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lembaga tersebut adalah CITO (*The National Institute for Educational Measurement*).

CITO merupakan sebuah lembaga yang pada awalnya pada saat dibentuk tahun 1968 dan termasuk di dalam struktur organisasi pemerintah (berada di bawah OCW). Namun, sejak tahun 1999, lembaga ini menjadi lembaga independen yang diswastakan sebagai ‘not-for-profit’ organization.

Di Belanda, UN SD bersifat optional, sekolah boleh memilih ikut atau tidak ikut. Namun, banyak SD di sana tidak mau ketinggalan dan beramai-ramai menyelenggarakan UN agar dihargai masyarakat dan lulusannya dapat lebih lancar untuk mendaftar di sekolah-sekolah menengah. CITO menyatakan bahwa sekitar 85% SD yang menyelenggarakan UN.



Gambar 4.1 Logo CITO.

Tugas utama CITO adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi proses serta hasil belajar. Bagian dari tugas tersebut adalah menyusun instrumen untuk melakukan pengawasan perkembangan proses belajar siswa dan melaksanakan UN pada jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.

Setiap tahunnya, CITO mengembangkan lebih dari 500 variasi soal UN bagi sekitar 190.000 siswa. Soal yang sudah dikembangkan oleh CITO kemudian diserahkan ke OCW. Pihak OCW yang selanjutnya bertugas mendistribusikan soal – soal ini ke seluruh sekolah di Belanda.

Hasil tes CITO digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis sekolah lanjutan yang sebaiknya ditempuh oleh setiap siswa. Sistem pengawasan dan evaluasi oleh CITO bersifat:

- Total/menyeluruh untuk semua siswa dan semua sekolah
- Fleksibel tetapi sistematis
- Holistik tetapi tetap dimungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan
- Berbasis pada kemampuan siswa secara individual, tidak ada sistem pemeringkatan atau pembuatan urutan kemampuan siswa.

Sistem evaluasi yang diterapkan oleh CITO terdiri dari serangkaian instrumen, proses registrasi/pendaftaran yang bersifat fleksibel dan menggunakan kerangka diagnostik yang beragam serta format laporan hasil evaluasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun metode evaluasi dapat dipilih antara yang tradisional (*pen-and-paper*) atau berbasis komputer (*computerized*).



Gambar 4.2 Soal – soal CITO.

Secara umum, evaluasi yang dilakukan CITO menekankan pada perkembangan proses dan hasil belajar. Hal ini untuk menunjukkan apakah setiap siswa menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Namun demikian, hasil tes ini bersifat indikatif, artinya belum merupakan hasil yang bersifat final. Hal semacam ini sangat individual, artinya masing-masing individu akan menunjukkan kemampuan yang berbeda-beda. Unsur-unsur penilaian terdiri dari:

- Penilaian kemampuan individual secara umum (*individual command of core skills*),
- *Social-emotion development*,
- Sikap terhadap proses belajar (*attitude towards learning*),
- *Educational benchmarks (progress relative to peer-group, school and region)*, dan
- *Educational achievement over time*.

CITO tes dilakukan bagi siswa yang sudah menempuh pendidikan hingga tahun ke-8, dalam bentuk pilihan ganda (*multiple choice*) dengan materi test: kemampuan membaca dan menulis, matematika dan aritmatika, keterampilan belajar, dan ilmu sosial dan lingkungan (pilihan). Saat ini, terdapat sekitar 15% sekolah-sekolah yang menggunakan instrumen tambahan lain untuk menguji capaian siswa.

Hasil tes ini pada perkembangannya juga mempertimbangkan beberapa hal lain, yaitu:

- Harapan dan keinginan orang tua siswa dan siswa sendiri,
- Saran yang diberikan oleh Kepala Sekolah atau guru/wali kelas pada kelas akhir di Sekolah Dasar, yaitu pada saat siswa berusia 11 atau 12 tahun, dan
- Saran dari pihak lain (*second opinion*), yang dapat berupa hasil test psikologi, *achievement test*, *entrance test* atau hasil observasi di kelas.

Hasil tes dan berbagai pertimbangan tersebut pada akhirnya digunakan untuk memberikan informasi bagi setiap siswa untuk menentukan langkah/pilihan pendidikan selanjutnya. Bagi sekolah-sekolah lanjutan (*secondary schools*), hasil CITO juga memberikan informasi yang berguna untuk menentukan proses penerimaan siswa baru dan keputusan untuk menentukan tingkatan pendidikan bagi calon siswa baru. Adapun bagi sekolah-sekolah dasar, CITO memberikan saran tentang pendidikan lanjutan. Bagi siswa dan orang tua siswa, CITO memberikan dukungan informasi tentang jenis-jenis sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi siswa.

Tujuan UN Sekolah Dasar di Belanda adalah untuk menentukan arah siswa untuk memilih tiga jalur, yaitu: (1) sekolah menengah akademis (VWO) dengan lama studi 6 tahun yang merupakan jalur bergengsi masuk universitas; (2) sekolah menengah umum (HAVO) dengan lama studi 5 tahun yang berciri sekolah komprehensif seperti sekolah GCSE di Inggris, semacam gabungan SMP dan SMA di Indonesia; dan (3) sekolah menengah vokasional/kejuruan (VMBO) dengan lama studi 4 tahun, semacam SMK di Indonesia. Di akhir program dari ketiga jalur ini, siswa mengikuti UN. Tetapi nilai yang tercantum di ijazah diambil dari hasil ujian internal sekolah sebesar 50% dan 50%-nya lagi dari hasil UN. Siswa cenderung hanya mengikuti UN pada 2 atau 3 mata pelajaran saja.

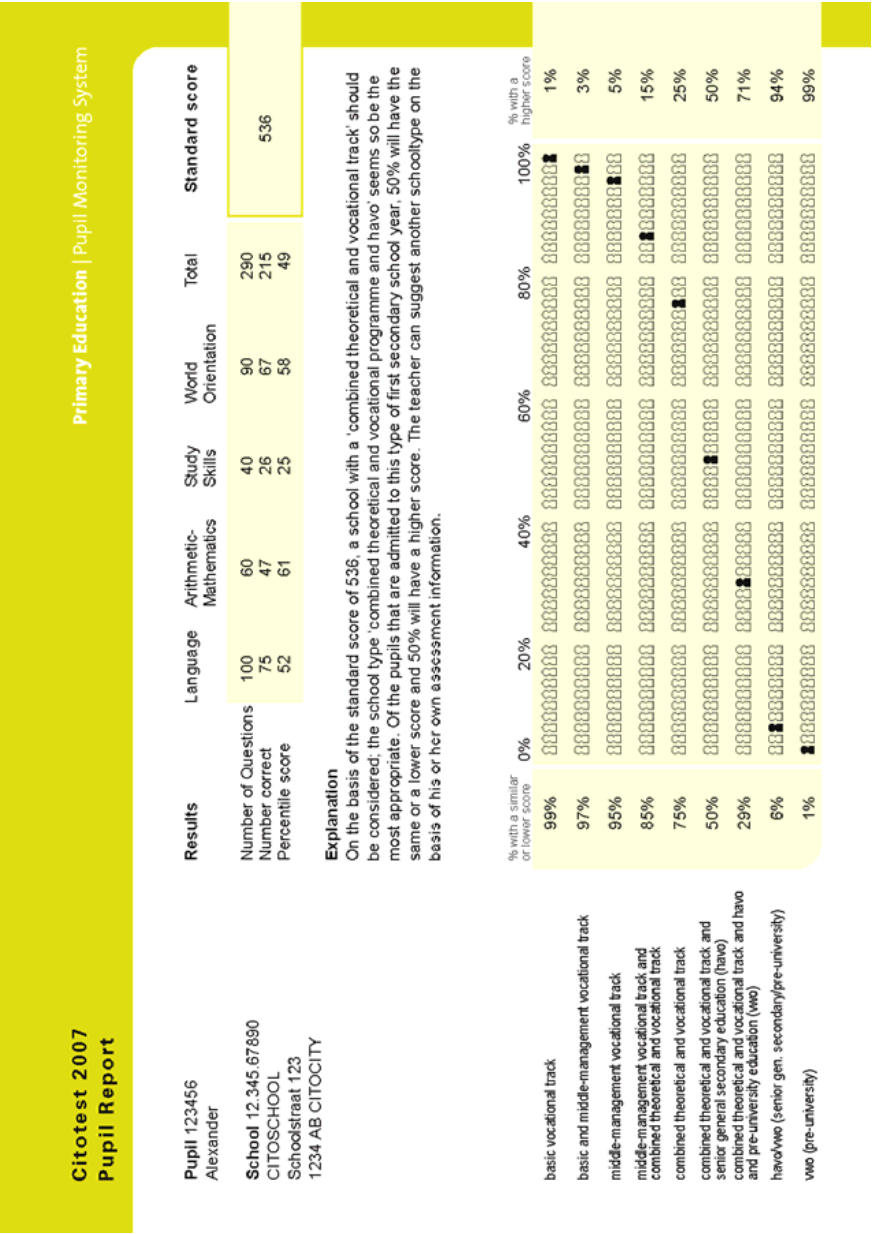
Di dua tahun pertama di sekolah menengah, siswa dapat berpindah jalur kalau merasa tidak cocok. Hasil ujian SD juga tidak mutlak menentukan jalur sekolah menengah yang dipilih karena siswa dan orang tua punya kebebasan untuk memilih jenis sekolah yang diinginkan. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di SD dan di sekolah menengah akademis dan umum ditambah pilihan mata pelajaran bahasa

asing lainnya. Bahasa asing lain yang populer dipilih adalah Bahasa Jerman dan Perancis.

Di samping melakukan pengawasan dan evaluasi proses belajar mengajar setiap siswa secara individual, CITO juga memberikan bantuan kepada sekolah untuk merencanakan proses pembelajaran dan strategi *remedial* atau perbaikan. Di dalam perkembangannya, sistem evaluasi yang dikembangkan CITO secara konseptual bersifat universal. Namun demikian, dapat disesuaikan untuk berbagai karakteristik siswa di berbagai negara, terlepas dari sistem yang ada di negara tersebut. CITO juga mengakomodasi berbagai kebutuhan khusus, misalnya versi digital, versi *braille*, dan versi rekaman audio dalam bentuk CD.

Setelah pelaksanaan ujian nasional oleh masing-masing sekolah, sekolah mengirimkan lembar jawaban ke CITO. Selanjutnya CITO akan melakukan pemindaian atau *scanning*. Hasil pemindaian dan pemeriksaan dicetak dalam bentuk *pupil reports* dan dikirimkan kembali ke sekolah-sekolah. Hasil secara keseluruhan disimpan di dalam situs internet, yang hanya dapat diakses oleh sekolah-sekolah. Gambar 4.3 menunjukkan contoh *pupil report* hasil tes CITO.

Untuk keperluan kualitas sekolah, lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas sekolah adalah Inspektorat Sekolah, dengan instrumen umum yang disesuaikan dengan kondisi dan filosofi masing-masing sekolah. Di samping itu, terdapat peran organisasi sekolah-sekolah dan organisasi orang tua siswa di dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.



5

Penjaminan Mutu

Di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, tanggung-jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas mutu sekolah ada di tangan Inspektorat Sekolah. Karena terdapat hubungan antara mutu sekolah dengan pretasi akademik siswa, maka hasil tes atau evaluasi oleh CITO juga merupakan masukan untuk penjaminan mutu sekolah.

Pada tingkat Pendidikan Tinggi, guna menjaga mutu pendidikan terdapat badan khusus yang menangani hal ini. Berdasarkan peraturan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2002, program bergelar akademik harus diakreditasi oleh Organisasi Akreditasi Belanda dan *Flanderen* (wilayah Belgia bagian utara). Terlebih lagi, kalau program itu dibiayai oleh negara.

Di dalam perkembangannya, sejumlah perguruan tinggi juga melakukan akreditasi bagi masing-masing program studinya sesuai dengan karakteristik dan tuntutan program studi tersebut. Beberapa organisasi akreditasi yang digunakan di Belanda adalah sebagai berikut:

- NVAO: Organisasi Akreditasi Belanda dan Fleming merupakan sebuah lembaga akreditasi independen yang menjamin kualitas pendidikan tinggi di Belanda dan Flander melalui program penilaian yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- AACSB: Akreditasi AACSB Internasional dengan standar pencapaian tertinggi bagi sekolah bisnis di seluruh dunia. Institusi yang memperoleh akreditasi ini, telah memastikan komitmen

mereka terhadap mutu dan perbaikan yang berkelanjutan melalui penilaian bersama yang mendalam dan menyeluruh.

- KNAW: Lembaga Pendidikan Riset Universitas Erasmus Rotterdam telah diakreditasi oleh Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda (KNAW). Akademi ini diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi terhadap semua lembaga pendidikan riset di Belanda. Lembaga pendidikan riset harus diakreditasi ulang setiap enam tahun.
- AMBA: Asosiasi MBA (AMBA) telah diakui secara internasional sebagai standar global bagi seluruh program Master dalam bidang bisnis dan administrasi (MBA), Doktoral dalam bidang bisnis dan administrasi (DBA) dan Master dalam bidang bisnis dan manajemen (MBM). Saat ini AMBA telah mengakreditasi program MBA, DBA dan MBM di 145 sekolah bisnis yang berada di 68 negara.
- EQUIS: sistem uji mutu yang berlaku di Eropa, peningkatan dan akreditasi bagi institusi pendidikan tinggi dalam bidang manajemen dan administrasi bisnis bertaraf internasional yang terkemuka.

6

Pendanaan Pendidikan

Sebagian besar sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah di Belanda dibiayai oleh pemerintah, baik langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah lokal (*gemeente*), dengan dana yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Meskipun demikian, orang tua siswa juga diminta untuk berpartisipasi untuk membayar tambahan biaya pendidikan, khususnya untuk mendukung program-program khusus, misalnya untuk *study tour* dan kegiatan-kegiatan khusus. Sekolah swasta, yang jumlahnya relatif sedikit dibanding sekolah negeri, pun juga mendapat bantuan dana dari pemerintah. Buku-buku paket pelajaran disediakan secara cuma-cuma untuk seluruh siswa, kecuali buku-buku keperluan khusus, misalnya kamus, dan alat-alat bantu misalnya kalkulator, tetap harus disediakan oleh orang tua.

Di tingkat Pendidikan Tinggi, bagi mahasiswa yang mengalami keterbatasan finansial untuk melanjutkan studi dapat mengajukan pinjaman dana belajar (*studie financiering*) yang diatur oleh sebuah lembaga bernama *Informatie Beheer* (Pengatur Dana Belajar). Untuk mendapatkan pinjaman setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan, yaitu terdaftar secara resmi pada sekolah atau universitas. Di samping itu, siswa tersebut harus terdaftar di dalam bursa prestasi, yang mewajibkan pinjaman itu dikembalikan sesudah studi selesai dengan masa dan jumlah angsuran tertentu. Sebagai gambaran perkiraan, dari data tahun 2010 dan 2011, mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh

pinjaman sebesar 853,16 Euro setiap bulan, maksimal selama tiga tahun. Pengembalian dapat dilakukan dengan bunga 2,39 persen, dan dengan minimal cicilan 45,41 Euro per bulan selama 15 tahun.

DAFTAR REFERENSI

1. http://www.educaide.nl/_resources/downloads/110331ArtDutchEduNL.pdf
2. <http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/netherlands-instructional-systems/>
3. <http://myinternationaladventure.com/01/live-in-the-netherlands/4/>

-o0o-

V

Sistem Pendidikan di Filipina



Sumber foto [Malacanang_palace_view_wikipeda_org](#)

Oleh:

Dr. Ir. Paristyanti Nurwardani
Atase Pendidikan di Manila

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Filipina

Filipina merupakan negara berkembang tetapi institusi pendidikannya sangat diminati oleh negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Di Filipina tercatat pelajar asing dari 73 negara. Institusi pendidikan Filipina menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Biaya pendidikan di Filipina sangat murah. Dalam pendidikan profesi selalu menerapkan lisensi profesi berstandar internasional sehingga lulusannya diserap pasar kerja dunia seperti perawat, sekretaris, guru Bahasa Inggris, dokter gigi, tenaga farmasi, dokter umum dan pebisnis.. Salah satu keberhasilan pendidikan Filipina adalah lulusan pendidikan keperawatan yang sudah diterima di banyak negara.

Pemerintah Filipina secara umum mempunyai 3 lembaga yang mengelola pendidikan yaitu *Department of Education* (DepEd); *Technical Education and Skill Development Authority* (TESDA) serta *Commission on Higher Education* (CHED). Wajib belajar disyaratkan selama 7 tahun (minimal 1 tahun *pre-school* dan 6 tahun *elemenatry*). Sampai dengan Bulan Maret tahun 2012, sistem pendidikan di Filipina menganut pola pendidikan dasar 10 tahun (6 tahun *Elementary* dan 4 tahun *High School*). Mulai bulan April tahun 2012, Pemerintah Filipina menerapkan pola pendidikan dasar 12 tahun (6 tahun *elementary*, 4 tahun *junior high school* dan 2 tahun *vocational* / 2 tahun *senior high school*). Program Sarjana, Master dan Doktor berturut-turut ditempuh selama 4, 2 dan 3 tahun.

Lulusan *vocational/ high school* yang akan bekerja sebagai teknisi, harus mempunyai sertifikat profesi yang berlaku secara nasional dan internasional. Filipina mempunyai 241 profesi vokasi bertaraf internasional tetapi bertarif lokal. Perkuliahan tingkat sarjana rata-rata ditempuh selama 4-5 tahun. Lulusan sarjana di Filipina yang akan bekerja sebagai tenaga administrasi dan manajer disyaratkan untuk menempuh program lisensi profesi melalui “*National Board Exam*”(calon guru, apoteker, perawat, insinyur dan lain-lain).

Jika dibandingkan dengan negara lain, biaya pendidikan di Filipina relatif murah. Sebagai contoh, biaya pendidikan untuk program kedokteran rata-rata US\$ 700-1,000/semester (untuk warga Filipina program ini “gratis” karena dirancang dengan sistem *residential doctor*). Sekolah pilot di Filipina biayanya hanya 60-70% dari biaya sekolah pilot di Indonesia.

Yang menarik dan penting untuk dipelajari dari Sistem Pendidikan di Filipina adalah lulusannya profesional, disiplin terhadap prosedur, kreatif dan memiliki tingkat percaya diri yang tinggi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	189
DAFTAR ISI	191
1. Pendahuluan	193
2. Struktur Dasar Sistem Pendidikan di Filipina	195
3. Kurikulum Pendidikan Filipina	203
4. Sistem Ujian di Filipina	213
5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Filipina	219
6. Pengembangan dan Pembinaan Guru	229
7. Penutup	237
DAFTAR REFERENSI	241

1

Pendahuluan

Pemerintah Filipina mempunyai tiga lembaga pengelola pendidikan, yaitu: *Department of Education* (DepEd), *Technical Education and Skill Development Authority* (TESDA) dan *Commission on Higher Education* (CHED). DepEd menangani administrasi serta koordinasi pendidikan dasar dengan daerah (*Ragion*). CHED mengelola regulasi pendidikan tinggi, kurikulum, pengawasan ujian, peraturan sarana prasarana serta penentuan dana masuk perguruan tinggi (*tuition fee*). TESDA berfungsi untuk memformulasikan rencana pengembangan yang komprehensif dalam bidang tenaga kerja tingkatan menengah sehingga menghasilkan tenaga kerja yang profesional serta siap kerja di dunia industri, termasuk di dalamnya adalah program magang dan *dual training*. TESDA bertugas untuk mengelola sistem pelatihan tenaga kerja setelah siswa selesai dari pendidikan menengah dan sebelum memasuki dunia kerja.

Struktur dasar pendidikan di Filipina adalah sekolah dasar, sekolah menengah atau *high school*, sekolah teknik dan kejuruan serta pendidikan tinggi. Sekolah dasar ditempuh selama 6 tahun, sekolah menengah selama 4 tahun, pendidikan dan pelatihan (Diklat) selama 1 bulan sampai dengan 3 tahun, sarjana selama 4 tahun dengan jumlah SKS sebanyak 190-216 SKS, magister selama 2 tahun dan doktor selama 3 tahun.

Kurikulum yang digunakan mulai dari pra-sekolah sampai dengan perguruan tinggi adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

Kurikulum pra-sekolah hanya memuat kompetensi kesiapan siswa untuk belajar membaca (bukan membaca) dan keterampilan fundamental. Kurikulum di sekolah dasar hanya memuat 8 mata pelajaran wajib. Kurikulum sekolah menengah memuat 11 mata pelajaran wajib. Kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan 8-9 mata kuliah wajib, sedangkan mata kuliah program studi diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan master mewajibkan 12 SKS mata kuliah wajib, 12-18 SKS mata kuliah program studi dan 6 SKS berupa tesis. Bagi lulusan master yang tidak membuat tesis, maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan ke program doctoral. Kurikulum pendidikan doctoral mensyaratkan mata kuliah wajib sebanyak 12 SKS, 21-36 SKS berupa mata kuliah spesialisasi dan 12 SKS untuk disertasi.

Siswa sekolah dasar dan menengah harus menempuh ujian nasional (NAT atau *National Achievement Test*) di Filipina. NAT dilaksanakan pada kelas 3, 5 dan 7. Sistem ujian nasional di Filipina dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian performansi kualitas pendidikan di tingkat sekolah, kecamatan, distrik, provinsi dan nasional. Bagi sekolah yang tidak mencapai performansi pendidikan yang ditentukan, maka dapat memperbaikinya pada saat *summer time* melalui program *remedial*.

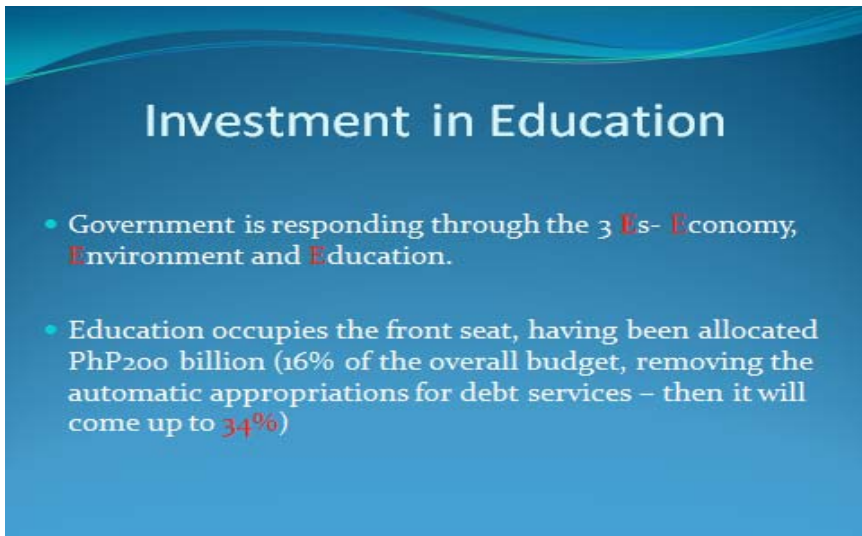
Sistem penjaminan mutu pendidikan di Filipina dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. Dari pihak pemerintah, institusi yang melakukan penjaminan mutu adalah DepEd dan CHED. Pihak pemerintah mengakui 5 lembaga akreditasi swasta yaitu: ACSCU-AAI atau *Association of Christian Schools, Colleges and Universities Accrediting Agency Incorporated*, PAASCU atau *Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities*, PACUCOA atau *Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation*, AACCUP atau *Accrediting Agency of Charter Colleges and Universities of the Philippines* dan ALCUCOA atau *Association of Local Colleges*.

2

Struktur Dasar Sistem Pendidikan di Filipina

2.1. Regulasi

Pemerintah Filipina sangat menjunjung tinggi pentingnya arti pendidikan. Dalam kebijakan nasional, pemerintah bertanggung jawab terhadap tiga pilar utama yang dikenal dengan 3Es: *Economy*, *Environment* dan *Education*, lihat Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Flier kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan

Perhatian yang sangat tinggi Pemerintah terhadap pendidikan di Filipina dibuktikan dengan dibentuknya tiga kementerian yang menangani pendidikan yaitu DepEd (*Department of Education*), TESDA (*Technical Education and Skill Development Authority*) serta CHED (*Commission of Higer Education*). Pemerintah Filipina mengistilahkannya dengan 'A Tripolized Education System'.

Regulasi berupa perundang-undangan tentang pendidikan pun dituangkan dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-undang tentang Pendidikan Dasar dituangkan dalam Republic Act 9155 yang menyatakan,

"An act instituting a frame work of governance for basic education, establishing authority and accountability, renaming the department of education, culture and sports as the department of education, and for other purposes".

Undang-undang tentang Pendidikan Teknik dan Kejuruan ditungkan dalam Republic Act 7796 yang menyatakan,

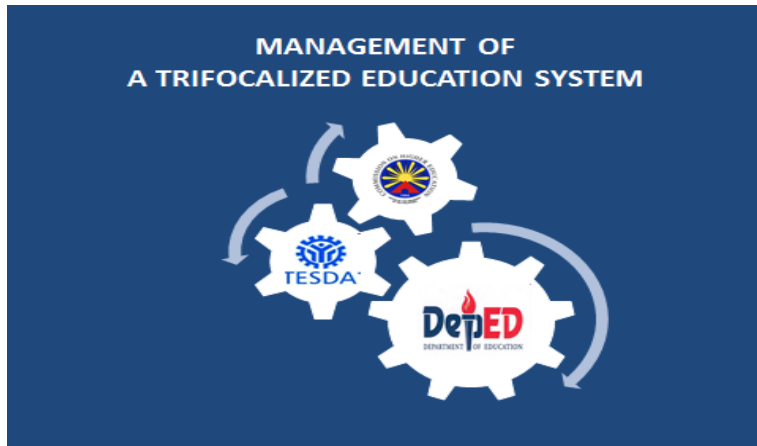
"An act creating the technical education and skills development authority, providing for its powers, structure and for other purposes".

Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi dituangkan dalam Republic Act 7722 yang menyatakan,

"An act creating the commission on higher education, appropriating funds therefore and for other purposes".

2.2. Sistem Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sistem pendidikan di Filipina dikelola oleh DepEd, TESDA dan CHED, seperti tampak pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Tiga kementerian yang bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di Filipina

Tugas dan Fungsi DepEd adalah:

1. Memformulasikan, mengimplementasikan dan melakukan koordinasi kebijakan
2. Merencanakan program dan project Pendidikan Dasar formal dan non-formal
3. Melakukan supervisi untuk semua institusi Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk sistem belajar alternatif (pendidikan jarak jauh) baik untuk sekolah negeri maupun swasta
4. Bertanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara secara utuh melalui sistem Pendidikan Dasar terintegrasi yang sesuai dan relevan dengan pengembangan tujuan nasional

Tugas dan fungsi TESDA adalah:

1. Mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan memonitor program pengembangan pendidikan keterampilan
2. Mempromosikan dan mengembangkan tenaga kerja tingkat menengah
3. Mengembangkan dan menyetujui standar pengujian keterampilan
4. Mengembangkan sistem akreditasi untuk lembaga pengembangan tenaga kerja tingkat menengah

5. Mendanai program-program pendidikan kejuruan dan pengembangan keterampilan
6. Mengembangkan program Diklat untuk pelatih/ instruktur

Tugas dan fungsi CHED adalah:

1. Mengembangkan kualitas dan relevansi Pendidikan Tinggi
2. Memastikan kualitas perguruan tinggi agar dapat dijangkau oleh semua warga negara
3. Memastikan dan melindungi kebebasan akademis untuk pertumbuhan intelektual yang berkelanjutan, penelitian dan pembelajaran yang tinggi dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan nilai kepemimpinan yang efektif, pendidikan profesi tingkat tinggi dan melakukan pengayaan terhadap sejarah dan warisan budaya
4. Berkomitmen terhadap moral yang tinggi, menghilangkan praktek korupsi, mengembangkan institusi yang transparan dan akuntabel serta berpartisipasi dalam pengedepankan tatakelola *good governance*



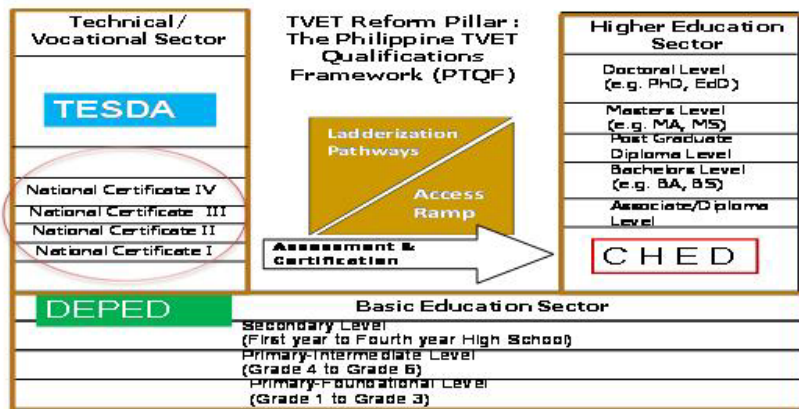
Gambar 2.3 Sistem pendidikan di Filipina

Secara terintegrasi berikut ini adalah urutan implementasi pendidikan formal di Filipina yaitu: Pra-sekolah (durasi belajar 1-3 tahun), Sekolah Dasar atau *Elementary School* (durasi belajar 6 tahun), Sekolah Menengah Atas atau *High School* (durasi belajar 4 tahun) atau Sekolah Menengah Kejuruan atau *Vocational Secondary School* atau

Sekolah Khusus atau *Special School*.

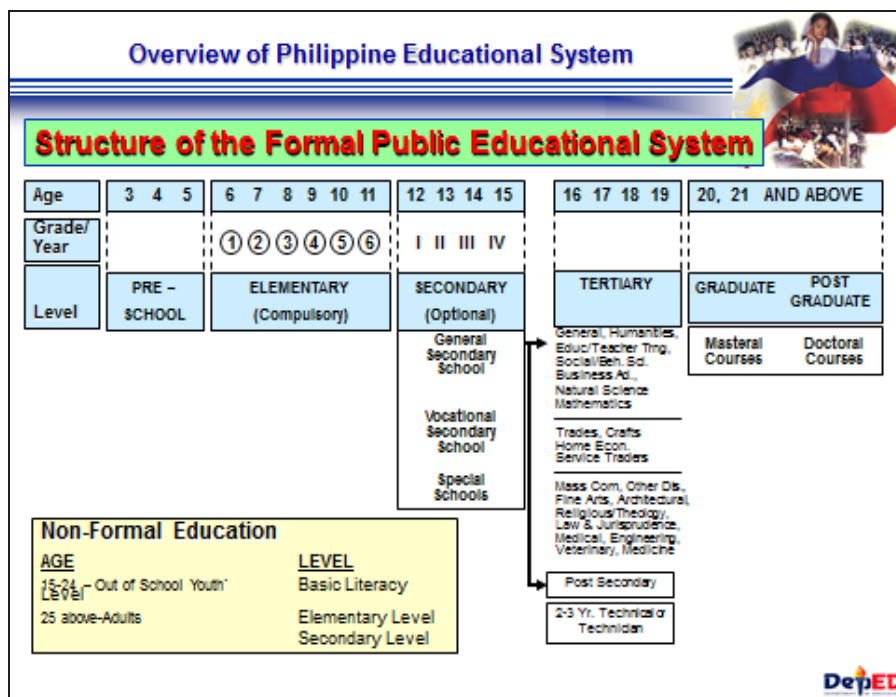
Lulusan Sekolah Menengah dapat melanjutkan ke TESDA yang berdurasi 1 - 36 bulan atau yang 2 – 3 tahun (untuk mendapatkan sertifikasi teknisi dan diakui oleh lembaga internasional) atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Lulusan TESDA yang melanjutkan ke perguruan tinggi harus melalui tahap matrikulasi (*bridging program*).

Lulusan Sarjana jika ingin menjadi professional, maka yang bersangkutan harus mengikuti *National Board Exam* agar memperoleh sertifikat profesi tingkat nasional/internasional (diakui oleh beberapa negara lain). Lulusan Sarjana dapat pula langsung melanjutkan ke program Master. Lulusan master dapat melanjutkan ke program Doktor.



Gambar 2.4 Keterkaitan tiga kementerian pendidikan dalam sitem pendidikan Filipina

Pendidikan non-formal di Filipina dibagi menjadi 2 jenjang yakni jenjang muda dan jenjang dewasa. Jenjang muda ditujukan bagi warga negara Filipina yang berusia 15-24 tahun agar menguasai kemampuan membaca tingkat dasar. Warga Filipina yang berusia di atas 25 tahun ke atas diharapkan mampu untuk membaca dengan kemampuan setara dengan Sekolah Menengah.



Gambar 2.5 Usia siswa per jenjang pendidikan

Jika diurutkan per jenjang, maka sistem pendidikan Filipina dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pra-Pendidikan Dasar

Pra-Pendidikan Dasar disiapkan untuk anak berusia 3-5 tahun. Program yang ditawarkan adalah *nursery* (pendidikan anak usia dini) untuk anak berusia 3-4 tahun, dan *kindergarten* (Taman Kanak-kanak) untuk anak berusia 4-5 tahun.

2. Pendidikan Dasar.

Pendidikan Dasar merupakan kebijakan pemerintah untuk wajib belajar. Sekolah dasar terdiri dari enam tingkatan kelas. Pada beberapa sekolah swasta terdapat penambahan tingkatan kelas, misal kelas 7. Kelas Pendidikan Dasar dikelompokkan menjadi dua subdivisi utama, yaitu *primer* (dasar) meliputi tiga tingkatan kelas pertama (Kelas 1 – 3), dan *intermediate* (lanjutan) terdiri dari 3 atau 4 tingkatan kelas (Kelas 4 - 6/7).

3. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah di Filipina terdiri dari 4 tahun yang ditujukan kepada siswa-siswi berusia 12-16 tahun. Filipina tidak mengenal Sekolah Menengah Pertama (tanpa *Junior Secondary School*). Setelah lulus Pendidikan Dasar, maka pendidikan lanjutannya langsung ke Pendidikan Menengah yang terdiri dari beberapa kelompok tergantung pada fokus sekolah atau “*theme or content*”. Beberapa fokus yang dikembangkan adalah *Center of Excellent High School in Math, Robotic, Science* dan lain-lain.

4. Pendidikan Teknik dan Kejuruan

Pendidikan Teknik dan Kejuruan adalah pendidikan pasca-sekolah menengah berupa pendidikan dan pelatihan teknik serta kejuruan, pelatihan keterampilan dan pengembangan pemuda luar sekolah juga pengangguran. Pelatihan ini ditujukan kepada mereka yang berusia di atas 16 tahun sampai dengan usia berapapun (tanpa batas usia). Lulusan TESDA diharapkan dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah di dunia industri.

Lembaga TESDA di Filipina sangat berhasil dalam memanfaatkan kesempatan kerja pada tingkat menengah di seluruh penjuru dunia. TESDA menyediakan 210 jenis tenaga profesi bertaraf internasional (diakui lembaga internasional) mulai dari sertifikat level I (SL-I) sampai dengan sertifikat level IV (SL-IV). Dengan demikian, jumlah seluruh kompetensi TESDA yang terstandar internasional adalah 840 profesi. Tenaga kerja tingkat menengah di Filipina dapat menyumbang pendapatan Negara Filipina sebesar 10%. Sebagian besar tenaga kerja Filipina bekerja di sektor kesehatan seperti perawat, dokter, dokter gigi, apoteker, juga bidang profesi lainnya seperti akuntan, mengetik dan perikanan.

5. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dibagi menjadi tiga bagian yaitu Sarjana, Masteral dan Doktoral.

a) Pendidikan Sarjana

Pendidikan Sarjana ditujukan untuk lulusan sekolah menengah yang berusia di atas 16 – 21 tahun. Program Sarjana dirancang untuk 4-5 tahun. Program studi yang umum ditawarkan adalah dari bidang keilmuan humanities, sosial, seni, sains, komunikasi,

bisnis, ekonomi, keagamaan dan lain-lain.

b) Pendidikan Master

Pendidikan Master ditujukan untuk lulusan Sarjana dengan usia di atas 20 tahun. Program Masteral umumnya dirancang untuk 2 tahun. Program studi yang dikembangkan adalah linier dengan program Sarjana.

c) Pendidikan Doktoral

Pendidikan Doktoral ditujukan untuk lulusan Master dengan usia di atas 21 tahun. Program Doktoral dirancang untuk selesai selama 3 tahun. Program studi yang dikembangkan umumnya linier dengan program Sarjana dan Master.

3

Kurikulum Pendidikan Filipina

Sistem pendidikan di Filipina, mulai dari pra-sekolah sampai dengan perguruan tinggi menggunakan Kurikulum Standar Berbasis Kompetensi (KSBK).

1.1 Pra-Sekolah

Pada sekolah taman kanak-kanak, kurikulum hanya berupa kesiapan untuk belajar membaca dan keterampilan dasar (foundational skills). Kurikulum pra-sekolah dilaksanakan selama 1-3 tahun.



Gambar 3.1 Situasi belajar di taman kanak-kanak

a. Pendidikan Dasar

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Filipina, kurikulum di SD

Negeri dan Swasta berbeda. SD negeri menerapkan kurikulum wajib saja sedangkan SD Swasta selalu menambah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Kurikulum SD harus diselesaikan selama 6 tahun.

Yang menarik adalah bahasa pengantar mata pelajaran. Pada kelas 1 – 3, guru dapat menggunakan bahasa ibu, yaitu: *Tagalog*, *Visayas* atau *Cebuano*, dan atau dicampurkan dengan Bahasa Inggris. Mulai kelas 4 – 6, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah Bahasa Inggris. Tabel 3.1 menampilkan rincian mata pelajaran di SD Negeri dan Swasta.

Tabel 3.1 Mata Pelajaran di SD Negeri dan Swasta

Sekolah Dasar Negeri	
Mata Pelajaran Inti	Matematika, Ilmu Pengetahuan, Bahasa Inggris, Bahasa Filipina, Makabayan (Ilmu Sosial, Pendidikan Nilai Moral).
	Pada Kelas-3 di tambah mata pelajaran sains.
Mata Pelajaran Pendukung	Musik, seni dan pendidikan jasmani
Sekolah Dasar Swasta	
Mata Pelajaran	Matematika, bahasa inggris, sains, ilmu sosial, komputer dasar, bahasa Tagalong, musik, seni dan teknologi, kesehatan dan pendidikan jasmani.
	Di sekolah katolik diberikan mata pelajaran agama atau kehidupan umat Kristen.
	Pada sekolah internasional diberikan mata pelajaran tambahan berupa bahasa dan budaya.
Catatan: <ul style="list-style-type: none"> - Bahasa pengantar: Bahasa Inggris - Bahasa Tagalong digunakan dalam pelajaran Makabayan dan pelajaran bahasa Filipina. - Bahasa Arab digunakan di sekolah-sekolah Islam - Di sekolah internasional menggunakan bahasa Inggris pada semua mata pelajaran 	



Gambar 3.2 Situasi belajar di sekolah dasar

b. Pendidikan Menengah

Mata pelajaran di sekolah menengah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Mata Pelajaran di Sekolah Menengah

Pendidikan Menengah	
Tahun ke-1 / Kelas-7	Mata Pelajaran: Aljabar I, Sains Terpadu, Bahasa Inggris, Bahasa Tagalog, Sejarah Filipina
Tahun ke-2/ Kelas-8	Mata Pelajaran: Aljabar II, Biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Tagalog, Sejarah Asia
Tahun ke-3/ Kelas-9 (Junior High School)	Mata Pelajaran: Geometri, Kimia, Bahasa Tagalog, Sejarah Dunia, Geografi
Tahun ke-4/ Kelas-10 (Senior High School)	Mata Pelajaran: Kalkulus, Trigonometri, Fisika, Bahasa Tagalog, Sastra dan Ekonomi
Mata Pelajaran pendukung: Kesehatan, Ilmu Komputer, Musik, Seni, Pendidikan Jasmani. Mata Pelajaran pilihan (sekolah eksklusif): Bahasa asing, Komputer, Menulis Sastra, dan lain-lain. Mata Pelajaran pra-pendidikan tinggi: Untuk peminatan Bisnis dan Ekonomi, sekolah menyediakan kursus mata pelajaran Bisnis dan Akuntansi. Untuk peminatan Sains, sekolah memberikan tambahan pelajaran untuk mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fisika mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 10.	

c. Pendidikan Kejuruan

TESDA menyiapkan SDM terampil untuk tingkat menengah berdasarkan standar kompetensi atau kinerja yang dapat diterima oleh dunia industri. Kompetensi dikemas agar relevan dengan pekerjaan dan profesi pada sektor prioritas. Kualifikasi kompetensi disesuaikan dengan tingkatan kerangka Kualifikasi TVET Filipina (FSWP).

TESDA menyediakan 210 profesi yang diakui secara nasional baik oleh Kementerian Kejuruan maupun Departemen Tenaga Kerja. Dalam setiap profesi yang dikembangkan selalu mengacu kepada standar internasional minimal Amerika Serikat, sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh TESDA diakui oleh negara lain seperti USA, Timur Tengah, Jepang, Korea, Singapura dan lain-lain. Gambar 3.3 adalah 210 profesi yang dikembangkan TESDA dan diakui oleh Internasional.

Regular - Competency Based Curriculum (CBC)	
2D GAME ARTS DEVELOPMENT NC III	Automotive Mechanical Assembly NC II
3D Game Art Development NC III	Automotive Mechanical Assembly NC III
Agricultural Crops Production NC I	Automotive Servicing NC I
Agricultural Crops Production NC III	Automotive Servicing NC II
Animal Health Care & Management NC III	Automotive Servicing NC III
ANIMAL PRODUCTION NC II	Automotive Servicing NC III
Animation (3D Digital) NC III	Automotive Servicing NC IV
Animation 2D Digital NC III	Backhoe Loader
Animation NC II	Barangay Health Services NC II
AQUACULTURE NC II	Bartending NC II
Articulated Off-Highway Dump Truck NC II	Beauty Care Services (Nail Care) NC II
Artificial Insemination (Large Ruminants) NC II	Beauty Care Services (Nail Care) NC III
Artificial Insemination (Swine) NC II	Beautycare NC II
Automotive Body Painting / Finishing NC I	Beautycare NC III

Automotive Body Painting / Finishing NC II	Biomedical Equipment Servicing NC II
Automotive Body Painting / Finishing NC III	Bulldozer
Contact Center Services Nc Ii	Construction Lift Passenger and Materials Operation NC II
Gambar 3.3 Sebanyak 241 profesi yang diakui oleh nasional maupun internasional	

Prinsip yang sangat ketat dilaksanakan dalam sekolah teknologi dan kejuruan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas lulusan, dimana

- 1) Pelatihan didasarkan pada kurikulum yang dikembangkan dari kompetensi standar
- 2) Proses belajar diselenggarakan dengan sistem modular terstruktur
- 3) Pelatihan dilakukan secara individual atau kelompok
- 4) Pelatihan didasarkan pada pekerjaan yang harus dilakukan
- 5) Materi pelatihan secara langsung terkait dengan standar kompetensi yang terdapat dalam modul atau kurikulum
- 6) Penilaian didasarkan pada pengumpulan bukti kinerja
- 7) Diklat dikombinasikan dengan praktek kerja industri sehingga sesuai dengan standar yang diperlukan
- 8) Pelatihan didasarkan pada on the job serta off the job training
- 9) Hasil Diklat dan bekerja dapat dikonversi untuk pengakuan pembelajaran sebelumnya (Recognition Prior Learning)
- 10) Pelatihan menerapkan sisten multiple entry dan multiple exit
- 11) Program pelatihan harus selalui disetujui oleh National Board dan harus selalu terakreditasi.

d. Pendidikan Tinggi

Komisi Perguruan Tinggi (CHED) mengeluarkan kebijakan bahwa pendekatan kurikulum di perguruan tinggi yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

1. Kurikulum Tingkat Sarjana

Kurikulum tingkat Sarjana disyaratkan untuk memenuhi jumlah minimum kredit sebanyak 190 unit. Perguruan tinggi negeri (State University sebanyak 11%) umumnya menerapkan jumlah minimum kredit, yaitu 190 unit. Untuk perguruan tinggi swasta

(Private Univeristy sebanyak 89%) umumnya mensyaratkan jumlah kredit sebanyak 216 unit (mata kuliah tambahan berupa pendidikan agama, Bahasa Inggris sebagai second language (ESL), dan bahasa asing selain Bahasa Inggris).

Tabel 3.3 Jumlah mata kuliah umum di setiap perguruan tinggi di Filipina

Mata Kuliah	Jumlah Unit (SKS)	
	Pilihan A (Humanities)	Pilihan B (Ilmu Sosial dan Komunikasi)
Bahasa Inggris	9	6
Bahasa Filipina	9	6
Matematika	6	6
Ilmu Alam	6	6
Sains Pilihan	3	3
Humanities	6	9
Literatur	6	-
Ilmu Sosial	12	12
Mandated Subject	6	3
Total Mata Kuliah Wajib	63	51
Total Mata Kuliah Program Studi beserta Pilihan atau Tambahan	127 (PTN) 153 (PTS)	149 (PTN) 175 (PTS)

Dalam kurikulum perguruan tinggi, kelompok mata kuliah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu mata kuliah umum (wajib untuk program Sarjana) dan mata kuliah program studi. Dalam kelompok mata kuliah umum diberikan 2 pilihan yaitu Opsi A untuk program Humanities yang terdiri dari 63 unit, atau Opsi B untuk program studi Ilmu Sosial dan Komunikasi terdiri dari 51 unit. Sebanyak 127-139 unit (swasta sebanyak 165 unit) merupakan mata kuliah program studi. Jumlah tatap muka per semester adalah sebanyak 16-18 minggu.

Setelah menyelesaikan 190-216 SKS, siswa diberi gelar Sarjana (Bachelor of Science) sesuai dengan program studinya (BS in

study program). Sebagai contoh BSN adalah Bachelor of Science in Nursing, BSA adalah Bachelor of Science in Accountancy dan lain-lain.

Di Filipina, lama studi bagi tingkat Sarjana sangat beragam. Tabel 3.4 adalah daftar umum lama studi setiap bidang studi di Filipina.

Tabel 3.4 Waktu untuk Menempuh Gelar Sarjana pada Berbagai Program Studi

Jurusan	Waktu Tempuh (tahun)
Ilmu Sains dan Matematika	4
Humaniora, Ilmu Sosial and Komunikasi	4
Ilmu Komputer/IT	4
Kesehatan Masyarakat	4-5
Kedokteran Umum, atau program studi yang eart berhubungan dengan kedokteran yakni nursing, farmasi, biologi (4 tahun) .	
Pendidikan profesi dokter, medical doctor (4 tahun)	8
Kedokteran Hewan	6
Kedokteran Gigi (2 tahun pre-dental ditambah 4 tahun kuliah kedokteran)	6
Insisniur dan Arsitektur	5
Teknik Kelautan	4
Akuntansi	4
Pertanian	4
Keguruan	4
Hukum (4 tahun belajar pada program studi yang berhubungan dengan ilmu hukum ditambah 4 tahun sarjana hukum)	8
Kriminologi	4

Lulusan Sarjana yang akan bekerja di bidang profesinya, harus menempuh *National Board Exam* yang dikelola oleh asosiasi profesi yang bersifat independen. Sarjana yang lulus *National Board Exam* dalam bidang tertentu, akan memperoleh nomor registrasi profesi dari asosiasi terkait contohnya adalah *Philippine Registered Nurse* (PRN), *Certified Philippine Accountant* (CPA) dan lain-lain.

Sarjana yang mempunyai sertifikat profesi akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibanding dengan Sarjana umum. Selain itu Sarjana dengan sertifikat profesi akan memperoleh pendapatan minimal sesuai dengan standar yang dibuat oleh asosiasi profesinya.

2. Kurikulum Tingkat Pascasarjana

Jumlah tatap muka wajib/ tugas telaah literatur pada pendidikan pascasarjana adalah 16-18 minggu/ semester. Tabel 3.5 merangkum lama studi tingkat Pascasarjana, yaitu tingkat Master dan Doktoral.

Tabel 3.5 Lama Studi Tingkat Pascasarjana

Pascasarjana	Waktu Tempuh (Tahun)
Program Master	2 tahun
Program Doktoral	3 tahun

3. Kurikulum Tingkat Master

Sama dengan level pendidikan lainnya, kurikulum tingkat ini menggunakan pendekatan KSBK. Kurikulum yang diwajibkan untuk ditempuh adalah sebanyak 30 – 36 unit. Dalam kurikulum tingkat master, mata kuliah dikelompokkan menjadi 3 group, yaitu: 12 unit adalah mata kuliah umum yang bersifat wajib, 12 – 18 unit mata kuliah program studi dan 6 unit adalah tesis.

Tabel 3.6 Kelompok Mata Kuliah Pada Tingkat Master

Kelompok Mata Kuliah	Jumlah Unit (SKS)
Mata Kuliah Umum dan Wajib	12
Mata kuliah spesialisasi program studi	12-18
Tesis	6

Gelar Master diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan kuliah selama empat semester atau 2 tahun, dengan program tesis maupun non-tesis. Yang dimaksud dengan program Master dengan tesis adalah setiap mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian dan membuat laporan dalam bentuk tesis, tetapi tidak diwajibkan untuk mengikuti *comprehensive defence*. Sedangkan untuk program Master dengan non-tesis, adalah mahasiswa tidak diwajibkan melakukan penelitian atau membuat tesis, tetapi wajib mengikuti *comprehensive defence*.

Lulusan Master yang memilih jalur tesis dapat melanjutkan ke program Doktorat. Lulusan Master non-tesis tidak dapat melanjutkan ke program Doktorat. Jika lulusan master non-tesis berharap dapat melanjutkan ke program Doktorat, maka yang bersangkutan harus menempuh paket khusus (*allied program*) berupa sejumlah mata kuliah transisi *Doctoral degree* dengan jumlah SKS sebanyak 12 unit dan ujian komprehensif Master. Jika *allied program* telah dinyatakan lulus, maka siswa tersebut dapat melanjutkan ke program Doktorat.

4. Kurikulum Tingkat Doktorat

Kurikulum tingkat Doktorat menggunakan pendekatan KSBK. Kurikulum yang diwajibkan ditempuh adalah sebanyak 45 – 60 unit. Dalam kurikulum tingkat Doktorat, mata kuliah dikelompokkan menjadi 3 group yaitu 12 unit adalah mata kuliah umum yang bersifat wajib, 21 – 36 unit mata kuliah program spesialisasi dan 12 unit adalah disertasi.

Tabel 3.7 Kelompok Mata Kuliah Pada Tingkat Doktorat

Kelompok Mata Kuliah	Jumlah Unit (SKS)
Mata Kuliah Umum dan Wajib	12
Mata kuliah spesialisasi	21-36
Disertasi	12

Gelar doktor diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan kuliah selama enam semester (3 tahun) atau 2 tahun untuk mahasiswa yang mengikuti program trimester (saat libur musim panas Bulan April s/d Juni, digunakan untuk mengambil sejumlah mata kuliah). Setiap mahasiswa program Doktoral diwajibkan untuk melakukan penelitian dan menulis disertasi.

4

Sistem Ujian di Filipina

Negara Filipina hanya menerapkan ujian nasional pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah dengan nama NAT atau *National Achievement Test*. NAT dilakukan oleh DepEd dengan tujuan untuk memetakan kinerja akademik dari tingkat sekolah, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi hingga nasional. NAT dilaksanakan sebanyak tiga kali dan dilaksanakan pada semester genap, umumnya pada bulan Maret. NAT dilakukan hanya 1 hari baik untuk kelas 3, 6 dan 8. NAT dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan pengawas dari sekolah yang bersangkutan.

Sistem ujian pada Diklat kejuruan mengacu pada standar kompetensi masing-masing profesi. Ujian dalam bidang kejuruan bertujuan untuk menentukan kelulusan kinerja suatu profesi (laik kerja atau tidak). Ujian teknik dan kejuruan dilakukan setiap akhir Diklat. Ujian mencakup evidence kinerja selama Diklat, tes tertulis dan tes kinerja. Ujian dilakukan di TESDA yang bekerjasama dengan asosiasi profesi serta Departemen Tenaga Kerja.

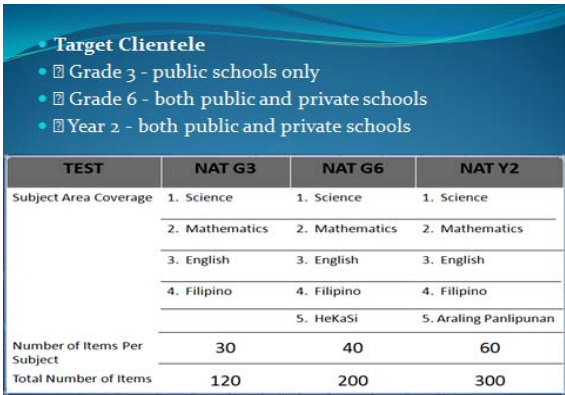
Sistem ujian pada perguruan tinggi, umumnya ditentukan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Ujian di perguruan tinggi, negeri maupun swasta, dilakukan saat masuk perguruan tinggi berupa ujian masuk atau *enterance exam*, *process exam*, *comprehensive defence*, ujian proposal atau *proposal defence* dan ujian hasil penelitian atau *thesis defence*. Setiap semester, untuk setiap mata kuliah dilakukan

ujian sebanyak tiga kali yaitu *preliminary exam*, *midterm exam* dan *final exam*. Setelah semua mata kuliah lulus, setiap mahasiswa akan mengikuti *comprehensive defense*, lalu melakukan ujian proposal yang dilanjutkan dengan seminar hasil penelitian dan terakhir adalah ujian hasil penelitian.

4.1 Sistem Ujian Nasional di Sekolah Dasar dan Menengah

Filipina mengembangkan NAT hanya untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. NAT dikembangkan untuk mengukur kemampuan siswa pada kelas 3, kelas 6 dan kelas 8 (tahun kedua di sekolah menengah), lihat Gambar 4.1. Pada tingkat sekolah dasar , hanya lima mata pelajaran yang diuji yaitu Sains, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa *Tagalog* (hanya untuk warga negara Filipina) dan *Hekasi* (Geografi dan Ilmu Pendidikan Sosial-Kewarganegaraan). Untuk tingkat sekolah menengah, juga diuji lima mata pelajaran, yaitu empat mata pelajaran yang sama dengan sekolah dasar ditambah dengan mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial.

NAT di Filipina tidak digunakan untuk menentukan kelulusan



The image shows a slide titled 'Target Clientele' with three bullet points: 'Grade 3 - public schools only', 'Grade 6 - both public and private schools', and 'Year 2 - both public and private schools'. Below this is a table comparing the National Achievement Test (NAT) for Grades 3, 6, and Year 2. The table lists subject area coverage, number of items per subject, and total number of items for each grade level.

TEST	NAT G3	NAT G6	NAT Y2
Subject Area Coverage	1. Science	1. Science	1. Science
	2. Mathematics	2. Mathematics	2. Mathematics
	3. English	3. English	3. English
	4. Filipino	4. Filipino	4. Filipino
		5. HeKaSi	5. Araling Panlipunan
Number of Items Per Subject	30	40	60
Total Number of Items	120	200	300

Gambar 4.1 Ujian Nasional di Filipina

siswa, tetapi untuk menentukan rata-rata capaian ilmu pengetahuan per mata pelajaran di setiap tingkatan kelas pada setiap sekolah. Data NAT digunakan pemerintah Filipina sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan dan bantuan pembinaan pada setiap sekolah, kelurahan,

kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Untuk sekolah yang bersangkutan data hasil NAT dijadikan sebagai alat bukti keberhasilan sekolah dan digunakan untuk promosi dalam rangka menarik siswa baru.

Penilaian ujian nasional berupa persentasi kelulusan dengan kualifikasinya (deskripsi equivalensi) seperti yang terdapat dalam Gambar 4.2.



Percentage	Descriptive Equivalent
96% - 100%	Mastered
86% - 95%	Closely Approximating Mastery
66% - 85%	Moving Towards Mastery
35% - 65%	Average Mastery
16% - 34%	Low Mastery
5% - 15%	Very Low Mastery
0% - 4%	Absolutely No Mastery

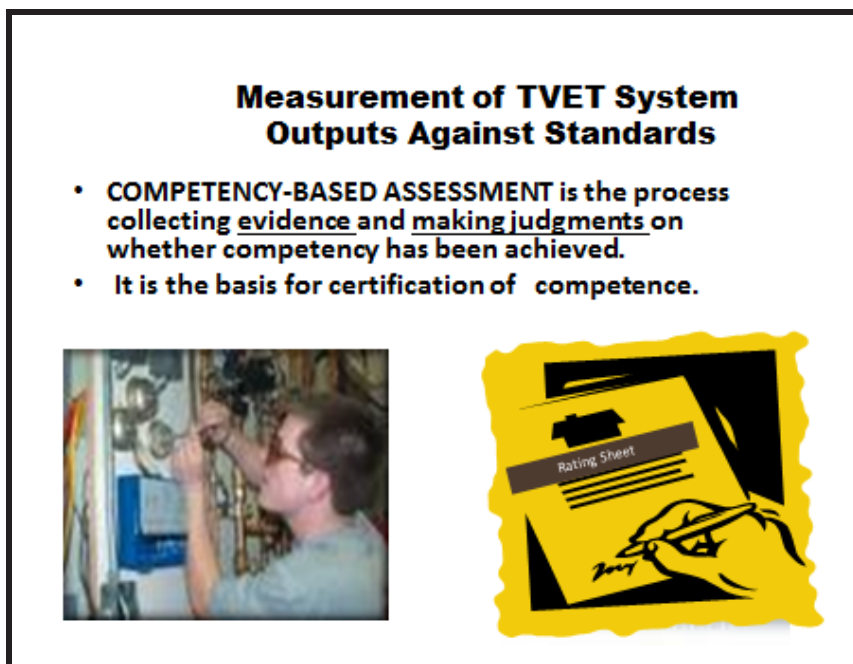
Gambar 4.2 Sertifikat peringkat *National Achievement Test* (NAT)

4.2 Sistem Ujian Pendidikan Kejuruan

Dalam sistem Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Filipina, disediakan 210 pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyediaan delapan bidang kerja prioritas, yaitu: Pertanian dan Perikanan, Kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Maritim, Pariwisata dan Perhotelan, Kriminologi, Pendidikan dan Teknisi.

Ujian yang dikembangkan oleh TESDA bertujuan untuk mengukur pemenuhan standar kompetensi suatu profesi. Ujian akan dilakukan di TESDA dan dunia kerja. Pelaksana ujian adalah TESDA bersama asosiasi profesi dan Departemen Tenaga Kerja. Ujian Pendidikan Teknik dan Kejuruan akan dilakukan pada saat proses Diklat (mengumpulkan bukti penguasaan kompetensi dan membuat penilaian apakah peserta Diklat sudah mencapai standar kompetensi yang dibutuhkan) dan di akhir Diklat akan dilakukan ujian tertulis dan performansi atau kinerja. Bagi peserta yang lulus ujian akan diberikan sertifikat sesuai tingkat

kompetensi kelulusan berupa Sertifikasi Level (SL) I, II, III dan IV.



Gambar 4.3 Ujian Diklat Teknik dan Kejuruan

Adapun level profesi untuk setiap bidang kerja adalah seperti yang tampak pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sertifikasi Level (SL) untuk Bidang Teknik dan Kejuruan

Level	Proses	Kewajiban	Aplikasi
SL – I	-	Pekerja melakukan tugas-tugas rutin dan dapat diprediksi.	
-	Pekerja tidak mendapatkan penilaian yang rumit.	Pekerja mengikuti standar	Urutan tugas pegawai SL-I biasanya dibuat oleh seorang supervisor atau pekerja pada tingkat yang lebih tinggi serta memberikan instruksi sederhana dan dapat melakukan klarifikasi atau saran bila diperlukan.

SL- II	Seorang pekerja pada level ini melakukan berbagai fungsi dengan melibatkan rutinitas dan prosedur.	Pekerja melibatkan beberapa akuntabilitas untuk kualitas output	Pekerja pada tingkat ini mulai melibatkan tanggung jawab individu atau otonomi, atau bekerja dengan orang lain (sebagai bagian dari sebuah tim atau kelompok).
SL- III	Seorang pekerja pada level ini melakukan berbagai kegiatan terampil pada tingkat kompetensi yang tinggi dengan melibatkan rutinitas dan prosedur yang telah ditentukan.	Pekerja bertanggung jawab terhadap pemahaman proses kerja, berkontribusi pada pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan untuk menentukan proses, peralatan dan bahan yang akan digunakan.	Pekerja pada tingkat ini melibatkan tanggung jawab individu atau otonomi, serta mendistribusikan beberapa tanggung jawab bagi orang lain.
SL- IV	Seorang pekerja pada level ini melakukan berbagai aplikasi dalam konteks yang agak besar sampai dengan sangat kompleks	Pekerja bertanggung jawab terhadap proses koordinasi dengan beberapa pemimpin dan membimbing/ mengatur diri dan orang lain, serta harus berkontribusi untuk mencari solusi teknis yang bersifat non-rutin. Pekerja pada tingkat ini membutuhkan pengkajian dan analisis praktek serta mengembangkan kriteria baru dan prosedur.	Aplikasi bertanggung jawab langsung kepada organisasi dan bertanggung jawab mengawasi kinerja orang lain.

5

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Filipina

5.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Jaminan kualitas adalah proses verifikasi apakah suatu produk atau jasa memenuhi atau melebihi harapan pelanggannya. UNESCO menetapkan jaminan kualitas terhadap program pendidikan untuk memastikan bahwa standar yang sudah disepakati dapat dipertahankan. Sebuah sistem jaminan mutu di suatu sekolah adalah dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan siswa dan kredibilitas sekolah sebagai penyedia layanan berkualitas untuk meningkatkan proses dan efisiensi serta agar sekolah mampu lebih bersaing.

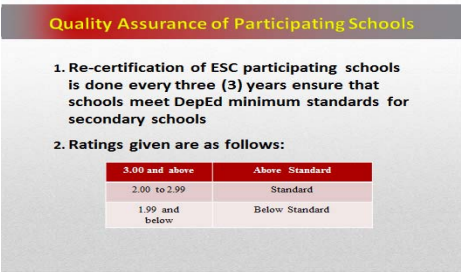
Penjaminan mutu, seperti yang didefinisikan oleh UNESCO, adalah upaya proses evaluasi (menilai, memantau, menjamin, menjaga dan meningkatkan) yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mutu sistem, lembaga atau program Pendidikan.

Jaminan kualitas adalah istilah yang mencakup semua yang mencakup semua kebijakan, proses, dan tindakan melalui mana kualitas pendidikan yang lebih tinggi dipertahankan dan dikembangkan (Campbell & Rozsnyai, 2002). Dalam bidang pendidikan tinggi, penjaminan mutu tersebut merupakan komitmen eksplisit dan

praktek lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya kelembagaan yang mengakui pentingnya mutu dan meningkatkannya secara terus-menerus.

5.2 Akreditasi Sukarela untuk Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi

Untuk tingkat sekolah dasar dan menengah, lembaga penjamin mutunya adalah DepEd melalui *Philippine Accreditation System for Basic Education* (PASBE) dan *Federation of Accrediting Agencies in the Philippines* (FAAP). Selain itu, di bawah binaan FAAP terdapat dua asosiasi yang berwenang untuk melakukan akreditasi yaitu AASCU-AAI (*Association of Christian Schools, Colleges and Universities Accrediting Agency, Inc*) dan PAASCU (*Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities*). Hasil akreditasi sekolah hanya dinyatakan sebagai sekolah terakreditasi dan dimasukkan dalam daftar sekolah terakreditasi oleh DepEd.



Gambar 5.1 Akreditasi sekolah dinyatakan terakreditasi jika nilainya minimal 2.00

Untuk tingkat perguruan tinggi, berdasarkan Memorandum Order No. 01 series of 2005 yang dikeluarkan CHED tentang “*Revised Policies and Guidelines on Voluntary Accreditation in Aid of Quality and Excellence in Higher Education*” akreditasi didefinisikan sebagai proses untuk menilai dan meningkatkan kualitas lembaga dan program pendidikan perguruan tinggi melalui evaluasi diri dan penilai sejawat (peer judgement). Ini menyebabkan status akreditasi harus dikeluarkan oleh badan akreditasi dan memberikan pengakuan publik tentang informasi dan kualitas pendidikan. Hal ini merupakan kebijakan CHED untuk mendorong dan membantu lembaga pendidikan tinggi yang ingin mencapai standar mutu lebih tinggi dan di atas kualitas batas minimum yang diperlukan. Persyaratan minimum ditetapkan dalam Kebijakan,

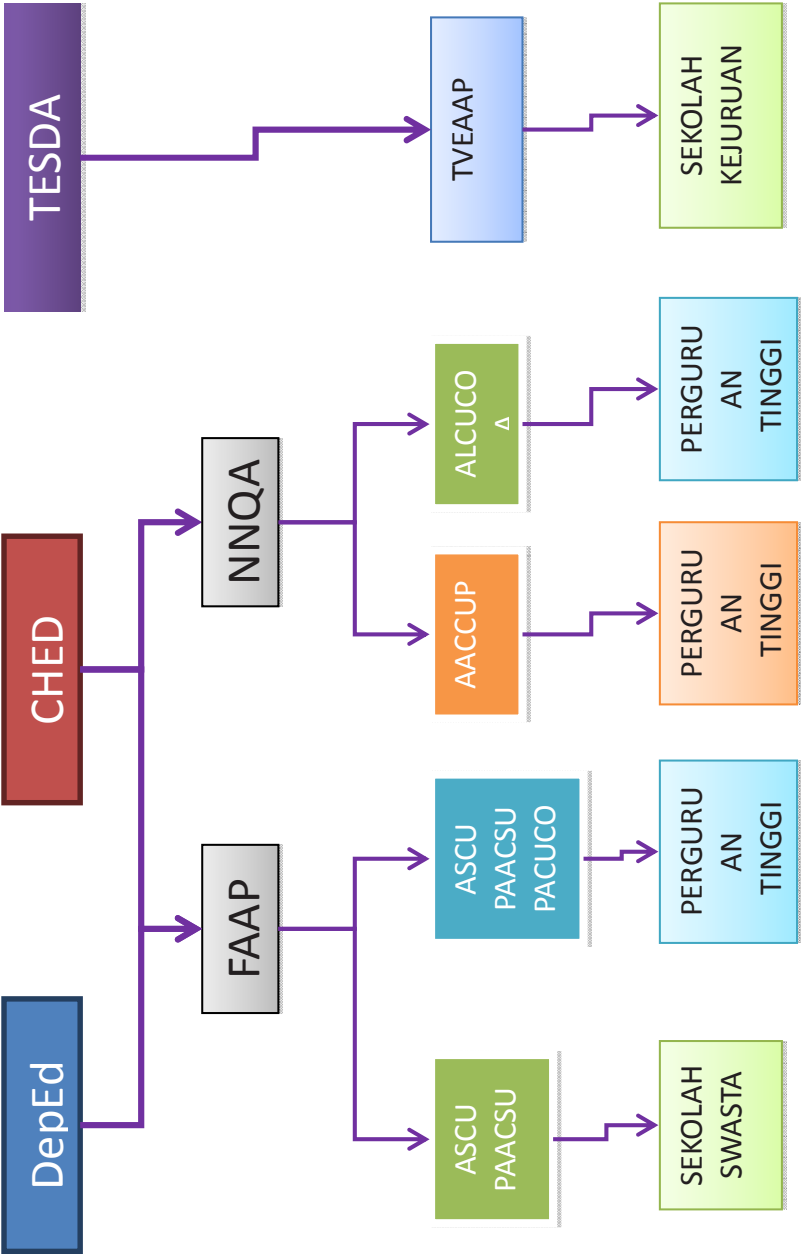
Standar dan Pedoman (*Policies, Standards and Guidelines, PSG*) yang diterbitkan oleh CHED untuk setiap program kurikuler.

Ada lima badan akreditasi untuk pendidikan tinggi di Filipina dan kelima badan ini dikelompokkan ke dalam dua federasi yang menjamin status akreditasi, sebagai berikut:

1. Federation of Accrediting Agencies in the Philippines (FAAP)
 - a. Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU)
 - b. Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation (PACU-COA)
 - c. Association of Christian Schools, Colleges and Universities Accrediting Agency, Inc. (ACSCU-AAI)
2. National Network of Quality Accrediting Agencies (NNQAA)
 - a. Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities of the Philippines (AACCUP)
 - b. Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation (ALCU-COA)

Selain memberikan jaminan akreditasi untuk Pendidikan Tinggi, AASCU-AAI dan PAASCU juga memberikan akreditasi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Status akreditasi program studi Pendidikan Tinggi memiliki manfaat umum sebagai,

3. Identifikasi sebagai Centers of Excellence (COE) dan Centers of Development (COD) yang menjelaskan dukungan pendanaan lembaga Pendidikan Tinggi tersebut yang diberikan oleh komisi dan proyek-proyek terkait
4. Pemilihan sekolah swasta untuk mendapatkan status otonomi atau status deregulasi dengan manfaat tertentu yang dapat diperolehnya



Gambar 5.2 Bagan Sistem Akreditasi Pendidikan di Filipina

CHED	=	<i>Commission on Higher Education</i>
TESDA	=	<i>Technical Education and Skill Development Authority</i>
FAAP	=	<i>Federation of Accreditation Agencies of the Philippine</i>
NNQAA	=	<i>National Network of Quality Accrediting Agencies</i>
ACSCU-AAI	=	<i>Association of Christian Schools, Colleges and Universities Accrediting Agency Incorporated</i>
PAASCU	=	<i>Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities</i>
PACUCOA	=	<i>Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation</i>
AACCUP	=	<i>Accrediting Agency of Charter Colleges and Universities of the Philippines</i>
ALCUCOA	=	<i>Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation</i>
TVEAAP	=	<i>Technical and Vocational Education Accrediting Agency of the Philippines</i>

Berikut adalah profil dari sebagian lembaga akreditasi yang telah disebutkan sebelumnya.

1. ACSCU-AAI

Lembaga akreditasi yang berfokus kepada pengembangan pendidikan serta meningkatkan kualitasnya. Sejak pendiriannya di tahun 1971, lembaga ini terus mengembangkan diri dan pada tahun 1979 berhasil mengembangkan dan memvalidasi instrumen akreditasinya. Kerjasama dengan lembaga lain seperti PAASCU telah dijalin, sehingga anggota ACSCU-AAI dapat mengajukan akreditasi kepada PAASCU, demikian pula sebaliknya.

2. PAASCU

Lembaga swasta, sukarela dan nirlaba. PAASCU memberikan pelayanan akreditasi program akademis yang telah memenuhi standar mutu pendidikan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1957 oleh 11 institusi pendidikan Katolik. Lembaga ini pertama kali diakui oleh Pemerintah Filipina pada tahun 1967 oleh Bureau of Education and Culture (sekarang DepEd) dan diakui oleh Commission on Higher Education (CHED) pada tahun 1977 untuk memberikan

sertifikasi di tingkat perguruan tinggi. Walaupun biasanya anggota PAASCU adalah sekolah-sekolah Katolik, tapi lembaga ini juga mengundang untuk sekolah dan universitas non-Katolik dan non-sectarian universities untuk menjadi anggotanya. AASCU-AAI dan PAASCU membidangi akreditasi untuk Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi, meliputi program studi Akuntansi, Pertanian, Perdagangan, Ilmu Komputer, Pendidikan, Liberal Art, Teknologi Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, Sains dan Ilmu Sosial.

3. PACUCOA

Badan akreditasi swasta yang telah berdiri sejak tahun 1932 yang memberikan pengakuan formal kepada suatu lembaga pendidikan dengan membuktikan bahwa program akademik telah mempertahankan standar yang sangat baik dalam operasi pendidikan, dalam konteks maksud dan tujuannya. Salah satu tujuan lembaga ini adalah untuk membantu institusi pendidikan mencapai efektivitas pendidikan maksimum melalui evaluasi diri dan disiplin diri. Program studi di perguruan tinggi yang diakreditasi oleh PACUCOA meliputi bidang Akuntansi, Kriminologi, Kedokteran Gigi, Pendidikan, Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Pendidikan Kelautan, Teknologi Kedokteran, Keperawatan, Optometri, Farmasi, Sains dan Teknik Sipil.

4. AACCUP

Didirikan untuk menangani proses akreditasi program studi pada perguruan tinggi negeri. Pada tahun 1989, lembaga ini secara formal telah menjadi lembaga independen yang mengakreditasi program studi pada lembaga perguruan tinggi negeri. Karena jumlah perguruan tinggi negeri lebih sedikit dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta maka lembaga akreditasi AACCUP memiliki anggota yang paling sedikit. Selanjutnya pada tahun 1997, lembaga ini bergabung ke dalam FAAP.



Gambar 5.3 Sistem penjaminan mutu pada tingkat pendidikan tinggi

Proses akreditasi terdiri dari beberapa tahapan, lihat Gambar 5.4. Setiap tahapan mensyaratkan status tertentu dari institusi yang mengajukannya. Setiap tahapan tersebut juga menetapkan persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi. Lembaga pendidikan tinggi yang menyandang status deregulasi mendapat manfaat yang sama dan hak istimewa (*previlage*) seperti pendidikan tinggi yang menyandang status otonomi, tetapi bagi yang menyandang status deregulasi tetap harus meminta izin untuk membuka program studi baru dan cabang kampus baru.

Secara lebih lengkap tentang status akreditasi dan manfaat yang diperoleh program studi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat I

Status pemohon untuk program yang telah menjalani survei awal dan disertifikasi oleh FAAP sebagai yang mampu mengakuisisi. Status terakreditasi didapat dalam waktu dua tahun. Program studi yang mendapat status Tingkat I ini mendapat manfaat berupa deregulasi administrasi secara parsial

2. Tingkat II

Status terakreditasi untuk program yang telah diberikan status

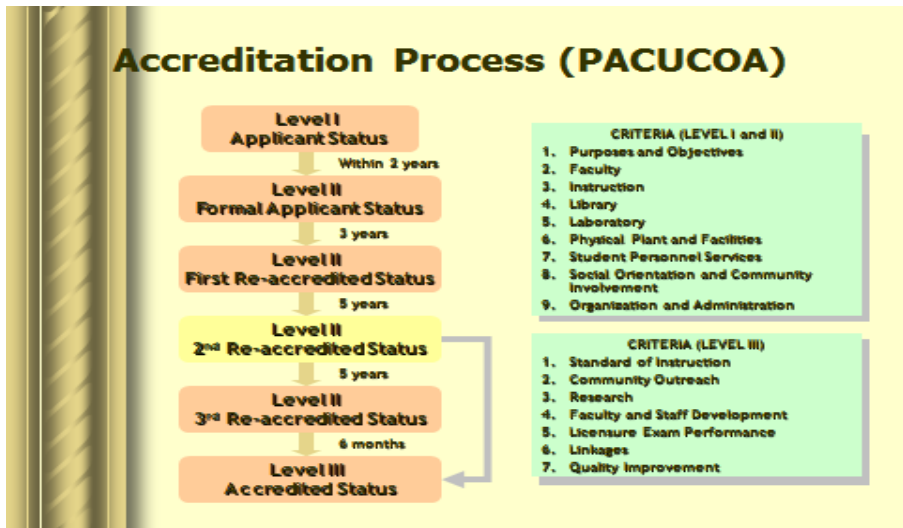
terakreditasi oleh salah satu lembaga anggota FAAP dan program studi yang telah disertifikasi oleh lembaga akreditasi yang kedua. Setelah mendapat status Tingkat II, maka program studi memperoleh manfaat berupa deregulasi administrasi secara penuh, deregulasi keuangan dalam hal menetapkan biaya kuliah dan biaya lainnya, otonomi kurikulum parsial, kewenangan untuk mahasiswa pascasarjana tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CHED dan tanpa perlu adanya *Special Order*, mendapat prioritas bantuan pendanaan, mendapat prioritas subsidi pemerintah untuk pengembangan dosen atau guru, mendapat hak dalam publikasi atau iklan menggunakan kata “TERAKREDITASI” dan mendapat kelonggaran untuk kunjungan atau inspeksi dan atau pengawasan oleh pihak CHED.

3. Tingkat III

Status terakreditasi untuk program yang telah setidaknya telah terakreditasi-ulang dan telah memenuhi persyaratan tambahan berdasarkan kriteria atau pedoman yang ditetapkan oleh FAAP. Penyandang status akreditasi Tingkat III memiliki semua manfaat pada level akreditasi Tingkat II plus deregulasi kurikulum secara penuh.

4. Tingkat IV

Status terakreditasi lembaga yang telah membedakan diri mereka di area yang luas dari disiplin akademik dan menikmati prestise dan otoritas sebanding dengan universitas internasional. Untuk program studi yang telah menyandang Tingkat IV, memiliki semua manfaat Tingkat II dan III, ditambah dengan pemberian hibah atau subsidi dana pengembangan pendidikan tinggi (*Higher Education Development Fund*) dan mendapat piagam otonomi penuh.



Gambar 5.4 Contoh prosedur akreditasi oleh salah satu assosiasi penjamin mutu

5.3 Akreditasi Pendidikan Kejuruan

Karena pendidikan kejuruan tidak berada di dalam naungan DepEd, tetapi di bawah pengelolaan TESDA, maka akreditasi untuk sekolah kejuruan dilakukan oleh lembaga terpisah, yaitu TVEAAP, lihat Gambar 5.2. Seperti halnya sistem akreditasi pada sekolah dan perguruan tinggi, akreditasi pendidikan kejuruan terbagi dua mekanisme, yakni registrasi program pendidikan dan akreditasi program pendidikan. Kedua hal tersebut tergabung dalam UTPRAS (Unified TVET Program Accreditation System).

Program studi yang harus didaftarkan adalah

1. Semua program studi kejuruan (TVET Programs) yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah (public) dan swasta (private), termasuk program yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pelatihan berbasis perusahaan yang diselenggarakan secara gratis kepada masyarakat luas.
2. Semua program studi kejuruan di dalam bidang Industri Perdagangan, Kerajinan Tangan, Pertanian, Perikanan, serta Jasa Industri Rumah Tangga.

3. Program kejuruan yang mendapat ijin dan sertifikasi pengakuan yang dijamin oleh Menteri Pendidikan.
4. Program magang yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta harus mendapat otorisasi atas dasar adanya pedoman magangnya. Adanya pedoman ini merupakan syarat untuk registrasi UTPRAS.
5. Institusi kejuruan yang memiliki program kejuruan yang terdaftar yang akan menyelenggarakan sistem ganda harus diakreditasi sebagai institusi pelatihan sistem ganda berdasarkan implementasi Republic Act No. 7686.
6. Pelatihan beorientasi livelihood training berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah tidak harus melakukan pendaftaran kecuali jika ditetapkan oleh Dewan TESDA.
7. Modul kompetensi yang layak atau sejumlah modul dapat didaftarkan sebagai program pendidikan kejuruan.

6

Pengembangan dan Pembinaan Guru

6.1 Regulasi

Regulasi untuk program pengembangan guru tercantum dalam “*Republic Act No. 7838-the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994*” yang dikeluarkan dan disetujui oleh “*Congress of the Philippines*” pada 16 Desember tahun 1994.

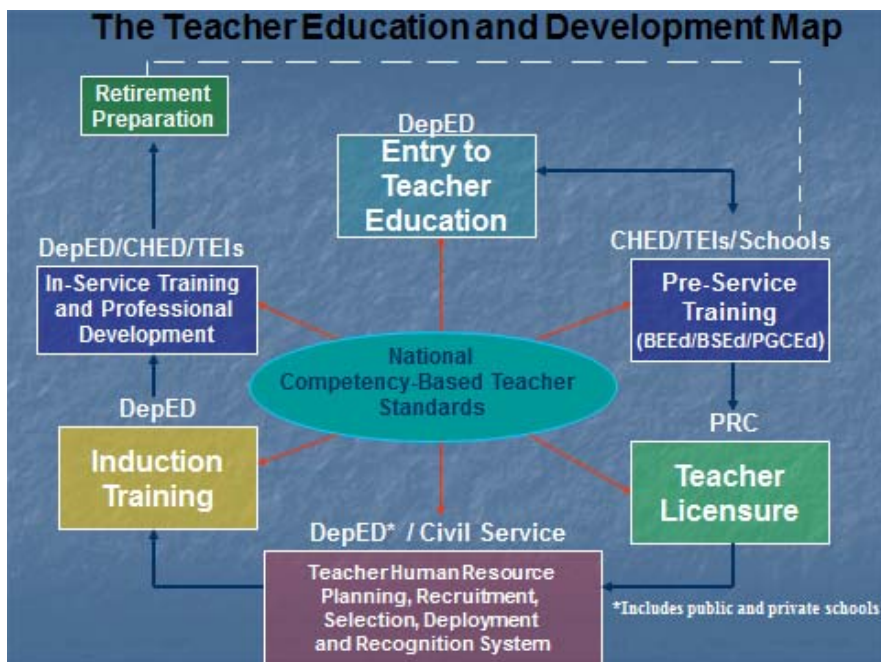
Tujuan dari Undang-undang ini adalah mengatur promosi, pengembangan dan profesi guru serta profesi pengajar, supervisor/ pengawas dan regulasi ujian lisensi guru.

6.2 Sistem Pengembangan Guru

Di Filipina, terdapat 2 (dua) persyaratan untuk menjadi seorang guru, yaitu: lulus *Bachelor of Elementary Education/ Bachelor Science in Education/ Post Graduate Certificate in Education* (kuliah pendidikan bersertifikat selama enam bulan) dan lulus ujian sertifikasi keguruan yang diselenggarakan oleh PRC (*Professional Regulation Commission*) dengan bukti berupa Lisensi dapat menjadi Guru (calon guru). Calon guru melamar ke DepEd, lalu mengikuti seleksi, yang lulus seleksi harus menjadi guru magang di sekolah selama 5 tahun, mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan lulus evaluasi yang dilakukan oleh BPT (*Board Professional Teacher*) kemudian menjadi Guru Level I. Setelah menjadi guru, DepEd akan memberikan Diklat Induksi selama karir guru

ditekuni, sehingga setiap guru menjadi profesional sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh “*The National Competency-Based Teachers Standards* (NCBTS)”.

Karir guru di Filipina secara garis besar adalah sebagai berikut: Guru (Level I, II, III) - Guru Kepala (I, II, III, IV, V, VI) / Kepala Sekolah (Level I, II, III, IV)- Guru Master (I, II, III, IV) – ASDS (*Asisstant School Devision Superintendent/ Wakil Pengawas di Region*) - SDS (*School Devision Superintendent/ Pengawas di Region*). Setiap jenjang karir guru selalu harus diikuti oleh Diklat *in service* dan pengembangan guru profesional yang diselenggarakan oleh DepEd/ CHED/ TEIs (*Teacher Education Institutions*). Untuk menjamin mutu guru, maka pada setiap jenjang kenaikan pangkat dilakukan evaluasi atau minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.



Gambar 6.1 Skema pengembangan guru di Filipina

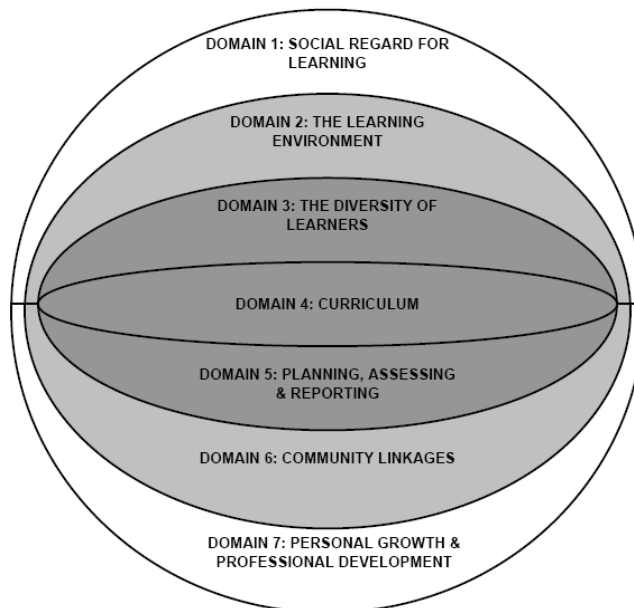
6.3 Model Pengembangan Guru

Di Filipina, untuk menjadi seorang guru yang profesional harus menguasai 7 domain kompetensi: i) *Social Regard for Learning*; ii)

The learning environment; iii) The diversity of learner; iv) Curriculum; v) Planning, assessing and reporting; vi) Community linkages dan vii) Personal growth and professional development.

Guru Level I harus mengajar dan mengembangkan diri serta memenuhi 7 (tujuh) domain yang dipersyaratkan selama 5 (lima) tahun. Jika mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah, dan lulus evaluasi yang dilaksanakan oleh *Board Professional Teachers* (BPT), maka guru tersebut akan naik pangkat menjadi guru Level II. Guru Level II dapat naik pangkat ke guru Level III jika sudah melaksanakan tugas dan fungsinya selama 4 (empat) tahun disertai rekomendasi dari kepala sekolah dan lulus evaluasi yang dilakukan oleh (BPT). Untuk naik pangkat ke guru Level III, dipersyaratkan hal yang sama selama 3 (tiga) tahun.

Untuk menjadi guru kepala (*Head Teacher*), maka guru Level III harus melakukan kegiatan “wali kelas/ *teacher in charge*” selama 2 (dua) tahun, setelah itu akan naik menjadi Guru Kepala Level I sampai dengan guru Kepala Level VI, dengan waktu selama 1 (satu) tahun untuk setiap level. Dengan demikian untuk menjadi guru kepala secara keseluruhan ditempuh selama 6 (enam) tahun.



Gambar 6.2 Tujuh domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Filipina

Untuk menjadi guru master, maka guru kepala Level VI harus mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan lulus evaluasi BPT, di mana pangkatnya akan naik menjadi guru master Level I sampai dengan IV. Guru Master Level I dapat naik pangkat menjadi Level II setelah menjalankan tugas selama 2 (dua) tahun, dapat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan lulus evaluasi BPT. Untuk kenaikan pangkat dari guru master level II, III dan IV hanya diperlukan waktu 1 (satu) tahun, untuk mendapatkan rekomendasi Kepala Sekolah dan lulus evaluasi BPT.

Untuk menjadi kepala sekolah di sekolah dasar disyaratkan harus mempunyai pangkat minimal guru master (2 tahun) atau guru kepala level I sampai dengan level III. Pangkat kepala sekolah mulai dari kepala sekolah level I sampai dengan level IV. Kenaikan Level Kepala Sekolah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi BPT.

Untuk menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah disyaratkan harus mempunyai pangkat minimal guru master (2 tahun) dan Guru Kepala level I sampai dengan level IV. Pangkat kepala sekolah mulai dari kepala sekolah level I sampai dengan Level IV. Kenaikan Level kepala sekolah menengah dinyatakan berdasarkan hasil evaluasi PBT.

Tabel 6.1 Daftar klasifikasi guru di Filipina

Class	Level	Salary Grade
Teacher	I, II, III	10, 11, 12
Master Teacher	I, II, III, IV	16, 17, 18, 19
Head Teacher	I, II, III, IV, V, VI	13, 14, 15, 16, 17, 18
Special Education Teacher	I, II, III, IV, V	13, 14, 15, 16, 17
Special Science Teacher	I, II, III, IV, V	13, 16, 19, 22, 24
Guidance Counselor	I, II, III	10, 11, 12
Guidance Coordinator	I, II, III	13, 14, 15
School Farming Coordinator	I, II, III	13, 14, 15
Vocational Instruction Supervisor	I, II, III	16, 17, 18

6.4 Modul Pengembangan Guru

Modul untuk pengembangan guru selalu disiapkan secara terstandar oleh DepEd/ CHED/ TEIs. Pada umumnya modul ini berupa Proses Belajar Mengajar (PBM) resmi perkuliahan di perguruan tinggi atau institusi pendidikan lain yang terakreditasi dan diakui oleh BPT. Setiap kenaikan pangkat guru pada umumnya harus setelah mengikuti perkuliahan minimal 18 SKS dan training minimal 8 jam.

Untuk guru master level III dan seterusnya, pendidikan minimal yang harus ditempuh adalah Master (S-2). Khusus untuk Kepala Sekolah, minimal harus menempuh 18 SKS, 8 jam Diklat dengan pangkat minimal guru master level I selama dua tahun. Persyaratan kuliah 6 SKS dan 8 Jam Diklat diwajibkan bagi kenaikan pangkat kepala sekolah level I ke level II, demikian juga dari level II ke level III. Khusus dari kepala sekolah level III ke level IV kuliah wajib sebanyak 9 SKS dan 8 jam Diklat.

Dalam setiap kenaikan pangkat guru, akan dinilai 7 domain guru profesional, 18 kompetensi dan 64 indikator kinerja guru (Standar Performansi Guru Filipina) seperti yang dicantumkan di bawah ini.

Tabel 6.2 Daftar Kinerja dan Indikator Guru Profesional di Filipina

The seven domains are the following:

1. Social Regard for Learning (SRFL)	5. Planning, Assessing Reporting (PAR)
2. Learning Environment (LE)	6. Community Linkages (CL)
3. Diversity of Learners (DOL)	7. Personal Growth & Professional Development (PGPD)
4. Curriculum (Curr.)	

Domain 1. Social Regard for Learning (SRFL)	
<i>The SRFL domain focuses on the ideal that teachers serve as positive and powerful role models of the value in the pursuit of different efforts to learn. The teacher's action, statements, and different types of social interactions with students exemplify this ideal.</i>	
Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The teacher ...
1.1 Teacher's actions demonstrate value for learning.	1.1.1 implements school policies and procedures; 1.1.2 demonstrates punctuality; 1.1.3 maintains appropriate appearance; and 1.1.4 is careful about the effect of one's behavior on students.

Domain 3. Diversity of Learners (DOL)	
<p><i>The DOL domain emphasizes the ideal that teachers can facilitate the learning process even with diverse learners, by recognizing and respecting individual differences and by using knowledge about their differences to design diverse sets of learning activities to ensure that all learners can attain the desired learning goals.</i></p>	
Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The teacher ...
3.1 The teacher is familiar with learners' background knowledge and experiences.	3.1.1 uses information on the learning styles and needs of the learners to design and select learning experiences; 3.1.2 establishes goals that define appropriate expectations for all learners; 3.1.3 paces lessons appropriate to needs and/or abilities of learners; 3.1.4 provides differentiated activities for learners; 3.1.5 initiates other learning approaches for learners whose needs have not been met by usual approaches; and 3.1.6 shows sensitivity to multi-cultural background of the learners.

Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The teacher ...
3.2 The teacher demonstrates concern for holistic development of learners.	3.2.1 sets clear, challenging and achievable expectations on the holistic development of all learners; 3.2.2 identifies learning gaps and takes action to enable learners to catch up; 3.2.3 employs integrative and interactive strategies for meaningful and holistic development of learners; 3.2.4 is sensitive to unusual behavior of learners and takes appropriate action; and 3.2.5 provides opportunities to enhance learners growth in all aspects.

Domain 4. Curriculum (Curr.)	
<p><i>The curriculum domain refers to all elements of the teaching-learning process that work in convergence to help students understand the curricular goals and objectives, and to attain high standards of learning defined in the curriculum. These elements include the teacher's knowledge of subject matter and the learning process, teaching-learning approaches and activities, instructional materials and learning resources.</i></p>	
Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The Teacher ...
4.1 The teacher demonstrates mastery of the subject.	4.1.1 delivers accurate and updated content knowledge using appropriate methodologies, approaches and strategies; 4.1.2 integrates language, literacy and quantitative skill development and values in his/her subject area; 4.1.3 explains learning goal, instructional procedures and content clearly and accurately to learners; 4.1.4 links the current content with past and future lessons; 4.1.5 aligns lesson objectives with the teaching methods, learning activities and instructional materials or resources appropriate to learners; 4.1.6 creates situations that encourage learners to use high order thinking skills; 4.1.7 engages and sustains learners' interest in the subject by making content meaningful and relevant to them; 4.1.8 integrates relevant scholarly works and ideas to enrich the lesson as needed; and 4.1.9 integrates content of subject area with other disciplines.

Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The teacher ...
4.4 The teacher selects teaching methods, learning activities and instructional materials or resources appropriate to learners and aligned to objectives of the lesson.	4.41 translates learning competencies to instructional objectives; 4.42 selects, prepares and utilizes instructional materials appropriate to the learners and to the learning objectives; 4.43 provides activities and uses materials which fit the learners' learning styles, goals and culture; 4.44 uses a variety of teaching approaches and techniques appropriate to the subject matter and the learners; utilizes information derived from assessment to improve teaching and learning; and 4.45 provides activities and uses materials which involve students in meaningful learning.

Domain 5. Planning, Assessing & Reporting (PAR)

This domain refers to the alignment of assessment and planning activities. In particular, the PAR focuses on the (1) use of assessment data to plan and revise teaching-learning plans; (2) integration of assessment procedures in the plan and implementation of teaching-learning activities, and (3) reporting of the learners' actual achievement and behavior.

Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The Teacher ...
5.1 The teacher communicates promptly and clearly the learners' progress to parents, superiors and to learners themselves.	5.11 conducts regular meetings with learners and parents to report learners' progress; and 5.12 involves parents in school activities that promote learning.
5.2 The teacher develops and uses a variety of appropriate assessment strategies to monitor and evaluate learning.	5.21 prepares formative and summative tests; 5.22 employs non-traditional assessment techniques (portfolio, authentic performance, journals, rubrics, etc.); 5.23 interprets and uses assessment results to improve teaching and learning; and 5.24 identifies teaching-learning difficulties and their possible causes to address gaps.
5.3 The teacher monitors regularly and provides feedback on learners' understanding of content.	5.31 provides timely and accurate feedback to learners to encourage them to reflect on and monitor their own learning growth; and keeps accurate records of grades with performance levels of learners.

Domain 6. Community Linkages (CL)

The LC domain refers to the ideal that classroom activities are meaningfully linked to the experiences and aspirations of the learners in their homes and communities. Thus, this domain focuses on teachers' efforts directed at strengthening the links between schools and communities to help in the attainment of the curricular goals.

Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The teacher ...
6.1 The teacher establishes learning environments that respond to the aspirations of the community.	6.11 involves community in sharing accountability for the learners' achievement; 6.12 use community human and materials resources to support learning; 6.13 uses the community as a laboratory for learning; 6.14 participates in community activities that promote learning; and 6.15 uses community networks to publicize school events and achievements.

Domain 7. Personal Growth & Professional Development (PGPD)	
<i>The PGPD domain emphasizes the ideal that teachers value having a high personal regard for the teaching profession, concern for professional development, and continuous improvement as teachers.</i>	
Strands of Desired Teaching Performance	Performance Indicators The teacher . . .
7.1 The teacher takes pride in the nobility of teaching as a profession.	maintains stature and behavior that upholds the dignity of teaching; allocates time for personal and professional development through : (a) participation in educational seminars and workshops, (b) enrolment in short-term courses and post graduate programs, (c) reading educational materials regularly, and (e) engaging in educational research. 7.13 manifests personal qualities such as enthusiasm, flexibility and caring; and 7.14 articulates and demonstrates one's personal philosophy of teaching.
7.2 The teacher builds professional link with colleagues to enrich teaching practice.	7.21 participates actively in professional teacher organizations; and 7.22 keeps abreast with recent developments in education.
7.3 The teacher reflects on the extent of the attainment of students' learning goals	7.31 reflects on the quality of his/her own teaching; 7.32 receives favorable rating from students, peers and superiors; 7.33 accepts personal accountability for learners' achievement; and 7.34 uses self-evaluation to recognize and correct weaknesses

Nilai kinerja guru tersebut di atas akan berkontribusi sebanyak 40%, Nilai lainnya akan diperoleh dari pengalaman sebanyak 10%, Penghargaan sebanyak 25% (Penghargaan, Inovasi, Penelitian, Penulisan buku dan konsultan/ pembicara di level distrik sampai dengan internasional), Pendidikan dan Diklat sebanyak 20%, Potensi guru sebanyak 2,5% dan pengabdian masyarakat sebanyak 2,5%.

7

Penutup

7.1 Saran

Berdasarkan berbagai penelaahan dan analisis terhadap sistem pendidikan di Filipina maka untuk perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan di Indonesia, maka disarankan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Struktur dasar dan system pendidikan Indonesia sudah baik, perlu diperkuat dan diperbaiki secara terus menerus terutama dengan standar internasional.
2. Kurikulum 2013, disarankan diimplementasikan dengan seksama dan selalu keberhasilannya dievaluasi secara teratur, berkesinambungan dan hasilnya selalu dijadikan masukan untuk aktivitas perbaikan berkelanjutan
3. Kurikulum 2013 sebaiknya diberi pengayaan dengan standard-standar internasional sehingga rerata kualitas Sains, matematika dan kemampuan membaca dapat setara dengan negara maju
4. Sekolah yang telah berhasil dengan baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dijadikan Pusat Unggulan atau Center of Excellence (COE)
5. Ujian nasional dijadikan alat untuk pemetaan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan negara serta sekaligus sebagai bahan masukan untuk bantuan peningkatan kualitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah sampai dengan nasional

6. Sistem penjaminan mutu Indonesia sudah baik, yang perlu ditingkatkan hanya penambahan personil auditor agar lebih tersedia di setiap kabupaten atau provinsi
7. Penjaminan mutu di sekolah negeri tersosialisasi secara baik, yang perlu ditingkatkan hanya sosialisasi di sekolah swasta di daerah terpencil dan bantuan teknis yang intensif sehingga semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri dan swasta mempunyai kualitas yang relatif merata di semua daerah Indonesia
8. Pengembangan dan pembinaan guru di Filipina dapat lebih menjamin bakat, kompetensi dan kualitas guru. Calon guru harus lulus sertifikasi (mendapatkan lisensi guru) terlebih dahulu sebelum melamar menjadi guru (DepEd/institusi pendidikan swasta).
9. Hal penting yang sering diapresiasi oleh siswa/mahasiswa Indonesia yang sekolah di Filipina adalah guru/ dosen Filipina memberikan hatinya untuk siswa/ mahasiswa sehingga guru dan siswa komunikasi dan hubungannya sangat dekat dan guru selalu ada di dekat siswa untuk memberi solusi dan memancing kreatifitas dan rasa percaya diri. Di Filipina, semua siswa mempunyai medali juara (no pupil left behind)

7.2 Rekomendasi

Struktur dasar dan sistem pendidikan di Indonesia secara umum lebih baik dari Filipina. hanya beberapa hal yang masih menjadi kendala dan sebaiknya disempurnakan yaitu Ujian Nasional (UN) yang menjadi tekanan terhadap sebagian besar siswa karena sangat menentukan kelulusan dengan waktu perbaikan yang sangat terbatas.

Berdasarkan kenyataan ini UN direkomendasikan untuk ditinjau kembali dan direkomendasikan untuk diselenggarakan pada kelas 5 dan kelas 11. Bagi siswa yang belum lulus, masih punya waktu untuk memperbaiki pada saat liburan kelas 5 dan 11 dan kelas 6 serta 12 sehingga diharapkan dapat lulus setelah ada program remedial. Ujian nasional bersifat sukarela, tetapi wajib bagi siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia sudah baik. Salah satu kendala adalah keterbatasan lembaga penjamin mutu. Rekomendasi yang disampaikan adalah mengembangkan lembaga penjamin mutu swasta baik untuk level sekolah maupun untuk perguruan tinggi. Jika dimungkinkan dapat dikaji BAN Sekolah/ madrasah swasta dan BAN-PT swasta dengan pembinaan dan penjaminan mutu auditor secara berkala dari BAN Sekolah/ BAN PT.

Untuk memantapkan kompetensi guru di Indonesia, ada baiknya untuk memodifikasi best practices Filipina dalam hal kenaikan pangkat guru selalu didahului oleh test tertulis dan praktek minimal 5 (lima) tahun sekali, dan di setiap sekolah selalu ada Guru Kepala yang dapat menjadi pembimbing bagi guru lain yang pangkatnya lebih rendah dan di setiap region terdapat BPT (Board Professional Teachers) yang bertugas menjamin kualitas guru.

“It is not that I'm so smart. But I stay with the questions much longer.”

-Albert Einstein-

DAFTAR REFERENSI

1. Anonymous. 2000. Higher Education in Developing Countries, Peril and Promise. The International Bank for Reconstruction and Development/ THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433. U.S.A. <http://www.worldbank.org>
2. Anonymous. 2004. Position Classification and Compensation Scheme for Teaching Position in Elementary and Secondary Schools. Civil Service Commission Regional and Field Office.
3. Anonymous. 2010. Educators, Technology and 21st Century Skills: Dispelling Five Myths A Study on the Connection Between K-12 Technology Use and 21st Century Skill. Report by Grunwald Associates LLC Based on Research by Eduventures, Inc. June 2012.
4. Anonymous. 2008. The National Competency –Based Teachers Standards (NCBTS). Department of Education Republic of the Philippines.
5. Campbell and Rozsnyai. 2002. Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD. www.oecd.org
6. Anonymous, 2012. Higher education in the Philippines - Wikipedia, the free encyclopedia. en.wikipedia.org
7. Anonymous. 2012. Philippine Basic Education Curriculum . www.studymode.com
8. Congress of the Philippine, 1994. Republic Act No. 7836, The Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. House of Representative of the Philippine.

9. www.ched.gov.ph
10. www.lanesra.org
11. www.deped.gov.ph
12. www.tesda.gov.ph

-o0o-

VI

Sistem Pendidikan di India



Sumber foto Taj Mahal: wallpapers-xs.blogspot.com

Oleh:
Son Kuswadi, Dr. Eng.
Atase Pendidikan di New Delhi

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di India

India, merupakan salah satu negara dengan kebudayaan tertua, institusi pendidikannya pun sudah berkembang sejak lama, dengan bentuk tradisional. Institusi pendidikan modern diperkenalkan selama pendudukan Inggris, dengan berbagai bidang yang dikembangkan dan seperti kedokteran, hukum, dan teknik sipil.

Tulisan ini membahas bagaimana sejarah perkembangan sistem pendidikan di India, termasuk kebijakan pemerintahnya (Pemerintah Pusat mau pun Negara Bagian) dalam pendanaan pendidikan, penjaminan mutu pendidikan melalui ujian nasional, pendidikan dan kesejahteraan guru serta bagaimana pengembangan kurikulum terutama pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan.

Konsistensi kebijakan dalam bidang pendidikan, termasuk pembiayaannya, tetap dijaga meski pun sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi murni, seperti halnya Indonesia sekarang. Ketiadaan UUD yang menjamin minimum pembiayaan pendidikan, tidak mengurangi semangat mereka untuk membiaya pendidikan, melalui berbagai *exercises* dan iterasi untuk kepentingan pengembangan generasi muda.

Ujian Nasional (meski pun mereka tidak menyebutkan secara harfiah seperti itu) terus diimplementasikan tanpa menimbulkan “kegaduhan politik” seperti di tanah air, meski pun hal yang sama terjadi seperti kebocoran soal dan ketimpangan mutu antara desa dan kota.

Kritik bahwa ujian nasional yang hanya beberapa hari tapi menentukan masa depan siswa dijawab dengan konsep *Continuous Comprehensive Evaluation* (CCE) sehingga mampu menggairahkan belajar siswa dan menaikkan mutu pendidikan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	245
DAFTAR ISI	247
1. Pendahuluan	249
2. Struktur Dasar Sistem Pendidikan	257
3. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	259
4. Penilaian/Penjaminan Mutu Pendidikan	267
5. Pengembangan Kurikulum	279
6. Kesimpulan	287
DAFTAR REFERENSI	289

1

Pendahuluan

1.1. Pengantar

India yang terletak di Asia Selatan secara resmi disebut sebagai Republik India (Hindi: Bharat Ganarājya), dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan luas wilayahnya. Populasi penduduk India merupakan negara kedua terpadat dengan lebih 1,18 miliar orang. Daratan India berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan, Laut Arab di sebelah Barat dan Teluk Benggala di sebelah Timur dan berbatasan dengan Pakistan di sebelah Barat; Bhutan, Republik Rakyat Tiongkok dan Nepal berada di sebelah Utara; dan Bangladesh dan Myanmar di Timur. Di Samudra Hindia, India daratan dan Kepulauan Lakshadweep berbatasan dengan Sri Lanka dan Maladewa, sementara kawasan Andaman dan Nikobar berbagi perbatasan maritim dengan Thailand dan Indonesia (Sumatera). Laut Andaman. India memiliki garis pantai 7.517 kilometer (4.700 mil) (lihat Gambar 1).



Gambar 1.1 Peta politik India

India berasal dari peradaban Lembah Indus kuno dan daerah jalur perdagangan bersejarah dan kerajaan yang luas. Anak benua India telah dikenal dengan kemajuan perdagangan dan budayanya dalam waktu yang panjang. Empat dari agama-agama utama dunia - Hindu, Buddha, Jainisme dan Sikhisme - berasal dari India. Sementara Zoroastrianisme, Yahudi, Kristen dan Islam tiba pada milenium pertama dan membentuk budaya yang sangat beragam di kawasan itu. India, secara bertahap dianeksasi oleh Perusahaan “British East India” dari awal abad kedelapan belas dan dijajah oleh Kerajaan Inggris dari pertengahan abad kesembilan belas. India menjadi negara merdeka pada tahun 1947 setelah perjuangan kemerdekaan yang ditandai dengan perlawanan non-kekerasan yang luas yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi.

India adalah sebuah republik konstitusional federal dengan demokrasi parlementer yang terdiri dari 28 negara dan tujuh wilayah persatuan (*union territories*). Di samping masyarakatnya yang majemuk, multibahasa dan multietnis, India juga rumah bagi keanekaragaman

satwa di berbagai habitat yang dilindungi. Ekonomi India berada pada ranking kesebelas perekonomian terbesar di dunia dengan GDP nominal terbesar keempat dilihat dari paritas daya beli (*purchasing power parity*). Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi berbasis pasar pada tahun 1991, India telah menjadi salah satu pusat perekonomian terbesar yang tercepat berkembang di dunia. Namun, negara ini terus menghadapi tantangan masalah kemiskinan, buta huruf, korupsi dan kesehatan masyarakat. India diklasifikasikan sebagai negara industri baru dan merupakan salah satu dari empat negara BRIC (Brazil, Rusia, India, China). India merupakan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir dan mempunyai kekuatan bersenjata terbesar ketiga di dunia, sementara berada pada peringkat kesepuluh dalam pengeluaran militer di dunia. India merupakan kekuatan regional utama di Asia Selatan.

India adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC-*South Asian Association for Regional Cooperation*), KTT Asia Timur, negara industri G20, dan anggota Persemakmuran, G8+5 dan pengamat anggota negara dalam Organisasi Kerjasama Shanghai.

1.2. Sejarah

Sejarah India dimulai dengan bukti adanya aktivitas manusia *Homo sapiens* 75.000 tahun yang lalu, atau hominid awal, termasuk *Homo erectus* dari sekitar 500.000 tahun yang lalu. Peradaban Lembah Indus, yang menyebar dan berkembang di bagian barat laut anak benua India dari 3300-1300 SM, adalah peradaban besar pertama di India. Sebuah budaya perkotaan canggih dan berteknologi maju dikembangkan pada periode *Harappa* dewasa, 2600-1900 SM. Peradaban Zaman Perunggu runtuh sebelum akhir milenium kedua SM dan diikuti oleh Peradaban Zaman Besi *Veda*, yang merupakan perpanjangan kawasan Indo Gangga dan yang menyaksikan munculnya kekuatan politik utama yang dikenal sebagai Mahajanapadas. Dalam salah satu kerajaan ini, *Magadha*, *Mahavira* dan *Gautama Buddha* lahir pada abad ke-6 SM atau 5 SM.

Hampir semua daerah di anak benua itu ditaklukkan oleh Kekaisaran Maurya selama abad ke-4 SM dan ke-3 SM. Kemudian menjadi terpecah-

pecah dengan berbagai berbagai ukuran dan diperintah oleh berbagai kerajaan menengah selama 1.500 tahun ke depan. Hal ini dikenal sebagai periode klasik sejarah India, di mana India banyak diperkirakan memiliki perekonomian terbesar dunia pada jaman kuno dan abad pertengahan, mengendalikan antara sepertiga sampai seperempat dari kekayaan dunia sampai abad ke-18.

Sebagian besar India Utara dan Tengah pernah bersatu sekali lagi sejak abad ke-4 sampai abad ke-6 di bawah Kekaisaran Gupta. Periode ini dikenal sebagai kebangkitan kembali agama Hindu dan kebangkitan intelektual, yang dikenal di kalangan pengagum sebagai “Golden Age of India”. Selama waktu yang sama dan selama beberapa abad kemudian, India Selatan, di bawah kekuasaan *Chalukya*, *Cholas*, *Pallavas*, dan *Pandyas*, mengalami zaman keemasannya sendiri. Selama periode ini, aspek peradaban India, administrasi, budaya dan agama (Hindu dan Buddha) menyebar ke sebagian besar Asia.

Bagian Selatan negara bagian Kerala memiliki hubungan bisnis maritim dengan Kekaisaran Romawi. Sekitar abad ke-7 Islam diperkenalkan di Kerala oleh pedagang muslim Arab. Kekuasaan Islam di benua ini dimulai pada 712 M ketika Muhammad bin Qasim, Jenderal Arab menaklukkan *Sindh* dan *Multan* di Punjab Selatan. Dia melakukan beberapa penaklukan dari Asia Tengah antara abad ke-10 sampai 15, sehingga terbentuk kerajaan Islam di anak benua India seperti Kesultanan *Delhi* dan Kekaisaran *Mughal*.

Kekaisaran *Mughal* menguasai sebagian besar benua bagian Utara. Mereka memperkenalkan seni dan arsitektur Timur Tengah ke India. Selain Kerajaan *Mughal* dan kerajaan *Rajput*, berbagai kerajaan Hindu independen, seperti Kekaisaran *Vijayanagara*, Kekaisaran *Maratha*, dan Kerajaan *Ahom*, berkembang secara sporadis di masing-masing wilayah India Selatan, Barat, dan Timur Laut. Kekaisaran *Mughal* mengalami penurunan bertahap di awal abad 18, sehingga memberikan kesempatan bagi *Afghanistan*, *Balochis*, *Sikh*, dan *Maratha* untuk mengendalikan daerah yang luas di barat laut benua sampai *British East India Company* memperoleh kekuasaan atas Asia Selatan. [2]

Dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan selama abad berikutnya, India secara bertahap dikuasai oleh *British East India Company*. Ketidakpuasan dengan kekuasaan Perusahaan tersebut menyebabkan meletusnya Pemberontakan India tahun 1857. Setelah India langsung dikuasai oleh Kerajaan Inggris dan dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan yang cepat pembangunan infrastruktur dan ironisnya terjadi penurunan ekonomi. Selama paruh pertama abad 20, sebuah perjuangan nasional untuk kemerdekaan diperjuangkan oleh Partai Kongres Nasional India dan kemudian diikuti dengan Liga Muslim. Negeri anak benua itu merdeka dari Britania Raya pada 1947 dan setelah itu menjadi Negara terpisah, yaitu India dan Pakistan.

1.3. Perkembangan Pendidikan India

Pada tahun 2000 tingkat melek huruf orang dewasa (persentase untuk yang berusia 15 atau lebih tua) adalah 58,5 persen (72,3 persen untuk laki-laki, 44,4 persen untuk perempuan). Angka ini meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 1961 dan lebih tinggi daripada kebanyakan negara di Asia Selatan lainnya, namun mereka masih jauh lebih rendah daripada kebanyakan negara di Asia Timur. Pada tahun 2001 angka partisipasi gabungan sekolah dasar, menengah pertama dan atas adalah 55 persen dari penduduk usia sekolah resmi untuk tiga tingkatan. Total belanja pemerintah pada pendidikan pada tahun 2001 adalah Rs 841.8 miliar (US \$ 17,300,000,000), setara 13,2 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah dan 4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sejak tahun 1950-an, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terus meningkat, sehingga India mampu mengembangkan sejumlah lembaga pendidikan dari dasar sampai tingkat universitas.

India memiliki potensi untuk menjadi pemimpin teknologi global. Industri India mampu bersaing secara global dalam perangkat lunak dan bahkan di bidang-bidang seperti mobil, bahan kimia dan peralatan rekayasa. Sebuah isu penting bagi keberhasilan masa depan industri India adalah pertumbuhan pendidikan teknik di India.

Sejak kemerdekaan, fokus awal dari kebijakan pemerintah adalah untuk menyediakan para insinyur yang diperlukan untuk

pengembangan ekonomi. Pendirian *India Institutes of Technology* (IIT), perguruan tinggi teknik regional (yang dikenal sebagai *National Institute of Technology*) ditujukan untuk mencapai hal ini. Insinyur India sudah terkenal reputasinya untuk keahlian rekayasa dan desain. Pendidikan Teknik di India merupakan pilihan favorit bagi siswa berprestasi. Hal ini mengakibatkan lonjakan pendirian perguruan tinggi teknik baru terutama di sektor swasta. Meskipun demikian, para pemimpin industri mengeluh tentang kurangnya insinyur berkualitas untuk industri mereka. Hal ini disertai dengan tingkat pengangguran yang signifikan terutama insinyur yang baru lulus.



Gambar 1.2 Rintisan kerjasama pendidikan Indonesia-India, guru-guru teladan SD/SMP Indonesia berkunjung ke sekolah di India

Di sisi lain, terjadi kesenjangan pendidikan teknik dimana Tamil Nadu, Andhra Pradesh dan Karnataka memiliki jumlah tertinggi lulusan teknik per penduduk.

Penduduk India yang mendapatkan ijazah (per tahun) sarjana teknik berjumlah sekitar 230,000, ijazah master sekitar 20,000 dan ijazah Ph.D sekitar 1,000 (data tahun 2006). Pemegang gelar doktor India kurang dari 1% dari seluruh lulusan teknik. Persentase gelar doktor untuk bidang teknik di India lebih rendah dari sebagian besar negara-negara lain (9% Amerika Serikat, 10% Inggris, Jerman 8%, 3% Korea).

Perbandingan beberapa institusi India terpilih (*Indian Institute of Technology*, Institut Teknologi Nasional dan perguruan tinggi teknik swasta) mengungkapkan beberapa hasil yang menarik. Sebuah perbandingan internasional menunjukkan bahwa banyak lembaga India yang tidak mampu berevolusi dari lembaga pengajaran tahap sarjana untuk menuju lembaga yang berbasis pengajaran dan penelitian. Salah satu keuntungan terbesar dari perguruan tinggi teknik terbaik di India adalah selektivitas tinggi - sekitar 2-3% dari pelamar yang dipilih. Ini jauh lebih rendah dari universitas internasional terkenal. Namun sistem pendidikan rekayasa tidak mampu menarik minat mahasiswa teknik terbaik untuk melanjutkan studi pasca-sarjana. Para lulusan IIT dan IISc berkontribusi kurang dari 1% dari mahasiswa pasca-sarjana teknik di negeri ini, 20% dari M.Tech dan 40% dari Ph.D. Hanya sekitar 1% (atau kurang) dari lulusan B. Tech yang memilih untuk melanjutkan M.Tech di India, sementara hanya 2% dari lulusan M.Tech yang memilih untuk melanjutkan Ph.D di India. Sekitar 75% dari mahasiswa pasca-sarjana teknik belajar di perguruan tinggi teknik swasta.

Ada lebih dari 1.100 perguruan tinggi swasta rekayasa. Namun hanya sebagian kecil dari perguruan tinggi swasta yang masuk peringkat 50 terbaik perguruan tinggi teknik di India. Lebih dari 90% dari perguruan tinggi teknik swasta merupakan perguruan tinggi yang berafiliasi dengan perguruan tinggi negeri, sehingga memiliki sedikit otonomi akademik. Struktur administrasi yang ada dan sifat dari perguruan tinggi swasta juga memiliki otonomi keuangan yang sangat sempit untuk pengembangan, dengan biaya dan gaji meliputi 80% dari anggaran.

Perbandingan dari perguruan tinggi teknik India dengan beberapa institusi terkemuka dunia menunjukkan bahwa dimungkinkan bagi institusi India untuk memiliki perbandingan antara siswa terhadap dosen 15:1 atau lebih namun tetap menjaga output penelitian yang signifikan. Hal ini tercermin dari data publikasi jurnal peer review per dosen dan rasio mahasiswa sarjana per dosen yang digunakan sebagai indikator dari keluaran penelitian dan pengajaran suatu institusi. Kebanyakan kualitas hasil riset lembaga India meningkat, tetapi berada di bawah ukuran yang bisa dicapai oleh beberapa institusi terbaik internasional. Tantangan untuk sistem pendidikan rekayasa di India adalah untuk

melakukan transisi dari universitas yang mengutamakan pengajaran menjadi universitas pengajaran dan penelitian.

Serangkaian inisiatif diperlukan untuk menarik mahasiswa cerdas untuk melakukan penelitian. Hal ini membutuhkan kemitraan dan komitmen dari industri, peningkatan pendidikan Ph.D. yang ada, peningkatan fasilitas penelitian dan penyediaan informasi pekerjaan yang berkualitas bagi lulusan doktor. Salah satu kendala terbesar untuk pengembangan pendidikan teknik di negara ini adalah kurangnya staf pengajar yang berkualitas. Hal ini terkait dengan masalah kurangnya lulusan Ph.D., serta gaji dan insentif untuk dosen. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini adalah mendorong kinerja, meningkatkan hubungan masyarakat dan industri serta mekanisme *review* berkala prestasi staf pengajar.

2

Struktur Dasar Sistem Pendidikan

2.1. Pengantar

Di kebanyakan Negara Bagian (*state*) dan wilayah persatuan (*union teritory*), Sekolah Dasar meliputi Kelas (disebut “standar”) 1 sampai 8; Sekolah Menengah Pertama meliputi Kelas 9 dan 10, sedangkan Sekolah Menengah Atas meliputi Kelas 11 dan 12. Hingga tahun 1997, sebagian besar negara bagian dan wilayah persatuan belum memiliki program wajib belajar. Dua belas negara bagian dan wilayah persatuan secara hukum memiliki program wajib belajar baik kelas kelima atau kelas delapan, namun tingkat *drop-out* tinggi bahkan dalam usia wajib belajar.

Sebagian besar negara bagian dan wilayah persatuan memiliki pendidikan gratis sampai ke kelas tujuh dan mayoritas sekolah dasar didanai dan dikelola oleh pemerintah. Namun, kurang dari setengah sekolah menengah yang didanai dan dikelola oleh pemerintah., Terdapat 34 persen lembaga sekolah yang dibiayai oleh pemerintah namun dikelola swasta dan 25 persen sekolah swasta yang dikelola tanpa dana pemerintah.

2.2. Struktur Pendidikan

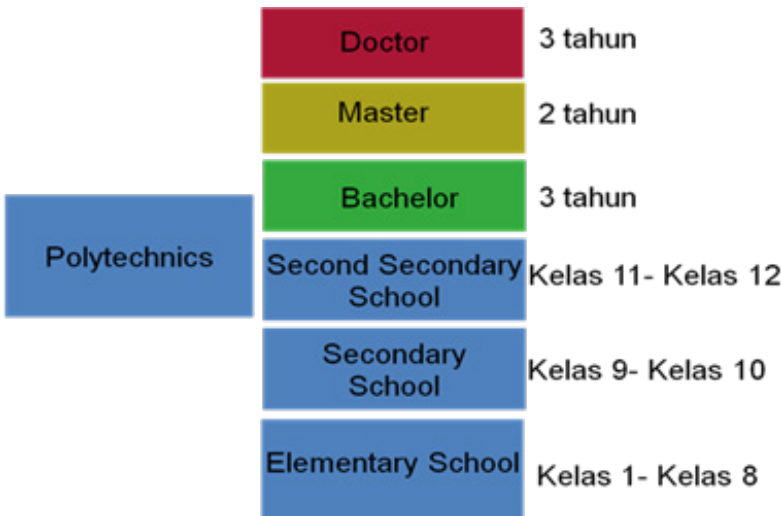
Struktur pendidikan di India sedikit berbeda dengan Indonesia di mana pendidikan dasarnya harus ditempuh 8 tahun, sedangkan pendidikan menengah pertamanya (*secondary school*) dilaksanakan

selama 2 tahun, demikian pula pendidikan menengah atasnya (*second secondary school*). Hampir semua sekolah di India bersifat satu atap, dimana kelas 1 hingga 12 dilaksanakan di sekolah yang sama.

Untuk Perguruan Tinggi, tergantung dari institusinya. Secara umum, institusi pendidikan tinggi di India terdiri atas universitas dan institut (teknologi, kedokteran, manajemen, teknologi informasi). Untuk tingkat bachelor, secara umum program di universitas adalah 3 tahun, sementara IIT secara umum program B.Tech (*Bachelor of Technology*) rata-rata 4 tahun, meskipun ada yang 5 tahun untuk B.Arch. (*Bachelor of Architecture*).

Politeknik di India berbeda dengan di Indonesia, di mana yang diterima adalah lulusan *Secondary School* (kelas 10) selama 3 tahun dan lebih bersifat ketrampilan. Program-program yang ditawarkan adalah program diploma dalam bidang yang ‘umum’ seperti Teknik Elektro, Kimia, Mesin, hingga yang sangat khusus seperti Fashion Design, Teknologi Keramik, Kesekretariatan.

Secara umum, struktur pendidikan di India tampak pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur pendidikan di India

3

Kebijakan Pendanaan Pendidikan

Ada dua sumber dana pendidikan di India, yaitu dari pemerintah dan sektor swasta/masyarakat. Dana dari pemerintah disediakan oleh: (i) pemerintah pusat (ii) pemerintah negara bagian (*state*) (iii) *University Grant Commission* (UGC) untuk Pendidikan Tinggi (iv) badan lokal (semacam CSR dari perusahaan daerah). Sedangkan dana dari swasta/masyarakat antara lain uang kuliah, sumbangan-sumbangan dan investasi dari perusahaan-perusahaan/pribadi.

Tabel 3.1 menunjukkan pembiayaan pendidikan India dari periode 1950-1951 hingga 1990-1991. Dari tabel tersebut tampak bahwa porsi dana dari pemerintah terus meningkat. Pada tahun 1950-1951 porsi dana dari pemerintah hanya 68%, dan meningkat pada tahun 1990-1991 menjadi 90.66%, sementara sumbangan dari masyarakat/swasta termasuk uang kuliah dan sumbangan menurun. Catatan menunjukkan bahwa porsi uang kuliah terus menurun dari 20,4% pada tahun 1950-51 menjadi 6,14% pada tahun 1990-1991. Hal ini terjadi karena tidak ada kenaikan berarti untuk uang kuliah meskipun inflasi terus terjadi.

Tabel 3.1 Sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91
Pemerintah (Pusat & Negara Bagian)	57,10	68,00	75,62	80,00	87,63
Pemerintah Daerah	10,90	6,50	5,70	5,00	3,03
Total dari Pemerintah	68,00	74,50	81,30	85,00	90,66
Fees	20,40	17,20	12,80	12,00	6,14
Endowments etc	11,80	8,30	5,90	3,00	3,20
Total dari Sektor Privat/Swasta	32,20	25,50	18,70	15,00	9,34
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* angka-angka dalam persentase					

Peran pemerintah pusat dibandingkan pemerintah Negara bagian lebih kecil. Meskipun demikian, alokasi dananya secara absolut terus bertambah. Porsi terbesar diberikan untuk pendidikan dasar. Pemerintah Negara Bagian secara keseluruhan menyumbangkan lebih kurang 60% untuk pendidikan. Alokasi biaya pendidikan mencapai 25% hingga 30% dari keseluruhan anggaran pemerintah Negara bagian, yang merupakan bagian terbesar dari pengeluarannya. Tabel 3.2 menunjukkan alokasi anggaran pendidikan untuk masing-masing tingkatan.

Dari Tabel 3.2 tampak bahwa persentase alokasi pendidikan terus menurun terhadap keseluruhan anggaran pembangunan meskipun secara absolut anggaran pendidikan terus meningkat dari Rs. 1,53 milyar pada Pelita Pertama (1951-1956) menjadi Rs. 203,81 milyar pada Pelita Kesembilan (1997-2002). Alokasi untuk pendidikan dasar secara umum adalah yang terbesar meskipun cenderung naik turun, 56% pada Pelita Pertama, turun pada periode 1966-1969 dan kemudian meningkat tajam 47% pada Pelita Kedelapan, bahkan pada Pelita Kesembilan (1997-2002) meningkat menjadi 58%. Sementara alokasi untuk Pendidikan Menengah berada pada kisaran 13% sedangkan Pendidikan Tinggi berada pada kisaran 9% hingga 12%.

Seperti yang terlihat di Tabel 3.2, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah berada pada kisaran 13% atau 4% dari GDP. Gambaran ideal yang diharapkan adalah 6% dari GDP, dimana 3%

untuk Pendidikan Dasar, 1.5% untuk Pendidikan Menengah, 1% untuk Pendidikan Tinggi dan 0.5% untuk Pendidikan Tinggi Teknik. Tetapi hal itu hanya terjadi pada tataran perencanaan saja, keadaan ideal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan.

Untuk tahun 2013, Pemerintah India telah meningkatkan anggaran pendidikan sebesar Rs. 65.867 crore (setara Rp 116,67 Triliun), meningkat 17% dari tahun lalu. Pada anggaran tahun 2013-2014, pemerintah India mengusulkan untuk memberikan Rs 27.258 crore (setara Rp.47.96 Triliun) untuk SSA (*Sarva Shiksha Abhiyan*/Pendidikan Sekolah Dasar) , serta Rs 3.983 crore (setara Rp. 7.01 Triliun) untuk RMSA (*Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan*/ Sekolah Menengah), meningkat 25,6% dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk anggaran *Mid-Day Meal Scheme* (MDM) akan disediakan sebesar Rs 13.215 crore (setara Rp. 23,26 Triliun). Selanjutnya Rs 5.284 crore (setara Rp. 9,30 Triliun) akan dialokasikan kepada berbagai kementerian untuk program ribuan beasiswa bagi pelajar kategori kasta rendah, suku minoritas, ekonomi lemah dan anak-anak perempuan di tahun 2013-2014. Pemerintah juga mengalokasikan Rs 1.650 crore (setara Rp. 2,9 Triliun) untuk enam lembaga antara lain *All India Institute of Medical Sciences* (AIIMS) serta Rs 1.069 crore (setara Rp. 1,88 Triliun) untuk *Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy* (AYUSH).

Tabel 3.2 Alokasi anggaran pendidikan untuk masing-masing tingkatan pendidikan (1951 -2002)

Sektor Pendidikan	Rencana 5 Tahunan/Rencana Tahunan										(Persentase)
	Pertama 1951-56	Kedua 1956-61	Ketiga 1961-66	Tahunan 1966-69	Keempat 1969-74	Kelima 1974-78	Keenam 1980-85	Ketujuh 1985-90	Tahunan 1990-92	Kedelapan 1992-97	Kesembilan 1997-02
Pendidikan Dasar	56 (85)	35 (95)	34 (201)	24 (75)	30 (239)	35 (317)	33 (836)	37 (2849)	37 (1729)	47 (9201)	58 (11842.8)
Pendidikan Menengah	13 (20)	19 (51)	18 (103)	16 (53)	18 (140)	17 (156)	21 (530)	24 (1832)	22 (1053)	18 (3498)	13 (2603.5)
Pendidikan Tinggi	9 (14)	18 (48)	15 (87)	24 (77)	25 (195)	22 (205)	22 (559)	16 (1201)	12 (588)	8 (1516)	12 (2500.0)
Pendidikan untuk Orang Dewasa	-	-	-	-	-	-	9 (224)	6 (470)	9 (416)	9 (1848)	3 (630.4)
Lain-lain	9 (14)	10 (30)	12 (73)	11 (37)	14 (106)	14 (127)	4 (108)	3 (198)	3 (118)	4 (751)	2 (431.4)

Total Pendidikan Umum	87 (133)	82 (224)	79 (164)	75 (242)	87 (680)	88 (764)	89 (2257)	86 (6550)	82 (3904)	86 (16814)	88 (18008.1)
Pendidikan Teknis	13 (20)	18 (49)	21 (125)	25 (81)	13 (106)	12 (9107)	11 (273)	14 (1083)	17 (823)	14 (2786)	12 (2373.5)
Total Pendidikan	100 (153)	100 (273)	100 (589)	100 (323)	100 (786)	100 (912)	100 (2530)	100 (7633)	100 (4727)	100 (19600)	100 (49836)
Total Pengeluaran yang Direncanakan	1960	4672	8577	6625.4	15779	39426.2	109291.7	220216.3	123120	434100	813998
Alokasi Pendidikan dalam Persen	7.8	5.8	6.9	4.9	5.0	3.2	2.7	3.5	3.8	4.9	6.1

* Angka-angka di dalam kurung adalah dalam Rupee

Kontribusi Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Negara Bagian (*State*) cenderung meningkat dari 25% pada Pelita Pertama dan Kedua, menjadi 38% pada Pelita Kesembilan, kecuali pada Pelita Kelima dan Keenam terjadi penurunan dan stagnan pada 30% (lihat Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Kontribusi Anggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara Bagian

Rencana 5 Tahunan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Negara Bagian	Total
Pertama	25	75	100
Kedua	25	75	100
Ketiga	26	74	100
Keempat	33	67	100
Kelima	30	70	100
Keenam	30	70	100
Ketujuh	37	63	100
Kedelapan	39	61	100
Kesembilan	38	62	100
* angka-angka dalam persentase			

Persentase alokasi dana pendidikan terhadap Anggaran Belanja India tidak didasari oleh payung Undang-Undang (UU) apalagi Undang-Undang Dasar (UUD) seperti di Indonesia. Karena itu, persentase dana pendidikan naik turun seiring dengan dinamika sistem yang ada di sana, meskipun menunjukkan tendensi meningkat setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 1951-1952 mencapai 7.92% dari total anggaran (0.64% dari GDP) dan pernah mencapai tingkat tertinggi sebesar 13.55% dari total anggaran (4.11% dari GDP) pada tahun 2000-2001. Untuk tahun 2013 ini alokasinya sekitar 13%. Perlu dicatat bahwa anggaran ini di luar gaji guru dan dosen (lihat Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Perkembangan anggaran pendidikan India

Tahun	Total Pengeluaran untuk Pendidikan dan Pelatihan (dalam Rupee)	Total Pengeluaran untuk Semua Sektor (dalam Rupee)	% Pengeluaran untuk Pendidikan dari Semua Sektor	% Pengeluaran untuk Pendidikan dari GDP
1951-52	64.46	814.13	7.92	0.64
1955-56	118.39	1111.26	10.65	1.15
1960-61	239.56	1997.93	11.99	1.48
1965-66	432.61	4404.82	9.82	1.69
1970-71	892.35	8787.12	10.16	2.11
1975-76	1849.47	17958.99	10.30	2.44
1980-81	3884.20	36398.39	10.67	2.98
1985-86	8713.02	67091.41	12.99	3.49
1990-91	19615.85	146711.53	13.37	3.84
1995-96	38178.09	286194.55	13.34	3.56
2000-01	77847.66	574436.07	13.55	4.11

4

Penilaian/Penjaminan Mutu Pendidikan

4.1. Pengantar

Pendidikan modern di India sejak jaman penjajahan Inggris telah dikelola secara “liberal” dimana tidak ada badan tunggal yang menentukan kurikulum, silabus bahkan ujian, tidak seperti Indonesia, misalnya, yang hanya memiliki Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Karena itu, siapa pun bisa membuat suatu “badan” sendiri, yang dikenal sebagai “Board” untuk penjaminan mutu pendidikan, sejauh ada yang mau berada di naungan “board” tersebut. Beberapa “board” yang ada, dapat dilihat di Gambar 4.1.

Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, terdapat “board” yang dikenal secara luas di India dan di luar negeri yaitu CBSE (*Central Board of Secondary Education*). CBSE inilah yang merancang kurikulum, silabus dan ujian untuk sebagian besar siswa di India, selain “board lain seperti ICSE. Jadi, meskipun tidak ada kata-kata ujian nasional, tetapi karena lingkup CBSE yang meliputi hampir seluruh India (bahkan Negara-negara lain seperti Nepal, Bhutan, Mauritius, Sri Lanka) maka secara de facto ujian CBSE itu bisa dipandang sebagai ujian nasional. Ujian ini diselenggarakan untuk Kelas 10 dan 12 sedangkan Kelas 8 tidak ada ujian semacam ini.



Gambar 4.1 Beberapa “board” pendidikan yang ada di India

4.2. Ujian Nasional

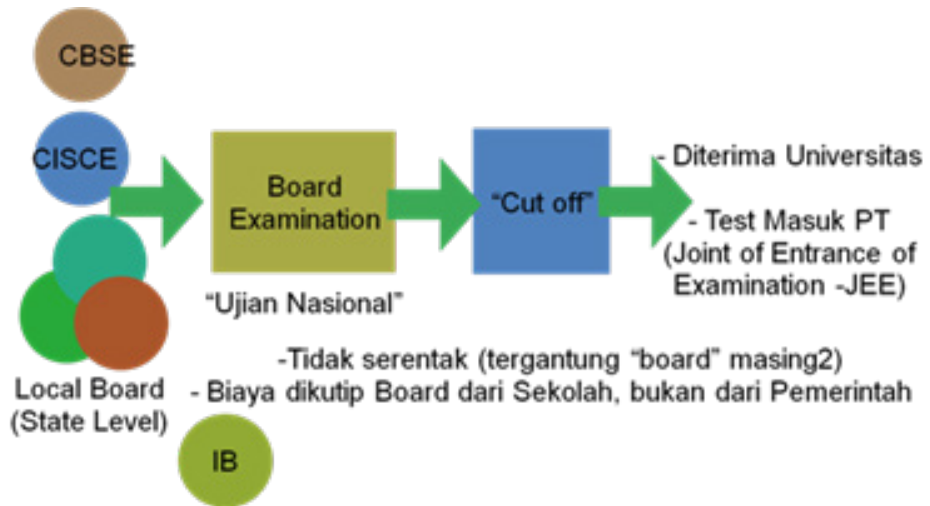
Ujian dari board seperti CBSE, ICSE dan “board” lain yang bersifat lokal mendapat pengakuan yang sama sebagai dasar bagi ujian ke Perguruan Tinggi. Ada ketentuan yang berbeda-beda pada institusi pendidikan tinggi India dalam memperlakukan nilai ujian nasional tersebut:

1. Dipakai sebagai “cut off” atau syarat minimal untuk masuk ke Perguruan Tinggi tanpa tes (misalnya Universitas Delhi selalu mengumumkan nilai “cut off” itu setelah nilai ujian nasional keluar).
2. Dipakai sebagai saringan awal untuk ikut test berikutnya yang juga bersifat nasional, seperti untuk masuk ke Indian Institute of Technology (IIT) yang berjumlah 18 buah yang dikenal sebagai Joint Entrance Examination (JEE).

Nilai ujian nasional ini juga sering diminta sebagai persyaratan minimal untuk mendapatkan bebas ujian masuk bagi universitas swasta, termasuk mendapatkan beasiswa. Manfaat lain, beberapa perusahaan juga meminta syarat nilai ujian ini untuk penerimaan pegawainya.

Ujian nasional ini tidak serempak, karena tergantung dari “board” masing-masing dan dilaksanakan oleh “board” masing-masing pula. Ujian tersebut tidak mungkin dicampur karena kurikulum dan silabusnya

berbeda. Ujian nasional biasanya diselenggarakan sekitar Februari dan Maret sedangkan hasilnya diumumkan Mei atau Juni (lihat Gambar 4.2).



Gambar 4.2 Nilai dari berbagai *board* mendapat pengakuan yang sama, sebagai *cut off* untuk bisa diterima di universitas, maupun sebagai syarat awal untuk bisa ikut JEE yang dilaksanakan oleh IIT

Ujian yang ditawarkan sesuai dengan *stream* (penjurusan) yang dipilih setelah Kelas 10, yaitu Sains, Dagang (*Commerce*) dan Sosial Humaniora.

Untuk ujian ini, sama sekali tidak ada dana dari pemerintah secara langsung, karena masing-masing sekolah melakukan iuran secara reguler kepada "board" yang diikutinya.

Soal ujian biasanya dibuat oleh board dan soal ujian didistribusikan oleh board di masing-masing Negara bagian. Kartu ujian diterbitkan oleh Pemerintah Negara bagian dan diatur tempatnya agar tidak berada pada sekolah yang sama dengan peserta tersebut. Ujian biasanya berlangsung selama 3 jam secara tertulis. Board kemudian akan mengevaluasi dan mengumumkan hasilnya di berbagai media.

Secara umum, tidak ditemukan adanya perdebatan tentang keberadaan dan fungsi ujian nasional itu sendiri seperti yang kita dapatkan

di tanah air. Hal ini memang cukup aneh, mengingat apa yang dikritisi oleh para pengamat di tanah air tentang ujian nasional kurang lebih sama atau bahkan lebih parah daripada di India, seperti masalah pemerataan fasilitas dan pengajar yang masih timpang. Meskipun demikian, tentu saja ada kritik-kritik tetapi lebih banyak tentang bagaimana (bukan pada keberadaannya itu sendiri) memperbaiki pelaksanaan ujian nasional tersebut, seperti bahwa ujian tersebut yang hanya beberapa hari tetapi sangat menentukan “nasib” siswa di kemudian hari.

4.3. Konsep *Continuous Comprehensive Evaluation*

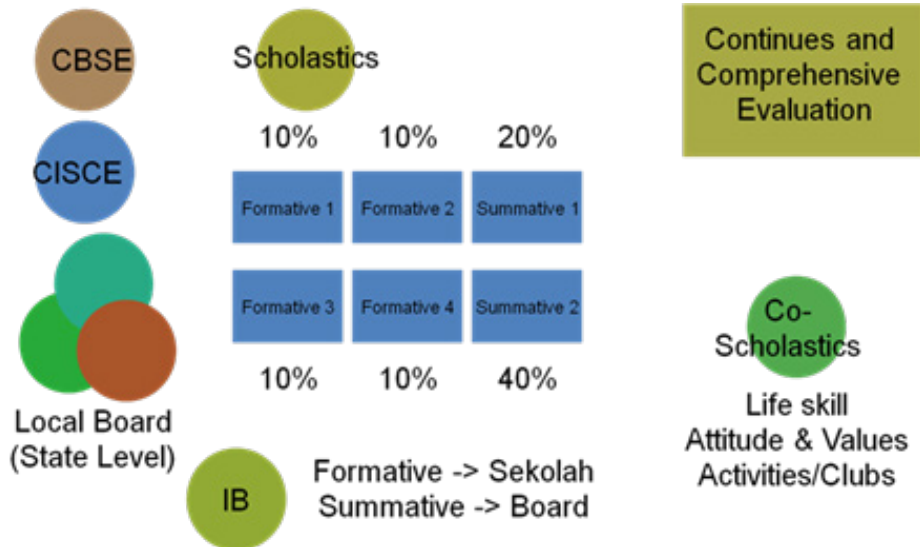
Kritik utama ujian nasional di India mirip dengan pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia yaitu “nasib” siswa yang hanya ditentukan oleh beberapa hari ujian. Karena itu, maka CBSE mengajukan ide yang dikenal sebagai *Continuous Comprehensive Evaluation* (CCE) (lihat). Konsep ini diperkenalkan CBSE sejak 2009, dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dan terus menerus untuk siswa kelas 10 dan kelas 12 (lihat Gambar 4.3).

Konsep CCE adalah membagi beban ujian merata sepanjang tahun. Tiap tahun dibagi atas 2 semester. Dalam satu semester, dilakukan 2 kali test formatif dan sekali sumatif. Bobot nilai formatif adalah 10 persen, sedangkan sumatif semester pertama 20 persen dan semester kedua 40 persen.

CCE dapat menurunkan tingkat *stress* siswa dan menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan kinerja siswa. Hal ini karena dengan CCE maka penilaian dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus meliputi kemampuan skolastik dan ko-skolastik. Penilaian skolastik sesuai dengan mata pelajaran yang ada pada bidang studi yang dipilih, sedangkan penilaian ko-skolastik meliputi kecakapan hidup, sikap, norma dan kegiatan pendukung lainnya. Instrumen penilaiannya juga dirancang oleh CBSE.

CCE berperan penting untuk pembelajaran bukan sekedar menguji kapasitas hafalan semata, sehingga siswa dapat belajar secara konseptual dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri mereka. CCE

juga menekankan pentingnya kebugaran fisik, keseimbangan emosional dan kewaspadaan mental siswa sehingga siswa termotivasi dan diberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan minat dan hobi mereka. Siswa juga diberi ketrampilan yang berbeda, kemampuan berpikir kritis dan ketrampilan sosial yang adaptif dan kompetitif.



Gambar 4.3 Konsep *Continues and Comprehensive Evaluation* (CCE), bertujuan untuk melakukan evaluasi secara terus menerus, tidak sekedar di akhir program pendidikan sehingga mengurangi tingkat *stress* siswa

Penilaian CCE meliputi formatif dan sumatif. Pada penilaian formatif, siswa diberikan masukan secara regular dan dimotivasi secara aktif untuk melibatkan diri dalam pembelajaran mandiri. Penilaian meliputi *class work, homework, oral question, quiz, project, dan assignment/test*.

Penilaian sumatif berupa penilaian kinerja siswa di akhir pengajaran. Penilaian ini meliputi tes tengah semester dan tes akhir semester oleh sekolah dan ujian “board” yang bersifat nasional. Penilaian hasil akhir ditentukan oleh sekolah, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

4.4. Penjaminan Mutu Guru

4.1.1. Sistem pendidikan Guru di India

Dalam struktur Negara federal seperti India, kebijakan dan kerangka hukum pendidikan guru disediakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini dikepalai oleh Kementerian Pendidikan (atau dikenal sebagai Kementrian HRD), berbagai program dan skema sebagian besar dilakukan oleh pemerintah negara bagian berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Terdapat dua pelatihan dalam rangka menyiapkan tenaga pengajar yang handal, yaitu :

1. Pendidikan/Sekolah guru (pre-service training)
2. Peningkatan kapasitas guru (in-service training)

Pre-Service Training

Untuk pelatihan *pre-service training*, *National Council of Teacher Education* (NCTE) yaitu lembaga otonom yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan pendidikan guru di India. NCTE meletakkan norma-norma dasar dan standar untuk berbagai kursus pendidikan guru, kualifikasi minimum, materi kursus, durasi dan kualifikasi minimum yang harus dicapai dalam berbagai tingkatan kursus.

In-service training

India memiliki jaringan institusi pelatihan guru milik pemerintah yang besar yaitu *Teacher Training Institutions* (TTI), yang menyediakan pelatihan *in-service* untuk para guru sekolah. Di tingkat Nasional, *National Council of Educational Research and Training* (NCERT) bersama enam *Regional Institutes of Education* (REI) menyiapkan sejumlah modul untuk berbagai kursus pelatihan guru dan juga melakukan program khusus untuk pelatihan guru dan *teachers trainer*. Dukungan kelembagaan juga disediakan oleh *National University on Educational Planning and Administration* (NUEPA). Kedua lembaga tersebut, NCERT dan NUEPA, adalah Badan Otonom Nasional. Di tingkat Negara bagian, *State Councils of Educational Research and Training* (SCERT), mempersiapkan modul untuk pelatihan guru dan

mengadakan kursus khusus untuk *teachers trainer* dan guru sekolah. *Colleges of Teacher Education* (CTE) dan *Institutes for Advanced Learning in Education* (IASE) menyediakan pelatihan *in-service* untuk guru SLTP dan SMA, serta *teachers trainer*.

Di tingkat *district*/kabupaten, pelatihan *in-service* disediakan oleh *District Institutes of Education and Training* (DIET). *Block Resource Centres* (BRC) dan *Cluster Resource Centres* (CRC) menjadi anak tangga terendah dari hirarki lembaga vertikal pelaksana *in-service training* untuk guru-guru sekolah. Selain itu, pelatihan *in-service* juga dilangsungkan dengan peran aktif dari lembaga sosial, sekolah swasta dan instansi lain.

4.1.2. Pendanaan

Untuk *Pre-Service Training*, lembaga pendidikan guru pemerintah dan lembaga pendidikan guru yang mendapat support pemerintah secara finansial didukung oleh Pemerintah Negara bagian masing-masing. Lebih jauh, di bawah skema sponsor pusat pada *Teachers Education*, Pemerintah Pusat juga mendukung lebih dari 650 lembaga, meliputi DIET, CTE, dan IASE.

Untuk pelatihan *in-service*, dukungan keuangan sebagian besar disediakan oleh Pemerintah Pusat di bawah skema *Sarva Shiksha Abhiyan* (SSA), yang merupakan kendaraan utama untuk pelaksanaan UU *Right to Education* (RTE). Di bawah skema SSA, 20 hari pelatihan *in-service* diberikan kepada guru sekolah, 60 hari kursus penyegaran bagi para guru yang tidak terlatih dan 30 hari orientasi bagi calon guru yang baru lulus. Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan finansial untuk *in-service training* yang diselenggarakan oleh institusi dibawah naungan pemerintah Negara bagian. Beberapa NGO, termasuk organisasi multilateral juga terlibat dalam proses *in-service training* bagi guru di India.

4.1.3. Beberapa Kategori Guru

1. Sekolah Pemerintah:

- Guru reguler, adalah karyawan tetap pemerintah. Penerimaan mereka diatur dalam seleksi yang ketat. Mereka diberikan tunjangan kesejahteraan dan tunjangan pensiun. Mereka dapat dipromosikan dari guru ke level kepala sekolah dan bahkan *supervisor/administrator/teacher trainer*.
- *Parateachers* atau guru kontrak ditunjuk atas dasar kontrak oleh institusi lokal pada level desa atau kecamatan (*panchayat*). Persyaratan berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Mereka tidak berhak atas tunjangan pensiun. Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk promosi dan diangkat ke jenjang karir yang lebih tinggi.
- Guru tamu : adalah tenaga sumber daya lokal yang diangkat oleh sekolah untuk mengajar. Tidak ada peraturan khusus dalam proses pengangkatan guru tersebut.
- Instruktur : ditunjuk untuk melaksanakan program jembatan dan beberapa sekolah alternatif. Tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, sehingga kontrak berbasis *ad hoc*.

2. Sekolah Swasta

Tidak seperti sekolah pemerintah, instansi atau lembaga swasta yang didirikan sebagian ada yang mendapat bantuan pemerintah dan sebagian lainnya tidak mendapatkannya.

3. Sekolah Swasta Bantuan

Institusi sekolah yang didirikan oleh pihak swasta. Mereka diakui dan didanai oleh pemerintah dan gurunya dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah negara bagian. Semua guru di sekolah ini masuk dalam kategori “formal teacher”. Akibatnya, mereka harus sesuai dengan norma-norma kualifikasi yang ditentukan.

4.1.4. Jenjang Pendidikan, Kelayakan dan Pelatihan Guru :

1. Pra-sekolah dasar dan Sekolah Dasar

Persyaratan minimum untuk menjadi guru Sekolah Dasar adalah lulusan dengan sertifikat pelatihan pengasuhan atau gelar diploma. Biasanya calon yang memiliki pendidikan S1 (B.Ed.) memulai karir

mereka sebagai guru Sekolah Dasar dan secara bertahap bergerak ke jenjang yang lebih tinggi. Kandidat lulusan dalam bidang *home science* juga dapat dipilih untuk menjadi guru Sekolah Dasar. Para calon harus lulus dengan nilai minimal 55% dari total nilai 100% dan memegang diploma atau gelar dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Peserta setidaknya telah mempelajari satu mata pelajaran dari seluruh mata pelajaran yang ada diajarkan di sekolah.

2. Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

Calon guru Sekolah Menengah Pertama harus memiliki gelar Pasca Sarjana dibidang tertentu sesuai mata pelajaran atau memiliki gelar sarjana pendidikan (B.Ed.) karena lulusan B. Ed benar-benar dipersiapkan untuk menjadi guru sekolah menengah. Guru yang memiliki gelar B.Ed. disebut Lulusan Guru Terlatih. Calon dengan pengalaman mengajar lebih dipilih untuk menjadi guru. Ada sejumlah perguruan tinggi pelatihan guru yang memberikan B.Ed. selama satu tahun. Beberapa universitas juga menawarkan kursus korespondensi untuk pelatihan keguruan. Ada juga lembaga terpisah untuk guru khusus seperti guru yang buta, tuli dan bisu, cacat mental, seni, kerajinan, musik dan pendidikan fisik.

3. Perguruan Tinggi

Dosen-dosen Seni, Perdagangan, Ilmu, Ilmu Sosial, Hukum, Bahasa Asing dan Pendidikan Jasmani memerlukan gelar pasca sarjana dalam mata pelajaran yang relevan dari Universitas-universitas di India atau gelar setara dari Universitas asing, dengan angka minimal presentase 55% dari total nilai 100%. *National Entrance Test* (NET) dilakukan oleh *University Grant Commission* (UGC), CSIR atau tes serupa yang terakreditasi oleh UGC. Calon dosen juga harus memiliki laporan penilaian kinerja secara konsisten dan memuaskan. Dosen senior yang tidak memiliki gelar Ph.D. atau karya tulis yang diterbitkan dan tidak memenuhi standar penelitian, tetapi memenuhi kriteria lain dan memiliki catatan yang baik dalam mengajar, mendapatkan kesempatan seleksi.

4.1.5. Renumerasi

Gaji kotor bagi guru Pemerintah di India meliputi gaji pokok ditambah tunjangan kemahalan yang ditingkatkan dari waktu ke waktu berdasarkan biaya indeks hidup ditambah tunjangan sewa rumah dan tunjangan kompensasi perkotaan bagi guru di perkotaan. Selain itu, guru yang memenuhi syarat dapat mengajukan pinjaman sejumlah minimal 25 % dari gaji bulanan hingga maksimum 33 kali gaji. Guru perempuan memiliki hak cuti hamil selama empat bulan dengan gaji penuh dan 6 minggu cuti dibayar penuh untuk kasus keguguran.

Tabel 4.1 Renumerasi guru dan dosen di India

Tingkatan	Kisaran
Guru sekolah dasar (Negeri)	Rs. 4.500 - Rs. 9.000
Sekolah Menengah (<i>junior school</i>) (Negeri)	Rs. 5.500 - Rs. 12.000
Sekolah menengah (<i>secondary school</i>)	Rs. 9.000 - Rs. 18.000
Dosen Universitas	Rs. 20.000 - Rs. 35.000
Profesor Universitas	Rs. 80.000 - Rs. 125.000

Untuk liburan rutin, guru juga dapat melaksanakan cuti tahunan selama 15 hari kerja dalam setahunnya dan 15 hari ijin membolos. Bagi guru yang tidak pernah mengambil hak cutinya setiap tahun dapat diakumulasikan untuk diambil kemudian maksimum hingga 300 hari kerja. Sedang yang tidak mengambil cuti sama sekali dapat menggantinya dengan uang cash pada akhir menjelang masa pensiun. Guru juga mendapatkan kebebasan dan suku bunga rendah untuk akses pinjaman rumah dan lainnya. Biaya sekolah anak juga ditanggung oleh pemerintah jika anaknya bersekolah di sekolah pemerintah.

Insentif and Penghargaan

Ironi sistem pendidikan India adalah tidak memiliki program insentif maupun penghargaan untuk guru yang berprestasi. Karir guru ditentukan oleh senioritas. Pemerintah memiliki program tersebut pada tahun 1950. Alasan utama tidak adanya skema insentif adalah untuk menghindari politisasi insentif atau penghargaan yang diberikan pada guru yang berprestasi.

4.1.6. Struktur Karir

Tidak ada struktur promosi yang kaku dalam profesi guru. Beberapa guru dengan track record yang baik dan yang telah aktif terlibat dalam penanganan tugas administrasi tambahan di sekolah bisa menjadi Wakil Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah. Penunjukan dan fungsi tidak konsisten dan bervariasi sesuai dengan aturan lembaga. Perguruan tinggi memiliki struktur karir yang lebih ketat.

5

Pengembangan Kurikulum

5.1. Pengantar

Kurikulum di sekolah dasar hingga menengah ditentukan oleh masing-masing Negara Bagian, tetapi Pemerintah Pusat (dalam hal ini NCERT) mengembangkan kurikulum nasional, berdasarkan kajian-kajian yang komprehensif dari berbagai ahli.

Kurikulum terbaru di India sudah cukup lama yaitu 2005, hingga sekarang belum ada pembaharuan meskipun para ahli pendidikan India berpendapat bahwa setelah 5 tahun sebuah kurikulum layak untuk ditinjau ulang. Tetapi hingga kini, kurikulum 2005 masih dianggap layak.

Pengembangan kurikulum tersebut berangkat dari kegelisahan para pendidik, melihat kecenderungan pelajaran yang tercerabut dari akarnya, siswa menjadi asing di lingkungannya sendiri. Mengutip sastrawan pemenang Nobel Rabindranath Tagore:

“Ketika saya kecil saya dan teman-teman saya memiliki kebebasan untuk membuat sendiri mainan yang bahannya berasal dari apa yang ada di sekitar kami. Lalu kami bebas bermain dengan imajinasi kami tanpa batas. Sampai suatu saat, di sorga masa kecil kami, masuklah godaan dari dunia pasar orang dewasa. Mainan yang dibeli di pasar diberikan oleh satu orang tua teman kami dan diberikan kepadanya; sungguh suatu mainan yang sempurna, besar dan sangat hidup. Teman kami tersebut sangat kagum dengan mainan tersebut dan menjaga jarak dengan teman

yang lain, dan meremehkan teman-teman kami yang memiliki mainan yang jauh lebih murah tersebut. Kalau dia belajar tentang bahasa modern tentang sejarah, maka dia akan mengatakan bahwa dia lebih beradab dari yang lainnya, karena dia memiliki mainan yang sangat sempurna. Satu hal yang dia lupakan – sebuah fakta yang pada saat itu kelihatannya bagi dia kurang berarti – bahwa godaan mainan sempurna tersebut telah merusak sesuatu yang lebih sempurna dari mainannya tersebut, fakta luar biasa dari dunia kanak-kanak yang sempurna. Mainan mahal itu hanyalah menyatakan kekayaannya, bukan semangat kreatif anak-anak, bukan kegembiraan meluap-luap dari anak-anak dalam bermain, sebuah undangan terbuka kepada siapa saja yang menjadi teman di dunia bermainnya”

(diterjemahkan bebas dari “Civilisation and Progress” oleh Rabindranath Tagore)

5.2. Dasar-dasar Pemikiran Pengembangan Kurikulum

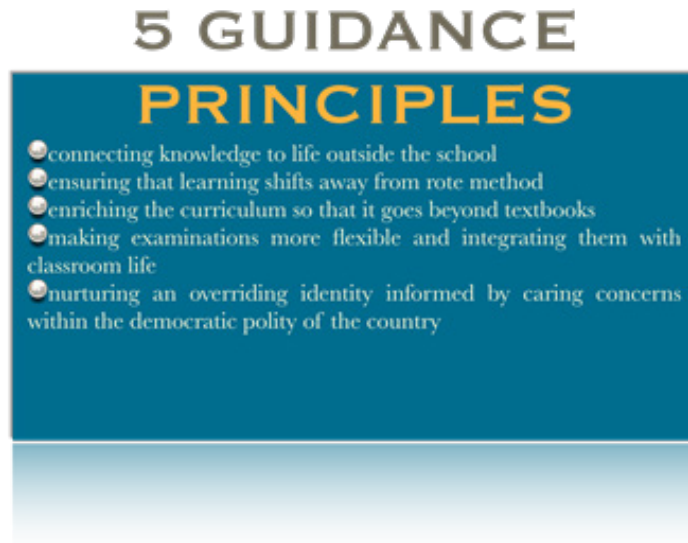
Berangkat dari Konstitusi India yang mengatakan bahwa tujuan India merdeka adalah terbentuknya masyarakat yang sekuler, egaliter dan pluralis, maka tujuan pendidikan yang diinginkan bangsa India adalah:

1. kebebasan berfikir dan bertindak
2. kepekaan terhadap kebahagiaan dan perasaan orang lain
3. belajar untuk menanggapi situasi baru secara lentur dan kreatif
4. bersedia untuk berpartisipasi dalam proses demokratis
5. kemampuan untuk bekerja menuju dan berkontribusi terhadap proses-proses ekonomi dan perubahan sosial.

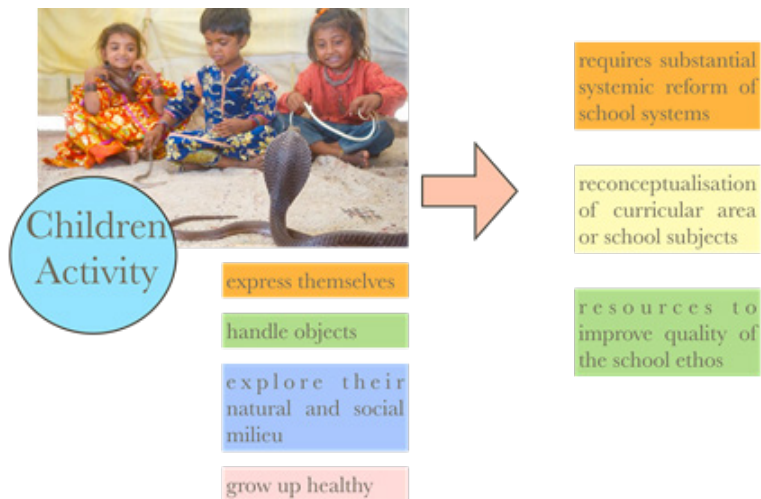
Kurikulum 2005 disusun dengan memperhatikan tujuan pendidikan tersebut, dan memperhatikan 5 petunjuk dasar (lihat Gambar 5.1).

Basis pengembangan kurikulum haruslah mendekatkan anak-anak dengan lingkungannya, berdasarkan hal-hal berikut ini: (i) Pengajaran hendaknya bertujuan untuk meningkatkan keinginan dan strategi alamiah anak-anak untuk belajar (ii) Pengetahuan hendaknya tidak disamakan dengan informasi (iii) Mengajar hendaknya dilihat sebagai aktifitas profesional, bukan pelatihan untuk hafalan atau sekedar penyampaian fakta-fakta.

Aktifitas anak-anak hendaknya mampu mengungkapkan jati diri mereka, langsung memegang obyek yang jadi perhatiannya, dapat mengeksplorasi lingkungan alamiah dan sosialnya dan dapat tumbuh secara sehat. Untuk bisa merealisasikan hal-hal tersebut, maka dibutuhkan: (i) reformasi total dari sistem sekolah (ii) konseptualisasi ulang daerah kurikuler atau bahan pelajaran (iii) sumber daya untuk memperbaiki kualitas dari etos sekolah (lihat Gambar 5.2).



Gambar 5.1 Lima petunjuk dasar dalam pengembangan Kurikulum 2005



Gambar 5.2 Basis pengembangan aktifitas anak

Secara umum ada empat pelajaran dasar, yaitu Bahasa, Matematika, Sains dan Ilmu Sosial. Diperlukan pelunakan batas-batas empat pelajaran di atas sehingga murid dapat merasakan integrasi pengetahuan dan kesenangan terhadap pengertian. Pelajaran hendaknya relevan dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang dan penyajian hendaknya diperbaiki sehingga mengurangi tingkat *stress* di kalangan anak-anak. Membangkitkan rasa cinta terhadap ilmu bisa membuat murid “menikmati” pelajaran, bukan menganggap pelajaran sebagai beban yang harus dihapalkan secara membabi buta. Buku teks dan material pengajaran lainnya hendaknya bersifat pluralis, yang memasukkan aspek-aspek pengetahuan lokal dan ketrampilan-ketrampilan tradisional serta mendorong lingkungan sekolah untuk memiliki kesesuaian dengan lingkungan rumah dan masyarakat untuk anak-anak.

Untuk pelajaran Bahasa, prinsip utamanya adalah pengakuan bahwa bahasa Ibu merupakan bahasa perantara terbaik dalam pendidikan. Kemampuan multi bahasa anak-anak, termasuk Bahasa Inggris hendaknya terus dipupuk untuk membuat mereka siap dan lentur dalam berkomunikasi. Kemampuan berbahasa yaitu membaca, menulis, mendengarkan, berpidato hendaknya terkandung dalam pembelajaran bahasa. Untuk kelas sekolah dasar (hingga kelas 8) hendaknya membaca ditekankan.

Dalam pelajaran Matematika hendaknya dapat menarik minat murid dengan membuat pelajaran yang atraktif dengan menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari murid. Keterkaitan dengan pelajaran lain hendaknya diperkenalkan sehingga murid tahu untuk apa mereka belajar matematika. Tujuan dari pembelajaran matematika adalah membuat murid bisa berfikir, berlogika, memvisualisasikan fakta-fakta hingga mudah dimengerti, mampu menangani berbagai abstraksi persoalan dan dapat memformulasikan dan memecahkan persoalan. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur seperti komputer beserta perangkat lunaknya dan tentu saja koneksi internet.

Pelajaran Sains hendaknya mampu membuat siswa mampu menguji dan menganalisis kejadian sehari-hari di sekitarnya. Perhatian terhadap lingkungan hendaknya ditekankan dan diusahakan ada aktifitas di

luar kelas untuk setiap subyek pelajaran. Hasil-hasil pengamatan dan analisis hendaknya dapat disimpan di suatu basis data sehingga bisa menjadi sumber daya belajar. Perlu dipikirkan untuk mengadakan acara seperti *Children's Science Congress* untuk mengumpulkan berbagai hasil eksperimen dan pengamatan sehingga dapat terjadi pembangkitan pengetahuan (*knowledge generation*) secara nasional.

Ilmu Sosial di samping harus membuat siswa mengerti batas-batas yang dipelajari, hendaknya tetap memperhatikan integrasi dari tema-tema besar seperti misalnya air. Air, bisa ditinjau dari berbagai aspek contohnya kesehatan, pergaulan sosial, pengaruhnya terhadap ekonomi. Beberapa pergeseran paradigma seperti (i) pembelajaran ilmu sosial dari perspektif kelompok yang termaginalisasi (keadilan gender dan kepekaan terhadap perbedaan kasta dan kaum minoritas) (ii) Pelajaran kewarganegaraan (*civic*) hendaknya dipisahkan dari sekedar ilmu politik (iii) pentingnya pelajaran sejarah yang membentuk persepsi murid terhadap identitas kewarganegaraan.

Materi-materi lain yang perlu diajarkan, di samping materi-materi di atas, yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan adalah: prakarya, kesenian, pendidikan jasmani dan perdamaian.

Prakarya hendaknya menggunakan bahan-bahan setempat dan sumber daya di luar sekolah (termasuk internet). Prakarya bukan saja memberikan siswa pengalaman dalam berkarya melainkan juga memiliki nilai-nilai pribadi dan sosial seperti kepercayaan diri, kreativitas dan kerjasama.

Kesenian yang perlu ditekankan adalah teater, visual (melukis, mematung), tari dan musik. Tujuannya adalah untuk mendorong kesadaran estetika dan pribadi serta kemampuan untuk menampilkan diri dalam berbagai bentuk. Dalam pengajarannya hendaknya dihindari hal-hal yang bersifat instruktif, melainkan dengan cara-cara interaktif.

Pendidikan jasmani hendaknya diajarkan pada semua kelas, untuk selalu membiasakan generasi muda berolah raga. Program pemberian makan siang hendaknya diberikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya agar siswa tetap bugar dan sehat.

Perdamaian merupakan prasyarat untuk suatu bangsa bisa membangun. Karenaitupelajaran perdamaian perlu diberikan, disamping pelajaran kewarganegaraan (*civic*). Pendekatan dengan memberikan nilai-nilai komprehensif perlu dilakukan, bahwa perdamaian bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang multi kompleks dan dengan sadar dibangun. Murid perlu diperkenalkan dengan budaya demokratis dan keadilan sejak dini.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah pentingnya berbagai opsi yang sifatnya fleksibel (tidak kaku) dalam penjurusan siswa di Sekolah Menengah Atas (Kelas 11-12), perlu dihindari kecenderungan siswa hanya terpaku pada satu stream saja (misalnya pembagian IPA-IPS-Bahasa yang kaku).

Keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akuntabilitasnya. Sekolah hendaknya mengajak masyarakat sekitar, kalangan industri dan pemerintahan untuk memberikan masukan dan terlibat secara aktif dan terbuka.

Perencanaan akademik dan kepemimpinan di sekolah merupakan faktor kunci untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Upaya pelatihan dan pencarian bakat tenaga-tenaga terbaik untuk menjadi pimpinan di suatu sekolah sangat esensial untuk dilakukan.

Reformasi dalam bidang ujian hendaknya terus dilakukan untuk menghindari tipologi soal ujian yang lebih menekankan untuk hapalan, melainkan untuk meningkatkan penalaran dan kreativitas.

Strategi yang memungkinkan siswa untuk memilih tingkat keberhasilan perlu dilakukan, untuk menghindari sistem yang berlaku sekarang yang hanya bersifat umum mengkategorikan siswa sebagai “lulus” atau “gagal”.

5.3. Kurikulum Pendidikan Dasar

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pendidikan dasar di India dimulai dari Kelas 1 hingga kelas 8.

Kurikulumnya adalah sebagai berikut:

1. Kelas 1 dan 2
 - Bahasa (bahasa Ibu/ bahasa setempat)
 - Matematika
 - Seni hidup produktif dan sehat
2. Kelas 3 hingga 5
 - Bahasa (bahasa Ibu/ bahasa setempat)
 - Matematika
 - Studi lingkungan
 - Seni hidup produktif dan sehat
3. Kelas 6 hingga 8
 - Bahasa (Bahasa ibu/bahasa setempat, Hindi dan Inggris)
 - Matematika
 - Sains dan Teknologi
 - Ilmu Sosial
 - Pendidikan Ketrampilan
 - Pendidikan Kesenian
 - Pendidikan Kesehatan Jasmani

5.4. Kurikulum Pendidikan Menengah

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pendidikan menengah (secondary education) di India dimulai dari Kelas 9 hingga 12.

1. Kelas 9 – 10
 - Bahasa (bahasa ibu/bahasa setempat, Hindi, Inggris) (beberapa sekolah memberikan tambahan seperti bahasa Jepang, Arab, Jerman)
 - Matematika (konsep aritmatika, sistem bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, statistik, pengukuran, geometri grafik dan koordinat)
 - Sains dan Teknologi (zat, energi, kehidupan dunia, sumber daya alam, lingkungan dan alam raya)
 - Ilmu sosial
 - Pendidikan ketrampilan
 - Pendidikan kesenian
 - Pendidikan Kesehatan Jasmani

2. Kelas 11-12

Berdasarkan hasil ujian kelas 10, maka siswa akan masuk kelas 11 dan langsung dilakukan penjurusan yaitu sains, bisnis dan humaniora. Murid dengan penjurusan sains akan belajar matematika, fisika dan kimia. Pelajaran tambahan adalah biologi bagi yang akan mengambil jurusan kedokteran saat nanti kuliah; dan sains komputer untuk yang akan masuk ke jurusan teknik. Untuk jurusan bisnis maka akan belajar ekonomi, akuntansi, matematika dan bisnis. Sedangkan untuk jurusan humaniora pelajarannya meliputi sejarah, geografi dan sains politik.

6

Kesimpulan

Kerjasama antara Indonesia dan India telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua Negara. Para pemimpin kedua Negara pun telah lama terjalin dengan baik. Apalagi sejak lama, jauh sebelum kedua Negara merdeka, telah lama terjalin hubungan budaya dan agama. Itu berarti, bahwa hubungan antar dua Negara tersebut memiliki ikatan yang erat dan mendalam.

Potensi-potensi kerjasama antar dua Negara tersebut, ditambah dengan eratnya hubungan batin yang mendalam, maka diharapkan mampu meningkatkan pula hubungan bidang pendidikan dan budaya. India memiliki institusi pendidikan yang mutunya diakui dunia, tetapi tetap menjaga agar biaya pendidikan tetap murah dan terjangkau. Karena itu, penulis yakin ada rahasia-rahasia yang perlu disingkap agar Negara kita dapat menyerap dan menerapkan hal-hal baik yang ada di India, dengan tetap mempertahankan ciri-ciri khas masing-masing Negara.

India dengan tantangan penduduknya yang lebih dari 1.2 milyar orang, menarik untuk dijadikan pelajaran dalam pengembangan pendidikannya. Tulisan ini telah memaparkan bagaimana pengembangan pendidikan di India, meliputi aspek kurikulum, pembiayaan pendidikan, sistem ujian dan pembinaan guru/dosen. Kita patut saling belajar untuk menemukan “best practice” yang mungkin cocok untuk diterapkan di tanah air.

DAFTAR REFERENSI

1., "India", Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/India>
2. R. Banerjee, V.P. Muley, "Engineering Education in India", Internal Report of Department of Energy Science and Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, December 16, 2008
3., Encyclopedia Britannica
4. <http://www.indiastudychannel.com/resources/155255-What-CCE-System.aspx>
5. <http://cbse.nic.in/>
6. <http://www.cisce.org/>
7. <http://edukasi.kompasiana.com/2013/06/05/evaluasi-menyeluruh-dan-berkelanjutan-cce-sebagai-alternatif-penilaian-peserta-didik-gambaran-sistem-evaluasi-pendidikan-di-india-562500.html>
8. D. Pulla Rao, "Role of Education in Economic Development", Abhijeet Publication, New Delhi, 2012
9., Proceeding International Conference on Globalization and Challenges of Education, NIEPA, 2003
10., Teacher Education, Department of School Education and Literacy, Ministry of HRD India, http://mhrd.gov.in/TE_ov
11., Teacher Education, Department of School Education and Literacy, Ministry of HRD India, <http://www.teindia.nic.in/Default.aspx>

12. G. R. Cheney, B.B. Ruzzi, K. Muralidharan, "A Profile of the Indian Education Systems", New Commission on the Skills of the American Workforce, November 2005
13. ... , "Voices of Teachers and Teacher Educators", Volume 1 Issue 2 May 2012
14. V. Ramachandran, M. Pal, S. Jain, S. Shekar, J. Sharma, "Teacher Motivation in India", Research Report The United Kingdom Department for International Development, April 2005
15. ... National Curriculum Framework 2005, NCERT, New Delhi, 2005
16. <http://www.indembassy.org.pe/english/mapsimages/mapsbig/1map-of-india-political.gif>
17. Vidyanatha Ayyar, R.V. Journal of Educational Planning and Administration, NIEPA, New Delhi, Vol. VII, No. 2, April 1993.
18. Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi (1999-2000).
19. Government of India (2000), India 2000-A Reference Annual, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
20. Dairy India (1997), Edited by P.R. Gupta, A -25, Priyadarshini Vihar, Delhi.
21. Handbook of Education and Allied Statistics, 1987.
22. National Accounts statistics published by C.S.O.
23. Budgeted Expenditure on Education published by D/O Secondary & Higher Education.

-oOo-

VII

Sistem Pendidikan di Inggris



Sumber foto kota London: The Telegraph

Oleh:
Prof. Dr. Ir. TA Fauzi Soelaiman, M.S.M.E.
Atase Pendidikan di London

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Inggris

Pendidikan formal di Inggris sudah dimulai sejak abad ke-5. Sekolah pertama yang beroperasi berdiri pada tahun 598 di Canterbury, England. Walaupun begitu, program wajib belajar baru diberlakukan pada tahun 1880. Pada saat itu, sekolah hanya diperuntukkan bagi anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun. Dalam perkembangannya, program wajib belajar berakhir di usia 18 tahun, sebagaimana yang ditetapkan di dalam *Education and Skills Act 2008* yang diberlakukan secara bertahap dari tahun 2013 hingga 2015.

Di dalam kurikulum program wajib belajar (jenjang pendidikan primer dan sekunder) yang ditangani oleh *Department for Education* (DfE), mata pelajaran dikelompokkan dengan istilah *key stage*. Terdapat empat *key stage*, yaitu *key stage* 1 dikhususkan bagi siswa berusia 5-7 tahun (kelas 1-2), *key stage* 2 dikhususkan bagi siswa berusia 7-11 tahun (kelas 3-6), *key stage* 3 dikhususkan bagi siswa berusia 11-14 tahun (kelas 7-9) dan *key stage* 4 dikhususkan bagi siswa berusia 14-16 tahun (kelas 10-11). Setelah *key stage* 4, siswa dihadapkan pada pilihan, salah satunya mengambil ujian *General Certificate Secondary Education* (GCSE), terutama bagi mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan. Pada jenjang pendidikan lanjutan, terdapat beragam kualifikasi yang dapat diambil, salah satunya *A-Levels*.

Proses perekrutan guru pada jenjang pendidikan primer dan sekunder dibawah oleh *National College for Teaching and Leadership*

(NCTL). Setiap guru harus mengantongi sertifikat *Qualified Teacher Status* (QTS) yang dikeluarkan oleh NCTL. Untuk mendapatkan sertifikat ini, para calon guru diwajibkan untuk mengikuti pelatihan *Initial Teaching Training* (ITT). Pada jenjang pendidikan lanjutan, para guru harus memiliki sertifikat *Qualified Teaching Learning and Skills* (QTLS) atau *Associate Teaching Learning* (ATL).

Ujian diadakan di akhir setiap *key stage* 1-3 oleh sekolah. Pendampingan dalam pelaksanaan ujian tetap diberikan oleh pemerintah melalui lembaga yang bernama *Standard and Testing Agency* (STA). Ujian-ujian yang diadakan di akhir *key stage* 4 (GCSE) dan di jenjang pendidikan lanjutan ditangani oleh *awarding bodies*. Setiap sekolah di Inggris diberikan kebebasan untuk memilih *awarding bodies*.

Untuk sekolah, evaluasi mutu dilakukan lembaga pemerintah non-kementerian yang bernama *Ofted* atau *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*. Lembaga ini tidak bertanggung jawab ke DfE, melainkan langsung ke parlemen.

Pendanaan pendidikan di UK diatur oleh *Education Funding Agency* (EFA) yang berada di bawah *Departement for Education* (DfE).

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	293
DAFTAR ISI	295
1. Pendidikan di Inggris	297
2. Kurikulum Nasional di Inggris	305
3. Penerimaan dan Pembinaan Guru	311
4. Sistem Ujian dan Kualifikasi Pendidikan di Inggris	325
5. Sistem Penjaminan Mutu	343
6. Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan	349
LAMPIRAN	353
DAFTAR REFERENSI	357

1

Pendidikan di Inggris

Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris (selanjutnya disebut Inggris) sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris *Anglo-Saxon*. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di Inggris adalah sebuah *grammar school* yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, England (1–3).

Salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan di Inggris adalah pertama kalinya program wajib belajar diberlakukan, yaitu pada tahun 1880. Wajib belajar diberlakukan saat itu hanya untuk anak berusia 5 sampai dengan 10 tahun. Batas akhir usia wajib belajar kemudian bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 tahun pada tahun 1918. Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali masing-masing meningkat menjadi 15 dan 16 tahun. Dengan diberlakukannya undang-undang *Education and Skills Act 2008*, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, batas akhir usia wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi 18 tahun (4, 5).

1.1 Pendahuluan

Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan empat negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing: Pemerintah Inggris bertanggung jawab atas England,

selanjutnya Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan negara masing-masing. Peta administratif Inggris secara demografi ditunjukkan pada Gambar 3.

Buku ini menyajikan informasi sistem pendidikan di Inggris, utamanya membahas sistem pendidikan di England. Sedangkan untuk sistem pendidikan di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara disajikan sebagai informasi tambahan atau pembandingan. Hal ini didukung oleh sebaran demografi penduduk empat negara tersebut dengan mayoritas jumlah penduduk berada di England sebanyak 52 juta jiwa (83,8%) dari total 62 juta jiwa populasi Inggris (2010). Populasi Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara masing-masing berjumlah sekitar lima juta (8,4%), tiga juta (4,8%) dan dua juta jiwa (3%) (6).



Gambar 3. Peta Administratif Inggris (7)

1.2 Struktur Dasar Sistem Pendidikan di Inggris

Pada sub bab ini dijelaskan secara singkat mengenai sistem pendidikan di Inggris yang umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang

berdasarkan umur (lihat Tabel 2):

- (1) Pendidikan pra-primer (*pre-primary education*), usia 3-4 tahun
- (2) Pendidikan primer (*primary education*), usia 4-11 tahun
- (3) Pendidikan sekunder (*secondary education*), usia 11-16 tahun
- (4) Pendidikan lanjutan (*further education*), usia 16-18 tahun
- (5) Pendidikan tinggi (*higher education*), usia di atas 18 tahun

Pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer saat anak-anak menginjak usia 5 tahun dan berakhir sampai dengan usia 16 tahun. Batas akhir usia wajib belajar ini akan berubah secara bertahap mulai tahun 2013 menjadi 18 tahun pada tahun 2015 (4). Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidikan sekunder (usia 16 tahun), lalu mengambil ujian *General Certificate of Secondary Education* (GCSE), untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan (*further education*) selama 2 tahun. Umumnya setelah mendapatkan nilai GCSE siswa di Inggris mengambil kualifikasi AS (*Advanced Subsidiary*) level yang kemudian dilanjutkan dengan A-Level, yang dapat diambil di sekolah yang sama, *sixth form college* atau *further education college*. A-Level biasanya dipakai sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke universitas. Selain A-Level terdapat beberapa pilihan lain seperti kualifikasi *Business and Technology Education Council* (BTEC), *International Baccalaureate* (IB), *Cambridge Pre-U* dan sebagainya, termasuk pilihan melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi kejuruan (4).

Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih cepat mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan (*vocational*), sebagai contoh, pendidikan untuk mendapatkan sertifikat *National Vocational Qualification* (NVQ). Pemegang kualifikasi pendidikan kejuruan NVQ tetap mempunyai peluang untuk dapat meneruskan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi atau universitas, setelah memenuhi beberapa ketentuan akademis (8).

1.3 Tipe Sekolah di Inggris

Laporan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 91% siswa angkatan sekolah di England terdaftar di sekolah-sekolah yang pembiayaannya mendapat bantuan pemerintah dan sisanya berada di sekolah-sekolah

swasta. Angka tersebut diikuti di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, yang masing-masing menunjukkan 95, 97 dan 98% (3).

Terdapat dua tipe sekolah di Inggris berdasarkan sumber pembiayaannya, yaitu: (1) sekolah yang dibiayai pemerintah (*publicly-funded schools*) atau '*state school*' dan (2) sekolah swasta (*non grant-aided schools*) atau '*private school*' atau '*independent school*'. Sekolah yang dibiayai pemerintah (*state schools*) dibagi menjadi yang tergolong umum (*maintained schools*), yang dibiayai melalui pemerintah daerah (*local authority*) dan yang tergolong khusus. Selain itu, ada juga sekolah-sekolah khusus, seperti *University Technical College* (UTC) dan *Sixth-form colleges*. Tahun 2011, pemerintah Inggris memperkenalkan sistem baru yang dinamakan *free school* (9, 10).

1.3.1 State School

Berikut sekolah-sekolah state school yang tergolong umum (9):

1. *Community dan Community Special Schools*

Sekolah jenis ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk aktivitas perekrutan staf, pemilikan tanah dan gedung serta dalam menentukan persyaratan masuk jika terdapat lebih banyak peminat dibandingkan kursi yang tersedia.

Community school terbuka untuk umum. Lain halnya dengan *community special school* yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus (*special education needs*).

Terdapat 11.659 *Community School* yang tercatat per 1 Januari 2011 dan 925 *Community Special School* yang tercatat per 15 Juli 2011 (11).

2. *Foundation, Foundation Special, dan Trust Schools*

Foundation school dikelola oleh suatu dewan pengurus yang dapat mempekerjakan karyawan dan dapat menentukan persyaratan masuk sekolah. Tanah dan bangunan biasanya dimiliki oleh dewan pengurus atau yayasan nirlaba.

Foundation special school merupakan *foundation school* bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti halnya *community special school*.

Trust school merupakan suatu jenis *foundation school* namun

memiliki ikatan kerjasama nirlaba dengan badan lain, beberapa dengan badan yang berlandaskan agama sehingga tergolong '*faith' school*.

Terdapat 1.297 *foundation school* yang tercatat per 1 Januari 2011 dan 45 *foundation special school* yang tercatat per 15 Juli 2011 (12).

3. *Voluntary-Aided (VA) School*

Sekolah yang masuk tipe ini biasanya sekolah yang berlandaskan agama atau '*faith' school*. Siapa saja dapat mengirimkan aplikasi untuk masuk sekolah jenis ini. Gedung sekolah dan tanah umumnya dimiliki oleh lembaga nirlaba, seringkali organisasi berlatar belakang keagamaan. Dewan pengurus dibebankan biaya pengelolaan gedung dan pemeliharannya. Terdapat 4.221 *VA school* yang tercatat 1 Januari 2011 (13).

4. *Voluntary-Controlled (VC) School*

Jenis sekolah ini mirip dengan *voluntary-aided school*, hanya saja dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Perekrutan staf dan kriteria persyaratan masuk juga diatur oleh pemerintah daerah setempat. Terdapat 2.606 *VC school* yang tercatat per 1 Januari 2013 (14).

5. *Grammar School*

Sekolah tipe ini memilih semua atau mayoritas siswanya berdasarkan kemampuan akademis yang dimiliki calon siswa. Beberapa sekolah mengadakan tes untuk menyeleksi calon siswa. Sekolah jenis ini dikelola oleh pemerintah daerah bersama badan lain.

Tercatat sejak tahun 1998, terdapat 164 *grammar school*. Per 1 Juli 2011, jumlah ini berkurang karena 75 sekolah mengkonversikan diri menjadi akademi (15).

Tabel 2. Sistem pendidikan di Inggris berdasarkan kelompok usia (8, 16)

Usia	England dan Wales			Irlandia Utara			Skotlandia		
3	Nursery	Non-compulsory		Nursery	Non-compulsory		Nursery	Non-compulsory	
4-5	Reception	Foundation Stage		Year 1	Foundation Stage		Nursery	Non-compulsory	
5-6	Year 1	Key Stage 1		Year 2	Key Stage 1		P1	Primary Education	
6-7	Year 2			Year 3			P2		
7-8	Year 3	Key Stage 2		Year 4	Key Stage 2		P3		
8-9	Year 4			Year 5			P4		
9-10	Year 5			Year 6			P5		
10-11	Year 6			Year 7			P6		
11-12	Year 7	Key Stage 3		Year 8	Key Stage 3		P7	Secondary Education / SCE Standard Grade	
12-13	Year 8			Year 9			S1		
13-14	Year 9			Year 10			S2		
14-15	Year 10	Key Stage 4 / GCSE		Year 11	Key Stage 4 / GCSE		S3		
15-16	Year 11			Year 12			S4		
Akhir usia wajib belajar ³ (akan berubah mulai 2013 (4))									
16-17	Year 12	Sixth Form / A-Level, BTEC, Cambridge Pre-U, IB, dsb.		Year 13	Sixth Form / A-Level, BTEC, Cambridge Pre-U, IB, dsb.		S5	Further Education / SCE Higher Grade	
17-18	Year 13			Year 14			S6		
18+	Higher Education								

Berikut sekolah-sekolah *state school* yang tergolong khusus (9):

1. *Maintained Nursery School*

Sekolah jenis ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 3-5 tahun. Tanggung jawab pengelolaan ada pada pemerintah daerah. Terdapat 423 *maintained nurseries* yang tercatat per 1 Januari 2011 (17).

2. *Academies*

Sekolah yang termasuk jenis ini dikelola secara independen dan menyediakan pendidikan yang berkualitas '*first class*'. Sekolah didirikan berdasarkan kerjasama berbagai pihak termasuk di dalamnya pemerintah, pihak swasta, kelompok sukarelawan dan organisasi berlandaskan agama. Baik tanah maupun gedung dibeli secara patungan, namun pemerintah menyediakan biaya pemeliharaan. Pendanaan sekolah ini dikelola oleh *Education Funding Agency* (EFA). Sekolah-sekolah lain yang dinilai telah menunjukkan performa yang bagus dapat dikonversi ke sekolah jenis ini. Terdapat 3.049 akademi di Inggris yang tercatat per 1 Juli 2013 (18).

1.3.2 *Private School*

Private school atau sekolah independen memiliki kebebasan menentukan kurikulum dan persyaratan masuk. Paling tidak terdapat 2.300 sekolah independen di Inggris. Sekolah ini dibiayai oleh uang masuk yang dibayar orang tua murid (9).

1.3.3 *University Technical Colleges (UTC)*

Tipe sekolah serupa *free school* juga dikenalkan untuk tingkat lanjutan yang disponsori oleh universitas dan dinamakan *University Technical Colleges* (UTC). UTC didanai dan dikelola seperti *free school* namun manajemennya harus dipimpin oleh universitas. UTC diperuntukkan bagi siswa usia 14 sampai dengan 19 tahun. Dari 79 sekolah yang sudah dan akan dibuka bulan September 2012, terdapat 13 sekolah yang tergolong UTC (19).

1.3.4 *Sixth-form Colleges*

Terdapat sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan khusus untuk tingkat lanjutan, seperti sekolah-sekolah yang berjenis ini. Sekolah jenis ini menerima mereka yang berusia 16-19 tahun dan pengelolaannya bersifat independen. Beberapa kualifikasi pendidikan tingkat lanjutan yang ditawarkan sekolah jenis ini, antara lain *A-level*, *International Baccalaureata Diploma*, dan GCSE. Terdapat 94 *sixth-form colleges* di Inggris per Oktober 2012 (20).

1.3.5 *Free School*

Free school pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010. Sekolah ini tetap didanai oleh pemerintah namun tidak dikelola oleh pemerintah daerah seperti umumnya *state school*. Sekolah dapat didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu misalnya orang tua murid, guru, yayasan nirlaba, universitas, kelompok agama dan lain-lain yang disetujui pendanaannya oleh pemerintah. Sekolah ini didirikan bukan untuk tujuan profit dan dalam penerimaan siswanya tidak boleh bersifat selektif. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan sekolah seperti ini dapat menyaingi atau mengungguli sekolah-sekolah swasta yang memiliki kebebasan dalam pengelolaannya yang selama ini hanya dapat ditempuh kalangan berada. Perencanaan kurikulumnya diatur oleh kepala sekolah, termasuk gaji guru sampai dengan kalender akademik sekolah (10).

Pada bulan September 2011 telah dibuka sekolah pertama jenis ini di England, kemudian berkembang menjadi 24 sekolah dan pada bulan September 2012, pemerintah Inggris mengumumkan akan ada tambahan 55 sekolah baru yang berdiri. Lebih lanjut, Departemen Pendidikan Inggris telah menyetujui pembukaan 114 sekolah lainnya pada tahun ajaran 2013.

2

Kurikulum Nasional di Inggris

Terdapat dua jenjang pendidikan yang diatur di dalam Kurikulum Nasional untuk England (*National Curriculum*), yaitu: Pendidikan Pra-Primer dan Pendidikan Primer dan Sekunder. *Education Act 2002 Chapter 32* adalah undang-undang yang mendasari pengaturan ini. Di dalam undang-undang ini, Kurikulum Nasional untuk Wales pun juga diatur, tepatnya di Part 7 (21). Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada keberadaan mata pelajaran Bahasa *Welsh* di dalam Kurikulum Nasional untuk Wales.

Tidak terdapat kurikulum yang baku untuk Pendidikan Lanjutan. Hal ini dikarenakan beragamnya kualifikasi yang ada di jenjang pendidikan pasca 16 tahun. Setiap kualifikasi memiliki kurikulumnya masing-masing. Siswa pada tahap ini sudah dianggap cukup dewasa untuk memilih. Beberapa kualifikasi yang ada menawarkan pelatihan keterampilan praktis sehingga dapat langsung bekerja selepas itu. Beberapa menawarkan persiapan sebelum masuk ke universitas dan lain lain.

2.1 Pendidikan Pra-Primer

Berdasarkan undang-undang, pendidikan pra-primer adalah pendidikan untuk anak-anak yang belum memasuki usia wajib belajar (anak yang belum berusia 5 tahun). Pendidikan ini dapat disediakan di sekolah, misalnya di taman kanak-kanak atau kelas *nursery* di sekolah dasar, atau di mana saja.

Untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, umumnya pendidikan disediakan oleh sektor swasta dan *voluntary*, dengan orang tua membayar biaya pendidikan dan tidak diwajibkan (*non-compulsory*). Untuk anak-anak berusia 3 dan 4 tahun terdapat pendidikan gratis bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.

Berdasarkan undang-undang yang diatur *Childcare Act 2006*, saat ini telah diberlakukan sistem *Early Years Foundation Stage* (EYFS). EYFS ditujukan untuk bayi sejak lahir hingga usia 5 tahun. Terdapat enam bidang pembelajaran dan pengembangan, yaitu: pengembangan pribadi, sosial, dan emosi; komunikasi, bahasa dan melek huruf; pemecahan masalah, reasoning dan angka; pengetahuan umum dan pemahaman terhadap dunia; olah raga; dan pengembangan kreatifitas (3). Tahap paling awal pendidikan di jenjang ini diberikan secara paruh waktu, sampai dengan 12 jam seminggu. Kurikulum perkembangan anak, atau disebut *foundation stage* di dalam Kurikulum Nasional sejak diberlakukannya *Education Act 2002*, disusun dalam beberapa bidang pembelajaran, seperti (8, 22):

1. Pengembangan Pribadi, Sosial dan Emosi
2. Komunikasi, Bahasa dan Melek Huruf
3. Perkembangan Matematika
4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Dunia
5. Olahraga atau Perkembangan Fisik
6. Pengembangan Kreatifitas

2.2 Pendidikan Primer dan Sekunder

Terdapat dua tahap pendidikan primer dan sekunder yang termasuk program paket wajib belajar:

1. Pendidikan Primer (usia 5-11 tahun), dan
2. Pendidikan Sekunder (usia 11-16 tahun).

Umumnya siswa melanjutkan dari sekolah primer ke sekolah sekunder di usia 11 tahun. Namun, ada beberapa daerah di Inggris menggunakan 3 jenjang (*3-tier*) dan menyediakan sekolah menengah

(*middle schools*) untuk siswa usia 8 atau 9 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Banyak dari sekolah sekunder setelah menyelesaikan tahap pendidikan wajib belajar juga menyediakan pendidikan tingkat lanjutan untuk siswa usia 16 sampai 18 tahun (3).

Penerimaan siswa baru sekolah-sekolah primer atau sekunder yang dibiayai pemerintah, tidak dipungut bayaran. Orang tua siswa dapat mengirimkan aplikasi untuk sekolah anaknya di mana saja. Proses penerimaan siswa diatur oleh pemerintah melalui peraturan khusus yaitu *Schools Admissions Code* dan *Schools Admission Appeals Code*. Semua sekolah yang dibiayai oleh pemerintah dan memiliki bangku kosong harus menerima aplikasi siswa tanpa syarat. Kebijakan penerimaan siswa jika jumlah bangku tidak mencukupi ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah (tergantung dasar hukum sekolah bersangkutan) (3).

Sekolah harus buka selama 190 hari dalam satu tahun. Pengajar wajib berada di sekolah 5 hari lebih lama untuk tujuan kegiatan di luar waktu mengajar, seperti misalnya pengembangan profesi. Jangka waktu dan hari libur ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah, tergantung dari dasar hukum sekolah bersangkutan. Tahun ajaran baru biasanya dimulai awal September dan diakhiri bulan Juli tahun berikutnya. Sekolah umumnya beroperasi lima hari seminggu (Senin sampai Jum'at).

Waktu pengajaran minimum dalam satu minggu:

5-7 tahun	7-11 tahun	11-14 tahun	14-16 tahun
21 jam	23,5 jam	24 jam	25 jam

Jumlah siswa di sekolah primer dalam satu kelas kelompok usia 5-7 tahun dibatasi 30 siswa. Siswa umumnya dikelompokkan dengan kemampuan beragam, meskipun banyak pengajar yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. Di sekolah primer siswa umumnya diajar oleh pengajar umum, sedangkan di sekolah sekunder diajar oleh pengajar spesialis (3).

Di Inggris, peran pengembangan kurikulum wajib belajar berada di tangan Departemen Pendidikan (DfE) (3). Tabel 3 dan Tabel 4 adalah

Kurikulum Nasional 2014 yang efektif berlaku dari September 2014 di sekolah-sekolah negeri di England.

Tabel 3. Kurikulum Nasional 2014 untuk pendidikan primer dan sekunder di England (23)

	Key Stage 1	Key Stage 2	Key Stage 3	Key Stage 4
Umur (tahun)	5-7	7-11	11-14	14-16
Kelas	1-2	3-6	7-9	10-11
Mata pelajaran wajib:				
Bahasa Inggris	Y	Y	Y	Y
Matematika	Y	Y	Y	Y
Sains	Y	Y	Y	Y
Mata pelajaran pilihan:				
Seni dan Desain	Y	Y	Y	
Kewarganegaraan			Y	Y
Pemrograman	Y	Y	Y	Y
Desain Teknologi	Y	Y	Y	
Bahasa		Y	Y	
Geografi	Y	Y	Y	
Sejarah	Y	Y	Y	
Musik	Y	Y	Y	Y
Olahraga	Y	Y	Y	Y

Tabel 4. Mata pelajaran khusus yang harus diajarkan oleh sekolah, selain mata pelajaran wajib dan pilihan

	Key Stage 1	Key Stage 2	Key Stage 3	Key Stage 4
Umur (tahun)	5-7	7-11	11-14	14-16
Kelas	1-2	3-6	7-9	10-11
Pendidikan Agama	Y	Y	Y	Y
Pendidikan Seks dan Hubungan Antar Manusia			Y	Y

Untuk dapat bersaing secara global, beberapa mata pelajaran yang mendapatkan perhatian di dalam kurikulum ini adalah Matematika, Bahasa Inggris, Pemrograman dan Bahasa Asing (24). Sebagai contoh, mata pelajaran Matematika yang mencoba untuk mengenalkan materi-

materi seperti fraksi, bilangan desimal, bilangan negatif dan tabel pengalian 12x12, di usia yang lebih dini. Lainnya adalah penggantian mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mata pelajaran Pemrograman yang lebih menekankan pada kemampuan programming yang praktis. Selain itu, mata pelajaran ini diberikan sejak Key Stage 1.

2.3 Pendidikan Tingkat Lanjutan

Terdapat beberapa pilihan sekolah di tingkat ini, antara lain: melanjutkan di sekolah yang sama, melanjutkan pendidikan ke *sixth form college*, *further education college*, atau *tertiary college*.

Beberapa jenis sekolah tersebut memiliki perbedaan penekanan materi antara pendidikan akademik/umum dan pendidikan kejuruan. Umumnya siswa yang ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau universitas memilih melanjutkan di sekolah yang sama (*Year 12*) atau melanjutkan ke *sixth form college*. Kriteria penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan ini ditentukan oleh sekolah atau *college* masing-masing. Biaya pendidikan gratis diberikan bagi siswa sampai dengan usia 19 tahun.

Tidak ada kurikulum wajib di jenjang pendidikan tingkat lanjutan ini. Siswa dapat memilih berbagai mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan tingkat lanjutan berdasarkan kualifikasi yang mereka inginkan. Pengajar diberi kebebasan untuk memutuskan metode dan materi pengajaran yang dianggap sesuai (3).

3

Penerimaan dan Pembinaan Guru

Guru di England tidak tergolong pegawai negeri sipil (*civil servants*), namun direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jenis sekolahnya. Jumlah guru yang mengajar di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan akademi tertanggal November 2012 adalah sebanyak 442.000, terdapat kenaikan sebesar 2,6% dari November 2011. Jika digabung dengan jumlah tenaga pengajar lainnya seperti asisten guru, staf pendukung dan tambahan di sekolah, maka jumlahnya menjadi 899.000 dan ini tersebar di 24.328 sekolah (data per Januari 2013), mulai dari nursery hingga sekolah-sekolah jenjang pendidikan sekunder (25). Terdapat sebutan khusus untuk tenaga kerja di sekolah ini, yaitu FTE (*Full-Time Employee*) *school workforce* (26).

Mayoritas guru yang terdata, 96%, adalah *qualified teacher* dengan kualifikasi tingkat degree atau lebih tinggi (26). Untuk menjadi guru di England dan Wales, calon guru diwajibkan untuk memiliki sertifikat QTS atau *Qualified Teacher Status* yang diterbitkan oleh *The National College for Teaching and Leadership* (NCTL), sebuah lembaga eksekutif DfE. Hal yang sama juga berlaku di Scotland, dengan sertifikat *Teaching Qualification* (TQ), dan Irlandia Utara (27). Hanya saja lembaga yang menerbitkan sertifikatnya berbeda. Sertifikat ini didapatkan setelah mengikuti *Initial Teacher Training* atau ITT yang diadakan juga oleh NCTL. Di Scotland dan Irlandia Utara, pelatihan serupa dinamakan *Initial Teacher Education* atau ITE.

3.1 Persyaratan Mengajar di Jenjang Pendidikan Primer dan Sekunder

Untuk mengajar di sekolah pemerintah, guru diwajibkan memiliki sertifikasi QTS yang didapatkan setelah mengikuti ITT dan ujian. Selain itu, ada beberapa persyaratan dasar terkait riwayat pendidikan calon guru (lihat Tabel 5) Khusus bagi para pemegang gelar sarjana, persyaratan dasar yang dibutuhkan hanya *Pass*. Namun, akhir-akhir terdapat penekanan pada penghargaan (*award*) dari gelar sarjana yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi indikator kesuksesan saat mengikuti ITT dan perekrutan untuk profesi mengajar. Data statistik yang bersumber dari *Training and Development Agency for Schools (TDA)* memperlihatkan sebaran calon guru yang mendapatkan dan tidak mendapatkan QTS serta tingkat perekrutan *postgraduate secondary trained* untuk *postgraduate* berdasarkan penghargaan gelar sarjana yang dimiliki, lihat Tabel 6 dan 7 yang menunjukkan data statistik peserta ITT yang mendapatkan dan tidak mendapatkan QTS serta tingkat keterserapan pasca ITT berdasarkan *award* yang dimiliki. Data ini diambil di antara rentang waktu tahun ajaran 1998/1999 hingga 2009/2010.

Tabel 5. Persyaratan dasar untuk mengajar di sekolah pemerintah di England dan Wales (28)

Kualifikasi	Nilai yang dibutuhkan
GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran Bahasa Inggris	C
GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran Matematika	C
GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran sains, jika ingin mengajar di jenjang pendidikan primer atau <i>Key Stages 2/3</i>	C
Gelar Sarjana UK, jika ingin mengambil <i>postgraduate teacher training course</i>	<i>Pass</i>

Tabel 6. Pemegang gelar sarjana dalam peraihian QTS (29)

<i>Award</i>	Mendapatkan QTS	Tidak Mendapatkan QTS	Total
1 st	10.741	1.290	12.031
	89%	11%	100%
2:1	64.268	7.545	71.813
	89%	11%	100%
2:2	42.149	7.434	49.583
	85%	15%	100%
3 rd	4.927	1.441	6.368
	77%	23%	100%

Sekilas Mengenai ITT

ITT tersedia di pusat-pusat pelatihan, di sekolah atau universitas, yang ditunjuk dan dibiayai oleh NCTL. Oleh karena itu, lembaga ini berhak untuk melakukan pemantauan dan audit, serta akreditasi terhadap pusat-pusat pelatihan penyedia ITT. Terkait akreditasi, NCTL berhak menarik akreditasi dari penyedia ITT jika dianggap tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh *Secretary of State for Education* (30).

Informasi mengenai penyedia ITT dapat dilihat situs web milik NCTL (<http://dataprovision.education.gov.uk>), khusus untuk menampilkan data-data, seperti distribusi peserta pelatihan tingkat pendidikan primer dan sekunder, peserta pelatihan yang berhasil dan tidak berhasil mendapatkan QTS dan lainnya, dari penyedia ITT.

Tabel 7. Tingkat perekrutan *postgraduate secondary trained* yang tengah berada di dalam masa percobaan (*Newly Qualified Teachers* atau NQTs) (29)

Tahun pertama selepas ITT	1 st	2:1	2:2	3 rd
	81%	81%	75%	73%

Di Skotlandia, terdapat 9 universitas yang menyediakan ITT (31). Di Irlandia Utara, terdapat 5 universitas (32). Di Wales, penyedia ITT dibagi ke dalam tiga pusat, yaitu: Tenggara Wales, Barat Daya Wales dan Utara dan Tengah Wales (33). Universitas Terbuka Wales juga menyediakan ITT, namun tidak termasuk ke dalam pusat tersebut.

Variasi Cara dan Rute ITT

Terdapat beragam cara dan rute yang tersedia untuk mengikuti ITT. Berikut adalah pembagian cara berdasarkan waktu pengambilan pelatihannya (34):

- Secara beruntun (*consecutive*)

Pelatihan ini ditujukan bagi guru yang sudah bergelar sarjana. Pelatihan profesi ini bertujuan untuk mendapatkan dua sertifikat, yaitu:

- > Secara akademik yaitu *Professional Graduate/Postgraduate Certificate in Education* (PCGE)
- > Secara profesional yaitu *Qualified Teacher Status* atau QTS

Biasanya secara tradisi, program pelatihan tipe ini mempersiapkan guru di tingkat sekunder. Untuk dapat menjadi pengajar di tingkat sekunder, gelar yang dimiliki harus memiliki relevansi dengan subjek yang akan diajar. Misalnya, seorang calon guru memiliki gelar di bidang kimia, maka mata pelajaran yang harus diajar adalah kimia. Penyedia pelatihan akan melihat apakah pengetahuan yang dimiliki sudah cukup mumpuni, walaupun dinilai sudah kualitas yang pas untuk menjadi seorang guru. Jika belum, maka penyedia akan menyarankan untuk mengambil kursus yang bernama *Subject Knowledge Enhancement* atau (SKE) (35). Beberapa subjek yang disediakan, antara lain: Kimia, Matematika, Bahasa Asing Modern dan Fisika.

Pemegang sertifikat QTS diperbolehkan untuk mengambil SKE, jika dirasa membutuhkan. Ini disebut *Post-ITT SKE Courses*. Dikhususkan untuk para guru yang masih aktif mengajar dan kembali mengajar (*returning teachers*). Subjek yang disediakan hanya Matematika, Kimia, Fisika dan Bahasa Asing Modern. Jumlah penyedia kursus ini tidak sebanyak yang menyediakan ITT (36).

- Secara bersamaan (*concurrent*)

Pelatihan ini merupakan pendidikan yang melibatkan program studi tiga atau empat tahun dengan pemberian gelar sarjana dan sertifikasi QTS. Umumnya program yang menggunakan sistem ini ditujukan bagi mereka yang ingin menjadi guru pendidikan di tingkat primer. Namun, ada juga yang ditujukan bagi calon guru

spesialis di tingkat sekunder. Dalam hal ini siswa dapat memperoleh gelar seperti BA atau BSc ditambah dengan sertifikasi QTS.

Pembagian lainnya adalah berdasarkan basis pengambilan pelatihannya. Berikut beberapa diantaranya (37):

- Basis sekolah, seperti SCITT dan Program Pelatihan *School Direct* (yang tidak bergaji dan bergaji). Berikut penjelasan masing program,
 - > SCITT

Memberikan pengalaman kepada calon guru dengan terlibat aktif mengajar di sekolah yang ditetapkan oleh konsorsium antara sekolah dan universitas yang menyediakan pelatihan ini. Calon guru tetap dibekali melalui pembelajaran di kelas-kelas, hanya saja porsi waktu terbesar adalah mengajar di sekolah (38).

Biasanya, pelatihan ini membutuhkan waktu satu tahun. Mengikuti tahun ajaran sekolah, dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni. Di beberapa tempat, pelatihan dimulai lebih awal seperti the National SCITT di *Outstanding Primary School* yang mulai pada bulan Agustus.

Pendaftaran untuk SCITT dapat dilakukan melalui *Graduate Teaching Training Registry* atau GTTR. Namun, beberapa konsorsium penyedia pelatihan ini mengharuskan calon guru untuk melakukan pendaftaran langsung. Selain mendapatkan sertifikat QTS, beberapa konsorsium dapat memberikan gelar PGCE yang diakui oleh institusi perguruan tinggi (39).

- > *School Direct*

Melalui pelatihan ini, pihak sekolah memiliki pengaruh untuk menentukan spesifikasi calon guru yang melakukan pelatihan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Sekolah secara independen memilih penyedia ITT. Daftar dari penyedia ITT yang terakreditasi tersedia di situs web Ofsted. Penilaian-penilaian seperti seberapa baik proses rekrutmen dan seleksi, kualitas pengawasan dari kerjasama untuk selalu memberikan yang terbaik, dan sebagainya, terdokumentasi, sehingga, pihak sekolah dapat memilih penyedia ITT yang dibutuhkan (40, 41).

Sekolah-sekolah yang tertarik untuk bergabung di pelatihan ini diwajibkan untuk membuat permintaan tempat ke NCTL. Sekolah-sekolah ini harus terlebih dahulu terdaftar sebagai lead school, artinya sekolah tersebut tidak termasuk ke dalam konsorsium penyedia ITT. Selanjutnya, NCTL yang akan mendistribusikan peserta pelatihan ITT ke sekolah-sekolah yang sudah membuat permintaan.

Terdapat dua tipe tempat yang dapat diajukan oleh pihak sekolah, yaitu (42):

> > *School Direct Training Programme (tuition fee)*

Para calon guru yang ditempatkan di sekolah adalah yang pendanaan didapat dari pinjaman untuk biaya sekolah, training bursaries dan beasiswa. Terkait pendanaan akan dibahas selanjutnya di bagian ini.

> > *School Direct Training Programme (salaried)*

Para calon guru yang ditempatkan dipekerjakan oleh sekolah sebagai *unqualified teacher*. Karena dipekerjakan, maka mereka berhak untuk digaji. NCTL menyediakan pendanaan kepada sekolah untuk menutupi biaya pelatihan dan mensubsidi gaji. Terdapat tambahan waktu untuk pengalaman kerja selama 3 tahun atau lebih bagi para calon guru.

> *Teach First*

Adalah sebuah organisasi pendidikan dan tidak berada dalam lingkup DfE, dengan kata lain independen. Organisasi ini juga menyediakan sebuah program bernama *Leadership Development Programme* (43). Program ini serupa dengan *School Direct*, dimana para calon guru tidak hanya menerima pelatihan, namun juga dipekerjakan di sekolah terkait. Program yang ditawarkan berdurasi 2 tahun. Di akhir program, para calon guru mendapat sertifikasi PGCE.

Teach First menempatkan para calon guru di daerah-daerah di England dan Wales. Para calon guru yang disaring untuk program ini adalah para top graduates dari universitas-

universitas yang tergabung dalam *Russels Group*. Beberapa kriterianya, antara lain (43):

- >> Gelar dengan penghargaan 2:1 atau lebih tinggi, 300 untuk poin UCAS
- >> Nilai GCSE C untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika (Nilai C di salah satu mata pelajaran sains dibutuhkan untuk mengajar di jenjang pendidikan primer)
- >> Berkomitmen untuk menjalankan program *Leadership Development Programme*.

Selengkapnya terkait program ini tersedia di situs webnya, <http://graduates.teachfirst.org.uk/>.

- Basis universitas, dengan mengambil program sarjana dan pascasarjana (seperti yang dijelaskan pada pembagian sebelumnya). Di dalamnya terdapat beberapa waktu yang digunakan untuk melakukan praktek mengajar di sekolah. Berikut skema waktunya,
 - > 160 & 120 hari untuk program sarjana yang diselesaikan dalam 4 tahun dan 2 atau 3 tahun
 - > 120 hari untuk *graduate trainees* yang mengajar di tingkat sekunder
 - > 90 hari untuk *graduate trainees* yang mengajar di tingkat primer
- Basis kursus online, seperti yang disediakan oleh Universitas Terbuka England (*the Open University*) dan Hibernia College UK.

Di dalam proses aplikasi untuk ITT terdapat proses wawancara yang akan melihat:

- Kepribadian
- Pengalaman bekerja dengan anak-anak muda
- Komitmen dan antusiasme untuk mengajar subjek yang menjadi spesialisasi dari calon guru, serta mampu berbahasa Inggris secara jelas dan akurat
- Keterampilan serta pengetahuan yang relevan.

Umumnya, wawancara dilakukan dengan satu orang pewawancara atau panel dan biasanya akan ada ujian dan tugas yang harus diselesaikan sebelumnya. Selain itu, ada kemungkinan untuk berpartisipasi di dalam diskusi dan presentasi grup (44).

Bagi yang mendaftar untuk memulai ITT di bulan September 2013 diwajibkan untuk mengikuti ujian keterampilan (*skill tests*) terlebih dahulu yang terdiri dari ujian literasi dan numerasi (Bahasa Inggris dan Matematika). Beberapa hal terkait ujian-ujian ini (45):

- Ujian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keterampilan inti yang harus dimiliki seorang guru, terutama pada bidang Bahasa Inggris dan Matematika (46, 47). Ini berlaku bagi calon guru dari semua latar belakang pendidikan dan spesialisasi.
- Tidak menggantikan persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan, yaitu GCSE dengan nilai C atau yang setara (lihat Tabel 12).
- Semua pertanyaan di dalam ujian adalah refleksi dari hal-hal yang dihadapi seorang guru di sekolah.
- Terkomputerisasi dan dapat diambil di kurang lebih 150 pusat ujian di Inggris yang bernama *Pearson Professional Centres* atau PPCs. Pusat ini dikelola oleh *Pearson VUE* yang khusus bergerak di bidang penyedia jasa ujian untuk sertifikasi dan lisensi (<http://www9.pearsonvue.com/>).

Terdapat kesempatan untuk mengambil ujian ulang jika gagal di sebelumnya. Tetapi, sejak ditetapkan pada 1 September 2012, jumlah remedial yang boleh diambil tiap subjeknya hanya dua kali. Jika keduanya gagal lagi, maka ujian ini baru bisa diambil lagi di 2 tahun berikutnya. Percobaan pertama (*first attempt*) dihitung saat mengambil ujian di 2 tahun berikutnya itu dan jumlah remedial yang diambil meningkat menjadi tiga kali. Waktu 2 tahun di sini dinilai cukup untuk persiapan *remidial*. Walaupun gagal, calon guru masih dapat mengikuti ITT. Namun, sertifikat QTS akan ditahan hingga ujian ini, kedua subjek, dapat dilewati dengan lulus (48, 49).

Data di tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan, tingkat kelulusan sebesar 98,22%. Dari 35.724 orang yang mengambil ujian, 35.087 orang lulus. Dari tingkat kelulusan dari tiga kali percobaan yang diambil didapat statistik per subjek, Bahasa Inggris dan Matematika. Total tingkat kelulusan per subjek, Bahasa Inggris dan Matematika, adalah 99.2% dan 98.1%. Rata-rata percobaan yang diambil per subjek adalah 1.24 dan 1.51 (48).

Terdapat tiga kategori pendanaan yang bisa didapatkan oleh para calon guru untuk membiayai pelatihan ITT, yaitu (50):

1. Pendanaan berbasis employment

Gaji adalah salah bentuk pendanaan yang bisa didapat para calon guru yang mengikuti pelatihan seperti *School Direct*. Rentang gaji minimum yang bisa didapat diatur di dalam *Unqualified Teacher Pay Scales*. Berikut perinciannya berdasarkan posisi, pengalaman dan lokasi (51),

- *London fringe (Berkshire, Buckinghamshire, Essex, Hertfordshire, Kent, Surrey dan West Sussex):* £16.856-26.052
- *Outer London:* £18.789-27.992
- *Inner London:* £19.893-29.088
- Daerah lainnya di England dan Wales: £15.817-25.016

2. Pendanaan program sarjana

Khusus untuk program ini, terdapat beberapa opsi pendanaan, seperti pinjaman untuk biaya studi, pinjaman untuk biaya hidup dan grant untuk biaya hidup. Khusus untuk yang terakhir, pendaftaran dilakukan melalui *Student Finance England* dan akan ujian yang harus diikuti oleh siswa (52).

3. Pendanaan program pascasarjana

Terdapat beberapa pendanaan yang sama dengan program sarjana, seperti pinjaman-pinjaman. Khusus untuk program ini, terdapat pendanaan yang bernama *Training Bursaries*. Bursar ini diberikan kepada para calon guru yang tidak dipekerjakan oleh sekolah tempat ITT diadakan. Tabel 8 adalah perincian besar bursar ini berdasarkan predikat yang dimiliki.

Tabel 8. Besaran *Training Bursaries* (53)

<i>Training Bursaries</i> 2013/2014	Subjek dan jenjang ITT			
	Fisika, Kimia, Matematika	Bahasa Modern	Matematika pada jenjang primer	Prioritas lain pada jenjang primer dan sekunder
1st	£20.000	£20.000	£11.000	£9.000
2:1	£15.000	£15.000	£6.000	£4.000
2:2	£12.000	£12.000	0	0

Bentuk pendanaan lainnya adalah *School Direct Bursary Top-Up*. Berlaku hanya kepada para calon guru yang terlibat di dalam program *School Direct*. Selain itu, sekolah tempat mengajar memiliki 35% dari siswa yang berhak atas *free meal*. Pendanaan ini merupakan tambahan untuk *Training Bursary* dan besarnya adalah 25% dari standar *bursary*.

Beasiswa-beasiswa dari *Institute of Physics* atau IOP, *Royal Society of Chemistry* atau RSC, BSC (terkait Ilmu Komputer) dan *Institute of Mathematics and its Applications* atau IMA diberikan untuk para calon guru yang mengajar subjek terkait (lihat catatan kaki 11 -14). Besaran dari beasiswa-beasiswa ini adalah £20.000. Persyaratan minimum adalah 2:1 dan mereka yang sudah mendapat beasiswa-beasiswa ini tidak berhak atas *Traning Bursaries* (53).

3.2 Persyaratan Mengajar di Jenjang Pendidikan Lanjutan

Untuk di tingkat pendidikan lanjutan (*further education*), staf pengajar diwajibkan memiliki kualifikasi profesional. Semua staf yang tugas utamanya adalah mengajar, memberikan pelatihan atau pendampingan terhadap murid, diwajibkan untuk berstatus *Qualified Teacher Learning and Skills* (QTLS) atau *Associate Teacher Learning Skills* (ATLS).

3.3 Menjadi Guru di UK

Selepas mengikuti pelatihan ITT dan mendapatkan QTS, setelah lulus dalam ujian *Skill Tests*, para guru yang sudah terqualifikasi memasuki masa percobaan atau *induction* selama satu tahun ajaran atau *three full school terms*. Mengikuti masa percobaan ini adalah wajib, karena termasuk persyaratan untuk dapat mengajar di sekolah-sekolah di England (54). Para guru ini memiliki sebutan tersendiri, yaitu NQTs atau *New Qualified Teachers*.

Dua komponen yang terdapat di dalam masa percobaan (55),

- Program profesional pengembangan diri
- Evaluasi dengan menggunakan *Teachers' Standards* (56)

Masa percobaan dapat dilakukan secara penuh atau paruh waktu. Bagi yang akan melakukan secara paruh waktu, masa percobaan berlangsung selama dua tahun ajaran. Evaluasi akan diadakan pada

setiap akhir *school term*. Evaluasi dilakukan oleh *induction tutor* atau kepala sekolah tempat guru tersebut mengajar. Masa percobaan hanya boleh dilakukan sekali saja. Jika hasil evaluasi menunjukkan yang bersangkutan tidak memenuhi standar yang digunakan, maka, yang bersangkutan tidak akan kehilangan QTS, tidak dapat direkrut oleh sekolah dan namanya akan tercatat di dalam daftar yang gagal di masa percobaan milik NCTL (54).

Disarankan, masa percobaan dimulai sesaat setelah mendapat QTS. Namun, hal tersebut tergantung dari kesepakatan antara lembaga terkait dengan kepala sekolah dan NQT. Lembaga terkait yang dimaksud akan memastikan penjaminan kualitas yang independen. Biasanya, lembaga ini adalah pemerintah daerah lain, pemerintah daerah dimana sekolah berada, *Independent Schools Teacher Induction Panel* (ISTIP) untuk NQT yang melakukan masa percobaan di sekolah swasta (termasuk di dalamnya akademi dan sekolah gratis) atau *National Induction Panel for Teachers* (NIPT) yang akan mulai aktif pada September 2013 (54, 57).

Selain itu, kepala sekolah harus memastikan bahwa akan ada pengurangan waktu mengajar di sekolah terkait sebesar 10% untuk memberikan kesempatan kepada NQT mengembangkan keterampilan mengajar di luar kelas dan sebagai masa persiapan serta evaluasi.

Di akhir masa percobaan, hasil evaluasi dari setiap *school term* dikumpulkan dan berdasarkan itu *induction tutor* atau kepala sekolah membuat rekomendasi yang diserahkan lembaga terkait. Isi dari rekomendasi menyatakan apakah progress NQT dan evaluasinya memenuhi *Teachers' Standards*. Selanjutnya, lembaga terkait membuat keputusan apakah NQT bisa dinyatakan lulus atau gagal atau membutuhkan perpanjangan dari masa percobaan. Keputusan ini lalu diserahkan kembali kepada kepala sekolah dan NCTL. Pihak NCTL yang akan menghubungi NQT terkait hasil masa percobaan yang dijalani (55).

Data per November 2012 menunjukkan, guru-guru terqualifikasi yang bekerja di *local authority maintained nursery and primary* di England digaji antara £23.800-37.800. Data ini adalah untuk laki-laki dan perempuan dari umur 25 tahun ke bawah hingga 60 tahun ke atas. Untuk data yang sama, guru-guru terqualifikasi yang bekerja di *primary*

academies di England digaji antara £23.700-37.100 (26). Untuk data yang sama, per November 2012, guru-guru terkualifikasi yang bekerja di *local authority maintained secondary* di England digaji antara £23.900-41.100 (26).

Guru yang bekerja di jenjang pendidikan *further education* di England dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: *unqualified lecturer*, *qualified lecturer*, *advanced teaching and training* dan *leadership and management*. Skala gaji per 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh *University and College Union* atau UCU yang berbasis di Wales menunjukkan, untuk *unqualified lecturer*, kisaran gaji antara £18.685-22.854; untuk *qualified lecturer*, kisaran gaji antara £23.546-35.551; untuk *advanced teaching and training*, kisaran gaji antara £35.551-40.007; untuk *leadership and management*, kisaran gaji antara £35.551-88.754 (58).

3.4 Pembinaan Guru di UK

Di jenjang pendidikan primer dan sekunder, pembinaan para guru adalah tanggung jawab dari masing-masing sekolah. Pelatihan biasanya diadakan di sekolah pada saat hari pelatihan atau di pusat pelatihan regional yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Terdapat 200 sekolah dengan predikat ‘*oustanding*’ (yang diberikan oleh Ofsted, terdapat di sub bab 5.2) yang dicanangkan dan didanai oleh pemerintah sebagai *Teaching Schools*. Sekolah-sekolah ini memiliki peran utama dalam melakukan pembinaan guru di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah di England. Model ini menekankan pada kolaborasi dalam bentuk aliansi sekolah-sekolah (59).

Selain melakukan pembinaan, sekolah juga bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap performa guru-gurunya. Dalam konteks figur, hal ini menjadi tanggung kepala sekola. Beberapa hal perlu diperhatikan di dalam melakukan evaluasi telah diatur di dalam *The Education (School Teachers’ Appraisal) (England) Regulations 2012* (60). Para guru juga didorong untuk mengikuti CPD atau *Continuing Professional Development*. CPD biasanya disediakan oleh institusi seperti IfL atau *Institute for Learning*.

Selain itu, para guru juga didorong untuk mengambil kembali pendidikan pascasarjana pada bidang-bidang prioritas, seperti Bahasa Inggris, Matematika, Sains dan SEN. Pemerintah secara khusus mengalokasikan dana sebesar £2 juta per tahunnya untuk menyediakan beasiswa *National Scholarship Fund* hingga £3.500, diberikan bagi para guru yang berminat. Hingga tahun 2013, program beasiswa ini sudah terlaksana sebanyak tiga kali.

4

Sistem Ujian dan Kualifikasi Pendidikan di Inggris

Sistem kurikulum nasional diberlakukan di Inggris terutama untuk sekolah-sekolah yang termasuk *state school* (dibiayai oleh pemerintah). Untuk jenjang pendidikan primer dan sekunder, berlaku sistem *Key Stage*. Di setiap akhir tingkatan diadakan ujian, yang disebut *National Curriculum Test* dan *Key Stage Test*, serta evaluasi keseharian siswa oleh para guru. Jenjang sekunder umumnya diakhiri dengan ujian nasional *General Certificate of Secondary Education* (GCSE). Setelah tahap ini, kebanyakan siswa meneruskan ke pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan ujian AS (*Advanced Subsidiary*)-Level dan A2-Level yang dikombinasikan menjadi A (*Advanced*)-Level, sebagai persiapan memasuki universitas atau perguruan tinggi (8).

Sistem *Key Stage* hanya berlaku di England, Wales dan Irlandia Utara, sedangkan di Skotlandia digunakan tahapan yang berbeda (lihat Tabel 1). Selain itu, di Skotlandia ujian GCSE digantikan oleh ujian *Scottish Certificate of Education* (SCE) *Standard Grade*, sedangkan ujian A-Level digantikan dengan ujian *SCE Higher Grade* (16).

Perlu menjadi catatan penting bahwa ujian-ujian di atas tidak berlaku bagi semua siswa. Setelah menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder 9 tahun pertama, siswa dihadapkan pada berbagai pilihan.

4.1 Ujian Pendidikan Primer

Penilaian terhadap siswa usia 3 sampai 14 tahun dilaksanakan melalui *National Curriculum Test* dan *Key Stage Test* untuk melihat perkembangan yang telah dicapai siswa terhadap setiap mata pelajaran yang diberikan. Penilaian dilaksanakan untuk memantau perkembangan siswa dalam perencanaan pendidikan tingkat berikutnya, bukan untuk menentukan lulus atau gagal. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan, kemampuan serta kemajuan yang telah dicapai setiap siswa pada setiap mata pelajaran yang diberikan. Penilaian tidak dilakukan khusus, namun dari kegiatan kelas sehari-hari, siswa biasanya tidak mengetahui sedang dilakukan penilaian terhadap dirinya. *National Curriculum Test* dan *Key Stage Test* biasanya dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei dan dilaksanakan saat (8):

1. Akhir *Key Stage 1* (usia 7 tahun)

Evaluasi dilakukan pada akhir *Year 2*, meliputi penilaian terhadap kemampuan Matematika Dasar, Sains dan Bahasa Inggris yang meliputi membaca (*reading*), menulis (*writing*), mengeja (*spelling*), berbicara (*speaking*) dan mendengar (*listening*). Evaluasi dilakukan di sekolah dalam kegiatan sehari-hari para siswa dan didasarkan pada penilaian guru. Hasilnya kemudian dibahas bersama orang tua siswa.

2. Akhir *Key Stage 2* (usia 11 tahun)

Evaluasi dilakukan pada akhir *Year 6*, meliputi dua mata pelajaran pokok, yaitu Matematika dan Bahasa Inggris yang meliputi *grammar*, *punctuation*, dan mengeja (*spelling*). Evaluasi ini dikenal dengan nama *National Curriculum Test*. Selain tes tersebut, terdapat penilaian guru pada Matematika, Sains dan Bahasa Inggris. Hasil evaluasi pada jenjang ini akan dilaporkan kepada orang tua siswa.

3. Akhir *Key Stage 3* (usia 14 tahun)

Evaluasi dilakukan pada akhir *Year 9*, mencakup hampir seluruh kurikulum, yaitu Bahasa Inggris (termasuk membaca, menulis dan *Shakespeare Play*), Matematika, Sains, Sejarah, Geografi, Bahasa asing Modern (contoh: Bahasa Perancis dan Bahasa Jerman), Desain dan Teknologi, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Seni, Desain, Musik,

Olahraga, Kewarganegaraan serta Pendidikan Agama. Evaluasi yang dilakukan kurang lebih serupa dengan yang dilakukan pada akhir *Key Stage 1*.

Standards and Testing Agency (STA) merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung dan mendampingi sekolah melakukan evaluasi-evaluasi di atas, termasuk di dalamnya membuat soal-soal *National Curriculum Test*. Selain itu, standar penilaian juga ditetapkan oleh lembaga ini (61).

4.2 Kualifikasi dan Ujian Pendidikan Sekunder

Saat memasuki *Year 10* atau saat siswa menginjakkan usia 14 tahun (memasuki *Key Stage 4*), siswa diberikan beberapa pilihan jalur kualifikasi yang dapat mereka ambil. Umumnya siswa mengambil jalur kualifikasi *General Certificate of Secondary Education* (GCSE), walaupun demikian terdapat beragam pilihan kualifikasi lainnya seperti, *National Vocational Qualification* (NVQ), *Entry Level Qualification*, HNCs (*Higher National Certificates*), HNDs (*Higher National Diplomas*). Berikut dijabarkan lebih lanjut mengenai beberapa pilihan jalur kualifikasi yang tersedia, atau secara singkat ditunjukkan dalam Gambar 4 (62).

	NVQ Level 2	NVQ Level 3	NVQ Level 4	NVQ Level 5	NVQ Level 6 up to Level 8
Work-based					
	Apprenticeship (includes NVQ Level 2)	Advanced Apprenticeship (includes NVQ Level 3)	Professional qualifications		
Academic	GCSE grades A–C	A levels AS and A2			
	14–19 Higher Diploma	14–19 Advanced Diploma	Certificate of Higher Education	Diploma of Higher Education	Honours degree
Job-related	ETEC First Diploma	National Diploma or Certificate	HNC	HND	Foundation Degree
	GCSEs at A–C in job-related subjects	A levels in job-related subjects			Degree in a job-related subject

Gambar 4. Pilihan kualifikasi yang dimulai dari usia 14 tahun (63)

Terdapat beberapa lembaga di luar sekolah yang berwenang memberikan kualifikasi pada tahap pendidikan sekunder, dalam artian mengadakan ujian dan menerbitkan sertifikat kualifikasi terkait. Lembaga-lembaga ini disebut sebagai *awarding bodies*, beberapa yang cukup terkenal, antara lain:

1. AQA (*Assessment and Qualification Alliance*)
2. Pearson Edexcel atau Edexcel
3. OCR (*Oxford, Cambridge, and RSA Examinations*)
4. CIE (*Cambridge International Examinations*)
5. WJEC (*Welsh Joint Education Committee*)

Sekolah dapat memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa *awarding bodies*, tergantung kebutuhan.

Fungsi pengaturan dan pengawasan dari *awarding bodies* di England dijalankan oleh sebuah lembaga non-kementerian yang bernama Ofqual atau *Office of Qualifications and Examinations Regulation*. Selain itu, lembaga ini juga melakukan tinjauan ulang terhadap kualifikasi-kualifikasi yang ada dan sistem ujian. Hal ini untuk memastikan sistem yang ada memiliki kesesuaian dengan hasil yang diharapkan (64). Di Wales dan Irlandia Utara, masing-masing diawasi oleh *Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills* (DCELLS) dan *Council for The Curriculum Examinations and Assessment* (CCEA). Beberapa kualifikasi yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari Ofqual tersedia lengkap di 'The Register' (<http://register.ofqual.gov.uk/>).

4.2.1 Kualifikasi Tingkat Pemula (*Entry Level Qualification*)

Kualifikasi tingkat pemula bisa diambil sebelum atau bersamaan dengan persiapan ujian nasional GCSE. Kualifikasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa di bangku sekolah, namun juga untuk masyarakat umum yang belum memiliki kualifikasi tertentu dan ingin melanjutkan pendidikan atau mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar (*learning difficulties*). Jika pendidikan kualifikasi ini diambil di sekolah, kualifikasi ini dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun, yaitu selama *Year 10* atau *Year 11*. Namun, jika diambil di luar sekolah, dapat ditempuh dengan waktu yang tidak terbatas tergantung dari jadwal dan

kecepatan belajar peserta didik. Kualifikasi ini disediakan juga di sekolah pendidikan tinggi lanjutan (*further education college*) atau bahkan di berbagai tempat pendidikan non-formal, seperti kantor, komunitas, rumah tinggal bahkan penjara dan sebagainya.

Kualifikasi ini dalam daftar penyetaraan yang diatur dalam Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (*National Qualifications Framework - NQF*) berada pada tingkat pemula (*entry*). Mengenai penyetaraan dalam kerangka kerja NQF dapat dilihat di bagian Lampiran A. Setelah menyelesaikan pendidikan kualifikasi ini, peserta didik dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, seperti misalnya: mengambil kualifikasi *GCSE*, *Key Skills*, *Skills for Life*, *NVQ*, *BTEC Introductory* dan lain sebagainya. Pilihan lainnya, peserta didik yang telah menempuh kualifikasi ini dapat langsung terjun ke dunia kerja melalui program magang (*apprenticeship*) (65).

4.2.2 *General Certificate of Secondary Education (GCSE)*

Sertifikat GCSE paling bersifat umum, sangat dihargai (*highly valued*) oleh sekolah dan penyedia lapangan pekerjaan dan pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan karir siswa setelah menyelesaikan *Year 11*. Yang paling umum adalah menggunakan nilai GCSE untuk melanjutkan ke pendidikan mempersiapkan ujian *A-Level* yang digunakan untuk mendaftar ke universitas atau perguruan tinggi. GCSE dapat diambil bersamaan dengan kualifikasi lainnya, seperti vokasi atau diploma (66).

GCSE disetarakan di Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional atau NQF pada tingkat 1 dan 2, tergantung nilai yang diperoleh. Nilai GCSE D-G setara dengan tingkat 1 NQF sedangkan di atas itu (A*-C) setara dengan tingkat 2 NQF (lihat Lampiran A) (67).

GCSE tersedia untuk lebih dari 40 mata pelajaran akademis dan 9 mata pelajaran terapan. Sekolah dapat memilih satu atau kombinasi dari beberapa *awarding body*. Mata pelajaran yang tersedia pada satu *awarding body* belum tentu tersedia di *awarding body* yang lain. Jadi, pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan.

Mata pelajaran terapan termasuk pelajaran teknik (*engineering*) atau pariwisata misalnya. GCSE dapat juga diambil secara bertahap, sehingga terdapat istilah setengah GCSE (*half a full GCSE*). Ujian GCSE pada dasarnya berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Perlu diketahui, tergantung program yang diambil, seseorang dapat berakhir dengan sertifikat setengah GCSE, seperti dijelaskan di atas, atau bahkan sertifikat setara dengan dua GCSE (*double award*). Sebagai contoh, GCSE Sains setara dengan satu GCSE, namun jika GCSE Sains diambil dengan bidang Sains lainnya yang paling tidak mencakup tiga mata pelajaran Sains, maka sertifikatnya setara dengan dua GCSE.

GCSE biasanya dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Di dalamnya, terdapat beberapa kali evaluasi pada mata pelajaran tertentu. Hasil dari evaluasi ini juga menentukan nilai akhir GCSE, selain dari ujian. Ujian GCSE belakangan telah disatukan, artinya siswa hanya perlu duduk di satu periode ujian secara bersamaan, yaitu di akhir masa studi. Sebelumnya, ujian diadakan setelah satu unit selesai (66). Terdapat juga sistem *remedial (resit)* yang dapat diambil pada bulan yang sama (Mei/Juni) tahun berikutnya, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Literatur Inggris dan Matematika. Di dalam remedial, nilai tertinggi yang akan diambil.

Rentang nilai mulai dari A*-G. Jika siswa tidak lulus dengan nilai terendah 'G' maka akan diberi nilai 'U' atau unclassified. Uniknya, sebelum memasuki masa ujian, siswa dapat memilih dua tipe ujian, yaitu higher tier atau foundation tier. Dengan higher tier siswa mungkin mendapatkan nilai A*, A, B, C atau D; sedangkan jika mengambil foundation tier nilai yang mungkin adalah C, D, E, F atau G. Sistem ini dibuat dikarenakan tiap siswa memiliki minat dan kelebihan masing-masing, sehingga dianggap perlu untuk menyediakan media ujian yang cocok agar siswa tidak merasa soal ujian di suatu bidang terlalu sulit atau terlalu mudah (67, 68).

Ujian GCSE dilakukan secara nasional. Terdapat lima awarding bodies yang menawarkan ujian dari kualifikasi ini, yaitu (66): AQA, CCEA, Edexcel, OCR dan WJEC. Setelah memperoleh nilai GCSE, siswa di *Year 11* ini dihadapkan kembali dengan berbagai pilihan yaitu

melanjutkan ke *AS Level* (setara dengan tahun pertama *A-Level*), *A-Level*, *NVQ*, *Diploma*, *BTEC*, *OCR Nationals* dan program kejuruan lainnya.

Pada tanggal 11 Juni 2013, *Ofqual* mengumumkan beberapa perubahan pada kualifikasi ini yang diajukan untuk berlaku dari September 2015. Beberapa perubahan tersebut, antara lain (69):

- 9 mata pelajaran akan mengalami pembaruan, yaitu: Bahasa Inggris, Literatur Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Kombinasi Sains, Sejarah dan Geografi
- Skala penilaian menjadi 8-1, dari yang sebelumnya A*-G
- Tidak ada tipe ujian higher tier dan foundation tier, kecuali untuk Matematika dan Sains

4.2.3 Kualifikasi Kejuruan

Kualifikasi ini menawarkan pendidikan keahlian khusus yang langsung bisa digunakan di dunia kerja. Kualifikasi di bidang kejuruan dikelompokkan dalam daftar Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit (*Qualifications and Credit Framework - QCF*). Tingkatan yang termasuk dalam QCF menunjukkan tingkat kesulitan tiap kualifikasi yang bertingkat dari tingkat pemula sampai dengan tingkat 8. Contoh kualifikasi kejuruan adalah NVQs (*National Vocational Qualifications*), HNCs (*Higher National Certificates*) dan HNDs (*Higher National Diplomas*) (70).

Kualifikasi kejuruan biasanya dibentuk berdasarkan sistem unit. Unit-unit tersebut lalu dikumpulkan yang kemudian dapat dikonversi menjadi suatu kualifikasi tertentu. Setiap unit terdiri dari kredit, dan 1 kredit sama dengan pelatihan selama 10 jam. Dari jumlah kredit ini juga menentukan jenis penghargaan yang dapat diperoleh di akhir pendidikan, yaitu (70):

1. 'Award' jika terdiri dari 1-12 kredit (1-120 jam pelatihan)
2. 'Certificates' untuk 13-36 kredit (130-360 jam pelatihan)
3. 'Diploma' jika memenuhi 37 kredit (370 jam pelatihan)

Bidang yang dapat dipelajari sangat beragam, tergantung dari *awarding body*. Evaluasi dilakukan di setiap unit, biasanya dalam bentuk laporan tertulis, presentasi atau rekaman video dari presentasi.

4.2.4 *Young Apprenticeship*

Semenjak *Year 10*, siswa juga dapat memilih program magang yang disebut *Young Apprenticeships*. Sistem kerja praktek ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk ikut serta dalam proses bekerja di suatu organisasi atau perusahaan secara penuh, selama satu sampai tiga pekan, atau berpartisipasi satu hari tiap minggu selama beberapa bulan. Pilihan ini dapat digabungkan dengan persiapan GCSE. Dengan program ini peserta didik dapat melakukan kerja praktek berdasarkan mata pelajaran yang ingin didalaminya guna menghadapi ujian GCSE (71).

4.3 Kualifikasi dan Ujian Pendidikan Lanjutan

Setelah siswa menyelesaikan *Year 11*, terdapat lebih banyak lagi pilihan. Apapun jalur yang dipilih akan melibatkan proses pendidikan. Di tahap ini biasanya siswa sudah dianjurkan untuk mencari tahu karir masa depan apa yang tertarik untuk diujjaki mereka. Pada dasarnya pilihan melibatkan dua kriteria, yaitu (72):

1. Melanjutkan sekolah baik di sekolah yang sama maupun ke sekolah tinggi (*college*), yang umumnya siswa mengambil pilihan ini untuk mempersiapkan ujian *A-Level*, atau
2. Melanjutkan pendidikan melalui pelatihan yang berbasiskan kerja praktek, seperti contohnya diploma dan lain-lain.

4.3.1 Kualifikasi AS dan A-Level

Kualifikasi *AS (Advanced Subsidiary)* dan *A (Advanced) Level* merupakan kualifikasi yang paling umum. Untuk *A-Level* diperlukan 2 tahun untuk menyelesaikannya (*AS-Level* yang setingkat dengan *A-Level* tahun ke-1 dan *A2-Level* yang setingkat dengan *A-Level* tahun ke-2). Siswa dapat memilih dari beragam mata pelajaran akademis dan mata pelajaran terapan. *AS* dan *A-Level* disetarakan di tingkat tiga di Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (*National Qualification Framework - NQF*).

Hasil dari *A-Level* dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas atau, jika dikehendaki, dapat digunakan untuk melamar kerja seperti untuk pekerjaan administrasi di kantor (73).

A-Level terdiri dari 2 tahap, yaitu *AS-Level* lalu setelah itu mengambil *A2-Level*. Masing-masing setara dengan 50% *A-Level*. *AS-Level* dapat merupakan kualifikasi yang berdiri sendiri jika siswa tidak ingin melanjutkan studi ke tahun kedua, yaitu *A2-Level* (73).

Umumnya siswa mengambil kualifikasi *AS* dan *A-Level* setelah lulus ujian GCSE. Namun, pelajar dewasa juga dapat mengambilnya. Bahkan di beberapa sekolah ada yang menyediakan *AS-Level* di beberapa mata pelajaran untuk siswa di tingkat lebih rendah, yaitu *Year 10* dan *Year 11* yang dinilai memiliki kemampuan akademis luar biasa. Umumnya diperlukan 5 GCSE dengan nilai *A*-C* atau mendapat nilai *B* atau lebih tinggi, untuk dapat melanjutkan ke kualifikasi *AS* dan *A-Level* (73).

Terdapat 80 mata pelajaran yang bisa dipilih untuk kualifikasi *AS* dan *A-Level* yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diambil sebelumnya di *Year 10* dan *Year 11*. Banyak siswa yang mengambil 3 atau 4 mata pelajaran di *AS-Level*. Hal ini memungkinkan siswa untuk memiliki pilihan untuk memutuskan mata pelajaran apa saja yang ingin diambil di tingkat *A2-Level* untuk mendapatkan kualifikasi *A-Level* (74). Sama halnya dengan GCSE, sekolah dapat memilih satu atau lebih *awarding bodies* yang menyediakan *A-Level*. Di England, terdapat 4 *awarding bodies*, yaitu (75): AQA, OCR, Edexcel dan WJEC. *Awarding body* lainnya adalah CIE atau *Cambridge International Examinations*. Selain menyediakan *A-Level* di Inggris, CIE juga menyediakan kualifikasi ini di beberapa negara lain, terutama negara-negara persemaikmuran. Selain CIE, Edexcel juga menyediakan layanan serupa.

Evaluasi pada setiap mata pelajaran yang diambil dilakukan dalam bentuk ujian dan tugas, seperti melakukan riset, esai, kerja lapangan, eksperimen atau beberapa hal praktis lainnya bergantung pada mata pelajaran yang diambil. Sistem penilaian *A-Level* berkisar dari *A** sampai *E*. Nilai akan keluar berdasarkan sistem yang dinamakan '*Uniform Mark Scale*' (UMS). *AS-Level* memiliki nilai penuh 300 UMS, sedangkan *A-Level* dengan nilai maksimum 600. Selanjutnya jika siswa mendaftar ke

universitas atau perguruan tinggi, nilai AS atau *A-Level* dapat dikonversi ke poin dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang dinamakan UCAS (*University and Colleges Admissions Service*), seperti ditunjukkan Tabel 9. Setiap universitas memiliki standar minimum nilai UCAS (73).

Tabel 9. Konversi nilai AS dan *A-Level* ke poin UCAS (73)

Grade	A level	AS level
A*	140	n/a
A	120	60
B	100	50
C	80	40
D	60	30
E	40	20

Pemerintah England merencanakan beberapa yang direncanakan akan berlaku di masa mendatang (belum ditetapkan waktunya), yaitu (76):

- Evaluasi di akhir studi, dari yang sebelumnya di akhir tahun setiap tingkat dari *A-Level*
- Kualifikasi AS yang dapat berdiri sendiri, independen dari *A-Level*
- Tinjauan ulang akan dilakukan pada beberapa mata pelajaran, seperti Matematika dan Matematika Lanjut (*Further Mathematics*), Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah, Geografi, Psikologi, Seni dan Desain, Sosiologi, Studi Bisnis, Ekonomi dan Ilmu Komputer

4.3.2 Kualifikasi Berbasis Kerja (*Apprenticeships*)

Selain beragam jenis kualifikasi bidang kejuruan seperti misalnya NVQ, siswa juga diberi pilihan untuk menimba pengalaman kerja (*apprenticeships*) atau bahkan mengambil tahun kosong (*gap year*) (77).

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi ini berkisar antara satu hingga empat tahun, tergantung dari tingkat kualifikasi yang diambil (yang dibahas setelah ini), kemampuan dari *apprentice* dan sektor industri. Selain itu, peserta program ini digaji dan terdapat batas minimal dari gaji yang diterima, yaitu £2,65 per jam. Sebuah *survey* menunjukkan gaji rata-rata per minggu dari peserta program ini adalah

sekitar £170, bahkan untuk posisi pekerjaan tertentu sekitar £210 (77, 78).

Terdapat tiga tingkatan yang bisa diambil, tergantung kualifikasi yang dimilikinya, yaitu (79):

1. *Intermediate Apprenticeship* (lulus 5 GCSE dengan nilai baik)
2. *Advanced Level Apprenticeship* (lulus dua A level)
3. *Higher Apprenticeship* (dapat memperoleh kualifikasi NVQ level 4 atau bahkan *Foundation Degree*)

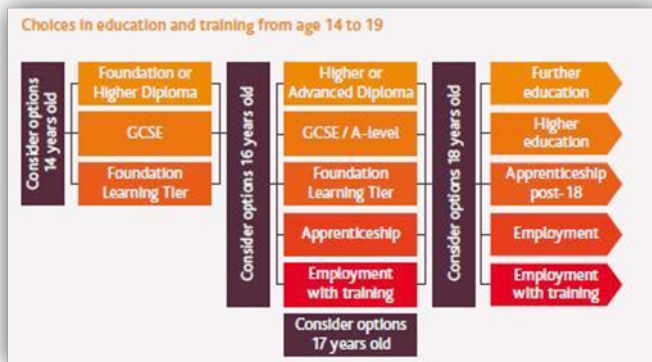
Terdapat juga 250 tipe dari program ini, bergantung dari sektor industri, dan 1400 posisi pekerjaan. Dengan mengambil program magang ini, siswa tetap dapat langsung terjun ke dunia kerja namun dapat pula melanjutkan ke jenjang universitas atau pendidikan tinggi, seperti yang terlihat pada Gambar 5 (79).

4.3.3 *International Baccalaureate (IB) Diploma*

IB adalah kualifikasi yang diakui secara internasional untuk siswa berusia 16-19 tahun. Program ini dapat diambil di 168 sekolah yang tersebar di UK (80). Program ini, menekankan pembelajaran mengenai identitas suatu kebudayaan dengan pengembangan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya yang berbeda.

Inti program dari kualifikasi ini meliputi tiga hal, yaitu (81, 82):

1. Teori ilmu pengetahuan (*theory of knowledge*)
2. Kreatifitas, Aksi dan Layanan
3. Menulis esai (*extended essay*)



Gambar 5. Posisi apprenticeships di antara kualifikasi-kualifikasi pendidikan usia 14-19 tahun (83)

Tiga hal di atas diterjemahkan ke dalam bentuk beberapa mata pelajaran yang mendukung. Siswa diberikan pilihan untuk mengambil enam mata pelajaran dari enam grup yang disediakan. Enam mata pelajaran tersebut terdiri dari tiga mata pelajaran yang termasuk *higher level* (H) dengan durasi 240 jam pengajaran dan tiga lainnya yang termasuk *standard level* (S) dengan durasi 150 jam pengajaran.

Keenam grup tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 (84, 85).



Gambar 6. Kurikulum International Baccalaureate (IB) Diploma (84)

Evaluasi di program ini dilakukan dengan dua cara, yaitu (86):

- Evaluasi eksternal
Bentuk yang paling umum adalah ujian. Namun, ada juga beberapa

bentuk lainnya seperti esai (*theory of knowledge* dan *extended essays*), pertanyaan terstruktur, pertanyaan studi kasus, pilihan ganda dan lain lain. Nilai yang didapat dari kedua esai tersebut, maksimal dapat menambah 3 poin ke total nilai akhir semua mata pelajaran. Tugas guru di sini adalah sebagai pengawas. Sedangkan penilaian dilakukan oleh pihak di luar sekolah (*awarding body*) (87).

- Evaluasi internal

Evaluasi diberikan oleh guru melalui beberapa hal, yaitu: tugas oral untuk mata pelajaran bahasa, tugas lapangan untuk mata pelajaran geografi, praktikum di laboratorium untuk mata pelajaran sains dan penampilan kesenian. Hasil evaluasi diperiksa oleh pihak di luar sekolah. Biasanya tugas-tugas ini berkontribusi terhadap 20-30% dari total nilai mata pelajaran. Khusus untuk mata pelajaran seni, bisa lebih, sekitar 50% dari total nilai.

Penilaian di program ini menggunakan 1-7 dengan 1 adalah *Very Poor* dan 7 adalah *Excellent* (85). Esai terkait *theory of knowledge* dan *extended essays* juga memiliki sistem penilaiannya sendiri (lihat Tabel 10). Total nilai maksimal untuk kualifikasi ini adalah 45, dengan 3 poin di dapat dari esai.

Tabel 10. Daftar nilai untuk Esai *theory of knowledge* dan *extended essay* (85)

Nilai	Deskripsi
<i>Band A</i>	Kualitas kerja <i>excellent</i>
<i>Band B</i>	Kualitas kerja bagus
<i>Band C</i>	Kualitas kerja memuaskan
<i>Band D</i>	Kualitas kerja rata-rata
<i>Band E</i>	Kualitas kerja <i>poor</i>

Program ini berakhir dengan satu kualifikasi yang terintegrasi. Kualifikasi diberikan oleh satu *awarding body* khusus yang bernama *International Baccalaureate Organization* (IBO) (88). Persyaratan untuk penerima sertifikat diploma di program ini adalah (85):

- Jika peserta didik berhasil mengumpulkan total poin sebanyak 24 atau lebih di ujian.
- Untuk setiap mata pelajaran berkategori H: mendapat nilai 4 atau

lebih tinggi. Namun, satu mata pelajaran dengan nilai 3 masih bisa diterima dengan kompensasi nilai 5 atau lebih tinggi di mata pelajaran lainnya.

- Untuk setiap mata pelajaran berkategori S: Tidak terdapat nilai 1 dan nilai 2 pada mata pelajaran lebih dari satu.

Keseluruhan hasil: Tidak terdapat nilai 3 pada mata pelajaran lebih dari tiga dan tidak terdapat nilai 3 pada satu mata pelajaran jika terdapat nilai 2 pada satu mata pelajaran yang berkategori S. Namun jika peserta didik tidak menamatkan secara penuh, ia tidak akan mendapatkan ijazah diploma namun dalam bentuk sertifikat per mata pelajaran.

Program diploma IB disetarakan pada tingkat 3 dalam Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (NFQ), dapat dilihat pada Lampiran A. Selepas menyelesaikan diploma IB yang diakui di 100 negara lain ini, siswa diperbolehkan meneruskan ke jenjang universitas dengan mengkonversi nilai sertifikat IB diploma. Misalnya, nilai 24 poin (maksimum 45 poin), setara dengan nilai 260 poin UCAS - atau sama dengan nilai satu 'B' atau dua 'C' di *A-Level*. Seseorang yang memperoleh nilai maksimum 45 poin sama saja dengan meraih 720 poin UCAS - atau setara dengan mengambil 6 mata pelajaran *A-Level* dengan semua nilai 'A' (81, 89).

4.3.4 BTEC (*Business Technician Education Council*)

BTEC adalah kualifikasi kejuruan yang memberikan pilihan bagi siswa untuk mendalami bidang tertentu dengan penekanan pendidikan praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kualifikasi ini dapat diambil sebagai pengganti GCSE dan *A-Level*, atau diambil bersamaan dengan kualifikasi umum tersebut. *Awarding body* yang menyediakan kualifikasi ini adalah Edexcel (90).

Di dalam setiap bidang yang ditawarkan, disediakan tingkatan yang sangat beragam, mulai dari tingkat pemula (*entry level*) sampai dengan tingkat 7 (*BTEC Advanced Professional*) di Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit (QCF) atau setara dengan pendidikan pascasarjana tingkat master (lihat Lampiran A). BTEC tingkat 3 (*BTEC Level 3 Nationals*) hasilnya dapat disetarakan dengan hasil *A-Level* sehingga dapat dikonversi ke

dalam poin UCAS (lihat Lampiran A). Hal ini menguntungkan bagi siswa yang telah mengambil program BTEC dan tetap ingin melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi (91). Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan penghargaan sebagaimana yang diatur di dalam QCF, yaitu: *Award* (terendah), *Certificate* dan *Diploma* (tertinggi) (90). Terdapat tingkatan-tingkatan BTEC yang dapat disetarakan dengan kualifikasi-kualifikasi lainnya (92). Perbedaan *Cambridge Pre-U* dengan *A-Level* adalah pada *Cambridge Pre-U* disediakan tidak dalam bentuk modular seperti *A-Level*, dan juga tidak memiliki mata kuliah wajib seperti halnya program *International Baccalaureate*. Siswa diberi kebebasan memilih 3 '*principal subject*' dari 26 mata pelajaran yang terbagi ke dalam 7 kelompok. Beberapa contoh mata pelajaran tersebut, yaitu: Literatur Inggris, Geografi, Sejarah, Filosofi dan Teologi, Kimia, Fisika, Matematika, Bisnis dan Manajemen, Ekonomi dan lain lain (93).

Tabel 11. Beberapa tingkatan kualifikasi BTEC dengan Ukuran (dapat berupa kredit atau Guided Learning Hours, GLH) dan penyetaraannya

Tingkatan	Kualifikasi	Ukuran (dalam kredit/GLH)	Setara
7	BTEC tingkat 7 kualifikasi Profesional	Bervariasi	Pasca sarjana
6	BTEC tingkat 6 kualifikasi Profesional	Bervariasi	<i>Degree</i>
5	BTEC tingkat 5 <i>Higher National Diplomas (HND)</i>	240 kredit	<i>Foundation Degree, Diploma of Higher Education</i>

4.3.5 Cambridge Pre-U

Cambridge Pre-U adalah suatu kualifikasi yang diprakarsai oleh UCIE (seringkali disebut dengan CIE) atau *University of Cambridge International Examinations* dan merupakan alternatif kualifikasi *A-Level*. Program yang termasuk pendidikan diploma ini baru diperkenalkan pada tahun 2008 di 20 sekolah swasta menggantikan sistem *A-Level*. Gambar 7 memperlihatkan diagram dari komponen-komponen utama yang wajib diambil di *Cambridge Pre-U*.



Gambar 7. Diagram komponen-komponen yang wajib diambil oleh siswa untuk mendapatkan Cambridge Pre-U Diploma (93)

Perbedaan *Cambridge Pre-U* dengan *A-Level* adalah pada *Cambridge Pre-U* disediakan tidak dalam bentuk modular seperti *A-Level*, dan juga tidak memiliki mata kuliah wajib seperti halnya program *International Baccalaureate*. Siswa diberi kebebasan memilih 3 ‘*principal subject*’ dari 26 mata pelajaran yang terbagi ke dalam 7 kelompok. Beberapa contoh mata pelajaran tersebut, yaitu: Literatur Inggris, Geografi, Sejarah, Filosofi dan Teologi, Kimia, Fisika, Matematika, Bisnis dan Manajemen, Ekonomi dan lain lain (93).

Siswa juga diwajibkan mengambil dua komponen lainnya yang tergabung dalam satu paket dikenal dengan *Cambridge Pre-U GPR* atau *Global Perspective and Independent Research*. Dua komponen tersebut adalah mata pelajaran *Global Perspective* yang diambil pada tahun pertama studi siswa dan Laporan Riset di tahun berikutnya. Lima komponen ini diperlukan untuk mendapatkan gelar diploma (94).

Evaluasi dilakukan pada lima komponen tersebut. Untuk komponen ‘*principal subjects*’, biasanya dilakukan dengan ujian tertulis, dapat berupa pertanyaan dengan pilihan ganda dan pertanyaan terstruktur, dan praktek. Waktu pelaksanaan evaluasi dari komponen ini adalah setiap akhir masa studi. Komponen *Global Perspective* terdiri dari beberapa tema, seperti Etika, Ekonomi, Lingkungan, Teknologi dan Politik dan Kultur. Setiap tema terdapat beberapa topik dan siswa diwajibkan untuk memilih 4 topik dari tema yang berbeda. Evaluasi dilakukan dengan ujian tertulis yang menelusuri kemampuan berargumen dan analisa kritis, tugas dan presentasi (93). Topik-topik yang dipilih pada komponen sebelumnya berpengaruh pada komponen Laporan Riset. Laporan ini

biasanya terdiri dari 4500-5000 kata dan dapat berupa disertasi atau laporan formal investigasi atau kuliah lapangan (93).

Sistem penilaian *Cambridge Pre-U* agak berbeda dengan *A-Level*, namun terdapat kesetaraan (lihat Tabel 12). Nilai D2 misalnya sama dengan A* di *A-Level* dan nilai P3 sama dengan nilai E. Nilai D1 dikonversi sebagai ‘melebihi nilai A* (*extends beyond A**)’ (65).

Tabel 12. Kontribusi setiap komponen terhadap skor dari Diploma (93)

Award	Band	Principal Subject	GPR
<i>Distinction (D)</i>	1	24	24
	2	22	22
	3	20	20
<i>Merit (M)</i>	1	18	18
	2	16	16
	3	14	14
<i>Pass (P)</i>	1	12	12
	2	10	10
	3	8	8

Sebagai bentuk persiapan masuk universitas atau perguruan tinggi, hasil dari *Cambridge Pre-U* dapat digunakan dalam sistem poin UCAS. Terdapat sistem konversi dari nilai *Cambridge Pre-U* ke poin UCAS. Nilai konversi tertinggi untuk ‘*principle subject*’ jika siswa mencapai nilai D2 yang dikonversi di tabel poin UCAS menjadi 145, dan yang terendah nilai P3 menjadi 46 poin UCAS (94).

4.3.6 Kualifikasi Bidang Kejuruan

Kualifikasi bidang kejuruan dikelompokkan dalam berbagai tingkat dalam Kerangka Kerja Kredit dan Kualifikasi (*Qualifications and Credit Framework - QCF*). Tiap tingkatan menunjukkan tingkat kesulitan - dari tingkat pemula sampai dengan tingkat 8 (lihat Lampiran A) (70).

Tingkatan suatu kualifikasi kejuruan dapat dibandingkan dengan jenis kualifikasi lainnya. Misalkan, kualifikasi QCF tingkat 2 disetarakan

dengan nilai A* sampai C dalam ujian nasional GCSE dan QCF tingkat 3 disetarakan dengan *A-Level* (lihat Perbedaan *Cambridge Pre-U* dengan *A-Level* adalah pada *Cambridge Pre-U* disediakan tidak dalam bentuk modular seperti *A-Level*, dan juga tidak memiliki mata kuliah wajib seperti halnya program *International Baccalaureate*. Siswa diberi kebebasan memilih 3 '*principal subject*' dari 26 mata pelajaran yang terbagi ke dalam 7 kelompok. Beberapa contoh mata pelajaran tersebut, yaitu: Literatur Inggris, Geografi, Sejarah, Filosofi dan Teologi, Kimia, Fisika, Matematika, Bisnis dan Manajemen, Ekonomi dan lain lain (93).

Kualifikasi kejuruan termasuk di dalamnya:

1. National Vocational Qualifications (NVQ), dan
2. BTEC *Higher National Certificates* (HNC) dan BTEC *Higher National Diplomas* (HND).

NVQ adalah kualifikasi berbasis kompetensi yang disiapkan untuk membangun keahlian atau ilmu pengetahuan khusus untuk suatu jenis pekerjaan secara efektif. NVQ berdasarkan standar nasional yang menetapkan kompetensi seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Terdapat 5 tingkatan yang kesetaraannya dapat dilihat di tabel QCF (lihat Lampiran A) (95).

NVQ terbuka lebar untuk pegawai atau seseorang yang sedang belajar di sekolah tinggi namun memiliki pekerjaan sampingan atau memiliki akses terhadap penempatan kerja. Menyelesaikan suatu tahap NVQ membuka kesempatan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Contohnya jika peserta didik menyelesaikan NVQ tingkat 3, seseorang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, seperti (95):

1. BTEC *Higher National Certificate*
2. BTEC *Higher National Diploma*
3. *Foundation Degree*
4. Spesialis Kejuruan lainnya

5

Sistem Penjaminan Mutu

Mutu sebuah sekolah ditentukan oleh beberapa hal. Dua hal yang seringkali dijadikan tolak ukur adalah kualitas dari guru/staf pengajar dan kelembagaan di dalam sekolah itu sendiri. Di Inggris, khususnya England, terdapat lembaga-lembaga yang khusus menangani kontrol mutu dari guru dan kelembagaan di dalam sekolah itu, yaitu: NCTL atau *National College for Teaching and Leadership* dan Ofsted atau *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills* (42, 96). Di Scotland, dua lembaga yang serupa adalah *the General Teaching Council for Scotland* atau GTCS dan *Education Scotland*. Di Irlandia Utara, dua lembaga yang serupa adalah *the General Teaching Council for Northern Ireland* atau GTCNI dan *Education and Training Inspectorate* atau ETI. Di Wales, dua lembaga yang serupa adalah *the General Teaching Council for Wales* atau GTCW dan Estyn (31–33).

5.1 Evaluasi Mutu Sekolah

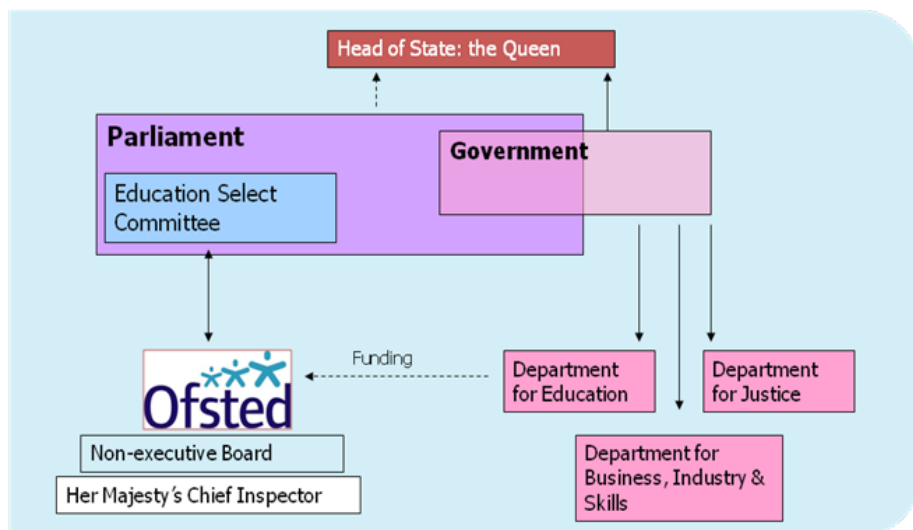
England memiliki pengalaman yang cukup matang dalam hal evaluasi mutu sekolah melalui inspeksi ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilakukan pertama kalinya pada tahun 1840. Pada tahun 1992, dibentuklah Ofsted atau *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*. Ofsted termasuk lembaga non-kementerian yang bekerja sama dengan DfE dan melapor langsung kepada parlemen, lihat Gambar 8. Walaupun begitu, Ofsted tetap mendapatkan pendanaan dari

DfE. Prinsip mereka adalah ‘Ofsted reports without fear of favour’ (97).

Gambar 9 menunjukkan struktur organisasi dari Ofsted. Di bawahnya terdapat *Operation Executive Board* yang memiliki peran sebagai penasihat untuk HMCI terkait strategi dan manajemen dari Ofsted. Melalui *Operation Executive Board*, HMCI dapat mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Direktur Regional, terutama untuk menjaga kualitas inspeksi di regionalnya. Direktur Regional juga memimpin sebuah tim yang terdiri dari *Senior HM Inspectors* dan *HM Inspectors* untuk mempromosikan perbaikan melalui inspeksi (98).

5.1.1 Tipe Sekolah yang Diinspeksi

Ofsted membuat dua kelompok sekolah-sekolah di England yang diinspeksi, yaitu: *maintained schools* dan akademi serta sekolah swasta (99). Ofsted melakukan inspeksi terhadap *maintained schools* secara rutin. Seberapa sering sekolah diinspeksi bergantung dari perkembangan dari inspeksi terakhir. Sekolah-sekolah yang dinilai memiliki kelemahan akan lebih sering diinspeksi.



Gambar 8 Posisi Ofsted di dalam pemerintah (97)

Selain sekolah, Ofsted juga melakukan inspeksi ke beberapa penyedia layanan *Early Years Education*, *Children's Social Care* dan *Training and Learning for Young People and Some Adults*.

Terdapat tiga lembaga inspeksi independen yang melakukan inspeksi terhadap sekolah swasta atas permintaan dari DfE. Ketiga lembaga tersebut adalah,

- *Independent Schools Inspectorate*. Bertugas untuk menginspeksi sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya tergabung di dalam *Independent School Association*.
- *School Inspection Service*. Bertugas untuk menginspeksi sekolah-sekolah berada di bawah *Focus Learning Trust*.
- *Bridge Schools Inspectorate*. Bertugas untuk menginspeksi sekolah-sekolah yang berhubungan dengan *Christian Schools' Trust* atau *Association of Muslim Schools*.

Ofsted bertugas memonitor kinerja dari ketiga inspektor ini, mewakili DfE untuk menjamin kualitas dan konsistensi dari inspeksi dan pelaporannya. Terdapat sebuah protokol yang secara khusus mengatur hubungan antara Ofsted dengan inspektor independen yang diakui (99).

5.1.2 Kerangka Kerja Inspeksi Ofsted

Secara singkat, inspeksi yang dilakukan oleh Ofsted melibatkan satu atau lebih inspektor. Hal-hal lainnya mengenai apa saja yang diinspeksi dan bagaimana inspeksi dilakukan telah diatur di dalam kerangka kerja inspeksi Ofsted (100).

Hampir setiap minggunya, Ofsted melakukan ratusan inspeksi di seluruh daerah di England dan mempublikasikan hasilnya dalam bentuk laporan di situs web, <http://www.ofsted.gov.uk/> (96). Biasanya, inspeksi mengambil di waktu-waktu setelah lima hari kerja selama autumn term.

Apa saja diharapkan ada pada hasil inspeksi yang dilakukan oleh Ofsted? Berikut beberapa di antaranya,

- Menyediakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh para pakar dan independen tentang seberapa baik sebuah sekolah untuk para orang tua. Hal ini dapat membantu untuk memilih sekolah bagi anak-

anak mereka.

- Menyediakan informasi kepada *Secretary of State for Education* dan parlemen tentang kinerja sekolah dan seberapa jauh standar dari pendidikan diimplementasikan
- Mempromosikan perbaikan terhadap sekolah-sekolah dan sistem.

Inspeksi yang dilakukan Ofsted melibatkan kepala sekolah, staf sekolah dan *governors*. Pandangan-pandangan dari orang tua murid, murid dan staff merupakan hal yang penting dalam inspeksi. Beberapa hal lainnya yang biasanya diinspeksi, antara lain :

- Capaian para murid di sekolah
- Kualitas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah
- Kelakuan dan keselamatan dari murid di sekolah
- Kualitas kepemimpinan dan manajemen di sekolah

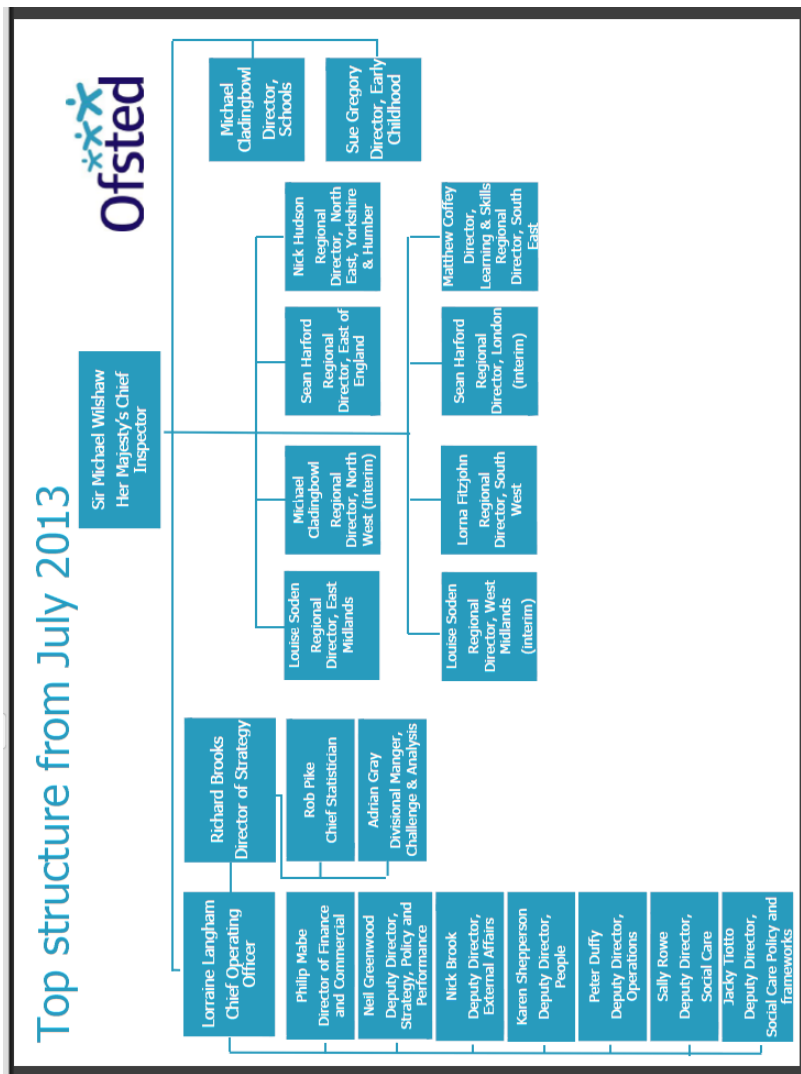
Ketika melakukan inspeksi, Ofsted harus mempertimbangkan hal-hal seperti spiritual, moral, social dan kultur dari perkembangan murid di sekolah; sejauh sekolah menyediakan fasilitas dan pelayanan terhadap murid-muridnya, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Peran kepala sekolah di dalam inspeksi dari Ofsted sangatlah krusial. Hal ini terkait tanggung jawab kepala sekolah, yaitu merekrut guru-guru, mengatur kualitas mereka dan mengadakan pengembangan profesi bagi para guru. Jika kualitas mengajar di sekolah tersebut dinilai buruk, maka bukan guru-gurunya yang terancam kehilangan pekerjaan, namun kepala sekolah.

Terdapat 4 kategori penilaian yang diberikan oleh Ofsted terhadap hasil inspeksinya yaitu (100):

- *Outstanding* dan *Good* (Grade 1 dan 2)
- *Requires Improvement* (Grade 3)
- *Inadequate* (Grade 4)

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Ofsted untuk tahun ajaran 2011/2012, per Agustus 2012, terdapat 21% sekolah yang berpredikat *Outstanding*, 49% sekolah yang berpredikat *Good*, 28% sekolah yang berpredikat *Satisfactory* dan 3% sekolah yang berpredikat *Inadequate*. Sekolah yang diinspeksi di sini adalah *maintained schools* (101).



Gambar 9 Struktur Organisasi dari Ofsted (98)

Menurut kerangka kerja inspeksi Ofsted, HMI adalah yang melakukan inspeksi, yang langsung dikerjakan oleh Ofsted. Terdapat juga karyawan kontrak sebagai tambahan yang disediakan oleh ISPs atau *Inspection Service Providers*. Sekolah akan diberitahu kapan inspeksi akan dilakukan oleh para inspektor. Biasanya dilakukan di atau setelah pertengahan hari saat hari-hari kerja. HMCI memiliki hak untuk menginspeksi sekolah tanpa memberitahu terlebih dahulu. Lama melakukan inspeksinya biasanya tidak lebih dari 2 hari dan ukuran dari tim yang melakukan inspeksi bergantung pada sekolah. Sebelum

melakukan inspeksi, data-data terkait sekolah yang akan diinspeksi diberikan kepada para inspektor, antara lain (97):

- Jumlah murid
- Presentase jumlah murid yang berasal dari kelompok etnis minoritas
- Presentase jumlah murid yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris
- Presentase jumlah murid yang mendapat dukungan fasilitas dari sekolah

Hal-hal teknis lainnya terkait inspeksi diatur secara detail di kerangka kerja inspeksi Ofsted (100).

6

Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan

Di tingkat nasional, pendidikan di England diawasi pemerintah pusat yaitu oleh Departemen Pendidikan (*Department for Education* - DfE) dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (*Department for Business, Innovation and Skills* - BIS). Namun untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, masing-masing pemerintah daerah diberi tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Berikut uraian mengenai berbagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di England mulai dari tingkat tertinggi yaitu ‘Nasional’ kemudian ‘Lokal’ sampai dengan tingkat ‘Lembaga’ (3).

6.1 Tingkat Nasional

Tanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan di England berada di tangan dua kementerian pemerintah Inggris, yaitu: Departemen Pendidikan (*Department for Education* - DfE) dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (*Department for Business, Innovation and Skills* - BIS). Tanggung jawab DfE antara lain merencanakan dan memantau pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah, menjamin penyediaan layanan pendidikan terpadu bagi siswa dan merumuskan kebijakan terkait anak-anak dan remaja. Sedangkan BIS bertanggung jawab terhadap sains dan inovasi, keterampilan, pendidikan lanjutan dan tinggi serta perusahaan (3).

DfE adalah kementerian dengan 3 badan eksekutif, yaitu: *Education Funding Agency* (EFA), *Standards and Testing Agency* (STA) dan *National College for Teaching and Leadership* (NCTL). Selain itu, kementerian ini juga bekerjasama dengan 6 lembaga non-kementerian (102). Sama halnya dengan DfE, BIS juga memiliki 9 badan eksekutif, salah satunya *Skills Funding Agency*. Terdapat 38 lembaga non-kementerian yang juga bekerjasama dengan kementerian ini, seperti *Office of Fair Trading* dan *UK Trade & Investment* (UKTI) (102).

Dalam hal pembiayaan pendidikan, badan yang dinamakan *The Education Funding Agency* (EFA) bertanggung jawab terhadap pendanaan untuk pendidikan usia antara 3 sampai dengan 19 tahun. Badan ini erat kaitannya dengan Departemen Pendidikan (DfE), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk pendanaan dan pengawasan pelatihan (*skills training*) dan pendidikan lanjutan (*further education*) untuk usia di atas 19 tahun, dibebankan kepada *Skills Funding Agency*.

“

Lembaga Pendidikan di Irlandia Utara

Urusan pendidikan primer dan sekunder dipegang oleh Departemen Pendidikan (*Department of Education - DE*), sedangkan untuk urusan pendidikan lanjutan dan tinggi dipegang oleh *Department for Employment and Learning* (DEL). Fungsi inspeksi atau pemeriksaan kualitas pendidikan dipegang oleh suatu badan yang dinamakan *The Education and Training Inspectorate* (ETI). Perihal urusan kurikulum, ujian dan kualifikasi diatur oleh suatu badan dibawah Departemen Pendidikan yang dinamakan *Council for the Curriculum, Examinations and Assessment* (CCEA).

Di tingkat daerah, pengelolaan pendidikan berada dibawah lima *Education and Library Boards* (ELBs). Di tingkat lembaga sekolah, arah pengelolaan pendidikan dilakukan oleh *Boards of Governors* sekaligus alokasi pembiayaan pendidikan (103).

publik atau pemerintah berada di tangan pemerintah daerah (*local authority*) atau biasa disebut LA. Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan generasi muda usia sekolah di daerahnya, antara usia 3 sampai 19 tahun atau 3 sampai 25 tahun bagi

peserta sekolah luar biasa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertugas mendistribusikan dana dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah pemerintah di daerahnya (3).

Lembaga Pendidikan di Skotlandia

Tanggung jawab pengawasan dan pengembangan sistem pendidikan di Skotlandia berada langsung di bawah Menteri Pertama (The First Minister). Tanggung jawab harian diemban oleh Menteri Kabinet bidang Pendidikan (Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning), yang terdiri dari Minister for Children and Young People dan Minister for Learning Skills. Mereka dilayani oleh Direktorat Jenderal bidang Pembelajaran dan Keahlian (Learning and Skills) Pemerintah Skotlandia. Para menteri diberi nasehat oleh badan yang dinamakan Education Scotland, yang utamanya memberi masukan perihal kurikulum dan evaluasi bidang pendidikan. Ujian nasional diselenggarakan di bawah Scottish Qualifications Authority.

Seperti halnya England, pengelolaan di tingkat lokal diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing, yang dinamakan Local Authorities (LAs). Dalam kenyataannya, urusan pengelolaan keuangan diserahkan 90% kepada kepala sekolah. Bahkan untuk pendidikan tingkat lanjutan atau tinggi, lembaga pendidikan umumnya memiliki hak otonomi penuh (104).

6.2 Tingkat Lembaga

Setiap lembaga pendidikan memiliki dewan pengurus (*governing body*) yang bertanggung jawab terhadap arahan perkembangan institusi. Berdasarkan hukum, sekolah pemerintah yang tergolong dalam *maintained schools* terbagi menjadi sekolah 1) komunitas (*community*), 2) *voluntary* dan 3) *foundation*. Umumnya sekolah yang termasuk dalam kategori komunitas didirikan dan didanai secara penuh oleh pemerintah daerah (*local authorities*). Sekolah *voluntary* umumnya didirikan oleh badan yang bersifat nirlaba (*voluntary*), yaitu gereja, oleh

karena itu pihak pendiri memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Sekolah jenis ini juga menerima bantuan dana dari pemerintah daerah walaupun mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai pengelola utama. *Foundation school* juga dibantu pembiayaannya oleh pemerintah daerah, namun dikelola oleh dewan pengurus sekolah (*school governing body*) atau yayasan amal (3).

Lembaga Pendidikan di Wales

Di Wales, pengaturan bidang pendidikan berada dibawah pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Keahlian (*Department for Education and Skills*). Fungsi inspeksi atau pemeriksaan kualitas pendidikan dipegang oleh suatu badan yang dinamakan *Estyn* atau *The Office of Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales*.

Pengelolaan pendidikan di tingkat lokal dipegang oleh pemerintah daerah yang berjumlah 22. Pemerintah daerah memiliki wewenang pengaturan pendidikan untuk tingkat primer dan sekunder. Sedangkan di tingkat lembaga, dewan pengurus sekolah (*governing body*) yang memutuskan arah kebijakan kurikulum yang mengacu kepada Kurikulum Nasional. Dewan ini juga yang memutuskan mengenai rencana belanja, jumlah staf dan bertanggung jawab dalam pemilihan kepala sekolah (105).

LAMPIRAN

A. Daftar Penyetaraan Kualifikasi Tingkat Nasional

Terdapat beragam kualifikasi pendidikan di Inggris. Hal ini disebabkan tersedianya berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan tujuan pendidikan masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 4. Untuk mengelompokkan berbagai kualifikasi tersebut, dilakukan penyetaraan dalam bentuk kerangka kerja kualifikasi (*qualification framework*) yang pada dasarnya dibagi menjadi (106):

1. Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (*National Qualifications Framework* - NQF)
2. Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit (*Qualifications and Credit Framework* - QCF)

Sistem kerangka kerja (*framework*) di atas mengelompokkan berbagai program yang berbeda latar belakang namun memiliki tuntutan syarat yang serupa terhadap peserta didik. Di setiap tingkatan yang sama, cakupan mata pelajaran sangat beragam juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi.

A.1 Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional (*National Qualifications Framework* - NQF)

NQF menyetarakan tingkat kualifikasi yang diakui di England,

Irlandia Utara dan Wales. Hanya kualifikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga perwakilan dari England, Wales dan Irlandia Utara yang dapat dimasukkan dalam tabel NQF, hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas setiap kualifikasi (106).

A.2 Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit (*Qualifications and Credit Framework - QCF*)

QCF terdiri dari penyetaraan kualifikasi kejuruan atau pendidikan berbasis kerja. QCF diakui di England, Wales dan Irlandia Utara. Sistem kualifikasi dibuat sehingga dapat dipecah menjadi satuan unit atau kredit. Peserta didik dapat mengambil unit atau kredit tersebut satu per satu kemudian menambahkannya untuk mendapatkan kualifikasi penuh.(106).

Tabel 13. Kualifikasi berdasarkan NQF dan QCF (106)

Tingkat	Contoh Kualifikasi NQF	Contoh Kualifikasi QCF
Pemula (Entry)	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Certificates of Entry Level</i> o <i>English for Speakers of Other Languages (ESOL)</i> o <i>Skills for Life</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Awards, Certificates, and Diplomas at entry level</i> - <i>Foundation Learning entry</i>
1	<ul style="list-style-type: none"> - <i>GCSE grades D-G</i> - <i>Certificates and Diplomas BTEC Introductory</i> - <i>OCR Nationals</i> - <i>Skills for Life</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BTEC Awards, Certificates, and Diplomas level 1</i> - <i>Foundation Learning Tier pathways</i> - <i>NVQs at level 1</i>
2	<ul style="list-style-type: none"> - <i>GCSE grades A*-C</i> - <i>Skills for Life</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BTEC Awards, Certificates, and Diplomas level 2</i> - <i>OCR Nationals</i> - <i>NVQs at level 2</i>
3	<ul style="list-style-type: none"> - <i>A-Level</i> - <i>GCE in applied subjects</i> - <i>International Baccalaureate</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BTEC Awards, Certificates, and Diplomas level 3</i> - <i>BTEC Nationals</i> - <i>OCR Nationals</i> - <i>NVQs at level 3</i>

4	<i>Certificates of Higher Education</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BTEC Professional Diplomas Certificates and Awards</i> - <i>HNCs</i> - <i>NVQs at level 4</i>
5	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HNCs dan HNDs</i> - <i>Other higher diplomas</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HNDs</i> - <i>BTEC Professional Diplomas, Certificates and Awards</i>
6	<ul style="list-style-type: none"> - <i>National Diploma Professional Production Skills</i> - <i>BTEC Advanced Professional Diplomas, Certificates and Awards</i> 	<i>BTEC Advanced Professional Diplomas, Certificates and Awards</i>
7	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Diploma in Translation</i> - <i>BTEC Advanced Professional Diplomas, Certificates and Awards</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BTEC Advanced Professional Diplomas, Certificates and Awards</i> - <i>NVQs at level 5</i>
8	<i>Specialist awards</i>	<i>Award, Certificate and Diploma at strategic direction</i>

DAFTAR REFERENSI

1. GILLARD, Derek. Education in England: a brief history . [online]. 2011. Available from: www.educationengland.org.uk/history
2. BERAVAL, T E A. An Overview of the UK Primary and Secondary Education System. DIPLOMAT [online]. 2012. Vol. Spring Edu. Available from: <http://www.diplomatmagazine.com>
3. EURYDICE. National system overview on education systems in Europe . [online]. 2011. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf
4. OFFICE OF PUBLIC SECTOR INFORMATION UK. Education and Skills Act 2008. [online]. Available from: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/25/contents>
5. EDUCATION AUDIOVISUAL & CULTURE EXECUTIVE AGENCY. Organisation of the education system in the United Kingdom – England, Wales and Northern Ireland 2009/2010. COMMISSION, European (ed.) [online]. 2010. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/UN_EN.pdf
6. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS UK. National Population Projections 2010-based Statistical Bulletin . [online]. 2010. Available from: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_235886.pdf

7. NATALIA CUDDY, Tom Leney. Vocational Education and Training in the United Kingdom. [online]. 2005. Available from: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5159_en.pdf
8. SIHBUDI, Muhammad R. Inggris. 2010.
9. DIRECTGOV-UK. Types of school. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/ChoosingASchool/DG_4016312
10. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Free Schools. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/freeschools>
11. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Community and Community Special Schools. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/a00198361/community-and-community-special-schools>
12. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Foundation, Foundation Special and Trust Schools. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/a00198364/foundation-foundation-special-and-trust-schools>
13. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Voluntary-Aided Schools. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/b00198369/voluntary-and-faith-schools/voluntary-aided-schools>
14. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Voluntary-Controlled Schools. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/b00198369/voluntary-and-faith-schools/voluntary-controlled-schools>
15. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Grammar School. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/maintained/a00198400/grammar-schools>
16. BRITISH COUNCIL. The Education Systems Of England & Wales, Scotland And Northern Ireland. [online]. Available from: <http://www.britishcouncil.org/flasonline-uk-education-system.pdf>
17. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Maintained Nursery School. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/>

- leadership/typesofschools/maintained/a00198357/maintained-nursery-schools
18. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Academies. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/academies>
 19. BBC NEWS. Free school numbers to rise by 55, government reveals. [online]. Available from: <http://www.bbc.co.uk/news/education-19460927>
 20. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Sixth-form Colleges. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/sixth/a00218498/sixth-form-colleges>
 21. LEGISLATION.GOV.UK. Education Act 2002. [online]. 2002. Available from: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32>
 22. LEGISLATION.GOV.UK. Education Act 2002: 83. Curriculum requirements for foundation stage. [online]. 2002. Available from: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/section/83>
 23. DEPARTMENT FOR EDUCATION. The national curriculum in England: Framework document. [online]. 2013. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210969/NC_framework_document_-_FINAL.pdf
 24. DEPARTMENT FOR EDUCATION. National curriculum: video interviews for schools. [online]. 2014. [Accessed 22 March 2014]. Available from: <https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-video-interviews-for-schools>
 25. NATIONAL STATISTICS. Statistics - national statistics: Schools, pupils and their characteristics - January 2013. [online]. 2013. Available from: <https://www.gov.uk/government/publications/schools-pupils-and-their-characteristics-january-2013>
 26. DEPARTMENT FOR EDUCATION. SCHOOL WORKFORCE IN ENGLAND: NOVEMBER 2012. [online]. 2013. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223587/SFR15_2013_Text_withPTR.pdf
 27. GRADUATE TEACHER TRAINING REGISTRY. Teacher training explained. [online]. Available from: <http://www.gttr.ac.uk/students/beforeyouapply/teachertrainingexplained/>

28. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Basic requirements. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/faqs/applying/basic-requirements.aspx>
29. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Why degree quality matters. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/apply-for-teacher-training/why-degree-quality-matters.aspx>
30. DEPARTMENT FOR EDUCATION. ITT criteria and supporting advice. [online]. 2013. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/initial/b00205422/qtsanditt>
31. SCOTLAND.GOV.UK. Chapter 4: Building twenty-first century teachers and leaders: the early phase. [online]. 2011. Available from: <http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/01/13092132/6>
32. DEPARTMENT OF EDUCATION NORTHERN IRELAND. Courses of Initial Teacher Education in Northern Ireland. [online]. Available from: http://www.deni.gov.uk/index/school-staff/teachers-teachinginnorthernireland_pg/10_teaching_in_northern_ireland-initial_teacher_education-pg.htm#providers
33. HIGHER EDUCATION FUNDING COUNCIL FOR WALES. Initial teacher training (ITT) reconfiguration. [online]. Available from: http://www.hefcw.ac.uk/policy_areas/itt/itt_reconfiguration.aspx
34. GRADUATE PROSPECTS. Teacher training: Where to start. [online]. 2012. Available from: http://www.prospects.ac.uk/teaching_advice_where_to_start.htm
35. DEPARTMENT FOR EDUCATION. How can I boost my knowledge? [online]. Available from: http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/itt-routes/~/link.aspx?_id=30D34DD344EB4E47810FAA2135943955&_z=z
36. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Post-ITT subject knowledge enhancement. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/returning-to-teaching/ske-for-returners>
37. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Choose a course and training provider. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/>

- get-into-teaching/teacher-training-options/itt-routes/choose-a-course.aspx
38. DEPARTMENT FOR EDUCATION. School-centered initial teacher training (SCITT) providers. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/school-based-training/school-centred-training/scitt-providers.aspx>
 39. DEPARTMENT FOR EDUCATION. School-centred initial teacher training. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/school-based-training/school-centred-training>
 40. DEPARTMENT FOR EDUCATION. School direct: How School Direct works. [online]. 2013. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/initial/b00205704/school-direct/schools>
 41. OFSTED. Summary of Ofsted information for teacher training providers. [online]. 2013. Available from: [http://media.education.gov.uk/assets/files/xlsx/o/ofsted grades for itt providers at 20 may 2013.xlsx](http://media.education.gov.uk/assets/files/xlsx/o/ofsted%20grades%20for%20itt%20providers%20at%2020%20may%202013.xlsx)
 42. NATIONAL COLLEGE FOR TEACHING AND LEADERSHIP. School Direct: Quick Start Guide for Schools 2014 to 2015 [online]. 4. 2013. Available from: www.education.gov.uk/schooldirect
 43. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Teach First. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/school-based-training/teach-first.aspx>
 44. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Help with your interview. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/apply-for-teacher-training/help-with-your-interview.aspx>
 45. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Introduction to professional skills tests. [online]. 2013. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/professional/b00212154/introduction>
 46. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Literacy skill tests: Test content. [online]. 2012. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/professional/b00211208/literacy/content>

47. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Numeracy skill tests: Test content. [online]. 2012. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/professional/b00211213/numeracy/content>
48. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Skill tests statistics. [online]. 2013. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/professional/a00212158/statistics>
49. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Skill test FAQs: FAQs-General. [online]. 2013. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/careers/traininganddevelopment/professional/b00211225/skills-test-faqs/faqs-general>
50. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Bursaries and funding. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/funding.aspx>
51. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Unqualified teacher pay scales. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/salary/unqualified-teacher-pay-scales>
52. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Funding for undergraduate teacher training. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/funding/undergraduate-funding.aspx>
53. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Funding for postgraduate teacher training. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/funding/postgraduate-funding.aspx>
54. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Statutory guidance on induction for newly qualified teachers (England) [online]. 2013. Available from: www.education.gov.uk/contactus
55. DEPARTMENT FOR EDUCATION. NQT induction. [online]. Available from: <http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/life-as-a-teacher/induction-year.aspx>
56. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Teachers' Standards. [online]. Available from: http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/t/teachers_standards_information.pdf
57. NATIONAL INDUCTION PANEL FOR TEACHERS. Welcome NIPT-the National Induction Panel for Teachers. [online]. 2013. Available from: <http://nqtinduction.co.uk/index.html>

58. UNION, University and College. FE salary scales for England. [online]. 2012. Available from: <http://www.ucu.org.uk/2218>
59. DEPARTMENT FOR EDUCATION. National teaching schools. [online]. [Accessed 27 August 2013]. Available from: <http://www.education.gov.uk/nationalcollege/index/support-for-schools/teachingschools.htm>
60. DEPARTMENT FOR EDUCATION. Teacher appraisal and capability. [online]. [Accessed 27 August 2013]. Available from: <http://www.education.gov.uk/schools/leadership/deployingstaff/b00201884/new-arrangements>
61. STA. Standards and Testing Agency Framework Document. [online]. Available from: [http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/s/standards and testing agency framework document.pdf](http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/s/standards%20and%20testing%20agency%20framework%20document.pdf)
62. DIRECTGOV-UK. Choosing subjects for Years 10 and 11: what's compulsory and what's optional. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/Years10And11/DG_10013568
63. DIRECTGOV-UK. Your Future Your Choice, Post-16 Guide to Higher Education. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@educ/documents/digitalasset/dg_073249.pdf
64. OFQUAL. Ofqual: Office of Qualifications and Examinations Regulation. [online]. Available from: <http://ofqual.gov.uk/how-we-regulate/>
65. DIRECTGOV-UK. Entry level qualifications. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039023
66. OFQUAL. GCSEs: The official student guide to the system [online]. Coventry : Ofqual, [no date]. ISBN 978-1-84721-930-5. Available from: www.ofqual.gov.uk
67. DIRECTGOV-UK. GCSE. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039024
68. OFQUAL. GCSEs. [online]. Available from: http://www.ofqual.gov.uk/files/GCSE_Guide.pdf

69. EDEXCEL. GCSE reforms. [online]. Available from: <http://www.edexcel.com/Aboutus/press-room/press-releases/Pages/ks4-announcement.aspx>
70. DIRECTGOV-UK. Vocational qualifications. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_181951
71. DIRECTGOV-UK. Work experience in Years 10 and 11. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/Years10And11/DG_10013569
72. DIRECTGOV-UK. Options after 16: getting into university and higher education. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/OptionsAt16/DG_066261
73. DIRECTGOV-UK. AS and A levels. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039018
74. DIRECTGOV-UK. Diplomas for 14 to 19 year olds. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_070676
75. OFQUAL. A Level reform. [online]. 2013. Available from: <http://ofqual.gov.uk/qualifications-and-assessments/qualification-reform/a-level-reform/>
76. OFQUAL. A Level reform. [online]. 2013. Available from: <http://ofqual.gov.uk/qualifications-and-assessments/qualification-reform/a-level-reform/>
77. APPRENTICESHIPS. What are Apprenticeships? [online]. 2013. Available from: <http://www.apprenticeships.org.uk/Parents/What-are-Apprenticeships.aspx>
78. APPRENTICESHIPS. Learning and earning. [online]. 2013. Available from: <http://www.apprenticeships.org.uk/Parents/Learning-and-earning.aspx>
79. DIRECTGOV-UK. Apprenticeships. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/OptionsAt16/DG_4001327
80. IBO. IBO: Country information for United Kingdom. [online]. Available from: <https://www.ibo.org/country/GB/>

81. DIRECTGOV-UK. International Baccalaureate Diploma. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039027
82. BBC. International Baccalaureate. [online]. Available from: http://www.bbc.co.uk/schools/parents/international_baccalaureate/
83. APPRENTICESHIPS. Level of Apprenticeships. [online]. 2013. Available from: <http://www.apprenticeships.org.uk/Parents/Levels-of-Apprenticeships.aspx>
84. IBO. Diploma Programme curriculum framework. [online]. Available from: <http://www.ibo.org/diploma/curriculum/>
85. ST. CLARE'S OXFORD. International Baccalaureate Diploma Guide. [no date].
86. IBO. Diploma Programme assessment: Methods. [online]. Available from: <http://www.ibo.org/diploma/assessment/methods/>
87. IBO. Diploma Programme assessment: Results. [online]. Available from: <http://www.ibo.org/diploma/assessment/results/>
88. OFQUAL. View Qualification : IBO Level 3 International Baccalaureate Diploma. [online]. 2008. Available from: http://register.ofqual.gov.uk/Qualification/Details/500_3415_7
89. UCAS. UCAS: Tariff Tables. [online]. Available from: <http://www.ucas.com/how-it-all-works/explore-your-options/entry-requirements/tariff-tables>
90. EDEXCEL. BTEC: Teachers and tutors-Home. [online]. Available from: <http://www.edexcel.com/btec/New-to-btec/BTEC-Explained/Pages/default.aspx>
91. BTEC. New to BTEC? | An overview. [online]. Available from: <http://www.edexcel.com/btec/New-to-btec/Pages/default.aspx>
92. BTEC. BTEC: Teachers and tutors-Equivalences. [online]. Available from: <http://www.edexcel.com/btec/New-to-btec/BTEC-Explained/Pages/Equivalences.aspx>
93. CIE. Cambridge Pre-U: A guide for schools. Cambridge : CIE, 2013.
94. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS. Cambridge Pre-U, A guide for parents. [online]. Available from: <http://www.cie.org.uk/docs/qualifications/preu/guide/Pre-U guide for schools.pdf>

95. DIRECTGOV-UK. NVQs. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039029
96. OFSTED. Who we are and what we do. [online]. Available from: <http://www.ofsted.gov.uk/about-us>
97. GRAY, Adrian. The work of Ofsted: The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. 2013.
98. OFSTED. How are we structured. [online]. Available from: <http://www.ofsted.gov.uk/about-us/how-we-are-structured>
99. OFSTED. Types of school Ofsted inspects. [online]. Available from: <http://www.ofsted.gov.uk/schools/for-schools/types-of-school-ofsted-inspects>
100. OFSTED. The framework for school inspection [online]. 2013. Available from: www.ofsted.gov.uk
101. OFSTED. The report of Her Majesty's Chief Inspector of Education, Children's Services and Skills: Schools [online]. Manchester, 2012. Available from: www.ofsted.gov.uk
102. GOV.UK. Inside Government: Departments, agencies & public bodies. [online]. Available from: <https://www.gov.uk/government/organisations>
103. EURYDICE. National System Overview on Education Systems in Europe - North Ireland. [online]. 2011. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_NIR_EN.pdf
104. EURYDICE. National System Overview on Education Systems in Europe and Ongoing Reforms. [online]. 2011. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_SC_EN.pdf
105. EURYDICE. National System Overview on Education Systems in Europe - Wales . [online]. 2011. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_WLS_EN.pdf
106. DIRECTGOV-UK. Qualifications: what the different levels mean. [online]. Available from: http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039017

-o0o-

VIII

Sistem Pendidikan di Jepang



Sumber foto Gunung Fuji: Meta Iqbal

Oleh:
Ir. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D.
Atase Pendidikan di Tokyo

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Jepang

Kebangkitan sistem pendidikan Jepang dimulai pada zaman *Meiji* yang dimulai dari tahun 1868 sampai dengan 1912, Pada masa restorasi *Meiji* terjadi perubahan besar-besaran di semua bidang kehidupan, Perubahan paling utama adalah dibukanya kembali Negara Jepang terhadap Negara lain, Jepang yang di masa pemerintahan *Tokugawa* selama 2,5 abad menutup diri, akhirnya menyadari ketertinggalan mereka akibat politik isolasi yang dijalankan oleh *Tokugawa*. Pada masa sebelum *Meiji*, di Jepang sudah ada lembaga pendidikan *Terakoya* yang diperuntukkan bagi pendidikan rakyat biasa, Lembaga pendidikan ini berdasarkan pada konfusianisme yang menetapkan posisi seorang dalam masyarakat Jepang menurut kehormatan dan kewajibannya yang dilaksanakan oleh pemerintahan *Tokugawa*, Pada masa ini diperkirakan ada lebih dari 10,000 lembaga pendidikan *Terakoya* dengan angka partisipasi pendidikan hanya sekitar 40%, Pemerintahan *Meiji* yang ingin mewujudkan Jepang menjadi Negara industri yang modern, menjalankan pembaharuan dalam sistem pendidikan dan melakukan kebijakan pendidikan wajib (*gimu kyouiku*) secara nasional.

Namun demikian, keadaan sekitar pendidikan telah berubah sangat cepat seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, globalisasi, makin bertambahnya populasi orang tua dan rendahnya angka kelahiran serta gaya hidup keluarga yang makin cenderung serba permisif. Berbasis keadaan ini, UU Dasar Pendidikan direvisi pada tanggal 15 Desember 2006. Revisi undang-undang ini

jelas mengatur prinsip dasar pendidikan Jepang yang dianggap sangat penting. Pada saat yang bersamaan revisi undang-undang ini juga tetap mewarisi prinsip-prinsip universal yang ditetapkan dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut termasuk menempatkan “nilai” sebagai spirit utama dan nilai-nilai normatif yang memperlihatkan bahwa orang Jepang memiliki, serta menghormati tradisi dan budaya yang telah dipupuk sebelumnya.

Sistem sekolah modern Jepang dimulai pada tahun 1872. Hukum Pendidikan dan Pendidikan Sekolah diberlakukan pada tahun 1947 dimana pada waktu itu sistem 6-3-3-4-tahun pendidikan sekolah didirikan bertujuan untuk mewujudkan prinsip kesempatan yang sama untuk pendidikan. Tahun akademik di Jepang dimulai pada 1 April dan berakhir tanggal 25 Maret tahun berikutnya, Jepang yang terkenal dengan disiplin dan aturannya yang ketat hanya membolehkan anak-anak yang telah berusia minimal enam tahun untuk mulai pendidikan wajib belajar sembilan tahun, Jika anak kurang umurnya dari enam tahun, meskipun kurang dari sehari tidak dibenarkan untuk masuk sekolah dasar dan harus menunggu tahun berikutnya. Kurikulum yang dipakai Sekolah di Jepang adalah kurikulum nasional yang telah distandarkan secara nasional. Mata pelajaran yang distandarkan secara nasional seperti bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Matematik, Sejarah, *Sports*, Pendidikan Jasmani, Keterampilan dan Kesenian, *Science*, *Integrated Course*, *Home Room*. Walaupun begitu setiap sekolah di masing-masing Prefektur mempunyai kebebasan untuk menyusun sendiri kurikulum sekolah, di mana untuk setiap daerah kurikulumnya, terutama di mata pelajaran pilihan bisa saja berbeda. Pelajaran pilihan ditekankan pada jenjang kelas 2 dan 3 dimana jumlah kredit per jenjang rata-rata 30.

Kurikulum sekolah di Jepang meliputi tiga aspek yaitu, *subjects* (*kamoku*), *moral education* (*doutouku;kyouiku*) dan *extra-kurikuler*. Kurikulum di level sekolah disusun dengan kendali penuh dari *The Board of Education* di tingkat *prefectur* dan *municipal* (distrik). Sistem ujian/ulangan sekolah-sekolah di Jepang menarik untuk dicermati. Pendidikan dasar (*shougakkou*) tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas I secara otomatis akan naik ke kelas II, demikian seterusnya. Ujian akhirpun

tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok pendidikan wajib (*compulsory education*), sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP.

Jepang sangat memperhatikan kemampuan guru karena mereka menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan pendidikan sekolah sangat tergantung pada kualitas guru. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengembangan guru, pekerjaan, dan pelatihan. Peningkatan kemampuan guru termasuk di dalamnya mengembangkan kemampuan menulis ilmiah dimana laporan tertulis para guru dikembangkan sebagai penelitian terpadu dan dipresentasikan di seminar-seminar pengembangan pendidikan.

Ujian Nasional SD dan SMP di Jepang bukan untuk kelulusan tetapi dipakai sebagai alat ukur kemampuan anak-anak yang akan lulus SD dan SMP. Sejak 20 April 2013 lalu, ada perubahan, yaitu pengurangan jumlah sekolah yang diikuti dalam program Ujian Nasional ini (*chuusyutsu houshiki*) dan diterapkannya sistem *jisyusanka* (kebebasan memilih). Oleh karena itu pemerintah sesuai dengan anggaran yang dimiliki dapat menerapkannya untuk semua sekolah atau memilih sekolah-sekolah partisipan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains dan Teknologi Jepang (MEXT) memilih beberapa sekolah negeri dan swasta, dan ada beberapa sekolah yang memilih untuk ikut secara mandiri.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	369
DAFTAR ISI	373
1. Pendahuluan	375
2. Sistem Pendidikan: Pendidikan Karakter Berbasis Pembiasaan bukan Hafalan	383
3. Kurikulum	393
4. Sistem Ujian Kelas dan Ujian Akhir pada SMA	397
5. Peningkatan Kemampuan Guru	401
6. Sistem Penjaminan Mutu	411
7. Pelaksanaan Ujian Nasional	413
8. Sistem Pendanaan Sekolah	415

9. Peran Orang tua dan Masyarakat	421
DAFTAR REFERENSI	423

1

Pendahuluan

Kebangkitan sistem pendidikan Jepang dimulai pada zaman *Meiji* yang dimulai dari tahun 1868 sampai dengan 1912. Pada masa restorasi *Meiji* terjadi perubahan besar-besaran di semua bidang kehidupan. Perubahan paling utama adalah dibukanya kembali Negara Jepang terhadap negara lain. Jepang yang dimasa pemerintahan *Tokugawa* selama 2,5 abad menutup diri, akhirnya menyadari ketertinggalan mereka akibat politik isolasi yang dijalankan oleh *Tokugawa*.

Di awal pemerintahan *Meiji*, Jepang mengirimkan beberapa misi khusus yang dikirim ke luar negeri mengunjungi beberapa negara di Eropa, Amerika Serikat dan juga Asia. Para pemimpin Jepang yang kebanyakan berasal dari golongan samurai, pergi mempelajari peradaban Barat mulai dari sistem pertanian, industri, perekonomian dan termasuk sistem pendidikannya,

Pada masa sebelum *Meiji*, di Jepang sudah ada lembaga pendidikan *Terakoya* yang diperuntukkan bagi pendidikan rakyat biasa. Lembaga pendidikan ini berdasarkan pada konfusianisme yang menetapkan posisi seorang dalam masyarakat Jepang menurut kehormatan dan kewajibannya yang dilaksanakan oleh pemerintahan *Tokugawa*. Pada masa ini diperkirakan ada lebih dari 10.000 lembaga pendidikan *Terakoya* dengan angka partisipasi pendidikan hanya sekitar 40%. Pemerintahan *Meiji* yang ingin mewujudkan Jepang menjadi Negara industri yang modern, menjalankan pembaharuan dalam sistem pendidikan dan

melakukan kebijakan pendidikan wajib (*gimu kyouiku*) secara nasional. Pada masa ini banyak sekolah dasar dan sekolah menengah baru didirikan, dan angka partisipasi pendidikan mencapai 90% (Gambar 1). Data pada tahun 2004 memperlihatkan hampir 97,5 % dari anak-anak Jepang tamat pendidikan dasar dan menengah. Sementara yang melanjutkan ke pendidikan tinggi mencapai angka 49,9% (Gambar 2). Untuk mensukseskan program tersebut, pada masa itu banyak dikirim para pelajar Jepang ke Barat. Di samping itu juga didatangkan tenaga pengajar dari luar negeri (*oyatoi gaikokujin*) yang digaji oleh pemerintah. Para pengajar asing inilah yang membawa pemikiran pendidikan Barat serta buku-buku teks dan peralatan pengajaran ke Jepang.

Kebijakan politik dalam modernisasi sistem pendidikan Jepang pada zaman *Meiji* dapat diketahui dengan dilaksanakannya sistem pendidikan yang disebut dengan *Gakusei*. Sistem pendidikan tersebut dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Jepang pada tahun 1872 dan memuat rencana sistem pendidikan secara umum. Sistem pendidikan tersebut diatur dan dilaksanakan seluruhnya oleh Departemen Pendidikan yang juga membuat kurikulum dan buku-buku pelajaran. Dimasa ini banyak dibangun sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi. Sistem ini kemudian disempurnakan dengan sistem *Kyouikurei* pada tahun 1879. Sistem *kyouikurei* memuat aturan untuk menerapkan desentralisasi pendidikan dengan mengizinkan daerah membangun sekolah dan membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Di awal masa reformasi *Meiji* banyak kalangan menilai, reformasi pendidikan Jepang yang mulai dilakukan sejak masa restorasi *Meiji*, merupakan salah satu kunci keberhasilan Jepang dibidang ekonomi dan industri.

Konstitusi Jepang menyatakan kebijakan pendidikan nasional dasar, sebagai berikut: “Semua orang berhak untuk menerima pendidikan yang sama sesuai dengan kemampuan mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Semua orang wajib menyekolahkan anak laki-laki dan perempuan dan memperoleh pendidikan sebagaimana diatur oleh hukum. Wajib belajar tersebut harus gratis.” (Pasal 26)

Undang-undang Pendidikan, diberlakukan pada Maret 1947,

menetapkan secara lebih rinci tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan sesuai dengan semangat konstitusi. Di dalamnya ditetapkan sebagai prinsip-prinsip nasional khusus pendidikan: kesempatan yang sama, wajib belajar, pendidikan sekolah, pendidikan sosial, larangan pendidikan politik partisan, larangan pendidikan agama di sekolah umum nasional dan lokal dan larangan kendali pendidikan yang tidak tepat.

Namun demikian, keadaan sekitar pendidikan telah berubah sangat cepat seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, globalisasi, bertambahnya populasi orang tua dan rendahnya angka kelahiran serta gaya hidup keluarga yang makin permisif. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar anak-anak juga telah berubah secara signifikan, sehingga muncul berbagai masalah.

Berdasarkan keadaan ini, UU Dasar Pendidikan direvisi pada tanggal 15 Desember 2006. Revisi undang-undang ini jelas mengatur prinsip dasar pendidikan Jepang yang dianggap sangat penting. Pada saat yang bersamaan revisi undang-undang ini juga tetap mewarisi prinsip-prinsip universal yang ditetapkan dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut termasuk menempatkan “nilai” sebagai spirit utama dan nilai-nilai normatif yang memperlihatkan bahwa orang Jepang memiliki serta menghormati tradisi dan budaya yang telah dipupuk sebelumnya.

Kurikulum sekolah di Jepang disusun oleh bagian perencanaan kurikulum yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan (MEXT: *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*). Dalam panduannya tentang pendidikan dasar (*compulsory education*) disebutkan bahwa tujuan pendidikan secara umum yang diberikan dalam pendidikan dasar ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menumbuhkan fondasi untuk hidup mandiri dalam masyarakat
2. Untuk mengembangkan kemampuan masing-masing individu
3. Untuk mendorong kualitas dasar yang diperlukan bagi mereka untuk membentuk negara dan masyarakat.

Untuk menjamin kesempatan warga negara akan pendidikan dasar dan memastikan standar yang memadai, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya wajib belajar melalui pembagian

peran yang tepat dan kerja sama yang saling menguntungkan. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk pendidikan wajib di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Adanya tanggung jawab bersama dan kerja sama yang baik antara orang tua, sekolah, pemerintah pusat, dan daerah, serta masyarakat setempat memegang peran penting dalam menyukseskan pendidikan di Jepang ini. Pemerintah pusat dan daerah wajib berupaya untuk meningkatkan pendidikan di masyarakat dengan mendirikan perpustakaan, museum, *community hall*, dan fasilitas pendidikan sosial, membuka penggunaan fasilitas sekolah, memberikan kesempatan untuk belajar, memperoleh informasi yang relevan, dan cara lain yang sesuai.

Panduan kurikulum di sekolah disebut *Gakushu Shidouyouryou* (GS) yang diakui secara hukum sehingga pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi hukum. GS merupakan panduan kurikulum untuk SD (*shougakkou*), SMP (*chuu-gakkou*), SMP-SMA satu atap (*chuutou-kyouiku-gakkou*), SMA (*koutou-gakkou*), dan SLB (*tokubetsu-shien-gakkou*). Sedangkan untuk panduan kurikulum Taman Kanak-Kanak (*youchien*) disebut *youchien-kyouiku-youryou*.

Rencana Reformasi Pendidikan

Menteri MEXT Mr. Hakubun Shimomura mengatakan ingin mengubah secara mendasar sistem sekolah pasca perang Jepang untuk mengajar anak-anak tentang tradisi sejarah bangsa dan budaya. Menteri Shimomura dikenal sebagai politikus konservatif di LDP dan dipercaya akan memainkan peran kunci dalam penyusunan platform kebijakan sayap kanan Partai Demokrat Liberal utamanya reformasi pendidikan yang akan dijadikan sebagai program prioritas dalam kabinet PM Shinzo Abe. Menteri Shimomura menyatakan bahwa banyak buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah Jepang memperlihatkan “pandangan mencela sejarah diri sendiri” dan bertekad untuk merevisi proses penyaringan dan mempertimbangkan perasaan negara-negara tetangga di Asia sebelum memutuskan isi buku mengenai sejarah tersebut. Menteri Shimomura mengutip bahwa ada anggapan “semangat Jepang” hilang setelah bencana gempa dan Tsunami yang melanda area Tohoku

tahun 2011. Shimomura mengatakan kabinet ini tidak menginginkan semangat harus kembali ke masa sebelum perang, tetapi sangat perlu mengajarkan anak-anak Jepang sejarah yang berusia lebih dari 2.000 tahun tentang tradisi dan budaya Jepang yang dirasa hilang pada generasi muda Jepang. Selama pascaperang, Shimomura mengatakan bahwa orang-orang Jepang kehilangan beberapa kualitas seperti ketekunan dan pertimbangan terhadap orang lain. Untuk itulah kabinet ini ingin mereformasi sistem pendidikan negara Jepang.

Menteri Shimomura merupakan anggota Parlemen Senior selama 6 periode dari Tokyo, sangat tertarik di bidang pendidikan terutama mengingat perjuangannya untuk menyelesaikan sekolah di tengah kesulitan keuangan setelah kehilangan ayahnya pada usia 9 tahun. Menteri Shimomura berhasil menyelesaikan SMAnyanya dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Universitas Waseda. Sembari kuliah di Waseda, Shimomura juga menjalankan sebuah Lembaga Bimbingan Belajar. Menteri Shimomura adalah teman dekat PM Abe dan menjabat sebagai sekretaris Kabinet pada saat PM Abe menjabat tahun 2006. Seperti Abe, Shimomura dianggap ultrakonservatif dan segera setelah pengangkatannya, ia mengumumkan bahwa pemerintah baru di bawah LDP akan mengeluarkan sekolah-sekolah yang pro dengan Korea Utara dari program bebas biaya.

PM Shinzo Abe melalui Menteri MEXT Shimomura menekankan perlunya reformasi pendidikan yang sangat penting untuk membangun bangsa lebih kuat. Untuk kembali membuat Jepang yang kuat, penting untuk menghidupkan kembali pendidikan anak-anak yang akan bertanggungjawab untuk masa depan negara itu. Hal ini ditekankan PM Abe saat pertemuan pertama Dewan Reformasi Pendidikan. Kebangkitan pendidikan adalah prioritas utama, seperti halnya kebangkitan ekonomi. Pada pertemuan pertama Dewan ini sekaligus pertanda dimulainya kembali Dewan Pendidikan yang pernah dibentuk oleh Abe pada saat menjabat PM pada tahun 2006. Dewan ini akan bertemu dua kali dalam sebulan. Dewan ini juga akan mengkaji apakah akan mengubah sistem pendidikan yang mengacu pada 6-3-3-4 atau 6 tahun pendidikan SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA dan 4 tahun pendidikan tinggi

PM Abe dan Menteri Shimomura juga mendukung pandangan sayap kanan yang sama pada isu-isu sejarah, termasuk kebutuhan untuk meninjau pernyataan tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono yang mengakui kesalahan Jepang atas pasukan Kekaisaran yang memaksa perempuan dan anak perempuan untuk dijadikan sebagai budak seks di rumah bordil militer di seluruh Asia selama perang. Pemerintah telah memutuskan untuk mempelajari interpretasi sejarah Jepang, termasuk membantah Pernyataan Kono. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri yang juga membidangi sains dan teknologi, Shimomura mengatakan juga berniat untuk meninjau target bebas tenaga nuklir yang diperkenalkan oleh Partai Demokrat pada masa pemerintahan sebelumnya, akan dipertahankan meskipun tahun 2011 telah terjadi kebocoran di pabrik Fukushima No 1.

Pada tanggal 31 Januari 2013, 15 anggota Dewan Pendidikan dibentuk atas inisiatif Perdana Menteri Shinzo Abe. PM Abe mengatakan bahwa dewan ini dibentuk untuk membangun kembali Jepang yang kuat. Hal ini sangat penting untuk menyadarkan pendidikan anak-anak Jepang, yang akan membawa masa depan Jepang pada pundak mereka. Selanjutnya Abe menyatakan bahwa tujuan besar dari pembentukan Dewan ini untuk memastikan bahwa anak-anak Jepang memperoleh dan memiliki kemampuan dan kesadaran akademik serta dapat masuk ke dalam peringkat level dunia.

Kabinet PM Abe nampaknya lebih tertarik mengembangkan anak-anak yang akan berguna untuk mencapai tujuan nasional daripada mengembangkan anak-anak yang mementingkan kepentingan individual seperti pemikiran independen dan kritis. Kabinet ini juga lebih mementingkan untuk mengembangkan anak-anak yang nantinya akan berkontribusi pada pengembangan kesehatan masyarakat melalui kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spontanitas. Dewan ini juga akan mengintervensi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalisir masalah serius seperti penyalahgunaan fisik oleh para guru dengan mengatasnamakan hukuman kepada siswa. Sebetulnya Dewan Pendidikan ini pernah terbentuk pada masa Abe menjadi PM pada tahun 2006 di mana pada saat itu Dewan ini mengusulkan sistem pembaharuan pada sertifikasi

guru. Hanya sayangnya, sistem ini tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 2006 itu juga Dewan Pendidikan merevisi UU Pendidikan untuk menanamkan rasa patriotisme pada anak-anak.

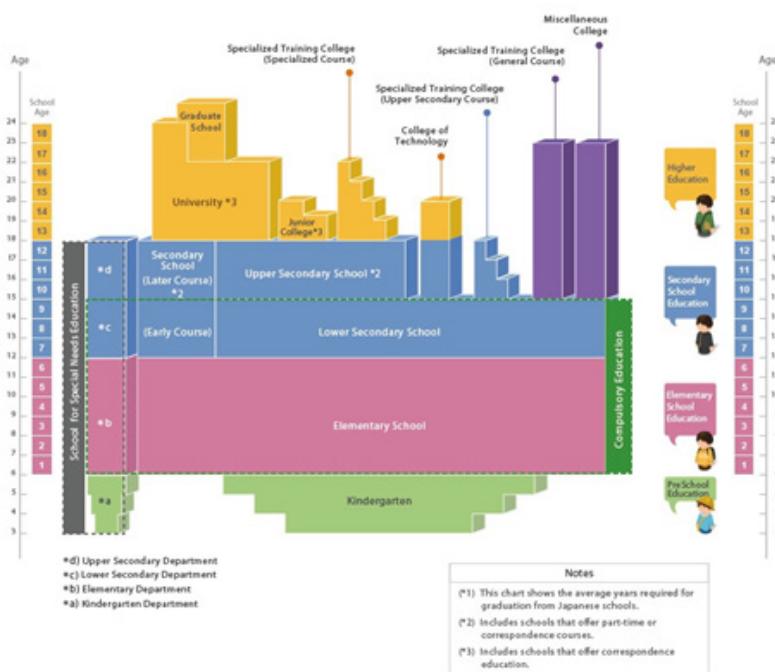
Para anggota Dewan Pendidikan umumnya sangat konservatif dan secara ideologis sangat dekat dengan ideologi PM Abe. Perwakilan Persatuan Guru Jepang yang dianggap berhaluan kiri tidak dimasukkan ke dalam Dewan tetapi Kepala Federasi Guru Konservatif dimasukkan ke dalam anggota Dewan Pendidikan. Beberapa Kepala Sekolah SMA yang beraliran konservatif juga dimasukkan ke dalam anggota Dewan Pendidikan. Pembentukan Dewan Pendidikan pada kenyataannya akan menyulitkan administrasi pendidikan pemerintah, karena sebetulnya MEXT mempunyai Dewan Pusat Pendidikan yang selama ini berfungsi sebagai penasehat dari Menteri MEXT. Pada saat yang sama Partai LDP juga memiliki kantor implementasi pendidikan. Walaupun demikian, Shimomura menekankan bahwa Dewan Pendidikan akan mengerjakan kebijakan dan meletakkan arah pendidikan, sedangkan Dewan Pusat Pendidikan akan bekerja untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan dan mengukur keberhasilan dari suatu program. Dewan Pendidikan tampaknya akan menjadi roda kelima tetapi bukan roda cadangan. Salah satu tugas pertama dari Dewan ini adalah membuat draf yang akan diajukan ke parlemen untuk memecahkan masalah penyiksaan antar murid dan penyiksaan oleh guru dengan dalih hukuman kepada siswa.

2

Sistem Pendidikan: Pendidikan Karakter Berbasis Pembiasaan bukan Hafalan

Sistem sekolah modern Jepang dimulai pada tahun 1872. Hukum Pendidikan dan Pendidikan Sekolah diberlakukan pada tahun 1947 dimana pada waktu itu sistem 6-3-3-4-tahun pendidikan sekolah diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip kesempatan yang sama untuk pendidikan.

Japanese School systems



Gambar 2.1 Bagan Sistem Pendidikan di Jepang

SMA yang pertama kali didirikan pada tahun 1948, menawarkan sistem waktu penuh (*full-time*) dan paruh waktu (*part-time*), dilanjutkan pada tahun 1961 dimana sistem korespondensi dimasukkan ke dalam salah satu sistem pembelajaran di SMA. Sistem baru untuk universitas dimulai pada tahun 1949. Sistem *junior college* didirikan pada tahun 1950 dan secara permanen disahkan pada tahun 1964, menyusul amandemen UU Pendidikan Sekolah. Pendidikan tinggi yang berbasis teknologi (dikenal dengan *College of Technology, Koutou Senmon Gakko*) dimulai sebagai sebuah institusi pendidikan pada tahun 1962 untuk menyediakan lulusan SMP dengan institusi pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi (2 tahun pendidikan setingkat SMA dan 3 tahun setingkat akademi). Semula yang diajarkan adalah ilmu perkapalan dan kelautan, tapi sekarang hampir semua cabang ilmu teknik ditawarkan.

Tahun akademik di Jepang dimulai pada 1 April dan berakhir tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Jepang terkenal dengan disiplin dan aturannya yang ketat hanya membolehkan anak-anak yang telah berusia minimal enam tahun untuk mulai pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Jika anak umurnya kurang dari enam tahun, meskipun kurang dari sehari tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah dasar dan harus menunggu tahun berikutnya.

1.1. Tingkatan Pendidikan

1.1.1. Pendidikan Pra Sekolah

TK (*Youchien*)

Anak-anak yang telah berusia tiga tahun ke atas dapat mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak (TK), baik negeri maupun swasta. TK ada juga yang merangkap langsung sebagai tempat penitipan anak yang dapat menerima anak untuk dititipkan dari usia bayi hingga menjelang masuk sekolah dasar dari pukul delapan pagi hingga pukul enam sore. Setiap anak yang berusia tiga tahun dan lima tahun dapat mengikuti program TK yang lama

pendidikannya adalah antara dua sampai tiga tahun. TK di Jepang disebut *youchien*. Sedangkan anak-anak yang lebih muda lagi dapat dimasukkan ke program *play group* atau disebut *hoikuen*. Umumnya anak-anak yang masih bayipun dapat dititipkan ke *hoikuen* dengan syarat ibunya harus bekerja/belajar sehingga tidak punya waktu untuk merawat anaknya. Khusus untuk *hoikuen* berada di bawah Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

TK bertujuan membantu anak-anak pra-sekolah mengembangkan pikiran dan tubuh mereka dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan edukatif. TK melayani anak-anak berusia 3, 4 dan 5. Tujuan pendidikan di Taman Kanak-Kanak yang berpusat pada emosi, sikap, dan lain lain adalah sebagai dasar bagi anak-anak untuk merangkul semangat hidup diharapkan bisa dikembangkan pada saat mereka meninggalkan Taman Kanak-Kanak, dengan mengintegrasikan aspek perkembangan anak: kesehatan (fisik dan mental), hubungan manusia (hubungan antara anak dan orang lain), lingkungan, bahasa, dan ekspresi (perasaan dan emosi). Dalam pelaksanaannya, anak-anak diajarkan berbagai kebiasaan-kebiasaan misalnya: kebiasaan dalam makan, membuang sampah, bermain dan membereskan mainan, disiplin dalam hal membaca, berolah raga, mengucapkan salam, bagaimana bekerjasama dengan teman, berani tampil di depan orang banyak, bagaimana bersikap dengan orang tua, kakek, nenek, bersahabat dengan alam, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya dengan pendekatan anak-anak yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan.

1.1.2. Pendidikan Wajib (Wajib Belajar Sembilan Tahun)

Pendidikan wajib di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditujukan untuk anak-anak berusia enam sampai 15 tahun. Selain itu juga terdapat Sekolah Berkebutuhan Khusus (SLB) tingkat dasar dan menengah. Wajib belajar di Jepang berlangsung sembilan tahun yaitu SD dan SMP. Semua anak yang berusia enam tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan SD selama enam tahun dan selanjutnya juga harus melanjutkan ke SMP selama tiga tahun.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mendapatkan sanksi. Anak-anak memasuki SD dan SMP negeri yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, tetapi diperkenankan juga untuk memilih sekolah swasta yang kemungkinan berada jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Namun biasanya ada ketentuan jarak tempuh tidak melebihi satu jam. Sehingga hampir tidak ada murid yang diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Semua murid dibiasakan sejak dari kelas 1 sekolah dasar berangkat dan pulang sendiri dengan cara berombongan. Biasanya dipandu oleh murid dari kelas yang tertinggi. Jepang yang terkenal dengan aturan kedisiplinan (hidup *by rule*) ternyata sudah membiasakan belajar teratur sejak mereka masuk TK. Kebiasaan didapat dengan contoh bukan dengan perkataan ternyata dihayati betul oleh para murid di Jepang.

Sekolah Dasar (*Shougakkou*)

Semua anak-anak yang telah mencapai usia 6 tahun wajib untuk mengikuti sekolah dasar selama enam tahun. Sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pendidikan umum dasar kepada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisik mereka.

Anak-anak memasuki sekolah dasar (*shougakkou*) pada bulan April setelah ulang tahun ke-6 dan akan belajar di tingkat ini selama enam tahun. Mata pelajaran yang ada di sekolah dasar Jepang berdasarkan kurikulum dari kementerian pendidikan adalah bahasa Jepang (*kokugo*), aritmatika (*sansuu*), IPA atau *science* (*rika*), kebiasaan hidup (*seikatsu*), musik (*ongaku*), menggambar dan kerajinan (*zuga kousaku*), perekonomian keluarga (*katei*), pendidikan fisik (*taiiku*), pendidikan moral (*doutoku*), studi lingkungan hidup, aktivitas khusus, dan studi terapan.

Di sekolah Jepang anak-anak lebih banyak belajar dari eksperimen dan pengamatan sehingga anak-anak mengerti dan memahami tidak hanya teori dan tidak mengandalkan hafalan. Di sini anak-anak diajak memahami setiap materi dengan pengalaman mereka. Selain itu, hampir semua kegiatan sekolah dilakukan anak-anak dengan berkelompok. Mereka bekerja sama dalam kelompok. Dengan metode ini diharapkan anak-anak akan terlatih untuk kerja sama, toleransi, berpikir kritis, dan saling membantu antara anak

yang pandai dan kurang pandai untuk menyelesaikan tugas.

Perbedaan nyata terlihat juga pada mata pelajaran *seikatsu* (kebiasaan hidup). Mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak dengan cara hidup mandiri sehari-hari. Daripada mulai mengajarkan IPA atau IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru menyelesaikan pembelajaran di TK-nya, serta lebih difokuskan pada kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas.

Pelajaran bahasa Jepang dan berhitung diajarkan lebih banyak dibandingkan pelajaran lainnya. Pendidikan olah raga juga menjadi mata pelajaran yang diajarkan dalam jumlah yang melebihi mata pelajaran selain bahasa dan berhitung. Sekolah-sekolah agama diperkenalkan mengajarkan agama (Kristen, Buddha, Sinto) sebagai bagian dari pendidikan moral. Selain pendidikan akademik, pendidikan estetika berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar.

1.1.3. Pendidikan Menengah

Anak yang telah berusia enam tahun dapat masuk sekolah dasar pada 1 April dan belajar selama enam tahun. Setelah tamat dari Sekolah Dasar dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama selama tiga tahun. Pendidikan wajib sembilan tahun gratis atau bebas biaya bagi seluruh murid termasuk siswa asing. Sekolah Menengah Atas terbagi dua yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) umum dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMAK). SMP dan Sekolah Berkebutuhan Khusus (tingkat dasar dan menengah) negeri bebas dari biaya pendidikan. Pada semua level tingkatan tidak dikenal adanya sistem perangkingan di kelas dan tidak ada siswa yang tinggal kelas. Sistem evaluasi pun diberikan tidak dalam bentuk angka tapi dalam bentuk grade dan verbal, sesuai dengan tingkatan kemampuan yang diharapkan. Contoh rating system yang diberikan adalah: “3” untuk *working above expectation or grade level*, “2” untuk *working at grade level expectation* dan “1” untuk *working below expectation/or grade level*,

1. Sekolah Menengah Pertama (*Chugakkou*)

Semua anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah dasar wajib untuk belajar di sekolah menengah selama tiga tahun sampai akhir tahun ajaran di mana mereka mencapai usia 15. Sekolah menengah pertama wajib untuk anak-anak antara usia 12 dan 15 di mana di sekolah ini diberikan pendidikan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan mental dan fisik mereka, atas dasar pendidikan yang diberikan di sekolah dasar.

2. Sekolah Menengah Atas (*Koto-Gakkou*)

Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah dasar dan menengah pertama dapat melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas. Siswa biasanya harus mengambil ujian untuk masuk sekolah menengah atas. Di SMA ini ada tiga pilihan program yaitu program sekolah penuh (*full-time*), paruh waktu (*part-time*) dan korespondensi. Program sekolah penuh berlangsung selama tiga tahun, sedangkan program paruh waktu dan korespondensi selama tiga tahun atau lebih. Program paruh waktu dan korespondensi ditujukan untuk pekerja muda yang ingin melanjutkan studi menengah atas mereka dengan cara yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Semua program ini akan mendapatkan ijazah atau sertifikat pendidikan menengah atas. Dalam hal isi pengajaran yang diberikan, SMA dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: umum, program khusus dan terpadu.

Program Umum memberikan pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang ingin maju ke pendidikan tinggi dan mereka yang akan mendapatkan pekerjaan tapi belum memilih pilihan kejuruan tertentu.

Program khusus dimaksudkan untuk memberikan pendidikan khusus kejuruan atau lainnya bagi siswa yang telah memilih area kejuruan tertentu sebagai karir masa depan mereka. Program ini dapat lebih lanjut diklasifikasikan menjadi: pertanian, industri, perdagangan, perikanan, ekonomi rumah tangga, keperawatan, ilmu-matematika, pendidikan jasmani, musik, seni, bahasa Inggris dan kursus lainnya.

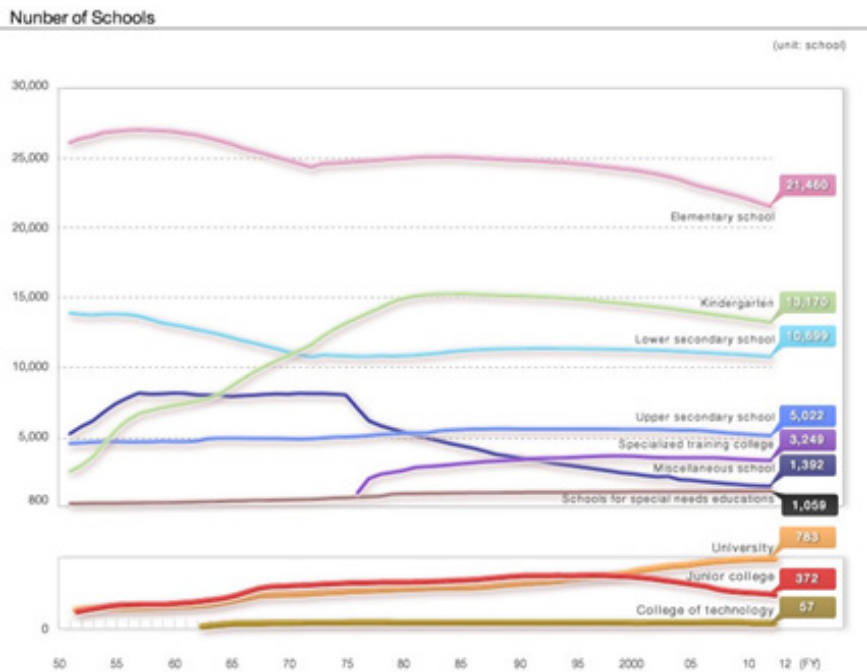
Program Terpadu diperkenalkan pada tahun 1994. Program ini menawarkan berbagai bidang studi dan mata pelajaran baik dari program umum dan program khusus, untuk memenuhi kepentingan, kemampuan dan bakat siswa yang beragam, serta rencana karir masa depan mereka.

3. *Secondary Schools (Chuto-kyoiku-gakkou)*

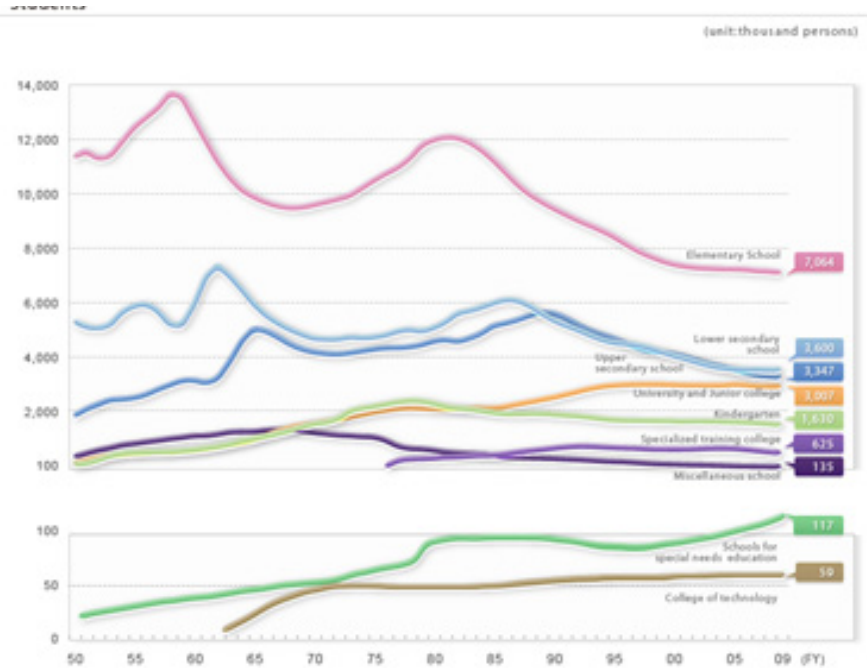
Pada bulan April 1999, tipe baru sekolah pendidikan menengah enam tahun, yang disebut “Sekolah Menengah” diperkenalkan ke sistem sekolah Jepang. Sekolah menengah mengkombinasikan pendidikan sekolah menengah atas dan pertama dalam rangka memberikan pendidikan SMP, pendidikan umum dan khusus menengah atas sampai 6 tahun. Pada prakteknya, pendidikan 3 tahun pertama sama dengan pendidikan yang diberikan SMP dan 3 tahun berikutnya sama dengan yang diberikan pada SMA.

4. Sekolah untuk Pendidikan Kebutuhan Khusus (*Tokubetsu-Shien-Gakkou*)

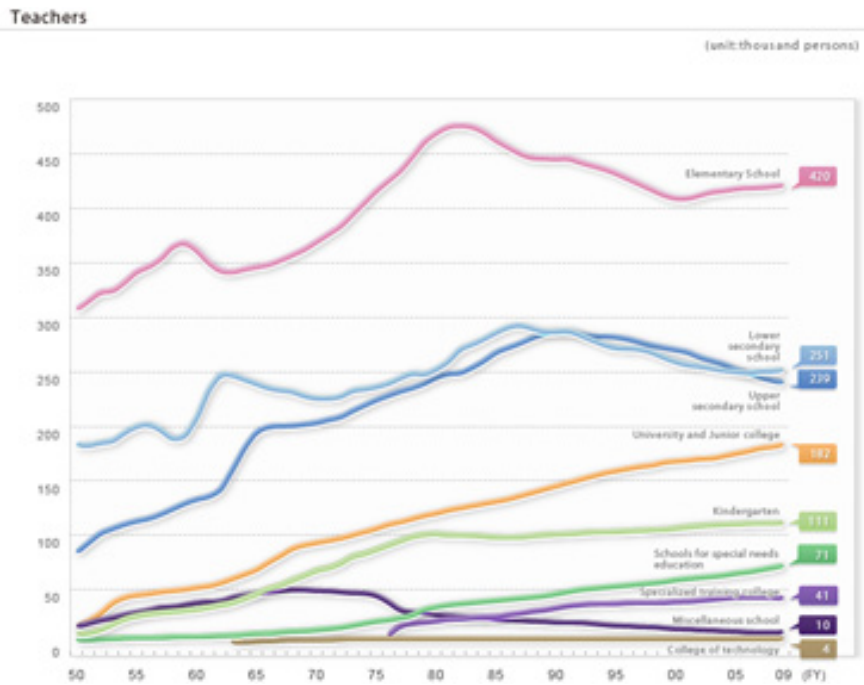
Pendidikan untuk anak dengan kebutuhan khusus bertujuan memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sekolah ini terdiri dari empat tingkatan, yaitu TK, SD, SMP dan SMA (SD dan SMP adalah pendidikan wajib). Sistem sekolah sekarang memungkinkan sekolah untuk menerima beberapa jenis penderita cacat sejak tahun 2007. Implementasi dari kebijakan ini sudah menyebar ke seluruh negeri. Pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus disediakan juga di sekolah reguler, di mana kelas khusus yang kecil ini diperuntukkan buat anak-anak yang mempunyai cacat ringan.



Gambar 2.2 Jumlah Sekolah pada Tiap Jenjang Pendidikan di Jepang



Gambar 2.3 Jumlah Pelajar pada Tiap Jenjang Pendidikan di Jepang



Gambar 2.4 Jumlah Guru pada Tiap Jenjang Pendidikan di Jepang

3

Kurikulum

Kurikulum yang dipakai oleh Sekolah di Jepang adalah kurikulum yang telah distandarkan secara nasional. Mata pelajaran yang distandarkan secara nasional antara lain bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Matematik, Sejarah, Olah Raga, Pendidikan Jasmani, Keterampilan dan Kesenian, *Science*, *Integrated Course*, dan *Home Room*. Walaupun begitu, setiap sekolah di masing-masing Prefektur mempunyai kebebasan untuk menyusun kurikulum sekolah. Jadi untuk setiap daerah, kurikulum di mata pelajaran pilihan bisa saja berbeda. Pelajaran pilihan ditekankan pada jenjang kelas 2 dan 3 di mana jumlah kredit per jenjang rata-rata 30.

Kurikulum sekolah di Jepang meliputi tiga aspek yaitu, *subjects* (*kamoku*), pendidikan moral (*doutouku;kyouiku*) dan *extra-kurikuler*. Subjects atau mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib di SD, mata pelajaran wajib dan pilihan di SMP dan SMA. Pendidikan moral tidak berupa mata pelajaran khusus seperti di Indonesia, tetapi berupa konseling selama satu jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan oleh guru wali kelas. Tidak ada penilaian atau nilai raport untuk mata pelajaran ini. *Extra kurikuler* dapat berupa kegiatan olah raga, seni, kegiatan OSIS, atau kegiatan sekolah.

Kurikulum di level sekolah disusun dengan kendali penuh dari *The Board of Education* di tingkat *prefectur* dan *municipal* (distrik). Karena kedua lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan

kurikulum Jepang masih sangat kental sifat sentralistiknya. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Central Council for Education* (*chuuou shingi kyouiku kai*) pada tahun 1997 memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Beberapa hal berikut harus diperhatikan ketika sekolah menyusun kurikulumnya:

1. Mengacu kepada standar kurikulum nasional
2. Mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa
3. Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar
4. Memperhatikan step perkembangan siswa
5. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran pendidikan/jurusan pada level SMA

Secara garis besar penyusunan kurikulum sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan sekolah
2. Mempelajari standar kurikulum, dan korelasinya dengan tujuan sekolah
3. Menyusun mata pelajaran wajib dan pilihan untuk SMP dan SMA
4. Mengalokasikan hari efektif sekolah dan jam belajar

Contoh kurikulum di salah satu SMA negeri di Jepang dapat di lihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kurikulum SMA di Jepang

No	Kelas	Mata Pelajaran
1	I	Bahasa Jepang (4 kredit), Geografi A (2), Math I (3), <i>Integrated Science A</i> (2), Olah Raga (3), Pendidikan Jasmani (1), Kesenian & Ketrampilan (2, pilihan: kaligrafi, musik, <i>art</i>), Bahasa Inggris (3), Teknologi Informatika (3), <i>Industry, society</i> dan manusia (2), Pilihan wajib (4), terdiri dari : Bhs Inggris dan Math A, Bhs Inggris dan Literatur kuno, <i>Integrated Science B</i> dan <i>Math A</i>), <i>Home room</i> (1)

2	II	Sejarah dunia (2), Masyarakat modern (2), <i>Science</i> (2), pilihan : fisika I, biologi I, kimia I), Olah Raga (3), Pendidikan Jasmani (1), Keterampilan Keluarga (2), <i>Integrated Course</i> (1), Mata pelajaran pilihan sesuai jurusan (12), Mata pelajaran pilihan bebas (4), <i>Home room</i> (1)
3	III	Olah Raga (2), Keterampilan Keluarga (2), <i>Integrated Course</i> (2), Mata pelajaran pilihan jurusan (16), Mata pelajaran pilihan bebas (7), <i>Home room</i> (1),

4

Sistem Ujian Kelas dan Ujian Akhir pada SMA

Sistem ujian sekolah-sekolah di Jepang menarik untuk dicermati. Pendidikan dasar (*shougakkou*) tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas I secara otomatis akan naik ke kelas II, demikian seterusnya. Ujian akhirpun tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok pendidikan wajib (*compulsory education*), sehingga siswa yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke SMP.

Walaupun begitu, sesekali guru tetap melakukan ujian untuk mengecek daya tangkap siswa dan penilaian ujian pun tidak dengan angka tetapi dengan huruf: A, B, dan C, kecuali untuk matematika. Dari kelas 4 hingga kelas 6 juga dilakukan test IQ untuk melihat kemampuan dasar siswa. Data ini dipakai bukan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan hasil test IQ-nya, tetapi untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan di atas normal atau di bawah normal. Perlu diketahui, siswa-siswa di Jepang tidak dikelompokkan berdasarkan kepandaian, tetapi semua anak dianggap bisa mengikuti pelajaran, sehingga kelas berisi siswa dengan beragam kemampuan akademik.

Wajib Belajar di Jepang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk mengenyam pendidikan selama sembilan tahun (SD dan SMP) dengan menggratiskan SPP, dan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak (ditetapkan dalam

Fundamental Law of Education). Untuk memudahkan akses, maka di setiap distrik didirikan SD dan SMP walaupun daerah terpencil dan siswanya minim (per kelasnya hanya 10 sampai 11 siswa). Orangtua pun tidak boleh menyekolahkan anak ke distrik yang lain, jadi selama masa Wajib Belajar, anak bersekolah di distrik masing-masing,

Tentu saja mutu sekolah negeri di semua distrik sama, dalam arti fasilitas sekolah, bangunan sekolah, tenaga pengajar dengan persyaratan yang sama (guru harus memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh *Educational Board* setiap Prefektur. Oleh karena itu mutu siswa SD dan SMP di Jepang yang bersekolah di sekolah negeri dapat dikatakan sama. MEXT mengondisikan *equality* di semua sekolah. Saat ini tengah digalakkan program reformasi yang memberi kesempatan kepada sekolah untuk berkreasi mengembangkan proses pendidikannya, tetapi tetap saja dalam pantauan MEXT.

Di tingkat SMA, ada dua kali ujian, mid test dan final test, tetapi tidak bersifat wajib ataupun nasional. Di beberapa *Prefektur* yang melaksanakan ujian, final test dilaksanakan serentak selama tiga hari, dengan materi ujian yang dibuat oleh sekolah.

Berdasarkan standar dari *Educational Board* di setiap *prefektur*, penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstra kurikuler, *mid test* dan *final test*. Dengan sistem seperti ini, tentu saja hampir 100% siswa naik kelas atau dapat lulus. Selanjutnya siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi kali ini mereka harus mengikuti ujian masuk SMA yang bersifat standar, artinya soal ujian dibuat oleh *Educational Board* di setiap Prefektur. Contoh di Propinsi Aichi (Jepang tengah), SMA dikelompokkan dengan pengelompokan A, dan B. Pengelompokan tersebut dibuat dalam proses memilih SMA. Setiap siswa dapat memilih satu sekolah di kelompok A dan satu sekolah di kelompok B. Jika si siswa lulus dalam kelompok A, maka secara otomatis dia gugur dari kelompok B. Dalam memilih SMA, siswa berkonsultasi dengan guru, orang tua atau disediakan lembaga khusus di *Educational Board* yang bertugas melayani konsultasi dalam memilih sekolah. Ujian masuk pun hampir serentak di seluruh Jepang dengan bidang studi yang

sama yaitu, Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Matematika, IPS, dan IPA. Di level ini siswa dapat memilih sekolah di distrik lain.

Seperti telah dijelaskan di atas, siswa SMA tidak mengikuti ujian kelulusan secara nasional, tetapi ada beberapa *prefektur* yang melaksanakan ujian. Penilaian kelulusan siswa berbeda di setiap prefektur. Mengingat angka *drop out* siswa SMA meningkat di tahun 1990-an, maka beberapa sekolah tidak mengadakan ujian akhir, jadi kelulusan hanya berdasarkan hasil ujian harian.

Untuk masuk universitas, siswa lulusan SMA diharuskan mengikuti ujian masuk universitas yang berskala nasional. Ini yang dianggap “neraka” oleh sebagian besar siswa SMA. Sebagian dari mereka memilih untuk belajar di *juku* (semacam bimbingan belajar atau les privat) untuk dapat lulus ujian masuk universitas.

Ujian masuk perguruan tinggi dilakukan dua tahap. Pertama secara nasional, di mana soal ujian disusun oleh MEXT, terdiri dari lima subjek, sama seperti ujian masuk sekolah SMA. Selanjutnya siswa harus mengikuti ujian masuk yang dilakukan masing-masing universitas, tepatnya ujian masuk di setiap fakultas. Skor kelulusan adalah akumulasi ujian masuk nasional dan ujian di setiap PT.

Skor hasil Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tidak diumumkan, tetapi jawaban ujian diberitakan melalui koran, televisi atau internet, sehingga siswa dapat mengira-ngira sendiri berapa total skor yang didapat. Siswa yang memilih Universitas dengan skor tinggi, tapi ternyata skornya tidak memenuhi batasan atau passing grade, dapat mengacu ke pilihan universitas kedua. Namun jika skornya tidak mencukupi, maka siswa tidak dapat masuk universitas. Selanjutnya dia dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi swasta atau rnenjalani masa ronin (menyiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk di tahun berikutnya) di *prepatory school* (*yobikou*). Penilaian mutu pendidikan di Jepang, dengan, kata lain dilakukan dengan menstandarkan ujian masuk sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Tentu saja sistem ini bisa berjalan karena pemerintah di Jepang pun berusaha maksimal untuk menyetarakan kondisi pendidikan umumnya, dalam arti menyediakan infrastruktur yang sama untuk setiap jenjang pendidikan di daerah.

5

Peningkatan Kemampuan Guru

Jepang sangat memperhatikan kemampuan guru karena mereka menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan pendidikan sekolah sangat tergantung pada kualitas guru. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengembangan dan pelatihan guru. Awal Maret 2009, MEXT menerapkan sistem untuk memperbaharui sertifikasi para guru yang mengharuskan pendidik untuk memperoleh pengetahuan yang paling canggih dan keterampilan setiap 10 tahun. MEXT mendorong Dewan Pendidikan untuk melakukan inisiatif untuk secara akurat menilai kemampuan dan prestasi guru dan mencerminkan penilaian tersebut dalam tugas, remunerasi, dan sebagainya. Pada bulan April 2008, hal ini menjadi wajib untuk Dewan Pendidikan di setiap prefektur untuk memberikan pelatihan tambahan untuk guru-guru yang kinerjanya tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu MEXT melakukan promosi secara adil kepada semua guru untuk memastikan bahwa guru yang tidak memadai tidak akan dilibatkan dalam proses pendidikan. MEXT juga memulai kajian komprehensif dari kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru, termasuk peningkatan program pelatihan guru di perguruan tinggi.

Peningkatan kemampuan guru termasuk di dalamnya mengembangkan kemampuan menulis ilmiah. Laporan tertulis para guru dikembangkan sebagai penelitian terpadu dan dipresentasikan di seminar-seminar pengembangan pendidikan. Ini dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh

MEXT bukan dari pemikiran bawah sehingga tidak bisa diterapkan secara optimal. Sistem sertifikat mengajar telah dikembangkan di Jepang sejak tahun 1886, yang hanya diberikan kepada guru yang lolos dalam ujian seleksi guru. Guru-guru tersebut bertugas di *Ordinary Normal School*, *Ordinary Middle School* dan *Girl High School*. Jenis sertifikat ada empat, yaitu sertifikat kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan non kelas. Perubahan jenis sertifikat dapat terjadi jika seorang guru telah memiliki pengalaman mengajar. Pada tahun 1892, pemberian sertifikat kepada guru pengajar *ordinary normal school* dibuat secara terpisah, dengan tetap mempertahankan sertifikat kelas satu dan kelas dua. Sedangkan kelas tiga dan non kelas diberikan kepada asisten guru. Tahun 1990 sistem sertifikasi sepenuhnya dipegang oleh MEXT dan lisensi hanya diberikan kepada lulusan sekolah keguruan atau fakultas pendidikan universitas. Bagi non lulusan fakultas pendidikan diperkenankan mengikuti ujian seleksi yang penanganannya dilakukan oleh komite khusus sertifikasi guru.

MEXT memberlakukan sistem *school councilor* di mana pada tahun 2003 tercatat hampir 7000 sekolah memiliki badan ini. Dengan kebijakan ini, guru-guru diharuskan

untuk mengikuti 'training penyegaran' setiap 10 tahun sekali. Dalam definisi MEXT, kriteria guru yang bermutu harus disesuaikan dengan era global dan perubahan struktur masyarakat Jepang. Perubahan struktur tersebut adalah semakin panjangnya daya hidup orang Jepang dan semakin menurunnya jumlah kelahiran. Sehingga menyebabkan masyarakat Jepang menuju kepada '*aging society*', yaitu masyarakat dengan populasi penduduk usia tua lebih banyak daripada penduduk usia muda. Sistem pengembangan profesionalisme guru di Jepang juga menganut sistem senioritas, yaitu guru-guru senior berkewajiban membimbing guru-guru baru..

Sistem sertifikat mengajar dalam era pendidikan modern Jepang, telah dikembangkan sejak tahun 1886. Sertifikat untuk guru SD hanya diberikan kepada guru lulusan sekolah umum, dan juga lolos ujian seleksi guru SD. Lisensi mengajar terbagi dua, yaitu lisensi nasional yang dikeluarkan oleh MEXT, dan lisensi lokal yang hanya berlaku di level

Prefektur dan ditetapkan oleh Gubernur. Lisensi lokal ada dua jenis yaitu dengan masa berlaku 5 tahun dan. lisensi dengan masa berlaku tanpa batas. Lisensi nasional diberikan kepada pemilik lisensi lokal yang telah mengajar selama lebih dari 5 tahun dan mempunyai skor kompetensi di atas standar. Tahun 1891, sertifikasi dikeluarkan oleh gubernur tanpa atau dengan tes kompetensi. Sedangkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri MEXT diberikan kepada guru tanpa melalui tes. Tahun 1913, lisensi hanya dikeluarkan oleh Gubernur dan berlaku nasional. Istilah lisensi nasional dan lokal kemudian dihapuskan.

Guru-guru yang akan bertugas di *Ordinary Normal School*, *Ordinary Middle School*, dan *Girl High School* memperoleh sertifikat jika mereka lulus dari Higher Normal School dan lolos tes. Jenis sertifikat ada empat, yaitu sertifikat kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan non kelas. Perubahan jenis sertifikat dapat terjadi berdasarkan masa mengajar. Pada tahun 1892, pemberian sertifikat kepada guru ordinary normal school dibuat secara terpisah dengan tetap mempertahankan sertifikat kelas satu dan kelas dua. Sedangkan kelas tiga dan non kelas diberikan kepada asisten guru.

Pelaksanaan sertifikasi guru berlangsung dua tahap, yaitu tahap pertama secara otomatis pemilik gelar sarjana atau lulusan sekolah keguruan, memperoleh sertifikat kelas satu, tanpa atau dengan mengikuti ujian khusus untuk menjadi guru. Sedangkan lulusan non sekolah keguruan atau kesarjanaan yang mengikuti ujian guru dan lolos akan memperoleh sertifikat kelas 2. Sertifikat kelas 1 dapat diperoleh oleh pemilik sertifikat kelas 2 setelah mengajar lebih dari satu tahun. Tahun 1894 lahir peraturan sertifikasi baru yang menghapuskan kelas-kelas sertifikasi, tetapi memberikan lisensi mengajar kepada semua lulusan universitas umum dan universitas khusus wanita yang berkecimpung di bidang pendidikan keguruan. Tahun 1896, hak memberikan sertifikasi guru diberikan sepenuhnya kepada rektor universitas. Tahun 1899 sertifikat diberikan untuk lulusan universitas negeri maupun swasta, college dan universitas asing. Tahun 1930, jumlah sekolah keguruan dibatasi hingga 6 buah dan 10 lainnya ditutup. Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru sekolah menengah, sertifikasi diberikan kepada lulusan Universitas /Keguruan dan juga sekolah tinggi.

Tahun 1949, klasifikasi lisensi mengajar dibagi tiga yaitu, *regular*, *temporary* dan *emergency*. Tipe *regular* ada dua jenis yaitu tipe 1 yang diberikan kepada lulusan pendidikan keguruan dan tipe 2 diberikan kepada lulusan non kependidikan setelah mengikuti tes. Hingga tahun 1960, di setiap *Prefektur* di Jepang telah diselenggarakan pusat pelatihan guru sains yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah pun menyediakan dana bagi guru-guru bidang studi sejenis untuk mengadakan pelatihan atau diskusi kelompok secara mandiri di pusat-pusat belajar ini. Pada tahun 1967, Pusat Pendidikan Nasional didirikan untuk memberikan kesempatan bagi para guru mengasah ketrampilan mendidik dan mengajar.

Sistem Sertifikasi Guru yang berlaku saat ini adalah hasil revisi panjang UU Sertifikasi tahun 1949. Revisi telah dilakukan berturut-turut pada tahun 1953, 1954, 1973, 1988, dan 1998. Berbagai polemik dalam revisi sistem sertifikasi guru dalam periode itu antara lain: kategori berdasarkan kelas-kelas memungkinkan munculnya ketidakharmonisan hubungan antar guru juga mempengaruhi tingkat kepercayaan orang tua dan siswa kepada guru. Guru akan disibukkan dengan upaya mendapatkan sertifikat dan akan melalaikan tugas utamanya untuk mendidik siswa dan mengembangkan kemampuan pribadi di mana terdapat ketidakjelasan sistem sertifikasi yang dilimpahkan kepada universitas. Kekuatan sertifikat yang dikeluarkan oleh universitas akan tak berarti jika pemerintah daerah dapat memberikan predikat guru kepada anggota masyarakat atau praktisi (Takakura, 1993).

Sistem sertifikasi guru yang diterapkan sekarang melalui sistem perkuliahan dengan kurikulum baku dan tes. Berdasarkan Peraturan Sertifikasi Tenaga Pendidik (*Educational Personnel Certification Law*) tahun 1998, setiap calon guru harus menjalani pendidikan guru di universitas atau sekolah tinggi yang telah diakreditasi oleh MEXT. Pada tahun 2003 terdapat 85% universitas di Jepang telah memperoleh akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan guru (Shigeyuki, et.al., 2004). Tahun 2003 sebanyak 60% guru SD adalah lulusan pendidikan keguruan yang dikelola oleh universitas, akademi atau sekolah tinggi, sedangkan 60% guru SMP dan 80% guru sekolah menengah atas adalah lulusan universitas non kependidikan (Shigeyuki, et.al., 2004).

Kurikulum yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikat mengajar terlihat pada Tabel 5.1 .

Tabel 5.1 Persyaratan Kurikulum/Kredit untuk Mendapatkan Sertifikat Mengajar

Jenis Lisensi	Syarat Dasar	Jumlah Kredit Wajib ambil di Universitas		
		MK Khusus subjek yang di ajar	MK Profesi	MK non khusus dan non profesi
Guru SD (Tipe I)	S1	8	41	10
Guru SMP (Tipe I)	S1	20	31	8

Mata kuliah (MK) khusus untuk menjadi guru Sekolah Dasar adalah Bahasa Jepang, Pendidikan Sosial, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Hidup dan Lingkungan, Musik, Menggambar dan Keterampilan, Home-making dan Pendidikan Jasmani. Sedangkan mata kuliah yang termasuk kategori MK profesi adalah: Falsafah Pendidikan, Teori Pendidikan, Kurikulum dan Metode Mengajar, Pembinaan Kesiswaaan dan Konsultasi karir, Seminar Umum, dan Praktek Mengajar. Calon guru juga wajib untuk mengambil mata kuliah Konstitusi Jepang, Pendidikan Jasmani, Bahasa Asing, serta Teknologi Informasi. Fenomena *aging society* dalam perubahan sosial masyarakat Jepang pun menjadi materi yang harus dikuasai oleh para pendidik dengan mengharuskan mahasiswa yang masuk perkuliahan sejak April 1998 untuk memiliki sertifikat pelayanan orang tua, sebagai jaminan kemampuan memberikan bimbingan kepada siswa SD dan SMP tentang penanganan orang berusia lanjut (Shigeyuki, et.al. 2004). MEXT mempunyai *survey* khusus untuk mendata berapa banyak guru-guru Jepang yang tidak layak mengajar atau sering disebut shidouryoku fusokukyouin, yang artinya guru dengan kemampuan membimbing terbatas. Survey ini diadakan sejak tahun 2002 dengan dasar pemikiran meningkatnya jumlah kriminalitas di kalangan pelajar Jepang. Berapa guru dinyatakan tidak layak mengajar menurut MEXT. Hasil survey itu kemudian dikompilasi pada tahun 2004 dan memberikan hasil bahwa semakin tua seorang guru semakin tidak layak guru memberikan pelajaran di depan kelas. Sebanyak 50% guru yang tidak layak mengajar berumur 40 tahun ke atas, padahal umur rata-rata guru di Jepang adalah

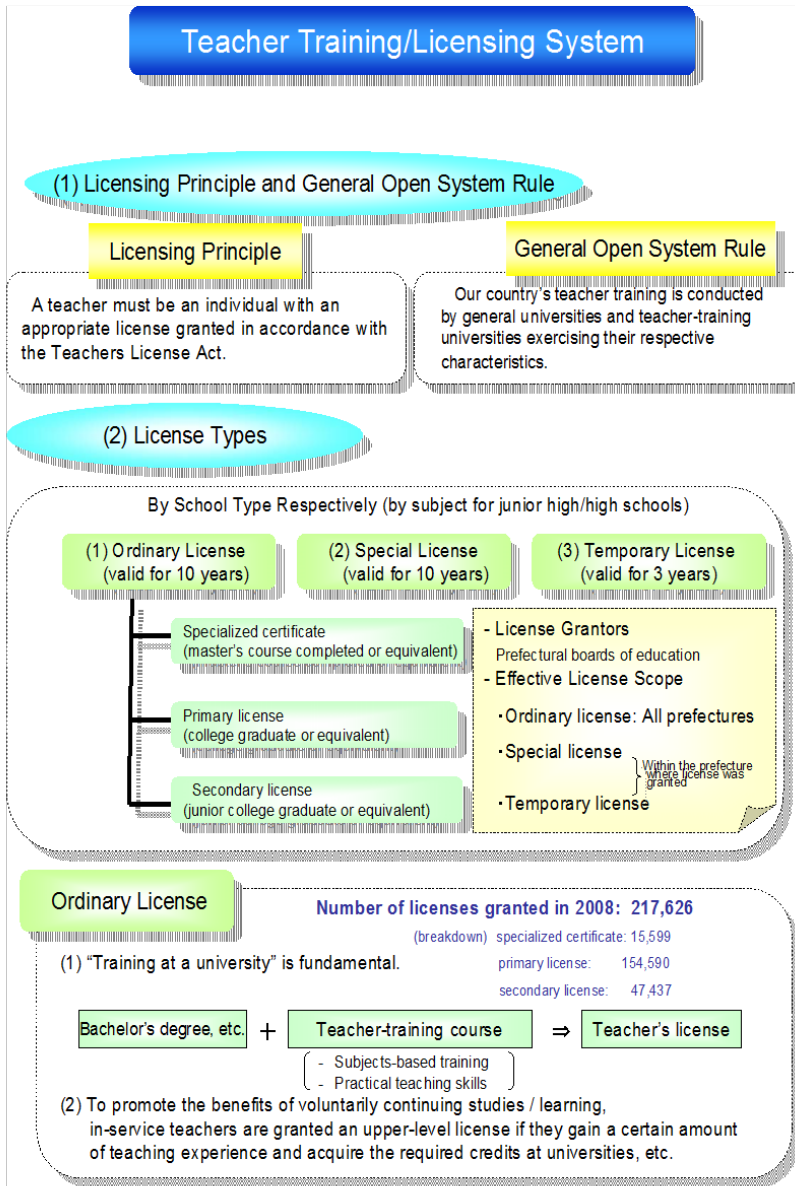
42 tahun. Sedangkan guru \neg guru yang berumur 50 tahun ke atas terdapat 34 % yang tidak layak. Guru-guru mudanya, berumur sekitar 20 atau 30 tahun ternyata masih fresh dan masih ingat teori-teori mendidik dengan benar. Untuk tingkat SD sebanyak 49%, SMP sebanyak 28%, dan SMA sebanyak 15% guru yang tidak layak mengajar. Yang menarik adalah bahwa Sekolah Berkebutuhan Khusus ternyata memiliki guru-guru yang terlatih dengan baik.

Data *survey* ini juga dipakai oleh MEXT untuk memberlakukan pembaharuan sertifikasi mengajar bagi guru yang mulai diuji cobakan tahun 2007. Pembaharuan ini berupa kewajiban untuk memperbaharui sertifikat mengajar setelah 10 tahun dengan mengikuti training yang diadakan oleh *The Board of Education* atau mengambil kredit di perguruan tinggi yang sudah ditentukan oleh MEXT.

Jepang melalui MEXT pada tahun 2001 mereformasi sistem pendidikannya yang disebut dengan *Rainbow Plan*. Reformasi pendidikan berjalan secara simultan sampai tahun 2007 dan ada beberapa poin yang masih dikembangkan hingga sekarang. Isi dari *Rainbow plan* itu adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan dasar skolastik siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada tiga pokok arahan yaitu pengembangan kelas kecil yang terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional.
2. Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran sekolah.
3. Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, di antaranya dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seni dan sosial lainnya.
4. Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan *school counselor*, komite sekolah yang beranggotakan orang tua dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat.

5. Melatih guru menjadi tenaga profesional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya.
6. Pengembangan universitas bertaraf internasional
7. Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan (MEXT, 2006).



Gambar 5.1 Skema untuk Sistem Pelatihan atau Lisensi Guru di Jepang

Special License

Number of licenses granted in 2008: 56

(total number of licenses granted from 1989-2008: 346)

"Teacher's" license granted to members of society who passed the educational personnel examination held by the board of education in the prefecture to welcome such individuals with excellent knowledge/experience who do not have licenses of teachers (Special license will be granted for each school type and subject)

- Requirements: 1) Must have professional knowledge/experience regarding the subject he/she will be in charge of
- 2) Must be eager and knowledgeable to have social influence on others and conduct the duties of a teacher

Temporary License

Number of licenses granted in 2008: 9,598

"Assistant teacher's" license granted as an exception only when any individuals with ordinary licenses cannot be hired.

- Granting Requirement: Must pass the educational personnel examination (personality, academic ability, practical skills, physical fitness) conducted by board of education in the prefecture

(3) Exceptions of Licensing Principle

(1) Special Part-time Lecturers

Number of notifications in 2008: 21,359

To welcome competent members of society to schools, those without a license can serve as part-time lecturers to teach certain areas of subjects (e.g., nursing, art, etc.).

(2) Special Subject In-Charge System

Total number from July 1, 2002-March 31, 2009:

Number of those in charge of elementary school subjects with junior high school license: 24,070

Number of those in charge of elementary school subjects with high school license: 4,608

Number of those in charge of junior high school subjects with high school license: 780

Those with junior high or high school teacher's license can serve as teachers, etc. of applicable subjects, etc. at elementary schools (e.g., junior high school science teacher could conduct a science class in an elementary school).

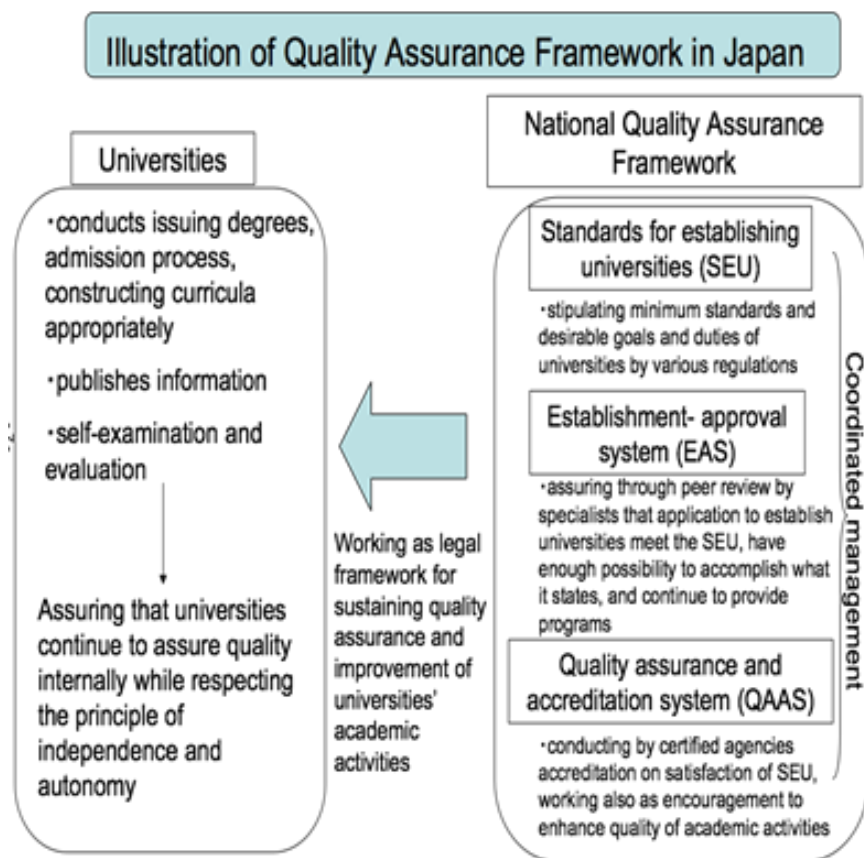
Those with high school teacher's license for special subjects, etc. can serve as teachers, etc. of applicable subjects, etc. at junior high schools.

Gambar 5.2 Lanjutan Skema dari Gambar 5.1

6

Sistim Penjaminan Mutu

Di Jepang, kerangka penjaminan mutu untuk pendidikan terdiri dari *Standards for Establishing University* (SEU), *the Establishment-approval System* (EAS) and *the Quality Assurance and Accreditation System* (QAAS). Kerangka penjaminan mutu ini dipercaya sebagai pengembangan dari kerangka penjaminan mutu sebelumnya, dengan menjamin mutu secara kontinyu dan tetap mengedepankan serta menghormati keberagaman universitas yang juga mempunyai kerangka penjaminan mutu secara spesifik. Walaupun begitu pemerintah tetap memonitoring hubungan antara ke tiga kerangka penjaminan mutu ini sehingga kualitas dan mekanisme jaminan mutu dapat terus ditingkatkan secara menyeluruh.



Gambar 6.1 Skema dari Penjaminan Mutu Pendidikan di Jepang

7

Pelaksanaan Ujian Nasional

Ujian Nasional SD dan SMP di Jepang bukan untuk kelulusan tetapi dipakai sebagai alat ukur kemampuan anak-anak yang akan lulus SD dan SMP. Pelaksanaannya pada tahun 2007 hingga 2009 melibatkan hampir semua sekolah (mendekati 100% namun ada beberapa daerah yang menolak). Pelaksanaan tahun ini yang berlangsung pada 20 April lalu agak unik, yaitu pengurangan jumlah sekolah yang diikuti dalam program ini (*chuusyutsu houshiki*) dan diterapkannya sistem *jisyusanka* (kebebasan memilih). Sistem seleksi itu adalah *survey* (*chousa*). Oleh karena itu, pemerintah sesuai dengan anggaran yang dimiliki dapat menerapkannya untuk semua sekolah atau memilih sekolah-sekolah partisipan. MEXT memilih beberapa sekolah negeri dan swasta, dan ada beberapa sekolah yang memilih untuk ikut secara mandiri. Data menunjukkan bahwa rasio sekolah negeri yang ikut mendaftar sekitar 80% untuk SD dan 75% SMP. Tetapi partisipasi sekolah swasta menurun dari 50% menjadi 24%. Mata pelajaran yang diujikan hanya dua, yaitu Bahasa Jepang (*kokugo*) dan berhitung (*sansu*) untuk SD dan untuk SMP adalah bahasa Jepang (*kokugo*) dan matematika (*suugaku*). Ada 13 prefektur yang menunjukkan angka partisipasi 100%, artinya semua SD dan SMP-nya ikut serta. Ujian nasional diberlakukan pertama kali pada tahun 1956 untuk sebagian siswa SD, SMP dan SMA. Lalu pada tahun 1961 menjadi wajib untuk siswa SMP kelas 2 dan 3, kemudian tahun 1962, ujian untuk SMA berakhir (dihentikan). Tahun 1965, karena protes dari pergerakan guru dan juga masyarakat semakin menguat, maka

ujian untuk SMP diterapkan dengan sistem partisipasi mandiri. Untuk sementara waktu Ujian nasional dihapuskan dan diadakan kembali pada tahun 1982 dengan sistem yang sama yaitu tidak wajib., Kemudian Ujian Nasional untuk SMA diselenggarakan kembali pada tahun 2002. Lalu dihentikan lagi, dan kembali dibicarakan dalam Kementrian dan DPR Jepang. Usulan penerapannya kembali menguat semenjak prestasi anak-anak SD dan SMP Jepang dalam PISA dan TIMMS menurun. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menerapkannya kembali sejak 2007 hingga sekarang.

8

Sistim Pendanaan Sekolah

Pendidikan adalah fondasi bagi keberadaan masyarakat Jepang dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keberhasilan Jepang masa depan tergantung pada fondasi ini. Secara khusus, pendidikan wajib di Jepang memiliki dua tujuan 1) membina generasi berikutnya yang akan bertanggung jawab untuk membentuk bangsa dan masyarakat dan 2) membangun landasan untuk memungkinkan setiap anak untuk hidup bahagia dan membentuk dasar bagi semua pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah menempatkan tujuan nasional mereka dan mempromosikan reformasi pendidikan. Hal ini mendorong Jepang untuk membuka era baru dan mendorong semangat yang kuat serta sebagai strategi nasional, untuk mempromosikan reformasi pendidikan.

Pada bulan November 2004 Menteri MEXT saat itu, Nariaki Nakayama mengumumkan rencana reformasi pendidikan berjudul *Japan...Rise Again*. Rencana ini mengusulkan tujuan pendidikan yang mendorong anak-anak yang melakukan yang terbaik dan membesarkan anak-anak untuk secara sportif bersaing dalam persaingan global.

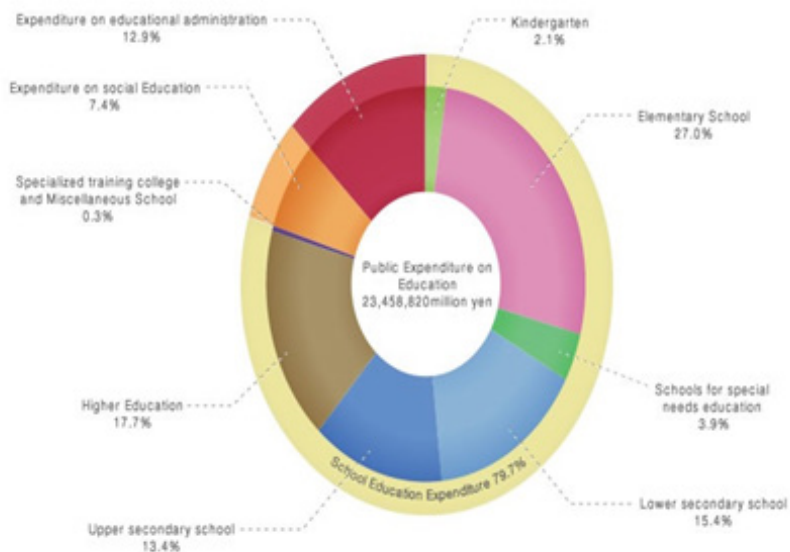
Reformasi pendidikan mengusulkan lima usulan antara lain:

1. Perubahan atas Undang-Undang Dasar Pendidikan
2. Peningkatan Kemampuan Akademik
3. Peningkatan Kualitas Guru melalui pembentukan sekolah profesional pascasarjana, dan sistem pembaruan kualifikasi guru, dll.

4. Reformasi sekolah dan Dewan Pendidikan.
5. Reformasi sistem anggaran nasional untuk biaya pendidikan wajib belajar. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa pemerintah pusat harus menjamin bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran ini sesuai dengan tujuan nasional.

MEXT berkewajiban melaksanakan reformasi ini sebagai tanggung jawabnya atas pendidikan wajib belajar di Jepang dan bertujuan untuk mewujudkan wajib belajar yang lebih baik di bawah peran pemerintah daerah dan sekolah untuk memenuhi harapan para orang tua dan masyarakat. Gambar di bawah memperlihatkan total pengeluaran biaya untuk pendidikan di Jepang.

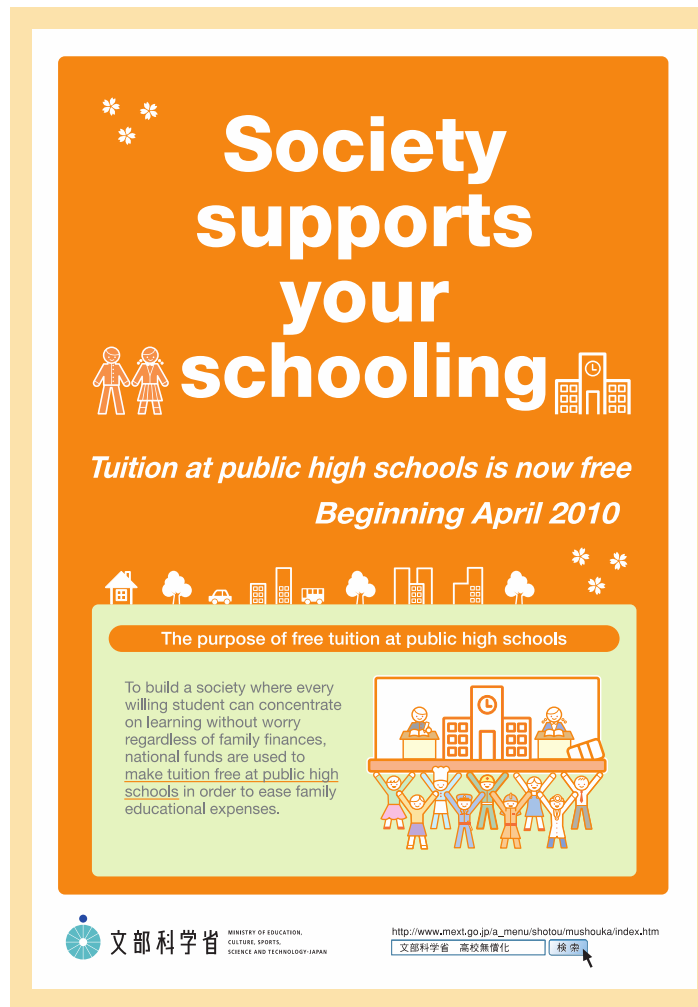
Total Expenditure on Education by Sphere of Education (FY2009)



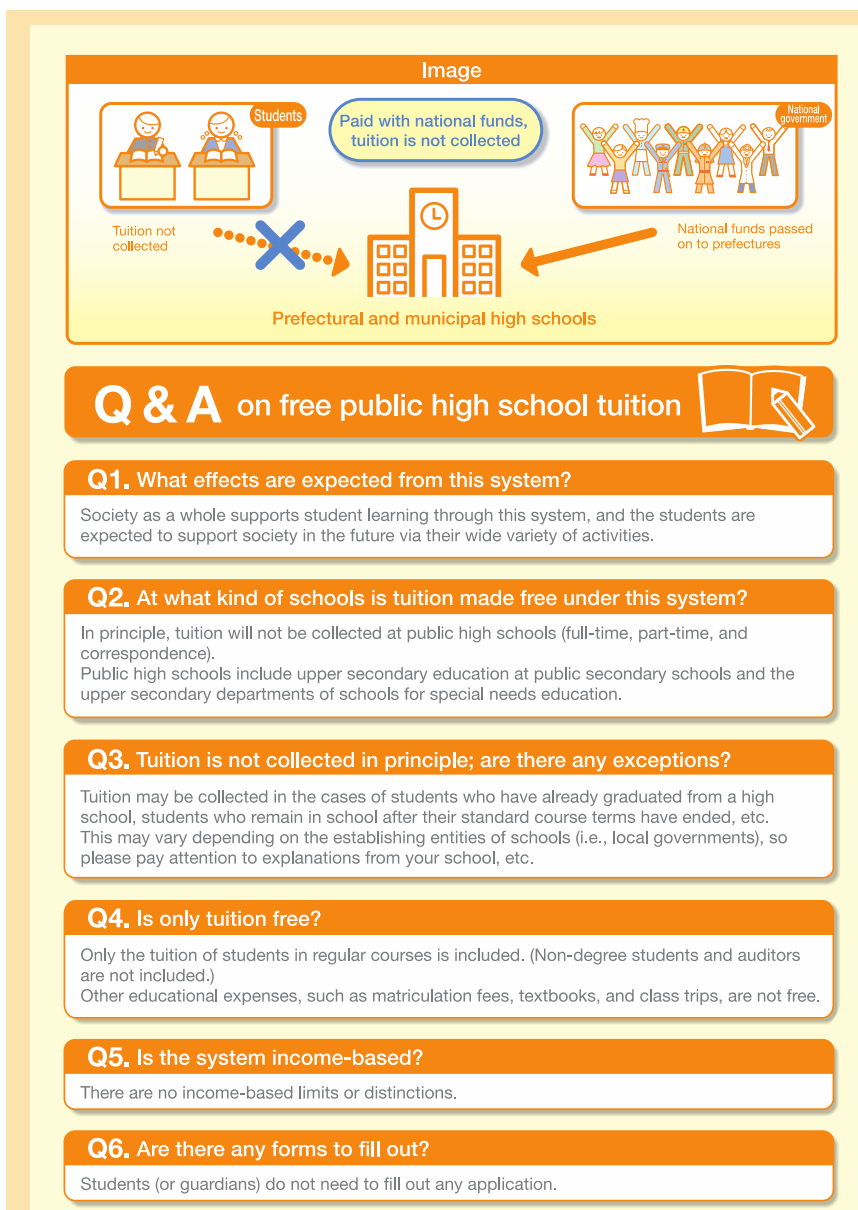
Gambar 8.1 Proporsi Pengeluaran untuk Pendidikan di Jepang

Undang-undang (UU) SPP gratis di sekolah-sekolah menengah umum dan dana dukungan pendaftaran sekolah tinggi disahkan pada 31 Maret dan diundangkan pada tanggal 1 April 2010. Undang-undang ini membuat sekolah gratis di sekolah-sekolah menengah umum dan menetapkan dukungan dana pendaftaran di SMA dan untuk pembayaran uang sekolah bagi siswa SMA swasta. Tujuan UU

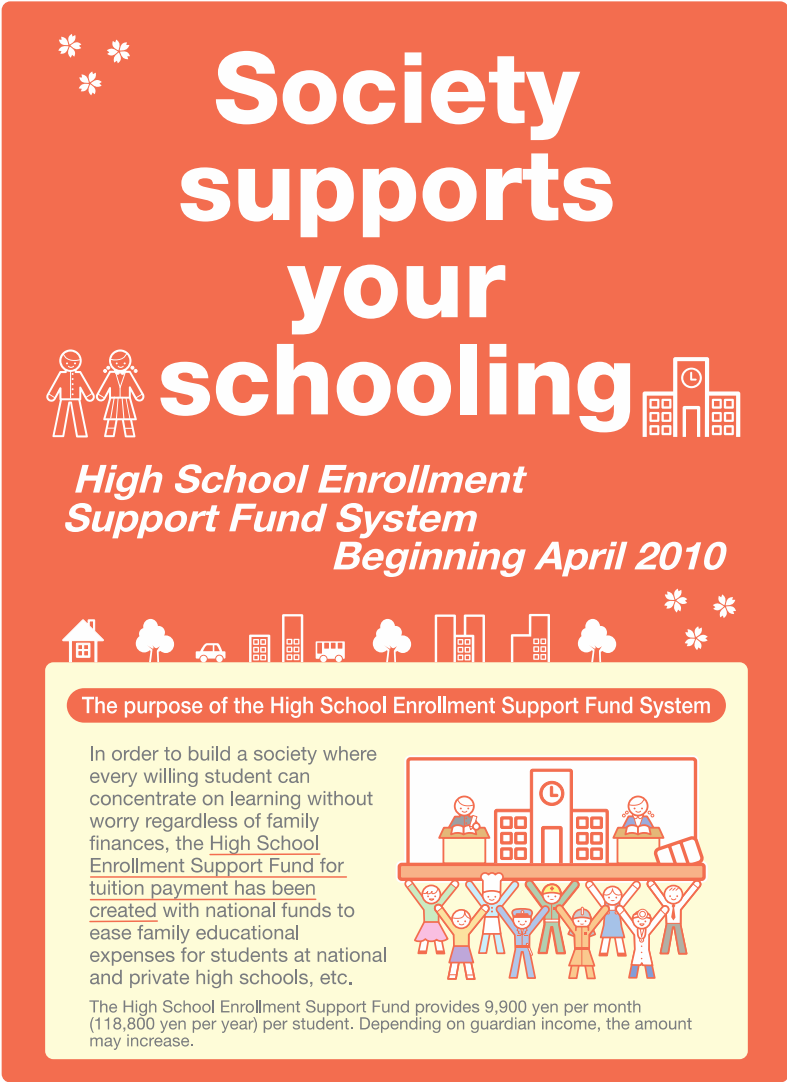
ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan keluarga dan untuk memberi kesempatan yang sama dalam pendidikan menengah atas. Biaya pendidikan ini tidak dibebankan pada SMA tetapi ditransfer langsung dari anggaran pemerintah pusat ke masing-masing prefektur dan kota. Siswa di sekolah menengah swasta disediakan dana untuk pembayaran SPP (jumlah dana yang meningkat untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah). Siswa harus mendapat sertifikasi dari gubernur prefektur. Sekolah dimana siswa bersertifikat bisa mendaftar dan akan menerima dana pendidikan selama di SMA.



Gambar 8.2 Contoh poster sosialisasi SPP sekolah



Gambar 8.3 Contoh poster sosialisasi SPP sekolah (bagian Tanya & Jawab)



Society supports your schooling

*High School Enrollment Support Fund System
Beginning April 2010*

The purpose of the High School Enrollment Support Fund System

In order to build a society where every willing student can concentrate on learning without worry regardless of family finances, the High School Enrollment Support Fund for tuition payment has been created with national funds to ease family educational expenses for students at national and private high schools, etc.

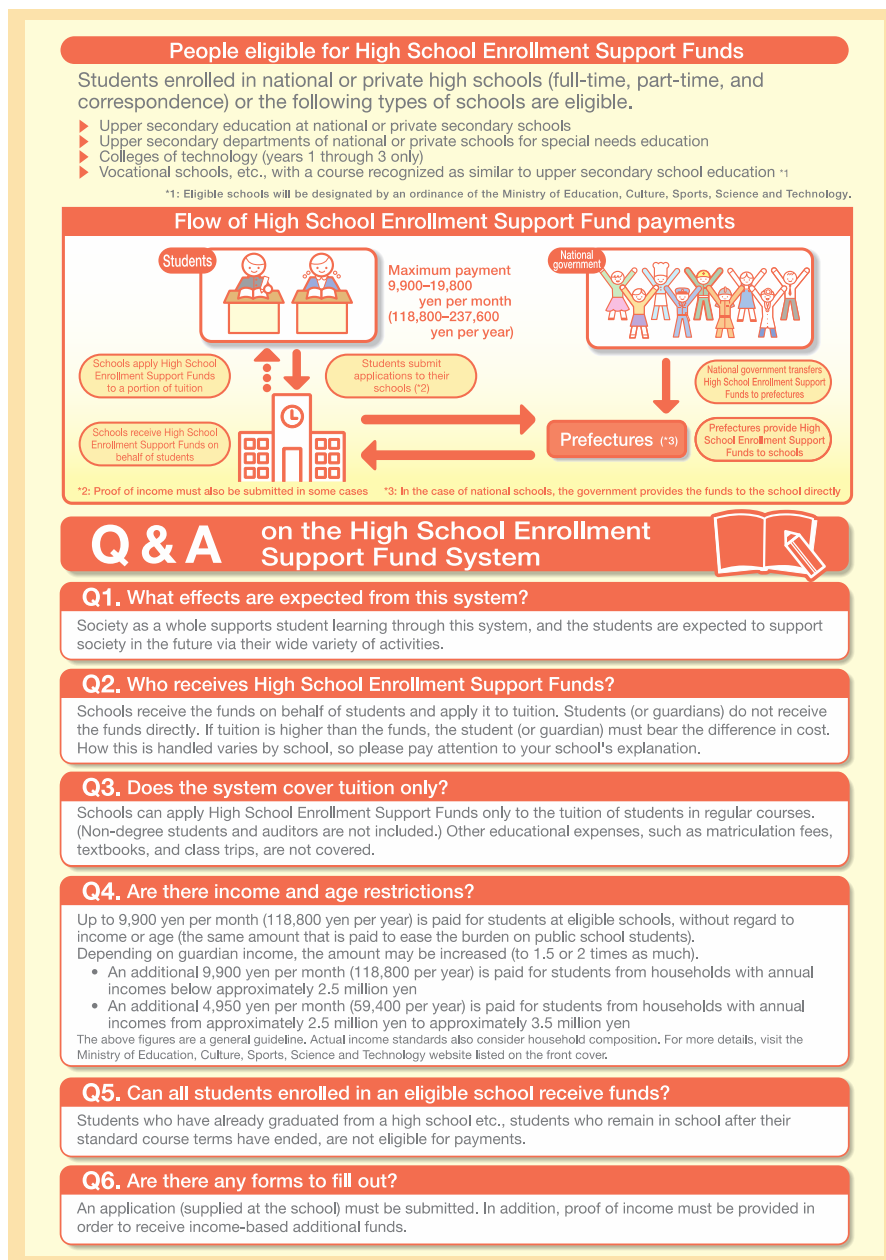
The High School Enrollment Support Fund provides 9,900 yen per month (118,800 yen per year) per student. Depending on guardian income, the amount may increase.

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

文部科学省 MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS, SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN

文部科学省 高校無償化 検索

Gambar 8.4 Contoh poster sosialisasi pendanaan sekolah



Gambar 8.5 Contoh poster sosialisasi pendanaan sekolah (bagian Tanya & Jawab)

9

Peran Orang tua dan Masyarakat

Perbaikan pendidikan lingkungan sekolah dan peningkatan kualitas guru bukanlah sesuatu dicapai melalui upaya sekolah sendiri. Di Jepang orang tua dan masyarakat memegang peranan penting dalam hubungan peningkatan pendidikan dalam bentuk saling percaya dalam mengembangkan pendidikan. Mereka bekerja sama dalam menjalankan proses pendidikan secara keseluruhan. Bedanya hanya bahwa guru melakukan pendidikan di sekolah, sedangkan orang tua dan masyarakat melaksanakan pendidikan secara tersirat di rumah dan lingkungan mereka. Urusan kurikulum, anggaran dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah sehingga setiap sekolah bisa menjalankan manajemen dan proses pendidikan secara kreatif berbasis keadaan dan kemampuan setiap anak. Pada saat yang sama melalui *School Management Council System* sekolah bekerjasama dengan orang tua murid dan masyarakat mempromosikan pengembangan sekolah sehingga keberlanjutan proses dan penjaminan mutunya bisa melibatkan partisipasi orang tua dan masyarakat sekitarnya.

Dalam hal peran orang tua dan masyarakat, Jepang lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat bukan dalam bentuk pendanaan, atau pengembangan kurikulum, apalagi mengutak-atik masalah tenaga kependidikan. Orang tua dan masyarakat menjadi fasilitator, pengayom dan pelindung para siswa ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah. Hal ini yang diyakini sebagai faktor yang membuat Jepang sangat terkenal dengan pendidikan karakternya karena lingkungan dalam hal ini masyarakat ikut berperan dalam proses pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

1. Aba, J. (2003). Incorporation of National Universities in Japan, Reform towards the , enhancement of autonomy in search of excellence, Paper presented to an RIHE Seminar on Organisational Reforms and University Governance, Autonomy and Accountability.
2. Aso M and Ikuo, A. (1972). Education and Japan's Modernization, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo.
3. Bethel, Dayle Morgan, Makiguchi. (1994). The Value Creator, Revolutionary Japanese Educator and Founder of Soka Gakkai, Tokyo, Weatherhill.
4. Institute for International Cooperation, JICA. (2004). The history of Japan's Educational Development.
5. Kemdiknas (2010). Sistem Pendidikan dan Ujian Nasional di 13 Negara
6. MEXT Report (2009). Higher Education in Japan. Higher Education Bureau, MEXT, Tokyo, 2009.
7. Ministry of Education (1989). Japan's Modern Educational System A History of the First Hundred Years, Printing Beaureau, Ministry of Finance.
8. Nemoto, Y. (1999). The Japanese Education System. Universal Publisher, Florida, USA
9. Okano, K and Tsutchiya, M. (1999). Education in contemporary

- Japan. Inequality and Diversity. Cambridge University Press
10. Rustam, F. (2003). Reformasi Pendidikan pada masa Jepang Meiji: Studi tentang peran politik kekuasaan dalam penerapan pendidikan, *Makara, Sosial Humaniora*, 7 (2), 45:48.
 11. Sumber Gambar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Tabel 3.1, 5.1, 5.2, 6.2, 8.1 – 8.5, : MEXT (2013)
 12. Sumber Tabel 5.1: (Shigeyuki, et.al, 2004)

-o0o-

IX

Sistem Pendidikan di Republik Federal German



Sumber foto Brandenburg Gate: www.helmholtzpark.de

Oleh:
Prof. Dr. rer.nat. Agus Rubiyanto
Atase Pendidikan di Berlin

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Republik Federal Jerman

Sistem pendidikan di Jerman dibagi menjadi lima tingkatan, dimana tingkat Primer sampai tingkat Sekunder II berada dalam bentuk sistem sekolah. Tingkat Elementer (*Elementarstufe*) merupakan pendidikan di taman kanak-kanak dan pra-sekolah. Di sistem pendidikan ini, sekolah dasar merupakan tingkat pertama yang wajib dan disebut sebagai tingkat Primer.

Berdasarkan pembagian ini, sistem pendidikan di Jerman juga disebutkan sebagai Sistem Pendidikan yang Tertata (*Gegliedertes Schulsystem*). Tingkat Tersier dan Kuarter merupakan pendidikan tinggi dan lanjutan, termasuk di dalamnya adalah yang ditawarkan oleh pihak swasta atau instansi pendidikan non-formal. Dengan demikian, sistem pendidikan mendampingi masyarakat seumur hidup. Setiap negara bagian mempunyai otoritas terhadap pendidikan, sehingga beberapa bagian dari sistem pendidikan sangat berbeda di masing-masing negara bagian sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Berdasarkan dengan falsafah federal, maka di Jerman tidak diselenggarakan ujian akhir secara nasional, karena setiap negara bagian ingin mewujudkan gagasannya sendiri. Namun demikian, Konferensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara-Negara Bagian sudah mencoba sejauh mungkin menyamakan materi ujian. Ujian dilangsungkan dalam beberapa tahap. Kira-kira 3 bulan sebelum akhir masa sekolah, diadakan ujian tertulis dan lisan, yang berlangsung selama beberapa hari.

Seperti yang telah diuraikan di atas, tidak ada ujian akhir untuk tingkat sekolah dasar. Sedang untuk tingkat lanjutan dasar, menengah dan atas terdapat ujian akhir untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Sesuai dengan otoritas pendidikan yang ada pada negara bagian, semua jenis ujian berlangsung pada tingkat negara bagian.

Produk pendidikan Jerman yang sangat terkenal di dunia adalah Pendidikan Kejuruan/Vokasi yang sering dikenal dengan dual system. Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan/Vokasi (*Dual VET*) Jerman adalah suatu kemitraan pemerintah-swasta yang sempurna. Bagi perusahaan, model ini berpengaruh positif terhadap muatan dan organisasi; memerlukan biaya rekrutmen yang rendah; serta memberikan jaminan bagi ketersediaan tenaga kerja terampil. Bagi peserta didik/pelatihan, model ini menciptakan pasar tenaga kerja yang sesuai dengan pelatihan keahlian, menghasilkan pendapatan, dan keterampilan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Bagi negara, model ini memerlukan biaya rendah untuk pelatihan kejuruan/vokasi; dan menjadikan Jerman sebagai satu-satunya negara dengan tingkat pengangguran paling rendah di seluruh Eropa.

Model *Dual System* memungkinkan pelatihan, terutama sekali disediakan oleh perusahaan dan didukung dengan mengajar paruh-waktu pada sekolah kejuruan/vokasi (*Berufsschule*). Dalam hal ini, mitra perusahaan (pembelajaran di perusahaan): 3-4 hari/minggu ; Sesuai dengan basis regulasi tentang pelatihan; dalam kerangka kontrak kerja pelatihan. Sementara itu, Mitra Sekolah Kejuruan/Vokasi: (pembelajaran di sekolah): rata-rata 1-2 hari/minggu, sesuai dengan basis kerangka kerja kurikulum pendidikan/pelatihan; pengetahuan umum dan kejuruan/vokasi diajarkan dalam kerangka kerja pendidikan wajib.

Regulasi Pendidikan Kejuruan/Vokasi ditetapkan sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan secara konsensus (*consensual decision-making*), di mana terdapat cakupan seluruh partisipan harus sepakat. Koordinasi terhadap aspek-aspek operasional pada pelatihan ganda di seluruh Jerman. Kepastian dalam hal tujuan dan muatan magang Instrumen untuk mengamankan kualitas pelatihan kejuruan/vokasi. Memuat tentang: rancangan profesi kejuruan/vokasi; durasi pelatihan

kejuruan/vokasi; garis besar profesi kejuruan/vokasi; kerangka kerja magang; persyaratan ujian.

Model pendidikan/pelatihan *Dual System* untuk program studi kejuruan/vokasi di Jerman memiliki keunggulan pada kualifikasi pekerja terampil. Hal ini menciptakan *win-win-situation* bagi perusahaan, pemerintah, dan generasi muda di Jerman. Model ini sangat kompleks, namun seimbang; dan dapat berjalan dengan adanya regulasi yang mewajibkan keanggotaan DIHK (*Deutscher Industrie- und Handelskammer*) bagi kalangan pengusaha di Jerman. Kurikulum pendidikan di Jerman tidak ditentukan oleh DIHK, melainkan oleh seluruh pemangku kepentingan. DIHK dibiayai secara independen, bersikap netral terhadap pengaruh apapun. *Member Fee* dikumpulkan dari 16 (enam belas) *Local Chamber* yang terdapat di setiap *Lander* berdasarkan hukum dan menjadi wajib. *Fee* dimaksud jumlahnya berdasarkan performa ekonomi di tambah keuntungan suatu perusahaan. Setiap perusahaan memiliki satu suara .

Dengan adanya *Demand Reform System*, di mana pendidikan didasarkan pada kebutuhan pasar, maka program studi di Jerman, khususnya pada sekolah kejuruan atau pendidikan/pelatihan vokasi, proporsinya menjadi 30 persen pendidikan dilakukan oleh sekolah dan 70 persen pelatihan menjadi tanggung-jawab perusahaan. Ujian Nasional dilakukan secara serentak berdasarkan masing-masing cabang profesi. Saat ini, ada 350 profesi yang terdaftar dan diakui di seluruh Jerman. Lebih dari 50 persen pelajar di Jerman menempuh sekolah kejuruan. Dalam hal ini, 2/3 generasi muda di Jerman masuk ke pendidikan/pelatihan vokasi. Namun, masih terbuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga perguruan tinggi.

Untuk penjaminan mutu dilakukan dua pengukuran, yaitu *assessment* tingkat supra-regional dan masing-masing negara bagian (dalam hal ini, Berlin). Instrumen-instrumen pengukur prestasi untuk jaminan mutu pendidikan sekolah-sekolah di Berlin, adalah sebagai berikut: Tes pertama untuk tingkat dasar berada pada akhir kelas 3 dan masa transisi awal di kelas 4. Masa penyeleksian untuk masuk ke *Grammar School/Gymnasium* ada pada akhir kelas 6, selanjutnya masa

percobaan di kelas 7 dan 8, dimana pada akhir kelas 8 diadakan tes sebagai metode seleksi apakah murid bisa melanjutkan di *Grammar School* atau direkomendasikan ke jenis sekolah lain, seperti sekolah menengah kejuruan atau *Integrated Secondary School* lainnya.

Beberapa instrumen dan metode untuk evaluasi eksternal dan internal adalah sebagai berikut: *Quality Loop*, *School Inspection*, *Self Evaluation* yang selenggarakan oleh ISQ (*Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V.*), sebuah lembaga yang memberikan pelayanan ilmiah mengenai kualitas sekolah-sekolah di Berlin dan Brandenburg. Lembaga ini tidak hanya memberikan konsultasi langsung ke sekolah-sekolah, tetapi juga ke kantor-kantor administrasi sekolah/kantor pendidikan daerah (*Schulamt*) di setiap daerah dan kepada pembuat kebijakan pada kedua negara bagian tersebut.

Produk Domestik Bruto (PDB) dari RFJ mengalami penurunan pada saat krisis di tahun 2009, Hasil dari perhitungan neraca nasional pada tahun 2010 dan 2011 meningkat, dengan perincian: tahun 2010 dengan 2.496 miliar Euro dan tahun 2011 dengan 2.592 miliar Euro. Sejak 2010, pendanaan untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan yang dikeluarkan dari pemerintah Federal adalah 9,5% dari PDB keseluruhan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	427
DAFTAR ISI	431
1. Sejarah Sistem Pendidikan di Jerman	433
2. Struktur Sistem Pendidikan Jerman: Sistem Tertata	435
3. Pembinaan Profesi Guru	461
4. Evaluasi dan Ujian	465
5. Penjaminan Mutu	479
6. Pendanaan Pendidikan	483
7. Penutup	485
LAMPIRAN	487
DAFTAR REFERENSI	497

1

Sejarah Sistem Pendidikan di Jerman

Sistem pendidikan di Jerman dimulai pada abad pertengahan. Saat itu, sebagian besar anak-anak masih diajar oleh orang tuanya. Pendidikan di sekolah hanya dapat dienyam oleh kalangan bangsawan dan kaum rohaniawan. Terdapat juga kalangan masyarakat kelas atas yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah. Jenis sekolah yang ada pada saat itu adalah sekolah-sekolah agama (*klosterschulen*) atau sekolah bahasa Latin. Kira-kira pada tahun 1100, perhimpunan-perhimpunan Pertukangan mulai mendidik ahlinya secara teratur untuk menjadi meister yang boleh membuka perusahaan sendiri dan juga mendidik siswa di sistem ganda. Pendidikan ini pada umumnya dianggap sebagai awal sistem pendidikan kejuruan ganda yang masih berlaku sampai hari ini.

Pendidikan tinggipun juga dimulai pada abad pertengahan. Universitas pertama di Jerman adalah Universitas Heidelberg yang didirikan pada tahun 1386.

Pada tahun 1949, saat pendirian Republik Federal Jerman (RFJ), dalam sistem federalisme budaya, kekuasaan pendidikan ditentukan oleh negara-negara bagian. Undang-Undang Dasar RFJ menetapkan bahwa kekuasaan dalam semua hal yang berkaitan dengan pendidikan terletak pada negara-negara bagian (“Kekuasaan Pendidikan dan Kebudayaan Negara-Negara Bagian”). Di dalamnya juga ditetapkan jenis-jenis sekolah dan waktu pendidikan wajib. Sistem-sistem sekolah yang pada

waktu itu masih sangat berbeda di masing-masing negara bagian secara terus-menerus disamakan melalui kerangka hukum yang ada.

Pengembangan sistem sekolah umum baru dimulai setelah era reformasi pada akhir abad pertengahan, bersamaan dengan didirikannya sekolah-sekolah pembukuan oleh kamar dagang. Pembangunan sekolah-sekolah dengan jumlah besar baru dimulai pada abad ke-18, bermula dengan sekolah-sekolah kejuruan (sekolah hari Minggu dan sekolah pendidikan lanjutan di bidang Pertukangan).

Pada akhir tahun 1950-an, bermunculan diskusi-diskusi tentang reformasi sistem pendidikan yang diakhiri dengan penetapan rencana struktur sistem pendidikan Jerman serta pendirian Komisi Pemerintah Federal Negara Bagian untuk Perencanaan Pendidikan dan Bantuan Riset (*Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung*). Pada tahun 1973, komisi ini mengajukan Rencana Pendidikan Keseluruhan Pertama (*Erster Bildungs-gesamtplan*) yang dianggap sebagai dasar untuk membangun dan memperluas sistem pendidikan di Jerman. Setelah usaha-usaha

politik pendidikan tidak berhasil, maka pada pertengahan tahun 1980-an tema pendidikan diutamakan lagi, berhubungan dengan bermunculannya pusat studi perbandingan pendidikan dunia yang berskala internasional seperti misalnya PISA.

Kewajiban belajar di sekolah sudah ditetapkan pada tahun 1763. Pada saat itu, diadakan reformasi neo-humanistis, dengan pendirian perguruan-perguruan tinggi Teknik pertama di kota Braunschweig, Karlsruhe dan Aachen. Bentuk dasar dari sistem pendidikan ini tidak berubah hingga tahun 1945, walaupun semakin lama semakin berorientasi pada pendidikan militer dan juga menuju target-target lain.

2

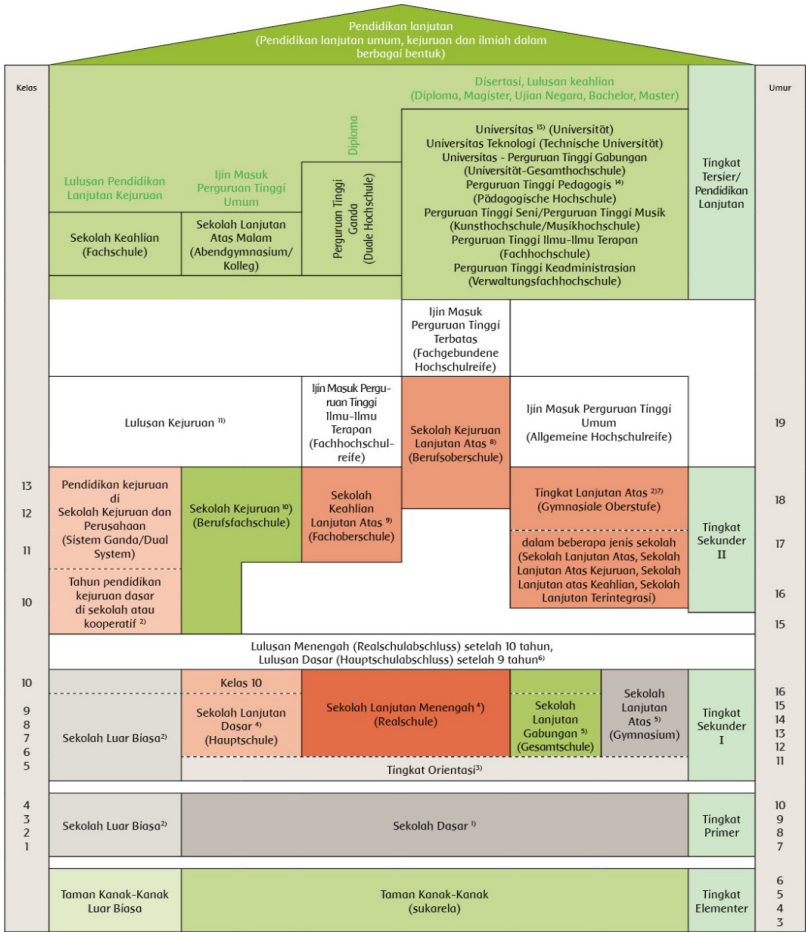
Struktur Sistem Pendidikan Jerman: Sistem Tertata

Sistem pendidikan di Jerman dibagi menjadi lima tingkatan, dimana tingkat Primer sampai tingkat Sekunder II berada dalam bentuk sistem sekolah. Tingkat Elementer (*Elementarstufe*) merupakan pendidikan di taman kanak-kanak dan pra-sekolah. Di sistem pendidikan ini, sekolah dasar merupakan tingkat pertama yang wajib dan disebut sebagai tingkat Primer.

Berdasarkan pembagian ini, sistem pendidikan di Jerman juga disebutkan sebagai Sistem Pendidikan yang Tertata (*Gegliedertes Schulsystem*). Tingkat Tersier dan Kuarter merupakan pendidikan tinggi dan lanjutan, termasuk di dalamnya adalah yang ditawarkan oleh pihak swasta atau instansi pendidikan non-formal. Dengan demikian, sistem pendidikan mendampingi masyarakat seumur hidup.

Karena di Jerman negara-negara bagian mempunyai otoritas terhadap pendidikan, maka beberapa bagian dari sistem pendidikan sangat berbeda di masing-masing negara bagian. Secara umum, sistem pendidikan di masing-masing negara bagian mengikuti beberapa kerangka dasar yang diakui di seluruh RFJ, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini;

Tabel 1.1 Diagram Struktur Dasar Sistem Pendidikan di RFJ



Sumber: Sekretariat Konferensi Tetap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara-Negara Bagian RFJ, Jasa Informasi Dokumentasi dan Pendidikan ©KMK 2009

Beberapa catatan terkait Tabel 1.1 dijabarkan sebagai berikut.

1. Beberapa negara bagian menawarkan berbagai bentuk khusus saat pindah dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar (prasekolah, taman kanak-kanak di sekolah dan sebagainya). Di negara bagian Berlin dan Brandenburg, sekolah dasar berlangsung selama enam tahun.
2. Terdapat sekolah-sekolah luar biasa, baik itu yang umum maupun kejuruan, tergantung jenis kebutuhan khusus, yang menyediakan pendidikan terintegrasi dengan murid-murid yang normal.

Sebutan sekolah jenis ini berbeda di masing-masing negara bagian, seperti *Sonderschule*, *Schule für Behinderte* dan *Förderschule und Förderzentrum*.

3. Kelas 5 dan 6 merupakan tahap pengawasan, karenanya disebut sebagai tingkat orientasi dan tidak tergantung dari jenis sekolah lanjutan. Di tingkat ini ditetapkan kelanjutan pendidikan dengan menitikberatkan pada bidang keahliannya.
4. Jenjang sekolah lanjutan dasar dan menengah juga ditawarkan oleh sekolah-sekolah dengan gabungan beberapa jenjang pendidikan.
5. Jenjang sekolah lanjutan atas juga ditawarkan pada sekolah lanjutan gabungan. Dalam jenis sekolah ini ditawarkan ketiga jenjang lanjutan (pendidikan lanjutan dasar, menengah dan atas).
6. Lulusan pendidikan umum setelah kelas 9 dan 10 dimungkinkan juga untuk mengambil jenjang tersebut pada sekolah malam atau sekolah kejuruan.
7. Persyaratan masuk ke tingkat lanjutan atas adalah ijin untuk mengikuti pendidikan pada tingkat lanjutan atas, yang diterima pada akhir kelas 9 atau 10.
8. Sekolah kejuruan lanjutan atas hanya terdapat di beberapa negara bagian. Kesempatan untuk mengambil ijin masuk perguruan tinggi diberikan terbatas kepada murid-murid yang lulus pendidikan lanjutan menengah ditambah dengan pendidikan kejuruan atau pengalaman kerja 5 tahun.
9. Sekolah keahlian lanjutan atas adalah sekolah dengan masa studi 2 tahun yang merupakan lanjutan dari pendidikan lanjutan menengah dengan kelas 11 dan 12.
10. Sekolah kejuruan adalah sekolah yang memberikan pendidikan sehari penuh dengan berbagai jenis menurut persyaratan masuk, jangka waktu dan jenis ijazah.
11. Lulusan sekolah kejuruan terkadang dapat ditambah dengan lulusan pendidikan lanjutan dasar atau menengah.
12. Sekolah keahlian memberikan pendidikan lanjutan kejuruan 1 atau 3 tahun.
13. Universitas termasuk perguruan tinggi yang hanya mempunyai jurusan-jurusan tertentu seperti Agama, Filsafat, Kedokteran, Ilmu-

ilmu Administrasi atau Olahraga.

14. Perguruan tinggi pedagogis (hanya terdapat di negara bagian Baden-Wurttemberg) melaksanakan pendidikan guru. Terkadang dimungkinkan untuk mengambil studi dengan pekerjaan di luar bidang pendidikan.
15. Perguruan tinggi sistem ganda adalah instansi di bidang tersier di beberapa negara bagian yang menawarkan pendidikan kejuruan baik ilmiah maupun berorientasi ke praktek, sesuai sistem ganda.

2.1 Tingkatan Pendidikan di Jerman

Secara umum dan singkat, pendidikan di Jerman dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

1. Tingkat Primer (*Primarstufe*)

Berlangsung di sekolah dasar selama 4 tahun (di beberapa negara bagian enam tahun, dimana kelas 5 dan 6 merupakan tingkat orientasi).



Gambar 2.1 Belajar dalam kelompok kerja di sekolah dasar

2. Tingkat Sekunder I (*Sekundarbereich I*)

Setelah tingkat primer, tingkat ini terdiri dari sekolah lanjutan dasar (*Hauptschule*), menengah (*Realschule*) atau atas (*Gymnasium*) dan gabungan (*Gesamtschule*), yang diakhiri dengan lulusan sekolah lanjutan dasar atau sekolah lanjutan menengah.

3. Tingkat Sekunder II (*Sekundarbereich II*)
Tingkat ini terdiri masing-masing jenis sekolah pendidikan kejuruan dan sekolah lanjutan tingkat atas.
4. Tingkat Tersier (*Tertiärbereich*)
Tingkat ini dimulai setelah lulus sekolah lanjutan atas dan dilakukan pada perguruan tinggi (*Hochschulen*), perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan (*Fachhochschulen*) dan akademi kejuruan/perguruan tinggi pendidikan ganda (*Berufsakademien/Duale Hochschulen*).
5. Tingkat Kuartier (*Quartärbereich*)
Pada tingkat ini, pendidikan lanjutan, baik swasta maupun kejuruan, tidak dapat dipastikan jangka waktunya.

Transfer antar jenis sekolah dan pengakuan ijazah di negara bagian lain ditetapkan dengan kesepakatan antar negara-negara bagian. Jangka waktu wajib sekolah (wajib sekolah umum) adalah 9 tahun (pada empat negara bagian 10 tahun dan wajib pendidikan kejuruan 3 tahun).

Penjelasan lebih mendalam dari kelima tingkatan pendidikan tersebut, dapat dibaca sebagai berikut.

2.1.1 Tingkat Primer

Tingkat Primer merupakan pendidikan di sekolah dasar (*Grundschule*) yang berlangsung selama 4 atau 6 tahun, tergantung negara bagian. Sebagai contoh, di negara bagian Berlin dan Brandenburg, sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun).

Umumnya anak-anak masuk sekolah pada saat berusia 6 tahun. Pendidikan sekolah dasar di Jerman berbeda dengan jenis-jenis sekolah lain. Di sekolah dasar, anak-anak tidak dituntut prestasi. Mereka hanya diharapkan untuk mengetahui tentang bagaimana belajar dan bekerja. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk mengetahui beberapa pengetahuan dasar seperti, Matematika, Bahasa dan Ilmu Pengetahuan umum, sebagai dasar untuk pendidikan lanjutan pada sekolah lanjutan dasar, menengah, atas atau sekolah gabungan. Di sekolah dasar, anak-anak juga diberikan pelajaran mengenai Estetika, Budaya dan Agama.

Di tahun-tahun pertama, hasil evaluasi anak-anak tidak ditampilkan

dengan angka, tetapi dengan kalimat. Biasanya, semua anak diijinkan naik kelas. Perbaikan kekurangan prestasi dilaksanakan tidak dengan mengulang kelas, tetapi melalui pelatihan khusus. Hal ini dikarenakan sekolah dasar dianggap sebagai instansi sosialisasi pertama di luar keluarga.

Penerapan konsep-konsep pedagogik biasanya dicoba dan pertama kali diterapkan pada sekolah dasar. Oleh sebab itu, pendidikan guru sekolah dasar lebih berorientasi terhadap pelajaran pedagogik dibandingkan dengan pendidikan untuk jenis-jenis sekolah lain (kecuali sekolah khusus). Konsep-konsep populer yang pertama kali dicoba di sekolah dasar adalah pelajaran bahasa asing atau struktur baru dalam proses belajar seperti pekerjaan bebas, pengajaran dalam bentuk proyek atau pengajaran dalam grup terbuka.

Bentuk sekolah dasar mengikuti perubahan masyarakat dimana kedua orang tua bekerja sehari penuh, dengan penyediaan tempat penitipan anak-anak sampai sore.

Pada umumnya, setiap kelas mempunyai satu guru yang bertindak sebagai wali kelas, selain guru-guru lainnya, yang mendampingi kelompok kelas dari kelas 1 sampai akhir sekolah dasar dan mengajarkan beberapa mata pelajaran. Tujuan belajar dalam mata pelajaran utama seperti, Matematika, Bahasa Jerman, Ilmu Pengetahuan umum dan Media PC, adalah:

1. Belajar membaca dan menulis
2. Menulis dengan jelas
3. Mengingat sesuatu
4. Menulis dengan betul dan dengan kata-kata yang baik
5. Menghitung di ruangan angka dari 1 sampai 1.000.000
6. Dasar Geometri
7. Belajar jam
8. Dasar Fisika, Kimia dan Ilmu alami untuk mengerti keadaan sehari-hari
9. Orientasi ruangan dan sejarah di lingkungan tempat tinggal sampai lingkaran 20 km
10. Dasar grafis/melukis

11. Musik (menyanyi; bermain alat musik)
12. Pendidikan Lalu Lintas
13. Dasar pendidikan Politik
14. Dasar pembicaraan Filsafat
15. Dasar kompetensi Demokrasi dan Sosial
16. Prinsip-prinsip dasar Demokrasi, mis. melalui pemilihan pembicara kelas, pemilu tentang aktifitas bersama, pemecahan konflik dan sebagainya
17. Pelajaran Agama
18. Bekerja secara mandiri dengan PC / internet

Bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya keterbelakangan mental atau cacat, mereka tidak dimasukkan ke sekolah dasar melainkan ke sekolah khusus yang sesuai dengan jenis cacat yang dimiliki.

2.1.2 Tingkat Sekunder I

Tingkat Sekunder I meliputi pendidikan di tingkat menengah dengan jenis-jenis sekolah:

1. Sekolah lanjutan dasar (*Hauptschule*)
2. Sekolah lanjutan menengah (*Realschule*)
3. Sekolah Lanjutan Atas/ Sekolah Lanjutan Gabungan (*Gymnasium/ Gesamtschule*)

Tingkat Sekunder I di sekolah lanjutan atas (*Gymnasium*) dan sekolah lanjutan gabungan (*Gesamtschule*). Lulusan sekolah lanjutan menengah mempunyai hak untuk masuk pendidikan tingkat lanjutan atas di sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan sekolah lanjutan gabungan. Sekolah lanjutan dasar sering dikritik karena siswanya pada umumnya berasal dari kalangan dengan status sosial lemah dan bahasa ibunya bukan bahasa Jerman sehingga jenis sekolah ini dikatakan memojokkan isu-isu ini dan memperkuat masalah sosial yang ada. Oleh sebab itu, Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 mengambil konsekuensi dan mengakui bentuk

sekolah sekunder yang menyatukan jenjang sekolah lanjutan dasar dan menengah. Sampai sekarang masih terdapat sekolah lanjutan dasar dan menengah di beberapa negara bagian. Negara-negara bagian lain telah menyatukan sekolah lanjutan dasar dan menengah. Di tingkat Sekunder I, kelas 5 dan 6 merupakan tahap pengawasan, karenanya disebut juga sebagai tingkat orientasi untuk mencari penjelasan tentang kelanjutan pendidikan dengan menitikberatkan pada bidang keahliannya.

Berikut, penjelasan mengenai jenis-jenis sekolah pada tingkat Sekunder II, yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Sekolah Lanjutan Dasar (*Hauptschule*)

Semua siswa yang tidak mengikuti pendidikan di salah satu sekolah lain wajib mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan dasar ini karena setiap anak di Jerman wajib sekolah sampai kelas 9 (atau 10 di beberapa negara bagian).

Sekolah lanjutan dasar menyiapkan siswanya untuk mengambil pendidikan di bidang kejuruan. Para lulusan dapat meneruskan dengan pendidikan kejuruan dalam sistem ganda untuk keahlian di bidang Pertukangan, Bengkel, Bangunan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pelajaran di sekolah ini jauh lebih dekat dengan dunia praktek daripada sekolah-sekolah tingkat sekunder lain. Mata pelajaran yang diutamakan adalah Ilmu Pekerjaan (*Arbeitslehre*) yang pada beberapa negara bagian merupakan mata pelajaran pokok. Para siswa juga menerima pengalaman tentang dunia kerja, misalnya dengan mengunjungi pameran pekerjaan (*Berufsmessen*), perusahaan atau magang.

Pada umumnya sekolah lanjutan dasar meliputi kelas 5 sampai 9 atau 10 dan diselesaikan dengan ijazah yang merupakan ijin untuk masuk sekolah kejuruan.

2. Sekolah Lanjutan Menengah (*Realschule*)

Sekolah lanjutan menengah merupakan sekolah di antara sekolah lanjutan atas dan sekolah dasar. Target dari sekolah ini adalah siswa yang ingin mengambil pendidikan kejuruan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah lanjutan dasar. Lulusan sekolah ini membuka pintu pada banyak jenjang pendidikan kejuruan, tetapi juga pada sekolah lanjutan kejuruan dengan memberikan peluang

untuk melanjutkan pendidikan umum sampai tingkat universitas. Ijazah akhir menengah atau surat tanda tamat belajar (*Mittlere Reife*) yang didapat setelah menyelesaikan sekolah jenis ini memberikan izin untuk memasuki pendidikan kejuruan bermutu tinggi pada beberapa jenis sekolah kejuruan, misalnya untuk menjadi pegawai negeri menengah (*Mittlere Beamtenlaufbahn*) atau melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekunder II di sekolah lanjutan atas (*Gymnasium*).

Masa belajar adalah dari kelas 5 sampai 10 (atau kelas 7 sampai 10 di negara bagian Berlin dan Brandenburg). Mulai kelas 7, para siswa wajib memilih beberapa profil pelajaran. Pada umumnya, profil-profil ini mengutamakan Ilmu-ilmu Alam dan Teknik, Ilmu-ilmu Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial atau bahasa asing kedua. Rinciannya tergantung pada negara bagian.

3. Tingkat Sekunder I di Sekolah Lanjutan Atas / Sekolah Lanjutan Gabungan (*Gymnasium / Gesamtschule*)

Untuk informasi lebih rinci tentang kedua jenis sekolah ini, dapat dilihat pasal tentang pendidikan tingkat Sekunder II di bagian terkait, 2.1.3 Tingkat Sekunder II.

Dalam beberapa tahun ini, Berlin sedang mereformasi sistem pendidikannya.

Sejak tahun ajaran 2010/2011, siswa/siswi lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan ke:

- Sekolah Menengah Terpadu (*Integrierte Sekundarschule*) atau
- SMA (*Gymnasium*).

Sekolah Menengah Terpadu atau *Integrierte Sekundarschule* tersebut adalah perpaduan antara jenis sekolah-sekolah Lanjutan Dasar, Lanjutan Menengah dan Lanjutan Gabungan.

Dari konsep baru Sekolah Menengah Terpadu ini, diharapkan para siswa/i dengan latar belakang dan rekomendasi pendidikan yang berbeda dapat saling mengisi, dapat memberikan kesempatan yang seimbang dan dapat lebih memperkuat rasa percaya diri dalam pembentukan jati diri di komunitas.

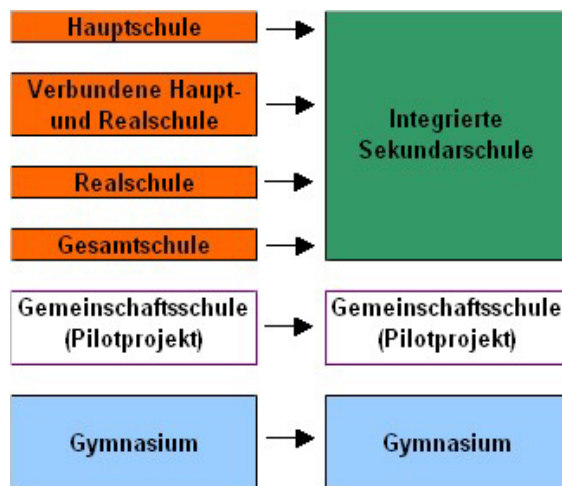


Foto: ©w ww.zukunft-im-handwerk.de (TIP e.V.)

Gambar 2.2. Sistem sekolah baru, sejak TA 2010/2011 di Berlin

2.1.3 Tingkat Sekunder II

Tingkat Sekunder II merupakan tingkat lanjutan atas (*Oberstufe*) yang terdapat pada sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan gabungan maupun sistem pendidikan kejuruan. Tingkat pendidikan atas ini dimulai dari kelas 11 (dalam jenjang 8 tahun, dimulai dari dengan kelas 10).

Sejak tahun 1955, semua jenis sekolah yang mengajarkan siswanya sampai memperoleh ijin masuk perguruan tinggi (*Abitur*) disebut sebagai sekolah lanjutan atas (*Gymnasium*). Jenis sekolah ini mempunyai hubungan erat dengan bidang-bidang Humanistik seperti dapat dilihat dari penawaran bahasa-bahasa tua misalnya bahasa Latin. Tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan selama ini tidak diperhatikan. Sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan gabungan adalah sekolah lanjutan yang memberikan pendidikan yang mendalam dan meliputi baik tingkat Sekunder I maupun tingkat Sekunder II. Sekolah lanjutan ini merupakan jalur paling cepat untuk mendapatkan ijin masuk perguruan tinggi dan memungkinkan keikutsertaan semua jenis pendidikan kejuruan atau perguruan tinggi.

Sistem pendidikan kejuruan terdiri dari Sistem Ganda (*Duales*

System) sebagai kombinasi antara pendidikan di tempat kerja dan sekolah kejuruan. Selain itu, termasuk juga di dalamnya adalah tahun persiapan pendidikan kejuruan (*Berufsvorbereitungsjahr*), sekolah kejuruan keahlian (*Berufsfachschule*), sekolah keahlian (*Fachschule*), sekolah lanjutan atas keahlian (*Fachoberschule*) dan sekolah lanjutan atas kejuruan (*Berufliches Gymnasium*). Berikut ini adalah contoh Kurikulum kelas 1-13 untuk Negara Bagian Berlin yang dijelaskan pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2. Kurikulum di Sekolah Umum di Negara Bagian Berlin

JENIS MATA PELAJARAN DI SEKOLAH-SEKOLAH UMUM UNTUK BAGIAN BERLIN			
	Kelas 1 - 6	Kelas 7 – 10 Tingkat Sekunder I	Kelas 11 – 13 Tingkat Sekunder II (<i>Gymnasiale Oberstufe</i>)
Seni Lukis		✓	✓
Biologi		✓	✓
Kimia		✓	✓
Bahasa China		✓ Pilihan Wajib	✓
Pelajaran Teater (<i>Darstellendes Spiel</i>)		✓ Pilihan Wajib	✓
Bahasa Jerman	✓	✓	✓
Jerman sebagai Bhs. Kedua (<i>DaZ</i>)	✓	✓	
<i>Deutsche Gebärdensprache</i>	✓	✓	
Bahasa Inggris*	✓	✓	✓
Ethik		✓	
Bahasa Perancis*	✓	✓	✓
Geografi	✓	✓	✓
Sejarah	✓	✓	✓
Bahasa Yunani Kuno		✓	✓
Bahasa Yunani Modern		✓	✓
Bahasa Ibrani			✓

Informatika/Dasar-Dasar Informatika		✓ Pilihan Wajib	✓
Bahasa Italia		✓	✓
Bahasa Jepang		✓	✓
Bahasa Latin		✓	✓
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Global (<i>Lernen in globalen Zusammenhängen</i>)	✓	✓	
Kesenian	✓		
Matematika	✓	✓	✓
Musik	✓	✓	✓
Ilmu Pengetahuan Alam	✓		
Filosofi		✓ Pilihan Wajib	✓
Fisika		✓	✓
Ilmu Pengetahuan Politik			✓
Pendidikan Politik	✓		
Bahasa Polandia		✓	✓
Bahasa Portugis		✓	✓
Psikologi		✓ Pilihan Wajib	✓
Hukum			✓
Bahasa Russia		✓	✓
Hidup Bermasyarakat (<i>Sachunterricht - kindorientierter und lebensweltorientierter Unterricht</i>)	✓		
Pendidikan Tambahan dengan Fokus: Pembentukan Karakter (<i>Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“</i>)	✓	✓	

Pendidikan Tambahan dengan Fokus: Belajar (<i>Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt „Lernen“</i>)	✓	✓	
<i>Sozialkunde</i>		✓	
Ilmu Pengetahuan Sosial			✓
Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu Pengetahuan Ekonomi		✓ Pilihan Wajib	
Bahasa Spanyol		✓	✓
Olah Raga	✓	✓	✓
Studi dan Karir			✓
Bahasa Turki		✓	✓
Ekonomi – Kerja – Teknik **		✓	
Ilmu Pengetahuan Ekonomi			✓
Pilihan Wajib I Sek. Lanjutan Menengah***		✓	
Pilihan Wajib III Sek. Lanjutan Menengah***		✓	
Sumber: www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/lehrplaene			

* Isi kerangka kurikulum untuk bahasa Inggris dan Perancis untuk sekolah dasar dan sekolah menengah adalah identik. Ini berlaku untuk kelas 3 sampai 10.

** Mata Pelajaran Bisnis Manajemen untuk kelas 7 pada tahun ajaran 2010/11 dan pada tahun ajaran 2011/12 di kelas 7 dan 8 diganti dengan Mata Pelajaran: Ekonomi – Kerja – Teknologi.

*** Umumnya adalah pelajaran-pelajaran mengenai musik, olah raga, kesenian dan bahasa asing kedua.

Berikut, penjelasan dari jenis-jenis sekolah yang terdapat pada tingkat Sekunder II.

1. Sekolah Lanjutan Atas/Sekolah Lanjutan Gabungan (*Gymnasium/Gesamtschule*)

Unsur utama dari tingkat Sekunder II di sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan gabungan adalah sistem kursus dimana siswa dapat memilih sendiri mata pelajarannya sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya untuk mempersiapkan diri dalam mengambil pendidikan akademis.

Berbagai negara bagian sedang mengubah sistem pilihan ini dengan mengutamakan beberapa mata pelajaran sebagai mata pelajaran

dasar dan untuk mengurangi spesialisasi. Dengan demikian, Bahasa Jerman, Matematika, Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya diutamakan sebagai mata pelajaran wajib. Selain itu, ada tendensi tingkat lanjutan atas lebih berorientasi terhadap dunia kerja dan jangka waktunya dikurangi dari 3 menjadi 2 tahun maupun pembaharuan di bidang didaktik dan metode pengajaran. Alasannya adalah bahwa para lulusan sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan gabungan sejak beberapa tahun terakhir lebih berorientasi pada pendidikan kejuruan tinggi. Ijazah akhir tingkat Sekunder II adalah merupakan ijin studi untuk semua jenis perguruan tinggi dan semua jenis sekolah pendidikan kejuruan.

Pada sebagian besar negara bagian, waktu pendidikan umum ini sedang dipersingkat dari 9 menjadi 8 tahun, sehingga izin masuk perguruan tinggi umum dapat diterima setelah kelas 12, tidak lagi setelah kelas 13. Sejak tahun 2004, semua negara bagian mulai menawarkan jenjang pendidikan lanjutan atas yang singkat. Dengan demikian, sekolah lanjutan atas dimulai dari kelas 5 (atau kelas 7 di negara bagian Berlin dan Brandenburg) dan berlangsung sampai kelas 12 atau 13.

Dengan pembentukan sekolah lanjutan gabungan, beberapa negara bagian sejak akhir tahun 70-an ingin meningkatkan keadilan pada sistem pendidikan, menghindari keputusan mengenai karir terlalu cepat, memperkuat dorongan individu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, kekurangan jumlah dan jenis mata pelajaran maupun seleksi sosial yang terjadi dalam Sistem Tertata selama ini. Sekolah lanjutan gabungan menggabungkan semua jenjang pendidikan menengah umum, mulai dari sekolah lanjutan dasar sampai sekolah lanjutan atas di bawah satu atap, sehingga siswa yang berpartisipasi dalam jenjang berbeda tetap duduk di kelas yang sama. Sampai sekarang jumlah sekolah lanjutan gabungan ini ada sekitar 800 di seluruh Jerman.

Jenis sekolah ini mengalami banyak masalah persaingan dengan jenis-jenis sekolah lain karena biasanya siswa-siswa yang lebih baik lebih senang masuk sekolah lanjutan menengah atau atas. Namun, di komunitas yang lebih miskin, sekolah lanjutan gabungan ini lebih

populer. Selain itu, dengan persatuan beberapa sekolah menjadi satu sekolah besar, komunitas bisa menghemat dana.

Biro statistik „Statista“ didalam website nya menyatakan, bahwa pada tahun 2012/2013 jumlah siswa/siswi yang terdaftar dalam jenis-jenis sekolah umum berkisar 8.557.069 orang.

2. Jenis-Jenis Sekolah Kejuruan (*Berufsschulen*)

Sekolah kejuruan adalah sekolah yang memberikan pendidikan sehari penuh dengan berbagai jenis menurut persyaratan masuk, jangka waktu dan jenis ijazah. Kepada siswa yang bersekolah dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun diberikan pendidikan kejuruan dasar, dan dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun diberikan pendidikan kejuruan lengkap. Kalau diambil jangka waktu minimal 2 tahun dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu dapat diperoleh ijin masuk perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan. Di Jerman, terdapat sembilan jenis sekolah atau pendidikan kejuruan dengan tugas-tugas tertentu, yaitu:

- Tahun persiapan kejuruan (*Berufsvorbereitungsjahr*)
- Tahun kejuruan dasar (*Berufsgrundschuljahr*)
- Sekolah kejuruan (*Berufsschule*)
- Sekolah kejuruan keahlian (*Berufsfachschule*)
- Sekolah keahlian (*Fachschule*)
- Sekolah pendidikan tambahan kejuruan (*Berufsaufbauschule*)
- Sekolah keahlian lanjutan atas (*Fachoberschule*)
- Sekolah lanjutan atas kejuruan (*Berufliches Gymnasium*)
- Sekolah kolej (*Kolleg*)

Jika sekolah lanjutan dasar tidak dapat diselesaikan, maka para siswa masih bisa menyelesaikan tahun persiapan kejuruan (*Berufsvorbereitungsjahr*).

Setelah lulus, siswa diijinkan untuk memulai pendidikan kejuruan di sistem ganda. Tahun kejuruan dasar (*Berufsgrundschuljahr*) adalah sekolah dengan pelajaran selama satu tahun untuk lulusan sekolah lanjutan dasar untuk memenuhi persyaratan jangka waktu pendidikan sekolah wajib sampai umur 18 tahun, dimana siswa diajarkan mutu dasar dalam satu bidang keahlian tertentu.

Sekolah kejuruan (*Berufsschule*) biasa adalah bagian dari pendidikan

kejuruan dalam Sistem Ganda yang mendampingi siswa selama dididik di suatu perusahaan dan memberikan pendidikan teori serta umum.

Sekolah keahlian kejuruan (*Berufsfachschule*) menawarkan baik pendidikan dalam Sistem Ganda maupun pendidikan kejuruan yang dapat diselesaikan di sekolah saja. Pendidikan ini dapat diteruskan di sekolah keahlian (*Fachschule*), misalnya untuk menjadi *Meister*.

Sekolah keahlian memberikan pendidikan lanjutan kejuruan selama 1 sampai 3 tahun. Persyaratannya adalah lulusan pendidikan kejuruan biasa di dalam pekerjaan yang diakui, ditambah dengan pengalaman kerja. Dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, dapat diperoleh izin masuk perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan.

Sambil atau sesudah pendidikan kejuruan siswa dapat mengikuti pendidikan di sekolah pendidikan tambahan kejuruan (*Berufsaufbauschule*) untuk menerima ijazah yang setara dengan ijazah akhir sekolah lanjutan menengah. Ijazah ini dapat digunakan untuk meneruskan pendidikan ke sekolah keahlian lanjutan atas atau sekolah lanjutan atas kejuruan (*Berufliches Gymnasium*), sekolah keahlian lanjutan atas (*Fachoberschule*) dan sekolah berdurasi selama 2 tahun yang melanjutkan pendidikan lanjutan menengah dengan kelas 11 dan 12. Setelah lulus, para murid mendapat izin masuk perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan. Para lulusan pendidikan lanjutan menengah, ditambah dengan pendidikan kejuruan, diizinkan langsung masuk kelas 12 dari sekolah keahlian lanjutan atas ini. Beberapa negara bagian juga menambah kelas 13, sehingga lulusan diberikan izin masuk perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan terbatas dan dengan persyaratan tertentu, juga izin masuk perguruan tinggi umum.

Beberapa negara bagian menawarkan lanjutan dari pendidikan sekolah keahlian lanjutan atas selama 1 tahun (sekolah atas keahlian 13, *Fachoberschule* 13, atau sekolah kejuruan tingkat atas, *Berufsoberschule*). Dengan demikian, lulusan mendapat izin masuk perguruan tinggi umum tanpa batasan jurusan.

Sekolah lanjutan atas kejuruan (*Berufliches Gymnasium*) hanya

terdapat di beberapa negara bagian dan memberikan kesempatan untuk mengambil izin masuk perguruan tinggi terbatas kepada murid-murid yang lulus pendidikan lanjutan menengah, ditambah dengan pendidikan kejuruan atau pengalaman kerja 5 tahun. Dengan membuktikan pengetahuan bahasa asing kedua, siswa dapat menerima izin masuk perguruan tinggi umum.

Di dalam jenis-jenis sekolah kejuruan yang ada, sekolah lanjutan atas kejuruan mengambil posisi khusus karena merupakan tingkat pendidikan atas dengan titik berat kejuruan. Dengan demikian, sekolah lanjutan atas disebutkan sesuai dengan kejuruannya, seperti misalnya sekolah lanjutan atas Teknik, sekolah lanjutan atas Ekonomi, sekolah lanjutan atas Ilmu-ilmu Pangan, sekolah lanjutan atas Bioteknologi dan sebagainya. Para lulusan yang sudah menerima ijazah akhir diizinkan untuk studi di semua jurusan.

Sekolah kolej (*Kollegschule*) mirip dengan sekolah lanjutan atas kejuruan dimana disini diberikan pendidikan umum dengan titik berat kejuruan. Sekolah kolej terdapat untuk bidang Teknik, Ekonomi atau Sosial. Para lulusan mempunyai ijazah kejuruan dan sekaligus izin studi untuk semua jurusan.

Menurut data yang didapat melalui biro statistik Jerman “Statista”, pada tahun 2012/2013 jumlah siswa/siswi yang terdaftar sebagai pelajar di sekolah kejuruan adalah 2.562.250 orang.

3. Sistem Pendidikan Kejuruan Ganda (*Duale Ausbildung*)

Sistem pendidikan kejuruan ganda hanya terdapat di beberapa negara bagian dan sangat berhasil diterapkan. Unsur utama dari sistem pendidikan ini adalah pembagian pendidikan ke beberapa tempat belajar yang berada di bawah kewenangan sekolah kejuruan dan perusahaan yang mendidik, ditambah dengan instansi pendidikan ketiga, jika dibutuhkan.

Sekolah kejuruan berwenang untuk memberikan pendidikan keahlian teori dan umum. Yang ditawarkan bukan hanya mata pelajaran yang berkaitan dengan kejuruan secara konkrit, tetapi juga di atas beberapa kejuruan atau pendidikan umum dan Politik. Penawaran mata pelajaran tergantung dari kurikulum yang diterbitkan oleh masing-masing negara bagian, namun harus tetap

sesuai dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (*Kultusminis terkonferenz*). Di sisi lain adalah pendidikan di perusahaan atau di tempat kerja dengan mengutamakan pengetahuan keahlian praktek yang diatur di dalam Peraturan Pendidikan Kejuruan (*Ausbildungsordnung*), dimana perusahaan bebas membuat jadwal waktu, tempat pendidikan dan metode pelajaran. Terkadang ditawarkan kursus tambahan di dalam atau di luar perusahaan.



Gambar 2.2 Sistem Pendidikan Kejuruan Ganda-Pendidikan Praktek di Perusahaan

2.1.4 Tingkat Tersier – Pendidikan Tinggi

Tingkat Tersier pada sistem pendidikan Jerman terdiri dari sekitar 340 perguruan tinggi, dimana hampir semua didanai oleh negara-negara bagian. Selain pendanaan, kewenangan pendidikan tinggi juga terletak pada negara-negara bagian, tetapi dibawah kerangka hukum, yaitu Undang-Undang Kerangka Perguruan Tinggi (*Hochschulrahmengesetz*).

Sekitar 160 perguruan tinggi adalah universitas, perguruan tinggi agama dan pedagogik maupun perguruan tinggi seni, dimana dididik sekitar 3/4 dari semua mahasiswa Jerman. Mahasiswa lainnya mengambil studi di institusi pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi Ilmu-ilmu terapan, perguruan tinggi Sistem Ganda dan institusi yang serupa.

Perguruan tinggi Sistem Ganda (*Duale Hochschule*) memberikan kesempatan untuk melakukan transfer Sistem Ganda ke bidang

pendidikan Tersier. Caranya dengan menggabungkan pendidikan kejuruan ilmiah dengan kerja praktek, melalui pendidikan di perguruan tinggi sendiri, dan dikaitkan dengan pekerjaan di perusahaan sesuai Sistem Ganda.

Tugas pokok dari perguruan tinggi adalah riset, pengajaran, pemberian pengetahuan dan pendidikan lanjutan serta penyerahan gelar akademis. Untuk itu, perguruan tinggi terdiri dari fakultas-fakultas yang menyatukan beberapa ilmu yang terkait. Selain itu setiap perguruan tinggi mempunyai berbagai biro administrasi dan jasa.

Pada awal 2010, terdapat sekitar 1,9 juta mahasiswa di Jerman yang mengambil studi di perguruan tinggi, dan sesuai perkiraan jumlah ini naik menjadi 2,2 sampai 2,4 juta mahasiswa sampai tahun 2011.

Persyaratan untuk masuk perguruan tinggi adalah izin masuk perguruan tinggi, biasanya yang disebut *Abitur* atau *Allgemeine Hochschulreife*. Persyaratan lain dan struktur studi sangat tergantung jurusan.

Struktur studi diatur melalui peraturan studi dan ujian (*Studien- und Prüfungsordnung*) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Selain itu gelar yang dapat diterima juga tergantung jurusan. Yang banyak dikenal adalah *Magister*, *Diplom*, Ujian Negara (*Staatsexamen*), *Bachelor* dan *Master*, serta gelar-gelar studi pasca sarjana seperti misalnya *Doctor*.

Pendidikan tinggi saat ini banyak didiskusikan di Jerman, misalnya masalah pembayaran biaya studi oleh mahasiswa atau peningkatan bantuan dana dari pemerintah federal. Satu masalah utama adalah kewenangan untuk pendidikan tinggi yang terletak di negara-negara bagian yang dananya kurang. Hanya bidang pendidikan yang masih memungkinkan untuk dilakukan penghematan dana karena anggaran-anggaran pada bidang lainnya telah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Dasar reformasi terhadap masalah ini yang pada umumnya ingin memberikan kewenangan lebih banyak kepada pemerintah federal, sampai sekarang tidak berhasil karena ketidakinginan negara-negara bagian untuk mengalihkan tugas-tugasnya kepada pemerintah federal. Beberapa ahli takut akan politik pendidikan di Jerman yang semakin lemah dan menuntut restrukturasi sistem pendidikan total.

2.1.5 Tingkat Kwartir – Pendidikan Lanjutan dan Non-Formal

Tingkat Kwartir meliputi semua jenis pendidikan lanjutan dan non-formal. Di Jerman, tingkat ini berdiri sendiri, sedangkan OECD memasukkannya dalam tingkat Tersier. Bidang yang paling kuat di tingkat ini adalah pelajaran non-formal, yang sulit diukur. Selain itu, terdapat juga pendidikan lanjutan formal yang dibagi menjadi bidang pendidikan lanjutan kejuruan, umum dan politik. Di bidang pendidikan kejuruan dikenal istilah pelajaran seumur hidup (*lifelong learning*).

Tempat-tempat terkenal sektor ini adalah perpustakaan umum, sekolah pendidikan non-formal (*Volkshochschulen*), pusat-pusat pendidikan gereja, serikat buruh dan asosiasi (kamar), instansi pendidikan swasta dan perusahaan, perguruan tinggi dan sekolah lanjutan atas malam. Satu tren baru adalah *e-learning* yang semakin populer, khususnya di bidang pendidikan lanjutan. Pada umumnya, pendidikan lanjutan dewasa ini lebih berperan karena pendidikan lanjutan secara terus-menerus menyesuaikan diri pada perubahan masyarakat yang sangat cepat.

2.1.6 Bidang-Bidang Khusus

Di samping sistem sekolah umum yang didanai oleh pemerintah, terdapat juga sistem lain yang terdiri dari sekolah-sekolah dan instansi pendidikan yang sebagian didanai oleh pemerintah sebagian lagi oleh swasta. Berikut, beberapa di antaranya.

1. Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Dorongan (*Sonderschule, Förderschule*)

Siswa yang tidak mempunyai perspektif untuk berhasil di sistem pendidikan umum karena sakit cacat pada umumnya mengikuti pendidikan pada sekolah khusus dapat didaftarkan pada sekolah yang biasanya disebut sebagai sekolah dorongan (*Förderschule*). Sejak tahun 1778, didirikan institusi pendidikan pertama untuk anak-anak bisu-tuli. Sekitar tahun 1900an, terdapat berbagai jenis sekolah luar biasa di masing-masing negara bagian. Di tahun 70-an, diperoleh pengalaman positif dengan mengintegrasikan siswa

cacat dengan siswa tidak cacat di dalam sekolah terintegrasi. Karena pengalaman yang positif ini, maka jumlah sekolah terintegrasi sampai sekarang naik secara terus-menerus dan sekolah-sekolah umum juga disarankan menerima siswa cacat, jika memungkinkan.

2. Sekolah-Sekolah Swasta (*Privatschulen*)

Di sistem pendidikan Jerman, sekolah swasta tidak berperan besar, utamanya karena Pasal 7 Undang-Undang Dasar RFJ yang menetapkan bahwa pemerintah yang berwenang untuk pendidikan, walaupun pasal tersebut ini juga memberikan hak untuk mendirikan sekolah swasta dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratannya dipenuhi, sekolah swasta akan diberikan pengakuan dari pemerintah.

Jika sekolah swasta memberikan lulusan yang setara dengan lulusan sekolah umum, maka sekolah tersebut akan diakui sebagai sekolah pada umumnya dan berhak menerima dana dari pemerintah untuk pegawai, langganan daya dan jasa serta administrasi. Saat ini, terdapat lebih dari ½ juta siswa belajar pada 2.500 sekolah swasta pendidikan umum atau kejuruan, dimana sebagian besar di bawah kewenangan gereja. Walaupun perannya tidak terlalu signifikan, sekolah swasta sering mengambil peran sebagai sekolah percontohan untuk menerapkan konsep-konsep pedagogik baru, sebelum kemudian masuk pada sistem sekolah pemerintah.

3. Pelajaran Tambahan (*Nachhilfe*)

Sektor pelajaran tambahan meliputi semua bantuan keahlian untuk para pelajar dengan tujuan untuk memperbaiki prestasi di sekolah. Pada tingkat primer biasanya dilaksanakan di dalam keluarga. Tetapi, dengan masuk kelas-kelas lebih tinggi, maka pelajaran tambahan yang dibiayai mengambil peran lebih besar. Sekitar separuh dari semua siswa, sekurang-kurangnya menerima pelajaran tambahan pribadi dan jumlah ini naik secara terus-menerus. Di Jerman, terdapat sekitar 3.000 institusi pelajaran tambahan swasta yang juga menawarkan jasanya kepada mahasiswa. Di tahun-tahun terakhir ini, dibentuk banyak bidang pelajaran tambahan yang berbasis internet dengan perangkat lunak belajar.



Gambar 2.3 Pendidikan Non-Formal Sangat Populer di Jerman

2.2 Dasar-Dasar Hukum

1. Hak Pendidikan

Hak untuk menerima pendidikan adalah hak asasi manusia sesuai dengan pasal 26 dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 10 Desember 1948. Di dalam pasal 13 dari Pakta Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hak pendidikan ini diperluas lagi menjadi hak asasi manusia budaya. RFJ telah menandatangani pakta tersebut pada tanggal 9 Oktober 1968.

Hak pendidikan ini dianggap sebagai hak asasi manusia umum dan merupakan hal penting untuk mendorong hak asasi manusia lain. Dalam hal ini, ditetapkan kebutuhan umum manusia terhadap kesempatan mengikuti pendidikan, keadilan memperoleh peluang dan hak sekolah, tanpa batasan apapun.

Pada Undang-Undang Dasar RFJ, hak pendidikan tidak dicantumkan secara eksplisit. Namun, hak pendidikan dapat disimpulkan dari hak-hak dasar lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar RFJ. Misalnya, prinsip dasar martabat manusia melarang tidak memberikan peluang pendidikan kepada manusia. Prinsip kesamaan hak melarang untuk merugikan atau mengutamakan manusia dalam pendidikannya karena keturunannya, sukunya, bahasanya, tanah airnya, agamanya atau karena pendapat politis atau keagamaannya.

Hak-hak pendidikan lebih lanjut ditetapkan oleh negara-negara bagian dalam konstitusinya. Negara-negara bagian juga harus melaksanakan, mengawasi dan membentuk sistem pendidikan melalui hukum-hukum sekolah, peraturan sekolah maupun kurikulum dan perencanaan pengajaran.

Pendidikan kejuruan diatur melalui hukum dan peraturan federal, misalnya melalui Undang-Undang Pendidikan Kejuruan (*Berufsbildungsgesetz*) dan Kerangka Perencanaan Pendidikan Kejuruan (*Ausbildungsrahmenplan*). Undang-Undang yang berlaku untuk mengatur perguruan tinggi adalah Undang-Undang Kerangka Perguruan Tinggi (*Hochschulrahmengesetz*) di tingkat federal. Selain itu, terdapat juga berbagai Undang-Undang Negara Bagian dan peraturan intern perguruan tinggi. Namun demikian, bidang pendidikan lanjutan belum terlalu diatur.

2. Kewajiban Sekolah

Untuk melaksanakan hak pendidikan, maka pendidikan sekolah di Jerman diwajibkan. Kewajiban sekolah tidak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau dalam Undang-Undang tingkat federal lain. Namun, di dalam konstitusi masing-masing negara bagian, kewenangan pendidikan di Jerman ada pada negara-negara bagian.

Negara-negara bagian diberikan hak untuk itu dari Undang-Undang Dasar, pasal 7, dimana ditetapkan bahwa sistem sekolah terletak dalam pengawasan pemerintah federal. Sesuai dengan keputusan jaksa agung, ini berarti bahwa negara-negara bagian mempunyai hak untuk menetapkan kewajiban sekolah melalui Undang-Undang negara.

Di Jerman, dibedakan antara kewajiban sekolah penuh dan kewajiban sekolah kejuruan. Kewajiban sekolah penuh umumnya berlangsung sampai akhir tahun ajaran ke-sembilan, beberapa negara bagian sampai akhir tahun ajaran ke-sepuluh. Artinya, bukan kelas 9 atau 10, tetapi 9 atau 10 tahun mengikuti pelajaran di sekolah. Misalnya, seorang siswa yang tidak naik kelas dua kali, hanya masuk sekolah sampai kelas 7 atau kelas 8.

Kewajiban sekolah kejuruan mulai setelah kewajiban sekolah umum selesai dan bisa dipenuhi baik melalui mengikuti pendidikan kejuruan, jenjang pendidikan kejuruan lainnya atau mengikuti tingkat Sekunder I atau tingkat Sekunder II pada sekolah lanjutan umum. Biasanya, kewajiban sekolah berhenti setelah pendidikan kejuruan selesai atau dengan akhir tahun ajaran ke-dua belas.

Untuk semua anak yang berusia 6 tahun sebelum tanggal 30 Juni, maka kewajiban sekolah mulai pada tanggal 1 Agustus di tahun tersebut. Beberapa negara bagian telah memajukan tanggal tersebut sehingga anak berusia 5 tahun atau lebih muda sudah dapat masuk sekolah, jika dinilai sudah mampu.

Pasal 7 Undang-Undang RFJ berisikan sebagai berikut.

1. *Keseluruhan sistem pendidikan terletak dalam pengawasan pemerintah federal.*
2. *Orang tua atau wali mempunyai hak untuk memutuskan sendiri tentang keikutsertaan anaknya pada pelajaran agama.*
3. *Pelajaran agama di sekolah-sekolah umum adalah merupakan pelajaran reguler, kecuali di sekolah-sekolah yang menolak agama. Walaupun pemerintah berhak mengawasi, namun pelajaran agama diberikan sesuai dengan dasar-dasar kehidupan masyarakat beragama. Guru tidak boleh dipaksa memberikan pelajaran agama jika tidak ingin.*
4. *Hak untuk mendirikan sekolah swasta akan dijamin. Pendirian sekolah swasta sebagai pengganti sekolah umum harus diijinkan oleh pemerintah federal dan dibawah Undang-Undang negara bagian. Izin harus dikeluarkan jika sekolah swasta dengan tujuan pendidikan dan instansinya maupun pendidikan ilmiah gurunya sekurang-kurangnya sama dengan sekolah umum dan tidak diutamakan hanya untuk murid-murid yang orang tuanya kaya. Izin tidak boleh dikeluarkan jika status ekonomi atau hukum dari guru-guru tidak dapat dijamin dengan baik.*
5. *Pendirian sekolah dasar swasta hanya diizinkan jika administrasi pelajaran dapat membuktikan diperlukannya program pedagogik yang khusus, atau ada permintaan dari wali siswa, jika didirikan*

sebagai sekolah komunitas, agama atau ideologi, dan jika sekolah dasar umum seperti ini belum ada di komunitasnya.

2.3 Para Aktor

Di Jerman terdapat tiga kelompok para aktor yang bergerak di sistem pendidikan:

1. Pemerintah dalam bentuk pemerintah federal, komunitas-komunitas dan komisi-komisi federalisme kooperatif. Ini adalah khususnya instansi-instansi yang terkait dengan Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (*Kultusministerkonferenz*, KMK) dan Konferensi Bersama Ilmu-Ilmu Pengetahuan (*Gemeinsame Wissenschaftskonferenz*, GWK).
2. Komisi-komisi pemerintah federal untuk penasehat politik seperti misalnya Dewan Ilmu-Ilmu Pengetahuan (*Wissenschaftsrat*) atau Dewan Pendidikan (*Bildungsrat*).
3. Di tingkat non-pemerintah khususnya perwakilan-perwakilan kelompok yang ikut serta pada sistem pendidikan seperti misalnya Serikat Buruh Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, (*Gewerk-schaft Erziehung und Wissenschaft*) atau Ikatan Guru Jerman (*Deutscher Lehrerverband*) dan organisasi-organisasi lain seperti misalnya Ikatan Federal Sekolah-Sekolah Swasta Jerman (*Bundesverband Deutscher Privat schulen*) atau Institut Jerman untuk Pendidikan Non-Formal (*Deutsches Institut für Erwachsenenbildung*) dan Konferensi Rektor-Rektor Perguruan Tinggi (*Hochschulrektor-renkonferenz*).

Karena pada sistem pendidikan kewenangan terletak pada negara-negara bagian, maka pemerintah federal harus membatasi diri untuk masalah kerangka kompetensi, khususnya di bidang perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan. Untuk hal-hal internal, hanya negara-negara bagian yang berwenang. Mereka membentuk sistem sekolah dan melaksanakan pengawasan sekolah. Negara bagian bisa memberikan dana kepada sekolah, menetapkan Undang-Undang dan peraturan, atau memberikan izin untuk membuka sekolah.

Tugas komunitas adalah dalam hal-hal eksternal seperti administrasi gedung dan perlengkapan dengan barang. Untuk mencapai

homogenitas, dibutuhkan komisi-komisi federalisme kooperatif, khususnya Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah didirikan oleh Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap menjaga kesamaan kualitas di bidang pendidikan umum termasuk liburan sekolah.

Tugas Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah menetapkan kualitas pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan tinggi. Tema-tema lainnya yang diutamakan adalah pendirian kursus Bachelor dan Master, kualifikasi/akreditasi jurusan baru, pendidikan lanjutan ilmuwan dan sebagainya. Para aktor non-pemerintah dan komisi-komisi yang memberikan nasehat tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap sistem pendidikan tetapi berfungsi sebagai penasehat. Namun, mereka mengembangkan konsep atau persyaratan, dan ikut serta dalam riset pendidikan atau melaksanakan studi-studi. Mereka juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap politik pendidikan.



Foto: obs/Bundesministerium für Bildung und Forschung/Laurence Chaperon

Gambar 2.4 Menteri Federal Riset dan Pendidikan RFJ, Johanna Wanka

3

Pembinaan Profesi Guru

3.1 Guru

Semua guru di Jerman harus menyelesaikan pendidikan akademis. Hingga tahun 1960-an, pendidikan tersebut tidak berorientasi ilmiah, sehingga misalnya guru sekolah dasar dididik pada perguruan tinggi pedagogis tanpa mempunyai gelar dari universitas. Perguruan tinggi pedagogis ini telah dihapuskan dan sebagian diintegrasikan pada perguruan tinggi ilmiah lain. Pengecualian terjadi di negara bagian Baden-Wurttemberg, dimana pendidikan guru tetap di perguruan tinggi pedagogis, kecuali pendidikan untuk guru sekolah lanjutan atas dan sekolah kejuruan yang dilaksanakan di universitas biasa.

Kini, pendidikan guru, yang sebagian besar berupa ilmu pedagogik dan sangat panjang, dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama harus mengikuti pendidikan di universitas, sebelum bisa dimulai kerja praktek (*Refendariat*). Pada saat studi di universitas, titik beratnya adalah dua Ilmu Pengetahuan beserta studi Ilmu Pendidikan, yang waktu studinya tergantung dari jenis sekolah.

Di Jerman, studi guru dapat diambil untuk mengajar di:

- Sekolah lanjutan atas – untuk mengajar di sekolah lanjutan atas, menengah dan dasar.
- Sekolah lanjutan menengah – untuk mengajar di sekolah lanjutan atas sampai akhir tingkat Sekunder I, sekolah lanjutan menengah dan dasar.

- Sekolah dasar dan sekolah lanjutan dasar
- Sekolah Pendidikan Kejuruan – untuk mengajar di semua jenis sekolah kejuruan dan sekolah lanjutan atas kejuruan.
- Sekolah Khusus – untuk mengajar di sekolah dasar, lanjutan dasar dan khusus maupun sekolah lanjutan gabungan terintegrasi dengan bagian pedagogik khusus.

Pada beberapa negara bagian, pendidikan guru mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sehingga jurusan yang ditawarkan berlaku hanya untuk tingkat Primer (sekolah dasar), tingkat Sekunder I atau tingkat Sekunder II.

Pendidikan pada perguruan tinggi berhenti dengan ujian negara pertama (*Erstes Staatsex amen*), yaitu ujian tertulis tentang metode-metode keahlian dan konsep.

Tahap kedua merupakan pendidikan praktek berbentuk diskusi-diskusi di seminar. Pada awal tahap kedua ini, para calon guru mengikuti pelajaran sekolah sebagai. Pada akhir tahap kedua ini, para calon guru harus melaksanakan praktek beberapa jam pengajaran di sekolah. Saat ini sedang berkembang pemikiran untuk membentuk studi guru sebagai studi dasar di perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan dengan gelar akademis Bachelor dan studi utama sebagai pasca-sarjana atau Master.

Terkadang para guru mengalami kesulitan jika ingin pindah ke negara bagian lain karena pendidikannya yang tidak diakui. Menurut peraturan federal, terdapat juga guru yang tidak menyelesaikan studi di universitas yang khusus untuk mendidik para guru, melainkan di perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan. Mereka tidak menyelesaikan studi guru atau pendidikan setara tetapi diharapkan berasal dari dunia praktis seperti para insinyur atau *Meister* dan sebagainya. Mereka hanya dapat mengajar pada sekolah-sekolah kejuruan. Di negara bagian Baden-Württemberg selain jenis guru yang disebutkan di atas, guru Musik dan Teknologi juga tidak harus menyelesaikan studi guru. Mereka dididik pada seminar keahlian pedagogik (*Pädagogisches Fachseminar*) untuk semua jenis sekolah. Guru dan penasehat yang bekerja pada sekolah-sekolah pertanian Pertanian harus merupakan lulusan perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan untuk administrasi Pertanian.

3.2 Pelatih (*Meister*)

Orang yang memberikan pendidikan dalam sistem pendidikan kejuruan adalah ketua pelatihan, Meister atau pelatih. Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan (*Berufsbildungs-gesetz*) mereka harus mempunyai pengetahuan keahlian yang cukup baik, dibuktikan dengan menyelesaikan pendidikan dalam pekerjaan yang diajar. Selain itu, mereka juga dituntut kemampuan di bidang metodik dan didaktik, hukum dan sebagainya, yang dapat dibuktikan melalui ujian sesuai dengan Peraturan Kemampuan Pelatih (*Ausbildereignungsverordnung*). Di bidang Pertukangan, kemampuan pelatih dibuktikan melalui ujian *Meister*.

4

Evaluasi dan Ujian

4.1 Evaluasi

Melalui penilaian, diharapkan prestasi siswa dapat dibandingkan dengan yang lain dan juga siswa berminat meningkatkan prestasinya. Penilaian ini diberikan pada setiap mata pelajaran, dan juga untuk menilai beberapa sikap umum seperti kerajinan atau keikutsertaan dalam pelajaran.

Di sekolah-sekolah Jerman, sampai akhir tingkat Sekunder I pada umumnya digunakan penilaian dalam bentuk angka 1 sampai 6. Ujian akhir dianggap lulus, jika siswa mencapai nilai angka '1' sampai '4'. Penilaian di bawah '4' berarti tidak lulus.

Pada tes-tes kelas, penilaian ini dapat ditambah dengan tanda '+' atau '-', juga dengan angka dibelakang koma, jika prestasi lebih baik atau lebih buruk sedikit daripada nilai yang diberikan, misalnya: '2+' adalah 'sangat baik', '2-' 'masih baik'; '1,7' (atau '1,75') setara dengan '2+' dan '2,2' (atau '2,25') setara dengan '2-'. Nilai '1-2' setara dengan '1,5', lihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Definisi Penilaian yang Ditetapkan oleh Konferensi Menteri-
menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1968

Nilai			Keterangan
Angka	Kata		
	Bahasa Jerman	Bahasa Indonesia	
1	<i>Sehr gut</i>	Amat baik	Jika prestasi sangat memenuhi persyaratan
2	<i>Gut</i>	Baik	Jika prestasi memenuhi persyaratan
3	<i>Befriedigend</i>	Memuaskan	Jika prestasi pada umumnya memenuhi persyaratan;
4	<i>Ausreichend</i>	Cukup	Jika prestasi walaupun ada kekurangan, masih bisa dikatakan memenuhi persyaratan
5	<i>Mangelhaft</i>	Kurang	Jika prestasi tidak memenuhi persyaratan, tetapi masih terdapat pengetahuan dasar yang dibutuhkan dan bahwa kekurangan dalam waktu dekat dapat dihilangkan
6	<i>Ungenügend</i>	Buruk	Jika prestasi tidak memenuhi persyaratan dan kekurangan pengetahuan dasar pun tidak dapat diperbaiki dalam waktu dekat

Definisi penilaian ini ditetapkan oleh Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 03 Oktober 1968 dan dilaksanakan di seluruh negara bagian.

Pada tingkat pendidikan lanjutan atas/Sekunder II dan juga pada sekolah-sekolah kejuruan lanjutan, penilaian diberikan melalui sistem kredit yang juga diterapkan dalam ujian akhir *Abitur*.

- 15 sampai 13 kredit setara dengan nilai '1' ('amat baik')
 - 15 kredit setara dengan nilai '0,67'
 - 14 kredit setara dengan nilai '1,0'
 - 13 kredit setara dengan nilai '1,33'
- 12 sampai 10 kredit setara dengan nilai '2' ('baik')
- 9 sampai 7 kredit setara dengan nilai '3' ('memuaskan')
- 6 sampai 5 kredit setara dengan nilai '4' ('cukup')

5. 4 kredit setara dengan nilai '4-' ('masih cukup')
6. 3 sampai 1 kredit setara dengan nilai '5' ('kurang')
7. 0 kredit setara dengan nilai '6' ('buruk')

Empat kredit (nilai '4,33') dinilai sebagai tidak lulus. Prestasi yang masih dianggap cukup untuk naik kelas atau lulus adalah lima kredit.

Pada tingkat pendidikan tinggi prestasi mahasiswa biasanya dinilai dengan angka '1' sampai '5', dengan angka di belakang koma (misalnya '1,33' atau '2,66'). Ada beberapa universitas yang menerapkan sistem penilaian sekolah. Nilai dibawah '4' biasanya berarti tidak lulus.

Disertasi pada jenjang Doktoral di universitas biasanya dinilai dengan satu dari dua sistem penilaian berikut:

1. 'summa cum laude' : amat baik
2. 'magna cum laude' : sangat baik
3. 'cum laude' : baik
4. 'rite' : lulus
5. 'insufficenter' : tidak lulus
6. '1' : amat baik
7. '2' : baik
8. '3' : lulus
9. '4' : tidak lulus,

Terkadang terdapat penilaian 'dengan pujian', yang tidak terlihat sebagai penilaian.

Sistem kedua, lihat Tabel 4.2, khususnya diterapkan pada universitas-universitas teknologi atau perguruan tinggi dengan titik berat dalam bidang ilmu-ilmu Teknik atau ilmu-ilmu Alam. Penilaian dalam ijazah atau predikat 'tidak naik kelas' dapat juga diajukan keberatan atau disanggah dan harus diajukan dalam bentuk tertulis kepada sekolah, yang harus memeriksa ulang penilaian tersebut. Jika sekolah menerima sanggahan, penilaian guru dapat diubah. Jika tidak diterima, sanggahan harus diteruskan kepada Dinas Pemeriksaan Sekolah. Dinas Pemeriksaan Sekolah menilai baik sanggahan maupun laporan dari sekolah dan memutuskan tentang menerima atau menolak sanggahan.

Tabel 4.2 Sistem Penilaian dengan Kredit

Jumlah Kredit	Dalam Huruf	%	Definisi
15	Baik sekali	96%	Sangat sesuai persyaratan
14		91%	
13		86%	
12	Baik	81%	Sesuai persyaratan sepenuhnya
11		76%	
10		71%	
9	Memuaskan	66%	Sesuai persyaratan
8		61%	
7		56%	
6	Cukup	51%	Walaupun kurang masih sesuai persyaratan
5		46%	
4	Masih cukup	41%	Prestasi kurang dan hanya sebagian sesuai persyaratan
3	Kurang	34%	Prestasi tidak sesuai persyaratan, tetapi pengetahuan dasar ada dan dapat dihapuskan dalam waktu tertentu
2		27%	
1		20%	
0	Tidak cukup	0%	Prestasi tidak sesuai persyaratan; pengetahuan dasarpun terlalu sedikit untuk bisa dihapuskan dalam waktu tertentu

4.2 Ujian

Berhubung dengan falsafah federal, maka di Jerman tidak diselenggarakan ujian akhir secara nasional, karena setiap negara bagian ingin mewujudkan gagasannya sendiri. Namun demikian, Konferensi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara-Negara Bagian, seperti yang disebutkan di atas sudah mencoba sejauh mungkin menyamakan materi ujian.

Ujian dilangsungkan dalam beberapa tahap. Kira-kira 3 bulan sebelum akhir masa sekolah diadakan ujian tertulis yang berlangsung selama beberapa hari. Ujian lisan juga diadakan di waktu ini.

Seperti yang telah diuraikan di atas, tidak ada ujian akhir untuk tingkat sekolah dasar. Sedang untuk tingkat lanjutan dasar, menengah dan atas terdapat ujian akhir untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Sesuai dengan otoritas pendidikan yang ada pada negara bagian, semua jenis ujian berlangsung pada tingkat negara bagian. Menurut Kantor Federal Statistik, pada tahun 2008, 28,7% dari semua lulusan sekolah menerima izin studi (*Allgemeine Hochschulreife*) dengan 1,5% yang menerima izin studi terbatas). Surat tanda tamat belajar dari sekolah menengah diterima oleh 40,2 %, dan lulusan sekolah dasar 22,6% dan 7,0% tidak menerima sama sekali. Kalau dibandingkan dengan studi internasional, jumlah siswa yang menerima izin studi masih relatif rendah.

Berikut adalah pemaparan ujian-ujian pada masing-masing jenis sekolah di Jerman.

1. Sekolah Lanjutan Dasar (*Hauptschule*)

Untuk menamatkan pendidikan di sekolah lanjutan dasar, siswa perlu menempuh ujian untuk 2 atau 3 mata pelajaran (Bahasa Jerman, Matematika dan satu pelajaran bahasa asing bila siswa tersebut mengambilnya di semester sebelumnya), serta satu proyek kerja kelompok. Walaupun ujian ini merupakan ujian di tingkat negara bagian, kadang-kadang guru sekolah juga dapat meminta izin untuk memberikan soal ujian sendiri.

Ujian dapat terdiri atas ujian lisan dan tertulis, dengan bobot yang bervariasi, dimana untuk bahasa bobot lisan dapat mencapai 70 %. Surat tanda tamat belajar memuat hasil ujian di atas, ditambah dengan nilai pelajaran lain yang telah mereka punyai di semester-semester sebelumnya.

2. Sekolah Lanjutan Menengah (*Realschule*)

Untuk siswa sekolah lanjutan menengah, ijazah (*Mittlere Reife*) dikeluarkan setelah siswa lulus ujian tertulis untuk 3 mata pelajaran dan ujian lisan untuk 2 mata pelajaran ditambah dengan proyek kerja kelompok. Lulusan menengah ini juga bisa diterima di jenis-jenis sekolah lain (setelah kelas 10) seperti, sekolah lanjutan atas, sekolah lanjutan dasar, sekolah gabungan dan beberapa instansi

kejuruan. Berbagai negara bagian menuntut ujian akhir sekolah lanjutan menengah yang berorientasi terhadap mutu pendidikan ujian tertulis yang telah ditetapkan oleh Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan.

Siswa yang duduk di sekolah lanjutan atas boleh mengikuti ujian pendidikan menengah pada kelas 10 secara sukarela. Sepertiga dari semua lulusan di tingkat Sekunder I ini diterima melalui pendidikan kejuruan. Di bidang ini belum ditentukan mutu-mutu pendidikan.

3. Sekolah Lanjutan Atas (Gymnasium)

Kelulusan pada tingkat sekolah lanjutan atas ditentukan melalui ujian Abitur. Untuk mengikuti ujian ini, ada beberapa syarat akademis tertentu dalam tahap kualifikasi yang harus dipenuhi.

Ujian Abitur terdiri dari 4 sampai 5 komponen. Soal ujian diberikan oleh Kementerian Pendidikan Negara Bagian atau juga oleh tenaga pengajar dari masing-masing sekolah yang diakui oleh instansi pemerintah yang melakukan supervisi terhadap sekolah tersebut.

Dalam ujian Abitur, para siswa harus menunjukkan kemampuan dan pengetahuan dalam mata pelajaran wajib, serta pengetahuan yang lebih luas dan mendalam dalam 2 mata pelajaran lainnya. Umumnya, 3 mata pelajaran, 2 di antaranya mata pelajaran yang dipelajari mendalam, diuji secara tertulis dan jika diperlukan juga dilakukan ujian lisan. Mata pelajaran keempat akan diuji secara lisan. Ketiga tipe ujian (Bahasa-Literatur-Seni, Ilmu Sosial, Matematik-Ilmu Pengetahuan Alam-Teknik) harus tercakup di dalam ujian. Dalam tipe ujian Bahasa-Literatur-Seni, Bahasa Jerman atau bahasa asing lainnya adalah mata pelajaran wajib yang akan diujikan. Termasuk di dalam ujian Abitur ini, dan tergantung dari kebijakan negara bagian, mata pelajaran ke-lima yang diuji dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, atau diganti dengan tugas tertulis lain (misalnya tugas tahunan atau hasil dari proyek penelitian mata pelajaran tertentu).

Prestasi akademik khusus siswa akan dilengkapi dengan sebuah kolokium. Dengan ujian Abitur, maka siswa tersebut dapat memperoleh ijazah untuk masuk ke perguruan tinggi. Di dalamnya, termasuk juga prestasi akademik dari fase kualifikasi.

Mahasiswa dapat melamar ke universitas jika nilai rata-rata ijazah minimal ‘cukup’ (nilai ‘4’ atau setidaknya 280 point). Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Bagian telah mengeluarkan “Kebijakan Ujian Abitur” yang seragam, yang meliputi prosedur ujian dan aturan ujian untuk semua negara bagian, yang saat ini berlaku untuk sekitar 40 mata pelajaran dan diperluas secara terus-menerus untuk mata-mata pelajaran lainnya.

4. Sekolah Kejuruan (Berufsschule)

Sekolah kejuruan dan keseluruhan pendidikan kejuruan diselesaikan dengan ujian akhir di depan kamar yang berwenang, yaitu kamar dagang, kamar pertukangan, kamar hukum dan selain itu juga sekolah-sekolah administrasi.

Yang diuji adalah pengetahuan teori dan kemampuan kerja praktek. Bentuk ujian praktek sangat tergantung dari jenjang pendidikan. Di bidang Pertukangan misalnya, harus membuat suatu karya atau studi dalam waktu terbatas.

4.2.1 Contoh Penyelenggaraan Ujian Akhir: Negara Bagian Baden-Wurttemberg

Kualitas pendidikan di Negara Bagian Baden Wurttemberg merupakan salah satu yang di nilai terbaik di Jerman.

1. Sekolah Lanjutan Dasar

- Ujian akhir setelah tahun ajaran ke-sembilan

Pada ujian akhir yang diadakan satu tahun sekali, siswa harus dapat menunjukkan bahwa target akademik sekolah lanjutan dasar telah tercapai. Semua siswa yang duduk di kelas 9 pada sekolah lanjutan dasar mengikuti ujian ini. Siswa yang memenuhi syarat dan ingin melanjutkan pelajaran di kelas 10 hanya harus melakukan ujian proyek bertema orientasi.

Ujian akhir terdiri atas satu bagian ujian tertulis, dan satu bagian ujian lisan serta ujian proyek bertema orientasi. Ujian di bidang bahasa asing (berdasarkan pilihan siswa) dilaksanakan baik tertulis maupun lisan. Persyaratan untuk mengikuti ujian bahasa asing adalah kehadiran di kelas bahasa asing yang bersangkutan pada semester kedua kelas 9.

Ujian proyek bertema orientasi terdiri atas satu proyek (yang dilakukan secara bersama-sama pada satu kelompok). Proyek ini termasuk pemilihan tema, pembentukan kelompok dan deskripsi proyek, pelaksanaan yang sebanding dengan minimal 16 jam mata pelajaran dan presentasi tentang hasil proyek. Ujian proyek bertema orientasi merupakan ujian dalam kelompok, dimana nilai secara individual akan diberikan. Dalam kasus tertentu, ujian dapat dilaksanakan sebagai ujian perorangan. Jadwal untuk ujian proyek bertema orientasi ditentukan oleh sekolah dan dilaksanakan sebelum ujian tertulis. Ujian tertulis meliputi mata pelajaran Bahasa Jerman, Matematika, bahasa asing (jika siswa dalam semester kedua kelas 9 mengikuti pelajaran bahasa asing). Ujian lisan terdiri atas (berdasarkan pilihan siswa) mata pelajaran yang juga diujikan secara tertulis dan bahasa asing (jika memungkinkan untuk dipilih sebagai mata pelajaran ujian lisan).

Nilai keseluruhan yang diperoleh dari masing-masing mata pelajaran yang diujikan merupakan nilai rata-rata dari hasil evaluasi selama satu tahun dan ujian akhir. Hasil dari ujian tertulis dan lisan memiliki bobot yang sama. Mata pelajaran yang tidak diujikan baik secara tertulis maupun lisan dinilai berdasarkan hasil evaluasi selama satu tahun.

- Ujian akhir setelah kelas 10:

Dalam ujian akhir setelah kelas 10, siswa yang diuji harus membuktikan bahwa ia telah mencapai kualifikasi kelas 10 sehingga dapat memperoleh ijazah sekolah lanjutan menengah. Ujian ini diikuti semua siswa kelas 10 yang telah melaksanakan ujian proyek di kelas 9 dan telah mendapatkan nilai. Ujian akhir terdiri dari satu bagian ujian tertulis dan satu bagian praktek serta satu bagian ujian lisan.

Mata pelajaran yang diuji secara tertulis adalah Bahasa Jerman, Matematika, bahasa asing dan Informatika. Ujian praktek meliputi satu dari mata pelajaran Teknik, Ekonomi Domestik dan Tekstil. Soal ujian terdiri dari satu bagian praktek dan

dilengkapi dengan pertanyaan tertulis dan atau lisan. Ujian lisan terdiri dari:

- Salah satu dari mata pelajaran Fisika, Biologi atau Kimia (sesuai pilihan siswa)
- Salah satu dari mata pelajaran agama, Sejarah/Ilmu Sosial, Olah Raga, Musik, Seni atau Bidang Praktis (sesuai pilihan siswa)
- Berdasarkan permintaan siswa juga dari mata pelajaran yang diujikan secara lisan

Siswa yang akan diuji memiliki kesempatan untuk menentukan titik berat tema yang akan diujikan, dimana saat ujian lisan tema tersebut yang akan diuji. Ujian dinyatakan lulus jika nilai rata-rata untuk mata pelajaran umum '4,0' atau lebih baik, dan nilai rata-rata untuk mata pelajaran inti '4,0' atau lebih baik, nilai keseluruhan dari mata pelajaran inti tidak ada yang bernilai tidak cukup dan nilai keseluruhan dari semua mata pelajaran tidak ada yang lebih jelek dari cukup. Jika semua syarat ini dipenuhi di maksimal 3 mata pelajaran, maka ujian dinyatakan lulus. Siswa yang tidak lulus dapat mengulangi ujian akhir, setelah ia mengulang kelas 10 di sekolah lanjutan dasar.

2. Sekolah Lanjutan Menengah

Ujian akhir terdiri atas satu bagian ujian tertulis yang mencakup mata pelajaran Bahasa Jerman, Matematika, bahasa asing wajib (bahan ujian kelas 10 dari sekolah lanjutan menengah yang akan diujikan) dan satu bagian ujian lisan yang terdiri dari mata pelajaran pilihan wajib dan pilihan bebas 1 atau maksimal 2 mata pelajaran yang terdiri dari pelajaran Agama, Etika, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Sosial, Fisika, Kimia, Biologi, Olah Raga, Musik, Seni. Selain itu, berdasarkan permintaan, mata pelajaran yang diujikan secara tertulis dapat pula diuji secara lisan. Pertanyaan atau tugas pada ujian lisan akan diambil dari bahan pelajaran sekolah lanjutan menengah, kelas 10.

Ujian ini akan diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ujian lisan dapat dilaksanakan sebagai ujian perorangan atau kelompok. Siswa yang akan diuji pada saat sebelum

ujian mempunyai kesempatan untuk memberikan titik berat tema atau untuk menyelesaikan tugas akhir.

Titik berat tema tersebut atau tema dari tugas akhir merupakan bahan yang akan diujikan pada ujian lisan. Ujian pada mata pelajaran Olah Raga, Musik dan Seni dilakukan sebagai ujian praktek, dimana teorinya pun termasuk sebagai bahan ujian.

3. Sekolah Lanjutan Atas: Abitur

Pada akhir kelas 11, siswa harus memilih kursus-kursus, sebagai berikut:

- Empat jam per minggu dengan 3 mata pelajaran pokok (Kernkompetenzfächer), 1 mata pelajaran profil (Profilfach) dan 1 mata pelajaran kegemaran (Neigungsfach)
- Dua jam per minggu: pilihan berbagai mata pelajaran, dimana kombinasinya tergantung dari kombinasi pilihan mata kuliah 4 jam per minggu. Untuk itu, semua mata pelajaran dibagi menjadi beberapa bidang tugas (Aufgabenbereiche).

Mata pelajaran bidang pilihan sukarela dapat dipilih sebagai tambahan. Tambahan kursus ini dapat juga dimasukkan dalam penilaian akhir untuk ijazah Abitur. Tabel 4.3 memperlihatkan pilihan mata pelajaran yang dapat diambil.

Tabel 4.3 Sistem Pilihan Mata Pelajaran pada Tingkat Sekunder II

Bidang Tugas		Pilihan Wajib	Pilihan Sukarela
I	Bahasa Sastra Seni	B. Jerman, Inggris, Latin, Yunani, Rusia, Spanyol, Itali, Portugal, Musik, Seni Rupa	Bahasa Perancis, Latin, Yunani, Rusia, Hebrew, Itali, Portugal, Cina, Jepang, Turki, Sastra
II	Ilmu-Ilmu Sosial	Sejarah, Ilmu Bumi, Ilmu Sosial, Agama/ Etika, Ekonomi	Filsafat, Psikologi
III	Matematika Ilmu-Ilmu Alami Teknik	Matematik, Fisika, Kimia, Biologi	Astronomi, Geometri, Aljabar Sistem Komputer, Teknik Komputer, Geologi, Informatika, Teknik
tanpa kode		Olah Raga	Prestasi Khusus (mis. kursus seminar)

Ujian Tertulis dan Bukti-Bukti Prestasi Lain

Dalam semua mata pelajaran yang berdurasi 4 jam, harus diadakan ujian sekurang-kurang 2 kali per pertengahan tahun. Selain itu, pada pertengahan tahun ke-empat (dimana diadakan ujian Abitur) sekurang-kurangnya 1 ujian tertulis.

Dalam semua mata pelajaran yang berdurasi 2 jam, harus diadakan sekurang-kurangnya 1 ujian per pertengahan tahun. Selain mengikuti ujian tertulis, siswa harus membuat 3 bukti prestasi dalam bentuk lain, misalnya ceramah atau eksperimen. Pilihan mata pelajaran untuk ujian bentuk ini tidak terbatas.

Ujian Abitur

Pada pertengahan tahun ajaran terakhir, diselenggarakan ujian Abitur untuk 4 mata pelajaran. Siswa dapat menentukan sendiri apakah akan diadakan tambahan ujian lisan (tanpa presentasi) untuk 4 mata pelajaran tersebut. Selain itu, ujian kelima hanya diuji secara lisan (presentasi dengan kolokium). Untuk mengganti ujian mata pelajaran kelima ini, bisa juga diajukan prestasi khusus yang setara (misalnya kursus seminar atau keikut-sertaan pada lomba). Mata pelajaran untuk ujian tertulis adalah mata pelajaran pokok Matematika, mata pelajaran pokok Bahasa Jerman, mata pelajaran pokok bahasa asing, mata pelajaran profil atau kegemaran. Waktu ujian dalam ujian tertulis meliputi 4 sampai 5,5 jam, tergantung mata pelajaran.



Gambar 4.1 Ujian tertulis untuk *Abitur*

Ujian *Abitur* tertulis diselenggarakan secara sentral, dengan arti bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menugaskan beberapa guru untuk membuat beberapa tugas ujian untuk semua sekolah negara bagian. Dari semua usulan mereka dipilih beberapa sebagai dasar untuk ujian negara bagian yang berlaku untuk semua siswa negara bagian. Oleh sebab itu, semua ujian negara bagian harus diadakan bersamaan.

Koreksi

Koreksi dilakukan oleh 3 korektor, yaitu:

- Korektor pertama adalah guru dari yang siswa bersangkutan, yang juga tahu nama siswanya. Kemudian nama murid dihilangkan dari dokumen dan diberikan kepada seorang korektor kedua dari sekolah lain
- Korektor kedua ini tidak diberitahu baik nama siswa maupun penilaian korektor pertama. Setelah koreksi kedua ini, dokumen diteruskan kepada korektor ketiga. Data-data ini biasanya juga anonim.
- Korektor ketiga diberitahu tentang penilaian korektor pertama dan kedua dan memutuskan tentang penilaian akhir. Jika kedua penilaian tidak berbeda lebih dari dua penilaian sebelumnya, maka harus diambil nilai rata-rata dari koreksi pertama dan kedua. Jika perbedaannya lebih besar, maka korektor ketiga akan mengoreksi sekali lagi dengan persyaratan bahwa nilai yang diberikan harus berada di antara kedua penilaian pertama.

Ujian Tambahan Lisan

Jika hasil penilaian ujian tertulis sangat buruk, siswa dapat mengikuti 1 atau beberapa ujian lisan secara sukarela. Selain itu, komisi ujian juga berhak untuk menuntut agar siswa mengikuti ujian lisan. Ujian lisan ini berlangsung selama 20 menit. Tugas yang diberikan biasanya terdiri dari teks dan tuntutan bisa dibandingkan dengan ujian tertulis. Tugas dipilih oleh ketua ujian dari luar sekolah tersebut dengan beberapa usulan yang diajukan oleh guru kelas. Sebelum diuji, siswa diberikan waktu 30 menit untuk mempersiapkan diri dengan membuat catatan, mempersiapkan kertas transparan dan

sebagainya. Kemudian, solusinya dipresentasikan dengan menjawab pertanyaan dari penguji (guru kelas) dan ketua ujian dari luar sekolah. Setelah ujian berlangsung selama 20 menit, penilaiannya ditetapkan oleh penguji, ketua ujian dan pembuat protokol.

Setiap mata pelajaran yang belum diuji dapat menjadi ujian lisan kelima. Dalam ujian ini, siswa harus mempresentasikan tentang satu dari empat tema yang diusulkan oleh siswa sendiri dan dipilih oleh ketua komisi ujian. Siswa diberikan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan presentasinya. Presentasi yang diberikan saat ujian harus berlangsung 10 menit. Lalu, siswa akan diwawancarai tentang presentasinya dan tentang mata pelajaran terkait.

Siswa dapat juga memasukkan prestasi khusus ke dalam penilaian untuk Abitur, misalnya sayembara yang didanai oleh negara bagian atau pemerintah federal atau kursus seminar. Pada sekolah lanjutan atas umum, nilai prestasi khusus ini dapat menggantikan ujian kelima (presentasi lisan). Pada sekolah lanjutan atas kejuruan, prestasi khusus ini dapat menggantikan satu ujian Abitur tertulis.

Perhitungan Akhir

Perhitungan akhir dari kredit pertengahan-pertengahan tahun ajaran dan ujian Abitur dilaksanakan dalam sistem yang terdiri dari tiga blok. Di blok pertama, semua mata pelajaran disatukan dan dihitung 1 kali. Semuanya berjumlah 22 kursus dengan maksimal 330 kredit ($22 \text{ kursus} \times 15 \text{ kredit}$). Jumlah kredit minimal adalah 110 yang setara dengan nilai '4,0' pada blok ini. Yang dihitung dalam blok pertama adalah:

- Semua mata pelajaran ketiga pertengahan tahun pertama dalam mata pelajaran yang diuji (kecuali yang dihitung dua kali di blok kedua)
- Semua mata pelajaran keempat pertengahan tahun ajaran dalam mata pelajaran profil/mata pelajaran kegemaran yang tidak diuji tertulis
- Semua mata pelajaran dari empat pertengahan tahun di mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi, Ilmu Masyarakat.
- Semua mata pelajaran dari dua pertengahan tahun di mata pelajaran Musik atau Seni

- Semua mata pelajaran dari dua pertengahan tahun dalam setiap Ilmu Alam yang diambil selama 2 jam per minggu
- Semua mata pelajaran lain sejumlah 22 yang dapat dipilih secara sukarela

Di blok kedua, semua hasil ujian dijumlahkan dan dihitung 2 kali dan ditetapkan oleh siswa pada awal pertengahan tahun ajaran terakhir. Mata pelajaran yang boleh dipilih adalah semua mata pelajaran yang diuji tertulis. Pertengahan tahun ajaran ketiga pertama dihitung 2 kali, sedangkan pertengahan tahun ajaran keempat dihitung 1 kali saja. Semua mata pelajaran dari pertengahan tahun ajaran keempat diperhatikan lagi pada blok ketiga sehingga pada akhirnya diperhitungkan 2 kali. Maksimal yang dapat dicapai adalah 210 kredit (7 kursus x 2 x 15 kredit) dan minimal 70 kredit.

Di blok ketiga, semua hasil ujian dijumlahkan bersama dengan penilaian mata pelajaran yang diuji dari pertengahan tahun ajaran keempat. Dalam perhitungan ini, penilaian pertengahan tahun keempat dihitung 1 kali, sedangkan penilaian dari ujian Abitur dinilai 3 kali.

Jika dalam 1 mata pelajaran hanya dibuat 1 ujian tertulis atau satu ujian lisan, maka penilaian dihitung 3 kali. Jika dilaksanakan ujian, baik lisan dan tertulis, maka yang tertulis dihitung 2 kali, yang lisan dihitung 1 kali. Melalui lima ujian dalam sistem penilaian ini, dapat dicapai maksimal 300 kredit, minimal 100 kredit.

5

Penjaminan Mutu

Pada skema di atas, terlihat beberapa panduan untuk penilaian prestasi murid dan mutu pendidikan. Hal ini pun dikategorikan menjadi dua measures, yaitu assessment tingkat supra-regional dan masing-masing negara bagian (dalam hal ini, Berlin).

Berikut adalah beberapa poin terkait perbandingan kualitas di RFJ.

1. Skala internasional dilakukan studi perbandingan dengan sistem PISA (*Programme for International Student Assessment*), TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) atau PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*)
2. Untuk skala perbandingan antara negara-negara bagian dilakukan dengan IQB model yang dikembangkan oleh Institut untuk Manajemen Mutu Pendidikan (*Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen*, IQB). VERA (*Vergleichsarbeiten* atau perbandingan tugas) adalah tes untuk kelas 3 dan kelas 8 yang dilakukan oleh antar negara bagian untuk mendapatkan data perbandingan kualitas
3. Di Berlin, diadakan model perbandingan tentang kemampuan bahasa dan belajar yang bernama LauBe untuk kelas 1 dan LAL untuk kelas 7. Untuk masa akhir pendidikan menengah, diadakan ujian nasional yang disebut Abitur atau MSA (*Mittelschulabschluss* atau Sertifikat Sekolah Menengah Lanjutan) atau FHR (*Fachhochschulreife* – Sertifikat Sekolah kejuruan)

Skema pada Gambar 5.1 adalah gambaran secara keseluruhan

mengenai instrumen-instrumen pengukur prestasi untuk sekolah-sekolah di Berlin.

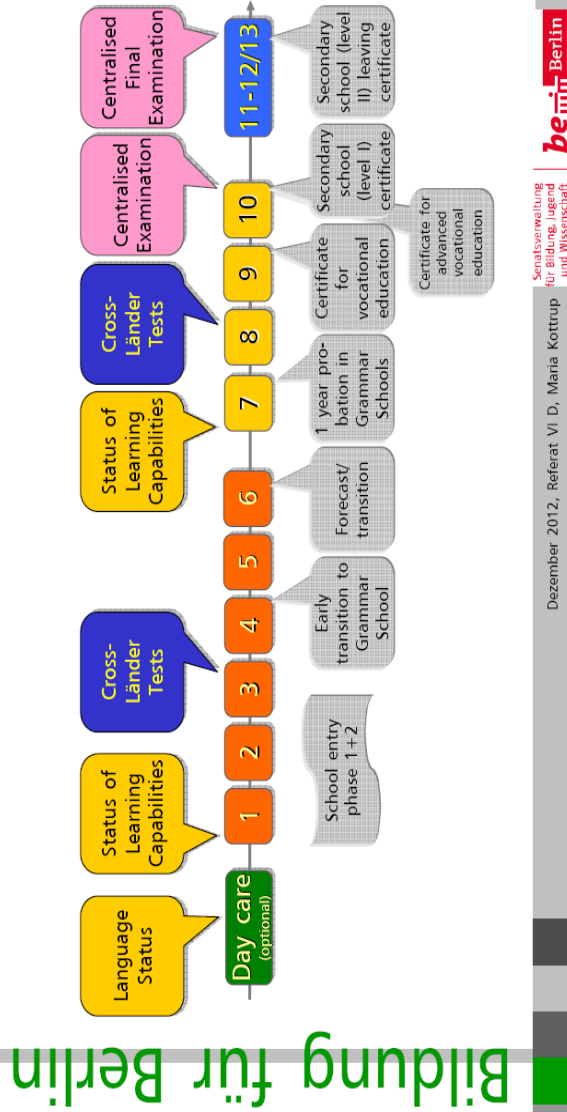
Tes pertama untuk tingkat dasar berada pada akhir kelas 3 dan masa transisi awal di kelas 4. Masa Seleksi untuk masuk ke *Grammar School/Gymnasium* ada pada akhir kelas 6, selanjutnya masa percobaan di kelas 7 dan 8, dimana pada akhir kelas 8, diadakan tes sebagai metode seleksi, apakah murid bisa melanjutkan di *Grammar School* atau direkomendasikan ke jenis sekolah lain, seperti sekolah menengah kejuruan atau *Integrated Secondary School* lainnya.

Beberapa instrumen dan metode untuk evaluasi eksternal dan internal adalah sebagai berikut:

1. *Quality Loop*
2. *School Inspection*
3. *SelfEvaluation* yang selenggarakan oleh ISQ (*Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V.*), sebuah lembaga yang memberikan pelayanan ilmiah mengenai kualitas sekolah-sekolah di Berlin dan Brandenburg. Lembaga ini tidak hanya memberikan konsultasi langsung ke sekolah-sekolah, tetapi juga ke kantor-kantor administrasi sekolah/kantor pendidikan daerah (*Schulamt*) di setiap daerah dan kepada pembuat kebijakan pada kedua negara bagian tersebut.

Quality Development and Quality Assurance in the Berlin School System

5. Performance-related instruments across Berlin Schools

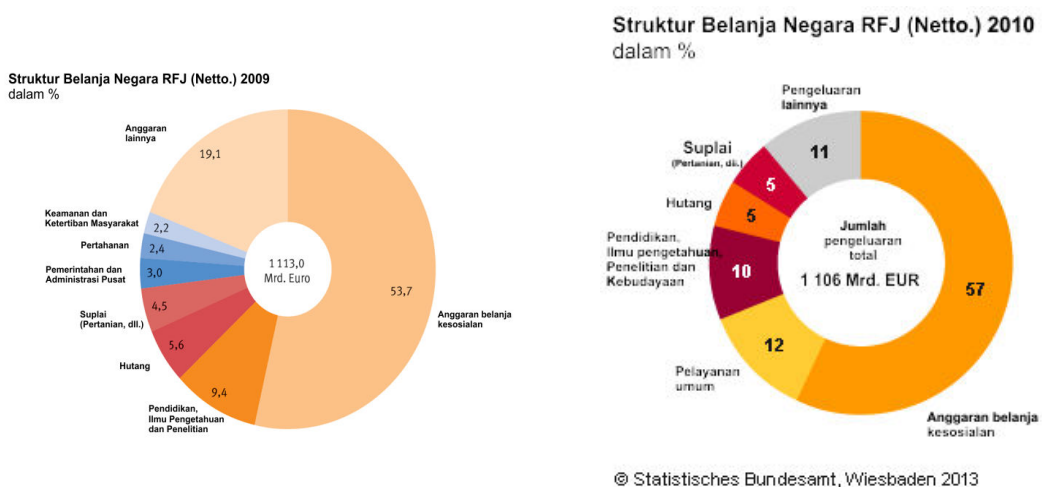


Sumber: Senatsverwaltung f. Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin

Gambar 5.1 Skema Pengembangan dan Evaluasi Kualitas Sistem Sekolah di Berlin

6

Pendanaan Pendidikan



Gambar 5.1. Perbandingan pengalokasian anggaran untuk tahun 2009 dan 2010 di RFJ

Produk Domestik Bruto (PDB) dari RFJ pernah mengalami penurunan pada saat krisis di tahun 2009. Hasil dari perhitungan neraca nasional pada tahun 2010 dan 2011, PDB Jerman mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 dengan 2.496 miliar Euro dan tahun 2011 dengan 2.592 miliar Euro. Sejak 2010, pendanaan untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan yang dikeluarkan dari pemerintah Federal adalah sekitar 9,5% dari PDB keseluruhan.

7

Penutup

Sistem sekolah Jerman sering dikatakan terlalu menyeleksi siswanya menurut status sosial sudah pada usia rendah (setelah sekolah dasar). Hasil-hasil studi PISA maupun laporan pendidikan yang diajukan pada tahun 2007 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperkuat kritik tersebut. Namun demikian, berbagai langkah pendayagunaan pengembangan telah dilakukan oleh beberapa negara bagian.

Menurut studi-studi lain, sebagian besar dari anak-anak yang masuk sekolah lanjutan atas berasal dari keluarga kalangan atas dibandingkan anak-anak dari keluarga pekerja. Studi pendidikan OECD yang mengusulkan penghapusan seleksi pada usia terlalu rendah dan perubahan struktur sistem pendidikan di Jerman. Namun, usulan-usulan ini tetap tidak diterima, walaupun angket-angket di antara orang tua menunjukkan bahwa sekitar separuhnya menganggap pelajaran bersama sebagai positif.

Selain itu para kritikus curiga bahwa melalui sejumlah tindakan yang telah diambil oleh beberapa negara bagian, ketidakadilan akan naik. Misalnya penghapusan pembebasan materi belajar, pemisahan sekolah lanjutan atas dari sekolah lanjutan dasar dan menengah, biaya studi, studi *Master* sebagai „halangan pendidikan baru“ dan penambahan kemiskinan anak-anak di Jerman.

Para ahli mengusulkan agar jangka waktu pendidikan dasar diperpanjang dari 4 menjadi 6 tahun dan menghapus sekolah-sekolah

lanjutan dasar. Murid-murid harus lebih sering ikut dalam mengambil keputusan, harus lebih mandiri dan memperlihatkan prestasinya secara kreatif. Sekolah-sekolah diharapkan diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengajarannya lebih bebas. Pendidikan guru harus diperbaiki, khususnya di bidang metode pengajaran.

Di bidang pendidikan tinggi, pemerintah federal dalam tahun-tahun terakhir ini mengambil beberapa langkah yang sangat efektif, antara lain sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi boleh lebih bebas dalam pilihan calon mahasiswanya.
2. Bidang riset terkemuka didorong melalui inisiatif unggulan dimana perguruan-perguruan tinggi dan *cluster* riset didanai proyek yang sangat inovatif.
3. Jerman mengikuti proses Bologna, dimana 29 Menteri-Menteri Pendidikan dari negara-negara Eropa menyepakati untuk menyamakan sistem pendidikan tingginya sampai tahun 2010. Dengan penyamaan ini, tahapan pendidikan tinggi di Jerman sekarang adalah program *Bachelor*, *Master* dan *Doctor*. Pada umumnya waktu studi dipersingkat, penawaran studi diperbaiki dan peluang untuk mendapat pekerjaan diperbesar.
4. Diciptakan kemungkinan bagi staf ilmiah muda untuk menjadi *Junior Professor*.
5. Orientasi perguruan tinggi terhadap kalangan riset dan pendidikan internasional.

LAMPIRAN

A.Beberapa Angka dan Data Statistik

A1. Jumlah Siswa pada Sekolah-Sekolah Umum

Pada tahun ajaran 2007/2008 jumlah siswa pada sekolah-sekolah umum di Jerman meliputi sekitar 9,3 juta, berarti berkurang 1,8 % atau 172.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, jumlah siswa pada sekolah-sekolah umum paling rendah sejak tahun 1992. Jumlah siswa perempuan dan laki-laki sangat berbeda dengan jenis-jenis sekolah. Khususnya pada sekolah luar biasa, jumlah siswa laki sangat tinggi (63,2 %), begitu juga pada sekolah dasar (56,0 %). Pada sekolah-sekolah lanjutan atas, jumlah siswa laki-laki relatif kecil (46,7 %).

A2. Jumlah Lulusan Sekolah Umum

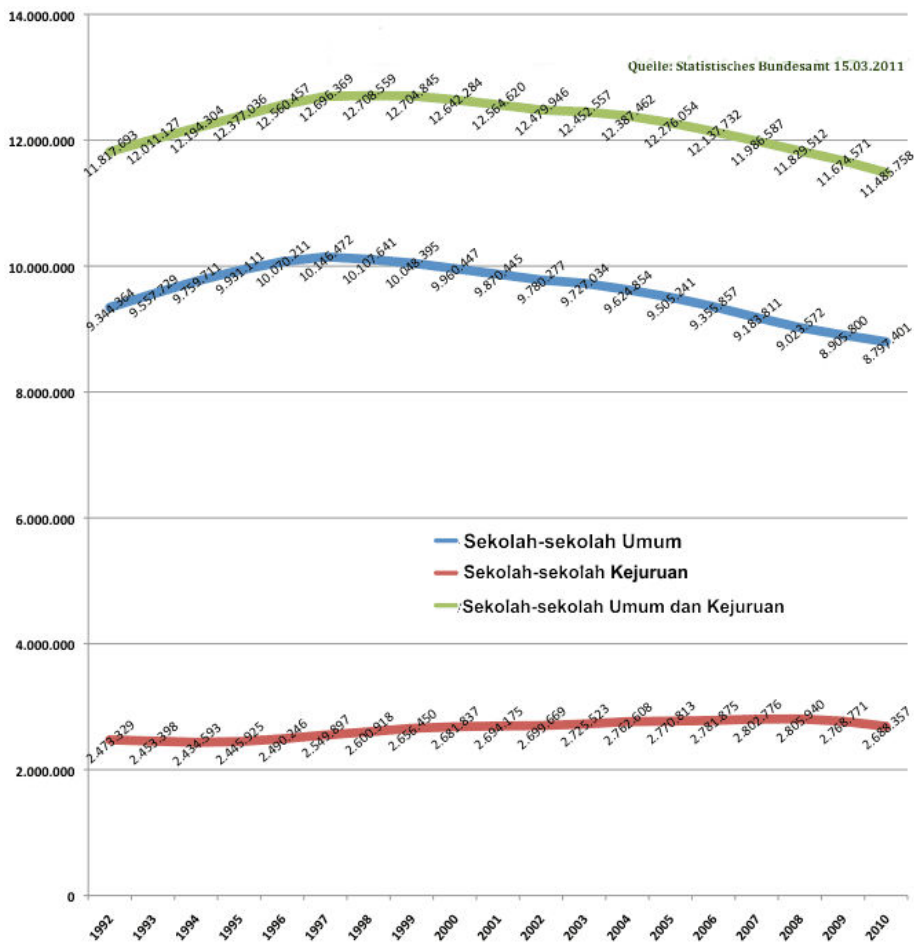
Pada tahun 2008, hampir 46 % dari orang berusia 15 ke atas adalah lulusan sekolah menengah atau tinggi. 21 % antara mereka lulus sekolah lanjutan menengah dan 24 % mempunyai ijin studi pada perguruan tinggi umum atau pada perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan. Dalam kelompok yang berusia 20 sampai 30, 74 % adalah lulusan sekolah seperti ini (32 % sekolah lanjutan menengah, 42 % ijin studi). Dari yang berusia 60 ke atas, hanya 13 % mempunyai STTB sekolah lanjutan menengah,

dan 13 % STTB dari sekolah lanjutan atas.

A3. Jumlah Lulusan Pendidikan Kejuruan

Pada tahun ajaran 2007/2008 sekitar 2,8 juta siswa mengikuti pendidikan kejuruan, berarti 0,8 % atau 20.900 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

55 % dari semua siswa pada sekolah-sekolah kejuruan adalah laki-laki, tergantung pada jenis sekolah kejuruan, jumlah ini bervariasi antara 41 % pada sekolah keahlian kejuruan sampai 70 % pada tahun pendidikan kejuruan dasar (sekolah sehari penuh).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Siswa/Siswi pada Sekolah-Sekolah Umum (1992=100%)

Data-Data Umum Bidang Pendidikan

Tabel 1. Data-Data Umum Pendidikan, Tahun Ajaran 2008-2011

Keterangan	Tahun	Jumlah
Sekolah-Sekolah Umum		
Siswa-siswi	2010/2011	8 796 894
Para Lulusan	2010	865 300
Para Guru	2010/2011	673 000
Sekolah-Sekolah Kejuruan		
Siswa-Siswi	2010/2011	2 688 351
Para Lulusan	2011	1 144 639
Para Guru	2011	124 498
Perguruan tinggi		
Mahasiswa-Mahasiswi pada Semester Musim Dingin*	2009/2010	2 128 976
Pemula Studi*	2009/2010	3 423 398
Lulus Ujian	2008	309 364
Staf Ilmiah dan Seni	2008	274 769
Beasiswa Pemerintah		
Siswa-Siswi yang Didanai	2008	311 876
Mahasiswa-Mahasiswi yang Didanai	2008	510 409
Sumber: www.tagesspiegel.de/wissen/weniger-schueler-in-deutschland www.destatis.de "BeruflicheSchulen2110200127004.pdf" .Hal. 20-30		

Tabel 2. Penduduk Jerman Menurut Lulusan Pendidikan di Jerman*

Jenis Lulusan	2006		2007		2008	
	x 1.000	%	x 1.000	%	x 1 000	%
Jumlah Penduduk ^{1, 2}	71.115	100	71.194	100	71.217	100
Pendidikan Sekolah Umum						
Masih mengikuti pendidikan umum	3.288	4,6	3.233	4,5	2.674	3,8
Lulusan Sekolah Lanjutan Dasar	33.863	47,7	33.468	47,0	32.675	45,9
Lulusan Sekolah Lanjutan Menengah/Setara	14.692	20,7	14.834	20,8	15.047	21,1
Ijin Studi Peguruan Tinggi Umum/Ilmu-Ilmu Terapan	16.305	22,9	16.764	23,5	17.409	24,4

Tanpa keterangan	531	0,7	316	0,4	319	0,4
Tanpa Lulusan Pendidikan Umum ³	2.422	3,4	2.318	3,3	2.748	3,9
Pendidikan Kejuruan						
Pendidikan Kejuruan Sistem Ganda ⁴	35.705	50,2	36.167	50,8	36.169	50,8
Lulusan Sekolah Keahlian ⁵	4.878	6,9	4.816	6,8	4.988	7,0
Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu-Ilmu Terapan ⁶	3.085	4,3	3.223	4,5	3.526	5,0
Lulusan Perguruan Tinggi	4.663	6,6	4.844	6,8	5.013	7,0
Promosi	648	0,9	676	0,9	726	1,0
Tanpa Keterangan	405	0,6	171	0,2	205	0,3
Tanpa Lulusan kejuruan	21.732	30,6	20.925	29,4	20.088	28,2

*Orang di atas usia 15 tahun

Keterangan untuk Tabel 2:

- 1 Termasuk orang yang tidak memberikan informasi tentang pendidikan sekolah umumnya (2006: 15.000, 2007: 262.000, 2008: 345.000).
- 2 Termasuk orang yang tidak memberikan informasi tentang pendidikan kejuruannya (2007: 372.000, 2008: 502.000).
- 3 Termasuk orang dengan lulusan setelah maksimal tujuh tahun mengikuti pelajaran sekolah.
- 4 Termasuk lulusan sekolah kejuruan keahlian yang setara, dinas persiapan untuk jasa menengah pada administrasi umum, tahun persiapan kejuruan atau praktikum kejuruan
- 5 Termasuk Pendidikan Meister/Ahli Teknik maupun lulusan sekolah kesehatan/perawat.
- 6 Termasuk lulusan sekolah insinyur maupun lulusan perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan bidang administrasi.

Dengan ijin studi perguruan tinggi ilmu-ilmu terapan	373.504	40,2	345.148	41,0	28.356	32,6	186.834	40,7	171.692	41,3	14.142	35,6
Dengan ijin studi umum	14.179	1,5	12.820	1,5	1.359	1,6	7.641	1,7	6.860	1,6	781	1,8

Tabel 4. Alokasi Anggaran untuk Pendidikan, Penelitian dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Sistem Pendidikan Jerman

Anggaran untuk pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan dalam pertimbangan pelaksanaan *											
			Bidang			Total Pengeluaran					
						Dalam Mrd. Euro			Dalam % dari PDB		
						1995	2010	2011	1995	2010	2011
A	Anggaran pendidikan sesuai dengan batas klasifikasi internasional ISCED ¹⁾						103,9	151,5	157,1	5,6	6,1

A30	Pengeluaran pada Institusi-institusi pendidikan dalam kepemilikan publik dan swasta ISCED 0 – Tingkat Elementer ²⁾ ISCED 1-4 – Sekolah-Sekolah dan Bidang-bidang Sekolah Diantaranya: Jenjang Pendidikan Umum Jenjang Pendidikan Kejuruan ³⁾ pelatihan kerja industri di dalam dual sistem - ⁴⁾ ISCED 5/6 – Tingkat Tersier ⁵⁾ Diantaranya: Penelitian dan Pengembangan di sekolah-sekolah tinggi Lain -lain (yang tidak termasuk dalam susunan ISCED) ⁶⁾ Pengeluaran anggaran swasta atas barang dan pelayanan pendidikan di luar institusi-institusi pendidikan Pengeluaran untuk Pengembangan dan Pembinaan peserta pendidikan dalam program pendidikan yang termasuk dalam susunan ISCED	94,8	131,6	137,0	5,1	5,3	5,3
A31		9,1	15,1	/	0,5	0,6	/
A32		63,2	81,7	/	2,5	3,3	/
A33		45,9	60,2	8,6	0,3	2,4	/
		10,4	10,6	/	0,6	0,3	/
		20,5	32,6	/	1,1	0,4	/
A34		7,4	12,7	/	0,4	1,3	/
				/		0,5	/
		1,9	2,2	/	0,1	0,1	/
A40		4,3	5,6		0,2	0,2	0,2
A50		4,9	14,3	14,4	0,3	0,6	0,6
B	Pengeluaran Tambahan biaya terkait pendidikan dalam tingkat nasional	21,5	21,0	20,9	1,2	0,8	0,8

B10	<i>Betriebliche Weiterbildung</i> – Pelatihan Kerja Industri/ Pendidikan lanjut ⁷⁾ Pengeluaran untuk program pendidikan lainnya KB/TPA dan <i>Hort</i> (extra kurikulum) negeri dan swasta Prasarana pembinaan pemuda/pemudi Pendidikan lanjutan guru-guru <i>Volkshochschule</i> (Pendidikan Non-Formal) Institusi-institusi pendidikan <i>tarifparteien</i> , kamar dagang, asosiasi/perhimpunan Pembinaan peserta pendidikan tingkat lanjut ⁸⁾	8,9	10,0	10,2	0,5	0,4	0,4
B20		7,3	9,9	9,8	0,4	0,4	0,4
B21		2,7	5,2	/	0,1	0,2	/
B22		1,3	1,7	/	0,1	0,1	/
B23		0,0	0,1	/	0,0	0,0	/
B24		0,8	1,0	/	0,0	0,0	/
B30		2,5	1,9	/	0,1	0,1	/
		5,3	1,1	1,0	0,3	0,0	0,0
A+B	Anggaran Pendidikan	125,4	172,4	178,1	6,8	6,9	6,9
C	Penelitian dan Pengembangan ⁹⁾	40,5	69,9	75,5	2,2	2,8	2,9
C10	Perekonomian	26,8 1,0	46,9 1,5	51,1 1,5	1,5	1,9	2,0
C20	Institusi penelitian negeri	5,2	8,8 12,7	9,5 13,4	0,1	0,1	0,1
C30	Institusi penelitian swasta nirlaba	7,4			0,3	0,4	0,4
C40	Sekolah tinggi (<i>zusätzlich in ISCED 5/6 enthalten</i>)				0,4	0,5	0,5
D	Infrastruktur pendidikan dan Ilmu pengetahuan lainnya	4,0	5,0	5,0	0,2	0,2	0,2

D10	Museum ilmu pengetahuan dan perpustakaan, pusat informasi teknis (tidak termasuk penelitian dan pengembangan)	0,5	0,7	/	0,0	0,0	/
D20	Museum non-ilmu pengetahuan dan perpustakaan	2,0	2,3	/	0,1	0,1	/
D30	Pengeluaran institusi non-universitas untuk ilmu pengetahuan dan penelitian (tidak termasuk penelitian dan pengembangan)	1,6	2,0	/	0,1	0,1	/
A+B+C+D	Anggaran untuk pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan (dengan konsolidasi untuk penelitian dan pengembangan di universitas)	162,5	234,7	245,1	8,8	9,4	9,5

- * Berdasarkan permohonan, batasan-batasan berdasarkan konsep pada tahun 2009, dalam angka perhitungan sementara 2011, dalam pembulatan subtotal dapat terjadi sedikit penyimpangan
1. ditentukan pada klasifikasi susunan ISCED atau *International Standard Classification for Education*
 2. TK, Kelompok Bermain, TK-Sekolah
 3. Tanpa sekolah tinggi kejuruan, Akademi Kejuruan, Sekolah Kejuruan, Sekolah Pelayanan Kesehatan di jenjang pendidikan tinggi
 4. Pengeluaran operasional perusahaan dan antar-perusahaan dan pelatihan eksternal dalam dual sistem (tanpa sekolah kejuruan), termasuk Tunjangan pendidikan terkait dari Kantor Tenagakerja federal
 5. Tanpa pengeluaran perawatan medis, termasuk biaya untuk Sekolah Tinggi Kejuruan, Akademi Kejuruan, Sekolah Kejuruan, Sekolah Pelayanan Kesehatan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan di sekolah-sekolah tinggi, serikat mahasiswa
 6. Beban tidak dialokasikan ke tingkat ISCED satu-persatu (termasuk estimasi biaya untuk pelatihan PNS, dalam pelayanan publik, serta seminar-seminar studi)
 7. Memperkirakan biaya pelatihan internal dan eksternal (tidak termasuk biaya staf dari peserta) atas dasar tenaga kerja (tidak termasuk trainee) sesuai mikro sensus dan biaya rata-rata pelatihan per karyawan, menurut Survei Pelatihan Kejuruan Lanjutan Eropa (CVTs). Kemungkinan penghitungan ganda dengan Pelatihan eksternal (misalnya, universitas) tidak bisa disesuaikan.
 8. Pembayaran melalui Kantor Tenaga Kerja Federal kepada peserta dalam pelatihan tenaga kerja, setiap penghitungan ganda (Pendidikan dual sistem, pelatihan/pendidikan lanjut) tidak bisa disesuaikan.
 9. Dihitung dengan metode statistik Pengembangan dan Penelitian (menurut laporan dari OECD/*Frascati-Handbook*)

DAFTAR REFERENSI

1. www.bildung-fuer-deutschland.de (Kelompok Kerja Pendidikan demi Jerman)
2. www.kmk.org (Konferensi Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara- Negara Bagian RFJ)
3. www.bmbf.de (Kementerian Federal Pendidikan dan Kebudayaan)
4. www.destatis.de (Kantor Federal Statistik)
5. wiki.bildungsserver.de (Server Pendidikan)
6. Kultusministerium Baden-Württemberg: Leitfaden für die Gymnasiale Oberstufe. Wissenswertes für Schülerinnen und Schüler. Abitur 2010
7. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst (ed.): Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland-Diagramm, ©KMK 2009 [www.kmk.org/fileadmin/doc/Dokumentation/Bildungswesen_pdfs/dt-2009.pdf]
8. Deutscher Bundestag; Foto: Werner Schüring
9. Senatsverwaltung f. Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin
10. Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 2008
11. www.de.statista.com/statistik

-o0o-

X

Sistem Pendidikan di Malaysia



Sumber foto kota Kuala Lumpur: www.propertylaunchesmalaysia.com

Oleh:
Prof. Drs. Rusdi, M.A., Ph.D.
Atase Pendidikan di Kuala Lumpur

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Malaysia

Pemerintah Kerajaan Malaysia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dua kebijakan strategis baru saja diambil oleh pemerintah Malaysia pada kakhir tahun 2013. Pertama, penggabungan dua kementerian yang menangani bidang pPendidikan. Sebelumnya, bidang pendidikan dikelola oleh dua kementerian, yakni: Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pelajaran mengelola pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Pengajian Tinggi mengelola institusi pendidikan tinggi. Mulai pemerintahan sekarang, kedua kementerian tersebut digabung menjadi Kementerian Pendidikan. Salah satu alasan pengabungan adalah untuk memudahkan pengelolaan bidang pendidikan. Kebijakan strategis kedua adalah peluncuran *Malaysia Education Blueprint 2013-2025* yang bertumpu kepada lima kebijakan strategis: akses, mutu, persamaan, kebersamaan, dan efisiensi. Target yang ingin dicapai Malaysia untuk akses pendidikan, misalnya, sebelum tahun 2020 semua (100%) anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan. Menjadi tiga besar dunia pada tahun 2025 pada penilaian prestasi internasional siswa seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*.

Sistem pendidikan Malaysia bersifat sentralistik. Pemerintah pusat bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir sudah dimulai usaha secara bertahap

untuk memberikan otonomi perguruan tinggi. Semua keperluan penyelenggaraan pendidikan ditanggung dan diatur oleh pemerintah pusat. Bahkan untuk jabatan rektor dan wakil rektor institusi pendidikan tinggi ditunjuk langsung oleh Kementerian Pendidikan. Pengelolaan pendidikan terpusat karena jumlah sekolah yang akan dikelola tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Indonesia. Data tahun 2012 menunjukkan terdapat 7,733 sekolah dasar dan 2,333 sekolah menengah dengan total jumlah murid 5,304,201.

Jenjang pendidikan dasar di Malaysia ditempuh selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan menengah tidak dipisah seperti di Indonesia. Untuk masuk ke perguruan tinggi program sarjana untuk Strata Satu (S1), lulusan sekolah menengah harus mengikuti pendidikan pra-universitas selama satu tahun. Kurikulum yang digunakan pada jenjang pendidikan dasar adalah Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR). Mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar adalah: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Agama, Pendidikan Moral. Untuk jenjang pendidikan menengah, kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Mata pelajaran wajib untuk tingkat Sekolah Menengah Rendah, setingkat SMP adalah: Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematika, Sains, Sejarah, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Seni, dan Kemandirian Hidup.

Malaysia juga menyelenggarakan ujian nasional untuk setiap jenjang pendidikan dan dilaksanakan serentak. Untuk tingkat sekolah rendah ujian nasionalnya dikenal dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Juga dilaksanakan ujian nasional untuk tingkat pendidikan menengah rendah, setingkat SMP, yang dikenal dengan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Hasil ujian PMR siswa hanya mendapatkan lembaran nilai hasil ujian bukan ijazah. Ujian nasional untuk jenjang sekolah menengah dikenal dengan Sijil Penilaian Malaysia (SPM). Bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan S1 pada perguruan tinggi diselenggarakan ujian secara nasional yang dikenal dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Seleksi masuk perguruan tinggi hanya menggunakan nilai STPM. Tidak ada ujian khusus untuk seleksi masuk

perguruan tinggi. Pada sistem pendidikan Malaysia saat ini hasil ujian sekolah atau ujian nasional tidak mempengaruhi siswa untuk naik kelas atau lulus. Semua siswa naik kelas dan lulus. Hasil ujian untuk pemetaan, dasar pengambilan kebijakan, dan untuk seleksi masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	501
DAFTAR ISI	505
1. Sejarah Sistem Pendidikan di Malaysia	507
2. Kurikulum Pendidikan Malaysia	513
3. Ujian Nasional di Malaysia	527
4. Penjaminan Mutu Pendidikan	531
5. Pembinaan Guru	539
6. Penutup	543
DAFTAR REFERENSI	545

1

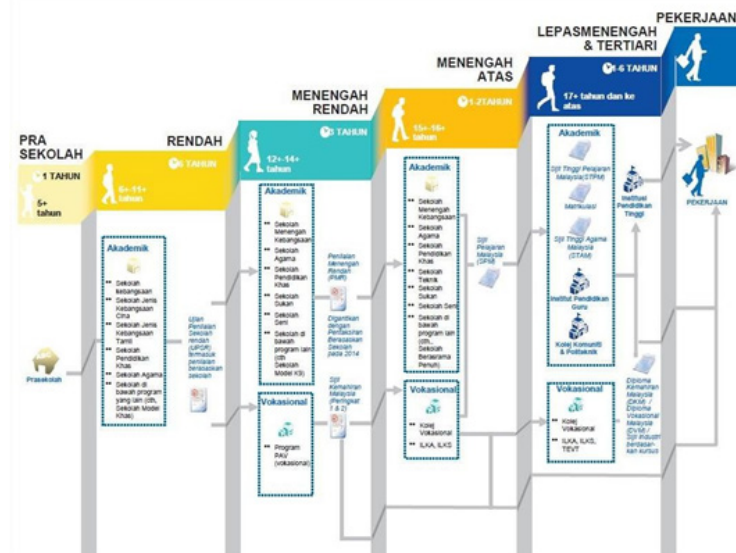
Sejarah Sistem Pendidikan di Malaysia

Sebelum membahas kurikulum pendidikan, ujian nasional, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan guru di Malaysia, terlebih dulu disampaikan secara ringkas sistem pendidikan di Malaysia. Sistem dan jenjang pendidikan di Malaysia dapat dilihat digambarkan pada Gambar 1.1.

Pendidikan pada rentangan usia 0-6 tahun dikategorikan dalam pendidikan pra-sekolah. Pendidikan formal diawali dari pendidikan pada Sekolah Rendah. Usia anak wajib di atas enam (6+) tahun untuk dapat memulai pembelajaran pada Sekolah Rendah. Pemerintah sangat ketat terkait usia masuk sekolah. Kurang satu hari saja dari ketentuan usia yang ditetapkan, calon siswa tidakizinkan untuk masuk sekolah. Lama pendidikan pada Sekolah Rendah adalah enam (6) tahun. Semua anak tetap naik kelas berapapun nilai yang mereka dapatkan dalam ujian. Pada akhir pendidikan di Sekolah Rendah dilaksanakan ujian secara nasional yang dikenal dengan nama Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Ujian serentak dilaksanakan di seluruh negara. Soal ujian disiapkan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan namanya yaitu ‘pencapaian’, hasil ujian tidak mempengaruhi kelulusan anak berapapun hasil yang anak dapatkan dari hasil ujian UPSR. Semua lulusan Sekolah Rendah wajib diterima di Sekolah Menengah Rendah. Nilai ujian ditulis dalam bentuk huruf (A+, B, C, F,...).

Setelah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Rendah, siswa melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Rendah selama tiga (3) tahun. Pada tahun terakhir di Sekolah Menengah Rendah siswa mengikuti ujian secara nasional yang disebut Penilaian Menengah Rendah (PMR). Soal ujian disiapkan oleh pemerintah pusat. Hasil ujian PMR tidak mempengaruhi kelulusan siswa. Semua peserta ujian dapat melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas berapapun hasil yang diperoleh siswa dari ujian nasional PMR. Nilai hasil ujian dinyatakan ditulis dalam bentuk huruf (A+, B, C, F, ...)

Setelah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Rendah selama 3 tahun, siswa melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas selama dua (2) tahun. Di Indonesia, lama pendidikan pada Sekolah Menengah Atas adalah tiga (3) tahun. Pada akhir tahun kedua di Sekolah Menengah Atas, siswa mengikuti ujian nasional yang dikenal dengan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Semua siswa yang mengikuti ujian nasional mendapatkan ijazah SPM berapapun nilai yang mereka dapatkan. Ijazah (sijil) pertama yang didapatkan oleh siswa adalah ijazah SPM. Pada saat mengikuti ujian UPSR dan PMR siswa hanya mendapatkan lembaran nilai hasil ujian, bukan ijazah. Nilai hasil ujian dinyatakan ditulis dalam bentuk huruf (A+, A, B, C, F,...).



Gambar 1.1 Alur Sistem Pendidikan di Malaysia (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013)

Setelah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, siswa memiliki dua pilihan utama. Pertama, jika ingin melanjutkan pada Kolej atau program diploma vokasi, siswa dapat langsung mendaftar dengan menggunakan ijazah SPM. Tidak ada tes masuk. Seleksi berdasarkan nilai yang diperoleh pada SPM. Kedua, jika siswa ingin melanjutkan pada universitas atau perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan setingkat sarjana S1, lulusan SPM harus mengikuti pendidikan *pra-university* selama dua (2) tahun. Pada tahun terakhir, dilaksanakan ujian secara nasional yang lazim disebut dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Semua peserta ujian mendapatkan ijazah (*sijil*) STPM dengan nilai yang berbeda sesuai kemampuan siswa. Jadi, tidak ada yang dinyatakan tidak lulus STPM, tetapi yang ada adalah nilai mata pelajaran tertentu mungkin berada pada garis tidak lulus (F- atau G), tetapi hal ini tidak menghalangi untuk memperoleh ijazah STPM. Nilai ujian dinyatakan dalam bentuk huruf (A+, A, A-, B, C, F, ...). Ijazah STPM digunakan sebagai syarat dan seleksi masuk perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan S1 yang disebut program sarjana muda (*bachelor*) di Malaysia. Di Malaysia tidak ada ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Seleksi dilakukan dengan menggunakan nilai ujian yang didapatkan oleh siswa pada ijazah SPM untuk masuk kolej atau pendidikan diploma vokasi, dan nilai siswa pada ijazah STPM untuk masuk perguruan tinggi untuk jenjang pendidikan S1.

Sistem pendidikan di Malaysia bersifat sentralistik. Pemerintah pusat bertanggung-jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tanggung jawab pemerintah pusat meliputi semua aspek terkait penyelenggaraan pendidikan mulai dari penyiapan infrastruktur, fasilitas pendukung, gaji guru, dan pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Malaysia

Visi: Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

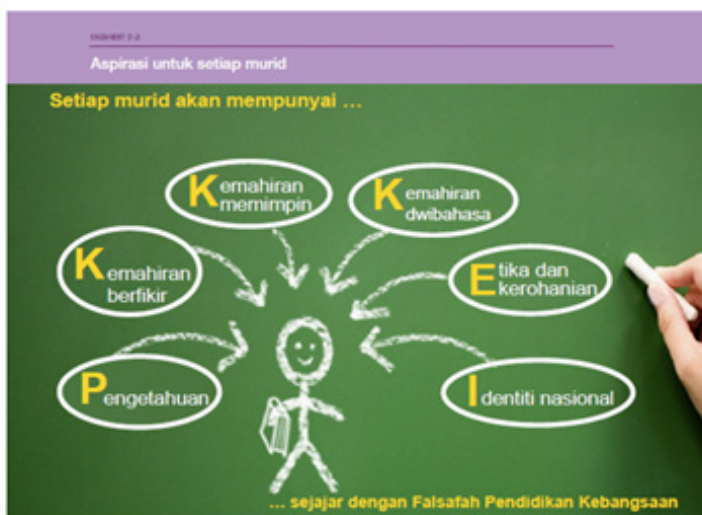
Misi: Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

Tujuan:

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan;
3. Menyediakan sumber tenaga kerja manusia untuk keperluan kemajuan negara;
4. Memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia



Gambar 1.2 Sasaran yang Ingin Dicapai pada Sistem Pendidikan Malaysia



Gambar 1.3 Sasaran Kecakapan untuk Dimiliki oleh Setiap Siswa dari Sistem Pendidikan Malaysia (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013)

Anggaran pendidikan Malaysia sejak tahun 1996 sudah 20% dari anggaran belanja negara, bahkan tahun 2012 mencapai 21,55%, seperti terlihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Anggaran Belanja Malaysia dalam Bidang Pendidikan

Tahun	Persentase Anggaran Pendidikan Terhadap Anggaran Belanja Negara
1996	19.55%
1997	20.6%
1998	19.51%
1999	20.68%
2000	18.04%
2001	20.43%
2012	21.55%

Tabel 1.2 adalah informasi statistik jumlah sekolah, siswa dan guru di Malaysia pada tahun 2012.

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru pada 3 Jenjang Pendidikan di Malaysia Tahun 2012

Jenjang Sekolah	Jumlah		
	Sekolah	Siswa	Guru
Pra-sekolah	*	191,942	*
Sekolah Rendah	7,743	2,743,149	240,066
Sekolah Menengah	2,344	2,279,170	178,080

(*): Data tidak tersedia

2

Kurikulum Pendidikan Malaysia

Kurikulum Pendidikan di Malaysia dibagi atas dua bagian: i) Kurikulum untuk Pendidikan Dasar atau Sekolah Rendah yang dikenal dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR); dan ii) Kurikulum untuk jenjang pendidikan menengah yang lazim dikenal dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Masing-masing pembagian kurikulum tersebut dijelaskan di bawah ini.

1.1. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diberlakukan sejak tahun 2011. Sebelumnya diberlakukan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang sudah diberlakukan sejak 1993-2010. Jadi, Malaysia juga baru saja melakukan perubahan terhadap kurikulum pendidikan untuk jenjang sekolah rendah dan menengah. Perbedaan mendasar kedua kurikulum tersebut dapat dilihat pada bagan pada Gambar 2.1.

1.1.1. Tujuan KSSR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang seimbang, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif melalui jalur komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fisik dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, serta sikap dan nilai.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. KSSR dikembangkan berdasarkan tantangan perkembangan abad ke-21, Model Baru Ekonomi (MBE) dan teori pembelajaran terkini, lihat Gambar 2.2. KSSR juga mengacu kepada empat tonggak pendidikan UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk bertindak (*learning to do*), belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*) dan belajar untuk membentuk peribadi (*learning to be*).

Peserta didik yang mengikuti KSSR diharapkan akan menjadi:

1. Insan yang seimbang dari segi intelektualitas, rohani, emosi, jasmani dan sosial
2. Warganegara yang bertanggung-jawab
3. Warganegara yang dapat berperan di arena global (*Global Player*)
4. Warganegara yang memiliki ilmu pengetahuan



Gambar 2.1 Perbezaan KBSR dan KSSR

1.1.2. Prinsip KSSR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah mempunyai empat prinsip utama: pendekatan holistik atau terpadu, perkembangan individu secara



Gambar 2.2 Dasar Pengembangan KSSR

menyeluruh, pendidikan untuk semua murid, dan pendidikan seumur hidup.

1. Pendekatan Terpadu

Tujuan utama ditekankan kepada pendekatan terpadu. Unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan nilai digabungkan supaya keterpaduan dari segi intelektualitas, rohani, emosi, jasmani dan sosial dapat diwujudkan.

2. Perkembangan Individu Secara Menyeluruh

KSSR dirumuskan untuk memastikan semua mata pelajaran dapat membentuk intelektualitas, rohani, emosi, jasmani dan sosial peserta didik.. Potensi peserta didik dikembangkan secara terpadu.

3. Pendidikan Untuk Semua Murid

KSSR memberi peluang yang luas kepada semua murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menyeluruh dan seimbang.

4. Pendidikan Seumur Hidup

KSSR menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh semua murid sebagai dasar untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan pendidikan seumur hidup.

Prinsip KSSR digambarkan sebagai berikut seperti tampak pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Prinsip KSSR [4]

1.1.3. Bentuk Kurikulum KSSR

Konsep pengembangan yang diperkenalkan dalam KSSR, merupakan satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, keterampilan dan nilai. Konsep ini berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektualitas dan sosial.

Terdapat enam aspek yang diidentifikasi mewakili bidang ilmu, keterampilan dan nilai yang menjadi asas pembangunan insan yang

berfikir kreatif, kritis dan inovatif. Tunjang-tunjang tersebut menggambarkan restrukturisasi secara eksplisit bidang ilmu, keterampilan dan nilai yang perlu dikuasai murid. Setiap aspek saling berhubungan dan terpadu.



Gambar 2.4 Aspek-Aspek yang Tercakup di Dalam KSSR [4]

1. Pengembangan Komunikasi

Pengembangan kemampuan komunikasi memberi penekanan kepada proses penggabungan keterampilan berbahasa lisan dan tulisan. Aspek ini memberi fokus kepada keterampilan bahasa seperti mendengar dan berbicara, membaca dan menulis, serta nilai tambah dalam pengambilan keputusan.

Peserta didik perlu menguasai keterampilan ini untuk membantu mereka dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam aspek-aspek yang lain. Penguasaan keterampilan berbahasa memungkinkan peserta didik membuat pilihan bahasa yang tepat dan sistematis dalam interaksi sosial.

Disiplin ilmu dalam Aspek Komunikasi ialah Bahasa Malaysia,

Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan, Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Semai.

2. Pengembangan Perkembangan Fisik dan Estetika

Pengembangan Fisik dan Estetika memberi penekanan kepada perkembangan jasmani dan kesehatan untuk kesejahteraan diri dan pemupukan daya imajinasi, kreativitas, bakat dan apresiasi. Disiplin ilmu yang mengembangkan aspek fisik ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan. Kreativitas, bakat dan apresiasi ditumbuhkan melalui Pendidikan.

3. Pengembangan Kemanusiaan

Pengembangan Kemanusiaan memberi penekanan kepada penguasaan ilmu dan praktek tentang kemasyarakatan dan lingkungan setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan solidaritas. Disiplin ilmu yang terdapat dalam Aspek Kemanusiaan ialah Sejarah yang diperkenalkan mulai Tahap II persekolahan.

4. Pengembangan Keterampilan Diri

Pengembangan Keterampilan diri memberi penekanan kepada pemupukan kepimpinan dan kepribadian diri melalui aktivitas kurikulum dan kokurikulum. Murid diberi peluang memadukan pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dipelajari di kelas dan mengamalkannya dalam kegiatan kokurikulum. Keterlibatan dalam kegiatan kokurikulum seperti asosiasi, badan beruniform dan olahraga memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan potensi diri sebagai pemimpin bagi diri sendiri, rakan sebaya, keluarga dan masyarakat.

5. Pengembangan Sains dan Teknologi

Pengembangan Sains dan Teknologi memberi penekanan kepada penguasaan:

- pengetahuan sains, keterampilan dan sikap ilmiah
- pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam matematika
- pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Disiplin ilmu yang terdapat dalam Aspek Literasi Sains dan Teknologi ialah Sains, Matematik, Reka Bentuk dan Teknologi

(RBT) serta Teknologi Maklumat (Informatika) dan Komunikasi (TMK).

6. Pengembangan Kerohanian, Sikap Dan Nilai

Pengembangan Kerohanian, Sikap dan Nilai memberi penekanan kepada bidang pembelajaran yang berfokus kepada penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Disiplin ilmu dalam aspek ini mencakup Pendidikan Islam bagi murid Islam dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Islam.

1.1.4. Fokus KSSR

KSSR memastikan setelah enam (6) tahun pembelajaran menggunakan KSSR peserta didik mencapai standar pengetahuan, keterampilan dan nilai yang ditetapkan di setiap tahap. KSSR memberi penekanan kepada 4M yaitu keterampilan membaca, menulis, menghitung dan menaakul (penalaran). Keterampilan penalaran adalah kemampuan membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau logika.



Gambar 2.5 Fokus penerapan dari KSSR

Pada Tahap I (Setara Pendidikan Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 3 di Indonesia), pengajaran dan pembelajaran menekankan penguasaan asas 4M. Penekanan diberikan untuk literasi dan numerasi

untuk memungkinkan peserta didik menguasai keterampilan tersebut. Penekanan juga diberikan kepada keterampilan nilai tambah yaitu kreativitas dan inovasi, kewirausahaan dan TMK.

Pada Tahap II (Setara Pendidikan Dasar kelas 4 sd 6 di Indonesia), penekanan diberikan kepada penguatan dan aplikasi keterampilan 4M di samping menguasai keterampilan TMK, penguasaan keterampilan yang lebih kompleks, akuisisi pengetahuan, dan perkembangan kepribadian.

1.1.5. Organisasi Kurikulum KSSR

KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular dengan mengelompokkan mata pelajaran dalam kelompok tertentu yang dikenal dengan modul. Mata pelajaran juga diorganisasikan secara modular yaitu kandungan mata pelajaran disediakan dalam bentuk modul yang otomatis-lengkap (self-contained). Setiap modul berisi pengetahuan, keterampilan dan nilai yang telah diidentifikasi untuk dikuasai oleh peserta didik.

1. Organisasi Tahap I (Setara dengan Pendidikan Dasar Kelas 1 sd 3 di Indonesia)

Pada Tahap I kurikulum diorganisasikan dalam Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Komposisi KSSR Tahap I adalah seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Modul-Modul yang Terdapat pada Tahap 1 KSSR

Modul Mata Pelajaran Pokok	Modul Mata Pelajaran Pokok Tematik	Modul Mata Pelajaran Pilihan
Bahasa Malaysia Bahasa Inggris Bahasa Cina SJKC Bahasa Tamil SJKT Matematika Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesehatan Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral	Dunia Kesenian - Dunia Seni Visual - Dunia Musik Dunia Sains dan Teknologi	Bahasa Arab Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) Bahasa Tami Sekolah Kebangsaan (BTSK) Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun

- Modul Mata Pelajaran Pokok

Modul Mata Pelajaran Pokok mencakup bidang pembelajaran asas yang terdiri dari Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani, dan Modul Pendidikan Kesihatan. Modul-modul ini harus atau wajib dipelajari oleh semua murid.

Modul Pendidikan Islam harus dipelajari oleh murid beragama Islam, sedangkan Modul Pendidikan Moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. SJKC adalah singkatan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Untuk etnik Cina ada sekolah kebangsaan khusus di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin. SJKT adalah singkatan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Sekolah ini khusus untuk warga negara Malaysia keturunan Tamil, atau India di mana bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Tamil.

- Modul Mata Pelajaran Pokok Tematik

Modul Teras Tema menggabungkan beberapa disiplin ilmu dalam satu modul. Terdapat dua modul Teras Tema yaitu Dunia Kesenian dan Dunia Sains dan Teknologi (DST). Dunia Kesenian terdiri dari Dunia Seni Visual dan Dunia Musik. DST pula menggabungkan disiplin Sains, Reka Bentuk Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Modul Teras Tema harus dipelajari oleh semua murid.

- Modul Mata Pelajaran Pilihan

Modul elektif merupakan pilihan disiplin bahasa yang ditawarkan kepada murid seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan, Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun. Modul ini ditawarkan untuk memungkinkan murid terampil dalam berbagai bahasa. Pihak sekolah perlu memilih untuk melakukan setidaknya satu bahasa dalam Modul Elektif berdasarkan kesiapan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaan dari murid serta prasarana sekolah.

2. Organisasi Tahap II (Setara dengan Pendidikan Dasar kelas 4 sd 6 di Indonesia)

Pada Tahap II, kurikulum diorganisasikan secara modular dalam Mata Pelajaran Teras dan Mata Pelajaran Elektif. Isi mata pelajaran disediakan dalam bentuk modul. Komposisi KSSR Tahap 2 adalah seperti terlihat pada Tabel 2.2.

1.2. Kurikulum Sekolah Menengah

Kurikulum Sekolah Menengah di Malaysia disebut dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kurikulum tersebut dibagi atas Kurikulum Menengah Rendah, setara dengan tingkatan SMP, dan Kurikulum Menengah Atas, setara dengan tingkatan SMA di Indonesia. Sekolah Menengah Rendah di Malaysia dilaksanakan selama tiga tahun, dan Sekolah Menengah Atas dilaksanakan selama dua tahun. Di Indonesia Sekolah Menengah Atas diselenggarakan selama tiga tahun. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai diberlakukan sejak tahun 1989.

Tabel 2.2 Modul-Modul yang Terdapat Pada Tahap 2 KSSR

Mata Pelajaran Pokok		Mata Pelajaran Pilihan	
Tunjang Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Malaysia • Bahasa Inggris • Bahasa Cina SJKC • Bahasa Tamil SJKT 	Tunjang Komunikasi Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa Arab - Bahasa Cina SK - Bahasa Tamil SK - Bahasa Iban - Bahasa Semai - Bahasa Kadazandusun

Mata Pelajaran Pokok		Mata Pelajaran Pilihan
Tunjang Sains & Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Matematika - Sains - Reka Bentuk & Teknologi/ Teknologi Informasi dan Komunikasi 	Tunjang Keterampilan Diri dilaksanakan melalui aktivitas kurikulum dan kokurikulum
Tunjang Perkembangan Fisik dan Estetika	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Jasmani - Pendidikan Kesehatan - Pendidikan Musik - Pendidikan Seni Visual 	
Tunjang Kerohanian, Sikap & Nilai	Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral	
Tunjang Kemanusiaan	Sejarah	

1.1.1. Prinsip-Prinsip KBSM

Prinsip-prinsip KBSM adalah sebagai berikut:

1. Kesenambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah
2. Pendidikan umum untuk semua siswa
3. Penggunaan disiplin ilmu yang ada
4. Kesepaduan antara unsur-unsur intelektualitas, rohani, emosi, dan jasmani
5. Penekanan pada nilai-nilai murni
6. Peningkatan penggunaan Bahasa Melayu
7. Pendidikan seumur hidup.

1.1.2. Organisasi Mata Pelajaran

Mata pelajaran yang dikelompokkan atas mata pelajaran untuk tingkat Sekolah Menengah Rendah (setara SMP), dan tingkat Sekolah Menengah Atas (setara SMA).

Mata pelajaran untuk tingkat Menengah Rendah dibagi atas mata pelajaran dasar atau mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan atau tambahan. Mata pelajaran wajib di Malaysia disebut mata pelajaran teras.

1. Mata Pelajaran Sekolah Menengah Rendah

Di bawah ini adalah mata pelajaran wajib atau teras untuk tingkat Sekolah Menengah Rendah:

- Bahasa Melayu
- Bahasa Inggris
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Moral
- Matematika
- Sains
- Sejarah
- Geografi
- Kemahiran Hidup
- Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- Pendidikan Seni

Di samping mempelajari mata pelajaran wajib di atas, siswa juga mempelajari mata pelajaran tambahan yang dapat dipilih satu dari tiga mata pelajaran yang ditawarkan yaitu: Bahasa Cina, Bahasa Tamil, dan Bahasa Arab.

2. Mata Pelajaran Untuk Sekolah Menengah Atas

Untuk jenjang pendidikan Menengah Atas, mata pelajaran dikelompokkan atas: Mata Pelajaran Teras (wajib), Mata Pelajaran Tambahan, dan Mata Pelajaran Elektif.

- Mata Pelajaran Teras (wajib)

Daftar mata pelajaran teras yang dipelajari siswa berjumlah delapan (8) mata pelajaran sebagai berikut:

 - Bahasa Melayu
 - Bahasa Inggris
 - Pendidikan Agama Islam
 - Pendidikan Moral
 - Matematika
 - Sains

- Sejarah
- Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- Mata Pelajaran Tambahan

Disamping mata pelajaran wajib di atas, siswa juga mempelajari salah satu dari tiga mata pelajaran tambahan berikut yaitu:

 - Bahasa Cina
 - Bahasa Tamil
 - Bahasa Arab
- Mata Pelajaran Elektif

Mata pelajaran elektif dikelompokkan menjadi empat paket penjurusan, yaitu: i) Kemanusiaan; ii) Vokasi dan Teknologi; iii) Sains; dan iv) Studi Islam.

Mata pelajaran dari masing-masing paket penjurusan adalah sebagai berikut:

 - Paket Jurusan Kemanusiaan

Mata pelajaran yang ditawarkan adalah: Kesusasteraan Melayu, Kesusasteraan dalam Bahasa Inggris, Geografi, Pendidikan Seni, dan Bahasa Arab Tinggi.
 - Paket Jurusan Vokasi dan Teknologi

Mata pelajaran yang ditawarkan untuk siswa yang mengambil paket vokasi dan teknologi adalah: Prinsip Keuangan, Dasar-Dasar Ekonomi, Perdagangan, Ilmu Pertanian, Ekonomi Rumah Tangga, Matematika Tambahan, Sekolah Teknik Mesin, Sekolah Teknik Umum, Teknik Listrik dan Elektronika, Menggambar Teknik, Teknik Bangunan, dan Reka Cipta.
 - Paket Jurusan Sains

Mata pelajaran yang ditawarkan kepada siswa yang mengambil penjurusan Sains adalah: Sains Tambahan, Fisika, Kimia, dan Biologi.
 - Paket Jurusan Pengajian Islam

Mata pelajaran yang ditawarkan kepada siswa yang mengambil Paket Jurusan Studi Islam adalah: Tasawwur Islam, Pendidikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pendidikan Syari'ah Islamiah.

3

Ujian Nasional di Malaysia

Malaysia menyelenggarakan ujian nasional untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah rendah, jenjang pendidikan menengah atas, dan jenjang persiapan memasuki perguruan tinggi.

Ujian nasional untuk jenjang pendidikan dasar, setara SD di Indonesia, di Malaysia disebut Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah rendah di Malaysia, setara SMP di Indonesia, disebut Penilaian Menengah Rendah (PMR). Ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah atas, setara kelas XI SMA di Indonesia, disebut Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Ujian Nasional bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, setara dengan kelas XII SMA di Indonesia, disebut dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

Gambaran jenis ujian nasional yang diselenggarakan di Malaysia digambarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jenis Ujian Nasional pada Sistem Pendidikan Malaysia

No.	Jenjang Pendidikan	Umur Siswa	Nama Ujian	Waktu Pelaksanaan Ujian	Keterangan
1	Sekolah Rendah	12	Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)	Akhir persekolahan	Mengetahui pencapaian hasil belajar dan semua siswa tetap tamat berapapun hasil ujian
2	Sekolah Menengah Rendah	15	Penilaian Menengah Rendah (PMR)	Akhir persekolahan	Mengetahui pencapaian hasil belajar dan semua siswa tetap tamat berapapun hasil ujian
3	Sekolah Menengah Atas (kelas 2)	17	Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)	Kelas 2 Sekolah Menengah Atas	Mengetahui hasil belajar dan semua tamat. Syarat untuk masuk Kolej bukan Universitas
4	Sekolah Menengah Atas (kelas 3)	18	Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)	Kelas 3 Sekolah Menengah Atas	Hasil Ujian digunakan untuk masuk universitas

Malaysia menyelenggarakan ujian nasional untuk semua tingkatan pendidikan. Untuk tingkat pendidikan Sekolah Rendah diselenggarakan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Hasil ujian menunjukkan pencapaian hasil belajar untuk setiap mata pelajaran bagi murid. Apapun hasil ujian atau nilai yang diperoleh oleh siswa tidak menghalangi siswa untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Rendah. Setiap siswa tetap mendapat lembaran hasil ujian.

Pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Rendah, setara SMP di Indonesia, juga diselenggarakan ujian nasional yang lazim disebut Penilaian Menengah Rendah (PMR). Ujian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar masing-masing siswa secara nasional disamping sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan bidang pendidikan. Apapun hasil ujian atau nilai yang diperoleh siswa mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Atas. Walaupun siswa mendapatkan nilai untuk mata pelajaran tertentu dianggap gagal, tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk dapat melanjutkan pendidikan. Tidak ada istilah lulus atau tidak lulus.

Ujian nasional juga diselenggarakan pada akhir pendidikan siswa di Sekolah Menengah Atas. Lama waktu pembelajaran di Sekolah Menengah Atas adalah dua tahun. Ujian nasional pada tingkatan pendidikan ini disebut Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Sijil bermakna ijazah dalam Bahasa Indonesia. Pada ujian tingkat Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah siswa tidak menerima ijazah, tetapi lembar hasil ujian saja. Baru pada Sekolah Menengah Atas siswa mendapatkan ijazah atau sijil. Apapun hasil ujian siswa tetap mendapatkan ijazah dan berhak untuk tetap melanjutkan pendidikan. Lulus SPM adalah syarat masuk untuk pendidikan di Kolej dan pendidikan diploma vokasi.

Lulusan SPM tidak dapat melanjutkan pendidikan ke universitas atau perguruan tinggi untuk program strata satu (S1). Jika siswa ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada jenjang S1, mereka harus melanjutkan pendidikan pra-universitas selama dua tahun. Setelah selesai melanjutkan pendidikan pra-universitas, kembali secara nasional diselenggarakan ujian untuk mendapatkan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). Hanya siswa yang memiliki STPM yang diizinkan masuk perguruan tinggi untuk jenjang S1. Semua peserta ujian mendapatkan ijazah STPM dan yang membedakannya adalah nilai yang diperoleh oleh siswa. Jadi, tidak ada istilah tidak lulus ujian STPM. Untuk masuk ke perguruan tinggi tidak diadakan ujian masuk baik oleh perguruan tinggi maupun oleh Kementerian Pendidikan. Seleksi didasarkan pada nilai STPM.

Dari informasi terkait sistem pendidikan, kurikulum, dan ujian nasional di Malaysia, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan Malaysia bersifat sentralistik. Pemerintah pusat bertanggung-jawab terhadap penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi
2. Jenjang pendidikan hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia, hanya pada tingkat Sekolah Menengah Atas terdapat perbedaan. Pada sistem pendidikan Malaysia lama penyelenggaraan pendidikan hanya dua (2) tahun;
3. Malaysia menerapkan usia masuk sekolah yang sangat ketat. Untuk masuk kelas satu Sekolah Rendah (SD) harus berusia di atas enam tahun (6+);
4. Anggaran pendidikan sudah 20% atau lebih dari anggaran belanja negara sejak tahun 1996;
5. Malaysia juga sedang dalam proses mencari model kurikulum yang cocok;
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Melayu termasuk mata pelajaran wajib mulai dari Kurikulum Pendidikan Sekolah Rendah dan Pendidikan Menengah;
7. Malaysia menyelenggarakan ujian nasional untuk setiap jenjang pendidikan: Pendidikan Sekolah Rendah, Pendidikan Menengah Rendah, Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Pra-universitas;
8. Hasil ujian nasional tidak mempengaruhi siswa untuk dapat terus melanjutkan pendidikan. Apapun nilai yang diperoleh dalam ujian nasional tidak mempengaruhi kesempatan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak dikenal tidak lulus ujian nasional;
9. Begitu juga kenaikan kelas, setiap siswa semuanya naik kelas berapapun nilai yang mereka dapatkan;

Tidak ada tes masuk ke perguruan tinggi. Seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan hasil nilai ujian nasional Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).

4

Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan di Malaysia dikelola oleh bahagian setingkat Direktorat pada kantor Kementerian Pendidikan Malaysia yang diberi nama Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK). Lembaga ini sudah didirikan sejak tahun 1956. Visi, misi, tujuan dan fungsi dari JNJK adalah sebagai berikut.

Visi: *JNJK memastikan standar mutu pendidikan yang berwibawa*

Misi: *JNJK meningkatkan mutu pendidikan pada institusi pendidikan secara professional, berkualitas, dan beretika.*

Tujuan dari JNJK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Meningkatkan mutu pengelolaan institusi pendidikan agar efektif dan efisien;
3. Mewujudkan dan mendorong kerjasama pada institusi pendidikan;
4. Menyalurkan informasi terkait peningkatan mutu pendidikan kepada institusi pendidikan;
5. Menggiatkan program kerja jaminan mutu berterusan pada institusi pendidikan.

Fungsi dari JNJK adalah sebagai berikut:

1. Merancang dasar dan pelaksanaan jaminan mutu yang akan

- diterapkan pada institusi pendidikan;
2. Bertanggung jawab dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas pada institusi pendidikan;
 3. Melakukan penilaian terhadap institusi pendidikan;
 4. Memberikan nasehat dan saran kepada pengelola institusi pendidikan;
 5. Menyampaikan laporan hasil penilaian institusi pendidikan kepada Kementerian Pendidikan;
 6. Merancang standar mutu pendidikan kebangsaan yang akan dilaksanakan pada institusi pendidikan;
 7. Memastikan standar mutu yang ditetapkan dijalankan oleh institusi pendidikan;
 8. Memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.

Standar Mutu Pendidikan Malaysia atau lazim dikenal di Malaysia dengan penamaan Standar Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Terdapat lima standar mutu pendidikan

Malaysia yang menjadi acuan penilaian pada institusi pendidikan dasar dan menengah. Lima standar pada SKPM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar mutu kepemimpinan dan Tujuan institusi pendidikan;
2. Standar mutu manajemen institusi pendidikan;
3. Standar mutu kurikulum, ko-kurikulum, olah raga, dan siswa;
4. Standar mutu pembelajaran dan pengajaran;
5. Standar mutu kemenjadian siswa

Masing-masing standar memiliki rincian komponen yang harus dipenuhi. Dari lima standar mutu utama tersebut dijabarkan dalam 93 komponen mutu sebagai berikut:

1. Standar mutu Kepemimpinan dan Tujuan Institusi
Standar ini memiliki delapan (8) komponen pendukung sebagai berikut:
 1. Gaya kepemimpinan institusi pada pendidikan
 2. Penetapan dan pelaksanaan tujuan institusi pendidikan

3. Kemampuan berkomunikasi
 4. Kemampuan membuat perencanaan
 5. Kemampuan memotivasi dan menggerakkan warga sekolah
 6. Kemampuan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
 7. Kemampuan memimpin bidang pendidikan dan pengajaran
 8. Kemampuan kerjasama dalam memimpin
2. Standar mutu manajemen institusi pendidikan
- Standar mutu ini juga memiliki delapan (8) komponen mutu yang dijadikan rujukan mutu oleh sekolah. Komponen mutu tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan sumber daya manusia
 2. Pengelolaan prasarana
 3. Pengelolaan keuangan dan aset sekolah
 4. Pengelolaan data dan informasi
 5. Pengelolaan sumber pendidikan
 6. Pengelolaan iklim organisasi sekolah
 7. Kemampuan membina musyawarah
 8. Pengelolaan asrama sekolah
3. Standar mutu kurikulum, ko-kurikulum, olah raga, dan siswa
- Standar mutu ini memiliki lima belas (15) komponen mutu sebagai berikut:
1. Menjalankan kurikulum pendidikan kebangsaan
 2. Pengelolaan mata pelajaran
 3. Pengelolaan program peningkatan kemampuan siswa
 4. Pengelolaan waktu belajar
 5. Pengelolaan ujian dan penilaian
 6. Menjalankan program ko-kurikular dan olah raga
 7. Pengelolaan kelompok olah raga bagi siswa
 8. Pengelolaan organisasi penunjang kegiatan siswa
 9. Pengelolaan olah raga untuk prestasi bagi siswa
 10. Pengelolaan penilaian kegiatan ko-kurikular dan olah raga
 11. Menjalankan kegiatan kompetisi olah raga
 12. Menyelenggarakan kegiatan olah raga untuk semua siswa
 13. Menjalankan disiplin sekolah

14. Melakukan kegiatan bimbingan dan konseling
15. Melaksanakan kegiatan kebajikan, kesehatan, dan keselamatan
4. Standar mutu pembelajaran dan pengajaran
Standar mutu ini memiliki dua belas (12) komponen mutu sebagai berikut:
 1. Penglibatan siswa
 2. penguasaan pembelajaran oleh siswa
 3. Hasil kerja siswa
 4. Perencanaan dan ketersediaan guru
 5. Penyampaian pelajaran oleh guru
 6. Kemampuan komunikasi guru dan siswa
 7. Pemamfaatan sumber belajar
 8. Penilaian
 9. Teknik pembuatan soal ujian
 10. Penguasaan materi pengajaran oleh siswa
 11. Pengelolaan kelas dan tempat belajar lainnya
 12. Penerapan nilai-nilai keprofesionalan guru
5. Standar mutu kemenjadian siswa
Standar mutu kemenjadian siswa memiliki lima puluh (50) kompnen mutu yang dibagi atas jenjang pendidikan: prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Masing-masing memiliki komponen mutu terkait kemenjadian siswa. Misalnya komponen mutu bagi murid prasekolah difokuskan kepada enam penguasaan sebagai berikut:
 1. Penguasaan menunjang komunikasi
 2. Penguasaan menunjang kerohanian, sikap dan nilai-nilai
 3. Penguasaan menunjang sains dan teknologi
 4. Penguasaan menunjang kehidupan social
 5. Penguasaan menunjang pembentukan fisik dan estetika
 6. Penguasaan keterampilanPenilaian institusi pendidikan terhadap lima standar utama tersebut diberikan dalam bentuk angka dengan rentangan 1 – 6 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - 1 = sangat lemah
 - 2 = lemah

- 3 = memuaskan
 4 = harapan
 5 = baik
 6 = cemerlang

Tabel 4.1 bBerikut diberikan model deskripsi penilaian dari Standar Mutu 1: Kepemimpinan Sekolah

Skor	Deskripsi penilaian
6	Semua kriteria pada skor 5 dipenuhi dan kepala sekolah memiliki gagasan inovasi dan kreativiti untuk meningkatkan mutu kepemimpinan sekolah
5	<ul style="list-style-type: none"> . Kepala sekolah menetapkan tujuan dan keputusan yang jelas, tepat dan fokus pada pelaksanaan kurikulum; . Kepala sekolah melaksanakan pengajaran sesuai jumlah jam yang ditetapkan; . Kepala sekolah menjadi rujukan teori pembelajaran, pedagogi, dan member contoh terbaik bagi guru di sekolah; . Kepala sekolah memastikan semua guru diberikan saran untuk meningkatkan mutu pembelajaran; . Kepala sekolah secara sistematis membimbing capaian hasil kerja dan tugas siswa; . Kepala sekolah juga membimbing guru dalam perencanaan dan proses pembelajaran; . Kepala sekolah mendorong terciptanya proses pembelajaran yang kondusif secara menyeluruh dan berkesan; . Budaya belajar diperlihatkan oleh hampir semua komunitas sekolah
4	Semua komponen mutu pada deskripsi skor 3 dipenuhi, tetapi belum mencapai keseluruhan komponen mutu dengan skor 5
3	<ul style="list-style-type: none"> . Kepala sekolah menetapkan tujuan pelaksanaan kurikulum; . Kepala sekolah mengajar sesuai jam pelajaran yang ditetapkan; . Kepala sekolah memberi saran mengenai pembelajaran kepada sebagian besar guru . Kepala sekolah membimbing hasil kerja siswa, tugas, dan capaian siswa; . Kepala sekolah mendorong suasana pembelajaran yang kondusif.

Skor	Deskripsi penilaian
2	Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan dan belum mencapai skor komponen mutu 3
1	<ul style="list-style-type: none"> . Kepala sekolah kurang berusaha untuk menentukan tujuan dan menetapkan mengenai pelaksanaan kurikulum; . Kepala sekolah tidak mengajar sesuai dengan jam pelajaran yang ditetapkan; . Kepala sekolah kurang membimbing pelaksanaan pengajaran; . Kepala sekolah kurang membimbing hasil kerja guru dan siswa; . Kepala sekolah kurang berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.

Bobot persentase penilaian sekolah dari lima standar mutu tersebut pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Bobot persentase penilaian sekolah dari lima standar mutu

Standar Mutu	Bobot Penilaian
1	10 %
2	15 %
3	20 %
4	20 %
5	35 %

Tabel 4.3 ditampilkan hasil penilaian akhir mutu suatu sekolah.

Tabel 4.2 Hasil penilaian akhir mutu sekolah

Tarf Pencapaian Mutu Sekolah	
Tarf	Persentase Penilaian
Cemerlang	90 – 100 %
Baik	80 – 89 %
Harapan	60 – 79 %
Memuaskan	40 - 59 %
Lemah	20 – 39 %
Sangat Lemah	0 – 19 %

Berdasarkan penilaian capaian mutu sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil langkah-langkah strategis kepada

masing-masing sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Misalnya, pada suatu sekolah Standar Mutu 1 (Kepemimpinan Kepala Sekolah) mendapat skor rendah, maka Kepala Sekolah diminta untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan sekolah pada institusi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Rata-rata sekolah di Malaysia hampir memiliki mutu yang tidak jauh berbeda baik sekolah yang berada di perkotaan dan di daerah karena manajemen mutu dikendalikan oleh pemerintah kerajaan. Pemerintah pusat bertanggung jawab melengkapi segala bentuk keperluan pendidikan pada semua sekolah yang berada dibawah kendali pemerintah.

5

Pembinaan Guru

Pembinaan guru meliputi penyiapan tenaga guru pada institusi pendidikan tinggi yang memiliki program studi kependidikan pembinaan pada saat calon guru memulai profesi keguruan, dan pembinaan setelah menjadi guru.

Pembinaan dalam penyiapan tenaga pendidik untuk guru sekolah dasar atau sekolah rendah disiapkan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG) dan tenaga pendidik untuk sekolah menengah disiapkan oleh institusi pendidikan tinggi melalui Fakultas Pendidikan.

Institut Pendidikan Guru dipimpin oleh seorang rektor yang memiliki cabang di setiap negeri. IPG mulai berdiri sejak tahun 1995 dan jenjang pendidikan yang dijalankan adalah program diploma dan sarjana (S1). IPG merupakan institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Saat ini tercatat 27 IPG yang ada di Malaysia yang mempunyai tugas menyiapkan tenaga pendidik untuk sekolah dasar. Jumlah mahasiswa yang diterima diperhitungkan secara matang kebutuhan guru pada tiga atau empat tahun yang akan datang. Dengan cara itu, lulusan IPG begitu menamatkan pendidikan langsung disiapkan untuk menjadi tenaga pendidik untuk sekolah dasar.

Visi, misi, dan Fungsi dari IPG adalah sebagai berikut:

Visi

IPG peneraju kecerlangan pendidikan guru

Misi

IPG melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

Falsafah pendidikan guru di Malaysia adalah “Guru yang berpekeriti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Sejak tahun 2007, pemerintah Malaysia sudah mengharuskan guru sekolah dasar harus sudah menamatkan jenjang pendidikan S1. Sama dengan yang diberlakukan di Indonesia, guru yang belum memiliki jenjang pendidikan S1 diharuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang S1. Data tahun 2010 menunjukkan 30% guru sekolah rendah sudah memiliki jenjang pendidikan S1.

Tenaga pendidik untuk jenjang sekolah menengah disiapkan melalui Fakultas Pendidikan dari beberapa perguruan tinggi negeri di Malaysia.

Penerimaan guru baru dan pembinaan guru dalam jabatan dikelola oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) pada Kementerian Pendidikan Malaysia. BPG tersebut setara dengan Direktorat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk memahami tugas BPG, berikut disampaikan visi, misi, dan fungsi BPG.

Visi BPG

Bahagian pembangunan profesionalisme keguruan yang efektif dan responsive kepada hala tuju Kementertain Pendidikan Malaysia.

Misi BPG

Melaksanakan program pembangunan profesionalisme keguruan secara terancang dan berterusan.

Fungsi BPG

1. Menjadikan guru professional dalam pembelajaran inovatif dan bermakna;
2. Membina guru menjadi fasilitator pembelajaran dan mengelola

- pembelajaran;
3. Menyiapkan tenaga pelatih bagi guru;
 4. Menjaga standar profesional guru;
 5. Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan profesional guru;
 6. Merancang pelatihan bagi guru;

Setiap guru wajib mengikuti pelatihan 40-56 jam (1 minggu) setiap tahun untuk meningkatkan profesional guru dan membekali guru dengan informasi baru terkait bidang studi yang diajarkan, dan informasi teknik dan metode pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan efisien. Pelatihan guru dikelola oleh Bahagian Pendidikan Guru. Dalam pelaksanaannya, BPG meminta bantuan tenaga pelatih dari Institut Pendidikan Guru atau dari perguruan tinggi yang memiliki program studi kependidikan.

Hal yang juga penting untuk diketahui adalah besarnya gaji guru di Malaysia. Guru dikategorikan menjadi lima jenjang berdasarkan kepangkatan dan lama dinas seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Skala Gaji Guru di Malaysia Tahun 2012

No	Grade	Gaji Minimum (Ringgit)	Gaji Maksimum (Ringgit)	Kenaikan per Tahun	Lama Mengabdikan (Tahun)
1	DG41	1916.31	6130.59	225	8
2	DG44	3370.78	6372.54	250	8
3	DG48	4921.15	7417.69	270	6
4	DG52	5537.53	8091.8	290	3
5	DG54	5839.43	8612.34	320	

(Bahagian Pendidikan Guru Malaysia, 2013)

Kebijakan pemerintah Malaysia pada tahun 2014 dalam upaya meningkatkan profesional tenaga pendidik menawarkan beasiswa magister S2 dan doctor S3 kepada tenaga pendidik yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tambahan insentif khusus juga diberikan kepada tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3.

6

Penutup

Secara singkat sudah dipaparkan sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa kesimpulan penting, pertama, Sistem Pendidikan Malaysia bersifat sentralistik. Pemerintah pusat mengelola dan bertanggung jawab terhadap layanan pendidikan. Kedua, Ujian Nasional diselenggarakan untuk setiap akhir jenjang pendidikan dan hasil ujian digunakan untuk pemetaan, dasar pengambilan kebijakan, dan seleksi untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, penjaminan mutu pendidikan dan pembinaan guru dikelola secara langsung oleh Kementerian Pendidikan. Standar penilaian penjaminan mutu sekolah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Pembinaan guru dilakukan secara rutin. Setiap tahun semua guru harus mengikuti pelatihan paling kurang selama satu minggu yang diatur secara nasional. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan perluasan akses pendidikan juga terus dilakukan melalui kebijakan strategis oleh pemerintah. Pada akhir tahun 2013, dua kebijakan strategis diambil oleh pemerintah, pertama, peluncuran Malaysia Education Blueprint 2013-2025. Kedua, penggabungan dua kementerian (Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi) yang mengelola pendidikan menjadi satu kementerian, yaitu, Kementerian Pendidikan. Semoga informasi singkat tentang Sistem Pendidikan di Malaysia bermanfaat.

DAFTAR REFERENSI

1. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Executive Summary
2. Malaysia Education Blueprint 2013-2025 (Preschool to P o s t - Secondary School). Putra Jaya: Percetakan Kementerian Pendidikan.
3. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan
4. Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putra Jaya: Percetakan Kementerian Pendidikan.
5. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Institut Pendidikan Guru Malaysia. www.moe.gov.my.
6. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Bahagian Pendidikan Guru Malaysia. www.moe.gov.my.
7. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. www.moe.gov.my.
8. Marzuki, Sharil. 2008. Dasar Kewangan Pendidikan. Kuala Lumpur: BS Print (M) Sdn. Bhd.

-o0o-

XI

Sistem Pendidikan di Mesir



Sumber foto Piramid di Mesir: gommu-gommu.blogspot.com

Oleh:
Dr. Drs. Fahmy Lukman, M.Hum.
Atase Pendidikan di Kairo

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Mesir

Republik Arab Mesir (RAM) merupakan Negara yang terletak di antara benua Afrika dan Asia. RAM, dengan penduduk sekitar 85 juta jiwa, dengan pertumbuhan sekitar 2,5%/tahun atau sekitar 1,3 juta jiwa penduduk/tahun, maka RAM dikenal sebagai salah satu Negara yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi di dunia.

RAM, berdasarkan *survey* pendidikan tahun 1986, hanya memiliki 4,1% penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan universitasnya, dengan tingkat buta huruf mencapai angka 26%. Pada tingkat sekolah menengah, hanya 21,7% yang dapat mengenyam pendidikan sekolah menengah, meski pun hal ini cukup pesat pertumbuhannya dengan adanya ekspansi pendidikan menengah dan tinggi.

Mengingat hal tersebut, Pemerintah RAM secara serius meningkatkan anggaran pendidikannya. Kalau pada tahun 2005-2006 anggarannya baru 18,6 milyar EGP (*Egyptian Pound*) maka pada 2010-2011 ditingkatkan sebesar 98,8% atau 36,5 milyar EGP. Gaji menyerap 80% lebih dari anggaran, sedangkan investasi untuk gedung meningkat hingga 13%. Pemerintah terus menerus memperhatikan mutu pendidikan dengan cara, misalnya, sertifikasi guru dan dosen. Setiap guru dan dosen diuji kelayakan mengajarnya, sebelum diberi sertifikat. Pemerintah memiliki sistem independen jaminan mutu pendidikan dan akreditasi yang dikenal sebagai *National Authority for Quality Assurance*

and Accreditation of Education-Egypt (NAQAAE). Lembaga ini berada langsung di bawah Perdana Menteri, beranggotakan 15 orang pakar.

Ujian Nasional (UN) dilaksanakan secara sentralistik dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir. UN tersebut dilaksanakan untuk Kelas 2 dan 3 SMA dan Kelas 3 SMK. Untuk UN Kelas 2 di SMA, digunakan sebagai dasar kenaikan kelas, sedangkan untuk Kelas 3 SMA dan SMK, nilai UN digunakan sebagai bahan pertimbangan kelulusan dan seleksi penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kritik masyarakat terhadap UN bukanlah pada pelaksanaan UN itu sendiri, melainkan hanya terfokus pada tingkat kesulitan naskah soal, validitas naskah dan pengaruh naskah ujian terhadap pelaksanaan pembelajaran.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	549
DAFTAR ISI	551
1. Latar Belakang Pendidikan di Mesir	553
2. Struktur dan Jenis Pendidikan Mesir	557
3. Ujian Nasional (UN) Di Mesir	569
4. Lembaga dan Sistem Penjaminan Mutu	575
5. Sistem Pembinaa Guru	579
6. Kasus Khusus: Pendidikan Mesir Pasca- Revolusi 25 Januari 2011	581
DAFTAR REFERENSI	589

1

Latar Belakang Pendidikan di Mesir

Republik Arab Mesir (RAM) luasnya kurang lebih 1 juta kilometer persegi dan terletak di bagian Timur Laut Benua Afrika dan Semenanjung Sinai di Barat Daya Benua Asia. Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania di Utara, Laut Merah, Terusan Suez dan Teluk Aqaba di sebelah Timur. Daerah semenanjung Sinai dipisahkan dari daerah Mesir lainnya oleh Terusan Suez. Di bagian Barat, Mesir berbatasan dengan Libya, sedangkan di bagian Selatan berbatasan dengan Sudan.

Mesir berpenduduk sekitar 85 juta jiwa (hasil sensus tahun 2012), dengan komposisi 36% berusia di bawah 15 tahun dan 3,7% di atas 65 tahun. Pada tahun 1990, penduduk Mesir baru mencapai 55 juta dan saat itu diperkirakan akan mencapai lebih kurang dari 85 juta pada tahun 2010. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1950 dan 1960-an, rata-rata 2,4 hingga 2,5% per tahun dan meningkat hampir 2,75% pada tahun 1970-an. Berdasarkan angka tersebut, Mesir merupakan salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi, dengan pertambahan penduduk kira-kira 1,3 juta jiwa setiap tahun. Angka kelahiran rata-rata 40,9 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian sekitar 11% per 1000 penduduk. Secara etnik, Mesir terdiri dari suku Ejiptsi, Badui, dan Barbar. Agama penduduk Mesir adalah Islam (85%), sebagian besar Islam Sunni, dan agama-agama lainnya. Bahasa resmi negara adalah Bahasa Arab. Angka buta huruf (*illiterate*) rakyat Mesir mencapai 26% dan merupakan angka yang terhitung cukup tinggi.

Survei tentang tingkat pendidikan di Mesir yang dilakukan pada tahun 1986 menunjukkan bahwa hanya 4,1% yang memiliki gelar universitas. Persentase penduduk yang berpendidikan sekolah menengah mencapai 21,7%. Jumlah ini tercapai karena adanya ekspansi pendidikan pada tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Penduduk yang buta huruf tercatat 70,8% dari penduduk berusia di atas 10 tahun pada tahun 1960, 56,3% tahun 1976 dan 49,4% pada tahun 1986. Jumlah wanita buta huruf masih tetap 70% lebih tinggi dari pria buta huruf. Walaupun terjadi perbaikan dalam persentase, namun dalam jumlah absolut angka buta huruf terus meningkat yang pesat sejak era 1990-an. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Mesir memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengembangan pendidikan.

Berdasarkan *Human Development Index* (HDI), Mesir menempati urutan ke 116 dari seluruh negara yang tercantum dalam HDI. Melalui bantuan dari Bank Dunia dan beberapa perusahaan multilateral, Pemerintah Mesir berusaha memperluas kesempatan pembinaan dan pendidikan terutama bagi anak-anak serta memasukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di seluruh jenjang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Pemerintah juga menjamin penyelenggaraan pendidikan gratis di seluruh tingkatan pendidikan negeri. Pada tahun 2007 jumlah total anggaran yang disediakan untuk sektor pendidikan mencapai 12,6 %. Investasi di sektor ini juga mengalami peningkatan hingga 4,8% dari GDP pada tahun 2005 dan berkurang menjadi 3,7% pada tahun 2007. Menteri Pendidikan dan Pengajaran, sebagai salah satu penanggungjawab pendidikan, telah menetapkan kebijakan mengurangi sentralisasi pendidikan dengan mengalihkan tanggungjawab pengelolaannya kepada institusi masing-masing sehingga setiap institusi lebih independen dan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan.

Sebagai negara yang masih berstatus negara berkembang, Mesir sedang terus membenahi diri, terutama dalam peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu bidang kerjasama strategis antara Indonesia-Mesir yang perlu terus ditingkatkan.

Di antara indikator keseriusan perhatian pemerintah Mesir terhadap peningkatan pendidikan, antara lain dibuktikan dengan peningkatan anggaran pendidikan tahun ajaran 2010 – 2011 menjadi 36,3 miliar Pound Mesir (*Egyptian Pound*, EGP) atau 98,8% lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun 2005 – 2006 yang berjumlah 18,6 miliar EGP.

Selain anggaran pendidikan, Pemerintah Mesir berupaya meningkatkan anggaran penelitian bagi perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah Universitas Cairo yang mendapat anggaran penelitian untuk ilmu-ilmu terapan yang sebelumnya hanya sebesar 10 juta EGP, saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 60 juta EGP.

Sebagai upaya peningkatan bidang pendidikan, pada tahun 2010 Pemerintah Mesir telah membentuk Tim Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan yang diketuai oleh Prof. Dr. Magdi Qasim. Tim Nasional Penjaminan Mutu bertugas untuk melakukan sertifikasi kepada seluruh lembaga pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Tim ini telah melakukan langkah-langkah yang positif dalam merealisasikan rencana sertifikasi pendidikan.

Pemerintah memberikan perhatian dalam menambah jumlah bangunan sekolah sebagai bagian dari peningkatan fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah, selain sebagai upaya perbaikan dari sekolah yang sudah rusak, dilakukan juga pembangunan sekolah baru yang diprioritaskan di wilayah-wilayah miskin.

Sejak tahun 2010, pemerintah Mesir secara terus menerus mensinergikan berbagai instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Keberadaan tanggungjawab pendidikan bukan saja dibebankan kepada Kementerian Pendidikan, melainkan juga kepada kementerian lainnya agar bertanggung jawab untuk berkontribusi melalui sinergi program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan.

Selain melakukan sertifikasi terhadap sekolah dan perguruan tinggi, Pemerintah Mesir juga melakukan sertifikasi terhadap guru dan dosen. Setiap guru dan dosen dievaluasi kelayakan mengajarnya melalui proses

sertifikasi. Untuk itu, Pemerintah Mesir telah mengundang lebih dari 100 orang ilmuwan Mesir yang telah bekerja di luar negeri dalam bidang pendidikan khususnya, untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Mesir.

2

Struktur dan Jenis Pendidikan Mesir

Jenjang pendidikan umum di Mesir terdiri dari 3 tahapan:

1. Tahapan pendidikan dasar untuk usia 4 – 14 tahun yang terdiri dari:
 - Tahapan Pra-sekolah (taman kanak-kanak) selama 2 tahun,
 - Tahapan Dasar (*Primary School* atau *Ibtida'i*) selama 6 tahun,
 - Tahapan Menengah Pertama (*Preparatory School* atau *Idady*)
2. Tahapan Menengah Atas (*Secondary School*) selama 3 tahun, yakni untuk usia 15 sampai 17 tahun;
3. Tahapan Perguruan Tinggi.

Pendidikan wajib diberlakukan untuk 9 tahun usia belajar, yakni usia 6 sampai 14 tahun. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi dua jenjang:

1. Jenjang I adalah sekolah dasar (*Primary school*) mulai dari kelas 1 sampai 6, dan
2. Jenjang II adalah sekolah menengah pertama (*Preparatory*) mulai dari kelas 7 sampai 9.

Berdasarkan kategori sekolah, sekolah di Mesir diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sekolah negeri

Sekolah negeri terdiri dari 2 macam, yaitu:

- Sekolah Arab

Sekolah Arab merupakan sekolah dengan menggunakan kurikulum nasional dan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar semenjak kelas 1. Sedangkan bahasa pengantar

bahasa Inggris mulai dilakukan di kelas 4.

- Sekolah Bahasa/Eksperimen

Sekolah Bahasa/Eksperimen merupakan sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sejak kelas 1 dan tetap menggunakan kurikulum nasional sebagai acuan. Penggunaan Bahasa Perancis sebagai bahasa kedua dilakukan pada sekolah menengah atas (*Secondary School*). Usia yang diterima untuk kelas 1 pada Sekolah Bahasa/Eksperimen adalah 7 tahun; setahun lebih tua dari sekolah dengan berbahasa Arab.

2. Sekolah swasta

Sekolah swasta terdiri dari empat kategori, yaitu:

- Sekolah Swasta Biasa (*Ordinary School*)

Sekolah swasta biasa (*Ordinary School*) tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah negeri dari sisi kurikulum. Hanya saja sekolah-sekolah jenis ini memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan peserta didik berupa fasilitas bangunan dan sarana-prasarana sekolah, di samping metodologi pengajarannya.

- Sekolah Bahasa (*Language School*), Sekolah Keagamaan, dan Sekolah Internasional.

Sekolah Bahasa (*Language School*) tetap mengacu pada kurikulum nasional dan mengajarkan sebagian besar dari mata pelajarannya dalam bahasa Inggris. Sekolah tersebut juga mengajarkan bahasa asing lain, seperti bahasa Perancis dan Jerman. Sekolah-sekolah bahasa memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sekolah lainnya. Hal ini disebabkan ketersediaan sarana-prasarana sekolah yang lebih memadai. Tidak jarang terdapat sekolah dalam kategori ini yang menjadikan bahasa Perancis atau Jerman sebagai bahasa pengantar utama.

Sekolah agama adalah sekolah yang seluruh kurikulumnya dibangun berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan berorientasi pada pendidikan dengan dasar keagamaan Islam. Sekolah dalam kategori ini biasanya fokus pada

pengajaran agama yang lulusannya ditujukan untuk menjadi ahli agama, seperti sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Al-Azhar. Di samping itu, terdapat pula sekolah-sekolah keagamaan yang didirikan oleh para misionaris Nasrani yang juga memiliki orientasi yang sama, yaitu menjadikan lulusannya sebagai ahli agama Nasrani. Biasanya sekolah semacam ini berada di bawah naungan gereja-gereja Nasrani (Kristen Koptik).

Sekolah internasional (*International School*) adalah sekolah swasta dengan dasar kurikulum mengacu pada negara lain, seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan Perancis. Sekolah semacam ini tetap harus mendapatkan persetujuan dan akreditasi/sertifikasi resmi dari Kementerian Pendidikan sebagai syarat untuk mendaftar di perguruan tinggi Mesir. Sekolah jenis ini menawarkan fasilitas sarana prasarana sekolah dan kegiatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah Mesir pada umumnya.

Beberapa sekolah swasta membuat program tambahan di samping kurikulum nasional, seperti *American High School Diploma*, *The British IGCSE System*, *The French Baccalauréat*, *The German Abitur* dan *The International Baccalaureate*.

2.1 Penjelasan Sistem Pendidikan di Mesir

2.1.1 Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar terdiri dari taman kanak-kanak, tingkat dasar, dan tingkat menengah pertama.

Pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Pada tahun 1999 –2000, terserap 16% anak usia *pre-primary* yang masuk taman kanak-kanak, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 24%. Seluruh keberadaan sekolah taman kanak-kanak (baik negeri maupun swasta) berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.

Salah satu fungsi Kementerian Pendidikan dan Pengajaran adalah memilih dan mendistribusikan buku-buku pelajaran. Berdasarkan petunjuk Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, jumlah maksimal peserta didik tidak boleh lebih dari 45 siswa per kelas. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran juga mendapatkan sokongan dana dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia untuk menopang pendidikan tingkat taman kanak-kanak dalam bentuk penambahan kesempatan masuk sekolah, perbaikan kualitas pendidikan, dan peningkatan kemampuan pengajar.

Pada tingkat dasar, peserta didik dari taman kanak-kanak bisa melanjutkan ke sekolah swasta, agama atau negeri. Sampai pada tahun 2007, daya serap masuk ke pendidikan dasar mencapai 7,8% pada sekolah swasta.

Pada tingkat menengah pertama, peserta didik akan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tingkat dasar jika lulus dalam ujian. Tuntasnya pendidikan pada tahap ini diharapkan bisa menghilangkan buta huruf dan kesempatan lapangan pekerjaan.

Pada sekolah menengah umum (*Tsanawiyah 'Ammah*), tahun pertama (kelas 9) adalah kelas bersama. Pada kelas 10, siswa harus memilih satu dari 2 bidang, yaitu: Sains dan non-Sains (IPA & non-IPA). Bidang yang dipilih berlaku hingga kelas 11.

2.1.2 Pendidikan Menengah Umum dan Vokasional/Teknik

Sekolah menengah atas terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Sekolah Menengah Atas Umum (SMA Umum),
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sistem Ganda yang direpresentasikan oleh Sekolah Kohl-Mubarak.

Masa belajar di SMA Umum adalah 3 tahun, SMK adalah 3 – 5 tahun, dan SMK Sistem Ganda adalah selama 3 tahun.

SMK tersedia atas 3 jurusan yang berbeda, yaitu:

1. Industri,
2. Perdagangan, dan
3. Pertanian.

Upaya untuk memperluas pendidikan kejuruan (vokasi) dan pendidikan teknik dimulai tahun 1950-an. Pada tahun 1988, Mesir memiliki 563 buah sekolah vokasi dan teknik.

Saat akan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah umum dan vokasional/teknik, para siswa maka harus terlebih dahulu lulus ujian komprehensif standar provinsi. Berdasarkan hasil penelitian, lulusan tingkat menengah pertama yang melanjutkan ke tingkat ini mencapai 77,3% pada tahun 2004.

Penilaian terhadap siswa dimulai sejak kelas 1 dan penilaian tersebut bersifat dasar sekaligus terakhir. Sementara untuk kelas 2 dan 3 nilai diambil dari rata-rata hasil ujian yang dilaksanakan dengan standar nasional. Nilai inilah yang dijadikan dasar kelulusan seorang siswa dan salah satu syarat untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

Pada saat ini Pemerintah Mesir telah bekerja sama dengan berbagai organisasi multilateral untuk mengembangkan sistem pendidikan agar mampu memberikan lulusan yang lebih berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para siswa di berbagai bidang keahlian.

Pemerintah juga telah menyatakan komitmennya untuk terus melakukan langkah-langkah konkret pengembangan kualitas pendidikan pada tingkat ini. Pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Pelatih Bidang Industri berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Lembaga inilah yang merancang, membina, dan memberikan arahan terkait strategi pelatihan dan pengembangan keahlian siswa.

2.1.3 Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini

dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu, seperti anak-anak, petani, pedagang, pengrajin, dan sebagainya. Pemerintah Mesir mengadakan model pendidikan non-formal ini ditujukan dalam upaya menurunkan tingkat buta huruf di dalam masyarakat. Pendidikan nonformal ini biasanya ditujukan pada masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan.

2.1.4 Pendidikan Al-Azhar

Pendidikan di bawah naungan Al-Azhar pada umumnya merupakan Pendidikan keagamaan. Sistem pendidikan yang dikembangkan setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tingkat dasar dilaksanakan selama 6 tahun, tingkat menengah pertama selama 3 tahun, dan tingkat menengah atas selama 3 tahun. Pada awalnya, lama sekolah di tingkat menengah atas adalah selama 4 tahun, namun pada tahun 1998 Kementerian Pendidikan dan Pengajaran menurunkan lama belajar dari 4 tahun menjadi 3 tahun agar sama dan sesuai dengan sistem pendidikan tingkat menengah umum. Dalam model pendidikan yang dikembangkan Al-Azhar, siswa putra dan putri dipisahkan di seluruh jenjang pendidikannya.

Otoritas pendidikan di sistem Al-Azhar berada di tangan Dewan Tertinggi Al-Azhar. Lembaga Al-Azhar sebenarnya merupakan lembaga independen, namun secara administratif tetap berada di bawah koordinasi Perdana Menteri Mesir. Sekolah-sekolah Al-Azhar disebut Ma'had dan memiliki jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Kurikulumnya merupakan gabungan dari kurikulum keagamaan dan umum. Namun, materi pelajarannya umumnya tidak sebanyak di SMA Umum dan lebih banyak menekankan pada kurikulum keagamaan. Seluruh siswa beragama Islam. Sekolah-sekolah di bawah naungan Al-Azhar tersebar di seluruh wilayah Mesir, terutama di daerah-daerah pedesaan. Pada tahun 2007, jumlah sekolah Al-Azhar mencapai 8272 sekolah dengan jumlah siswa 1.906.290 siswa. Para siswa yang lulus SMA Al-Azhar dapat langsung melanjutkan ke pendidikan tinggi, di antaranya Universitas Al-Azhar (*Al-Azhar University*).

2.1.5 Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi cukup populer di masyarakat Mesir. Sekitar 30% warga negara Mesir yang berada di usia produktif terdaftar di perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Mesir berada di bawah otoritas Kementerian Pendidikan Tinggi. Sampai saat ini, Mesir memiliki 17 universitas negeri, 51 institut negeri, 16 perguruan tinggi swasta, dan 89 sekolah tinggi. Di antara 51 institut itu terdapat 48 institut kejuruan/teknik dengan masa studi 2 tahun, dan 4 institut dengan masa studi 4 – 5 tahun.

Pada tahun 1990, terbit peraturan baru yang memberikan otonomi pada perguruan tinggi. Hanya saja, konstruksi pendidikan maupun sumber daya manusia masih belum memenuhi standar yang ditargetkan. Meskipun demikian, minat masyarakat Mesir untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tetap tinggi. Pada tahun 1999 terjadi peningkatan jumlah mahasiswa sebanyak 659 ribu dari tahun sebelumnya dan bertambah pada tahun 2007 menjadi 2,5 juta mahasiswa. Berdasarkan kelompok pendaftar berusia antara 18 – 23 tahun terjadi penambahan sekitar 20-28%.

Dilihat dari segi pembiayaan untuk pendidikan tinggi, maka belanja pendidikan tidak banyak mengalami peningkatan. Dari 77% jumlah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi, 98% di antaranya masuk ke perguruan tinggi negeri yang gratis. Sementara dari 98% tersebut, 48% di antaranya berasal dari keluarga menengah ke atas. Penyebabnya adalah karena standar yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi adalah nilai ujian di tingkat menengah umum/atas. Tentu saja, mereka yang berasal dari keluarga mampu, melalui bimbingan belajar yang mahal, dapat lulus dengan hasil yang tinggi, sehingga nilai ujiannya dapat mengantarkannya ke perguruan tinggi favorit di Mesir. Sementara itu, mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah umumnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena nilai tidak mencukupi dan/atau tidak mampu untuk memiliki kesanggupan membayar biaya perguruan tinggi swasta.

Pembinaan pendidikan tinggi berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah dibantu oleh

Dewan Tertinggi Universitas yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah. Dewan ini beranggotakan perwakilan dari sektor-sektor pendidikan, perguruan tinggi, lembaga Al-Azhar, kebudayaan, perencanaan, keuangan, industri dan jasa, ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Struktur dan wewenang dewan ini dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Presiden atas usulan Menteri Pendidikan.

Sistem yang berlaku di perguruan tinggi Mesir adalah sentralistik, sehingga perguruan tinggi tidak bisa menentukan sendiri hal-hal yang terkait dengan pembaruan kurikulum, pengembangan program studi, serta peningkatan mutu dosen dan pegawai. Dalam upaya melakukan pembaharuan dan pengembangan di perguruan tinggi, Pemerintah Mesir membentuk Lembaga Nasional Penjamin Mutu Pendidikan dengan tugas mendorong peningkatan mutu/kualitas perguruan tinggi. Selain itu, juga dibentuk lembaga lain yang berkonsentrasi pada pengembangan riset dan menggali penemuan-penemuan baru di berbagai bidang.

Seluruh perguruan tinggi negeri di Mesir tidak berbiaya, atau gratis. Mahasiswa tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya administrasi pendaftaran pertama kali. Sementara itu, perguruan tinggi swasta menetapkan biaya yang sangat tinggi, sehingga hanya dapat dimasuki oleh orang-orang berpenghasilan tinggi.

2.2 Manajemen Pendidikan di Mesir

2.2.1 Otoritas

Sistem pendidikan di Mesir merupakan tanggungjawab Kementerian Pendidikan. Pendidikan pra-universitas berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kementerian tersebut bertanggungjawab mulai dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan menengah dalam aspek perencanaan, kebijakan, kontrol kualitas/penjaminan mutu, koordinasi dan pengembangannya. Sementara pejabat-pejabat pendidikan di tingkat pemerintah daerah (provinsi) bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan yang

telah ditentukan oleh pusat.

Dalam rangka membantu tugas-tugas Kementerian Pendidikan dan Pengajaran maka dibentuk dewan tertinggi, yaitu Dewan Tertinggi Pendidikan Pra-Perguruan Tinggi yang diketuai oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Dewan tersebut berwenang untuk menentukan perencanaan pendidikan dan penyusunan program-programnya.

2.2.2 Pendanaan

Peningkatan jumlah guru dan sekolah, perbaikan peralatan dan kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah menyebabkan kenaikan belanja pendidikan. Pada tahun 1994, pengeluaran masyarakat untuk pendidikan mencapai 1.186,5 juta EGP atau setara dengan USD 1,163 juta. Ini berarti 8,9% dari keseluruhan pengeluaran Pemerintah atau sama dengan 4,1% dari *Gross National Product* (GNP). Pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan formal adalah 18% dari total pengeluaran untuk masyarakat. Gaji menyerap 80% lebih dari anggaran. Investasi untuk gedung meningkat pada awal tahun 1980-an dari 7 menjadi 13%. Hal tersebut masih belum mencukupi keperluan untuk gedung-gedung sekolah yang dibutuhkan. Apabila seluruh permintaan dipenuhi, maka pemerintah harus menyediakan biaya lebih dari 3 miliar EGP atau setara dengan USD 2,9 miliar dalam masa 10 tahun mendatang.

Mesir menerima bantuan pendidikan dari Bank Dunia, UNICEF, UNESCO dan negara-negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan negara-negara Arab. Walaupun jumlah bantuan itu cukup besar, namun masih banyak lagi yang harus didanai untuk mencapai tujuan pendidikan, dan untuk hal itu pemerintah memandang sangat perlu untuk melakukan efisiensi manajemen dan belanja pendidikan.

2.2.3 Personalia

Kementerian Pendidikan dan Pengajaran memiliki hampir 2000 staf profesional dan staf pendukung yang dipilih dengan cermat. Para perencana, misalnya, dipilih dari lulusan universitas dengan tambahan pendidikan selama 1 tahun di Institut Perencanaan. Pada umumnya yang

dipilih adalah mereka yang telah menunjukkan keterampilan mengajar yang sangat baik. Para pegawai kementerian dalam menjalankan tugas masing-masing senantiasa melakukan kordinasi antara pusat dan daerah secara terus menerus.

2.3 Kurikulum dan Metode Pengajaran

Dalam sistem pendidikan Mesir, kurikulum merupakan olahan hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum ini terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Kurikulum yang sudah dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pra-Universitas yang berwenang mengesahkannya secara resmi untuk diimplementasikan. Berdasarkan peraturan, kurikulum dapat diubah dan disesuaikan untuk mengakomodasi kondisi setempat atau hal-hal khusus.

Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi tentang materi pengajaran yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang telah disepakati dan melakukan pengawasan dalam implementasinya di lapangan. Hasil penelitian itu disampaikan pada dewan kesekretariatan. Apabila dipandang perlu untuk melakukan perubahan, maka disusun kepanitiaan yang bertugas untuk mempelajari dan merumuskan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Ada berbagai cara yang digunakan untuk menjamin relevansi dan deseminasi program baru. Sejumlah besar supervisor, konsultan dari semua tingkat bertemu secara regular dengan guru-guru guna memberikan bimbingan dan mengumpulkan informasi. Terdapat berbagai pusat latihan, sekolah percobaan, dan sekolah percontohan yang bertujuan untuk pembaruan kurikulum serta perbaikan metode mengajar. Seluruh bahan yang telah disediakan dijadikan bahan untuk menyiapkan materi pelajaran. Umumnya, penyiapan tersebut dilakukan oleh berbagai badan atau lembaga termasuk panitia kurikulum dari semua jurusan, para akademisi, dan asosiasi guru-guru mata pelajaran. Sekolah dan guru mempunyai kebebasan yang agak luas dalam memilih materi pelajaran.

2.4 Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi

Ujian naik kelas ditetapkan pada kelas 2, 4 dan 5. Ujian Nasional (UN) pertama dilaksanakan pada akhir kelas 8. Murid yang lulus mendapatkan sertifikat pendidikan dasar dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah nilai (skor) menentukan jenis sekolah yang akan dimasuki. Hal itu menjadi sangat penting karena umumnya hanya siswa yang mendapatkan nilai tinggi saja yang dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah menengah yang diinginkan hingga tingkat universitas. Oleh sebab itu, nilai kumulatif sangat menentukan jenis sekolah yang akan dimasuki.

Masa depan anak muda Mesir sangat bergantung pada nilai yang diperoleh pada hasil ujian nasional/UN. Kondisi ini telah menimbulkan tingkat persaingan di antar siswa menjadi sangat ketat dan tinggi. Sama halnya dengan siswa yang akan menyelesaikan pendidikan menengah, jumlah nilai yang mereka peroleh akan menentukan fakultas atau universitas mana yang dapat mereka masuki.

2.5 Evaluasi Pendidikan

Evaluasi pendidikan dilaksanakan oleh tiga pihak. Pertama, evaluasi yang dilaksanakan oleh sekolah. Evaluasi ini bersifat formatif dan sumatif. Hasil evaluasi yang diselenggarakan oleh sekolah digunakan untuk menentukan kenaikan kelas pada SD, SMP, dan SMA pada akhir tahun kelas 1 untuk kenaikan ke kelas 2.

Kedua, evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi). Evaluasi ini bersifat sumatif dan digunakan untuk menentukan kelulusan pada SD dan SMP. Selain digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara keseluruhan, hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan penerimaan siswa baru pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP dan SMA.

Ketiga, evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang lazim disebut Imtihan 'Am (Ujian Nasional/UN). Ujian Nasional di Mesir dilaksanakan pada siswa SMA.

3

Ujian Nasional (UN) Di Mesir

Sebagaimana yang telah disebutkan pada beberapa penjelasan sebelumnya, selain ujian dengan standar provinsi, ada pula ujian yang dilaksanakan dengan standar nasional dan berlaku di seluruh sekolah Mesir. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Republik Arab Mesir melaksanakan kegiatan UN di SMA. Berikut adalah uraian tentang Ujian Nasional yang dimaksud.

3.1 Kebijakan Ujian Nasional

Ujian Nasional di Mesir disebut *Imtihan 'Am* yang secara harfiah bisa diartikan Ujian Umum (*General Examination*). Ujian tersebut dilaksanakan secara nasional pada tingkat SMA di kelas 2 dan 3. Pada kelas 2, hasil ujian digunakan untuk menentukan kenaikan kelas ke kelas 3. Sedangkan pada kelas 3, hasil ujian digunakan untuk menentukan kelulusan dan penerimaan mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Adapun bagi siswa SMK, maka Ujian Nasional diberikan pada kelas 3 saja, dengan materi ujian mengacu pada kurikulum sekolah kejuruan. Ujian Nasional diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara nasional.

3.2 Tujuan Ujian Nasional

Beberapa tujuan pokok pelaksanaan UN di Mesir, adalah untuk mengukur dan menentukan:

1. secara keseluruhan rata-rata kemampuan siswa SMA di kelas 2 dan 3,
2. kenaikan kelas di kelas 2 SMA,
3. kelulusan di kelas 3 SMA dan SMK, dan
4. penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.

Terdapat beberapa keuntungan dan kelemahan pada sistem ujian di Mesir dibandingkan dengan sistem yang terdapat di Indonesia.

Ditinjau dari pelaksanaannya yang dimulai sejak dari kelas 2 SMA, siswa memiliki kesempatan persiapan yang lebih banyak. Menjelang pelaksanaan ujian pada kelas 3 SMA/SMK yang sangat menentukan kelulusan dan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi ini, para peserta merasa lebih siap karena telah mengikuti UN pada kelas 2.

Ditinjau dari segi pendanaan, UN di Mesir lebih efisien. Dengan menggunakan sistem ini, maka perguruan tinggi sudah tidak perlu melaksanakan tes seleksi mahasiswa baru. Siswa cukup melaksanakan ujian 1 kali untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan sekaligus sebagai sarana untuk memasuki perguruan tinggi.

Salah satu kelemahan sistem ini adalah dari segi realibilitas dan objektivitas hasil ujian. Keinginan sekolah yang sangat tinggi untuk meloloskan siswanya ke jenjang pendidikan tinggi akan memungkinkan terjadinya kecurangan dari pihak sekolah.

3.3 Penyelenggaraan dan Anggaran.

Ujian Nasional dalam sistem Pendidikan Mesir diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Naskah soal dibuat oleh tim pembuat naskah dari ahli bidang studi (profesor dari perguruan tinggi yang ditunjuk).
2. Penyelenggaraan ujian dilaksanakan dengan menggunakan silang sekolah dan silang pengawas. Siswa dari satu sekolah melaksanakan ujian pada ruangan di sekolah lain. Guru dari satu sekolah ditugasi untuk menjadi pengawas ujian di sekolah lain yang jauh dari sekolah asal. Silang pengawas terkadang dilakukan hingga antar provinsi.
3. Koreksi lembar jawaban dilakukan secara manual oleh guru yang

ditunjuk dari masing-masing daerah. Dalam upaya mengoptimalkan pengamanan, koreksi dilakukan dengan:

- Menggunakan nomor kode rahasia
 - Setiap korektor mengoreksi hanya satu nomor soal
 - Mengoptimalkan objektivitas, panitia menetapkan korektor kedua
4. Tempat penyelenggaraan UN terdapat pada masing-masing provinsi.
 5. Biaya penyelenggaraan UN sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

3.4 Waktu Pelaksanaan Ujian.

Ujian Nasional di Mesir dilaksanakan mulai dari awal sampai dengan akhir bulan Juni. Dengan memperhatikan musim panas yang suhunya cukup tinggi, maka liburan pada sekolah-sekolah di Mesir berlangsung cukup lama, yaitu dimulai dari awal bulan Juni sampai dengan tanggal 20 September bagi kelas-kelas non-UN. Bagi kelas-kelas UN, kelas 2 dan kelas 3 SMA, liburan dimulai dari awal Juli sampai dengan tanggal 20 September.

3.5 Opini Publik tentang Pelaksanaan Ujian.

Kritik masyarakat tentang pelaksanaan Ujian Nasional terfokus pada tingkat kesulitan naskah soal, validitas naskah dan pengaruh naskah soal terhadap pembelajaran (*washback effect*).

Kritik yang dimaksud pada umumnya disampaikan melalui telepon, e-mail, media massa, seperti koran dan TV. Bila terdapat masukan atau kritikan yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan, maka Menteri Pendidikan membentuk tim khusus untuk mengadakan tindakan nyata dengan meneliti tingkat validitas kebenarannya. Jika ditemukan fakta yang membenarkan kritik tersebut, maka Menteri akan membuat keputusan untuk merespon kritik yang dimaksud, misalnya dengan menganulir soal yang dinyatakan tidak benar dan menambah nilai peserta secara nasional sebagai kompensasi butir soal yang dianulir.

Acapkali masukan dan kritikan masyarakat menyinggung masalah pemerataan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di pedesaan umumnya jauh lebih rendah dari kualitas pendidikan di perkotaan. Hal ini menyebabkan tingkat kegagalan siswa di pedesaan dalam UN lebih tinggi daripada siswa yang tinggal di perkotaan.

3.6 Mata Pelajaran Ujian Nasional

Pada tingkat SMA, terdapat dua kelompok mata pelajaran yang diujikan secara nasional sesuai dengan jurusan yang ada, yaitu: kelompok Sains dan kelompok Sosial/Literasi. Mata pelajaran yang diujikan secara nasional untuk dua jurusan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Mata Pelajaran yang Diuji Saat UN di Mesir

No.	Kelompok Sains	Kelompok Sosial	Keterangan
1	Bahasa Arab	Bahasa Arab	
2	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	
3	Fisika	Fisika	
4	Biologi	Geografi	
5	Kimia	Psikologi	
6	Matematika	Filsafat	
7	Pendidikan Agama	Ekonomi	
8	Komputer	Komputer	
	Kesenian	Kesenian	
	Musik	Musik	

3.7 UN di Sekolah Kejuruan

Pada jenjang SMK, UN hanya diberikan pada tahun ketiga (kelas 3) dan materi ujian menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yaitu mengutamakan pemberian bobot yang besar pada ujian praktek. Siswa dari sekolah kejuruan bisa memasuki perguruan tinggi dengan syarat harus lulus ujian short course yang dilaksanakan selama libur panjang. Materi short course adalah beberapa mata pelajaran yang perlu ditambahkan kepada siswa kejuruan, seperti matematika dan sains.

3.8 Kriteria Kenaikan, Kelulusan, dan Penerimaan Pada Kelas dan Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi

Agar dapat naik kelas (bagi kelas 2 SMA ke kelas 3) atau lulus (untuk kelas 3 SMA), siswa harus memiliki nilai minimal 50%, dengan catatan boleh ada yang dibawah 50% dengan syarat tidak kurang dari 45% dan tidak lebih dari 1 mata pelajaran. Ujian perbaikan diperbolehkan bagi siswa yang nilai kurangnya maksimal 3 mata pelajaran. Siswa tersebut selanjutnya diberi kesempatan untuk mengikuti pengajaran remedial pada waktu libur musim panas dan selanjutnya diberi kesempatan untuk mengikuti ujian pada bulan Agustus. Bila hasil ujian tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan kelas, maka siswa yang bersangkutan dinyatakan naik kelas. Mereka yang memperoleh nilai kurang dari 3 mata pelajaran dinyatakan tidak naik kelas.

Untuk memasuki SMA, hanya siswa yang memperoleh nilai ujian pada SMP minimal 75% saja yang berhak. Bagi siswa yang memiliki nilai 50% sampai dengan 74% dianjurkan untuk memasuki SMK.

Saat seorang siswa hendak memasuki perguruan tinggi, mereka wajib memperoleh nilai minimal 65%. Beberapa fakultas, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Fakultas Teknik mensyaratkan calon mahasiswa harus berasal dari sekolah jurusan Sains.

3.9 Kesimpulan Ujian Nasional

Pelaksanaan UN dilakukan secara sentralistik dan pelaksanaannya adalah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir. UN tersebut dilaksanakan untuk kelas 2 dan 3 SMA dan kelas 3 SMK. Pada kelas 2 SMA, UN digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan kelas. Pada kelas 3 SMA dan SMK, UN digunakan sebagai bahan pertimbangan kelulusan dan seleksi penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi.

UN tersebut dilaksanakan dan didanai oleh pemerintah pusat. Secara umum, masyarakat Mesir memandang positif pelaksanaan ujian nasional. Kritik yang sering muncul umumnya terfokus pada butir soal yang dipandang terlalu sulit atau kurang terkait dengan kurikulum

yang berlaku. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir memiliki komitmen untuk menanggapi kritik dari masyarakat dan menindaklanjuti dengan mengadakan cross check serta tindakan seperlunya bila terdapat temuan yang memerlukan dilaksanakan tindakan.

4

Lembaga dan Sistem Penjaminan Mutu

Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang Lembaga Jaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Mesir.

1. Pemerintah Mesir memiliki sistem jaminan mutu pendidikan dan akreditasi yang dipegang oleh Lembaga Jaminan Mutu dan Akreditasi (al-Hai'ah al-Qaumiyyah li Jaudat al-Ta'lim wa al-I'timad/National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education-Egypt (NAQAAE)). Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 82 tahun 2006. Petunjuk operasional UU tersebut dikeluarkan melalui Kepres Mesir No. 25 tahun 2007. Berdasarkan UU, lembaga ini merupakan sebuah lembaga independen dan berada langsung di bawah Perdana Menteri. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga ini beranggotakan 15 orang yang merupakan para pakar pendidikan. Mereka ditunjuk langsung berdasarkan Surat Keputusan (SK) presiden. Di antara 15 anggota tersebut, satu orang diangkat sebagai ketua dan 3 orang lainnya ditunjuk sebagai wakil yang membidangi Urusan Pendidikan Tinggi, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Lembaga Pendidikan al-Azhar. Masa jabatan para anggota NAQAAE adalah 4 tahun dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya.
2. Tujuan Utama didirikannya NAQAAE Mesir adalah:
 - Menyebarkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya jaminan dan peningkatan mutu pendidikan.
 - Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan guna

- membentuk sebuah formulasi tolak ukur pendidikan serta cara penilaian sesuai dengan standar internasional dengan tetap mempertahankan identitas lokal.
- Membantu lembaga-lembaga pendidikan di Mesir agar mampu melakukan penilaian dan evaluasi internal.
 - Memastikan adanya kepercayaan lokal dan internasional terhadap outcome proses pembelajaran di lembaga pendidikan Mesir tanpa merusak tata nilai lokal.
 - Melakukan penilaian dan evaluasi komprehensif terhadap seluruh lembaga pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk lembaga-lembaga pendidikan.
3. Dalam mencapai tujuan tersebut, NAQAAE berwenang melakukan hal-hal berikut:
- Menyusun konsep dan strategi pelaksanaan jaminan mutu serta menyiapkan laporan hasil penilaian serta akreditasi dan teknis pelaksanaannya. Setelah itu, wajib memberitahukan kepada masyarakat luas tentang lembaga pendidikan yang mampu memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan visi yang disampaikan.
 - Menyusun teknis penyebaran kesadaran pentingnya wawasan yang berorientasi pada kualitas/mutu.
 - Menyusun standar dan teknis penilaian mutu pendidikan di lembaga tertentu.
 - Menyusun konsep petunjuk teknis yang dibutuhkan lembaga pendidikan dalam upaya mencapai mutu pendidikan dan akreditasi.
 - Menyusun konsep teknis pengawasan rutin terhadap lembaga-lembaga pendidikan.
 - Mengeluarkan, memperbaharui atau memberhentikan sertifikat/akreditasi jika lembaga pendidikan tersebut tidak memenuhi standar mutu.
 - Melakukan pertukaran dengan lembaga jaminan mutu dan akreditasi negara-negara tertentu sehingga dapat saling bertukar pengalaman dan informasi.

4. Dalam melaksanakan tugas NAQAAE memiliki beberapa divisi:
- Divisi Litbang
 - Divisi Standardisasi Mutu Pendidikan
 - Divisi Akreditasi
 - Divisi Informasi
 - Divisi Keuangan dan Manajemen
 - Divisi Keluhan Layanan Masyarakat
 - Divisi Pelatihan

5

Sistem Pembinaan Guru

5.1 Beberapa Jenjang Guru

Terdapat beberapa tingkatan guru dalam sistem pendidikan Mesir:

1. Asisten Guru
2. Guru Biasa
3. Guru Pertama
4. Guru Pertama (A)
5. Guru Ahli
6. Guru Senior

5.2 Syarat-syarat menjadi guru:

1. Berkebangsaan Mesir atau berkewarganegaraan asing dengan sistem perlakuan yang sama dengan warga negara Mesir.
2. Memiliki gelar kesarjanaan di bidang pendidikan atau memiliki ijazah keterampilan untuk mengajar.
3. Lulus dalam ujian yang diselenggarakan untuk rekrutment para guru.

5.3 Lembaga Profesi Guru

Dalam upaya pengembangan profesi guru terdapat lembaga Akademi Profesi Guru (*al-akadimiyyah al-Mihaniyyah li al-Mu'allimin*). Lembaga ini dipimpin oleh para ahli di bidang pendidikan dan diangkat oleh Presiden. Lembaga ini diberi kewenangan untuk memberikan penilaian

kepada para guru dan memberikan sertifikat kelayakan profesi bagi guru terkait. Kenaikan pangkat para guru ditentukan oleh lembaga ini, setelah diberikan penilaian kenaikan pangkat dan jabatan guru bersangkutan.

Kepala sekolah, minimal harus dijabat oleh guru yang telah mencapai pangkat minimal Guru Pertama (A). Ia dapat menjabat sebagai kepala sekolah selama 3 tahun.

Syarat kenaikan pangkat guru:

1. Memenuhi syarat profesi
2. Telah melaksanakan tugas selama 5 tahun pada jenjang jabatan sebelumnya
3. Mendapatkan sertifikat dari Lembaga Profesi Guru dan telah memenuhi syarat untuk naik pangkat
4. Mendapatkan surat keterangan bahwa ia benar-benar telah mampu melaksanakan tugas mengajar dengan sangat baik, minimal dua tahun sebelumnya.

Perkiraan jumlah guru pada tahun 2010 adalah 420.000 guru yang bertugas di sekolah-sekolah Mesir. Kira-kira 55% di antaranya mengajar di sekolah dasar, 22% di sekolah menengah pertama, dan 16% di sekolah menengah atas. Hanya 17% yang mengajar di sekolah Al-Azhar dan sekolah swasta.

Salah satu yang agak mengherankan, di Mesir terjadi kekurangan guru Agama Islam dan guru Bahasa Arab dalam jumlah yang cukup besar. Juga terdapat kekurangan guru bidang Seni, Pertanian, IKK, Musik, dan berbagai cabang Ilmu Pendidikan Teknik. Hal ini mungkin disebabkan oleh profesi guru yang kurang menarik bagi sebagian masyarakat Mesir.

6

Kasus Khusus: Pendidikan Mesir Pasca- Revolusi 25 Januari 2011

6.1 MasaTransisi Tahun 2011

Revolusi 25 Januari 2011 telah membawa angin baru di Mesir. Tidak hanya dalam wilayah politik, tetapi juga di bidang pendidikan. Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter selama kurang lebih 30 tahun, kini banyak pihak menjadi sadar bahwa dalam rentang waktu tersebut tidak banyak kemajuan pendidikan yang diraih Mesir. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa selama tiga dekade terakhir, pendidikan berada dalam kondisi mengesankan dan mengakibatkan hilangnya profesionalisme, kaburnya moral, buruknya manajemen pendidikan, korupsi dana pendidikan, buruknya fasilitas pendidikan, terhambatnya inovasi dan lahirnya pengangguran-pengangguran berijazah.

Perkembangan terkini, setelah para pemuda dan bangsa Mesir berhasil menegakkan revolusi, harapan untuk memperbaiki pendidikan kembali bersemi. Namun tentu saja, sebuah bangsa yang baru bangkit dari tragedi kejatuhan selama 30 tahun, banyak mengalami kendala untuk memulai pembaruan pendidikan itu. Masa-masa transisi pasca-revolusi adalah masa-masa ketidakpastian bagi dunia pendidikan di Mesir. Setidaknya berikut ini adalah persoalan-persoalan yang mengemuka satu bulan terakhir pasca- revolusi dan masa-masa awal transisi:

1. Ketidakstabilan Kabinet

Sejak Presiden Hosni Mubarak lengser dari jabatannya pada 11 Februari 2011 dan kendali pemerintahan dipegang oleh Dewan

Tinggi Militer, Kabinet Transisi telah mengalami perombakan sebanyak tiga kali. Kabinet Perdana Menteri Ahmed Shafiq yang dibentuk oleh Presiden Mubarak, ditugaskan Militer untuk melanjutkan Pemerintahan. Dalam kabinet ini, Menteri Pendidikan Tinggi dijabat oleh Menteri lama, Dr. Hani Hilal, sekaligus merangkap pejabat Menteri Pendidikan dan pengajaran yang kosong sejak pengunduran diri kabinet Dr. Ahmed Nazhef.

Berselang dua minggu kemudian, kembali terjadi perombakan kabinet Ahmed Shafiq. Dalam perubahan susunan menteri, Kementerian Negara Riset Ilmiah dipisahkan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan pengelolaannya dijabat oleh Dr. Amr Salamah, yang lima tahun sebelumnya juga menduduki posisi yang sama. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dipegang oleh satu menteri, Dr. Ahmed Gamaleddin, yang beberapa tahun sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Banyak pakar pendidikan yang menyayangkan penggabungan ini, dikarenakan beban masing-masing kementerian tersebut sangat besar dan tidak mungkin hanya dipimpin oleh satu orang menteri. Meskipun tidak dilebur, tetapi menggabungkan kedua lembaga pendidikan tersebut ke dalam satu kementerian dipandang akan menambah persoalan-persoalan baru di kemudian hari.

Kabinet Ahmed Shafiq jilid 2 ini rupanya hanya bertahan 10 hari, karena pada 3 Maret, Ahmed Shafiq mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri atas desakan massa. Militer kemudian menunjuk Dr. Isham Sharaf sebagai perdana menteri untuk membentuk kabinet baru. Di kabinet Sharaf ini, Kementerian Pendidikan Tinggi kembali digabung dengan Kementerian Negara Riset Ilmiah dan Teknologi dan dijabat menteri yang sama. Demikian pula Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dilanjutkan dengan menteri yang sama pula. Dalam situasi perubahan kabinet yang begitu cepat tersebut, tidak muncul suatu keputusan apapun terkait dunia pendidikan, bahkan jadwal masuk sekolah dan perguruan tinggi juga mengalami beberapa kali pengunduran dengan alasan

keamanan hingga akhirnya diputuskan untuk masuk mulai Sabtu, 5 Maret 2011.

2. Revisi Kurikulum Sejarah

Selaras dengan perubahan yang terjadi, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kementerian Pendidikan Tinggi mulai menjajaki revisi terhadap beberapa bagian dalam kurikulum pendidikan, terutama yang terkait sejarah Mesir mutakhir. Untuk kurikulum sejarah di sekolah, banyak pakar melihat bahwa sejarah yang termaktub dalam buku pelajaran siswa mengandung banyak kelemahan, dan bahkan manipulasi fakta demi membesarkan nama penguasa. Karenanya, mereka mengusulkan untuk menyusun ulang sejarah mutakhir Mesir dengan memasukkan revolusi 25 Januari sebagai salah satu materi dan membuang materi-materi yang tidak sesuai fakta tentang keberhasilan mantan Presiden Hosni Mubarak. Selain itu, metode pengajaran yang ditetapkan oleh rezim lama dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan era baru dan perlu diganti dengan metode-metode baru yang lebih maju dan dikembangkan oleh negara-negara besar di dunia.

Demikian pula di tingkat perguruan tinggi. Para pakar memandang bahwa para pemuda yang mengobarkan api revolusi sejatinya adalah para mahasiswa perguruan tinggi. Karenanya, menurut mereka, sudah sewajarnya jika keberhasilan para pemuda ini dimasukkan dalam materi-materi yang diajarkan di perguruan tinggi. Selain untuk mengenang jasa para pemuda, juga untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi politik di kalangan mahasiswa perguruan tinggi.

3. Tuntutan Perbaikan Kesejahteraan dan Pengangkatan Guru Tetap

Femonena lain yang juga menghiiasi dunia pendidikan di Mesir adalah tuntutan para pekerja pendidikan, baik guru, dosen, maupun pegawai di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Mereka merasa telah mengabdikan diri sebaik mungkin namun tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari Pemerintah. Dengan terjadinya perubahan, mereka memiliki kesempatan untuk menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Dengan kata lain, para guru, dosen dan pegawai meminta Pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan

mereka setelah bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan.

Di antara kelompok yang menuntut perbaikan adalah para guru kontrak dan honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Menurut mereka, semua syarat yang dibutuhkan untuk diangkat guru tetap telah mereka penuhi, termasuk lolos seleksi kader guru. Namun mereka tak juga mendapat surat pengangkatan. Menanggapi tuntutan ini, Menteri Pendidikan, Dr. Ahmed Gamaleddin, memutuskan untuk mengangkat para guru kontrak dan honorer tersebut terutama yang telah menjalani masa tugas lebih dari 3 tahun, telah lulus semua ujian dalam seleksi kader guru, memiliki ijazah kelayakan mengajar, dan telah memenuhi semua persyaratan untuk diangkat menjadi guru. Bahkan, mereka yang baru memenuhi sebagian syarat tersebut juga diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi guru tetap, dengan syarat harus memenuhi semua persyaratan dan lulus seleksi kader dalam waktu satu periode kalender pendidikan mendatang. Menurut Gamaleddin, seluruh guru kontrak dan honorer yang akan diangkat tahun itu berjumlah 150 ribu orang, dan diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar 1,35 miliar Pound Mesir.

6.2 Pasca-Transisi: Tahun 2012.

Seberapa besarkah perkembangan pendidikan di Mesir pasca-Revolusi? Di tahun 2012 (tahun kedua Revolusi) beberapa hal penting telah dilakukan Pemerintah Mesir untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional secara umum. Namun, tentu belum dapat dikatakan telah berhasil sesuai target yang diharapkan. Revolusi masih terus berlangsung melalui perubahan gradual yang terjadi di level kebijakan pendidikan mulai dari jejang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Dalam suasana revolusi yang belum usai dan kondisi dalam negeri yang belum stabil, politik luar negeri Mesir mengalami banyak tantangan. Sebagaimana umumnya negara yang mengalami revolusi, suasana revolusi belum sepenuhnya beralih ke negara yang stabil secara ekonomi, politik dan sebagainya. Persoalan-persoalan reformasi politik

masih lebih banyak menyita perhatian Pemerintah daripada persoalan pendidikan.

Selama tahun 2012, telah terjadi beberapa peristiwa politik penting yang menandai munculnya Mesir baru di bawah pemerintah yang baru. Sebagai pemimpin baru pasca-transisi, Presiden Morsi membentuk kabinet baru yang akan menjalankan roda pemerintahan selama empat tahun ke depan. Seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru, maka terjadi pergantian beberapa menteri di bidang pendidikan. Perubahan menteri secara tidak langsung berpengaruh terhadap orientasi kebijakan dan penanganan persoalan-persoalan pendidikan.

Beberapa persoalan pendidikan yang menjadi perhatian Pemerintah selama tahun 2012 adalah revisi terhadap beberapa ketentuan hukum yang terkait pendidikan, mulai dari UU Pendidikan Nasional, UU Ujian Nasional, UU Perguruan Tinggi, dan sebagainya. Fasilitas fisik pendidikan, seperti bangunan sekolah, kampus, fasilitas laboratorium, dan perlengkapan teknologi informasi secara umum juga mendapat prioritas. Demikian pula prioritas untuk memperbaiki profesionalisme serta kesejahteraan para guru dan dosen. Hal lain yang juga ditingkatkan adalah kerja sama-kerja sama pendidikan, penelitian ilmiah, dan budaya dengan berbagai negara di dunia.

Untuk melihat sejauh mana perkembangan kebijakan pendidikan di Mesir, beberapa hal berikut dapat memberikan gambaran.

- Selama tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mengalami pergantian menteri sebanyak 2 kali. Pertama dijabat oleh Prof. Dr. Gamal el-Araby, dan; kedua, dijabat oleh Prof. Dr. Ibrahim Ghunaim (hingga saat ini).
- Pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran memulai perbaikan pendidikan dengan merevisi Undang-undang tentang Kader Guru. Setelah Rancangan Undang-undang tersebut disetujui oleh DPR, Kepala Dewan Tertinggi Militer, Marsekal Hosein Thantawi (selaku Pelaksana Kepala Negara) mengesahkan revisi terhadap UU nomor 39 tahun 1981 tentang pendidikan.
- Beberapa hal penting dalam revisi di antaranya adalah penetapan gaji minimum dan maksimum guru. Dalam draf revisi disebutkan

bahwa gaji minimum guru adalah 1500 EGP, dan maksimum 35 kali lipatnya, sebagaimana berlaku di kementerian-kementerian lainnya.

- Selain gaji minimum, juga ditetapkan bahwa prosedur pengangkatan guru honorer tidak lagi berada di Menteri Pendidikan dan Pengajaran, namun dialihkan ke Gubernur di masing-masing propinsi. El-Araby juga mengumumkan pembukaan pendaftaran ujian kader guru bagi para guru yang telah menjalankan masa tugas lebih dari lima tahun untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji/tunjangan. Perubahan-perubahan lain yang dilakukan adalah memasukkan kembali kelompok-kelompok profesi yang sebelumnya tidak diperbolehkan mengikuti program kader, seperti pembina, pengawas kegiatan, pengelola laboratorium komputer dan pengawas makanan sekolah. Untuk pengangkatan guru juga akan diprioritaskan pada lulusan fakultas ilmu pendidikan dan tidak akan ada ujian pengangkatan lagi, tapi melalui seleksi lulusan terbaik serta program pelatihan profesi guru.
- Dalam UU Pendidikan Hasil Revisi tersebut juga ditetapkan perubahan tentang pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat SMA dari dua kali yaitu di kelas 2 SMA dan 3 SMA menjadi sekali Ujian Nasional, yaitu kelas 3 SMA saja. Hal itu dilakukan sebagai langkah pertama dalam rangka revisi terhadap sistem pendidikan di tingkat SMA secara umum.
- Program-program pokok yang diprioritaskan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Kabinet Dr. Hisham Qandil hingga saat ini adalah mengembalikan disiplin sekolah, baik di kalangan siswa maupun guru, revisi sistem pendidikan SMA, pembangunan sekolah-sekolah baru dan pengembangan sekolah kejuruan.
- Sebagai salah satu prioritas, pendidikan kejuruan dipandang sebagai salah satu bagian pendidikan yang sangat penting untuk pembangunan Mesir ke depan. Melalui sekolah-sekolah kejuruan, diharapkan muncul tenaga-tenaga terampil yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan dapat bersaing di lapangan kerja, baik level lokal, regional maupun internasional. Saat ini jumlah siswa di sekolah-sekolah kejuruan telah mencapai 1,2 juta siswa, potensi yang sangat besar untuk masa depan. Target besar yang hendak

dicapai adalah mengalihkan sekolah kejuruan menjadi Lembaga Nasional Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Profesi.

- Untuk tahap pertama realisasi program pengembangan sekolah kejuruan ini, Menteri Pendidikan dan Pengajaran mengeluarkan surat keputusan tentang:
 - Pembangunan sekolah kejuruan baru yang diberi nama Sekolah Kejuruan Transportasi Sungai dengan spesialisasi di bidang-bidang Navigasi, Mekanika, dan Listrik untuk Transportasi Sungai.
 - Selain itu juga dibangun sekolah kejuruan perindustrian yang diberi nama Sekolah Kejuruan Perindustrian as-Shorouk dengan spesialisasi Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi secara baik dengan kemajuan pesat bidang Teknologi Informasi.

DAFTAR REFERENSI

1. Ahmad Ismail Haji, Nidzam al-Ta'lim fi Masr, Dar el-Nahdlah el-Arabiyyah: Cairo:1991.
2. Mohammed Said Mursi dkk. Tarikhut Tarbiyah Watarikhu al-Ta'lim fi Mashr, Fakultas Pendidikan Universitas Ain Syams-Cairo, 1987.
3. Ministry of Higher Education Arab Republic of Egypt, Directory of Higher Education in Egypt, Cairo: 2009
4. Muhammad Abdel Mun'im Khafagi, Al-Azhar fi Alfi Am, Maktabah Kulliyaah al-Azhariyyah: 1988.
5. Undang-undang Nomor 139 tahun 1981tentang: Sistem Pendidikan Mesir: <http://portal.moe.gov.eg/ABOUTMINISTRY/DEPARTMENTS/CABE/DEP-CENTERS/DEP3/Pages/dep3v.aspx>
6. Undang-undang Nomor 82 tahun 2006 tentang: Jaminan Mutu (Pendidikan Mesir): <http://www.f-law.net/law/threads>

-o0o-

XII

Sistem Pendidikan di Papua New Guinea



Sumber foto kota Port Moresby: www.portmoresbyairport.com

Oleh:
Didik Wisnu Widjajanto, Ph.D.
Atase Pendidikan di Port Moresby

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Papua New Guinea

Papua New Guinea merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan berperan sangat penting sebagai negara tetangga.

Pembagian jenjang pendidikan di Papua New Guinea tidak jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Pelaksanaan ujian nasional diadakan sebanyak 3 kali selama masa pendidikan formal pra-universitas siswa. Pemerintah setempat menyediakan pendidikan jarak jauh yang dimulai dari kelas 5-12.

Pemerintah PNG sejak tahun 2011 telah melaksanakan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk yang signifikan di mana penduduk PNG yang sebelumnya hanya 2 juta menjadi 6 juta penduduk, mengakibatkan ruang kelas penuh dan tidak cukup menampung siswa belajar.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	593
DAFTAR ISI	595
1. Pendahuluan	597
2. PNG dan Eksistensinya	599
3. Sistem Pendidikan di Papua New Guinea	601
DAFTAR REFERENSI	615

1

Pendahuluan

Belajar merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak boleh berhenti sepanjang hayat, sesuai dengan filosofinya yaitu life long learning (belajar sepanjang hayat). Belajar juga merupakan proses refleksi diri, yakni menemukan dan mengenali kekuatan atau potensi yang harus dioptimalkan serta kekurangan yang harus diperbaiki. Demikian juga negara, dimana setiap negara juga memiliki keunggulan dan kekurangan dalam bidang pendidikannya, sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk saling melengkapi, tidak terkecuali Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG).

Banyak sekali persoalan pendidikan yang dapat dipelajari PNG dari Indonesia dan sebaliknya. Oleh karena itu, Satker (Satuan Kerja) Atase Pendidikan KBRI Port Moresby mencoba membuat pondasi kerjasama yang kuat dalam hal pendidikan antara PNG dan RI. Implementasi kegiatan pendidikan antara PNG dan RI merupakan pengejawantahan komitmen pemimpin kedua negara yang dicanangkan baik pada kunjungan Presiden RI ke Port Moresby pada bulan Maret 2010 dan kunjungan Perdana Menteri PNG ke Jakarta pada bulan Juni 2013.

Pada saat ini, Pemerintah PNG tengah fokus pada tiga bidang utama pembangunan, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang pendidikan, pemerintah PNG mengimplementasikan

free fee education (pendidikan bebas biaya). Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah PNG tentang life long learning, dimana diharapkan setiap anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang relatif lebih baik dari PNG memberikan kesempatan bagi Pemerintah RI untuk dapat membantu masyarakat PNG. Secara geografis dan politis, posisi PNG sangat strategis bagi Indonesia dan sebaliknya. Berbagi informasi dalam bidang pendidikan sangat direkomendasikan, mengingat soft diplomacy merupakan strategi yang harus diterapkan guna menjaga hubungan antara RI dan PNG menjadi semakin harmonis.

2

PNG dan Eksistensinya

PNG terletak di tenggara Samudra Pasifik, di bagian barat berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia. Perbatasan tersebut memanjang dari utara (Jayapura) sampai ke selatan (Merauke) sepanjang kira-kira 900 km dan terdapat 14 titik batas sepanjang perbatasan tersebut . PNG terletak antara 3-11o Lintang Selatan (LS), terdiri sekitar 600 pulau dan sekitar 85% area (463.840 km²) terdapat pada daratan atau pulau utama (lihat Gambar 2.1). Secara topografi, sebagian besar PNG tertutup oleh hutan hujan tropis dan dibagi oleh pegunungan besar.



(<http://www.ezilon.com/maps/oceania/papua-new-guinea-physical-maps.html>)

Gambar 2.1 Peta Negara Papua New Guinea

PNG memiliki dua musim, yaitu: musim hujan dan kemarau, tetapi karena kondisi geografi PNG yang sangat bervariasi maka daerah yang berbeda memiliki perubahan musim yang berbeda sepanjang tahun. Temperatur udara dapat mencapai 14oC di wilayah dataran tinggi dan sementara itu di wilayah pantai, khususnya bagian Utara, temperatur dapat mencapai 36oC. Negara ini memiliki sumberdaya alam yang kaya, khususnya emas dan cadangan gas alam yang besar, lahan yang luas untuk pertanian, air tawar yang berlimpah, serta hutan tropis dan perikanan maritim yang luas.

Populasi PNG adalah sekitar 5,5 juta penduduk dimana 85% dari mereka tinggal di daerah pedesaan. Lebih dari 800 dialek bahasa digunakan penduduk di seluruh 22 provinsi. Seperti yang ditunjukkan oleh heterogenitas bahasa yang diucapkan, terdapat keragaman karakteristik fisik dan budaya para penduduk tergantung pada asal provinsi. Populasi tumbuh pada tingkat 2,7% per tahun sehingga jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 7,5 juta pada tahun 2020. Menurut sensus tahun 2000, 45% penduduk diperkirakan berada di bawah usia 15 tahun. Tahun 2010 penduduk usia sekolah dan penduduk yang aktif secara ekonomi masing-masing akan tumbuh sebesar 45% dan 67%.

Ibu kota PNG adalah Port Moresby yang terletak di pantai selatan daratan PNG. Standard kehidupan di Port Moresby tergolong sangat mahal karena sebagian besar bahan kebutuhan pokok merupakan komoditas impor. Mata uang nasional PNG adalah Kina (dibaca: kee-nah), dibagi menjadi 100 Toea (dibaca: toy-ah). Jika dibandingkan dengan mata uang Indonesia (IDR), K 1 = Rp 4300 (tahun 2014).

PNG telah memiliki konstitusi monarki dengan demokrasi parlementer sejak memperoleh kemerdekaan dari Australia pada tahun 1975. Pada tahun yang sama secara konstitusi, kekuasaan eksekutif terletak di Dewan Eksekutif Nasional, yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

3

Sistem Pendidikan di Papua New Guinea

3.1 Visi Pendidikan Papua New Guinea

Visi Pendidikan PNG adalah membangun manusia secara utuh yang dapat dicapai melalui sistem pendidikan yang terjangkau, yang menghargai nilai-nilai Kristen dan tradisional, untuk menyiapkan warga menjadi “melek huruf”, terampil dan sehat dengan berkonsentrasi pada pertumbuhan dan perkembangan kelangsungan hidup pribadi masing-masing individu dan pembentukan karakter, serta memastikan semua dapat berkontribusi untuk perdamaian dan kemakmuran bangsa.

3.1.1 Pendidikan dasar

Pada usia 6 tahun semua anak-anak memulai pendidikan dasar di sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa lokal. Selama tiga tahun berikutnya, anak-anak mengembangkan dasar untuk ‘melek huruf’ terutama kemampuan berhitung, nilai-nilai keluarga dan masyarakat termasuk disiplin, perawatan kesehatan pribadi, dan menghargai orang lain. Pada usia 9 tahun anak-anak melanjutkan pendidikan dasar mereka di *primary school* (Gambar 3.1. dan Table 1). Setelah 6 tahun pendidikan dasar yang dimulai dengan program dwi bahasa, anak-anak memiliki kemampuan untuk hidup bahagia dan produktif, berkontribusi terhadap masyarakat tradisional mereka dengan menggunakan bahasa Inggris untuk memahami konsep-konsep sosial, ilmiah, teknologi, dan nilai atau pribadi dasar.

3.1.2 Pendidikan menengah

Siswa kelas 9 sampai 12 mencapai potensi mereka masing-masing untuk menjalani kehidupan yang produktif sebagai anggota masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Para siswa umumnya mengambil bagian dari kualitas pendidikan dan pelatihan lanjutan, setelah dilakukan berbagai subjek dan pekerjaan terkait kegiatan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3.1.3 Fleksibel, terbuka dan pendidikan jarak jauh

PNG memanfaatkan semua teknologi tepat-guna dan terjangkau untuk mengejar kesempatan pendidikan yang fleksibel, terbuka dan jarak jauh.

3.1.4 Pendidikan Kejuruan

Kebutuhan pendidikan dan pelatihan masyarakat langsung yang dipenuhi oleh lembaga pendidikan kejuruan menawarkan program yang tepat dan relevan dari berbagai jenjang dan memberikan prioritas kepada para siswa yang telah menyelesaikan kelas 8.

3.1.5 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

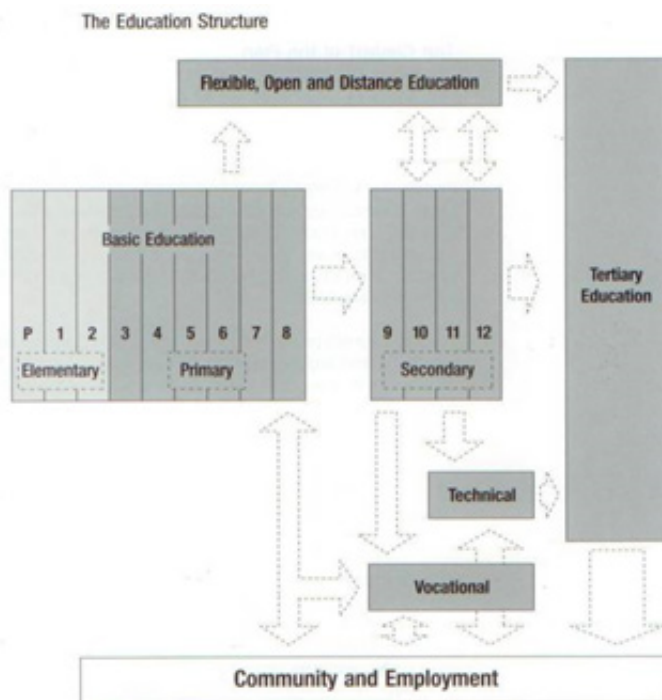
Sebuah sistem lembaga mandiri, di bawah otoritas independen yang dirancang untuk melatih tenaga kerja yang tepat-guna untuk pekerjaan di sektor formal dan informal, termasuk wirausaha.

3.2 Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan kolonial dan sejumlah sistem dijalankan oleh gereja yang dimulai pada tahun 1940-an dan berlangsung secara mandiri sampai awal 1970-an ketika sistem pendidikan nasional diberlakukan. Sistem pendidikan PNG memiliki struktur pendidikan dari bawah mulai Pendidikan dasar (*Basic education*), terdiri dari *Elementary school* (persiapan/TK sampai kelas 2 SD) dan *Primary school* (kelas 3-8),

selanjutnya *Secondary school* (kelas 9-12), dan *Tertiary* (Pendidikan Tinggi). Secara terperinci struktur pendidikan PNG dapat dipelajari pada Gambar 3.1. Berdasarkan gambar tersebut, ujian sekolah di PNG dilaksanakan pada kelas 8, 10 dan 12, bukan pada kelas 6, 9 dan 12 seperti di Indonesia.

Pada tahun 1973, sistem pendidikan PNG memiliki sekitar 1.050 lembaga pendidikan, 9.060 guru, dan 254.000 siswa. Tiga puluh tahun kemudian (tahun 2003), sistem pendidikan PNG telah tumbuh dan mempekerjakan 33.000 guru, serta memiliki hampir satu juta siswa yang tersebar di 4000 *Elementary school* (TK - kelas 2 SD), 3300 *Primary school* (kelas 3-8), 170 *Secondary school* (kelas 9-12), dan 140 sekolah kejuruan. Pada tahun 2004, selain dari pemerintah, ada enam lembaga gereja yang memiliki sekolah dan diatur oleh 20 dewan pendidikan provinsi dan dikelola oleh 20 divisi pendidikan provinsi. PNG memiliki sistem pendidikan yang sangat terdesentralisasi menyusul pembentukan sistem pemerintahan provinsi pada tahun 1978. Undang-undang desentralisasi telah memberikan tanggung jawab kepada provinsi, termasuk perencanaan, pendanaan, pengadaan staf, dan pemeliharaan lembaga pendidikan umum sampai kelas 12, termasuk pra-sekolah, pendidikan dasar bawah (kelas 1-2), pendidikan dasar atas (kelas 3-8), pendidikan menengah (kelas 9-12) dan pendidikan kejuruan.



(Sumber: Department of Education of PNG, 2004)

Gambar 3.1. Struktur Pendidikan di Papua New Guinea

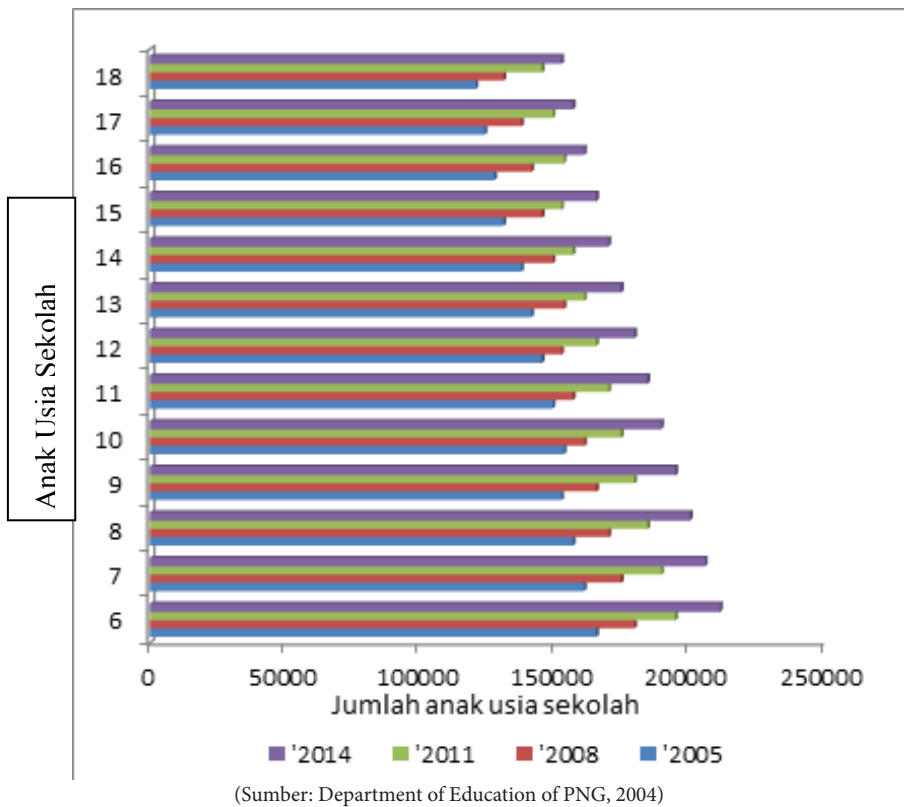
3.3 Anak Usia Sekolah

Tujuan utama pemerintah PNG dalam pendidikan anak usia sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui perencanaan pengembangan yang lebih efektif. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebebasan hak asasi yang terkandung dalam konstitusi PNG dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan tingkat pendidikan umum dan keaksaraan sehingga mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara luas, untuk meningkatkan status perempuan dan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Departemen Nasional Perencanaan dan Pembangunan Pedesaan bekerja berdasarkan kondisi sosial penduduk di setiap provinsi. Diharapkan bahwa persoalan ini akan dimasukkan ke dalam rencana pendidikan di setiap provinsi. Proyeksi penduduk untuk rencana tersebut

telah didasarkan pada sensus nasional yang dilakukan pada tahun 2000. Jumlah anak usia sekolah berdasarkan pada perhitungan 3 tahunan dari tahun 2005 sampai dengan 2014 disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Jumlah anak usia sekolah selama 9 tahun (2005 – 2014)

3.4 Penelaahan Perencanaan

3.4.1 Pendidikan Dasar

Sejalan dengan kebutuhan untuk menyediakan pendidikan untuk semua, tujuan utama pendidikan dasar adalah untuk memperluas akses sehingga tersedia waktu dan ruang di persiapan dasar (*Elementary Prep*) untuk setiap anak berumur 6 tahun. Pada tahun 2012, semua anak berumur 6 tahun diberi kesempatan untuk masuk ke kelas persiapan dan untuk menyelesaikan 3 tahun pendidikan dasar. Dalam pendidikan

dasar ada ruang yang tersedia bagi semua anak untuk menyelesaikan pendidikan sampai kelas 8. Pendidikan dasar selalu tersedia untuk semua anak termasuk para penyandang cacat atau berkebutuhan khusus. Statistik dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) menunjukkan bahwa secara global sekitar 10% anak-anak di sekolah memiliki beberapa bentuk berkebutuhan khusus dan 2,5% memiliki berkebutuhan khusus yang tinggi, termasuk anak-anak usia sekolah di PNG.

Penanganan kesetaraan dalam penyebaran guru dilakukan oleh Komite Alokasi Posisi yang menentukan kriteria penyebaran dan pengalokasian guru ke masing-masing provinsi. Komite Alokasi Posisi terdiri dari berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan dari provinsi. Berbagai inisiatif diambil dalam rangka meningkatkan penyebaran guru termasuk pengenalan kembali kondisi layanan untuk mengajar siswa yang telah didanai oleh pemerintah, penentuan standar minimum perumahan guru, peningkatan tunjangan guru di sekolah terpencil dan insentif non-keuangan.

Pada tahun 1974 konsep reformasi pendidikan (*Education Reform*) diluncurkan di PNG. Salah satu aspek yang penting dalam reformasi pendidikan di PNG adalah fokus dalam penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar. PNG mungkin merupakan satu-satunya negara di dunia yang memakai bahasa daerah sebagai alat membaca dan menulis disamping juga sebagai alat pengantar pengenalan budaya di Sekolah. Namun demikian, muncul persoalan mengingat di PNG terdapat lebih dari 850 bahasa daerah, karena bahasa daerah yang dipakai sebagai bahasa pengantar di kelas adalah bahasa daerah dari komunitas tertentu dimana sekolah-sekolah berada. Bahasa pengantar yang digunakan bisa bahasa daerah atau *tok pisin* (bahasa *pidgin* yang digunakan di PNG) bahkan juga bahasa Inggris jika bahasa itu adalah bahasa yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi, seperti sekolah-sekolah di Ibukota Port Moresby.

Tabel 1. Wajib belajar 9 tahun pada pendidikan dasar berdasarkan reformasi pendidikan di PNG. Struktur reformasi didasarkan pada pemahaman bahwa sebagian besar penduduk hanya akan berpartisipasi pada pendidikan dasar, dengan jumlah terbatas yang terseleksi untuk pendidikan menengah.

Sekolah	Kelas/Usia	Bahasa	Karakteristik
<i>Elementary</i>	Preparation, kelas 1 dan 2, usia 6-8 tahun	Bahasa daerah	Terletak di komunitas kecil. Guru dipilih oleh masyarakat.
<i>Primary lower</i>	Kelas 3 – 5, usia 9 – 11 tahun	Bahasa daerah dan bahasa Inggris	Guru-guru kelas 3 dikenal sebagai bridging teacher, harus menggunakan kedua bahasa, daerah dan Inggris.
<i>Primary upper</i>	Kelas 6 – 8, usia 12 – 14 tahun	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa instruksi di dalam kelas, tetapi penggunaan bahasa daerah masih dianjurkan.

3.4.2 Pendidikan Menengah

Sekitar lima belas tahun yang lalu, sistem pendidikan PNG masih menggunakan ujian nasional bagi siswa-siswi kelas 6. Pada saat itu Sekolah Dasar adalah dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada kenyataannya tidak semua murid lulus ujian nasional pada kelas 6, sehingga timbul persoalan bagi murid-murid yang tidak lulus pada ujian nasional kelas 6, karena tidak dapat melanjutkan pendidikan ke kelas 7 dan untuk masuk dunia kerja usia mereka belum cukup.

Untuk itu muncul pemikiran untuk membangun “*top up schools*” dimana sekolah-sekolah dasar yang sudah ada ditambahi dengan dua kelas lanjutan (kelas 7 dan kelas 8). Selanjutnya sejak saat itu ujian nasional kelas 6 ditiadakan dan digantikan dengan ujian nasional COBE (*Certificate of Basic Education*) di kelas 8. Oleh karena itu, transisi terjadi dari kelas 8 ke kelas 9. Bagi murid-murid kelas 8 yang tidak berkesempatan untuk meneruskan pendidikan ke kelas 9 dapat mencari peluang kerja mengingat sudah cukup umur. Disamping transisi pada

kelas 8 ke kelas 9, juga diimplementasikan transisi pada kelas 10 ke kelas 11, dimana murid-murid kelas 10 wajib mengikuti ujian nasional.

Kesempatan untuk pendidikan fleksibel, terbuka dan jarak jauh akan meningkat untuk menyediakan jalur alternatif dan sebanding bagi siswa dan orang dewasa untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Mungkin ada kesempatan lebih lanjut bagi siswa di luar kelas 10 atau 12 melalui pengaturan libur dan bekerja bagi orang PNG di Australia dan negara-negara lainnya. Skema yang diusulkan adalah bagi mereka yang berusia 18 sampai 30 tahun dan kesempatan akan terikat pada pelatihan untuk mahasiswa, baik di luar negeri atau kembali ke PNG.

Perdana Menteri Hon. Peter O'Neill mengimplementasikan “*Tuition Fee Free Education*” (Pendidikan Bebas Biaya) sejak dilantik sebagai Perdana Menteri, setelah memenangkan Pemilihan Umum 2012. Kebijakan “Pendidikan Bebas Biaya” adalah subsidi uang sekolah untuk semua murid PNG dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas termasuk juga murid-murid studi jarak jauh, institusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga sekolah-sekolah swasta. Walaupun kebijakan ini disambut baik oleh sebagian besar orang tua PNG tetapi pada saat ini kebijakan “Pendidikan Bebas Biaya” justru menimbulkan persoalan baru antara lain sekolah-sekolah menjadi penuh sesak, tidak cukup meja dan bangku untuk murid, kurangnya sarana sekolah untuk keperluan murid yang jumlahnya mendadak meningkat, kekurangan guru-guru untuk mengajar di kelas-kelas yang jumlah muridnya sangat besar.

3.5 Kualitas

Kurikulum, pendidikan dan pelatihan guru sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan untuk para siswa. Kurikulum pendidikan dasar ditinjau secara berkala dengan memperhatikan sensitivitas gender. Komunitas sekolah didukung untuk mengembangkan materi kurikulum yang relevan secara lokal. Mereka juga didukung oleh penyediaan keaksaraan dasar dan kursus berhitung. Pengawasan untuk ini dilakukan oleh Sekretariat Literasi dan Kesadaran Nasional dan melalui lembaga-lembaga lain seperti pusat-pusat kejuruan.

Pada sektor setelah pendidikan dasar, kurikulum sekolah menengah direvisi untuk membangun kurikulum reformasi pendidikan dasar. Ada kerjasama yang lebih besar antara pengembang kurikulum di sektor kejuruan dan sekolah menengah untuk memastikan bahwa ada komponen keterampilan yang lebih besar dalam reformasi kurikulum sekolah menengah. Instrumen pengawasan standar telah dikembangkan untuk sekolah dasar dan akan dimodifikasi untuk membantu departemen untuk memantau standar di sekolah menengah.

Kurikulum kejuruan ditinjau untuk mencerminkan kebutuhan selama 1 tahun pembelajaran. Kursus teknis dan kejuruan dibuat dengan sistem modul dan diakreditasi agar sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional. Hubungan antara masyarakat lokal, swasta, sekolah menengah, kejuruan dan teknis secara terus menerus didorong dan diperkuat.

Pendidikan guru ditinjau secara berkelanjutan dan ditingkatkan untuk menjamin kualitas guru dan para guru dilatih untuk mengajarkan kurikulum reformasi. Kerangka kerja standar nasional untuk pelatihan guru akan dibentuk untuk memberikan kualitas dan konsistensi seluruh guru di pendidikan tinggi. Pelatihan guru akan mendukung inisiatif pembentukan kurikulum. Kebijakan akreditasi nasional akan dikembangkan agar berlaku untuk program studi yang ditawarkan. Layanan inspeksi telah terhambat dalam beberapa tahun terakhir oleh kurangnya dana operasional sehingga tidak mampu melaksanakan fungsinya secara penuh.

3.6 Pengelolaan

Fungsi dan struktur Departemen Pendidikan selalu ditinjau dan diperbaiki untuk memastikan Departemen Pendidikan lebih tanggap terhadap perubahan dan memiliki kapasitas organisasi untuk mengelola rencana ini. Amandemen undang-undang organik pada pemerintah provinsi dan pemerintah tingkat daerah akan didorong untuk memungkinkan pengiriman layanan pendidikan antara tingkat nasional dan sub-nasional menjadi lebih efisien.

Dalam penilaian guru pada tingkat pendidikan dasar, tanggung

jawab lebih besar akan diberikan kepada perwakilan masyarakat. Khususnya, kepada mereka yang berada dalam posisi untuk menilai kesesuaian dan penerimaan guru untuk masyarakat yang mereka layani.

Lembaga gereja diberikan kesempatan untuk mengerahkan tingkat kontrol yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan kejuruan yang mereka operasikan. Departemen memberikan dukungan dalam penyusunan rencana strategi selama periode perencanaan untuk provinsi dan kabupaten.

3.7 Keuangan

Pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintahan, orang tua dan masyarakat. Situasi keuangan pemerintah yang sulit menyatakan bahwa orang tua dan sekolah itu sendiri, melalui peningkatan kemandirian kegiatan, harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pendidikan. Hal ini akan menjadi kasus terutama setelah pendidikan dasar. Pemerintah provinsi, misalnya, akan diminta untuk memberikan dukungan anggaran dalam pemeliharaan di semua sekolah menengah. Dalam pelaksanaannya anggaran ini akan didukung oleh kontribusi dari lembaga donor.

Pembayaran gaji guru merupakan komponen terbesar dari anggaran pendidikan. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan dalam menaikkan efektivitas biaya agar dapat dipastikan penggunaan sumberdaya staf yang paling efisien. Pembagian alokasi guru ke provinsi secara adil dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Guru akan dialokasikan satu per kelas untuk kelas atas di *primary*, dengan peningkatan yang sesuai dengan rasio guru siswa, dan alokasi guru-ke-kelas akan direvisi pada tingkat sekolah menengah atas. Akan ada perbaikan yang cukup besar dalam lokalisasi di sektor teknis. Ketiga langkah ini akan menghasilkan penghematan sekitar K300 juta (K1 = IDR 4.300) selama periode rencana. Staf lembaga pendidikan kejuruan akan didasarkan pada siswa-instruktur rasio 1 sampai 18. Dalam pendidikan teknik rasio mahasiswa-dosen akan meningkat dan akan ada upaya baru untuk meningkatkan jumlah SDM lokal.

Pemerintah akan mendukung orang tua dalam menyediakan pendidikan terutama melalui pembayaran semua gaji guru, pemberian subsidi, pendidikan guru dan pengembangan kurikulum. Terdapat juga pandangan yang luas bahwa orang tua harus memberikan kontribusi, baik dari sisi keuangan maupun dalam bentuk lainnya terhadap pendidikan anak-anak mereka. Di tingkat *Elementary*, Pemerintah akan menyediakan perlengkapan sekolah dasar untuk semua sekolah. Di sektor sekolah dasar orang tua akan memainkan peran yang semakin besar dalam mendukung anak-anak mereka, khususnya pembiayaan untuk kelas atas di sekolah dasar.

Akan ada perubahan signifikan dalam sistem subsidi pasca pendidikan dasar. Subsidi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak yang menyelesaikan kelas 8 dilengkapi dengan beberapa dukungan pemerintah yang disebut sebagai skema insentif setelah kelas 8. Semua lulusan kelas 8 berhak untuk mendapatkan dukungan dalam memajukan pendidikan dan pelatihan di lembaga yang disetujui. Hal ini mencakup sekolah menengah, pendidikan jarak jauh, pusat kejuruan dan penyedia swasta yang disetujui. Skema ini diharapkan akan menggantikan skema subsidi untuk kelas 9, pusat kejuruan dan pendidikan jarak jauh pada saat ini. Sistem subsidi tunai akan terus dilanjutkan untuk kelas 10, 11 dan 12. Tidak akan ada subsidi khusus untuk asrama siswa.

3.8 Pengelolaan Sekolah Swasta Khususnya Sekolah Internasional

Di PNG, pendidikan merupakan fokus pembangunan dan Departemen Pendidikan dan Pendidikan Tinggi mempunyai motto: Education for All. Masyarakat PNG wajib mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib memberikan fasilitas sekolah sehingga mulai tahun 2011 mempraktekan Sekolah Gratis. Mengingat laju pertumbuhan populasi sangat tinggi (Penduduk PNG saat merdeka di tahun 1975 hanya sekitar 2 juta. Namun saat ini populasi PNG telah mencapai 6 jutaan jiwa atau meningkat 3 kali lipat dalam waktu 35 tahun). Oleh karena itu, pemerintah mengalami sedikit kesulitan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pendidikan tinggi tanpa campur tangan swasta. Pada

tahun 1977, seorang pendidik bernama Mr. Stephen Michael Mead OBE dan kawan-kawannya mencoba menyiapkan sistem sekolah swasta. Akhirnya Mr. Mead dan kawan-kawan membentuk sekolah swasta dalam bentuk perusahaan nir laba dengan nama *International Education Agency* (IEA) yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1977, hanya 1,5 tahun setelah PNG merdeka (16 September 1975). Mulai saat itu, secara resmi IEA menjadi penyelenggara sekolah swasta, meskipun pada saat yang bersamaan menjadi bagian dari sistem yang dimiliki pemerintah pula.

Pada saat ini, IEA memiliki dan mengoperasikan sebanyak 20 sekolah dan 14 sekolah tinggi (*Technical and Further Education*, TEFA) di 14 provinsi di PNG. Lembaga ini merupakan penyelenggaraan pendidikan swasta yang tidak *profit-oriented* dimana kepemilikannya ada pada sekolah-sekolah sebagai anggota. Pada tahun 2013, IEA memiliki pegawai termasuk guru lebih dari 1500 orang dengan murid keseluruhan mencapai 7000 siswa.

IEA didirikan dengan tujuan untuk memberikan siswa pengetahuan dan skill untuk menjadi self-directing, mampu bekerjasama dalam kelompok, bertingkah-laku etis, efektif berkomunikasi, mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga mampu menolong setiap siswa menghargai lingkungan alam dan sosial, dan mendorong siswa untuk mampu bertanggungjawab. Program disusun dengan mempertemukan kebutuhan setiap siswa secara individu dan merefleksikan pemahaman dari fase perkembangan yang dilalui anak-anak, serta memastikan bahwa apa yang telah dipelajari siswa dibentuk dari pelajaran sebelumnya. Kurikulum mempromosikan apresiasi dari perbedaan budaya dan sistem nilainya.

Untuk sekolah menengah, IEA menyediakan pilihan kurikulum termasuk PNG (kelas 10 dan 12), Australia (wilayah ibukota Australia untuk kelas 10 dan 12), sertifikat internasional pendidikan menengah (Kelas 10-Inggris), dan *diploma Baccalaureate International* (Kelas 12-Internasional). Guru-guru IEA didukung untuk mencapai tingkat tinggi secara profesional, dengan waktu dan kondisi pekerjaan yang

sangat baik. Mayoritas guru-guru berkebangsaan PNG dan sekitar 50% adalah orang asing. IEA telah menjadi pemimpin dunia dalam membantu memperbaiki kemampuan guru-guru lokal dan memberikan mereka tempat sejajar dengan pengajar asing di kelas berstandar internasional.

Di samping menyelenggarakan pre-school dan school, IEA juga menyelenggarakan profesional dan vocational training pada 4 kampus TAFE di seluruh negeri. Program ini memberikan sertifikasi TAFE Australia dan PNG untuk siswa-siswa yang telah meninggalkan kelas 10 dan 12, dan memotivasi mereka untuk menjadi profesional. Oleh karena itu, sertifikat yang mereka peroleh diakui baik di PNG maupun Australia. Seluruh sekolah yang tergabung dalam IEA beroperasi secara aman di PNG mengingat keamanan merupakan prioritas utama.

Sekolah-sekolah yang tergabung dalam IEA adalah *International School (IS)* antara lain:

1. *Tabubil IS* (Tabubil, *Western Province*), dengan murid mencapai 260 siswa saat ini
2. *Korobosea IS*, merupakan sekolah yang terbaik dengan murid mencapai 636 murid dan berlokasi di Port Moresby, NCD
3. *The Ela Murray IS*, berlokasi di Port Moresby, NCD
4. *Coronation College* berlokasi di Lae, *Morobe Province* dan memiliki 255 murid sekolah menengah dan 300 murid TAFE
5. *Madang IS*, berlokasi di kota Madang, memiliki 210 siswa *pre-school* sampai usia 8 tahun
6. *Gordon IS*, Port Moresby, NCD dengan siswa 710 siswa
7. *Popondetta IS*, Popondetta, *Oro Povince*, yang memiliki 96 siswa
8. *Kamarau IS*, Katsinkuri, Buka, Bougainville
9. *Boroko East IS*, Port Moresby, NCD, dengan 600 siswa (TK sampai kelas 2)
10. *Alotau IS*, berlokasi di *Charles Abel Highway*, dengan 124 siswa
11. *Goroka IS*, West Goroka, *East Highland Province*, dengan 140 siswa
12. *Kimbe IS*, Kota Kimbe, *West New Britain Province*, dengan 270 siswa
13. *Kiunga IS*, Kiunga, *Western Province*, dengan 102 siswa
14. *Kundiawa IS*, Kota Kundiawa, *Chimbu Province*, dengan 54 siswa.

Sampai saat ini, selama 35 tahun (1977 - 2013), IEA berkembang sangat pesat sehingga secara tidak langsung IEA yang berstatus swasta ini telah berhasil membantu pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah internasional. Disamping itu, IEA telah memberikan pintu gerbang bagi anak-anak para repatrian yang bekerja di PNG untuk bergabung dengan sekolah-sekolah berstandar Internasional.

Kemandirian yang diberikan oleh Pemerintah PNG terhadap IEA menjadi salah satu dukungan bagi perkembangan IEA. Meskipun IEA dibentuk bukan untuk profit-oriented, tetapi semua keperluan operasional diperoleh dari siswa. Dengan demikian, biaya sekolahnya termasuk sangat tinggi dibanding dengan sekolah-sekolah internasional di negara lain termasuk Indonesia. Sebagai contoh, di Boroko East International School, biaya untuk tiap term (3 bulan) untuk TK dan kelas 1 SD mencapai sekitar: 15 jutaan rupiah. Oleh karena itu, maka biaya setiap tahun mencapai 60 jutaan rupiah.

DAFTAR REFERENSI

1. Anonymous, 2011. Pengajaran Bahasa Indonesia di the UPNG, WP I (1) : 18-20
2. Anonymous, 2011. Universitas di Papua New Guinea, WP I (1) : 14-17
3. Anonymous, 2012. Mengenal Provider Sekolah Swasta di PNG-International Education Agency, WP II (4) : 21-22
4. Department of Education of PNG, 2004. Achieving a better future. A National Plan for Education 2005 – 2014. National Library Service of PNG.
5. Minister for Tourism, Art and Culture of PNG, 2010. Welcome to Papua New Guinea.

-o0o-

XIII

Sistem Pendidikan di Perancis



Sumber foto kota Kuala Lumpur: www.propertylaunchesmalaysia.com

Oleh:
Prof. Dr. Syarif Akhlus, M.Sc.
Atase Pendidikan di Paris

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Perancis

Sistem pendidikan di Perancis dibagi atas dua kelompok utama yaitu: sistem pendidikan dasar dan menengah, serta sistem pendidikan tinggi. Kedua sistem tersebut dioperasikan oleh dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Pada tulisan ini, yang diuraikan hanya sistem pendidikan dasar dan menengah.

Sistem pendidikan dasar dan menengah di Perancis merupakan sistem yang terpadu dan berkesinambungan. Ada tiga parameter utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan sistem yaitu: target kompetensi, jenjang pendidikan dan proses/tahap pendidikan.

Target kompetensi, yang dikenal sebagai *le socle commun*, adalah target kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh murid sebelum mereka masuk ke pendidikan menengah lanjutan/atas. Target ini merupakan kemampuan/kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak di Perancis agar mereka dapat melanjutkan studi atau langsung bekerja dengan baik dan benar.

Jenjang pendidikan dasar dan menengah di Perancis dikelompokkan dalam empat jenjang yaitu: *Ecole Maternelle* (Taman Kanak-Kanak), *Ecole Elementaire* (Sekolah Dasar), *Collège* (Sekolah Menengah Pertama) dan *Lycée* (Sekolah Menengah Lanjutan).

Pada jenjang Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar, proses/tahap pendidikan dibagi atas tiga putaran (*cycle*) di mana putaran pertama

ada di Taman Kanak Kanak, putaran kedua sebagian di Taman Kanak Kanak dan sebagian lagi ada di Sekolah Dasar, dan putaran ketiga ada di Sekolah Dasar.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, setiap tingkatan/tahun merupakan bagian (putaran) dari tahap pendidikan di mana tahun pertama disebut putaran adaptasi, tahun kedua dan ketiga disebut putaran utama/sentral dan tahun keempat disebut putaran orientasi.

Pada akhir pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama, para siswa akan mengikuti ujian nasional untuk memperoleh *Diplome National Brevet*, diplome ini akan memberikan petunjuk kepada siswa untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Lanjutan/ Atas. Ada dua pilihan jalur bagi lulusan *collège* untuk masuk ke *lycée* (Sekolah Menengah Lanjutan) yaitu: *lycée général et technologique* untuk jalur akademik/umum dan *lycée professionnel* untuk jalur vokasi/kejuruan.

Proses pendidikan di *lycée* diselenggarakan selama 3 tahun yang dibagi menjadi: *La seconde* (kelas 1 /tahun pertama), *La première* (kelas 2/tahun kedua) dan *La terminale* (kelas 3/tahun ketiga). Pada akhir tahun ketiga, seluruh siswa akan mengikuti Ujian Nasional yang dikenal sebagai ujian *baccalaureat*. Bagi siswa yang lulus dari ujian *baccalaureat*, selain dinyatakan lulus dari *lycée*, siswa tersebut dinyatakan juga sudah diterima di perguruan tinggi sebagai mahasiswa, sesuai dengan bidang pilihannya.

Proses pengadaan dan peningkatan karir guru di Perancis dilakukan secara terpusat. Guru-guru di Perancis minimal berpendidikan Master yang sesuai dengan bidang dan jenjang sekolah yang akan diajarkannya. Pemantauan kinerja guru serta peningkatan karir guru dilakukan oleh para inspektur di daerahnya masing-masing.

Untuk mengawasi jalannya implementasi kurikulum serta sistem yang ada di sekolah, pemerintah Perancis membentuk badan-badan di tingkat lokal dan regional. Di tingkat nasional, terdapat direktorat evaluasi, prospektif dan prestasi yang melakukan evaluasi serta analisis terhadap sistem pendidikan nasional secara keseluruhan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	619
DAFTAR ISI	621
1. Pendahuluan	623
2. <i>Le socle commun</i> : Dasar-dasar Pengetahuan dan Kompetensi	629
3. Guru	691
4. Sistem Penjaminan Mutu	695
5. Penutup	697
DAFTAR REFERENSI	699

1

Pendahuluan

Sistem pendidikan di suatu negara adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan cerminan sistem ketatanegaraan dari negara tersebut. Negara yang berbentuk republik menerapkan sistem pendidikan yang terpusat, sedangkan negara yang berbentuk federal akan menerapkan sistem pendidikan yang federalistik.

Pada negara-negara dengan sistem pendidikan yang terpusat, sistem evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan standar yang bersifat nasional. Sedangkan pada negara-negara dengan sistem pendidikan yang federalistik, pemerintah pusat hanya mengatur norma-norma umum, dan sistem evaluasi dilakukan oleh masing masing daerah dengan mengikuti standar yang berlaku di daerah tersebut. Ada juga beberapa negara yang sistem ketatanegaraannya merupakan kombinasi bentuk federasi dan bentuk kesatuan (baik republik maupun monarki). Pada negara-negara tersebut sistem pendidikan yang diterapkan tidak sama dengan sistem pendidikan pada negara federal maupun negara republik.

Sebagai penggagas awal bentuk republik untuk sebuah negara, sejak awal berdirinya Republik Perancis Pertama (1792-1804) sampai dengan Republik Perancis Kelima (1958-sekarang), Perancis secara konsisten menerapkan sistem pendidikan yang terpusat.

Sistem pendidikan di Perancis merupakan suatu sistem terpusat dan terpadu yang bersifat nasional, di mana seluruh kebijakan dan

implementasi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas sistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, diatur oleh pemerintah pusat. Kurikulum, pengelolaan guru dan sistem evaluasi di pendidikan dasar dan menengah seluruhnya merupakan program dan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan untuk operasional sekolah, tanggung jawab biaya operasional diserahkan kepada daerah. Untuk Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diserahkan kepada pemerintah departement (daerah tingkat II atau kabupaten/kotamadya), untuk SMA dan SMK diserahkan kepada pemerintah region (daerah tingkat I atau provinsi). Berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, mayoritas pembiayaan operasional perguruan tinggi termasuk gaji dosen merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Pada sistem pendidikan di Perancis, secara garis besar jenjang pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Ketiga jenjang pendidikan tersebut dirancang menjadi suatu sistem pendidikan yang integratif dan berkesinambungan.

Proses pendidikan yang dilakukan di jenjang pendidikan dasar merupakan proses yang mempersiapkan siswa untuk mengikuti proses pada jenjang pendidikan menengah. Lalu proses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah merupakan proses yang mempersiapkan siswa untuk mengikuti proses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi atau langsung masuk kedalam dunia kerja. Kesenambungan proses pada sistem pendidikan di Perancis diimplementasikan pada petahapan proses pendidikan yang dilakukan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi.

Jenjang pendidikan dasar terdiri dari *Ecole Maternelle* (TK) dan *Ecole Elementaire* (SD), jenjang pendidikan menengah terdiri dari *Collège* (SMP) dan *Lycée* (Sekolah Menengah Lanjutan). Pada jenjang pendidikan tinggi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu: *Grande Ecole* (Sekolah Tinggi, ST) dan Universitas.

Jenjang pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah dari masing-masing sekolah adalah sebagai berikut:

1. *Ecole Maternelle* (Taman Kanak-Kanak) terdiri dari:
 - *Petite section* (kelas kecil), untuk usia 3 tahun.
 - *Moyenne section* (kelas menengah), untuk usia 4 tahun.
 - *Grande section* (kelas besar), untuk usia 5 tahun.
2. *Ecole Elementaire* (Sekolah Dasar) terdiri dari:
 - *Cours Preparatoire*, disingkat CP (kelas 1)
 - *Cours Elementaire 1*, disingkat CE1 (kelas 2)
 - *Cours Elementaire 2*, disingkat CE2 (kelas 3)
 - *Cours Moyen 1*, disingkat CM1 (kelas 4)
 - *Cours Moyen 2*, disingkat CM2 (kelas 5)
3. *Collège* (Sekolah Menengah Pertama) terdiri dari:
 - *La sixième*, disingkat 6^{ème} (tahun pertama SMP)
 - *La cinquième*, disingkat 5^{ème} (tahun kedua SMP)
 - *La quatrième*, disingkat 4^{ème} (tahun ketiga SMP)
 - *La troisième*, disingkat 3^{ème} (tahun keempat SMP)
4. *Lycée* (Sekolah Menengah Lanjutan) terdiri dari:
 - *La seconde* (kelas 1)
 - *La première* (kelas 2)
 - *La terminale* (kelas 3)

Sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi Bologna, pendidikan tinggi di Perancis dibagi menjadi tiga jenjang, yaitu: *Licence* (tiga tahun), *Master* (dua tahun) dan *Doctorat* (tiga tahun). Sistem pendidikan tinggi ini dikenal juga sebagai sistem LMD (*Licence*, *Master* dan *Doctorat*).

Untuk penamaan lulusan, selain penamaan umum, Perancis tetap mempertahankan penamaan lulusan dari perguruan tinggi sesuai dengan jumlah tahun pendidikan (n) di perguruan tinggi yang dilalui, misal *Licence* disebut juga sebagai *Bac+3* karena diperoleh tiga tahun setelah *Baccalaureat* (*Bac*), *Master* disebut juga sebagai *Bac+5* dan *Doctor* disebut juga sebagai *Bac+8*. Penamaan lulusan dengan *Bac+n* tersebut tetap diberlakukan karena menerapkan sistem LMD. Selain itu,

beberapa perguruan tinggi di Perancis, khususnya pada *Grande Ecole*, menerapkan sistem pendidikan yang sedikit berbeda dengan sistem LMD yang umum.

Ditinjau dari proses pendidikannya, Perancis menerapkan proses pendidikan melalui sistem *cycle* atau putaran. Pada jejang pendidikan dasar, proses pendidikan dibagi atas tiga putaran. Putaran pertama ada di *Ecole Maternelle* (*petite section* dan *moyenne section*), putaran kedua sebagian ada di *ecole maternelle* (*grande section*) dan sebagian lagi ada di *ecole elementaire* (CP dan CE1), dan putaran ketiga ada di *ecole elementaire* (CE2, CM1 dan CM2). Dari pembagian ini terlihat bahwa integrasi proses pendidikan sudah dimulai sejak awal pendidikan, yaitu integrasi antara TK dan SD. Dengan adanya integrasi seperti ini, tidak diperlukan tanda tamat belajar bagi lulusan TK, sekaligus tidak diperlukan lagi persyaratan maupun ujian bagi murid yang telah menyelesaikan taman kanak-kanak untuk masuk ke sekolah dasar.

Para murid yang sudah menyelesaikan tiga putaran pada pendidikan dasar dinilai sudah mampu untuk memulai tiga putaran selanjutnya pada proses pendidikan menengah pertama. Di Perancis, tidak ada ijazah SD. Para murid yang telah selesai CM2 dapat langsung mendaftar ke *collège* untuk memulai proses pendidikan menengahnya. Integrasi proses antara pendidikan dasar dan menengah terjadi pada kelas *6ème* (tahun pertama SMP), di mana proses pendidikan di kelas *6ème* disebut sebagai putaran adaptasi (*le cycle d'adaptation*). Proses pendidikan yang utama di *collège* ada di kelas *5ème* dan kelas *4ème*, proses di kedua kelas ini disebut sebagai putaran sentral (*le cycle central*). Pada tahun terakhir *collège* yaitu di kelas *3ème*, para siswa sudah dapat memilih dan menentukan jalur pendidikan selanjutnya yang akan dilalui, apakah melalui jalur akademik atau jalur profesional/kejuruan. Proses pendidikan pada kelas terakhir *collège* ini disebut sebagai putaran orientasi (*le cycle d'orientation*).

Pada akhir proses pendidikan di *collège*, siswa mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk mendapatkan *le diplôme national du brevet*, disingkat DNB, atau Ijazah Brevet Nasional. Ijazah ini juga sebagai penentu apakah seorang siswa meneruskan pendidikan menengah selanjutnya melalui jalur akademik atau profesional/kejuruan. Bagi

yang meneruskan melalui jalur akademik akan diterima di sekolah menengah lanjutan umum, sedangkan bagi yang meneruskan melalui jalur profesional akan diterima di sekolah menengah lanjutan profesional/kejuruan atau dapat langsung memulai karirnya di dunia kerja melalui pendidikan profesional berdiploma di CAP (*Certificat d'Aptitude Professionnelle*). Ujian Nasional di *collège* untuk mendapatkan DNB ini merupakan instrumen integrasi antara proses pendidikan di *collège* dengan proses pendidikan di *lycée*.

Setelah mendapatkan DNB, para siswa dapat memulai pendidikannya di *lycée* pada kelas *seconde* (kelas 1). Sesuai dengan DNB-nya, siswa dapat berada di *seconde générale et technologique* untuk jalur akademik atau di *seconde pro* untuk jalur profesional/kejuruan. Di Perancis, siswa yang menempuh jalur akademik maupun profesional dapat saja sekolah pada *lycée* yang sama, karena di suatu *lycée* (sekolah menengah lanjutan) dapat diselenggarakan *lycée général et technologique* (SMA) dan *lycée professionnel* (SMK) secara bersamaan.

Bagi para siswa yang berada di *seconde générale et technologique*, pada akhir tahun ajaran akan ditetapkan apakah siswa tersebut akan melanjutkan pendidikannya di *première* (kelas 2) *générale* (umum), *technologique* (teknologi) atau *professionnelle* (kejuruan). Penetapan ini ditentukan bersama oleh orang tua dan sekolah berdasarkan hasil-hasil yang dicapai oleh siswa selama mengikuti pendidikan di *seconde*. Mulai dari kelas *première*, para siswa akan terbagi menjadi tiga kelompok pada tiga jalur yang berbeda, yaitu: *générale*, *technologique* dan *professionnelle*. Pengelompokan ini diteruskan sampai ke kelas *terminale* (kelas 3). Sehingga ada tiga jenis *terminale* di *lycée* yaitu *terminale générale*, *technologique* dan *professionnelle*.

Pada akhir pendidikan di *lycée*, seluruh siswa diwajibkan mengikuti UN SMA/SMK yang disebut *Baccalauréat* disingkat *Bac*. Apabila siswa lulus, maka siswa akan mendapatkan *diplôme* (ijazah) sesuai dengan kelasnya di *terminale*, ada yang mendapatkan *Bac général*, *Bac technologique* atau *Bac Pro*. Ketiga jenis ijazah *Bac* tersebut juga sekaligus merupakan dokumen awal untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Seluruh pemegang ijazah *Bac* dapat langsung masuk ke perguruan tinggi

tanpa ujian masuk, karena UN untuk *Bac* sudah sekaligus merupakan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. *Bac* adalah instrumen integrasi antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Perancis, ujian *Bac* pertama kali diadakan pada tahun 1808 dan secara konsisten terus diadakan sampai sekarang.

Para pemegang *Bac* yang lulus dengan nilai yang tertinggi, yaitu lulus dengan predikat pujian, pada umumnya melanjutkan pendidikannya ke *Grande Ecole*, yang lulus dengan predikat biasa akan memilih masuk ke Universitas, sedangkan pemegang *Bac Pro* yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi umumnya akan memilih IUT (*Institute Universitaire de Technologie*). Sistem pendidikan yang terintegrasi ini memungkinkan siswa-siswa di Perancis merancang jalur pendidikannya sejak dini dan mempersiapkannya dengan baik.

Pemilihan jalur pendidikan bagi para siswa di Perancis sudah dapat dilakukan setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di *collège* (SMP). Pada dasarnya, kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh para siswa di Perancis sampai dengan *collège* adalah sama karena sudah diatur oleh pemerintah melalui suatu standar yang dikenal sebagai *le socle commun*. Standar ini merupakan acuan untuk menyusun kurikulum di pendidikan dasar dan menengah pertama.

2

Le socle commun: Dasar-dasar Pengetahuan dan Kompetensi

Dasar-dasar pengetahuan dan kompetensi merupakan kumpulan dari hal-hal yang harus diketahui dan dikembangkan oleh para siswa pada akhir masa wajib belajarnya (sampai dengan tamat *collège*). Dasar-dasar pengetahuan dan kompetensi, yang dalam bahasa Perancisnya disebut *Le socle commun de connaissances et de compétences* ini berisi kumpulan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan agar para siswa dapat berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah dan di perguruan tinggi, berhasil dalam kehidupan pribadinya serta berhasil meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengukur keberhasilan para siswa, kepada setiap para siswa diberikan buku rapor kompetensi.

Sejak tahun 2011, telah ditetapkan tujuh kompetensi dasar utama yang harus dikembangkan oleh para siswa selama mengikuti proses pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai memperoleh DNB. Ketujuh kompetensi dasar utama ini menjadi pedoman untuk menyusun kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, sekaligus menjadi instrumen integratif antar kedua jenjang tersebut. Setiap kompetensi terdiri dari pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, keterampilan menggunakan dan mengambil sikap yang penting sepanjang hidup, keterbukaan terhadap orang lain, rasa ingin tahu, kreativitas, serta penghormatan atas diri sendiri dan orang lain. Sejak 2009, kurikulum di *collège* sudah mengintegrasikan elemen-elemen kompetensi dasar sebagai lanjutan dari kompetensi yang sudah diberikan di jenjang *l'école primaire* sejak tahun 2008.

Tujuh kompetensi dasar utama tersebut meliputi:

1. Penguasaan Bahasa Perancis

Prioritas absolut untuk menguasai Bahasa Perancis diperoleh melalui:

- kemampuan untuk membaca dan memahami berbagai teks
- kualitas ekspresi tertulis
- ketrampilan berbicara
- ketepatan ejaan dan tata bahasa belajar
- penguasaan kosakata harian

2. Praktek bahasa asing

Siswa harus mampu:

- memahami tentang teks singkat dan sederhana, baik lisan maupun tertulis
- menjelaskan secara lisan dan tertulis ungkapan-ungkapan sehari-hari yang umum digunakan.

3. Unsur-unsur utama Matematika serta budaya Sains dan Teknologi

Dalam matematika, berdasarkan kemampuan berhitung dan elemen geometri, para siswa belajar untuk meningkatkan kemampuan argumentatif untuk menemukan pemecahkan masalah.

Berkenaan dengan budaya Sains dan Teknologi, para siswa mengetahui:

- struktur dan fungsi bumi dan alam semesta
- materi dan sifat-sifat fisika dan kimianya, serta energi
- karakteristik kehidupan (sel, keragaman hayati, evolusi spesies)
- desain, konstruksi dan operasi dari objek-objek teknis

Budaya Sains dan Teknologi diperkenalkan melalui pendekatan investigasi/penelitian agar memperoleh pengetahuan dan belajar untuk bertindak dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

4. Pengendalian teknologi informasi dan komunikasi

Setiap siswa belajar untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara bertanggung-jawab. Di sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, penguasaan pengendalian TIK dikonfirmasi dengan sertifikat Brevet Informatique et Internet (B2i) yang menegaskan penguasaan teknik tersebut.

5. Budaya humanis

Budaya humanis memberikan kontribusi terhadap pembentukan keputusan, rasa dan kepekaan yang dapat diperoleh melalui pembandingan:

- Sejarah (peristiwa-peristiwa pendirian)
- Geografi (lanskap dan wilayah, populasi, dll.)
- Sastra dan Seni (karya-karya besar)

Sebuah pendekatan rasa terhadap karya-karya besar akan mengawali para siswa untuk mempelajari sejarah seni. Hal ini nantinya akan mempengaruhi karya-karya artistik yang akan dibuat oleh para siswa tersebut.

6. Kompetensi sosial dan ketatanegaraan

Mempelajari bagaimana mengontrol diri, baik sebagai individu dan maupun sebagai warga negara, mengetahui aturan-aturan dasar kehidupan dalam masyarakat dan menerapkannya di lingkungan sekolah. Para siswa mengembangkan kompetensi tersebut melalui beberapa pembandingan mengenai:

- hak dan kewajiban warga negara;
- pengertian tanggung jawab dan kebebasan, dan hubungan antara keduanya; dan
- prinsip-prinsip aturan hukum, peran dan fungsi lembaga-lembaga negara Perancis dan Uni Eropa.

7. Otonomi dan inisiatif

Otonomi dan inisiatif diajarkan selama masa sekolah di setiap mata pelajaran dan aktivitas sekolah. Pembelajaran tersebut meliputi:

- melatih kemandirian dalam pekerjaan;
- terlibat dalam proyek sampai selesai (membuat presentasi, mencari tempat magang, bergabung dengan klub atau asosiasi, bekerjasama dalam sebuah tim); dan
- menyusun proyek/rencana kerja individu.

Dengan mengembangkan keterampilan ini, siswa akan memiliki sarana agar berhasil dalam pendidikan dan orientasi untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan pribadi, sosial dan profesional.

Selama masa wajib belajar, dasar-dasar pengetahuan dan kompetensi tersebut dievaluasi pada tiga tahap, yaitu: tahap pertama di kelas CE1, tahap kedua di kelas CM2 dan tahap ketiga di kelas 3^{ème}. Evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam buku rapor dari para siswa.

Di kelas CE1, yang dievaluasi adalah Bahasa Perancis, Matematika, Pengetahuan Sosial dan Ketatanegaraan. Di kelas CM2, evaluasi dilakukan terhadap ketujuh kompetensi pada *Le socle commun*, begitu juga evaluasi yang dilakukan di kelas 3^{ème}. Evaluasi yang dilakukan di kelas 3^{ème} sekaligus merupakan persiapan untuk mendapatkan DNB.

Evaluasi terhadap kompetensi yang ada pada *Le socle commun* merupakan pemetaan kemampuan para siswa. Evaluasi tersebut melibatkan orang tua para siswa dan majelis guru. Hasil dari evaluasi ditindaklanjuti dengan pembinaan serta tambahan jam belajar dan latihan dengan tujuan akhir agar para siswa dapat memiliki seluruh kompetensi yang sudah ditetapkan.

Pada tataran implementasinya, dasar-dasar pengetahuan dan kompetensi yang diuraikan pada *Le socle commun* diterjemahkan menjadi kurikulum, mulai dari *ecole maternelle* sampai *collège*.

2.1 *Ecole maternelle* (TK)

Ecole Maternelle adalah sekolah pertama untuk anak-anak di Perancis. *Ecole maternelle* tidak identik dengan taman bermain atau sejenisnya yang banyak dijumpai pada sistem pendidikan di negara lain. Penamaan *ecole* memang ditujukan untuk menyatakan bahwa di *ecole maternelle* ini proses pendidikan telah dimulai secara terprogram dan terpusat. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas program-program di *ecole maternelle*, terutama guru dan kurikulumnya.

Di *ecole maternelle*, anak-anak dipersiapkan untuk mulai mengikuti proses pendidikan dalam rangka mendapatkan kompetensi yang ditetapkan di dalam *Le socle commun*. Tujuan utama dari pembelajaran di *ecole maternelle* adalah membantu setiap anak agar mandiri dan mampu mempelajari pengetahuan serta keterampilan secara tepat. Anak-anak harus mampu memperkaya berbahasa lisan, terorganisir

dan dimengerti oleh yang lain. Tujuan pembelajaran utama lainnya di *ecole maternelle* adalah mempersiapkan anak agar nanti dapat berhasil di *cours préparatoire* (CP)/kelas satu SD.

Proses pembelajaran/kurikulum di *ecole maternelle* dikelompokkan atas lima jenis kegiatan, yaitu: pembelajaran bahasa termasuk persiapan menulis, persiapan menjadi murid, ekspresi motorik, pengenalan alam sekitar, serta pengenalan seni dan budaya. Jumlah jam pelajaran untuk satu minggu bagi siswa di *ecole maternelle* adalah 24 jam.

Rincian kelima jenis kegiatan di *ecole maternelle* adalah:

1. Pembelajaran bahasa, termasuk persiapan menulis.

Pembelajaran bahasa yang paling utama di *ecole maternelle* adalah bahasa lisan. Anak-anak diajarkan untuk berbagi cerita dan mengekspresikan diri. Secara bertahap anak-anak diarahkan untuk memahami cerita yang semakin kompleks. Dengan memaksimalkan menggunakan kosakata dan manipulasinya, akan memungkinkan anak:

- menangkap aturan yang mengatur struktur kalimat, dan
- memperoleh kosakata dalam urutan tertentu.

Persiapan membaca dan menulis dilakukan melalui pengenalan bunyi dan asosiasinya dengan lambang/abjad, pelatihan gerakan-gerakan tangan melalui penggambaran pola-pola tertentu seperti lingkaran dan garis, agar yang nantinya di SD sudah terlatih dan bisa menuliskan abjad dan kata.

2. Persiapan menjadi murid.

Tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak untuk mengenali:

- yang membedakan dirinya dari yang lain;
- bagaimana bisa diakui sebagai seseorang/pribadi;
- bagaimana hidup dengan orang lain dalam komunitas yang diselenggarakan oleh aturan; dan
- bagaimana memahami apa itu sekolah dan di mana tempatnya nanti di sekolah.

Persiapan menjadi murid merupakan suatu proses bertahap yang membutuhkan ketegasan dan fleksibilitas dari guru.

3. Ekspresi motorik.

Pada kegiatan ekspresi motorik, anak-anak diajarkan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan gerakan tubuhnya

melalui praktek kegiatan fisik yang bebas atau yang diarahkan. Pada gerakan-gerakan yang dipandu, diajari pula aturan-aturan gerakan termasuk aturan ekspresi artistik. Dengan latihan-latihan tersebut anak-anak akan memperoleh gambaran tentang orientasi tubuh mereka sendiri. Kegiatan ini akan melatih gerakan-gerakan penting seperti: bergerak berpindah-pindah, menjaga keseimbangan dan memanipulasi objek, memproyeksikan atau menerima.

4. Pengenalan alam sekitar

Di *ecole maternelle*, anak-anak diajar mengenal alam sekitar dirinya dengan menggunakan referensi spasial dan temporal. Mereka mengamati, mengajukan pertanyaan dan belajar untuk mengadopsi dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan sendiri dan mengkonfrontasikan dengan pemikiran logis sehingga tumbuh rasa penalarannya. Mereka menjadi mampu mengklasifikasikan, menyusun dan menjelaskan melalui bahasa berbagai bentuk representasi (gambar, diagram). Mereka mulai memahami apa yang membedakan benda-benda hidup dari tak hidup.

5. Pengenalan seni dan budaya

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang membangkitkan kesadaran artistik pertama dari anak-anak. Melalui pembuatan desain dan komposisi visual di satu sisi, bersuara dan mendengarkan suara di sisi lain, keduanya akan meningkatkan kemampuan sensorik anak.

Kelima jenis kegiatan ini diterjemahkan oleh para guru menjadi aktivitas-aktivitas yang terukur dan didistribusikan ke tiga jenjang pendidikan yang ada di *ecole maternelle*, yaitu: *petite section*, *moyenne section* dan *grande section*. Proses pembelajaran di *petite section* dan *moyenne section* disebut sebagai proses pembelajaran siklus pertama, sedangkan proses pembelajaran di *grande section* merupakan bagian dari siklus pembelajaran dasar yang terintegrasi dengan proses pembelajaran di kelas CP dan CE1 di *ecole elementaire*.

2.2 *Ecole Elementaire* (SD)

Seperti pada *ecole maternelle*, jumlah jam pelajaran per minggu untuk *ecole elementaire* adalah 24 jam. Tetapi bagi beberapa siswa yang

mengalami kesulitan atau memerlukan bimbingan khusus, jam pelajaran di sekolah dapat ditambah sampai dengan 2 jam per minggu.

Proses pembelajaran di *ecole elementaire* dibagi atas 2 siklus. Siklus pertama disebut siklus pembelajaran dasar, sedangkan siklus kedua disebut siklus pendalaman. Siklus pembelajaran dasar meliputi CP (kelas 1) dan CE1 (kelas 2), sedangkan siklus pendalaman meliputi CE2 (kelas 3), CM1 (kelas 4) dan CM2 (kelas 5).

1. Siklus pembelajaran dasar: kelas CP dan CE1

Siklus pembelajaran dasar sudah dimulai sejak dari TK besar (*grande section*) di *ecole maternelle*, lalu dilanjutkan di dua tahun pertama sekolah dasar: CP dan CE1.

Jumlah total jam belajar per tahun untuk kelas CP dan CE1 masing-masing 864 jam, dengan jam tambahan 24 jam per tahun. Uraian penggunaan jam pelajaran per tahun untuk tiap mata pelajaran adalah sebagai berikut:

- Bahasa Prancis:
 - Jumlah jam per tahun: 360 jam
 - Jumlah jam per minggu: 10 jam
- Matematika
 - Jumlah jam per tahun: 180 jam
 - Jumlah jam per minggu: 5 jam
- Pendidikan Jasmani dan Olahraga
Jumlah jam per tahun: 108 jam
- Bahasa asing
Jumlah jam per tahun: 54 jam
- Praktek Artistik dan Sejarah Seni
Jumlah jam per tahun: 81 jam
- Pengenalan alam sekitar
Jumlah jam per tahun: 81 jam

Kurikulum yang diaplikasikan pada siklus pembelajaran dasar, termasuk yang diberikan di kelas besar *ecole maternelle*, merupakan penjabaran dari kompetensi yang akan dicapai pada *Le socle commune*. Pada kelas CP dan CE1, objektif utama adalah:

- pelajaran membaca,
- menulis dan bahasa Perancis, dan

- pengetahuan dan pemahaman tentang angka,
- penulisan angka-angka dan bilangan, termasuk notasi desimal, dan
- berhitung untuk jumlah-jumlah yang kecil.

Uraian kurikulum untuk tiap mata pelajaran adalah:

- Bahasa Perancis

Pada akhir TK besar, para murid telah memiliki kosakata yang banyak. Mereka mampu menjelaskan, mendengarkan dan mengambil peran dalam berbicara. Ini termasuk ketika cerita dibacakan oleh orang dewasa. Mereka juga sudah dapat membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa dan simbol-simbol grafis sebagai dasar untuk untuk menulis.

Di kelas satu (CP), pelajaran membaca dilakukan dengan pengenalan simbol-simbol pembentuk sebuah kata dan identifikasi kata itu sendiri. Setelah mereka mengenal kata dan simbol-simbol pendukungnya (abjad), baru secara bertahap mereka diajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami suatu teks. Belajar membaca dan menulis (apakah kata-kata, frasa atau teks), yang dilakukan secara bersama-sama, selama berada di siklus pembelajaran dasar. Pelajaran tersebut dilakukan dengan praktek bahasa lisan dan penguasaan kosakata. Pada bagian akhir, mereka dikenalkan dengan tata bahasa dan ejaan.

- Matematika

Pembelajaran matematika di kelas CP dan CE1 diprioritaskan pada pengenalan angka-angka serta perhitungan sederhana. Melalui pengerjaan soal-soal berhitung, secara bertahap diharapkan mampu membangkitkan pemahaman tentang tanda dan operasi. Pada saat yang sama, mental aritmatika dibangun melalui latihan berhitung yang teratur.

- Pendidikan Olahraga dan Jasmani

Pendidikan olah raga dan jasmani ditujukan untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan pada pengaturan gerakan motorik. Para siswa diarahkan untuk

melakukan aktifitas fisik, olahraga dan kegiatan-kegiatan yang artistik. Dengan mengajak anak-anak bergembira untuk bergerak, diharapkan mereka akan dapat mengembangkan kesungguhan dan ketekunan. Para siswa belajar lebih banyak tentang bagaimana mengenal diri mereka sendiri dan mengenal orang lain. Mereka juga belajar untuk merawat kesehatan mereka.

- Bahasa asing

Para siswa diajarkan sejak dini bahwa adanya bahasa yang berbeda dalam lingkungan mereka, yang disebut bahasa asing. Di kelas satu, pengenalan bahasa asing dilakukan secara lisan. Di kelas kedua, baru diajarkan bahasa lisan dan tertulis. Objektif utama dalam mempelajari bahasa asing adalah penekanan pada pemahaman dan ekspresi lisan.

- Pengenalan alam sekitar

Di kelas CP dan CE1, siswa diajarkan mengenal konsep nilai dalam ruang dan waktu, serta pengetahuan tentang dunia. Mereka diajarkan kosakata tertentu yang sesuai dengan objek yang dipelajari. Melalui observasi dan manipulasi diharapkan para siswa akan dapat memperluas cakrawala di luar dirinya. Mereka mulai dilatih untuk menggunakan komputer dengan pengetahuan dan praktek awal penggunaan komputer sebagai bagian dari proses melengkapi kompetensi untuk mendapatkan B2i.

- Praktek Artistik dan Sejarah Seni

Praktek-praktek artistik dan referensi-referensi budaya yang berhubungan dengan sejarah seni akan mengembangkan kepekaan artistik dan kemampuan ekspresi dari para siswa. Kegiatan ini terkait dengan penggunaan kosakata tertentu yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pilihan dan selera. Pengenalan awal terhadap karya-karya seni akan membawa siswa untuk mampu mengamati, mendengarkan, menjelaskan dan membandingkan karya-karya tersebut.

Pembelajaran sejarah seni di Perancis merupakan suatu proses

pembelajaran yang terpadu sejak SD sampai SMA. Dokumen terakhir yang digunakan sebagai referensi adalah Bulletin officiel no 32 tanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Perancis.

- Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral
Pada pendidikan kewarganegaraan dan moral ini, siswa belajar aturan kesopanan dan perilaku sosial. Mereka secara bertahap diajarkan untuk bertanggung jawab dan menjadi lebih mandiri.

2. Siklus pendalaman: kelas CE2, CM1 dan CM2

Siklus pendalaman atau yang dikenal juga sebagai siklus ketiga pada pendidikan dasar meliputi proses pembelajaran pada jenjang/kelas CE2 (kelas 3), CM1 (kelas 4) dan CM2 (kelas 5).

Jumlah total jam belajar per tahun untuk kelas CE2, CM1 dan CM2 masing-masing 864 jam, dengan jam tambahan 24 jam per tahun. Uraian jam pelajaran per tahun untuk tiap mata pelajaran adalah sebagai berikut:

- Bahasa Perancis
 - Jumlah jam per tahun: 288 jam
 - Jumlah jam per minggu: 8 jam
- Matematika
 - Jumlah jam per tahun: 180 jam
 - Jumlah jam per minggu: 5 jam
- Pendidikan Jasmani dan Olahraga
 - Jumlah jam per tahun: 108 jam
- Bahasa asing
 - Jumlah jam per tahun: 54 jam
- Praktek sains dan teknologi
 - Jumlah jam per tahun: 78 jam
- Budaya humanis
- Praktek Artistik dan Sejarah Seni
 - Jumlah jam per tahun: 78 jam
 - Jumlah jam pengajaran Sejarah Seni per tahun adalah 20 jam untuk semua bidang studi.

- Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral, Sejarah dan Geografi
Jumlah jam per tahun: 78 jam
Kurikulum pada siklus pendalaman ini merupakan perluasan dari kurikulum pada siklus sebelumnya. Sebagai kelanjutan dari pendidikan di awal sekolah dasar, objektif utama pada proses pembelajaran di siklus pendalaman di kelas CE2 dan CM adalah:

- menguasai Bahasa Perancis, dan
- menguasai unsur-unsur utama matematika.

Para siswa dipersiapkan untuk melanjutkan ke *collège*, dengan pengajaran pada disiplin ilmu yang berbeda. Uraian kurikulum untuk siklus pendalaman ini adalah:

- Bahasa Perancis
Pengajaran memberikan akses ke semua siswa untuk menguasai Bahasa Perancis sehingga siswa dapat membuat sebuah ekspresi yang tepat dan jelas secara lisan dan tertulis, terutama untuk pelajaran Bahasa Perancis. Kemampuan Bahasa Perancis tersebut ini juga berlaku untuk semua disiplin ilmu: Ilmu Pengetahuan, Matematika, Sejarah, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Seni.

Kemajuan dalam menguasai Bahasa Perancis dilakukan melalui program membaca dan menulis, kosakata, tata bahasa, dan ejaan. Untuk mendukung kemandirian siswa dalam membaca dan menulis diberikan tambahan sebuah program sastra.

- Matematika
Pengajaran matematika diarahkan untuk mengembangkan kemampuan melakukan penelitian dan penalaran, imajinasi dan kemampuan abstraksi, ketelitian dan presisi.
Dari CE2 ke CM2 siswa memperkaya pengetahuan mereka tentang matematika, mendapatkan metode-metode baru, dan terus belajar untuk memecahkan masalah. Hal-hal tersebut memperkuat keterampilan mental matematikanya. Mereka juga diajarkan otomatisasi. Dalam matematika, ketepatan mekanisme/tahapan akan selalu dikaitkan dengan pemahaman yang mereka capai.

- **Pendidikan Jasmani dan Olahraga**
Pendidikan Jasmani dan Olahraga diarahkan untuk pengembangan keterampilan motorik dan praktek-praktek kegiatan fisik, olahraga dan seni. Pendidikan tersebut memberikan kontribusi untuk pendidikan kesehatan dengan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik tentang tubuh mereka. Pendidikan tersebut juga mengembangkan pendidikan keamanan dengan mengambil risiko yang terkendali. Pendidikan olahraga dan jasmani juga mengajarkan tanggung jawab dan otonomi, membuat akses ke siswa untuk memahami nilai-nilai moral dan sosial (menghormati aturan, menghormati diri dan orang lain).
- **Bahasa asing**
Mulai dari CE2, yang menjadi prioritas pada pembelajaran bahasa asing adalah aktifitas-aktifitas oral. Kosakata semakin diperkaya, dan komponen audio dari bahasa tetap menjadi perhatian. Dalam tata bahasa, tujuan pembelajaran ditetapkan pada penggunaan bentuk-bentuk dasar. Adanya tambahan pengetahuan tentang gaya hidup negara pemilik bahasa akan membantu untuk memahami alasan apa yang membuat orang-orang tersebut mengambil suatu tindakan.
Pada akhir CM2, siswa harus memperoleh keterampilan komunikasi dasar yang didefinisikan dengan tingkat A1 pada Kerangka Umum Acuan Eropa untuk Bahasa. Kerangka umum ini dapat dilihat pada situs Eduscol.
- **Praktek Sains dan Teknologi**
Praktek Sains dan Teknologi memiliki tujuan sebagai berikut:
 - memahami dan menggambarkan dunia nyata, baik alam maupun yang dibangun oleh manusia dan bagaimana bertindak atau berperilaku di atasnya
 - mengontrol perubahan-perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusiaTujuan tersebut dicapai melalui kegiatan-kegiatan observasi, pertanyaan, eksperimen dan penalaran. Itulah sebabnya pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk melakukan

pendekatan penelitian/riset. Penelitian ini mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas, berpikir kritis dan minat dalam kemajuan Sains dan Teknologi.

- Budaya humanis

Budaya humanis diberikan agar siswa mulai memahami kesatuan dan kompleksitas dunia, sejarah dan geografi yang memberikan dasar-dasar sendi, ruang dan waktu. Sejarah dan geografi membantu siswa mengembangkan rasa keingintahuan, rasa observasi dan berpikir kritis. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh para siswa diwujudkan dengan berbagai tulisan. Misalnya bagaimana membuat ringkasan dan jadwal, serta peta dan sketsa.

Praktek artistik individu atau kolektif ditujukan untuk mengembangkan rasa estetika. Kedua praktek tersebut dapat mengembangkan ekspresi, menciptakan kebijaksanaan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan akuisisi dari cara kerja dan teknik tiap-tiap siswa. Dalam konteks sejarah seni, praktek-praktek tersebut dikuatkan dengan mempelajari kejadian-kejadian sensitif dan rasional dari beberapa topik pilihan yang disusun secara kronologis

- Teknik Informasi dan Komunikasi sehari-hari

Budaya numerik memerlukan penggunaan yang rasional dari sarana informatika, multimedia dan internet. Di sekolah dasar, harus diajarkan sikap tanggung-jawab pada penggunaan peralatan interaktif tersebut. Siswa harus diajar untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar dari sebuah komputer:

- mengetahui fungsi-fungsi dan elemen-elemen yang berbeda dari sebuah komputer
- menggunakan mouse dan keyboard
- menggunakan pengolah kata
- menulis dokumen digital
- mengirim dan menerima pesan
- pencarian online
- mengidentifikasi dan memilah informasi

- Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral

Aturan Ketatanegaraan dan Pendidikan Moral memungkinkan setiap siswa untuk lebih mengintegrasikan dirinya ke dalam komunitas kelas dan sekolah di saat sikap dan kebebasannya diberikan.

Pendidikan ini mendorong para siswa untuk merenungkan masalah-masalah praktis yang timbul pada kehidupan sekolah dan mengenali lebih eksplisit dasar-dasar moralitas/karakter.

Untuk memantau perkembangan kompetensi siswa sekolah dasar, pemerintah telah membuat tabel yang rinci tentang materi apa saja yang akan diberikan untuk tiap kelas/jenjang, dan bagaimana melakukan evaluasinya. Dari tabel tersebut, para guru menyusun rencana pembelajaran secara mandiri untuk dilaksanakan di kelasnya.

Para siswa yang telah menyelesaikan CM2 dapat langsung meneruskan pendidikan ke *collège*.

2.3 Collège (SMP)

Kurikulum yang digunakan di *collège* didefinisikan sebagai pengetahuan penting serta metode-metode yang harus diperoleh di seluruh siklus pembelajaran oleh para siswa. Kurikulum tersebut merupakan kerangka nasional dengan mana para guru mengatur pembelajarannya menggunakan irama pendalaman yang berbeda untuk tiap siswa.

Mata pelajaran yang dipelajari selama di *collège* adalah:

1. Bahasa Perancis
2. Matematika
3. Bahasa Asing
4. Bahasa dan budaya lama/kuno
5. Sejarah, geografi, pendidikan kewarganegaraan
6. Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi
7. Fisika - Kimia
8. Teknologi
9. Seni Visual dan Pendidikan Musik
10. Pendidikan Jasmani dan Olahraga (EPS)

11. Sejarah Seni

12. Komputer dan Internet

Tujuan dan deskripsi dari tiap mata pelajaran diuraikan sebagai berikut:

1. Bahasa Perancis

Tujuan pembelajaran bahasa Perancis di *collège* adalah untuk menguasai bahasa dan mengenal budaya sastra Perancis. Guna mencapai tujuan tersebut, para siswa belajar:

- mengekspresikan diri dengan benar dan jelas, baik lisan maupun tulisan
- membaca dan menganalisis karya sastra dan teks dari semua jenis tulisan
- menjelaskan sesuatu dengan alasannya
- memberikan sanggahan
- menyusun hasil pemikirannya secara terstruktur

Mereka mengembangkan imajinasi, rasa, budaya dan belajar elemen pertama dari budaya humanis.

- Mempelajari bahasa Perancis

Sebagai kelanjutan dari proses pembelajaran yang dilakukan di *ecole primaire*, siswa belajar lebih dalam dan rinci fungsi-fungsi pada bahasa dan mempelajari aturan yang mengaturnya, tata bahasa, ejaan dan kosakata untuk memahami lebih baik lagi teks yang dibaca dan bagaimana menjelaskannya.

Pengetahuan-pengetahuan di atas memungkinkan mereka untuk menganalisis konstruksi dan operasi pada kalimat dan teks. Penekanan yang ditempatkan pada ejaan kata-kata dan makna serta nilai-nilai yang berbeda tergantung pada konteks mana kata itu digunakan. Para siswa dilatih menggunakan aturan tata bahasa dengan menerapkannya dalam berbagai latihan. Mereka secara bertahap telah meningkatkan kosakata mereka lalu menggunakan kosakatanya dengan tepat dan bervariasi, sesuai dengan situasi.

- Ekspresi

Dalam penulisan, siswa diharapkan mampu menghasilkan teks secara alami yang panjang dan bervariasi. Mereka belajar untuk:

- meringkas atau menyusun ulang sebuah teks yang sudah dibaca atau teks yang akan diusulkan
- menulis dialog, deskripsi, laporan lengkap
- membuat pendahuluan atau penutup laporan
- mengubah teks dan membuat tiruannya.

Mereka juga belajar untuk memberikan komentar dari suatu teks dan mengembangkan argumen-argumen untuk mendukung sudut pandangnya.

Di lisan, mereka berlatih membaca keras dan melafalkan kata atau kalimat, mengekspresikan emosi dan refleksi pribadi untuk berbagi, menyusun ulang kata-kata hasil pemikiran orang lain dan menggunakannya untuk membuat presentasi.

- **Bacaan**

Di kelas, siswa dilatih mempelajari tulisan-tulisan baik secara utuh maupun sebagian. Tulisan tersebut dapat berasal dari sastra atau film dokumenter, artikel berita, gambar, dan lain-lain. Mereka belajar untuk menempatkan diri mereka dalam konteks sejarah dan budaya, lalu melakukan analisis sesuai dengan apa yang mereka miliki.

Guru bebas untuk memilih teks dan bahan lainnya yang sesuai dengan kerangka program yang sudah disusunnya. Dari kelas 6^{ème} sampai ke kelas 3^{ème}, program Bahasa Perancis mengikuti perkembangan kronologis yang terkait dengan kurikulum pelajaran Sejarah meliputi: teks-teks kuno untuk kelas 6^{ème}, sastra Abad Pertengahan dan *Renaissance* untuk kelas 5^{ème}, narasi abad 19 untuk kelas 4^{ème}, bacaan-bacaan dari abad 20 dan 21 untuk kelas 3^{ème}.

Siswa juga mengupas karya-karya sastra yang besar dan terkenal selama bertahun-tahun seperti: cerita-cerita dan kisah-kisah indah untuk kelas 6^{ème}, petualangan dan komedi untuk kelas 5^{ème}, surat-surat untuk kelas 4^{ème}. Selain itu, teater dan puisi juga dieksplorasi pada setiap kelas dengan cara yang berbeda.

Guru mendorong siswa agar memiliki dan membaca bacaan-bacaan pribadi.

2. Matematika

Pembelajaran matematika di *collège* bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir logis, imajinasi dan analisis kritis, serta meletakkan dasar-dasar penting dari budaya matematika. Melalui pemecahan masalah, siswa belajar untuk:

- mengidentifikasi dan merumuskan persamaan
- membuat hipotesis dan bereksperimen dengan contoh
- membangun argumen
- memeriksa hasil-hasil yang diperoleh melalui penilaian relevansinya
- mengkomunikasikan suatu penelitian/pengamatan
- menyusun solusi

Dari kelas *6ème* sampai ke kelas *3ème*, pengajaran matematika ditekankan pada 4 bidang studi:

- organisasi dan manajemen data, serta fungsi
- angka dan perhitungan
- geometri
- besaran dan ukuran

Berikut penjabaran mata pelajaran ini pada tiap tingkatan di *collège*.

- *Kelas 6ème*

Pada kelas *6ème*, siswa mendalami dan memperkaya pembelajaran mereka, yang merupakan kesinambungan dari pelajarannya di sekolah dasar. Mereka diajarkan beberapa cara baru dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menggunakan alat bantu dalam matematika yaitu.

- situasi proporsionalitas, representasi data;
- angka desimal, meningkatkan keterampilan mental aritmatika dan penggunaan kalkulator;
- mengenal dan mengkonstruksi gambar, serta lambang yang simetri terhadap sumbu; dan
- satuan pengukuran dan sudut.

- *Kelas 5ème dan 4ème*

Di kelas *5ème* dan *4ème*, siswa memperdalam ide dan konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya:

- persentase, penerapan persamaan dasar statistik, mengambil sampling;

- berhitung dengan angka relatif biasa dan desimal, berhitung secara literal/simultan (pendahuluan);
- membuat gambar dalam dalam ruang, studi simetri; dan
- perhitungan luas dan volume.
- Kelas 3^{ème}
Di kelas 3^{ème}, siswa mengembangkan keterampilan mereka pada:
 - elemen-elemen dasar pada statistik deskriptif dan probabilitas;
 - berhitung numerik (bilangan bulat, desimal dan pecahan, terkait atau tidak, proporsionalitas) dan elemen-elemen dasar perhitungan literal, pengertian fungsi;
 - bentuk-bentuk dasar dan sifat-sifat konfigurasi dari bidang dan ruang; dan
 - pengecilan dan pembesaran, pengaturan skala dan perubahan satuan.

Mereka juga belajar untuk menggunakan mistar geser dan perangkat lunak konstruksi geometris.

3. Bahasa Asing

Pembelajaran bahasa asing di *collège* memiliki beberapa tujuan:

- Belajar untuk berkomunikasi
Para siswa belajar bahasa asing untuk sarana komunikasi, termasuk oral, yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dan bekerja di Perancis dalam kontak dengan wisatawan atau profesional yang berbicara bahasa lain, di Eropa maupun di seluruh dunia.
- Menemukan budaya baru
Siswa menjadi sadar akan persamaan dan perbedaan antara budaya mereka dan budaya yang mereka pelajari bahasanya, termasuk bagaimana perubahan pandangan antara satu budaya dengan budaya lainnya.
- Mencapai tingkat yang telah ditetapkan di seluruh Eropa
Untuk pembelajaran bahasa-bahasa di Eropa, ada 6 tingkat kompetensi yang telah disepakati. Tingkat kompetensi tersebut meningkat dengan peningkatan kesulitan yang tetap untuk

semua bahasa Eropa.

Tingkat pertama dicapai pada akhir SD, di mana siswa mampu, dengan bantuan, untuk berkomunikasi singkat tertulis dan lisan dan memahami teks yang sangat pendek dan sangat sederhana. Tingkat kedua dicapai pada akhir kelas 3^{ème}/SMP, dimana siswa harus mampu bertukar informasi dasar tentang topik-topik umum dan memahami teks singkat dan sederhana.

Berikut penjabaran mata pelajaran ini pada tiap tingkatan di *collège*.

- Kelas 6^{ème} dan 5^{ème}

Pada kelas 6^{ème} dan 5^{ème}, siswa belajar untuk:

- berkomunikasi dalam masyarakat (mengerti bagaimana memperkenalkan diri, mengetahui aturan kesopanan, mampu berbahasa sehari-hari, dll.).
- berbicara tentang kehidupan sehari-hari mereka (bercerita, menguraikan, menjelaskan pilihan, dll.).
- menceritakan dan menjelaskan berbagai variasi dokumen (lagu, iklan, klip film, cerita, puisi, peribahasa, dll.).

Mereka juga mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan sejarah dan geografi.

Program ini juga termasuk untuk bahasa kedua yang akan dimulai pada kelas 4^{ème} dan dilanjutkan sampai ke kelas 3^{ème}.

- Kelas 4^{ème} dan 3^{ème}

Pada kelas 4^{ème} dan 3^{ème}, para siswa mempelajari 2 bahasa asing. Siswa belajar untuk menjelaskan, memberikan argumentasi atau berdebat. Mereka juga memperkaya pengetahuan mereka tentang budaya dari bahasa-bahasa yang mereka pelajari. Mereka bekerja pada beberapa konsep:

- perjalanan (ekspedisi-ekspedisi utama, pertemuan antar ras, berada di pengasingan, dll.),
- Sains dan Fiksi Ilmiah,
- sekolah dan masyarakat, dan

- pengaruh yang ditinggalkan oleh budaya di lingkungan terdekat mereka.

Di beberapa sekolah:

- pada kelas bilingual, siswa dimungkinkan untuk belajar dua bahasa asing mulai dari kelas 6^{ème}, satu diantaranya Bahasa Inggris;
- pada seksi Eropa atau internasional di mana bahasa oriental ditawarkan kepada beberapa siswa, siswa mendapat kesempatan untuk mengambil pelajaran dalam bahasa asing yang dipelajarinya; dan
- pada seksi bahasa regional, siswa mendapat kemungkinan belajar bahasa regional di sekolah sebagai paritas/pasangan bilingualnya.

4. Bahasa dan budaya kuno

Pembelajaran bahasa dan budaya kuno dimaksudkan agar siswa memiliki pemahaman yang lebih baik dari Bahasa Perancis dengan berfokus pada asal-usulnya. Para siswa juga memahami perkembangan budaya umum melalui sejarah, hukum, sastra, politik dan seni. Dengan mempelajari bahasa kuno sebagai akar bahasa, akan mempermudah mempelajari bahasa asing Eropa lainnya.

Pengajaran dilakukan 3 jam per minggu, dimulai dari kelas 5^{ème} untuk Bahasa Latin dan kelas 3^{ème} untuk Bahasa Yunani. Pelajaran tersebut dapat diteruskan sepanjang masa sekolah.

Studi tentang budaya dan bahasa dilakukan secara bersamaan, dimulai dari teks berbahasa Latin atau Yunani sampai teks yang lebih bervariasi.

Pada akhir *collège*, diharapkan para siswa telah menguasai aturan dasar tata bahasa dan memiliki leksikon (kosa-kata) yang cukup untuk menganalisis serta menerjemahkan teks sederhana. Setelah mempelajari dan memahami logika bahasa yang sesuai dengan bahasa masing-masing serta menangkap nuansa dan seluk-beluknya, maka kompetensi tersebut dapat digunakan untuk merefleksikan bahasa kuno tersebut ke dalam bahasa Perancis.

Pada pembelajaran bahasa dan budaya kuno, para siswa mempelajari

referensi budaya-budaya besar dan utama, termasuk kehidupan sehari-hari, politik dan seni di Roma, kota Athena pada abad 5 SM (Sebelum Masehi), mitos-mitos dan sejarah. Dalam kaitannya dengan sejarah seni, siswa juga mengungkap ilustrasi karya seni, monumen, berpartisipasi dalam kunjungan ke museum, serta menemukan karya modern yang terinspirasi oleh zaman kuno.

5. Sejarah, Geografi, Pendidikan Kewarganegaraan

- Tujuan:

Membangun referensi budaya agar siswa dapat menempatkan dirinya dalam waktu, ruang, dan sistem nilai-nilai demokrasi serta menjadi warga negara yang bertanggung-jawab.

Dalam sejarah, siswa mengembangkan kebudayaan umum. Mereka sadar akan warisan masa lalu dan tantangan dunia saat ini.

Dalam geografi, siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan pengetahuan mereka tentang dunia. Hal mana akan mengantarkan mereka untuk mengetahui perubahan dunia dengan bijak.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mereka dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung-jawab. Mereka juga memperoleh pengetahuan penting untuk memahami kewarganegaraan dan mempersiapkan pelaksanaannya.

Berikut penjabaran dari mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Pendidikan Kewarganegaraan.

- Sejarah:

Pada pelajaran Sejarah dibahas berbagai bidang yang berkembang bersama sejarah: ekonomi, sosial, politik dan budaya, dan sejarah seni. Di setiap jenjang/kelas, dipelajari dan dibahas topik-topik yang khusus.

- Kelas 6^{ème}

Di kelas 6^{ème}, setelah kontak awal dengan peradaban Timur, siswa melanjutkan ke peradaban Yunani dan Roma dan mempelajari munculnya agama Yahudi dan Kristen.

- Kelas 5^{ème}

Di kelas 5^{ème}, siswa belajar tentang peradaban besar antara abad ketujuh dan akhir abad ketujuh belas: awal

Islam, peradaban Eropa pertengahan (Kristen, feodalisme, munculnya negara), dan sejarah Afrika. Mereka juga membahas pergolakan budaya dan intelektual di Eropa dari akhir abad kelima belas serta penegasan berdirinya negara.

- Kelas 4^{ème}

Untuk kelas 4^{ème}, topik yang dibahas adalah peristiwa-peristiwa pada abad-abad kedelapan belas dan kesembilan belas (Abad Pencerahan untuk Revolusi Industri) yang ditandai dengan beberapa peristiwa antara lain revolusi sebagai pusat perubahan. Selain itu, isu perdagangan budak dan perbudakan juga ikut dibahas.

- Kelas 3^{ème}

Di kelas 3^{ème}, siswa mempelajari perjalanan sejarah dunia sejak 1914: mereka mempelajari perang dunia, rezim totaliter dan kerangka geopolitik global setelah 1945. Perhatian khusus diberikan kepada sejarah politik Perancis.

• Geografi:

Seperti halnya sejarah, pembelajaran Geografi juga menampilkan topik yang berbeda untuk tiap jenjang/kelas.

- Kelas 6^{ème}

Setelah pengetahuan yang lebih dalam tentang daerah yang terdekat (lanskap dan wilayah), di kelas 6^{ème} para siswa mengeksplorasi dunia untuk mengetahui masyarakat manusia dalam segala keanekaragamannya, sekaligus untuk menemukan dan mengkarakterisasi berbagai cara hidup mereka.

- Kelas 5^{ème}

Di kelas 5^{ème}, topik yang dipelajari adalah pertumbuhan penduduk, kesenjangan dalam kondisi hidup, kekayaan dan pengembangan perusahaan, hubungan antara perusahaan dan sumber daya (lahan, penggunaan, penyimpanan, dan berbagi antara yurisdiksi dan manusia), di kelas 5^{ème} ini secara khusus dipelajari konsep pembangunan

berkelanjutan.

- Kelas 4^{ème}

Berdasarkan lanskap, di kelas 4^{ème} siswa belajar elemen sederhana deskripsi, analisis dan penjelasan dari proses globalisasi dan menerapkannya pada diskusi-diskusi yang diikutinya.

- Kelas 3^{ème}

Di kelas 3^{ème}, siswa mempelajari konsep wilayah mulai dari wilayah terdekat dan penghuninya, selanjutnya siswa belajar tentang Perancis sebagai ruang produksi terbuka lalu ke Eropa, dunia dan Uni Eropa (UE). Program ini mengarah ke peran global Perancis dan UE.

• Pendidikan kewarganegaraan:

Siswa belajar kompleksitas kehidupan sosial dan politik. Dari situasi konkret (pemilihan wakil kelas, misalnya), mereka membahas konsep-konsep kunci dan kosakata kewarganegaraan:

- kehidupan masyarakat, di sekitar konsep siswa, anak-anak dan penduduk,
- prinsip-prinsip dasar seperti sekularisme, dan
- nilai-nilai keragaman, kesetaraan, keamanan, kebebasan, hukum, keadilan.

Republik Perancis dan organisasi demokratis merupakan pelajaran utama di kelas 3^{ème}.

6. Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi

Pembelajaran Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi bertujuan mempelajari elemen-elemen penting dari literasi ilmiah untuk memahami cara kerja tubuh manusia, dunia kehidupan, bumi dan lingkungan.

Siswa mengamati fenomena organisme hidup, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, melakukan manipulasi dan percobaan. Dari kegiatan tersebut mereka mengenal proses ilmiah.

Mereka juga menyadari pentingnya keamanan, menghormati orang lain dan kebutuhan bagi setiap orang untuk merasa bertanggung-jawab terhadap lingkungan dan kesehatan.

Berikut penjabaran mata pelajaran ini pada tiap tingkatan di collège.

- **Kelas 6ème**

Di kelas 6ème, siswa mengamati kondisi sekitarnya untuk memahami dua aspek: lingkungan pemukiman, serta produksi dan daur ulang material. Mereka juga menganalisis aplikasi bioteknologi dan intervensi manusia terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan makanan:

- karakteristik lingkungan terdekat dan distribusi makhluk hidup lokal,
- populasi media,
- asal bahan makhluk hidup,
- praktek dalam pelayanan makanan,
- keanekaragaman, kekerabatan dan kesatuan makhluk hidup.

- **Kelas 5ème**

Di kelas 5ème siswa tiba pada tingkat pertama pemahaman tentang fungsi gizi pada manusia, fungsi pernafasan pada makhluk hidup, dinamika planet dimulai dari manifestasi permukaan:

- pernapasan dan pendudukan lingkungan hidup,
- fungsi tubuh dan kebutuhan energi, dan
- geologi evolusi lansekap eksternal

- **Kelas 4ème**

Di kelas 4ème dipelajari reproduksi seksual pada makhluk hidup dan manusia, mekanisme transmisi saraf dan hormon dalam tubuh dan fungsi internal dari planet:

- kegiatan internal di bumi,
- reproduksi seksual dan pemeliharaan spesies di masyarakat,
- transmisi hidup pada manusia, dan
- komunikasi saraf dan hormon pada manusia.

- **Kelas 3ème**

Di kelas 3ème, siswa mempelajari genetika dan imunologi untuk memperkaya pengetahuan tentang manusia. Selain itu, karakteristik makhluk hidup dipelajari melalui keanekaragaman Hayati dan evolusi spesies. Pada akhir *collège*, adalah saat di

mana para siswa sudah mendapatkan refleksi tentang sains dalam menangani implikasi etis dari beberapa progres ilmiah serta tanggung jawab terhadap lingkungan, dunia kehidupan dan kesehatanyang meliputi:

- keragaman dan kesatuan manusia,
- evolusi organisme hidup dan sejarah bumi,
- risiko infeksi dan perlindungan organisme, dan
- tanggung jawab untuk kesehatan manusia dan lingkungan.

7. Fisika - Kimia

Pembelajaran Fisika-Kimia bertujuan untuk mempelajari dasar-dasar budaya ilmiah dalam berbagai bidang fisika dan kimia. Pelajaran ini mengandalkan terutama pada eksperimen, di mana siswa belajar gagasan-gagasan ilmiah pertama dari materi, cahaya, listrik, dan gravitasi. Mereka mengembangkan rasa observasi, rasa ingin tahu, pemikiran kritis dan minat dalam kemajuan ilmiah dan teknis. Pengajaran Fisika-Kimia dimulai dari kelas 5^{ème}.

- Kelas 5^{ème}

- Air

- Siswa merenungkan peran air di lingkungan kita. Mengamati bahwa air jernih tidak selalu air murni, mereka mendiskusikan konsep campuran homogen dan zat murni.

- Listrik

- Rangkaian arus listrik dipelajari melalui prestasi praktis, dengan tujuan utama menangani masalah keamanan dalam jangka pendek.

- Cahaya

- Untuk menjelaskan gagasan tentang cahaya, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: apa itu cahaya dan bagaimana perannya ketika kita melihat sebuah benda?, serta bagaimana itu cahaya menyebar?

- Kelas 4^{ème}

- Molekul

Konsep molekul diperkenalkan melalui contoh air dan udara. Transformasi kimia diinterpretasikan menggunakan konsep atom.

- Listrik

Setelah tahap kesadaran dan pengamatan fenomena listrik, siswa dikenalkan dengan hukum-hukum umum yang berlaku untuk listrik.

- Cahaya

Sebagai kelanjutan dari program kelas 5^{ème}, bahasan tentang cahaya dilanjutkan dengan mempelajari gagasan warna serta pembentukan gambar dengan lensa.

- Kelas 3^{ème}

- Kimia

Siswa mulai melakukan identifikasi bahan dan larutan berair yang mengantarkan listrik. Selain itu mereka juga mulai diajak untuk bertanya “Bagaimana cara membuat spesies kimia baru?”.

- Listrik

Topik pengaliran listrik dari stasiun pembangkit sampai ke pengguna merupakan topik bahasan di kelas 3^{ème}, siswa juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan produksi dan penggunaan energi listrik.

- Gravitasi

Untuk menjelaskan gravitasi, model yang digunakan adalah organisasi tata surya. Selain itu dibahas juga hubungan antara berat dan massa suatu benda.

8. Teknologi

Pembelajaran Teknologi bertujuan untuk memahami dunia teknik berdasarkan langkah-langkah yang konkret.

Siswa belajar metode dan pengetahuan untuk memahami dan mengontrol bagaimana objek teknis yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Siswa menganalisis desain dan implementasi mereka, dan mengikuti perkembangan

teknologi dalam kronologi penemuan dan inovasi. Mereka juga mempelajari dampak dari benda-benda teknis dan perubahannya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berikut penjabaran mata pelajaran ini pada tiap tingkatan di *collège*.

- *Kelas 6ème*

Memahami fungsi objek teknis.

Siswa belajar bagaimana objek teknis yang terkait dengan transportasi. Mereka menemukan dan menerapkan cara-cara untuk produksi.

Mereka juga memperdalam pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kontinuitas dengan program sekolah dasar.

- *Kelas 5ème dan 4ème*

Mengembangkan pengetahuan tentang desain, implementasi dari objek teknis dan TIK.

Kelas 5ème, fokus kegiatan pada habitat dan struktur (paviliun, bangunan kolektif, jembatan, terowongan, jalan atau pembangunan perkotaan). Kelas 4ème, mereka membahas tentang kenyamanan dan otomasi (semua teknologi elektronik, komputer dan telekomunikasi yang digunakan di rumah).

Siswa menganalisis sistem dan proses pelaksanaan, mereka belajar tentang pendekatan desain. Mereka memperkaya pengetahuan mereka pada TIK, dengan sistem kemudi otomatis dan pemodelan numerik.

- *Kelas 3ème*

Pengantar pendekatan teknologi, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, kendala lingkungan dan sosial.

Siswa mengembangkan satu atau lebih proyek untuk menggunakan dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di tingkat sebelumnya. Mereka mengembangkan metode kerja dan meningkatkan keterampilan TIK mereka melalui produksi media digital

yang terkait dengan proyek.

9. Seni Visual dan Pendidikan Musik

Pembelajaran Seni Visual dan Pendidikan Musik ditujukan untuk mengembangkan kemampuan siswa mengamati suatu karya dan memberikan arti pada suatu kegiatan seni.

Siswa belajar dengan menganalisis karya seni, keragaman jenis, gaya dan periode. Mereka secara bertahap memperoleh rasa untuk ekspresi diri dan kreativitas, bagaimana memahami fenomena penciptaan dalam musik, seni visual, arsitektur, seni gambar.

- Pendidikan Musik

Siswa mendengarkan berbagai karya musik: lagu, musik instrumental, karya-karya klasik. Mereka belajar untuk menganalisis, menafsirkan beberapa elemen musik, memperdalam budaya musik dan memperoleh pengetahuan teknis (teori, bernyanyi atau memainkan alat musik).

Di setiap sekolah, siswa yang ingin berlatih bernyanyi dalam paduan suara dapat melakukannya di bawah asuhan guru musik yang disiapkan oleh sekolah. Sekolah juga dapat mengadakan latihan instrumen secara reguler.

- Seni

Pada pelajaran seni, siswa berinteraksi berbagai karya: gambar, lukisan, kolase, patung, pahatan, arsitektur, fotografi, film, video, dan digital. Mereka diajak untuk membahas dalam ukuran fisik serta makna historis dan sosial dari objek yang mereka amati.

Mengartikulasikan pendekatan budaya dan praktik artistik, akan meningkatkan kapasitas dari siswa untuk refleksi dan ekspresi seni dari seni masa lalu dan kontemporer. Hal ini akan memberikan siswa sarana:

- memperluas budaya artistik mereka untuk menempatkan karya-karya dalam sejarah,
- untuk menguasai teknik menggambar dan melukis,
- memahami citra dan spasial, dan

- untuk menemukan bagian yang berarti dari objek yang diamati.

Di beberapa *collège* ada yang mengadakan jam kerja yang fleksibel untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam konteks peningkatan jadwal dan program pada kelas pendidikan. Awalnya, mereka hanya peduli terhadap musik dan seni tari, sekarang para siswa dapat membuka teater dan seni visual.

Pada kelas yang disebut kelas proyek seni dan budaya disediakan jadwal dan program untuk seni dan budaya kepada semua siswa untuk memberikan pengalaman kepada siswa. Kelas ini dapat menarik seniman dan budaya profesional untuk mengajarkan: arsitektur, film dan audiovisual, tari, desain, sastra, warisan budaya, fotografi, teater dan sebagainya.

Pendidikan seni juga dilakukan di bengkel seni, yaitu tempat praktek artistik dan seni kontemporer. Bengkel tersebut terbuka untuk siswa yang secara sukarela, di bawah pengawasan tim guru, melakukan sebuah proyek.

10. Pendidikan Jasmani dan Olahraga (EPS)

Di *collège*, EPS bertujuan agar fisik siswa memperoleh kemampuan baru, karena para siswa berada pada usia di mana terjadi transformasi perubahan fisik dan psikologis yang signifikan.

Untuk mengembangkan citra positif dari para siswa dan merasakan kenyamanan yang memberikan kepercayaan diri, mereka belajar untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menggunakan metode-metode tertentu. Mereka juga secara bertahap bertanggung-jawab untuk mengasimilasi aturan-aturan yang penting.

Kegiatan olah raga bersama/grup dibagi menjadi kelompok:

- atletik (jarak menengah, rintangan, lompat tinggi, lempar lembing, lompat jauh, estafet kecepatan),
- kompetisi berenang (berenang cepat dan berenang jauh),
- kegiatan di luar ruangan (kano-kayak, pendakian dan

- panjat tebing),
- senam (senam aerobik, senam ritmik),
- seni (seni sirkus, tari),
- tim olahraga (basket, sepak bola, bola tangan, rugby, bola voli),
- olahraga raket (bulu tangkis, tenis meja), dan
- beladiri (tinju Perancis, gulat).

Dengan memvariasikan kegiatan, siswa belajar untuk:

- mencapai kinerja yang terukur dalam ruang dan waktu (renang, atletik);
- mengadaptasi gerakan: memilih rute dalam lingkungan alam, terlibat dalam keselamatan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup (pendakian dan panjat tebing);
- mencapai kinerja artistik atau akrobatik: memproduksi dan menguasai penciptaan di depan penonton (tari); dan
- mendorong dan mengontrol konfrontasi: keputusan menghormati lawan, mitra, wasit (olahraga tim).

Mereka juga menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mempersiapkan, memelihara dan memulihkan diri dari stres. Mereka belajar untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk prinsip-prinsip yang sesuai kesehatan dan gaya hidup, mengontrol emosi mereka dan untuk menilai efek dari latihan pada tubuh mereka.

Asosiasi olahraga (AS)

Untuk melawan siswa, asosiasi olahraga (AS) menawarkan kepada semua collège untuk meningkatkan latihan kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan spesialisasi dalam satu atau lebih olahraga, untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari pembentukan tugas-tugas organisasi, penjurian, peliputan, dll. AS juga mengorganisir pertemuan antara siswa-siswa dari sekolah yang sama atau dengan sekolah lainnya.

11. Sejarah Seni

Pelajaran Sejarah Seni dimulai tahun 2012 di collège, setelah sebelumnya mulai diperkenalkan di SD pada tahun 2008. Pelajaran ini merupakan persimpangan dari semua disiplin

ilmu dan dengan demikian melibatkan semua guru. Sejak 2011, ijazah Brevet nasional baru mencakup sejarah lisan seni.

Pelajaran Sejarah Seni bertujuan untuk mengembangkan budaya artistik umum, di mana siswa mengungkapkan karya-karya besar dari berbagai bidang artistik yang berbeda, dari era yang berbeda dan dari peradaban yang berbeda. Mereka diajak untuk memahami bahwa mereka adalah ahli waris dari budaya-budaya yang mereka amati jejaknya. Dengan pemahaman tersebut, para siswa semakin paham akan makna warisan seni dan dengan demikian memperkaya kepekaan mereka terhadap warisan seni dan budaya tersebut.

Pengajaran sejarah seni merupakan pengajaran yang interdisipliner: dapat diajarkan oleh semua guru, termasuk guru pendidikan musik dan seni visual, sejarah, Bahasa Perancis, bahasa asing dan bahasa kuno.

Pengajaran sejarah seni didasarkan pada periode atau kurun waktu pengamatan yang tertentu. Pada kurun waktu tersebut dipelajari sejarah dan 6 bidang seni:

- seni spasial: arsitektur, seni taman;
- seni bahasa: sastra (puisi naratif);
- seni kehidupan sehari-hari: desain, benda-benda seni;
- seni: musik (instrumental, vokal);
- seni pertunjukan: teater, tari, sirkus, pedalangan; dan
- seni visual: seni visual, film, fotografi.

Untuk mempelajari sejarah seni, para siswa dapat:

- mengunjungi museum dan situs yang ditujukan untuk seni,
- menganalisis gambar,
- mendengarkan karya musik,
- menghadiri acara, dll.

Pelajaran sejarah seni ini juga menghubungkan seni, budaya ilmiah dan teknis, sejarah ide-ide, masyarakat, budaya dan agama. Misalnya, bagaimana suatu benda artistik yang dibuat terinspirasi oleh mitos dan agama, negara, dan kekuasaan, ruang dan waktu, diekspresikan dengan teknologi.

Praktek Seni dan Budaya

Praktek seni dan budaya dapat memberikan ekstensi sensitif dan spesifik untuk pengajaran Sejarah Seni, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan khusus dalam paduan suara, workshop, teater, tari, menulis, dll. Sebagian besar kegiatan ini diawasi oleh seorang guru dan seorang seniman profesional, yang mentransmisikan pengalaman dan keahliannya dan memberikan kontribusi untuk seni dan budaya.

12. Komputer dan Internet

Di collège, semua guru berkontribusi terhadap pelatihan Komputer dan Internet.

- Tempat-tempat belajar Komputer dan Internet.
Setiap mata pelajaran yang diajarkan di collège memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketrampilan siswa mengaplikasikan teknik informatika dan komunikasi (TIK). Peralatan TIK tersebut dapat dijumpai di semua kelas seperti:
 - dalam kelas Bahasa Perancis, untuk mencari informasi seperti pengambilan dokumen dan pengolahan teks;
 - dalam kelas Sejarah dan Geografi, dimana siswa menangani peta, gambar dan sumber daya informasi digital lainnya;
 - dalam kelas Matematika dan ilmu pengetahuan, dengan menggunakan perangkat lunak, seperti geometri atau studi tentang gempa bumi;
 - dalam kelas bahasa asing di mana, berkat alat multimedia, siswa dapat belajar mandiri; dan
 - dalam kelas Artistik dengan alat grafis digital untuk seni visual dan berbagai teknologi seperti generator nada untuk Pendidikan Musik.

Siswa juga diajarkan untuk menghormati hak cipta pada setiap penggunaan perangkat lunak dan pengambilan konten/dokumen di internet.

Brevet informatique et internet (B2i)

B2i adalah sertifikat yang menyatakan tingkat penguasaan alat-alat multimedia dan Internet. Untuk mendapatkan sertifikat ini, ada 5 kompetensi yang harus dimiliki yaitu:

- memahami lingkungan kerja yang informatik;
- mengadopsi sikap-sikap yang bertanggung jawab;
- membuat, memproduksi, mengolah, menggunakan data;
- mengatur proses saling memberi informasi dan dokumen; dan
- melakukan komunikasi dan bertukar bahan/informasi.

Siswa akan mendapatkan B2i mereka apabila mereka mampu memvalidasi 80% kompetensi yang telah ditetapkan. B2i merupakan syarat untuk mendapatkan ijazah Brevet nasional (DNB).

- Buku teks digital
Buku teks digital secara bertahap diperkenalkan di sekolah-sekolah. Hal ini memungkinkan para siswa dan orang tua mereka berkonsultasi jarak jauh untuk meminta akses ke dokumen-dokumen yang disediakan oleh guru berupa: bahan pelajaran, teks, foto, video, dan rekaman suara, tergantung pada disiplin masing-masing.
- Tanda peringatan untuk penggunaan alat-alat multimedia
Untuk membantu siswa meningkatkan kemampuannya mengoperasikan peralatan (komputer, scanner, kamera digital, dll.) serta perangkat lunak yang digunakan, collège mengingatkan tentang hak cipta dan aturan penggunaan sumber daya, serta risiko-risiko yang akan mereka hadapi apabila melanggar ketentuan yang ada. Di sebagian besar sekolah, tanda-tanda peringatan dibuat untuk dihormati oleh semua.

Pada akhir proses pendidikan di collège, para siswa akan mengikuti Ujian Nasional SMP untuk mendapatkan le diplôme national du brevet (DNB).

2.3.1 *Le diplôme national du brevet* (DNB - Ijazah Nasional SMP)

Le diplôme national du brevet (DNB) adalah ijazah nasional setelah evaluasi pengetahuan dan kemampuan siswa pada akhir pendidikan menengah pertama (*collège*). DNB atau yang dikenal sebagai brevet merupakan hasil pemetaan kemampuan dari siswa yang digunakan sebagai orientasi pemilihan jalur pendidikan selanjutnya. *Brevet* bukan merupakan persyaratan administratif untuk mengikuti pendidikan lanjut setelah *college*, tetapi akan menjadi pertimbangan, khususnya bagi siswa dan keluarganya, untuk memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan hasil *brevet*-nya.

Ujian nasional untuk brevet dilaksanakan di seluruh college, baik negeri maupun swasta. Ujian tersebut terdiri dari:

1. Ujian tulis untuk mata pelajaran: Bahasa Perancis, Matematika, Sejarah-Geografi, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Masing-masing mata pelajaran diberi koefisien 2.
2. Ujian lisan untuk mata pelajaran Sejarah Seni, yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Untuk mata pelajaran Sejarah Seni ini juga diberi koefisien 2.
3. Nilai-nilai ulangan untuk mata pelajaran pada kelas 3ème: semua mata pelajaran kecuali Sejarah-Geografi dan Pendidikan Kewarganegaraan. Total koefisien 10 atau 11 tergantung seri *collège*-nya, karena ada *collège* yang sudah profesional seperti *collège* untuk pertanian.
4. Validasi kompetensi dasar (*le socle commun de connaissances et de compétences*).
5. Nilai *vie scolaire* (kehidupan di sekolah), dengan koefisien 1.
6. Untuk materi yang opsional fakultatif, nilainya harus di atas 10/(20), yaitu pada mata pelajaran Bahasa Latin, Bahasa Yunani, bahasa Asing atau daerah, pengenalan dunia profesional 3 jam. Nilai tersebut ditambahkan ke dalam nilai total dari seluruh mata pelajaran.

Untuk mendapatkan *brevet*, minimum rata-rata nilai yang harus diperoleh dari semua nilai yang ada adalah 10/(20), ditambah dengan validasi hasil uji kompetensi pada *Le socle commun*.

Bagi yang lulus dengan predikat ‘baik’ dan ‘sangat baik’, pada beberapa kondisi tertentu akan mendapatkan beasiswa atau penghargaan.

Ujian tulis pada tiap mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional merupakan ujian esai. Misalnya untuk ujian Bahasa Perancis: ujian pada tahun 2013 dikte lebih panjang (600 - 800 karakter), dengan dua pilihan soal esai. Ujian Matematika juga ujian esai yang menuntut kemandirian siswa untuk menjawabnya, begitu pula dengan ujian Sejarah, Geografi dan Pendidikan Kewarganegaraan yang memasukkan peta sebagai salah satu soal yang diuji.

Setelah mendapatkan *brevet*, para siswa dapat melanjutkan sekolahnya ke *lycée*. Bagi yang memilih jalur akademik akan melanjutkan ke *lycée general et technologique*, sedangkan yang memilih jalur vokasi akan melanjutkan pendidikannya ke *lycée professional*.

2.4 *Lycée (SMA)*

Pada sistem pendidikan di Perancis, seluruh sekolah menengah lanjutan setelah *collège* dinamakan *lycée*. *Lycée* diselenggarakan selama 3 tahun yang dibagi menjadi: *La seconde* (kelas 1 /tahun pertama), *La première* (kelas 2/tahun kedua) dan *La terminale* (kelas 3/tahun ketiga).

Berdasarkan jalur pendidikannya, *lycée* dibagi menjadi dua: *lycée général et technologique* untuk jalur akademik/umum dan *lycée professionnel* untuk jalur vokasi/kejuruan. Pemisahan jalur pendidikan menjadi jalur akademik dan vokasi ini dilakukan sejak tahun pertama *lycée*.

Pada *lycée general et technologique* yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur akademik, dibagi lagi menjadi dua, yaitu: *lycée general* untuk jenis pendidikan akademik yang umum, dan *lycée technologique* untuk jenis pendidikan akademik yang mengarah kepada suatu bidang yang tertentu dan spesifik. Pembagian tersebut dilakukan pada tahun kedua *lycée*.

Pada *lycée général*, terdapat tiga jurusan/seri, yaitu: *la série littéraire* (L)-Literatur/sastra, *La série économique et sociale* (ES)-Ekonomi Sosial dan *La série scientifique* (S)-Sains. Pembagian jurusan dilakukan pada

tahun kedua, bersamaan dengan pemisahan *lycée général* dan *lycée technologique*.

Lycée technologique menyelenggarakan 8 seri teknologi yaitu:

1. *sciences et technologies de l'industrie et du développement durable* (STI2D)- Teknologi industri dan pembangunan berkelanjutan.
2. *sciences et technologies du design et des arts appliqués* (STD2A)- Teknologi desain dan seni terapan.
3. *sciences et technologies du management et de la gestion* (STMG)- Teknik pengaturan dan tata kelola.
4. *sciences et technologies de la santé et du social* (ST2S)- Teknologi kesehatan dan sosial.
5. *sciences et technologies de laboratoire* (STL)- Teknologi laboratorium.
6. *techniques de la musique et de la danse* (TMD)-Teknik musik dan tari.
7. *hôtellerie*- Perhotelan.
8. *sciences et technologies de l'agronomie et du vivant* (STAV)- Teknologi Pertanian.

Sedangkan, *lycée professionnel* menyelenggarakan 88 jenis *spécialités* (spesialisasi) vokasi.

Di Perancis, perbedaan jalur maupun jenis pendidikan di *lycée* diartikan sebagai perbedaan program, bukan perbedaan sekolah, sehingga lazim dijumpai penyelenggaraan *lycée general*, *lycée technologie* dan *lycée professionnel* dilakukan di sekolah yang sama. Begitu pula sebaliknya, perpindahan siswa dari satu *lycée* ke *lycée* lain, karena mereka merubah jalur pendidikannya, juga merupakan hal yang lazim, terutama saat siswa naik dari *la seconde* ke *la première*. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk mengawali pendidikan di *lycée*, semua *lycée* menyelenggarakan kelas *la seconde* dengan program yang sama.

1. *La seconde* – kelas 1

Pengajaran yang diselenggarakan di kelas *la seconde* ini merupakan dasar yang akan dipakai oleh siswa sampai menyelesaikan pendidikannya di *lycée*. Kelas 1 sekolah menengah atas/lanjutan ini dinamakan dengan *la seconde* (kelas kedua) sebagai konsistensi integrasi pendidikan antara *collège* dan *lycée*, karena kelas terakhir

di *collège* adalah *la troisieme* (kelas ketiga).

Jumlah jam pelajaran per minggu di *la seconde* adalah 28,5 jam. Jam pelajaran tersebut didistribusikan untuk 8 mata pelajaran umum dan 2 aktifitas tambahan dengan perincian sebagai berikut:

- Bahasa Perancis: 4 jam
- Sejarah-Geografi: 3 jam
- Bahasa Asing 1 dan 2: 5,5 jam
- Matematika: 4 jam
- Fisika Kimia: 3 jam
- Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi: 1,5 jam
- Pendidikan Jasmani dan Olah Raga: 2 jam
- Pendidikan kewarganegaraan, hukum dan sosial: 0,5 jam
- Pendampingan pribadi: 2 jam
- Pendalaman materi: 3 jam.

Pokok-pokok bahasan yang dipelajari untuk tiap mata pelajaran adalah:

- Bahasa Perancis
Mempelajari 4 *genre* sastra utama (novel, drama, puisi, argumentasi tertulis) dari sejarah sastra yang terdapat pada kurun waktu yang berbeda, yaitu antara abad 17 dan 20, melalui teks dan karya yang lengkap. Untuk persiapan ujian *baccalauréat*, praktek memberikan komentar atas teks (tertulis dan lisan) dan tulisan-tulisan tambahan dipelajari lebih mendalam.
- Sejarah dan Geografi
Dalam pelajaran Sejarah, dipelajari kedudukan sejarah Eropa di dunia, mulai dari zaman kuno sampai pertengahan abad 19. Dengan mengamati perubahan secara kronologis, pembelajaran ini dapat memberikan gambaran tematik dan problematik dari masa-sama (kurun waktu) yang dipelajari.
Dalam pelajaran Geografi, dibahas 4 tema sentral pada isu-isu pembangunan berkelanjutan. Studi kasus tersebut dapat digunakan untuk mempelajari organisasi, perencanaan dan pengembangan wilayah dan menyilangkannya dengan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Bahasa asing 1 (LV1) dan bahasa asing 2 (LV2)

Program bahasa asing ini merupakan kelanjutan dari bahasa yang telah dipelajari di *collège*. Hal ini dibuat untuk mempersiapkan siswa sebagai bagian dari warga Eropa yang menguasai beberapa bahasa Eropa.

Konteks penggunaan bahasa dikaji berdasarkan seni hidup bersama keluarga, komunitas, kota, dan wilayah. Konteks tersebut diorganisir dalam 3 konsep, yaitu: memori, rasa memiliki dan visi ke depan. Untuk setiap bahasa, konsep-konsep ini dibagi lagi menjadi masalah yang melekat dalam kekhususan budaya dan bahasa yang dipelajari.

- Matematika

Pengajaran Matematika mencakup 3 bidang:

- fungsi,
- geometri, serta
- statistik dan probabilitas.

Kegiatan matematika yang ditawarkan bervariasi:

- pencarian, eksperimen, terutama dengan pendekatan numerik;
- penerapan teknik dan menerapkan algoritma;
- penalaran, penunjukkan; dan
- secara lisan menjelaskan proses, mengkomunikasikan hasilnya secara lisan atau tertulis.

- Fisika dan kimia

Pengajaran Fisika dan Kimia dibagi atas tiga tema:

- kesehatan,
- olahraga, dan
- alam semesta.

Pembelajaran membahas masalah-masalah utama masyarakat, menawarkan perspektif sejarah dan memberikan pengetahuan ilmiah. Hal penting yang dipelajari adalah metode ilmiah dan pendekatan eksperimental.

- Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi

Tiga isu yang dibahas pada pelajaran ini adalah:

- bumi di alam semesta, kehidupan dan evolusi kehidupan;

- isu global kontemporer; serta
- tubuh manusia dan kesehatan.
- Pendidikan Jasmani dan Olahraga (EPS)
EPS dilaksanakan melalui praktek yang beragam untuk aktifitas fisik, sportif dan artistik. Kegiatan tersebut dapat membuat siswa mampu menggerakkan dan mengembangkan kemampuan motoriknya untuk menjaga kesehatannya.
- Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan
Melalui studi empiris yang nyata, dilakukan studi tentang bagaimana aturan kolektif dapat mengatur kehidupan seluruh masyarakat dan mendirikan serta menjaga keutuhan suatu negara.

Pendalaman materi

Pada kelas *la seconde*, di samping pelajaran umum seperti Bahasa Perancis atau Matematika, siswa juga mengikuti 2 eksplorasi untuk pendampingan pribadi masing-masing 1,5 jam per minggu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- menemukan bidang disiplin pengetahuan dan metode yang terkait dengannya;
- mendapatkan informasi yang terkait dengan mata pelajaran yang sesuai untuk pendidikan lanjutannya di: IUT, kelas persiapan, perguruan tinggi, dll.; dan
- mengidentifikasi mata pelajaran yang sesuai dengan aktivitas kerja yang akan dikerjakan nantinya.

Kegiatan pendalaman materi ini antara lain:

- Seni sirkus
- Bioteknologi
- Penciptaan dan kegiatan kesenian: Seni Visual atau Seni dan Seni dan Warisan
- Penciptaan dan budaya desain
- Penciptaan dan inovasi teknologi
- Pendidikan Jasmani dan Olahraga
- Pelatihan praktis, menuntut dan ketat dalam bidang kegiatan fisik, olahraga dan seni (APSA).
- Bahasa asing 3

- Latin dan Yunani
- Sastra dan Masyarakat
- Metode dan praktik ilmiah
- Prinsip-prinsip dasar ekonomi dan manajemen
- Kesehatan dan Sosial
- Ilmu Teknik
- Ekonomi dan Ilmu Sosial
- Sains dan Lab

Pendampingan Pribadi

Semua siswa memiliki waktu 2 jam per minggu untuk mendapatkan pendampingan pribadi agar bisa sukses dan lebih baik beradaptasi seirama dengan tujuan sekolah.

Pendampingan ini bertujuan untuk:

- membantu siswa untuk memperdalam pengetahuan mereka,
- membekali siswa dengan metode kerja untuk membantu mereka bekerja secara mandiri, dan
- berbicara dengan mereka tentang orientasi atau rencana mereka.

Pendampingan dilakukan dalam bentuk pelatihan penyegaran atau tutorial.

Setelah menyelesaikan kelas *la seconde*, sebahagian siswa melanjutkan ke *la première générale*, sebahagian ke *la première technologique* dan sebahagiannya lagi ke *la première professionnelle*. Ketiga kelas *la première* tersebut memiliki program yang berbeda antara satu dengan lainnya. Secara linier, siswa yang masuk ke *la première générale* akan meneruskan ke *la terminale générale*, begitu pula dengan *la première* lainnya. Program pada tiap-tiap *la terminale* adalah lanjutan dari program pada *la première* sebelumnya, sehingga uraian kurikulum dan program pada kelas-kelas *la première* dan *la terminale* akan dijelaskan secara linier, yang selanjutnya disebut sebagai jalur (*voie*) *générale*, *technologique* dan *professionnelle*.

- *La voie générale*- jalur umum
La voie générale atau jalur umum disiapkan untuk dua tahun untuk para siswa *lycée* yang akan mengambil *baccalaureat général* dan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, secara umum ke universitas atau kelas persiapan untuk *grande école*.

Jalur umum ini terbagi atas tiga seri: seri literatur/sastra (L), seri ekonomi dan sosial (ES) dan seri sains (S).

- *La série littéraire* (L)- Seri Literatur/Sastra.

Program pada seri literatur telah diperbaharui dan diperluas agar kelak para siswa dapat lebih berhasil di pendidikan tingginya. Pada seri ini:

- » Dipusatkan pada studi literatur yang dihubungkan dengan dunia moderen,
- » Diadakan pengkhususan untuk pelajaran bahasa asing, dan
- » Ditawarkan pilihan pengajaran spesialisasi yang bervariasi. Di kelas *première*, identitas dari seri ini mendapat sorotan berkat:

- » Pembelajaran baru literatur dan literatur asing dalam bahasa aslinya untuk seluruh siswa, dan
- » Pembelajaran panel bervariasi dengan pilihan: seni, matematik, bahasa asing ke 3 atau ke 1 dan ke 2 yang diperdalam, bahasa dan budaya kuno (Latin dan Yunani).

Di kelas *terminale*, merupakan saat yang khusus bagi spesialisasi:

- » Lanjutan pembelajaran literatur dan literatur asing; serta
- » Beberapa pengajaran khusus yang ditawarkan: pelajaran hukum dan isu-isu kontemporer dunia, ditambah dengan Matematika, bahasa dan budaya kuno, bahasa asing 1 dan 2 yang diperdalam, bahasa asing 3 dan Seni. Pengajaran Sejarah dan Geografi diperdalam dengan metode dan sarana analisis yang berkenan dengan pelajaran tersebut.

- *La série économique et sociale* (ES)- Seri Ekonomi dan Sosial.

Seri Ekonomi dan Sosial dipusatkan pada pembelajaran ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial, yang dapat menjadikan para siswa memahami dengan cepat konsep-konsep, metode-metode dan masalah-masalah penting dari tiga ilmu sosial yang penting: ilmu ekonomi, sosiologi dan ilmu politik.

La terminale ES menawarkan pengajaran khusus dari ilmu sosial politik atau ilmu ekonomi lanjutan. Spesialisasi di Matematika tetap dijaga. Seperti pada seri L, pembelajaran Sejarah dan

Geografi diarahkan kepada pendalaman metoda dan sarana analisis yang berkenaan dengan bidang tersebut.

- *La série scientifique* (S) – Seri Sains

Seri S telah direorganisasi untuk menarik lebih banyak siswa termotivasi pada bidang Sains dan memilih seri S ini.

Di kelas *première*, disediakan tempat yang luas untuk Matematika dan Sains eksperimen: Fisika-Kimia dan Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Dominasi Sains untuk Teknologi dibuat sebagai alternatif bagi Sains Hayati dan Kebumian sehingga menjadi Sains Bersama. Dominasi Ekologi, Agronomi dan Kewilayahan juga dapat dipilih sebagai dua pelajaran tambahan, pada *lycée* yang berafiliasi dengan Kementerian Pertanian.

Di kelas *terminale*, arah pembelajaran diarahkan pada penguasaan keterampilan Sains: pengajaran saintifik mengambil dua pertiga bagian dari total pengajaran. Pengajaran khusus Informatika dan Sains Numerik ditambahkan untuk mempertajam spesialisasi pada Fisika-Kimia, Matematika dan Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi.

Mata pelajaran yang diberikan pada jalur umum ini adalah:

- » Untuk seluruh *la première générale*: Bahasa Perancis, Sejarah dan Geografi.
- » Untuk seluruh *la terminale générale*: Bahasa Asing.
- » Untuk kelas *la première seri L*: Matematika, Sains, Literatur/ Sastra.
- » Untuk kelas *la terminale seri L*: Sejarah dan Geografi, Matematika, Bahasa dan Budaya Asing, Hukum dan tantangan utama dari dunia kontemporer, dan Filsafat (8 jam/minggu).
- » Untuk kelas *la première seri ES*: Matematika, Sains, Sains Ekonomi dan Sosial.
- » Untuk kelas *la terminale seri ES*: Sejarah dan Geografi, Matematika, Sains Ekonomi dan Sosial, serta Filsafat (4 jam per minggu).
- » Untuk kelas *la première seri S*: Matematika, Fisika-Kimia, Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi.

- » Untuk kelas *la terminale* seri S: Matematika, Fisika-Kimia, Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi, Dasar sains untuk teknologi, Sejarah dan Geografi (fakultatif), serta Filsafat (3 jam/minggu).

Pokok bahasan dari mata pelajaran yang diajarkan pada tiap kelas untuk tiap seri tidak selalu sama, disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kompetensi standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Para guru diberi kebebasan untuk menyusun sendiri metoda pengajarannya yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan siswanya. Selain mata pelajaran yang disebutkan di atas, ada juga mata pelajaran yang merupakan lanjutan mata pelajaran dari kelas 1 (*la seconde*), atau mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran yang diberikan di setiap seri disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai oleh masing-masing *baccalauréat*.

Pada *Baccalauréat littéraire (L)*, kompetensi siswa diarahkan untuk memiliki kemampuan analisis dan sintesis, ketertarikan pada sastra, bahasa, sejarah-geografi, seni. Tujuannya memperdalam budaya sastra berdasarkan analisis, kontekstualisasi karya dan argumentasi, serta memperoleh pemikiran kritis yang diperkaya dengan pengajaran filsafat.

Pada *baccalauréat économique et social (ES)* yang merupakan *baccalauréat* multidisiplin, kompetensi ditekankan pada pemahaman dan penguasaan bidang-bidang sosial-ekonomi dan aktualita, sejarah dan geografi, serta matematika.

Pada *baccalauréat scientifique (S)*, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat abstraksi, disiplin ilmiah, rasio dan eksperimen. *Baccalauréat scientifique* ini bertujuan mengembangkan budaya sains berdasarkan pengetahuan dan pendekatan eksperimental sains dari tiap siswa.

- *La voie technologique* – jalur teknologi

Berawal dari *seconde générale et technologique*, para siswa dapat memilih satu dari beberapa seri yang ada pada jalur teknologi. Setelah *baccalauréat*, para siswa dapat melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi teknologi, yaitu: BTS, DUT dan sebagainya.

Pembelajaran pada jalur teknologi dikarakterisasikan dengan:

- Metode pembelajaran induktif (teori dideduksi untuk masalah yang spesifik) diaplikasikan ke objek yang diamati secara nyata, sebagai alternatif pengajaran murni yang diterapkan di jalur umum; serta
- Suatu tujuan untuk dapat mengikuti pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.

Para pemegang *baccalauréat* teknologi mempunyai kemungkinan besar untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka dapat melanjutkan ke BTS atau DUT setelah *baccalauréat*, dan terus sampai *licence* (sarjana) profesional. Untuk membangkitkan motivasi mereka, apabila diantara mereka ada yang mendapatkan nilai baik, mereka dapat mencapai diploma insinyur atau *master*, langsung setelah *baccalauréat*, melalui kelas *préparatoire* (persiapan) misalnya setelah BTS atau DUT.

Ada 8 seri teknologi pada jalur teknologi yaitu:

- *sciences et technologies de l'industrie et du développement durable* (STI2D)- Teknologi industri dan pembangunan berkelanjutan.
- *sciences et technologies du design et des arts appliqués* (STD2A)- Teknologi desain dan seni terapan.
- *sciences et technologies du management et de la gestion* (STMG)- Teknik pengaturan dan tata kelola.
- *sciences et technologies de la santé et du social* (ST2S)- Teknologi kesehatan dan sosial.
- *sciences et technologies de laboratoire* (STL)- Teknologi laboratorium.
- *techniques de la musique et de la danse* (TMD)-Teknik musik dan tari.
- *hôtellerie*- Perhotelan.
- *sciences et technologies de l'agronomie et du vivant* (STAV)- Teknologi Pertanian.

Setiap jalur teknologi memiliki kurikulum yang khusus dan linier. Kekhususan kurikulum tersebut ada mata pelajaran yang berbeda untuk tiap jalur.

Selain mata pelajaran yang berbeda, ada juga beberapa mata pelajaran yang sama yang diajarkan pada semua atau sekelompok jalur teknologi.

Mata pelajaran yang diberikan pada jalur teknologi ini antara lain:

- Untuk seluruh *la première technologique*: Bahasa Perancis.
- Untuk seluruh *la terminale technologique*: Bahasa Asing, filsafat (2 jam).
- Untuk kelas *la première* seri STI2D: Sejarah-Geografi-Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Fisika-Kimia.
- Untuk kelas *la terminale* seri STI2D: Bahasa Asing, Matematika, Fisika-Kimia, Pengajaran Teknologi.
- Untuk kelas *la première* seri STD2A: Sejarah-Geografi-Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika.
- Untuk kelas *la terminale* seri STD2A: Bahasa Asing, Matematika, Fisika-Kimia, Desain dan Seni Terapan.
- Untuk kelas *la première* seri STMG: Sejarah-Geografi-Pendidikan Kewarganegaraan.
- Untuk kelas *la terminale* seri STMG: Sejarah-Geografi-Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum, Ekonomi, Manajemen dan Organisasi.
- Untuk kelas *la première* seri ST2S: Biologi dan Fisiopatologi Manusia.
- Untuk kelas *la terminale* seri ST2S: Sejarah-Geografi-Pendidikan Kewarganegaraan, Sains dan Teknik Kebersihan Lingkungan dan Sosial.
- Untuk kelas *la première* seri STL: Sejarah-Geografi-Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Fisika-Kimia, Kimia-Biokimia-Sains Mahluk Hidup, Bioteknologi, Pengukuran dan Instrumentasi, Sains Fisika dan Kimia Laboratorium.
- Untuk kelas *la terminale* seri STL: Bahasa Asing, Matematika, Fisika-Kimia, Kimia-Biokimia-Sains Makhluk Hidup, Bioteknologi, Sains Fisika dan Kimia Laboratorium.

Selain mata pelajaran di atas, masih ada beberapa mata pelajaran

lain, baik yang merupakan lanjutan dari mata pelajaran di kelas 2 (*la seconde*), maupun mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Untuk mata pelajaran yang bersifat umum seperti bahasa Perancis dan Matematika, pokok bahasan yang dibahas pada mata pelajaran tersebut disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan dari tiap seri.

Setelah menyelesaikan *la seconde*, secara umum para siswa menjaga linieritas jurusannya dengan melanjutkan ke kelas 3 (*la terminale*) pada seri yang sama. Sangat jarang sekali ada siswa yang berpindah jurusan/seri di kelas *terminale*. Para lulusan dari seri teknologi akan mendapatkan *baccalaureat* sesuai dengan seri/jurusannya.

- *La voie professionnelle*- jalur profesional

Jalur profesional, dibuat untuk pengajaran kompetensi dan ketrampilan dari suatu bidang atau domain profesional. Pengajaran pada jalur ini dihubungkan dengan bidang-bidang yang ada pada dunia profesional. Jalur ini dapat dimulai dari kelas *la seconde*, atau dapat juga dimulai dari kelas *la premiere* apabila sebelumnya siswa berada di *seconde general et technologie*.

Setelah kelas *la troisieme* di college, siswa dapat masuk ke jalur profesional untuk mendapatkan *certificat d'aptitude professionnelle* (CAP) atau sertifikat kemampuan profesional dalam kurun 2 tahun, atau memperoleh *baccalaureat professionnel* dalam kurun 3 tahun. Untuk itu dibuat *seconde professionnelle*. Kelas-kelas *seconde professionnelle* terdiri dari banyak spesialisasi atau disiplin yang masing-masingnya terhubung dengan dunia kerja profesional. Pada jalur profesional, selain CAP juga dikenal *le brevet d'etudes professionnelle* (BEP) atau *brevet* pendidikan profesional, yang diperoleh setelah menyelesaikan *la seconde professionnelle*, *brevet* ini merupakan diploma *intermediate* (antara) sebelum mendapatkan *baccalaureat professionnel*.

Pembelajaran di jalur profesional didasarkan pada pendalaman teknik-teknik profesional. Para siswa melakukan kerja praktek di bengkel atau kelas selama beberapa bulan, lalu magang di

perusahaan. Pengalaman profesional tersebut akan membuat para siswa siap bekerja di pasar kerja.

Pendidikan pada jalur profesional ini termasuk juga pengajaran untuk mata pelajaran umum. Para siswa mengikuti pelajaran Bahasa Perancis, Sejarah-Geografi dan Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, bahasa asing, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Pendidikan Artistik tergantung spesialisasinya, pembelajaran Sains Fisika dan Kimia serta bahasa asing kedua.

Saat ini, terdapat 88 spesialisasi yang diadakan pada jalur profesional yaitu:

- Layanan perawatan dan dukungan kepada orang
- Home - hubungan pelanggan dan pengguna
- *Aerospace* - opsi avionik mekanik
- *Aerospace* - pilihan sistem sel mekanik
- Penataan ruang arsitektur
- Perencanaan dan pembangunan selesai
- Kerajinan dan kerajinan – opsi seni batu
- Kerajinan dan kerajinan - pilihan komunikasi grafis
- Kerajinan dan kerajinan - media opsi komunikasi visual multi
- Kerajinan dan kerajinan - opsi tukang kayu
- Kerajinan dan kerajinan - opsi visual merchandising
- Kerajinan dan kerajinan - opsi jok tukang melapis perabot
- Kerajinan dan kerajinan - pilihan “ilmiah dan teknis gelas” dan “perdagangan diajarkan dan signage”
- Industri *bio-processing*
- *Baker* – pembuat kue
- *Butcher* dan katering
- Perdagangan
- Restorasi pemasaran dan pelayanan
- Akuntansi
- Sopir pengangkutan barang melalui jalan darat
- Konstruksi bodi
- *Kitchen*

- Budidaya Laut
- Listrik, energi, peralatan komunikasi
- Lingkungan Nuklir
- Wewangian kosmetik estetika
- Studi dan definisi produk industri
- Pengolahan produk dicetak, routing
- Pengecoran
- Manajemen-administrasi
- Kesehatan dan lingkungan
- Industri pengolahan
- Industri pasta, kertas dan karton
- Intervensi dalam warisan built
- Logistik
- Pemeliharaan kendaraan bermotor Pilihan: sepeda motor, kendaraan komersial, mobil penumpang
- Pemeliharaan peralatan industri
- Pemeliharaan peralatan
- Pemeliharaan sistem mekanis otomatis opsi - c: sistem rel
- Pemeliharaan Air
- Industri *fashion* - pakaian
- Kerajinan kulit sepatu pilihan
- Kulit perdagangan kulit pilihan
- Kerajinan pembersihan dan binatu
- *Microtechnology*
- Bahan tekstil pilihan Pelaksanaan
- Pilihan Implementasi dibentuk bahan bahan logam, bahan keramik
- Kacamata optik
- Bangunan kerja: aluminium, kaca dan bahan sintetis
- Membangun kerja: logam
- *Wig posticheur*
- Fotografi
- Fotografi khusus
- Pengendalian sistem produksi otomatis
- Percontohan lini produksi

- Plastik dan komposit
 - Penjual ikan kulit katering
 - Proses kimia, air dan kertas dan kardus
 - Produksi Grafis
 - Produksi cetak
 - Teknik Produksi Mesin - opsi pemotongan
 - Gigi tiruan
 - Perbaikan Tubuh
 - Restorasi
 - Sekretariat
 - Pencegahan Keselamatan
 - Layanan Dukungan *Main Board*
 - Layanan lokal dan kehidupan lokal
 - Sistem elektronik digital
 - Teknisi *Aerostructures*
 - Teknisi produsen kayu
 - Teknisi manufaktur kayu dan bahan terkait
 - Pemeliharaan energi Teknisi dan sistem iklim
 - Teknisi *sawmill*
 - Teknisi konstruksi: persyaratan organisasi dan konstruksi
 - Pendinginan dan AC
 - Teknisi Studi Bangunan
 - Teknisi mesin
 - Teknisi *boiler* industri
 - Teknisi instalasi untuk energi dan iklim sistem
 - Insinyur *surveyor surveyor*
 - Fitter teknisi tukang kayu
 - Teknisi *modeler*
 - Teknisi pembuat perkakas
 - Perawatan permukaan
 - Transportasi
 - Pekerjaan Umum
 - Penjualan (prospeksi, negosiasi, pelanggan tindak lanjut)
- Setiap spesialisasi memiliki kurikulum teknis yang berbeda-beda.

Seluruh siswa *lycee*, baik *generale*, *technologique* maupun *professionnelle*, pada akhir *terminale* (kelas 3) wajib mengikuti ujian nasional untuk memperoleh *baccalaureat* atau *bac*.

2.4.1 *Le baccalauréat* (Ijazah Nasional SMA/SMK)

Le baccalauréat atau *bac* adalah ijazah nasional yang menandai akhir pendidikan menengah lanjutan (umum dan kejuruan), sekaligus merupakan diploma untuk masuk ke perguruan tinggi. *Bac* diperoleh melalui ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Perancis. Ujian Nasional (UN) tersebut dilaksanakan di *lycee* yang ditunjuk oleh Rektor Akademi (sepadan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi) selaku penanggung jawab pelaksanaan ujian di wilayahnya. UN ini pertama kali diadakan pada tahun 1808 dan secara konsisten tetap terus dilaksanakan sampai sekarang. Konsep *bac* sebagai tanda lulus SMA/SMK sekaligus diploma masuk perguruan tinggi juga pertama kali dikenalkan pada tahun 1808 dengan dekrit 17 Maret 1808, dan sampai saat ini masih tetap berlaku.

Secara prinsip tidak ada ujian masuk perguruan tinggi di Perancis. Penentuan penerimaan mahasiswa di suatu perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi berkas dan dikoordinasikan secara nasional. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar perguruan tinggi di Perancis adalah perguruan tinggi negeri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa pada akhir pendidikan di *lycée*, para siswa terbagi atas tiga jalur: *général*, *technologique* dan *professionnel*. Ketiga jalur ini menghasilkan tiga jenis *baccalauréat* yang berbeda: *baccalauréat général*, *baccalauréat technologique* dan *baccalauréat professionnel*. Untuk setiap jenis *baccalaureat* terbagi lagi atas beberapa seri. Setiap seri dari *baccalauréat* memiliki petunjuk operasi standar masing-masing untuk pelaksanaan UN. Tetapi, secara umum konsep UN-nya tetap sama.

UN SMA/SMK berlangsung dalam 2 tahap, yaitu: tahap I dan tahap II.

Ujian tahap I diikuti oleh semua peserta, yang terbagi atas:

1. Ujian wajib, pada akhir kelas 2 (*la première*)
2. Ujian akhir, pada akhir kelas 3 (*la terminale*)

Kriteria kelulusan:

1. Nilai rata-rata $> 10/20$ dinyatakan lulus
2. Nilai rata-rata $> 8/20$ dan $< 10/20$, harus mengikuti ujian II
3. Nilai rata-rata $< 8/20$ dinyatakan tidak lulus

Ujian tahap II disebut “ujian lisan ulangan”. Pada ujian ini dilakukan ujian lisan dalam 2 materi. Materi tersebut dipilih diantara materi-materi yang diujikan pada ujian tahap I, termasuk Bahasa Perancis yang diujikan sewaktu di kelas 2 (*la première*).

Nilai terbaik yang diperoleh (dalam ujian tahap I atau II) dipertimbangkan oleh juri. Peserta dinyatakan lulus jika setelah ujian tahap II memperoleh nilai rata-rata 10/20 atau lebih pada keseluruhan ujian.

Peserta yang tidak lulus setelah mengikuti ujian tahap II akan memperoleh *certificat de fin d'étude secondaires* (CFES) atau sertifikat tanda selesai pendidikan kedua.

Kepada peserta yang langsung lulus pada ujian tahap I, dapat diberikan predikat (*mention*):

1. *Assez bien* (AB), bila rata-rata besar sama dengan 12 dan kecil dari 14
2. *Bien* (B), bila rata-rata besar sama dengan 14 dan kecil dari 16
3. *Tres bien* (TB), bila rata-rata besar sama dengan 16

Predikat ini akan memberikan pengaruh yang signifikan pada penetapan penerimaan di perguruan tinggi. Pada umumnya, siswa dengan predikat B dan TB cenderung untuk masuk ke kelas persiapan (*préparatoire*) *grande école*.

UN untuk *baccalauréat* terdiri dari 9-10 mata ujian wajib, baik tertulis maupun lisan, ditambah dengan ujian fakultatif. Nilai yang diperoleh untuk tiap mata ujian dikalikan dengan koefisien untuk mata ujian tersebut. Untuk beberapa mata ujian, faktor perkalian ada yang ditambahkan dengan unsur lain, tergantung relevansi mata ujian tersebut dengan bidangnya. Nilai hasil kali dengan perkalian lalu

dijumlah dan dibagi dengan total koefisien pengali. Angka hasil bagi yang diperoleh tersebut disebut sebagai nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini yang menentukan kelulusan dan predikat kelulusan dari peserta.

Hitungan nilai dari ujian nasional untuk *baccalauréat* ini mirip dengan perhitungan indeks prestasi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia, tetapi bedanya pada perhitungan ini nilai yang digunakan adalah nilai murni yang didapat oleh peserta, bukan nilai indeks.

Mata ujian yang diuji untuk tiap seri *baccalauréat* berbeda-beda, begitu pula dengan koefisien dari tiap mata ujian. Sebuah mata ujian yang memiliki koefisien tinggi pada suatu seri belum tentu tinggi di seri yang lain. Mata ujian yang diuji juga diuji dengan bentuk ujian yang berbeda dan dengan waktu ujian yang berbeda pula. Secara umum bentuk ujian adalah tertulis/esai, atau lisan, tergantung mata ujiannya. Durasi terpanjang untuk satu mata ujian adalah 4 jam.

Pada ujian yang berbentuk tulisan/esai, jawaban dari peserta dikumpulkan lalu difotokopi dengan identitas yang sudah diubah menjadi kode. Fotokopi lembar jawaban peserta yang sudah tidak mengandung unsur identitas, kecuali kode, dikirim ke pemeriksa untuk dinilai. Setelah selesai dinilai, pemeriksa mengirimkan nilainya ke penyelenggara *bac*. Soal ujian dibuat oleh para guru SMA/SMK dan pemeriksa hasil ujian juga dari kalangan guru SMA/SMK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Perancis. Setelah nilai terkumpul dan valid, lalu diadakan sidang penetapan kelulusan. Pada sidang tersebut kalangan perguruan tinggi diundang untuk ikut menentukan dan menetapkan kelulusan peserta. Peserta yang lulus akan mendapatkan *baccalauréat* sesuai dengan seri yang diikutinya.

Pada setiap seri *baccalauréat*, mata ujian yang diuji disusun dalam bentuk tabel. Tabel tersebut berisi jenis mata ujian, materi/mata ujian, koefisien, bentuk ujian dan durasi ujian. Tabel mata ujian yang paling sederhana adalah tabel mata ujian pada seri *baccalauréat general* karena jenis mata ujian yang diuji relatif sedikit. Tabel mata ujian pada *baccalauréat technologique* dan *baccalauréat professionnelle* lebih banyak dan lebih kompleks. Walaupun tabelnya berbeda, tetapi sistem perhitungan dan penentuan kelulusannya tetap sama.

Tabel mata ujian untuk setiap seri pada *baccalauréat general* dapat pada Tabel 2.1, 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.1 Mata Ujian pada Seri *Baccalauréat littéraire (L)*

Ujian Wajib

Ujian dilaksanakan pada akhir kelas 2 (*la première*)

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
1. Bahasa dan sastra Perancis	3	tertulis	4 jam
2. Bahasa dan sastra Perancis	2	lisan	20 menit
3. Sains	2	tertulis	1 jam 30 menit
Ujian praktek	2	lisan	30 menit untuk grup (3 peserta)

Ujian Wajib

Ujian dilaksanakan pada akhir kelas 3 (*la terminale*)

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
4. Sastra	4	tertulis	2 jam
5. Sejarah dan Geografi	4	tertulis	4 jam
6. Bahasa Asing 1	4	tertulis dan lisan	3 jam dan 20 menit
7. Bahasa Asing 2	4	tertulis dan lisan	3 jam dan 20 menit
8. Budaya dalam bahasa asing	1	lisan	10 menit
9. Filsafat	7	tertulis	4 jam
10. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga	2	Ujian pada saat pendidikan	
11. Ujian spesialisasi (satu pilihan oleh peserta)			
Bahasa dan budaya kuno (Latin), atau	4	tertulis	3 jam
Bahasa dan budaya kuno (Yunani), atau	4	tertulis	3 jam

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
Pendalaman bahasa asing 1 atau 2, atau	4	lisan	30 menit
Bahasa asing 3, atau	4	lisan	20 menit
Matematika	4	tertulis	3 jam
Hukum dan tantangan besar dari dunia kontemporer, atau	4	lisan	20 menit
Senirupa, atau	3+3	tertulis dan praktek	3,5 jam dan 30 menit
Sinema-audiovisual, atau	3+3	tertulis dan lisan	3,5 jam dan 30 menit
Sejarah seni, atau	3+3	tertulis dan lisan	3,5 jam dan 30 menit
Musik, atau	3+3	tertulis dan lisan	3,5 jam dan 30 menit
Teater, atau	3+3	tertulis dan lisan	3,5 jam dan 30 menit
Tari, atau	3+3	tertulis dan lisan	3,5 jam dan 30 menit
Seni sirkus	3+3	tertulis dan lisan	3,5 jam dan 30 menit
Ujian lain			
Pendidikan jasmani dan olah raga (tambahan)	2	Ujian pada saat pendidikan	

Ujian Fakultatif

Peserta memilih maksimum 2 ujian fakultatif

Materi		Bentuk Ujian	Durasi
Bahasa asing 3 (asing atau daerah)		lisan atau tertulis (menurut bahasa)	20 menit atau 2 jam
Bahasa isyarat Perancis		lisan	20 menit
Bahasa dan budaya kuno: Latin		lisan	15 menit

Materi		Bentuk Ujian	Durasi
Bahasa dan budaya kuno: Yunani		lisan	15 menit
Pendidikan jasmani dan olah raga		Ujian pasa saat pendidikan	
Seni: senirupa ; sinema-audiovisual, tari, sejarah seni, teater,		lisan	30 menit
Musik		lisan	40 menit

Tabel 2.2 Mata Ujian pada Seri *baccalauréat économique et social* (ES)

Ujian Wajib

Ujian dilaksanakan pada akhir kelas 2 (*la première*)

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
1. Bahasa Perancis	2	tertulis	4 jam
2. Bahasa Perancis	2	lisan	20 menit
3. Sains	2	tertulis	1 jam 30 menit
Ujian praktek	2	lisan	30 menit

Ujian Wajib

Ujian dilaksanakan pada akhir kelas 3 (*la terminale*)

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
4. Sejarah dan Geografi	5	tertulis	4 jam
5. Matematika	5 atau 5+2	tertulis	3 jam
6. Sains Ekonomi dan sosial	7 atau 7+2	tertulis	4 jam atau 4 jam+1jam
7. Bahasa Asing 1	3	tertulis dan lisan	3 jam (tertulis)
8. Bahasa asing 2	2	tertulis dan lisan	2 jam (tertulis)
9. Filsafat	4	tertulis	4 jam

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
10. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga	2	Ujian pada saat pendidikan	
11. Ujian spesialisasi (satu pilihan oleh peserta)			
Pendalaman ekonomi, atau	2	tertulis	1 jam
Matematika, atau	2	tertulis	digabungkan dengan ujian no5
Sains sosial dan politik, atau	2	tertulis	1 jam
Bahasa asing 3, atau	4	lisan	20 menit
Matematika	4	tertulis	3 jam
Ujian lain			
Pendidikan jasmani dan olah raga (tambahan)	2	Ujian pada saat pendidikan	

Ujian Fakultatif

Peserta memilih maksimum 2 ujian fakultatif

Materi		Bentuk Ujian	Durasi
Bahasa asing 3 (asing atau daerah)		lisan atau tertulis (menurut bahasa)	20 menit atau 2 jam
Bahasa isyarat Perancis		lisan	20 menit
Bahasa dan budaya kuno: Latin		lisan	15 menit
Bahasa dan budaya kuno: Yunani		lisan	15 menit
Pendidikan jasmani dan olah raga		Ujian pada saat pendidikan	
Seni: senirupa; sinema-audiovisual, tari, sejarah seni, teater,		lisan	30 menit
Musik		lisan	40 menit

Tabel 2.3 Mata Ujian pada Seri *baccalauréat scientifique* (S)

Ujian Wajib

Ujian dilaksanakan pada akhir kelas 2 (*la première*)

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
1. Bahasa Perancis	2	tertulis	4 jam
2. Bahasa Perancis	2	lisan	20 menit
Ujian praktek	2	lisan	30 menit
3. Sejarah-Geografi	3	tertulis	4 jam

Ujian Wajib

Ujian dilaksanakan pada akhir kelas 3 (*la terminale*)

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
4. Matematika	7 atau 9	tertulis	4 jam
5. Fisika-Kimia	6 atau 8	tertulis dan praktek	3,5 jam + 1 jam
6. Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi	6 atau 8	tertulis dan praktek	3,5 jam + 1 jam
atau 6. Ekologi, Agronomi dan Teritori	7 atau 9	tertulis dan praktek	3,5 jam + 1,5 jam
7. Bahasa asing 1	3	tertulis dan lisan	3 jam (tertulis)
8. Bahasa asing 2	2	tertulis dan lisan	2 jam (tertulis)
9. Filsafat	3	tertulis	4 jam
10. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga	2	Ujian pada saat pendidikan	
11. Ujian spesialisasi (satu pilihan oleh peserta, pilihan ini fakultatif untuk peserta yang memilih Ilmu Rekayasa sebagai ujian no 6)			
Matematika, atau	Digabungkan dengan no 4		
Fisika-Kimia, atau	Digabungkan dengan no 5		

Materi	Koefisien	Bentuk Ujian	Durasi
Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi, atau	Digabungkan dengan no 6 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi		
Informatika dan sains digital, atau	2	tertulis	20 menit
Ekologi, Agronomi dan Teritori	2	tertulis	30 menit
Ujian lain			
Pendidikan jasmani dan olah raga (tambahan)	2	Ujian pada saat pendidikan	

Ujian Fakultatif

Peserta memilih maksimum 2 ujian fakultatif

Materi		Bentuk Ujian	Durasi
Sejarah-Geografi		lisan	20 menit
Bahasa asing 3 (asing atau daerah)		Lisan atau tertulis (menurut bahasa)	20 menit atau 2 jam
Bahasa isyarat Perancis		lisan	20 menit
Bahasa dan budaya kuno: Latin		lisan	15 menit
Bahasa dan budaya kuno: Yunani		lisan	15 menit
Pendidikan jasmani dan olah raga		Ujian pada saat pendidikan	
Seni: senirupa; sinema-audiovisual, tari, sejarah seni, teater,		lisan	30 menit
Musik		lisan	40 menit
Hipologi (pengetahuan tentang kuda) dan menunggang kuda		Ujian pada saat pendidikan	

Materi		Bentuk Ujian	Durasi
Praktek sosial dan budaya		Ujian pasa saat pendidikan	

2.4.2 Penyelenggaraan UN untuk baccalauréat.

Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk baccalauréat dipersiapkan jauh hari sebelum ujian tersebut dilaksanakan karena memerlukan persiapan dan pengorganisasian yang besar dan kompleks. Seluruh penyelenggaraan yang meliputi: pengawasan, penempatan peserta dalam kelas, penyimpanan soal, pengaturan lembar jawaban berikut kopinya serta kompilasi dan validasi nilai, menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional. Hampir seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Nasional, baik yang di pusat maupun yang di daerah, ikut serta pada penyelenggaraan ini.

Secara umum, pembagian tugas dan tanggung jawab pada penyelenggaraan ujian nasional baccalauréat adalah:

1. Administrasi nasional/pusat.

Menyusun dan menetapkan aturan serta rincian ujian yang akan dilaksanakan untuk tiap baccalauréat, antara lain: waktu ujian, koefisien dan lain lain.

- Menetapkan kalender/jadwal nasional pelaksanaan
- Mengatur alokasi beban dan distribusi untuk tiap wilayah (académie)
- Menetapkan dan mengalokasikan petugas dan dana untuk penyelenggaraan ujian

2. Inspektur/Pengawas

Para Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan Nasional adalah penanggung-jawab kualitas akademik dari baccalauréat. Mereka bertanggung jawab ke Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tataran akademik, Inspektur Jenderal akan diwakili oleh Inspektur Wilayah atau Inspektur Pengajaran Regional untuk baccalauréat general dan technologique, dan Inspektur Nasional

untuk baccalauréat professionnel, yang memainkan peran sangat penting pada saat ujian berlangsung. Para inspektur tersebut memberikan kontribusi pada penentuan subjek ujian serta menjadi juri pada rapat penetapan kelulusan.

3. Rektor Académie (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi)

Secara prinsip Rektor Académie bertanggung-jawab melakukan:

- Penggandaan, penyimpanan dan pendistribusian ujian ke pusat-pusat penyelenggara ujian.
- Pendataan peserta ujian.
- Penetapan kalender/jadwal untuk ujian lisan dan praktek di wilayahnya.
- Penunjukan dan penetapan pusat-pusat ujian dan peserta ujian yang diuji di pusat-pusat ujian tersebut.
- Pemilihan juri.
- Pemanggilan juri dan peserta.
- Penyerahan diploma.
- Pengelolaan sanggahan.
- Penyimpanan kopi jawaban dan berkas evaluasi individu (pada ujian oral dan praktek) selama 12 bulan setelah ujian.

4. Kepala Pusat Ujian

Kepala Pusat Ujian biasanya adalah Kepala Sekolah di mana sekolahnya digunakan sebagai tempat ujian. Kepala Pusat Ujian ini dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa wakil/staf.

Tanggung jawab dari Kepala Pusat Ujian ini antara lain:

- Menyimpan bahan ujian sehari sebelum ujian dilaksanakan.
- Menyiapkan ruangan dan penempatan peserta.
- Mengorganisasikan pengawasan ujian dengan para guru sebagai pengawas.
- Menerima dan memastikan peserta ujian melaksanakan ujiannya.
- Mendistribusikan soal dan membagikan kopi hasil jawaban kepada pemeriksa.
- Mengorganisasikan sekretariat dewan juri.
- Mengorganisasikan ujian ulangan.
- Meyerahkan hasil/nilai kepada peserta.

- Mengatur hal-hal lain yang belum diatur.

Persiapan pelaksanaan dan bahan ujian untuk baccalauréat sudah dilakukan kurang lebih setahun sebelumnya. Pembentukan tim untuk menyiapkan soal/bahan ujian dimulai pada bulan Juni setahun sebelum ujian tersebut berlangsung. Tim atau komisi pembuat soal beranggotakan para guru lycée terpilih, dan diketuai bersama oleh inspektur jenderal dari wakil dari universitas/perguruan tinggi. Tim tersebut bekerja secara konfidensial. Tim ini pula yang nantinya akan menetapkan kelulusan dari peserta.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada sistem pendidikan di Perancis, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah, pelaku penting dalam sistem tersebut adalah para guru. Oleh karena itu, guru menjadi perhatian yang utama dari pemerintah.

3

Guru

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa sistem pendidikan di Perancis bentuknya sentralisasi atau terpusat, begitu pula dengan pengorganisasian guru, pengadaan guru, penggajian dan pengembangan karirnya diatur secara nasional. Seluruh guru baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta adalah pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat secara periodik melakukan analisis kebutuhan guru untuk seluruh jenjang sekolah dan seluruh jurusan/bidang yang ada di Perancis. Data formasi kebutuhan guru tersebut diumumkan secara terbuka. Bagi para calon yang berminat menjadi guru dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi. Seleksi untuk menjadi calon guru bersifat nasional dan terjadwal serta tidak dibuka sepanjang tahun.

Seleksi untuk menjadi guru berlangsung dalam 2 tahap, yaitu: tahap pertama ujian kelayakan dan tahap kedua ujian penerimaan. Ujian kelayakan dilakukan pada awal proses persiapan menjadi calon guru, ujian ini dapat diikuti oleh para lulusan *licence* (sarjana) dari bidang yang relevan dengan formasinya. Sedangkan ujian penerimaan dilakukan setelah calon guru menyelesaikan pendidikan *master* yang dikhususkan untuk guru.

Proses pengadaan guru berlangsung dalam 2 tahun. Setelah calon guru lulus pada ujian kelayakan, maka calon guru tersebut memulai pendidikannya di tahun pertama master pada program studi yang

dikhususkan untuk pendidikan guru yaitu di *Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation* (ESPE)-Sekolah Tinggi Guru dan Pendidikan d/h *Instituts Universitaires de Formation des Maîtres*(IUFM)-Institut Universitas Persiapan Guru. Selama masa pendidikannya di ESPE para calon guru tersebut mendapat beasiswa.

Pada tahun pertama *master*, para calon guru mengikuti pendidikan untuk mendapatkan *master 1 Premier degré Professeur des écoles* atau gelar pertama guru. Program pada *master 1* ini masih bersifat umum. Selama mengikuti *master 1*, para calon guru juga mengikuti persiapan *Concours de recrutement de professeur des écoles* -CRPE (Ujian Penerimaan Guru). Apabila calon guru lulus dari *master 1*, maka yang bersangkutan melanjutkan kuliahnya di *master 2* (*master* tahun kedua) di jurusan yang sesuai dengan pilihannya.

Untuk menjadi guru TK dan SD, tidak ada bidang khusus setelah *master 1*, sedangkan untuk menjadi guru SMP, SMA dan SMK pendalaman masing-masing bidang studi mulai dilakukan di *master 2*. Pada pendidikan *master 2*, selain memperdalam materi, para calon guru sudah mulai mengikuti magang latihan mengajar. Mata kuliah yang merupakan persiapan CRPE tetap diberikan pada *master 2* sebagai persiapan bagi calon guru mengikuti ujian penerimaan calon guru tersebut.

Setelah para calon guru lulus dari *master2* ESPE, selanjutnya mereka mengikuti *Concours de recrutement de professeur des écoles* -CRPE atau Ujian Penerimaan Guru. Bagi para calon guru yang lulus CRPE, selanjutnya diangkat sebagai guru tetap dan ditempatkan sesuai formasi pilihannya, atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Penempatan ini juga bersifat nasional, para guru akan ditempatkan dimana saja sesuai dengan kondisi pada saat penempatan dilakukan. Guru yang baru lulus CRPE disebut guru muda.

Selain mekanisme di atas, ada juga mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh calon guru yang sudah memiliki ijazah *master* (M2). Mula-mula kandidat ini mengikuti ujian kelayakan. Setelah lulus ujian kelayakan, kandidat mengikuti pendidikan profesional di ESPE sekaligus mengikuti persiapan CRPE. Selama masa pendidikan, kandidat memiliki

status kontrak kerja waktu paruh (*part time*) dan menerima gaji paruh waktu. Setelah selesai pendidikan profesional di ESPE, kandidat dapat mengikuti CRPE atau Ujian Penerimaan Guru. Apabila kandidat lulus dari CRPE, maka yang bersangkutan menjadi guru muda.

Para guru muda adalah guru tetap dengan status sebagai pegawai negeri/pegawai pusat. Setelah ditempatkan di sekolahnya, pengawasan, penilaian dan pembinaan karir dari guru muda tersebut diserahkan kepada inspektur yang ada di *académie* dimana sekolah berada. Setelah dinilai mampu untuk mandiri, maka inspektur dapat memberikan promosi kepada guru muda untuk menjadi guru penuh.

Guru-guru di Perancis secara rutin membuat perencanaan proses belajar mengajar di kelas dan membuat laporan hasil pekerjaannya. Mereka datang lebih awal dari siswa dan pulang lebih akhir. Laporan yang dibuat oleh para guru diperiksa oleh inspektornya. Satu inspektur membawahi beberapa guru dari sekolah yang berbeda tetapi pada *académie* yang sama. Apabila diperlukan, inspektur dapat mengusulkan guru untuk mengikuti pelatihan yang sesuai agar kompetensi guru tersebut dapat ditingkatkan. Selain diusulkan oleh inspektur, para guru juga dapat secara pro aktif mengajukan usulan kepada inspektur agar mereka dapat mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya. Secara akademik dan administratif, para guru bertanggung-jawab kepada inspektur.

Selain memiliki kompetensi mengajar, menerjemahkan kurikulum menjadi rencana aksi pada proses pembelajaran, dan membuat laporan evaluasi hasil belajar, para guru di Perancis juga memiliki kompetensi membuat soal dan memeriksa jawaban yang terukur. Pada ujian nasional, brevet untuk SMP dan *baccalauréat* untuk SMA, soal ujian dibuat oleh guru dan jawaban para siswa juga diperiksa oleh guru. Hal ini dapat dilakukan karena para guru telah memiliki kompetensi tersebut secara terukur.

Kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh para guru di Perancis tidak statis, tapi dinamis. Mereka terus menerus belajar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Bagi para guru yang tidak melakukan perubahan atau peningkatan pada kinerjanya, akan terdeteksi oleh inspektur. Secara

berkala para guru juga mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh inspektur atau dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui Rektor *Académie*. Mekanisme ini sekaligus merupakan mekanisme penjaminan mutu guru pada sistem pendidikan di Perancis.

4

Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu pada sistem pendidikan di Perancis dilakukan oleh beberapa lembaga yang berbeda, baik pada tingkatan sekolah maupun pada tingkatan wilayah. Sistem penjaminan mutu tidak dilakukan oleh lembaga eksternal di luar sistem pendidikan, karena sistem yang diterapkan di seluruh sekolah di Perancis adalah sama. Lembaga-lembaga eksternal yang melakukan penilaian terhadap kinerja sistem pendidikan Perancis adalah organisasi-organisasi regional atau dunia yang bergerak di bidang pendidikan, salah satunya *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Rekomendasi yang disampaikan oleh OECD menjadi rujukan bagi Kementerian Pendidikan Nasional Perancis untuk mengevaluasi dan merevisi sistem pendidikan nasional di Perancis.

Untuk mengawasi jalannya implementasi sistem pendidikan di sekolah, ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk mengawasinya.

1. Pada tingkat sekolah.

- Untuk TK dan SD
 - Dewan guru, yang bertanggung-jawab untuk menjamin mutu pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar.
 - Dewan *maîtres de cycle*, yang bertanggung-jawab menjamin integrasi pendidikan antar jenjang (TK dan SD) serta antar *cycle* atau siklus berjalan dengan baik.
 - Dewan sekolah, yang menjamin semua program-program sekolah yang telah disusun, terutama ekstrakurikuler, dapat

berjalan dengan baik.

- Untuk *collège* (SMP) dan *lycée* (SMA/SMK)
 - Dewan kelas, yang menjamin mutu dan kelancaran aktifitas akademik terutama pekerjaan mandiri dari siswa.
 - Dewan administrasi, yang menjamin lancarnya aktifitas administrasi dan keuangan di sekolah.
 - Dewan disiplin sekolah, yang menjamin penindakan yang tepat untuk tiap pelanggaran disiplin yang terjadi di sekolah.
 - Komisi kesehatan dan keamanan, khusus di SMK, yang menjamin pengawasan atas aspek kesehatan dan keamanan di laboratorium dan bengkel.
- 2. Pada tingkat *départementale* (daerah tingkat II)
Dewan pendidikan nasional daerah tingkat II, yang mengawasi layanan umum yang terkait dengan aktifitas pendidikan di wilayah tingkat II
- 3. Pada tingkat *régionale* dan *académique* (daerah tingkat I)
Dewan pendidikan nasional daerah tingkat I, yang mengawasi layanan umum yang terkait dengan aktifitas pendidikan di wilayah tingkat I

Di tingkat nasional, terdapat Direktorat Evaluasi, Prospektif dan Prestasi yang melakukan evaluasi serta analisis terhadap sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

5

Penutup

Pada tulisan ini sistem pendidikan yang dipaparkan hanya pada sistem pendidikan dasar dan menengah. Sistem ini adalah sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional Perancis. Sistem pendidikan tinggi di Perancis dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Sistem pendidikan tinggi di Perancis berbeda dengan sistem pendidikan dasar dan menengahnya, karena perguruan tinggi di Perancis dikelola lebih otonom, dan mengadopsi norma-norma yang berlaku secara internasional.

Sistem pendidikan dasar dan menengah di Perancis sangat terpusat dan sentralistik. Hal tersebut memiliki keunggulan sekaligus juga punya kelemahan. Salah satu keunggulan yang dapat kita amati adalah: mutu pendidikan dan hasil-hasil pendidikan dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya. Mutu dan hasil pendidikan di sekolah Perancis, di manapun sekolah itu berada, akan berada pada nilai yang relatif sama. Apabila ada sekolah yang menunjukkan tendensi menurun, maka pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya.

Keseragaman pengelolaan pendidikan di seluruh Perancis memberikan kemudahan bagi pelaku pendidikan, baik guru maupun murid, apabila harus berpindah tempat karena berbagai sebab. Keseragaman tersebut tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang ada di Perancis saja, tetapi berlaku juga untuk sekolah-sekolah Perancis yang ada di seluruh dunia.

Hal lain yang menarik untuk disimak, bahwa sistem pendidikan di Perancis ini sudah dimulai sejak 200 tahun lebih, dan sampai sekarang masih dipertahankan. Sistem tersebut tentu saja mengalami perubahan, tetapi perubahan yang dilakukan ada pada tataran substansi pembelajaran, bukan pada sistemnya.

DAFTAR REFERENSI

1. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Executive Summary
2. Malaysia Education Blueprint 2013-2025 (Preschool to P o s t - Secondary School). Putra Jaya: Percetakan Kementerian Pendidikan.
3. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan
4. Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putra Jaya: Percetakan Kementerian Pendidikan.
5. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Institut Pendidikan Guru Malaysia. www.moe.gov.my.
6. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Bahagian Pendidikan Guru Malaysia. www.moe.gov.my.
7. Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. www.moe.gov.my.
8. Marzuki, Sharil. 2008. Dasar Kewangan Pendidikan. Kuala Lumpur: BS Print (M) Sdn. Bhd.

-o0o-

XIV

Sistem Pendidikan di Singapura



Sumber foto kota Singapura:

Oleh:
Prof. Dr. Ismunandar
Atase Pendidikan di Singapura

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Singapura

Sejak merdeka di tahun 1965, Singapura telah berkembang begitu pesat menjadi negara maju hingga hari ini. Selama beberapa tahun terakhir Singapura teridentifikasi sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Prestasi siswa-siswi sekolah Singapura menempati peringkat atas pada berbagai kategori penilaian, termasuk matematika, sains, dan bahasa. Selain itu, dua universitas di Singapura yaitu National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) berhasil masuk dalam peringkat 50 universitas terbaik di dunia.

Sistem pendidikan di Singapura diatur secara sistematis oleh *Ministry of Education* (MOE), di mana MOE melakukan pengawasan dan pengaturan dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk institusi, kurikulum sekolah, dan rekrutmen guru. Pada umumnya institusi pendidikan di Singapura dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu institusi negeri (*public*), institusi swasta (*private*), dan *special schools* bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Untuk menjamin hak warga negara Singapura untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, pemerintah membebaskan biaya sekolah *primary* dan memberlakukan skema biaya pendidikan murah bagi warga negara Singapura di tingkat *secondary* sampai *university*.

Secara umum, jenjang pendidikan di Singapura dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu *pre-school* (4-6 tahun), *primary* (7-12 tahun),

secondary (13-16 tahun), *post-secondary* (17-19 tahun), dan *university* (20-23 tahun). Pendidikan di tingkat *primary* memiliki tingkatan dari *Primary 1* sampai *Primary 6* dan bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang sains, matematika, bahasa Inggris, bahasa ibu dan seni. Pada akhir *Primary 6*, siswa akan menjalani ujian akhir yang dinamakan *Primary School Leaving Examination* (PSLE).

Setelah menyelesaikan pendidikan *primary*, siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat *secondary* di mana berdasarkan hasil PSLE, siswa akan ditempatkan dalam salah satu jalur antara *Express*, *Normal (Academic)*, dan *Normal (Technical)*. Ketiga jalur tersebut sama-sama memiliki tingkatan *Secondary 1* sampai *Secondary 4* tetapi dengan program lanjutan dan ujian akhir yang berbeda. Siswa pada jalur *Express* melanjutkan pendidikan melalui *Integrated Programme* (IP) yang merupakan program terintegrasi antara *Secondary School* dengan *Junior College* (JC) dengan tujuan akhir *GCE Advanced Level* ('A' Level) atau gelar *Diploma*. Siswa jalur *Express* yang tidak mengikuti *Integrated Programme* mengikuti ujian *GCE Ordinary Level* ('O' Level) dan melanjutkan studi ke *Junior College* (JC). Jalur *Normal (Academic)* mengarahkan siswa untuk mengikuti ujian *GCE Normal Level* ('N' Level) lalu melanjutkan ke politeknik atau melanjutkan satu tahun sebelum mengikuti ujian *GCE 'O' Level*. Jalur *Normal (Technical)* mengarahkan siswa untuk mengikuti ujian *GCE Normal Level* ('N' Level) lalu melanjutkan pendidikan ke *Institute of Technical Education* (ITE).

Kualitas pendidikan di Singapura ditunjang oleh keberadaan divisi-divisi khusus di dalam MOE yang berperan dalam penjaminan mutu sekolah dan guru, di antaranya *Academy of Singapore Teachers*, *Schools Division*, dan *Internal Audit Branch*. Di samping itu, MOE mengurus secara langsung rekrutmen guru di tingkat *primary*, *secondary*, dan *Junior College*. MOE membagi kandidat guru berdasarkan latar belakang pendidikan ke dalam 3 kelompok, yaitu lulusan *S1 (degree holders)*, *'A' Level/Diploma holders*, dan *'O' Level holders*. Kandidat guru yang diterima kemudian ditempatkan di sebuah sekolah untuk mengajar selama satu tahun lalu melanjutkan pendidikan di *National Institute of Education* untuk memperoleh kualifikasi mengajar resmi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	703
DAFTAR ISI	705
1. Latar Belakang	707
2. Sistem Pendidikan di Singapura	711
3. Kurikulum Nasional di Singapura	725
4. Sistem Ujian dan Kualifikasi Pendidikan di Singapura	747
5. Sistem Penjaminan Kualitas	759
DAFTAR REFERENSI	779
GLOSSARY	787

1

Latar Belakang

1.1. Sejarah Singapura

Setelah berpisah dari Malaysia dan menjadi negara yang merdeka di tahun 1965, Singapura menghadapi tantangan untuk menjaga keberlangsungannya dalam ekonomi dan politik. Salah satu prioritas utama dari pemerintah Singapura adalah bagaimana mengembangkan ekonomi industri yang dianggap sebagai kunci untuk keberlangsungan dan kemajuan negara. Hal ini tidak mudah mengingat di masa kolonialisme, struktur ekonomi yang ada tidak seimbang dan lebih bertumpu pada fungsi Singapura sebagai jalur perdagangan [1].

Survival-Driven Education

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Singapura memfokuskan pembangunan Singapura pada keterkaitan dan kesinambungan antara kualitas pendidikan dan pembangunan ekonomi, yang disebut sebagai *survival-driven education*. Dengan strategi ini, berbeda dengan pendidikan yang pada umumnya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik dan kesukuan, pemerintah Singapura bermaksud mengembangkan keahlian baru serta etos kerja yang dapat mendukung strategi ekonomi nasional. Meski berfokus pada strategi ekonomi, sistem pendidikan Singapura juga ditujukan untuk membangun identitas dan persatuan bangsa. Pemerintah mengakui pentingnya pendidikan wajib selama 6 tahun yang dimulai sejak usia

6 tahun tanpa diskriminasi ras, bahasa, jenis kelamin, status sosial dan latar belakang ekonomi.

Singapura memiliki kebijakan dwibahasa yang mewajibkan pelajaran bahasa kedua di sekolah dasar. Selain bahasa Inggris, pelajar Singapura diwajibkan mempelajari bahasa ibu (*mother tongue*) masing-masing agar tidak melupakan asal-usul budayanya. Bahasa ibu ini meliputi bahasa Cina untuk ras Cina, bahasa Melayu untuk ras Melayu, dan bahasa Tamil untuk ras India. Selain strategi di atas, Singapura juga terus mengembangkan pendidikan teknik dan keahlian profesi. Sejak dibentuknya *Ministry of Science and Technology* pada April 1968, diperlukan restrukturisasi sistem pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Efficiency-Driven Education

Di akhir 1970, perekonomian Singapura mulai berkembang. Setelah berfokus pada industri padat karya, Singapura mengubah strateginya dan bertransisi menjadi negara dengan ekonomi padat modal. Dimulai sekitar tahun 1978, Singapura dengan paradigma pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang efektif memilih fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pada Januari 1979 diperkenalkanlah *New Education System* (NES) yang menyediakan beragam jalur sesuai kemampuan masing-masing siswa. Di awal 1980-an ciri-ciri kunci *efficiency-driven education* telah nampak, seperti keberadaan kurikulum nasional dengan penekanan pada dwibahasa, pendidikan moral dan kewarganegaraan, sains, matematika, dan pendidikan teknik; pemantauan dengan penilaian teratur oleh divisi *Research and Testing* dari *Ministry of Education*; materi kurikulum yang memenuhi silabus sekolah dan kurikulum yang dibuat oleh *Curriculum Development Institute of Singapore*; serta jalur yang jelas untuk universitas, politeknik, serta institut vokasi.

Ability-Driven Education

Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, Singapura menyambut paradigma baru menuju pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan melalui *ability-driven education*. Pada Juni 1997, paradigma ini dimanifestasikan dalam sebuah visi, yakni “*Thinking*

Schools, Learning Nation". Pemahaman bahwa dengan minimnya sumber daya alam, keberlangsungan negara-kota ini bergantung pada kemampuan penduduknya untuk terus belajar telah mendasari visi ini. Struktur pendidikan yang baru pun dikembangkan untuk memfasilitasi warga Singapura untuk terus menggali ilmu pengetahuan, keahlian, berpikir kreatif, mengembangkan jiwa inovasi, serta kemahiran menggunakan ICT. Hingga kini sistem pendidikan Singapura diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan dua universitasnya, yakni National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU), menempati peringkat 50 besar di dunia pada tahun 2012 [2].

1.2.Reputasi Pendidikan di Singapura

Sistem pendidikan Singapura menempati peringkat 5 di tahun 2012 dan peringkat 3 di tahun 2014 menurut studi *The Learning Curve* yang dilakukan oleh lembaga Pearson [3]. Singapura teridentifikasi sebagai salah satu sistem sekolah dengan kinerja terbaik di dunia oleh laporan dari McKinsey yang dipublikasikan di tahun 2010. Siswa Singapura juga menempati peringkat atas pada berbagai kategori di berbagai penilaian, seperti kategori "*Reading, Mathematics and Science*" pada *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2009, kategori "*Mathematics and Science*" pada *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) 2007, serta kategori "*Literacy*" pada *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) 2006 [4]. Pada *World Economic Forum Global Competitiveness Report 2013-2014*, Singapura menempati peringkat 3 dan untuk kategori "*Quality of the educational system*" pada *level primary education* dan *higher education*. Kolaborasi R&D antara universitas dengan industri di Singapura juga menempati peringkat 4 [5].

2

Sistem Pendidikan di Singapura

2.1 Institusi Pendidikan

Pendidikan di Singapura diatur oleh *Ministry of Education* (MOE) sebagai lembaga sentral [6]. Dalam formulasi dan implementasi kebijakan terkait pendidikan di Singapura, MOE merupakan lembaga sentral yang memegang kendali administrasi serta pengembangan *primary school*, *secondary school*, dan *junior colleges* baik yang dimiliki oleh pemerintah (*government school*) maupun yang disubsidi oleh pemerintah (*government-aided school*). Selain itu MOE juga mengawasi sekolah swasta (*private school*).

Kementerian ini dalam struktur organisasinya [7] memiliki tiga sayap, yakni *Professional*, *Policy*, dan *Services*. Direktorat Jenderal *Professional Wing* membawahi beberapa deputi dan direktur, yakni Deputi *Curriculum* yang mengurus perencanaan dan pengembangan kurikulum, Deputi *Schools* yang bertugas sebagai direktur dari sekolah-sekolah, Deputi *Professional Development* yang membawahi *Academy of Singapore Teachers*, Direktorat *Educational Technology*, dan Direktorat *Education Services*. Pada sayap kebijakan (*Policy Wing*) terdapat divisi *Communications and Engagement Group*, *Higher Education*, dan *Planning*. Sementara sayap pelayanan (*Services Wing*) memiliki beberapa divisi, yaitu *Finance & Development*, *Human Resource*, *Legal Services*, *School Planning & Placement*, dan *Internal Audit*.

Selain itu, terdapat sepuluh lembaga yang diatur oleh statuta [8] dan

berada di bawah MOE, yaitu *Council for Private Education*, *Institute of Southeast Asian Studies*, *Institute of Technical Education* (ITE), *Science Centre Singapore*, *Singapore Examinations and Assessment Board*, dan 5 politeknik. *Council for Private Education* (CPE) bertugas untuk mengatur pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta [9]. Selain berperan sebagai regulator *Private Education Institutions*, CPE juga memfasilitasi upaya pengembangan kapabilitas untuk meningkatkan standar industri pendidikan swasta. *Singapore Examinations and Assessment Board* (SEAB) merupakan sebuah lembaga yang didirikan pada 1 April 2014 untuk mengembangkan dan menyelenggarakan ujian nasional di Singapura serta menyediakan produk dan layanan ujian dan penilaian lainnya [10].

Secara umum, institusi pendidikan di Singapura bisa dibagi menjadi institusi negeri (*public*), institusi swasta (*private*), dan *special schools*. Informasi mengenai masing-masing lembaga diberikan di bawah ini.

2.1.1. *Public Institutions*

Pemerintah menyediakan lembaga pendidikan dari tingkat *primary* sampai *university*. Struktur dasar dari sistem pendidikan di Singapura akan dijelaskan pada bagian lain.

2.1.2. *Private Institutions*

Lembaga pendidikan swasta, mencakup lembaga pendidikan dari tingkat *pre-primary* sampai *university*, diatur oleh *Council for Private Education* (CPE). Lembaga pendidikan swasta ini dapat berupa sekolah internasional dengan sistem asing, *Islamic Religious Schools*, *Privately Funded Schools*, maupun *Specialised Independent Schools*. Selain itu, di tingkat *Post-Secondary* atau Universitas juga terdapat beberapa lembaga swasta, termasuk universitas asing yang mendirikan kampus di Singapura.

Sekolah swasta dapat memberikan sertifikat kelulusan ujian atau penilaian internal maupun sertifikat ketuntasan studi. Sertifikat ini umumnya dipandang sebagai kinerja awal siswa sebelum mengambil

ujian eksternal seperti *Singapore-Cambridge General Certificate of Education* (GCE), *London Chamber of Commerce & Industry* (LCCI), *National Computing Centre* (NCC), *City & Guilds* (C&G), dan lain-lain.

2.1.3. *Special Schools*

Siswa dengan kebutuhan khusus difasilitasi oleh *Special School* dengan kurikulum yang dapat berupa kurikulum pada umumnya dengan program khusus, sesuai dengan kebutuhan siswa, maupun kurikulum pendidikan khusus. Peserta didik juga menerima sokongan dari paramedis profesional, seperti psikolog, terapis bicara, terapis okupasi, fisioterapis, dan juga pekerja sosial. Sekolah yang dikhususkan bagi siswa berkebutuhan khusus ini juga dapat mengajukan kebutuhan teknologi bantu (*assistive technology*) bagi siswanya berupa alat bantu visual dan pendengaran, serta alat bantu visual dan fisik kepada MOE.

Per Januari 2010, terdapat 20 *Special Education* (SPED) *School* yang dijalankan oleh 13 *Voluntary Welfare Organization* (VWO) yang memperoleh pendanaan dari MOE dan *National Council of Social Service* (NCSS) [11]. *Ministry of Education* bersama dengan *National Council of Social Service* juga menyediakan skema bantuan finansial bagi warga negara Singapura yang terdaftar di *Special Education* (SPED) *School* yang dibiayai oleh MOE. Keuntungan yang diperoleh bagi yang memenuhi persyaratan adalah dapat menikmati keuntungan berupa gratisnya biaya sekolah, buku paket dan seragam, serta 75-100% keringanan biaya ujian dan sarapan pagi untuk 200 hari sekolah. Skema bantuan finansial dalam program *Edusave* juga dapat diperoleh siswa program *Special Education School*.

2.1.4. *Supporting Institutions*

Di Singapura terdapat pula institusi-institusi pendidikan pendukung, seperti *National Research Foundation*, *Economic Development Board*, dan *National Library Board*. Gambaran umum mengenai ketiga institusi di atas dijelaskan sebagai berikut.

National Research Foundation

National Research Foundation (NRF) merupakan sebuah departemen di bawah *Prime Minister's Office* (PMO) [12]. Lembaga ini menentukan arah riset dan pengembangan (R&D) dengan mengembangkan kebijakan, rencana, dan strategi dalam bidang riset, inovasi, dan usaha. Lembaga ini mendanai inisiatif strategis dan membangun kapabilitas riset dan pengembangan dengan menarik orang-orang berbakat baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga ini juga mengkoordinasikan agenda riset dari berbagai lembaga seperti lembaga-lembaga penelitian dan universitas untuk mentransformasi Singapura menjadi negara dengan *knowledge-intensive, innovative, dan entrepreneurial economy*.

Economic Development Board

Lembaga ini merupakan lembaga utama pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk meningkatkan posisi Singapura sebagai pusat bisnis global. Misi dari lembaga ini ialah untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan kesempatan usaha dan kesempatan kerja yang baik. *Economic Development Board* ingin melebarkan proposisi nilai Singapura kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan dan memperdalam aktivitas strategis di Singapura guna menggerakkan sasaran bisnis, inovasi, dan sumber daya manusia di tingkat Asia maupun dunia [13].

National Library Board

National Library Board (NLB) mengelola *National Library*, 25 *Public Library*, dan *National Archives* [14]. NLB mengkampanyekan gemar membaca dan melek informasi melalui penyediaan perpustakaan dan layanan informasi yang terpercaya, aksesibel, dan terhubung melalui *National Library* dan jaringan banyak *Public Library* yang komprehensif. Selain itu, lembaga bernama *National Archives of Singapore* mengawasi koleksi, perawatan, dan pengelolaan dari rekaman arsip publik dan swasta, termasuk di dalamnya data-data pemerintahan, memoir pribadi, peta, foto, serta material *audio-visual*, dan wawancara oral.

2.2 Struktur Dasar

Secara umum jenjang pendidikan di Singapura dapat dibagi menjadi beberapa tahap [15]:

1. *Pre-school* (usia 4-6 Tahun)
2. *Primary* (usia 7-12 tahun)
3. *Secondary* (usia 13-16 tahun)
4. *Post-Secondary* (usia 17-19 tahun)
5. *University* (usia 20-23 tahun)

Buku ini akan membahas kelima tahap di atas dengan berfokus pada jenjang *primary* dan *secondary*. Diagram struktur sistem pendidikan Singapura dapat dilihat di Gambar 2.1. Informasi lebih lanjut mengenai masing-masing tahap pendidikan dijelaskan di bagian 2.2.1 sampai 2.2.5 sebagai berikut.

2.2.1. *Pre-school Education*

Taman kanak-kanak (*Kindergarten*) menyediakan program pendidikan terstruktur selama tiga tahun untuk anak berusia 4-6 tahun yang terdiri dari beberapa tahap/kelas: *nursery*, *kindergarten 1* dan *kindergarten 2*. Pusat penitipan anak (*childcare centre*) juga menawarkan program taman kanak-kanak. Jika *kindergarten* terdaftar pada *Ministry of Education*, *childcare centre* terdaftar pada *Ministry of Community Development, Youth and Sports*.

2.2.2. *Primary Education*

Sekolah dasar di Singapura terdiri dari empat tahun *foundation stage* (kelas *Primary 1-4*) dan dua tahun *orientation stage* (kelas *Primary 5-6*). Berdasarkan *Compulsory Education Act 2000* [16], Singapura menerapkan wajib belajar hingga sekolah dasar (*primary school*). Di akhir kelas 6, seluruh siswa akan menjalani penilaian kemampuan akademik melalui *Primary School Leaving Examination* (PSLE). Hasil dari PSLE ini akan menentukan ke *Secondary School* mana siswa tersebut dapat melanjutkan studinya. Selain dengan hasil PSLE, siswa juga dapat menggunakan jalur prestasi dan bakat dalam berbagai bidang (termasuk

Seni dan Olahraga) untuk melalui *Direct School Admission*.

2.2.3. Secondary Education

Pada tahapan ini, siswa mendapatkan peluang untuk memilih jalur *Express*, Normal (*Academic*) atau Normal (*Technical*). Setiap program menawarkan kemampuan dan minat akademik yang berbeda-beda. Siswa dapat berpindah dari satu jalur ke yang lain jika memenuhi kurikulum yang ditawarkan pada masing-masing program. Siswa pada program *Express* akan menjalani ujian *Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level)* atau *GCE 'O' Level Examination* di akhir kelas *Secondary 4*. Sementara siswa pada program Normal (*Academic*) di akhir kelas *Secondary 4* dapat mengambil ujian *GCE 'N' Level* atau melanjutkan studi hingga tahun kelima untuk mengambil *GCE 'O' Level* jika memenuhi syarat. Bagi siswa program Normal (*Academic*) yang memenuhi persyaratan akademik dapat melanjutkan pada *Polytechnic Foundation Programme* atau *Institute of Technical Education 'ITE'*. Sedangkan siswa program Normal (*Technical*), dengan kurikulum yang lebih berorientasi praktis, dapat berpindah ke *Secondary 4 Normal (Academic)* atau melanjutkan ke *Institute of Technical Education* jika memenuhi persyaratan.

- *Integrated Programme*
Beberapa sekolah menawarkan *Integrated Programme* yang dirancang selama 6 tahun untuk siswa dengan kemampuan akademik tinggi dengan pendekatan belajar yang lebih independen. Dengan program ini siswa *Secondary School* dapat melanjutkan ke program *Pre-University* tanpa perlu mengambil ujian *GCE 'O' level*. Di akhir tahun keenam siswa akan melangsungkan ujian untuk tingkat *Pre-University*.
- *Specialised Education*
Siswa dengan bakat khusus di bidang seperti matematika, sains, seni dan olah raga dapat mengasahnya pada *Specialised Independent School* (seperti: NUS High School of Mathematics and Science, Singapore Sports School, School of the Arts, dan School of Science and Technology) dan *Specialised Schools* (Seperti: NorthLight

School, Assumption Pathway School, dan Crest Secondary School). Melalui proses pendaftaran secara langsung, *Junior College* dan *Polytechnic* memiliki fleksibilitas dalam menyeleksi siswanya berdasarkan ragam bakat untuk memfasilitasi siswa dengan talenta yang tidak dapat diukur dengan ujian standar.

- **Private Education**

Terdapat sekolah swasta yang menawarkan kurikulumnya sendiri beserta kualifikasi alternatif. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta diatur oleh *Council for Private Education* (CPE).

2.2.4. *Post-Secondary Education*

- *Pre-University Education*

Pendidikan di tingkat pre-university dirancang untuk siswa yang lebih memilih untuk melanjutkan studi di universitas. Setelah menjalani masa studi selama 2-3 tahun, siswa akan menjalani Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level) Examination atau yang disingkat sebagai GCE 'A'-Level.

- *Institute of Technical Education*

ITE (*Institute of Technical Education*) ditujukan untuk membekali siswa dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di berbagai sektor industri. *Institute of Technical Education* menyediakan program pendidikan di malam hari atau akhir minggu atau paruh waktu dengan durasi studi yang berbeda-beda, termasuk seminar dan pendidikan lanjutan bagi orang dewasa yang sudah bekerja.

Institute of Technical Education menawarkan beragam kurikulum yang luas dan multidisipliner, mulai dari *engineering*, *technical*, hingga bisnis dan jasa. Siswa juga dapat memilih untuk mengambil sertifikasi berupa *ITE Skill Certificate* (ISC), *National ITE Certificate* (NITEC), atau *Higher NITEC* pada bidang industri seperti aeronautika, otomasi, elektronika, kelautan, fabrikasi, dan *precision engineering*. Pelatihan dengan praktek secara langsung merupakan hal yang ditekankan pada proses pendidikan di ITE.

- *Polytechnic*

Polytechnic menyediakan pelatihan berorientasi praktek yang

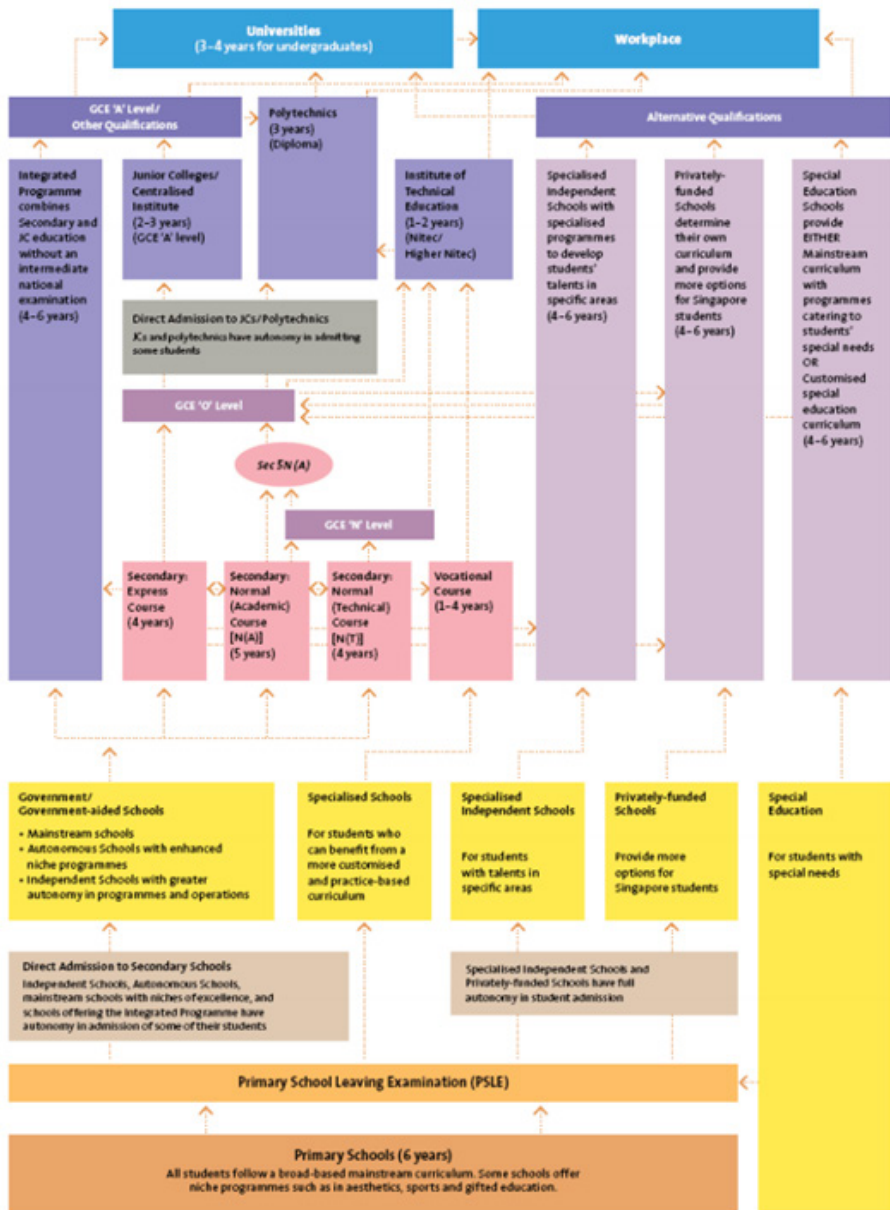
berkualitas untuk membekali siswa dengan keahlian untuk berkontribusi bagi perkembangan teknologi dan ekonomi di Singapura. Siswa dapat memilih untuk mengambil diploma pada berbagai disiplin seperti bisnis, kimia, dan bio-sains, komunikasi, desain, media digital, teknik, dan manufaktur. Selain itu, *Polytechnic* juga menyediakan pendidikan lanjutan dalam bentuk *Advanced Diploma* dan *Specialist Diploma*. Saat ini terdapat lima politeknik di Singapura, yakni *Nanyang Polytechnic*, *Ngee Ann Polytechnic*, *Republic Polytechnic*, *Singapore Polytechnic*, dan *Temasek Polytechnic*.

- *Art Institution*

Beberapa institut seni di Singapura yang menyelenggarakan program diploma, sarjana, hingga pascasarjana antara lain: *Nanyang Academy of Fine Arts* (NAFA), *LASALLE College of the Arts*, dan *Singapore Raffles Music College*. Institut-institut tersebut dalam menyelenggarakan programnya juga bekerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri.

2.2.5. *University*

Pada jenjang universitas, *National University of Singapore* (NUS), *Nanyang Technological University* (NTU), *Singapore Management University* (SMU), dan *Singapore University of Technology and Design* (SUTD), merupakan empat universitas lokal yang didanai pemerintah. Selain itu, *SIM University* menawarkan program paruh waktu yang disubsidi pemerintah bagi orang dewasa dan pekerja profesional. SIT (*Singapore Institute of Technology*) merupakan universitas otonom kelima di Singapura yang dirancang untuk memfasilitasi lulusan *Polytechnic* yang ingin memperoleh gelar sarjana. Institusi ini didirikan pada tahun 2009 dan bekerja sama dengan berbagai universitas asing seperti *Culinary Institute of America*, *Digipen Institute of Technology*, *Glasgow School of Art*, *Newcastle University*, *Technical University of Munich*, *University of Glasgow*, *University of Manchester*, *University of Nevada, Las Vegas*, dan *Wheelock College*.



Gambar 2.1 Struktur sistem pendidikan Singapura [6]

2.3 Skema Dana Pendidikan

Meskipun biaya pendidikan di Singapura cukup mahal, pemerintah Singapura menyediakan berbagai skema dana bantuan untuk memastikan warga negaranya dapat memperoleh kesempatan terbaik dalam hal pendidikan. Biaya pendidikan di tingkat *primary* sampai

university diberikan di gambar 2.2 dan 2.3. Berikut adalah beberapa skema bantuan dana pendidikan yang berlaku di Singapura.

School Fees and Miscellaneous Fees

Monthly Fees Payable in Government and Government-aided Primary Schools			
	School Fees	Standard Miscellaneous Fees	Second-tier Miscellaneous Fees
Singapore Citizen	\$0	\$6.50	The fees are decided by the school but are capped at a maximum of \$6.50. Your child may use his Edusave account to pay for these fees.
Singapore PR	\$90.00	\$6.50	The fees are decided by the school but are capped at a maximum of \$6.50.

For more information on school fees payable for your child, please visit www.moe.gov.sg/education/primary/ and www.moe.gov.sg/education/admissions/international-students/general-info/#monthly-school-fees.

Gambar 2.2 Biaya sekolah di level Primary School [17]

Annual School Fees at Government and Government-aided Junior Colleges and Centralised Institute for Academic Year 2014

	Singapore Citizens	Singapore Permanent Residents	International Students
JCs/ CI	\$72	\$1,920	ASEAN \$8,400 Non-ASEAN \$12,000

Annual Tuition Fees at ITE, Polytechnics and Publicly-Funded Degree Courses for Academic Year 2014

		Singapore Citizens	Singapore Permanent Residents	International Students
ITE	Nitec	\$310	\$4,150	\$10,350
	Higher Nitec	\$560	\$7,450	\$18,650
Polytechnics		\$2,400	\$4,800	\$8,000
Autonomous Universities (Undergraduate)		\$7,850 to \$31,500	\$11,000 to \$44,100	\$15,700 to \$63,000
SIT		\$7,860 to \$15,300	\$15,720 to \$30,600	\$28,800 to \$45,900 (no subsidy)
UniSIM (Full-time Programmes)*		\$30,000 to \$32,000	\$60,000 to \$64,000	-
UniSIM (Part-time Programmes)*		\$13,230 to \$20,200	\$23,520 to \$35,910	\$29,400 to \$44,890
Arts Institutions (Diploma)		\$4,550 to \$5,550	\$7,000 to \$7,100	\$9,000 to \$9,300
Arts Institutions (Degree)		\$10,400	\$14,600	\$23,000 to \$31,500 (no subsidy)

Notes:
Independent Schools, Singapore Sports School and School of the Arts have their own fees schemes. Please refer to their website for information on their fees.

The tuition fees listed above for ITE, polytechnics, AUs, SIT, Arts Institutions and UniSIM are AY2014 figures.

Malay Singapore Citizen students in Government and Government-aided JCs/ CI and ITE are eligible for fee waivers.

Miscellaneous fees may also apply for the above post-secondary education institutions.

The autonomous universities refer to the National University of Singapore (NUS), the Nanyang Technological University (NTU), the Singapore Management University (SMU), and the Singapore University of Technology and Design (SUTD).

* The fees for UniSIM are estimated fees for the whole full-time and part-time degree programmes. The amount of course fees payable each semester/year depends on the number of courses that students take in that semester/year.

The Arts institutions refer to the Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) and the LASALLE College of the Arts (LASALLE).

All the above tuition fees are subsidised, except for the fees for international students enrolled in the SIT, NAFA, LASALLE and UniSIM degree programmes, which MOE does not fund. For updated annual tuition fees for ITEs, polytechnics and publicly-funded degree programmes, please refer to the website of the respective institutions.

POST-SECONDARY EDUCATION

Gambar 2.3 Biaya Pendidikan pada tingkat Post-Secondary hingga Universitas
[18]

2.3.1. MOE Financial Assistance Scheme (MOE FAS) for Government and Government-Aided Schools

MOE menyediakan skema bantuan finansial dengan nama *MOE Financial Assistance Scheme* [19] untuk siswa yang bersekolah di sekolah yang dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah Singapura. Siswa berhak memperoleh MOE FAS apabila berasal dari keluarga yang memiliki *Gross Household Income* (GHI) tidak lebih dari S\$2.500 per bulan atau *Per Capita Income* (PCI) tidak lebih dari S\$625 per bulan. Keuntungan dari skema ini adalah subsidi penuh untuk biaya sekolah dan biaya lain-lain, seragam dan buku paket gratis untuk tahap *primary* dan *secondary*, serta *bursary* sebesar S\$750 pada tahap *pre-university*, dan 75% subsidi biaya ujian nasional. Terdapat pula program sarapan bagi siswa sekolah dasar sebesar S\$270.

Selain keuntungan yang diperoleh masing-masing siswa, terdapat pula bantuan keuangan yang diberikan melalui sekolah. Bantuan sebesar S\$10.000 per tahun telah dialokasikan oleh MOE agar sekolah dapat memberikan bantuan finansial baik untuk siswa yang berhak memperoleh skema FAS maupun yang tidak memenuhi persyaratan. Sekolah dengan penerima FAS yang banyak juga akan mendapatkan tambahan S\$5.000 setiap tahun.

Untuk siswa *Independent School* juga terdapat skema FAS dengan skema dan persyaratan yang serupa. Subsidi penuh biaya sekolah, *bursary* sebesar S\$750, serta keringanan 75% biaya ujian nasional diberikan pada siswa tingkat *Junior College* dari keluarga dengan *Per Capita Income* tidak lebih dari S\$625 atau *Gross Hould Income* tidak melebihi S\$2.500. Selanjutnya terdapat pula subsidi tidak penuh, mulai dari 90% hingga 33%, sesuai dengan kriteria penghasilan keluarga.

2.3.2. Edusave Scheme

Edusave Scheme [20] dirancang untuk memaksimalkan kesempatan bagi seluruh anak-anak Singapura dalam memperoleh pendidikan. Skema ini dihadiahkan kepada siswa yang memiliki kinerja yang bagus dalam akademik dan non-akademik dengan memberikan dana untuk pengayaan dan penambahan sarana prasarana kepada siswa dan sekolah.

Edusave Endowment Fund merupakan sebuah investasi dari pemerintah Singapura dan bunga yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai *Edusave Scheme*. Dana awal dari pemerintah sebanyak satu miliar dolar telah diinvestasikan di tahun 1993. Total dana mencapai target lima milyar dolar telah tercapai pada Agustus 1997.

Keuntungan *Edusave* dapat diperoleh apabila seorang siswa merupakan warga negara Singapura yang menjalani studi purna waktu pada *Government School*, *Government-aided school*, *Independent School*, *Junior College*, *Centralised Institute (CI)*, *Institute of Technical Education*, maupun *Special Education School*. Melalui program *Edusave Pupils Fund*, setiap siswa mendapatkan kontribusi *Edusave* sebesar S\$200 pada tingkat *primary* dan S\$240 pada tingkat *secondary*. Akun *Edusave* dapat digunakan untuk membayar biaya-biaya yang disetujui maupun program pengayaan. Setiap sekolah juga dapat memperoleh *Edusave Grant* untuk mengadakan program pengayaan dan perbaikan pembelajaran bagi siswa. Terdapat pula *International Experience Fund* bagi siswa yang dikirim untuk program belajar di luar negeri. Selain itu, beragam beasiswa dan penghargaan *Edusave* juga tersedia bagi siswa yang berprestasi, seperti *Edusave Character Award*, *Edusave Scholarship*, *Edusave Awards for Achievement*, *Good Leadership and Service (EAGLES)*, *Edusave Merit Bursary*, dan *Good Progress Award*.

2.3.3. Tuition Fee & Study Loan

Terdapat pula skema pinjaman berupa *Tuition Fee Loan* maupun *Study Loan* [18]. Skema ini juga dapat diakses oleh siswa berkewarganegaraan lain. Skema *Tuition Fee Loan* dapat memberikan pinjaman hingga biaya pendidikan sebesar 75% bagi siswa *Diploma* dan hingga 90% bagi siswa *undergraduate* (S1). Skema *Study Loan* hanya dapat diambil setelah mengambil *Tuition Fee Loan* yang dapat memberikan 25% *tuition fee* serta biaya hidup S\$2.000 per tahun bagi siswa *diploma*, dan 10% *tuition fee* dan pinjaman biaya hidup sebesar S\$3.600 per tahun bagi siswa *undergraduate*.

2.3.4. *Community Development Council & Citizens' Consultative Committee Bursary*

Skema ini didirikan bersama oleh pemerintah, *Community Development Council* (CDC) dan *Citizens' Consultative Committee* (CCC) [21]. Skema *bursary* ini dapat diperoleh bagi siswa yang terdaftar pada institusi pendidikan *Post-Secondary* yang didanai pemerintah apabila *per capita income* keluarga tidak melebihi S\$1.700.

2.3.5. *Scholarship*

Selain skema yang disebutkan di atas, terdapat pula beragam beasiswa dari berbagai institusi maupun lembaga yang tersedia bagi siswa yang mengenyam pendidikan di Singapura.

3

Kurikulum Nasional di Singapura

3.1 Pendidikan Pre-school

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.1.1, terdapat 2 macam penyelenggara pendidikan *pre-school*, yaitu *kindergartens* dan *child care centres*. *Kindergartens* menyediakan pendidikan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Lama pendidikan *kindergartens* adalah 3 tahun, yang terdiri dari tingkat *Nursery*, *Kindergarten 1*, dan *Kindergarten 2*. *Child care centres* menyediakan pendidikan anak pada usia 18 bulan sampai 6 tahun. Terdapat juga beberapa *centres* yang memberikan program pengasuhan anak usia 2 bulan sampai 18 bulan. Mulai 1 April 2013, kedua macam penyelenggara pendidikan tersebut berada di bawah pengawasan *Early Childhood Development Agency* (ECDA), yaitu lembaga otonom yang diawasi oleh MOE dan *Ministry of Social and Family Development* (MSF).

MOE menyusun kurikulum pendidikan *pre-school* sebagai panduan untuk penyelenggara pendidikan tersebut. Kurikulum tersebut lebih ditujukan sebagai referensi untuk penyedia pendidikan *pre-school*. MOE juga memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar *pre-school* dalam menjalankan pendidikan sesuai kurikulum tersebut. Kurikulum *pre-school* diberikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kurikulum Pre-school di Singapura [22]

3.2 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar dilaksanakan melalui Sekolah Dasar dan merupakan jenjang pendidikan wajib yang diatur pemerintah dalam *The Compulsory Education Act (Cap 51)* [23]. Lama pendidikan dasar adalah 6 tahun dengan tingkatan mulai dari *Primary 1* sampai *Primary 6*. Pendidikan dasar ditujukan untuk membekali para siswa dengan ketrampilan bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika.

3.2.1 Sistem Penerimaan

Penerimaan siswa baru dalam Sekolah Dasar dilaksanakan melalui tahap *Primary One Exercise*. Sistem penerimaan ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September untuk tahun ajaran berikutnya. Syarat usia siswa untuk dapat mendaftar adalah minimal berusia 6 tahun per 1 Januari pada tahun ajaran yang bersangkutan.

Registrasi dapat dilakukan secara langsung ke sekolah yang bersangkutan maupun secara online. Daftar Sekolah Dasar yang tersedia dapat dilihat dalam dokumen online *Mode of Operations of Primary Schools in Academic Year 2015* [24]. Orang tua wajib mempersiapkan syarat-syarat tertentu [25]. Apabila jumlah pendaftar telah melebihi kuota, sekolah memiliki prioritas tertentu dalam menyeleksi siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan [26].

3.2.2 Kurikulum

Skema kurikulum Sekolah Dasar ditunjukkan pada Gambar 3.2. Mata pelajaran yang diberikan kepada siswa antara lain adalah:

- Bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Ibu
- Matematika dan sains.
- Kemanusiaan dan seni, yaitu studi sosial (social studies), seni, dan musik.

Selain dari pada aktivitas belajar dan mengajar di kelas, terdapat beberapa program yang ditujukan untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif. Program-program itu akan dijelaskan di bawah ini.

Learning Support Programmes

Program ini ditujukan untuk membantu siswa yang memiliki kekurangan dalam kemampuan bahasa atau berhitung saat memasuki level *Primary 1*. Melalui program ini, siswa akan dibimbing oleh guru khusus dalam kelompok kecil.

Gifted Education Programme (GEP)

Program ini ditujukan kepada siswa yang memiliki kemampuan pembelajaran lebih. Untuk mengikuti program ini, siswa akan diberikan

test pada level *Primary* 3. Siswa yang dinilai layak dalam program ini akan ditempatkan di sekolah tertentu pada level *Primary* 4 sampai *Primary* 6. Siswa akan diajar dalam kelas khusus dengan kurikulum pembelajaran yang lebih tinggi.

Co-Curricular Activities (CCA)

Selain pembelajaran dalam kelas, siswa diharapkan untuk aktif dalam kegiatan ekstra-kurikuler. Pada tiap sekolah, terdapat beragam kegiatan ekstra-kurikuler, seperti kegiatan olah raga, musik, seni, dsb.

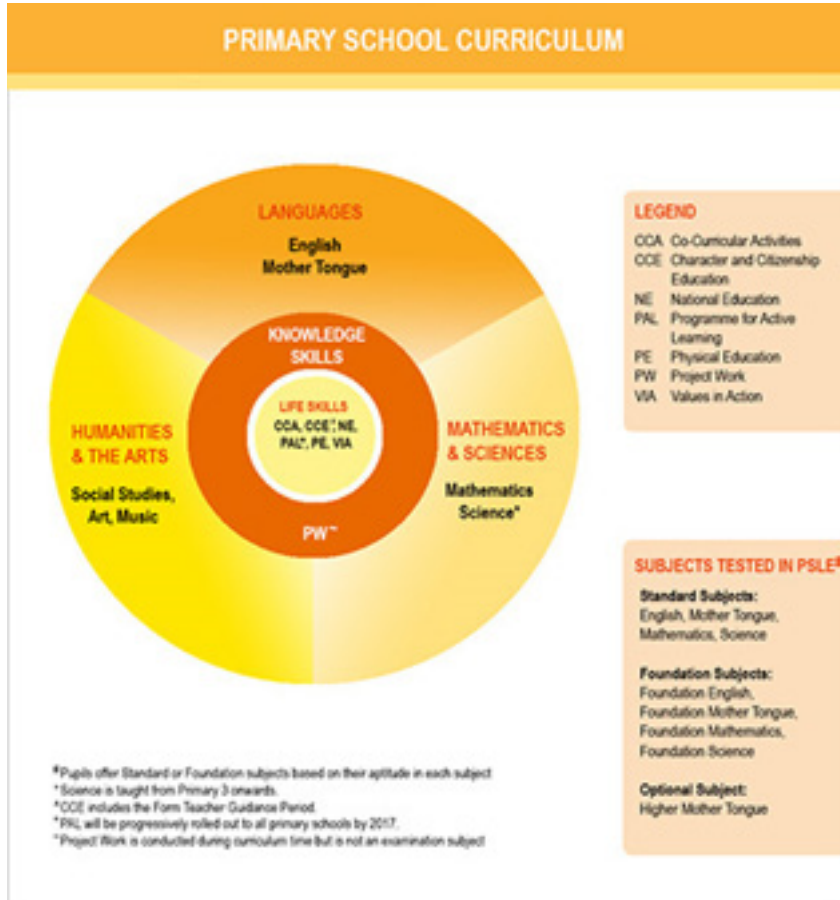
Subject-Based Banding

Program *Subject-Based Banding* memberikan pilihan kepada siswa dalam menentukan tingkat kesulitan mata pelajaran yang diambil. Tujuan program ini adalah agar siswa yang memiliki kesulitan dalam mata pelajaran tertentu dapat mengambil mata pelajaran tersebut pada tingkat yang lebih mudah dan fokus pada mata pelajaran lainnya. Proses *Subject-Based Banding* adalah sebagai berikut:

1. Pada level *Primary* 4, siswa akan menjalani ujian untuk menentukan pilihan mata pelajaran pada level selanjutnya. Berdasarkan hasil ujian tersebut, sekolah akan memberikan rekomendasi kepada orang tua dalam memilih mata pelajaran siswa pada level *Primary* 5.
2. Orang tua akan mengisi form kombinasi mata pelajaran untuk level *Primary* 5. Adapun pilihan mata pelajaran yang tersedia untuk level ini adalah sebagai berikut:
 - Bahasa Inggris, Matematika, Sains, dan bahasa ibu pada level dasar (*foundation level*).
 - Bahasa Inggris, Matematika, Sains, dan Bahasa Ibu pada level *standard*.
 - Bahasa Ibu pada level tinggi.
3. Mata pelajaran yang diberikan kepada siswa pada level *Primary* 5 adalah berdasarkan pilihan orang tua.
4. Pada akhir *Primary* 5, siswa diberikan beberapa pilihan:
 - Siswa dapat meneruskan mata pelajaran yang sama untuk level *Primary* 6.
 - Siswa yang mengambil mata pelajaran pada tingkat dasar dan berhasil menjalaninya dengan sangat baik akan diperbolehkan

untuk mengambil mata pelajaran tersebut pada tingkat standar.

- Siswa yang mengambil mata pelajaran pada tingkat standar dan mengalami kesulitan dalam menjalaninya akan diperbolehkan untuk mengambil mata pelajaran tersebut pada tingkat dasar.



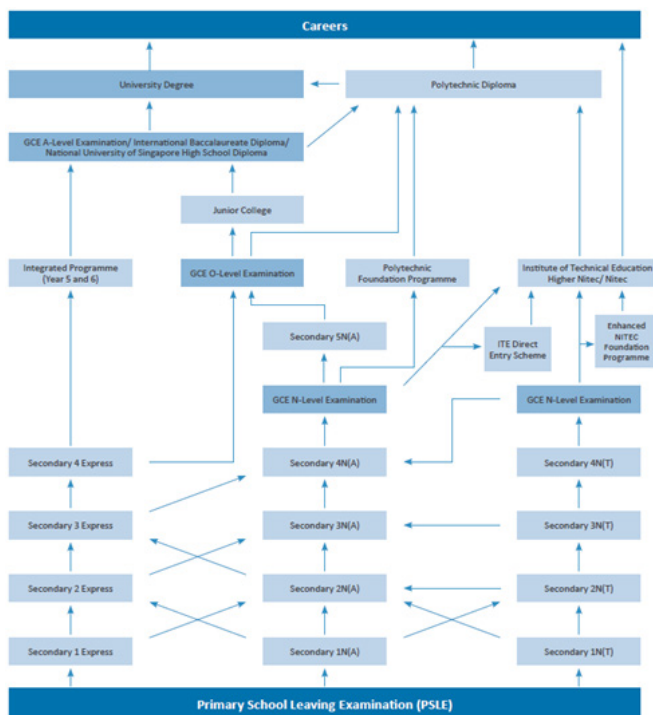
Gambar 3.2 Kurikulum Sekolah Dasar di Singapura [27]

Pada akhir tingkat *Primary 6*, siswa akan menjalani ujian akhir untuk menentukan jenjang sekolah sekunder yang akan ditempuh. Ujian akhir ini dikenal dengan nama *Primary School Leaving Examination* (PSLE). Hasil PSLE akan dirilis setelah akhir tahun ajaran. Kemudian, orang tua siswa dapat memilih 6 *Secondary School* di mana siswa akan meneruskan studinya. *Secondary School* yang bersangkutan akan menyeleksi siswa berdasarkan hasil PSLE tersebut dan menempatkan siswa dalam salah satu jalur antara *Express*, *Normal (Academic)*, dan *Normal (Technical)*.

3.3 Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang studi selanjutnya setelah *Primary* 6 dengan lama studi 4 sampai 5 tahun. Pendidikan ini diberikan melalui Sekolah Menengah yang dibedakan ke dalam 3 jalur berdasarkan hasil PSLE siswa seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3, yaitu:

- *Express*
Merupakan program 4 tahun dengan ujian akhir GCE 'O' Level.
- *Normal (Academic)*
Merupakan program 4 tahun dengan ujian akhir GCE 'N' Level. Siswa yang berhasil memperoleh nilai yang baik pada GCE 'N' tingkat dapat melanjutkan studi ke tahun ke-5 N(A) dan mengikuti ujian GCE 'O' Level.
- *Normal (Technical)*
Merupakan program 4 tahun dengan ujian akhir GCE 'N' Level.



Gambar 3.3 Skema jalur pendidikan Sekolah Menengah [28]

3.3.1 Sistem Penerimaan

Terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh siswa untuk diterima di Sekolah Menengah tertentu. Jalur yang paling umum adalah *Secondary One (S1) Posting Exercise*. Syarat untuk mengikuti jalur seleksi ini adalah lulus PSLE dan belum diterima di sekolah sekunder dengan jalur *Direct School Admission Secondary Exercise*. Adapun sistem seleksi pada jalur ini terbagi dalam 3 tahap:

Tahap 1: *S1 option phase*

Pada tahap ini, orang tua mengajukan 6 pilihan Sekolah Menengah setelah hasil PSLE diumumkan.

Tahap 2: *School Posting Phase*

Pada tahap ini, sekolah akan melakukan seleksi terhadap siswa yang mendaftar. Penerimaan siswa akan didasarkan pada hasil PSLE. Jika terdapat dua atau lebih siswa dengan nilai PSLE yang sama, maka seleksi akan didasarkan pada kewarganegaraan, dengan prioritas diberikan kepada *Singapore Citizens*, kemudian *Singapore Permanent Residents*, dan terakhir kepada *International Students*.

Apabila keenam pilihan Sekolah Menengah tidak dapat menampung siswa yang bersangkutan, maka siswa akan ditempatkan di Sekolah Menengah lain dengan pertimbangan berdasarkan jarak antara sekolah dan rumah siswa.

Tahap 3: *Posting Results Release*

Pada tahap ini hasil seleksi akan diumumkan. Pengumuman dilaksanakan pada akhir bulan Desember. Setelah pengumuman, siswa diharapkan untuk melapor ke sekolah bersangkutan yang menerima mereka.

Di samping *S1 Posting Exercise*, terdapat beberapa sekolah yang memiliki hak untuk melakukan penerimaan siswa baru secara terpisah, antara lain:

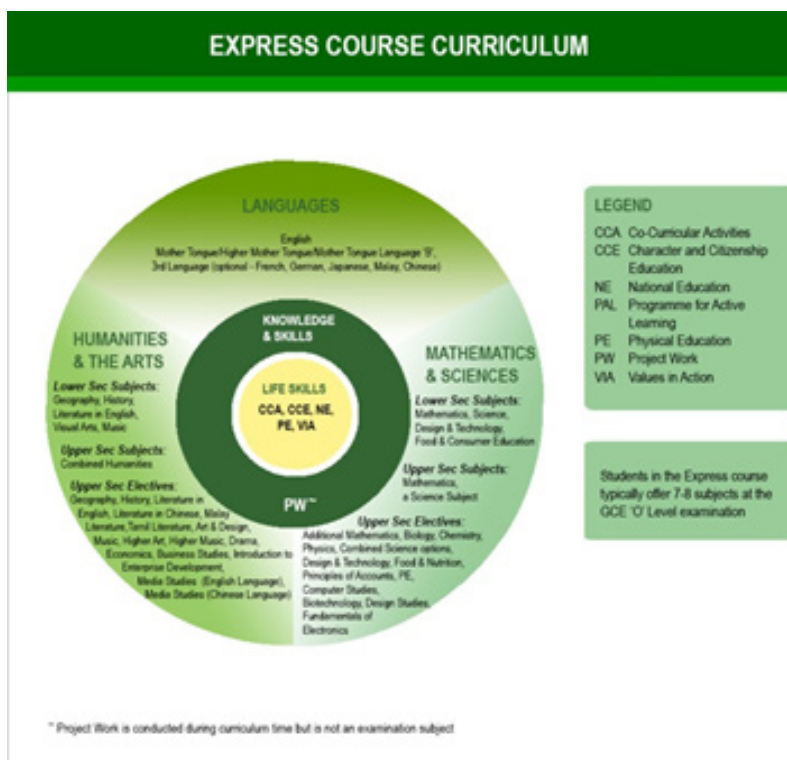
- Secondary School dengan Integrated Programmes (IP) memiliki hak penuh dalam melaksanakan penerimaan siswa baru.
- Autonomous school dan Independent School dapat menetapkan kuota 10% sampai 20% untuk penerimaan siswa tersendiri.
- Sekolah dengan niche of excellence yang diakui dapat menetapkan kuota 5% untuk penerimaan siswa tersendiri.

Selain itu, terdapat juga seleksi siswa melalui *Direct School Admission Exercise*. Penerimaan siswa melalui jalur ini dilakukan berdasarkan bakat dan pencapaian siswa, disamping syarat nilai PSLE siswa. Proses penerimaan siswa melalui jalur ini dapat dilihat pada laman <http://moe.gov.sg/education/admissions/dsa-sec/flowchart/> [29]. Daftar sekolah yang menyediakan seleksi siswa melalui jalur ini dapat dilihat pada laman <http://moe.gov.sg/education/admissions/dsa-sec/participating-schools> [30]. Siswa yang telah diterima melalui jalur ini tidak diijinkan untuk mengikuti seleksi penerimaan melalui jalur *S1 Posting Exercise* maupun berpindah ke Sekolah Menengah lainnya.

3.3.2 Kurikulum

Express Course

Kurikulum Sekolah Menengah untuk jalur Express ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Kurikulum Sekolah Menengah untuk jalur Express [31]

Di samping mata pelajaran pilihan pada diagram di atas, beberapa sekolah menengah diijinkan untuk menyediakan mata pelajaran GCE 'O' tingkat tambahan, seperti Ekonomi, *Computer Studies*, dan Drama.

Siswa juga dapat mengambil mata pelajaran Bahasa Ibu Tingkat Lanjut (*Higher Mother Tounge Language*, HMTL) dengan syarat:

- Nilai PSLE berada pada top 10%.
- Nilai PSLE berada pada top 11-30% dengan nilai A+ pada mata pelajaran Bahasa Ibu atau nilai Merit pada mata pelajaran HMTL.

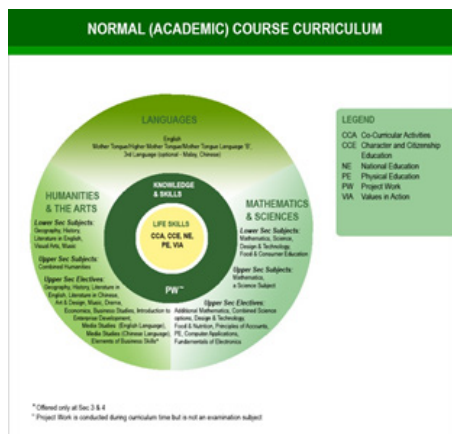
Untuk siswa yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran Bahasa (*dyslexia*, ADHD, *autism*, tuna rungu), atau siswa yang mendapat nilai Bahasa Ibu kurang dari sama dengan C pada PLSE, diijinkan untuk mengambil mata pelajaran Bahasa Ibu 'B' pada sekolah sekunder.

Normal (Academic) Course

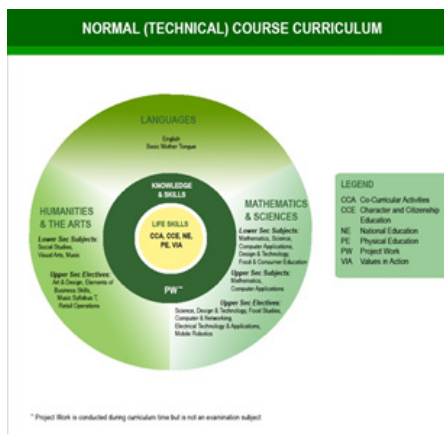
Kurikulum untuk jalur *Normal (Academic)* ditunjukkan pada Gambar 3.5. Siswa diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, dan Matematika. Siswa diharapkan untuk mempersiapkan 6-8 mata pelajaran (termasuk mata pelajaran wajib) untuk menghadapi ujian GCE 'N' Level. Untuk tahap Sekolah Lanjutan Atas (*Upper Secondary*), siswa juga diwajibkan untuk mengambil pilihan mata pelajaran Humaniora dan Sains.

Normal (Technical) Course

Kurikulum jalur *Normal (Technical)* ditunjukkan pada Gambar 3.6. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mempersiapkan siswa dalam pendidikan teknik kejuruan pada *Institute of Technical Education* (ITE). Siswa wajib mengambil 5-7 mata pelajaran dengan mata pelajaran wajib Bahasa Inggris, Matematika, Dasar-dasar Bahasa Ibu, dan *Computer Applications*.



Gambar 3.5 Kurikulum Secondary School untuk jalur Normal (Academic) [32]



Gambar 3.6 Kurikulum Secondary School untuk jalur Normal (Technical) [32]

3.3.3 Program Khusus

Language Programme

Selain daripada Bahasa Inggris dan Bahasa Ibu, terdapat beberapa pilihan program bahasa tambahan pada Sekolah Menengah, yaitu:

Higher Mother Tongue Language (HMTL)

Merupakan pelajaran Bahasa Ibu yang lebih mendalam. Syarat untuk mengambil mata pelajaran ini adalah:

- Nilai PSLE berada pada top 10%.
- Nilai PSLE berada pada top 11% sampai 30% dengan nilai A+ pada Bahasa Ibu atau Merit pada HMTL.

Pelajaran ini diberikan tergantung pada kebijakan Secondary School yang bersangkutan. Daftar sekolah yang menyediakan pelajaran ini dapat dilihat pada laman <http://www.moe.gov.sg/education/secondary/language-programmes/files/schools-offering-hmtl.pdf> [33]. Selain itu, pelajaran Higher Malay juga tersedia pada *MOE Language Centre (Bishan)* dan *Higher Tamil* tersedia pada *Umar Pulavar Tamil Language Centre*.

Elective Programme in Malay Languages for Secondary School (EMAS)

Program ini ditujukan untuk memperdalam pengetahuan siswa mengenai bahasa, sejarah, dan budaya Melayu. Syarat untuk mengikuti

program ini adalah siswa cukup berkualifikasi untuk mengambil pelajaran Bahasa Melayu Tingkat Lanjut (*Higher Malay*). Pelajaran ini diselenggarakan di Sekolah Menengah tertentu, yaitu *Anderson Secondary School*, *Bukit Panjang Government High School*, dan *Tanjong Katong Secondary School*.

National Elective Tamil Language Programme (NETP)

Program ini ditujukan untuk siswa yang memiliki minat dalam mempelajari bahasa dan budaya Tamil. Program ini ditawarkan kepada seluruh siswa pada tingkat *Secondary 1*.

Third Languages

Selain bahasa yang ditawarkan pada Bahasa Ibu, terdapat pelajaran bahasa lain yaitu:

- Chinese Special Programme (CSP) dan Malay Special Programme (MSP)
Program bahasa ini diselenggarakan oleh *CSP Centre* dan *MSP Centre* tertentu. Syarat untuk mengikuti pelajaran ini adalah:
 - » Berada pada jalur Express atau Normal (Academic).
 - » Untuk CSP, siswa belum mengambil mata pelajaran Bahasa Cina (Chinese) maupun Bahasa Cina Tingkat Lanjut (Higher Chinese).
 - » Untuk MSP, siswa belum mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu maupun Bahasa Melayu Tingkat Lanjut (Higher Malay).
- Bahasa Indonesia atau Bahasa Arab
Program bahasa ini diselenggarakan oleh MOE Language Centre (Bishan) dan merupakan mata pelajaran 4 tahun untuk ujian GCE O-Level. Syarat untuk mengikuti mata pelajaran ini adalah:
 - » Berada pada jalur Express atau Normal (Academic).
 - » Untuk Bahasa Indonesia, belum mengambil pelajaran Bahasa Melayu maupun Bahasa Melayu Tingkat Lanjut pada PSLE.
 - » Siswa dan orang tua siswa merupakan Warga Negara atau Penduduk Tetap (Permanent Resident) Singapura.

Bahasa Asing: Perancis, Jerman, Jepang, Spanyol

Program bahasa ini merupakan program 4 tahun untuk ujian GCE

O-Level. Terdapat 2 lembaga yang menyelenggarakan program ini, yaitu:

- *MOE Language Centre (Bishan)* untuk pelajaran Bahasa Perancis, Jerman, dan Jepang.
- *MOE Language Centre (Newton)* untuk pelajaran Bahasa Spanyol, Perancis dan Jepang

Syarat mengambil mata pelajaran ini adalah:

- Nilai PSLE berada pada top 10%.
- Untuk mata pelajaran Bahasa Jepang, lulus mata pelajaran Bahasa Cina atau Bahasa Cina Tingkat Lanjut pada PSLE.
- Siswa dan orang tua siswa merupakan Warga Negara atau Penduduk Tetap (*Permanent Resident*) Singapura.

Bicultural Studies (Chinese)

Program ini ditujukan untuk siswa yang memiliki minat dalam mempelajari tentang budaya Cina. Mata pelajaran ini merupakan program 4 tahun yang dimulai pada tingkat Secondary 3. Untuk mengikuti pelajaran ini, siswa harus cukup berkualifikasi untuk mengikuti pelajaran Bahasa Cina Tingkat Lanjut. Adapun pelajaran ini diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tertentu, yaitu *Hwa Chong Institution, Dunman High School, Nanyang Girls' High School, dan River Valley High School*.

Regional Studies Programme (RSP)

Program ini ditujukan kepada siswa yang tertarik untuk mempelajari budaya dan masyarakat pada wilayah Asia Tenggara. Untuk mengikuti pelajaran ini, siswa harus mengambil mata pelajaran *Malay Special Programme (MSP)* atau Bahasa Indonesia sebagai *Third Language*. Sekolah yang menyediakan mata pelajaran ini adalah *Anglo-Chinese School (Independent), Raffles Institution, Raffles Girls' (Secondary), Victoria School, dan Cedar Girls' Secondary School*. Perlu diketahui bahwa hanya siswa pada sekolah yang bersangkutan yang diperbolehkan untuk mengikuti program ini.

Mother Tongue Language 'B' (MTLB)

Pelajaran bahasa ini ditujukan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari Bahasa Ibu. Siswa disarankan untuk

mengambil program ini antara lain jika:

- Mendapat nilai kurang dari sama dengan C pada PSLE.
- Tidak lulus mata pelajaran Bahasa Ibu pada tingkat Secondary 3.
- Mendapat nilai kurang dari sama dengan E8 pada ujian Mid-Year O-Level di Secondary 4.

Terdapat beberapa sekolah yang menyediakan program ini. Di samping itu, pelajaran ini juga tersedia pada MTLB Centres.

Art and Music Elective Programmes

Program Pilihan Seni, atau Art Elective Programme (AEP)

Program ini ditujukan kepada siswa yang memiliki bakat dan minat khusus pada bidang seni. AEP merupakan program 4 tahun yang termasuk ke dalam GCE O-Level *Higher Art Examination*. Syarat mengikuti program ini adalah siswa cukup berkualifikasi dalam mengikuti jalur *Express* dan lulus ujian seleksi AEP yang diadakan oleh sekolah. Sekolah yang menyediakan program ini antara lain:

- *Bukit Panjang Government High School.*
- *CHIJ Secondary (Toa Payoh)*
- *Hwa Chong Institution*
- *Nanyang Girls' High School*
- *National Junior College*
- *Victoria School*
- *Zhonghua Secondary School*

Untuk *IP School Hwa Chong Institution*, *Nanyang Girls' High*, dan *National Junior College*, siswa AEP dapat melanjutkan program AEP selama 2 tahun untuk mengajukan subjek H2 dan H3 Art pada ujian GCE A-Level. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat pada lembar online *Art Elective Programme at Secondary Schools* [34].

Program Pilihan Music, atau Music Elective Programme (MEP)

Program ini ditujukan kepada siswa yang memiliki bakat dan minat khusus pada bidang musik. MEP merupakan program 4 tahun yang termasuk ke dalam GCE O-Level *Higher Music Examination*. Syarat mengikuti program ini adalah siswa cukup berkualifikasi dalam mengikuti jalur *Express* dan lulus pada *Grade Three Practical and Theory*

atau *Practical Musicianship* yang diberikan oleh *Associated Board of Royal Schools of Music* (ABRSM). Jika siswa tidak memiliki kualifikasi resmi dari ABRSM, siswa dapat mengikuti ujian tertulis dan praktek yang disediakan pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang menyediakan program ini adalah:

- *Anglo-Chinese School (Independent)*
- *Catholic High School*
- *CHIJ St Nicholas Girls' School*
- *Crescent Girls' School*
- *Dunman High School*
- *Methodist Girls' School (Secondary)*
- *Raffles Girls' School (Secondary)*
- *Raffles Institution*
- *Tanjong Katong Girls' School*
- *Temasek Junior College*

Untuk *Integrated Programme School Temasek Junior College*, *Raffles Girls' School (Secondary)*, dan *Raffles Institution*, siswa MEP dapat meneruskan program MEP selama 2 tahun untuk mengajukan H2 dan H3 Music sebagai subjek ujian GCE A-Level atau *International Baccalaureate (IB) Diploma Programme Music* pada *Higher Level*. Pada *Anglo-Chinese School (Independent)* dan *Methodist Girls' School (Secondary)*, siswa diwajibkan untuk mengikuti *GCE O-Level Higher Music Examination*.

Program Terintegrasi atau Integrated Programme (IP)

IP merupakan program terintegrasi antara Sekolah Menengah dengan *Junior College* (JC). Program ini diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan berminat dalam proses pembelajaran yang lebih mandiri. IP ditujukan untuk ujian GCE A-Level atau gelar *Diploma*. Sekolah yang memiliki IP pada tahun 2014 diberikan pada Tabel 3.1. Penerimaan siswa pada program ini dilaksanakan pada tingkat *Secondary 1*. Siswa juga dapat mengajukan program ini pada tingkat *Secondary 3*.

Tabel 3.1 Sekolah Menengah dengan *Integrated Programme* [28]

Sekolah	Partner Junior College	Kualifikasi yang diperoleh
<i>Catholic High School</i> <i>CHIJ St Nicholas Girls' School</i> <i>Singapore Chinese Girls' School</i>	<i>New Government JC</i> yang akan didirikan pada tahun 2017	<i>GCE A-Level</i>
<i>Hwa Chong Institution (Secondary)</i> <i>Nanyang Girls' High School</i>	<i>Hwa Chong Institution</i>	
<i>Raffles Girls School</i> <i>Raffles Institution (Secondary)</i>	<i>Raffles Institution</i>	
<i>Cedar Girls' Secondary School</i> <i>Victoria School</i>	<i>Victoria Junior College</i>	
<i>Dunman High School</i>	-	
<i>National Junior College</i>	-	
<i>River Valley High School</i>	-	
<i>Temasek Junior College</i>	-	
<i>Methodist Girls' School</i>	<i>Anglo-Chinese School</i> <i>(Independent)</i>	<i>International</i> <i>Baccalaureate</i>
<i>Anglo-Chinese School (Independent)</i>	-	
<i>St Joseph's Institution</i>	-	
<i>National University of Singapore</i> <i>(NUS) High School</i>	-	<i>NUS High School</i> <i>Diploma</i>

Program Pendidikan Anak Berbakat atau Gifted Education Programme (GEP)

Siswa yang mengikuti GEP pada Sekolah Dasar dapat mengikuti sekolah IP yang menyediakan *School-Based Gifted Education (SBGE) Programmes*. Program ini tersedia pada IP school berikut:

- Anglo-Chinese School (Independent)
- Dunman High School
- Hwa Chong Institution
- Nanyang Girls' High School
- NUS High School of Mathematics and Science
- Raffles Girls' School (Secondary)
- Raffles Institution

Selain itu, siswa GEP dapat memilih dual-track IP school pada sekolah yang menyediakan program GCE O-Level. Sekolah yang menyediakan IP dan GCE O-Level adalah sebagai berikut:

- *Anglo-Chinese School (Independent)*
- *Catholic High School*
- *Cedar Girls' Secondary School*
- *CHIJ St Nicholas Girls' School*
- *Methodist Girls' School (Secondary)*
- *Singapore Chinese Girls' School*
- *St Joseph's Institution*
- *Victoria School*

3.4 Pendidikan Pasca Sekolah Menengah (Post-Secondary)

Setelah pendidikan sekolah menengah, siswa memiliki beberapa pilihan dalam melanjutkan pendidikan sesuai dengan jalur masing-masing (*Express*, *Normal(Academic)*, dan *Normal (Technical)*) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. Secara umum, terdapat 3 pilihan pendidikan Pasca Sekolah Menengah (*Post-Secondary*), yaitu *Junior College/Centralised Institute*, *Polytechnics*, dan *Institute of Technical Education* (ITE).

3.4.1 Junior College (JC) dan Centralised Institute (CI)

Junior College dan *Centralised Institute* ditujukan untuk mempersiapkan siswa dalam memasuki perguruan tinggi atau *Institute of Higher Learning*. Program JC ditempuh dalam waktu 2 tahun, sedangkan CI ditempuh dalam waktu 3 tahun. CI memiliki program tambahan seperti *Principle of Accounting* dan *Management Business*. JC dan CI menyediakan pendidikan untuk ujian akhir GCE A-Level. Selain itu, terdapat juga IP School yang memberikan sertifikasi *International Baccalaureate* (IB) Diploma setelah kelulusan, yaitu ACS (I) dan SJI (JC). Saat ini, Singapura memiliki 12 JC, 7 IP School, dan 1 CI, yaitu *Millenia Institute*.

Sistem Penerimaan dan Seleksi

Joint Admission Exercise (JAE)

JAE diadakan setiap tahun setelah hasil ujian GCE O-Level diumumkan. Persyaratan pendaftaran ke JC dan IP School adalah hasil GCE O-Level dengan kombinasi L1R5 (Bahasa Inggris dan 5 mata pelajaran lainnya) dengan nilai *aggregate* kurang dari sama dengan 20.

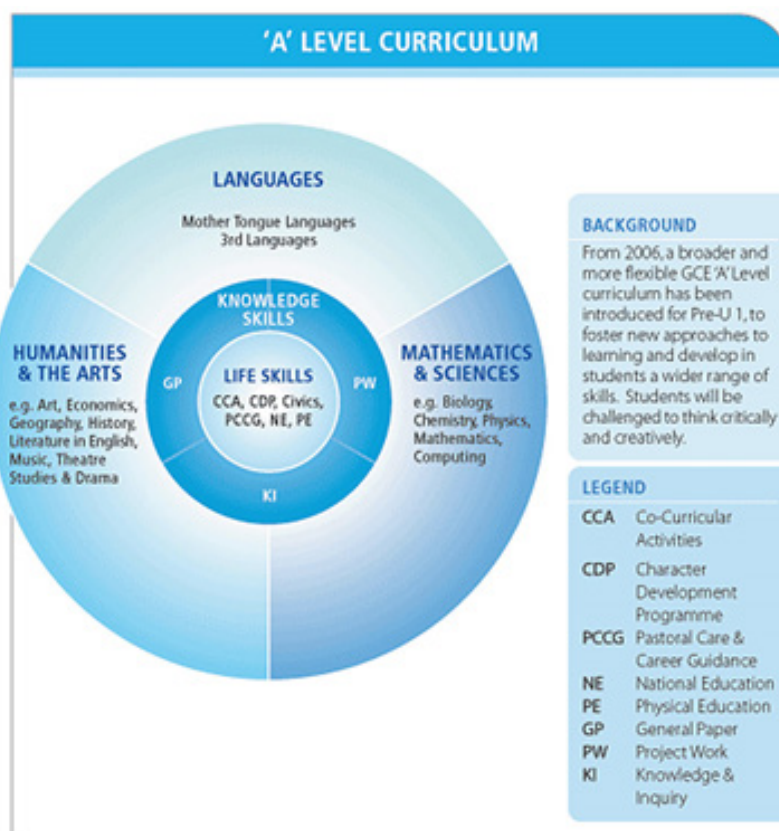
Direct School Admission-JC Exercise

Jalur seleksi ini diberikan untuk siswa yang menunjukkan prestasi atau bakat yang tinggi dalam bidang tertentu.

Kurikulum

Kurikulum dari JC dan CI ditunjukkan pada Gambar 3.6. Mata pelajaran tersebut memiliki 3 tingkatan, yaitu Higher 1 (H1), Higher 2 (H2), dan Higher 3 (H3). Pengelompokan H1, H2, H3 diberlakukan sejak tahun 2006 menggantikan sistem klasifikasi yang lama (AO, A, dan S), di mana H1 setara dengan AO-Level, H2 setara dengan A-Level, dan H3 setara dengan S-Level.

Selain dari mata pelajaran yang terdapat pada Gambar 3.7, terdapat juga mata pelajaran pilihan khusus antara lain *Art Elective Programme*, *Bicultural Studies Programme*, *Regional Studies Programme*, *Music Elective Programme*, *Language Elective Programme* (*English, Chinese, Malay, French/German/Japanese*), dan *Humanities Programme*.



Gambar 3.7 Kurikulum JC dan CI [35]

3.4.2 Polytechnics

Politeknik (*Polytechnics*) ditujukan untuk mengarahkan siswa untuk bekerja di bidang yang membutuhkan pengalaman praktek. Pengajaran pada politeknik berorientasi pada praktek dan magang pada industri. Setelah lulus dari politeknik, siswa dapat bekerja pada industri maupun meneruskan ke universitas atau Pendidikan Tinggi seperti Singapore *Institute of Technology* (SIT). Saat ini, terdapat 5 politeknik di Singapura, yaitu *Nanyang Polytechnic* (NYP), *Ngee Ann Polytechnic* (NP), *Republic Polytechnic* (RP), *Singapore Polytechnic* (SP), dan *Temasek Polytechnic* (TP).

Sistem Penerimaan dan Seleksi

Terdapat beberapa macam jalur penerimaan siswa ke politeknik, yaitu:

- *Joint Admissions Exercise (JAE)*
Penerimaan melalui JAE dilaksanakan tiap tahun. Syarat masuk ke politeknik melalui jalur ini adalah ujian GCE O-Level. Adapun subjek O-Level yang dibutuhkan untuk masuk ke jurusan tertentu pada politeknik bervariasi sesuai kebutuhan pada jurusan tersebut.
- *Joint Polytechnic Special Admissions Exercise (JPSAE)*
Jalur ini ditujukan untuk siswa dengan prestasi tertentu, seperti keaktifan dalam *work attachments*, *course-related projects*, kompetisi, maupun bakat yang tinggi dalam kepemimpinan, kemasyarakatan, kewirausahaan, olahraga, seni. Politeknik menyediakan 5% dari kuota siswa untuk penerimaan melalui JPSAE.
- *Direct-Entry-Scheme to Polytechnic Programme (DPP)*
Jalur ini diberikan kepada siswa *Secondary 4* program *Normal (Academic)* yang memperoleh nilai baik. Terdapat program persiapan 10 bulan sebelum DPP dimulai. Melalui DPP, siswa akan ditempatkan selama 2 tahun pada pendidikan *Higher Nitec* di ITE. Apabila siswa berhasil lulus dengan nilai *Grade Point Average (GPA)* yang baik, siswa akan ditempatkan di politeknik pada tahun pertama atau tahun ke-2 pada jurusan yang sesuai.
- *Polytechnic Foundation Programme (PFP)*
Jalur PFP ditawarkan kepada siswa *Secondary 4* program *Normal (Academic)* yang memperoleh nilai tinggi pada ujian GCE N(A)-Level. PFP merupakan program pendidikan 1 tahun untuk mempersiapkan siswa memasuki jurusan politeknik tertentu. Siswa yang mengikuti program ini dan lulus ujian untuk semua modul PFP akan diutamakan dalam penerimaan ke politeknik sesuai dengan jurusan yang bersangkutan.

Kurikulum

Terdapat bermacam-macam jurusan yang ditawarkan pada politeknik dengan kurikulum yang bervariasi. Jurusan tersebut antara lain [36]:

- *Engineering: Electronics, Computer & Communications Engineering (NYP), Electrical Engineering (NP), Electrical and Electronic Engineering (RP and SP), Electrical & Electronic Engineering Programme (TP).*
- *Game Design: Digital Game Art & Design (NYP), Animation & 3D Arts (NP), Game Design (RP), Games Design & Development (SP), Game Design & Development (TP).*
- *Business: Business Management (NYP), Business Studies (NP), Customer Relationship and Service Management (RP), Business Administration (SP), Accounting & Finance (TP).*
- *Sains: Food Science & Nutrition (NYP), Veterinary Bioscience (NP), Pharmaceutical Sciences (RP), Nutrition, Health & Wellness (SP), Veterinary Technology (TP).*
- *Jurusan lainnya: Advertising & Public Relations, Child Psychology & Early Education, Creative Writing for TV & New Media, Landscape Design & Horticulture, Digital & Precision Engineering, Nanotechnology & Materials Science, Optometry, Nursing, Outdoor & Adventure Learning, Tourism & Resort Management, dsb.*

3.4.3 Institute of Technical Education (ITE)

Pendidikan ITE merupakan pendidikan kejuruan yang ditujukan untuk membekali siswa dengan kemampuan teknis sebagai tenaga kerja dalam berbagai macam industri. Saat ini, terdapat 3 lembaga ITE di Singapura, yaitu *ITE College Central*, *ITE College East*, dan *ITE College West*.

Sistem Penerimaan dan Seleksi

Terdapat beberapa jalur penerimaan siswa ke ITE, yaitu:

- *Joint Intake Exercise*
JIE merupakan jalur penerimaan ke *Nitec*. Syarat penerimaan melalui jalur ini adalah hasil ujian GCE N-Level atau GCE O-Level yang bervariasi tergantung pada mata kuliah yang bersangkutan. Di samping itu, untuk beberapa mata kuliah, terdapat seleksi wawancara dan tes kesehatan.
- *Joint Admissions Exercise (JAE)*

JAЕ merupakan jalur penerimaan ke *Higher Nitec*. Syarat penerimaan melalui jalur ini adalah hasil ujian GCE O-Level yang memenuhi syarat mata kuliah yang bersangkutan

- *Direct-Entry-Scheme to Polytechnic Programme (DPP)*

Jalur ini diberikan kepada siswa *Secondary 4* program N(A) yang memperoleh nilai tinggi pada ujian GCE N-Level. Siswa dapat mendaftar langsung ke *Higher Nitec*. Selain itu, apabila nilai Grade Point Average (GPA) siswa cukup tinggi, siswa dapat meneruskan ke politeknik dengan mata kuliah yang sesuai.

Kurikulum

Kurikulum di ITE bervariasi bergantung pada mata kuliah yang diambil, antara lain [36]:

- Bidang *Marine Engineering*: *Higher Nitec in Marine & Offshore Technology*, *Marine Engineering*, dan *Offshore & Marine Engineering Design*.
- Bidang *culinary*: *Nitec in Pastry & Baking*, *Asian Culinary Arts*, dan *Food & Beverage Operations*.
- Bidang *healthcare*: *Nitec in Nursing*, *Nitec in Opticianry*, *Higher Nitec in Paramedic & Emergency Care*, dan *Nitec in Nursing (Dual Certification Course)*.
- Lainnya: *Accounting*, *Applied Food Science*, *Automotive Technology*, *Electronics*, *Rapid Transit Technology*, *Info-Communications Technology*, *Early Childhood Education*, *Fitness Training*, *Hospitality Operations*, *Space Design*, dsb.

4

Sistem Ujian dan Kualifikasi Pendidikan di Singapura

4.1 Ujian Nasional

Terdapat 5 macam ujian nasional di Singapura yang diatur oleh lembaga Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB). Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan ujian nasional Singapura dan ujian lainnya untuk siswa internasional yang membutuhkan penyetaraan kualifikasi dengan pendidikan di Singapura. Ujian yang diatur oleh SEAB adalah sebagai berikut:

- *Primary School Leaving Examinations (PSLE) dan Singapore international Primary School Examination (iPSLE)*
- *GCE N(T)-Level*
- *GCE N(A)-Level*
- *GCE O-Level*
- *GCE A-Level*

PSLE dan iPSLE merupakan ujian akhir Sekolah Dasar. GCE N(T)-Level, N(A)-Level, dan O-Level ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah. Untuk siswa *Junior College (JC)* dan *Centralised Institute (CI)*, terdapat ujian GCE A-Level.

4.1.1 PSLE dan iPSLE

PSLE merupakan ujian akhir pada Sekolah Dasar. Ujian ini diberikan di akhir pendidikan *Primary 6*. Hasil ujian ini dapat digunakan untuk

pendaftaran dan penerimaan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah. Adapun mata pelajaran yang diujikan adalah sebagai berikut:

- Bahasa Inggris
- Bahasa Ibu: Bahasa Cina, Melayu, Tamil, Bahasa India Non Tamil, Cina Tingkat Lanjut, Melayu Tingkat Lanjut, Tamil Tingkat Lanjut.
- Matematika
- Sains

Mata pelajaran tersebut disediakan pada tingkat Normal dan Foundation sesuai dengan mata pelajaran yang diambil siswa pada tingkat Primary 6. Untuk silabus pada masing-masing mata pelajaran dapat dilihat di laman online SEAB [38].

iPSLE merupakan versi internasional dari PSLE. Ujian ini ditujukan kepada siswa internasional yang membutuhkan penyetaraan kualifikasi terhadap pendidikan Singapura. Ujian ini diselenggarakan di lembaga yang bersangkutan di beberapa negara tertentu. Saat ini, terdapat 17 lembaga penyelenggara iPSLE yang tersebar di 7 negara, dapat dilihat pada PSLE internasional [39]. Ujian iPSLE dapat diambil oleh siswa internasional tanpa batasan usia. Namun, apabila siswa hendak mendaftar ke Sekolah Menengah di Singapura, siswa tersebut harus berusia minimum 12 tahun per 1 Januari pada tahun ajaran yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang diujikan pada iPSLE adalah sebagai berikut:

- Bahasa Inggris
- Bahasa Ibu: Bahasa Cina, Melayu, Tamil
- Matematika
- Sains

Siswa wajib mengambil maksimum 4 mata pelajaran (Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, Matematika dan Sains). Silabus masing-masing mata pelajaran dapat dilihat pada laman online di tautan berikut <http://www.seab.gov.sg/iPSLE/2014subjectInfo.html> [40]. Sertifikat PSE dan iPSLE akan diberikan kepada siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan E pada satu mata pelajaran atau lebih. Hasil ujian akan diberikan kepada semua peserta yang mengikuti ujian tersebut.

4.1.2 GCE N(T)-Level

Ujian GCE N(T)-Level diberikan kepada siswa Sekolah Menengah untuk program Normal (Technical) pada tingkat Secondary 4. Hasil ujian ini dapat digunakan untuk pendaftaran dan penerimaan ke Institute of Technical Education (ITE) pada program Nitec course. Adapun mata pelajaran yang diujikan adalah sebagai berikut:

<i>Cambridge Subject</i>	<i>Applied Subjects</i>	<i>Local Subjects</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Matematika • Sains • Seni • Musik • Desain dan Teknologi • Food Studies • Aplikasi Komputer • Elemen Ketrampilan Bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobile Robotics • Komputer dan Jaringan • Operasi Eceran • Teknologi Listrik dan Aplikasinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Cina Dasar • Bahasa Melayu Dasar • Bahasa Tamil Dasar

Siswa wajib mengambil mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, Matematika, Sains dan Aplikasi Komputer. Selain itu, siswa harus mengambil mata pelajaran pilihan tergantung dari persyaratan penerimaan pada jurusan ITE yang dituju. Silabus dari masing-masing mata pelajaran dapat dilihat pada laman khusus *Singapore-Cambridge GCE* [41]. Pada pilihan mata pelajaran tersebut, terdapat Applied Subjects yang diadakan sejak tahun 2009 melalui kerja sama dengan ITE.

Hasil ujian GCE N(T)-Level akan diberikan kepada setiap peserta ujian. Sertifikat N(T)-Level akan diberikan kepada peserta yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan D pada satu mata pelajaran atau lebih. Adapun standar nilai ujian ini adalah sebagai berikut:

- A: $\geq 75\%$
- B: 70% - 74%
- C: 60% - 69%
- D: 50% - 59%
- U: $< 50\%$ (gagal atau tidak dinilai)

4.1.3 GCE N(A)-Level

Ujian GCE N(A)-Level diberikan kepada siswa Sekolah Menengah untuk program *Normal (Academic)* pada tingkat *Secondary* 4. Selain untuk melanjutkan studi ke jenjang *Secondary* 5, hasil ujian ini dapat juga digunakan untuk penerimaan dan pendaftaran pada program berikut:

- *Polytechnic Foundation Programme*
- *Direct Entry Scheme to Polytechnic*
- *ITE program Nitec*

Adapun mata pelajaran yang diujikan adalah sebagai berikut:

<i>Cambridge Subjects</i>	<i>Local Subjects</i>
<ul style="list-style-type: none">• Bahasa Inggris• Literatur dalam Bahasa Inggris• Combined Humanities• Sejarah• Geografi• Bahasa India non Tamil• Matematika• Matematika Tambahan• Sains (Fisika dan Kimia)• Sains (Fisika dan Biologi)• Sains (Kimia dan Biologi)• Makanan dan Nutrisi• Desain dan Teknologi Seni• Prinsip-prinsip Akuntansi	<ul style="list-style-type: none">• Bahasa Cina• Bahasa Melayu• Bahasa Tamil

Siswa pada umumnya mengambil 6 sampai 8 mata pelajaran, dengan mata pelajaran wajib Bahasa Inggris, Bahasa Ibu, dan Matematika. Untuk Sekolah Menengah Atas, siswa juga wajib mengambil mata pelajaran Humaniora dan Sains. Mata pelajaran pilihan dapat diambil siswa berdasarkan tujuan studi selanjutnya. Selain itu, siswa juga dapat mengambil maksimal 2 mata pelajaran GCE O-Level apabila siswa mendapat nilai yang baik pada tingkat *Secondary* 2. Nilai mata pelajaran O-Level akan dikonversi menjadi N(A)-Level. Silabus dari masing-masing mata pelajaran dapat dilihat pada laman di situs SEAB [42].

Hasil ujian GCE N(A)-Level akan diberikan kepada setiap peserta ujian. Sertifikat N(A)-Level akan diberikan kepada peserta yang

memperoleh nilai lebih dari sama dengan 5 pada satu mata pelajaran atau lebih. Adapun standard nilai ujian ini adalah sebagai berikut:

- 1: $\geq 75\%$
- 2: 70% - 74%
- 3: 65% - 69%
- 4: 60% - 64%
- 5: 50% - 59%
- U: $<50\%$ (gagal atau tidak dinilai)

Untuk mata pelajaran O-Level, konversi nilai ke N(A)-Level diberikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Konversi Nilai O-Level ke N(A)-Level

O-Level	N(A)-Level
A1-B3	1
B4-C6	2
D7-E8	3
F9	4

4.1.4 GCE O-Level

Ujian GCE O-Level diberikan kepada siswa program *Express* pada tingkat *Secondary* 4 dan siswa program *Normal (Academic)* pada tingkat *Secondary* 5. Ujian ini dapat digunakan untuk pendaftaran dan penerimaan ke *Junior College*, *Centralised Institute*, dan *Polytechnic*. Selain itu, hasil ujian ini juga dapat digunakan untuk masuk ke ITE pada program *Nitec* dan *Higher Nitec*. Mata pelajaran yang diujikan untuk GCE O-Level adalah sebagai berikut:

Cambridge Subjects <ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Bahasa Arab (Bahasa Ketiga) • Bahasa Indonesia (Bahasa Ketiga) • Literatur di Bahasa Inggris • Bahasa Perancis • Bahasa Jerman • Bahasa India non Tamil • Bahasa Burma • Bahasa Thai • Bahasa Jepang • Sejarah • Humaniora Terpadu • Geografi 	<ul style="list-style-type: none"> • Matematika • Matematika Tambahan • Fisika (SPA) • Kimia (SPA) • Biologi (SPA) • Sains (Fisika, Kimia) • Sains (Fisika, Biologi) • Sains (Kimia, Biologi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Musik • Musik Lanjutan • Makanan dan Nutrisi • Seni • Seni Lanjut • Desain dan Teknologi • Prinsip-prinsip Akuntansi
--	---	--

O-Level School Initiated Elective (OSIE) Cambridge Subjects

Mata pelajaran OSIE ditujukan untuk memberi kebebasan kepada Sekolah Menengah dalam menyediakan pelajaran O-Level tertentu sesuai dengan *area niche* masing-masing sekolah. Mata pelajaran yang termasuk dalam kategori ini adalah Ekonomi, Drama, Pendidikan Jasmani, Pelajaran Komputer dan Studi Bisnis.

Applied Subjects

Mata pelajaran pada kategori ini dibentuk oleh kerja sama antara Politeknik dengan Sekolah Menengah. Mata pelajaran ini ditujukan untuk memberikan pendidikan yang lebih fokus kepada praktek. Mata pelajaran yang termasuk dalam *Applied Subjects* adalah Elektronika Dasar, Studi Media, Bioteknologi, Studi Perancangan dan Pengantar ke Pengembangan Perusahaan.

Pelajaran Lokal yang diuji dengan Bahasa Ibu

Bahasa Cina	Bahasa Melayu	Bahasa Tamil
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahasa Cina Lanjutan</i> • <i>Bahasa Cina</i> • <i>Bahasa Cina (Program Khusus)</i> • <i>Sastera Cina</i> • <i>Bahasa Cina B</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahasa Melayu Lanjutan</i> • <i>Bahasa Melayu</i> • <i>Bahasa Melayu (Program Khusus)</i> • <i>Sastera Melayu</i> • <i>Bahasa Melayu B</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahasa Tamil Lanjutan</i> • <i>Bahasa Tamil</i> • <i>Sastera Tamil</i> • <i>Bahasa Tamil B</i>

Pilihan Bahasa Ibu B (Bahasa Cina B, Bahasa Melayu B, dan Bahasa Tamil B) tidak termasuk dalam mata pelajaran O-Level dan nilai mata pelajaran tersebut tidak akan diikutkan dalam perhitungan nilai akhir O-Level. Terdapat 3 tingkatan nilai pada Bahasa Ibu B, yaitu Merit, Pass, dan Ungraded. Siswa yang mengambil mata pelajaran ini dengan nilai minimum Pass akan dianggap memenuhi syarat nilai Bahasa Ibu untuk penerimaan ke *Junior College* (JC).

Siswa pada program Special dan Express wajib mengambil minimum 6 mata pelajaran O-Level. Siswa dapat mengambil maksimum 9 mata pelajaran. Apabila siswa hendak mengambil 10 mata pelajaran, siswa harus mendapatkan ijin dari MOE. Mata pelajaran wajib untuk program ini adalah:

- Bahasa Inggris (meliputi *Oral Examination*)
- Matematika
- Bahasa Ibu (meliputi *listening* dan *Oral Examination*, dapat digantikan oleh *Second Language* atau Sastera)
- Humaniora Terpadu (Studi Sosial dan pilihan antara Geografi, Sejarah, Sastera Inggris, Cina, Melayu, atau Tamil)
- Sains, yaitu Sains Murni dan atau Sains Terpadu (2 dari mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi).

Untuk program *Normal (Academic)*, siswa dapat mengambil 4 sampai 7 mata pelajaran O-Level. Mata pelajaran wajib untuk program ini adalah:

- Bahasa Inggris
- Matematika

- Bahasa Ibu (dapat digantikan dengan *Second Language*)
- Sains Terapan (2 dari mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi)
- Humaniora Terapan (Studi Sosial dan pilihan antara Geografi, Sejarah, atau Sastera)

Silabus untuk masing-masing mata pelajaran dapat dilihat pada [43].

Hasil ujian O-Level akan diberikan kepada semua peserta ujian. Sertifikat GCE O-Level akan diberikan kepada peserta yang memperoleh nilai lebih besar sama dengan 6 pada satu mata pelajaran atau lebih. Adapun standar nilai yang terdapat pada ujian O-Level adalah: A(1, 2), B (3, 4), C (5, 6), D7, E8, dan F9.

4.1.5 GCE A-Level

Ujian GCE A-Level diberikan kepada siswa Junior College (JC) dan *Centralised Institute* (CI). Hasil ujian ini dapat digunakan untuk pendaftaran dan penerimaan ke universitas dan Politeknik. Mata pelajaran yang diujikan untuk A-Level terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu:

- *Higher 1* (H1), merupakan mata pelajaran dengan konten separuh dari mata pelajaran H2. tingkat H1 berlaku sejak tahun 2006 menggantikan mata pelajaran AO.
- *Higher 2* (H2), merupakan mata pelajaran dengan tingkat kesulitan setara dengan mata pelajaran A-Level sebelum tahun 2006.
- *Higher 3* (H3), merupakan mata pelajaran dengan tingkat kesulitan lebih tinggi dari H2 dan membutuhkan pemahaman lebih mendalam (konten yang lebih tinggi, melibatkan riset, modul dari universitas). tingkat ini menggantikan S-Level sebelum tahun 2006.

Mata pelajaran yang diujikan pada ujian GCE A-Level dapat dilihat di laman SEAB [44]. Adapun kombinasi mata pelajaran yang wajib diambil siswa secara umum adalah sebagai berikut:

- 3 mata pelajaran H2 dan 1 mata pelajaran H1 (minimum terdapat 1 mata pelajaran yang dari disiplin yang berbeda, yang dikenal dengan istilah *contrasting subject*)
- H1 Bahasa Ibu (*Mother Tongue Language*, MTL)
- H1 General Paper (GP)

- H1 Project Work (PW)

Selain dari kombinasi di atas, terdapat juga beberapa pilihan kombinasi mata pelajaran lainnya apabila siswa mengambil subjek tertentu yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi, antara lain:

- Mata pelajaran Knowledge & Inquiry (KI) dapat diambil menggantikan mata pelajaran GP. Selain itu, KI dapat dianggap sebagai contrasting subject, sehingga siswa dapat mengambil kombinasi mata pelajaran berikut:
 KI (pengganti GP dan contrasting subject)
 3 mata pelajaran H2
 H1 Bahasa Ibu
 H1 Project Work
- Bahasa Ibu dan Sastera (Mother Tongue Language & Literature, MTLL) dapat diambil menggantikan MTL. Mata pelajaran ini juga dapat dihitung sebagai mata pelajaran H2, sehingga siswa dapat mengambil kombinasi mata pelajaran berikut:
 H2 MTLL
 2 mata pelajaran H2 dan 1 mata pelajaran H1 (termasuk contrasting subject)
 H1 GP
 H1 PW
- Siswa yang memiliki minat di bidang tertentu dapat mengambil salah satu dari tambahan mata pelajaran berikut:
 1 mata pelajaran H1 atau H2.
 Maksimal 2 mata pelajaran H3.

Contrasting subject merupakan mata pelajaran yang berasal dari disiplin yang berbeda ditujukan untuk memperkaya pengetahuan siswa terhadap bidang di luar area spesialisasi mereka. Mata pelajaran ini dapat diambil pada tingkat H1 maupun H2.

Untuk mata pelajaran H3, terdapat beberapa mata pelajaran yang tidak dapat diambil secara bersamaan karena konten yang mirip, yaitu:

- MOE H3 Intisari Fisika Modern (*Essentials of Modern Physics*), NUS Fisika Modern, dan NTU Fisika dan Piranti Semikonduktor (*Semiconductor Physics & Devices*)

- NUS Biodiversity dan NTU Biologi Molekular (*Molecular Biology*)
- NTU Angka dan Matriks (*Number & Matrices*) dan NUS Aljabar Linier (*Linear Algebra*)

Selain itu, terdapat mata pelajaran H3 di bidang sastera yang membutuhkan topik riset, yaitu NUS-MOE Humaniora dan Sains Sosial (*Humanities & Social Science*) dan H3 MOE-developed *Research Essays*. Siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakan topik riset yang telah dipakai pada mata pelajaran lain (Sastera Inggris, Sejarah, Geografi) untuk mata pelajaran tersebut. Sumber primer sastera yang telah digunakan pada mata pelajaran H3 Sastera Inggris, Bahasa dan Sastera Cina serta Bahasa dan Sastera Malaysia juga tidak boleh digunakan untuk mata pelajaran NUS-MOE Penelitian Bidang Humaniora dan Sains Sosial (*Humanities & Social Science Research*)

Mata pelajaran MTL dapat digantikan dengan mata pelajaran H1 Bahasa India Non-Tamil (Non-Tamil Indian Language) atau H1 Bahasa Asing (Foreign Language). Selain itu, apabila siswa telah menyelesaikan mata pelajaran Bahasa Ibu Lanjutan (Higher MTL) pada ujian O-Level dengan nilai minimum D7, maka siswa dianggap telah memenuhi persyaratan H1 MTL. Namun siswa diharapkan untuk tetap mengikuti proses pembelajaran MTL.

Ujian A-Level akan dilakukan pada akhir tahun ke-2 JC atau akhir tahun ke-3 CI. Namun, terdapat beberapa ujian mata pelajaran yang dapat diambil pada akhir tahun ke-1 JC atau akhir tahun ke-2 CI, yaitu:

Satu mata pelajaran H1 (*content-based*). Siswa tidak diperbolehkan mengulang ujian mata pelajaran tersebut pada akhir tahun ke-2 JC atau tahun ke-3 CI.

Mata pelajaran H1 MTL. Siswa dapat mengulang mata pelajaran ini pada akhir tahun ke-2 JC atau akhir tahun ke-3 CI.

Project Work akan diuji pada akhir tahun ke-1 JC atau tahun ke-2 CI dan tidak dapat diulang pada akhir tahun ke-2 JC atau tahun ke-3 CI.

Hasil ujian GCE A-Level akan diberikan kepada semua peserta ujian. Sertifikat A-Level akan diberikan kepada peserta yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan E pada satu mata pelajaran atau lebih. Adapun

standard nilai ujian GCE A-Level adalah sebagai berikut:

Mata pelajaran H1 dan H2: *A, B, C, D, E, S (subpass), Ungraded.*

Mata pelajaran H3: *Distinction, Merit, Pass, Ungraded.*

4.2 Kualifikasi Pendidikan Pasca Sekolah Menengah (*Post-Secondary*)

Di samping A-level, terdapat kualifikasi lain untuk jenjang pendidikan setelah Sekolah Menengah. Kualifikasi pendidikan tersebut antara lain disediakan oleh ITE dan Politeknik.

4.2.1 Sertifikasi dari ITE

Sejak tahun 2002, sertifikasi ITE digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu [45, 46, 47]:

1. National ITE Certificate (NITEC)
Sertifikasi NITEC menggantikan sertifikasi National Technical Certificate Grade 2 (NTC-2), Certificate in Office Skills (COS), dan National Certificate in Nursing (NCN) pada sistem sertifikasi sebelumnya. Pelatihan untuk NITEC ditempuh selama 2 sampai 3 tahun dengan syarat masuk berupa hasil GCE N-Level atau GCE O-Level.
2. Higher National ITE Certificate (Higher NITEC)
Sertifikasi Higher NITEC menggantikan sertifikasi Industrial Technician Certificate (ITC) dan Certificate in Business Studies (CBS) pada sistem sertifikasi sebelumnya. Sertifikasi ini dapat diperoleh melalui pelatihan selama 2 tahun dengan syarat masuk berupa hasil GCE O-Level atau sertifikasi NITEC.
3. Master National ITE Certificate (Master NITEC)
Sertifikasi Master NITEC menggantikan sertifikasi National Technical Certificate Grade 1 (NTC-1) pada sistem sertifikasi sebelumnya. Sertifikasi ini setara dengan kualifikasi Meister di Jerman. Syarat mengikuti sertifikasi ini adalah sertifikasi NITEC atau NTC-2 dengan pengalaman kerja yang relevan.

Selain itu, ITE juga menyediakan program diploma dengan sertifikasi

Technical Engineer Diploma (TED). Sertifikasi ini diperuntukan bagi lulusan NITEC dan *Higher NITEC*. Sertifikasi TED dapat diperoleh melalui pelatihan selama kurang lebih 2 tahun ditambah pengalaman kerja selama 1,5 tahun di industri yang relevan. Saat ini, terdapat 3 program diploma di ITE, yaitu *Technical Diploma in Culinary Arts*, *Technical Engineer Diploma in Automotive Engineering*, dan *Technical Engineer Diploma in Machine Technology*.

4.2.2 Sertifikasi dari Politeknik

Politeknik menyediakan sertifikasi diploma dengan lama pendidikan selama 3 tahun termasuk kerja praktek selama 6 minggu sampai 6 bulan. Gelar Diploma menekankan pembelajaran berbasisan praktek. Politeknik juga menyediakan program *Post-Diploma*, antara lain:

- *Specialist Diploma*
Program *Specialist Diploma* ditujukan untuk lulusan Diploma yang ingin menambah spesialisasi keahlian dalam bidang mereka. Program ini ditempuh dalam waktu 1 tahun.
- *Advanced Diploma*
Sama seperti program *Specialist Diploma*, program ini ditujukan untuk lulusan Diploma yang membutuhkan spesialisasi keahlian dalam bidang mereka. Program ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *Specialist Diploma*. Program ini dapat ditempuh dalam waktu antara 1,5 sampai 2 tahun.
- *Diploma (Converted)*
Program ini ditujukan untuk lulusan Diploma yang membutuhkan keahlian di disiplin yang berbeda dengan bidang Diploma mereka. Program ini dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun.

Disamping program Diploma, politeknik juga menyediakan beberapa macam pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja, yaitu *Short Courses* dan *Workforce Skills Qualifications (WSQ) Courses*.

5

Sistem Penjaminan Kualitas

Dua hal yang paling sering dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi kualitas pendidikan adalah sumber daya staf pengajar dan institusi pendidikan. Bab ini akan membahas kedua tolok ukur tersebut dalam dua bagian. Bagian 5.1 akan menjelaskan peran divisi-divisi yang berada di dalam struktur organisasi *Ministry of Education* (MOE) dalam penjaminan kualitas pendidikan di Singapura, dan Bagian 5.2 akan menjelaskan mengenai sistem penjaminan kualitas guru di tingkat sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga *Junior College* yang meliputi aspek rekrutmen dan aspek pembinaan guru oleh MOE sebagai pengatur sistem pendidikan di Singapura.

5.1 Peran MOE dalam Penjaminan Kualitas

Dalam urusan penjaminan kualitas guru dan institusi pendidikan, MOE memiliki divisi-divisi khusus yang diuraikan di bawah ini.

5.1.1. Academy of Singapore Teachers

Academy of Singapore Teachers atau akademi guru Singapura adalah divisi di dalam MOE yang memiliki misi membangun keunggulan profesional pada guru dengan berfokus pada perkembangan yang terpadu pada anak [52]. Divisi ini memiliki komitmen untuk membangun profesionalisme guru demi kesuksesan siswa dan sekolah.

5.1.2. Schools Division

Schools Division atau divisi sekolah adalah divisi yang mengatur sekolah-sekolah di Singapura berdasarkan area atau lokasi [53]. Divisi sekolah ini memiliki lima cabang yang terdiri dari empat cabang area sekolah, yaitu sekolah cabang area utara, selatan, timur, dan barat, dan satu cabang penilaian sekolah atau yang disebut sebagai *school appraisal branch*. *School appraisal branch* bertanggung jawab pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi *School Excellence Model* (SEM) dan sistem penilaian MOE. Cabang ini juga menyediakan konsultasi dalam hal evaluasi sekolah yang diselenggarakan secara mandiri dan pengecekan eksternal pada sekolah-sekolah. Tujuan dari keberadaan *school appraisal branch* ini adalah untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah yang berkesinambungan dan membantu sekolah untuk menjadi lebih teroganisir dan tertata agar dapat menyediakan pendidikan yang berkualitas.

5.1.3. Higher Education Division

Higher Education Division atau divisi pendidikan tinggi bertugas mengontrol peraturan pendidikan tersier dan teknikal di Singapura dan juga menangani registrasi sekolah swasta [54]. Divisi ini mengawasi perkembangan 5 universitas otonom di Singapura dan mengatur 9 badan pendidikan resmi yang terdiri dari:

- 5 Politeknik, yang mencakup Nanyang Polytechnic [55], Ngee Ann Polytechnic [56], Republic Polytechnic [57], Singapore Polytechnic [58], dan Temasek Polytechnic [59]
- Institute of Technical Education (ITE) [60]
- Science Centre Singapore (SCS) [61]
- Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) [62]
- Council for Private Education (CPE) [63]

Divisi pendidikan tinggi juga mengawasi ketetapan di tempat-tempat yang disubsidi oleh publik di institusi-institusi pendidikan berikut:

- Singapore Institute of Management (SIM) University,
- LASALLE College of the Arts, dan
- Nanyang Academy of Fine Arts

Misi utama dari divisi pendidikan tinggi ini adalah mengarahkan dan mendukung pembangunan pendidikan pasca Sekolah Menengah yang berkualitas dan mendukung tujuan ekonomi dan sosial di tingkat nasional. Divisi pendidikan tinggi juga bertugas memfasilitasi pembangunan pendidikan informal yang berkualitas melalui *Science Centre Singapore* dan *Institute of Southeast Asian Studies*, sekaligus menawarkan pelayanan berkualitas bagi penyedia pendidikan swasta. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, divisi pendidikan tinggi terbagi menjadi 9 bidang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:

- Bidang kebijakan
Bidang ini menginisiasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah di tingkat universitas, politeknik, dan pendidikan tersier bidang teknikal dan seni. Bidang ini juga merancang kebijakan dalam pengaturan sektor pendidikan privat dan mengawasi proses perencanaan tenaga kerja lulusan pendidikan paska pendidikan sekunder.
- Bidang perencanaan dan penelitian
Bidang ini menyelenggarakan riset, termasuk pengumpulan dan analisis data, dalam rangka perancangan strategi kebijakan untuk sektor pendidikan paska pendidikan sekunder.
- Jawatan pendidikan dan pelatihan lanjutan
Jawatan ini bertugas mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan dan pelatihan lanjutan di *Institute of Technical Education* (ITE), politeknik, dan universitas, dan menjalin hubungan kerja sama dengan agensi ekonomi dan industri untuk menyiapkan pendidikan dan pelatihan lanjutan di lembaga-lembaga pendidikan lanjutan.
- Bidang riset akademik
Bidang ini merancang kebijakan pemerintah dalam hal riset akademis, mengatur dana riset MOE, serta memfasilitasi berdirinya *Research Centres of Excellence* (RCEs) di Singapura.
- Bidang sekolah swasta
Bidang ini mengatur peraturan dan undang-undang pendidikan di sekolah dan registrasi sekolah-sekolah swasta di bawah undang-undang pendidikan.

- Bidang finansial
Bidang ini merancang, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendanaan MOE, mengatur budget pendidikan, dan mengatur skema Tuition Grant (TG) dan Service Obligation (SO) di sektor pendidikan tinggi.
- Bidang penjaminan kualitas pendidikan tinggi
Bidang ini melakukan pengawasan penjaminan kualitas di institusi pendidikan paska pendidikan sekunder, dan penyetaraan standar dengan sistem pendidikan tinggi di negara-negara lain.
- Bidang sumber daya manusia
Bidang ini mengatur sumber daya manusia dan pelatihan pada umumnya dan memfasilitasi penunjukan dan pembaruan anggota dewan di dewan pemerintahan.
- Bidang operasional
Bidang ini mengurus administrasi divisi pendidikan tinggi di pusat, menjaga kredibilitas respon divisi pendidikan tinggi MOE kepada masyarakat, dan menjalankan respon manajemen krisis.

5.1.4. Internal Audit Branch

Internal Audit Branch atau cabang audit internal merupakan cabang independen yang didirikan di dalam MOE untuk melaksanakan audit dan tinjauan finansial dan operasional untuk memastikan bahwa sistem kontrol internal berjalan dengan efektif dan efisien [64]. Fungsi-fungsi khusus dari divisi ini meliputi penyelenggaraan audit di tingkat sekolah, verifikasi integritas dan keabsahan data-data akunting dan finansial, pengadaan tinjauan khusus sesuai perintah komite audit, dan melakukan investigasi atas dugaan malpraktik finansial.

5.2. Sistem Penjaminan Kualitas Guru

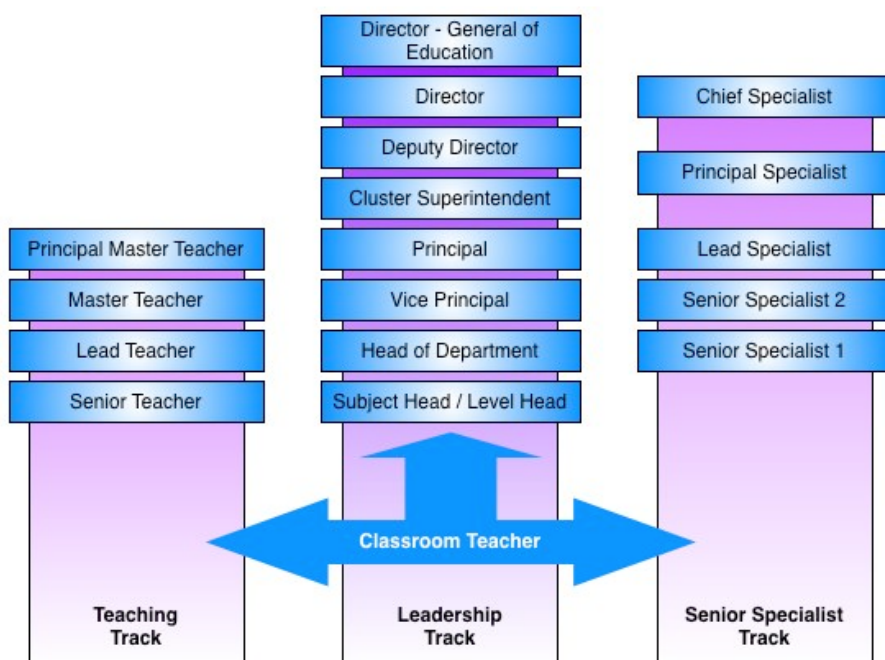
Guru di Singapura tergolong dalam kategori civil servant atau pegawai negeri sipil dan direkrut langsung oleh MOE. Dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki sumpah guru atau *Teachers' Pledge* yang dikutip dalam Bahasa Inggris sebagai berikut [65]:

“ *We, the teachers of Singapore, pledge that:*

- *We will be true to our mission to bring out the best in our students.*
- *We will be exemplary in the discharge of our duties and responsibilities.*
- *We will guide our students to be good and useful citizens of Singapore.*
- *We will continue to learn and pass on the love of learning to our students.*
- *We will win the trust, support and co-operation of parents and the community so as to enable us to achieve our mission.”*

Sumpah guru di atas memberi gambaran dasar komitmen guru di Singapura, yang mana mencakup tiga peran penting. Ketiga peran tersebut adalah menjadi teladan bagi murid, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan misi pendidikan, dan membangun warga negara Singapura yang baik dan bermanfaat bagi bangsa.

Untuk memfasilitasi aspirasi karir guru-guru yang berbeda, MOE menyediakan tiga jalur karir bagi guru, yaitu *Teaching Track*, *Leadership Track*, dan *Senior Specialist Track*. Bagi guru-guru yang mengambil jalur mengajar (*Teaching Track*), mereka akan diberi kesempatan untuk membangun profesionalisme dan keahlian dalam kemampuan pedagogi atau pembentukan kurikulum. Posisi puncak untuk jalur ini adalah *Principal Master Teacher*. Bagi guru-guru yang mengambil jalur kepemimpinan (*Leadership Track*), mereka akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dengan menjalankan posisi kepemimpinan di sekolah dan MOE. Bagi guru-guru yang mengambil jalur spesialis (*Senior Specialist Track*), mereka akan diberi kesempatan untuk mengembangkan lebih jauh minat dan ketertarikan mereka pada bidang ilmu yang khusus. Guru-guru yang mengambil jalur ini pada akhirnya akan diharapkan untuk dapat merintis inovasi baru di bidang pendidikan. Gambar 5.1 memperlihatkan diagram jenjang karir guru untuk masing-masing jalur secara lebih mendetail.



Gambar 5.1: Jenjang karir guru untuk jalur karir mengajar, kepemimpinan, dan spesialis [66]

Dalam pengembangan karir guru dalam sektor pendidikan, pada tahun 2011, MOE menerapkan kerangka mengajar yang disebut sebagai *TEACH framework* [67]. Istilah *TEACH framework* pada dasarnya mengacu pada lima misi pengembangan bagi pengajar atau guru:

- Strengthen Teacher professionalism;*
- Deepen Engagement with teachers;*
- Fulfil teachers' Aspirations;*
- Enhance teachers' Career opportunities; and*
- Achieve Harmony in work and life.*

Intisari dari *TEACH framework* dapat dilihat pada Gambar 5.2. Dengan adanya *TEACH framework*, guru-guru akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam profesinya sebagai pendidik, memperdalam ketrampilan mengajar mereka, dan berkembang menuju aspirasi karir mereka.



Gambar 5.2: TEACH framework [67]

Rentang gaji guru MOE dibedakan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja masing-masing guru (lihat Tabel 5.1) [68]. Selama menjalani profesi mereka sebagai guru MOE, guru berhak mendapatkan tiga jenis bonus. Jenis yang pertama disebut sebagai *Non-Pensionable Annual Allowance* (NPAA), di mana semua guru mendapatkan gaji ke-13 pada bulan Desember yang biasanya setara dengan satu bulan gaji. Jenis bonus yang kedua disebut sebagai *Annual Variable Component* (AVC), yang dibagikan di bulan Juli dan Desember dan jumlahnya bergantung pada kondisi ekonomi Singapura pada tahun tersebut. Jenis bonus yang ketiga adalah *Performance Bonus*, yang diperuntukkan bagi guru yang sudah menjalani program studi di NIE. *Performance bonus* biasanya dibayarkan di bulan Maret berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru pada tahun sebelumnya.

Guru yang merupakan warga negara atau residen permanen Singapura juga berhak mendapatkan *Central Provident Fund* (CPF) *contributions* [69]. *CPF contribution* adalah tambahan dana yang diberikan oleh MOE sebagai *employer* bagi tabungan pensiun warga negara dan *residen permanen* Singapura. Di samping semua benefit di atas, guru juga mendapatkan asuransi kesehatan, jatah liburan di masa liburan sekolah, 10 hari cuti pribadi di masa sekolah (hanya untuk alasan urgen), dan diskon dalam penggunaan vila milik pemerintah. MOE juga memiliki *CONNECT Plan* yang diperuntukkan bagi guru tetap. Dengan

CONNECT Plan ini, sejumlah dana akan dibayarkan kepada guru sebagai tambahan deposit yang bisa digunakan sebagai bantuan finansial ketika mengambil komitmen finansial jangka panjang, terutama di awal pengembangan karir. Deposit ini hanya akan diberikan kepada guru yang memiliki kinerja yang baik.

Tabel 5.1: Rentang Gaji Guru Berdasarkan Kualifikasi [68]

Position	Qualification	Salary
<i>General Education Officer 1 (GEO 1)</i>	<i>Pass Degrees</i> (Bachelor tanpa Honors)	3,010 SGD
	Honors	3,210 – 3,310 SGD
<i>General Education Officer 2 (GEO 2)</i>	D3 Politeknik (program mata kuliah teknikal)	1,920 SGD
	D3 Politeknik (program mata kuliah non-teknikal)	1,870 SGD
	'A'-Level (setara SMA)	1,480 SGD
'O'-Level Programme	<i>Art & Music Teacher Training Scheme</i>	Dalam 3 tahun pertama, kandidat akan diberi bursary sebesar 800 SGD / bulan dan di tahun terakhir, kandidat akan digaji 1,870 SGD / bulan.
	<i>Chinese Language Teacher Specialization Scheme</i>	

5.2.1 Proses Rekrutmen Guru

Guru yang direkrut oleh MOE pada dasarnya dapat dikategorikan berdasarkan bidang studi sebagai berikut:

- Seni, Musik, Pendidikan Jasmani
- Humaniora
- Sains
- Bahasa dan Sastra Inggris
- Bahasa Ibu
- General Paper

Dalam menjalankan proses rekrutmennya, MOE membedakan pelamar dalam tiga jalur berdasarkan latar belakang calon guru sebagai berikut: 1) pelamar tanpa kualifikasi mengajar, 2) pelamar dengan kualifikasi mengajar, dan 3) pelamar yang sebelumnya merupakan guru yang sudah menjalani program studi mengajar di *National Institute of Education* (NIE) [70]. Bagi pelamar dengan kategori (2) dan (3), proses rekrutmen yang dilalui lebih mudah dan sederhana daripada pelamar tanpa kualifikasi mengajar. Oleh karena itu, bab ini hanya akan membahas proses rekrutmen kategori (1), yaitu pelamar tanpa kualifikasi mengajar. Pelamar yang termasuk dalam kategori ini meliputi lulusan *Bachelor (degree holders)*, *'A' Level/Diploma holders*, dan *'O' Level holders*. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam proses rekrutmen pelamar tanpa kualifikasi mengajar.

Tahap 1: Mengetahui pilihan jalur pendaftaran sesuai kualifikasi pendidikan

Semua pelamar yang berhasil melewati proses seleksi akan menjalani pelatihan di *National Institute of Education* (NIE) melalui salah satu program di bawah ini:

- *Degree holders: Postgraduate Diploma in Education (PGDE)*
- *A-level/Diploma holders:*
 - o *Bachelor of Arts / Bachelor of Science (Education)*
 - o *Diploma in Education*
- *O-level holders:*
 - o *Art and Music Teacher Training Scheme*
 - o *Chinese Language Teacher Specialization Scheme*

Tahap 2: Mengikuti jadwal pendaftaran sesuai informasi yang tercantum di website MOE

Jadwal rekrutmen yang tersedia di website MOE meliputi tanggal penutupan pendaftaran, periode interview, dan awal masa mengajar. Apabila lamaran dimasukkan setelah pendaftaran ditutup, lamaran akan dipertimbangkan di masa pendaftaran berikutnya. Bagi pelamar yang masih bersekolah/kuliah, lamaran dapat dimasukkan di semester akhir masa sekolah/kuliah. Tabel 5.2 dan 5.3 menunjukkan jadwal pendaftaran untuk masa ajaran 2014/2015 [71].

Tabel 5.2: Masa Pendaftaran Pelamar Dengan Kualifikasi Bachelor Atau Lebih Tinggi

Minimum Qualification required	Application Window	Application Closing Date	Interview Period	If you are shortlisted for the interview, you will be contacted by this date	Starting Date of Compulsory Untrained Contract Teaching Stint
University Degree	10 May 2014 to 13 Jun 2014	13 Jun 2014	Jun/Jul 2014	18 Jul 2014	Early Sep / End Dec 2014
	27 Sep 2014 to 17 Oct 2014	17 Oct 2014	Oct/Nov 2014	21 Nov 2014	End Dec 2014 / Mid Mar 2015

Tabel 5.3: Masa Pendaftaran Pelamar Dengan Kualifikasi A Level / Diploma

Minimum Qualification required	Application Window	Application Closing Date	Interview Period	If you are shortlisted for the interview, you will be contacted by this date	Starting Date of Compulsory Untrained Contract Teaching Stint
'A' Level/ International Baccalaureate/ Diploma	10 May 2014 to 13 Jun 2014	13 Jun 2014	Jun/Jul 2014	18 Jul 2014	Early Sep 2014 / End Dec 2014
	27 Sep 2014 to 17 Oct 2014	17 Oct 2014	Oct/Nov 2014	21 Nov 2014	End Dec 2014 / Mid Mar 2015

Tahap 3: Pendaftaran online melalui portal “MOE Teach Website” [72]

Tahap 4: Interview

Apabila aplikasi yang dikirimkan berhasil lulus seleksi berkas, pelamar akan dihubungi melalui email untuk menghadiri interview.

Tahap 5: *Update of application status*

Setelah interview, kandidatan dihubungi kembali dalam 2-4 minggu. Jika kandidat tidak memenuhi kriteria program NIE pada jalur program studi yang sudah ditentukan, pelamar akan diminta untuk

mengambil *Entrance Proficiency Tests*. Jika sudah memenuhi kriteria, aplikasi yang ada akan diteruskan untuk dipertimbangkan bersama dengan aplikasi kandidat-kandidat lain.

Tahap 6: *Entrance Proficiency Tests*

Berikut adalah mata pelajaran *Entrance Proficiency Tests* berdasarkan bidang studi yang diambil:

- Bidang Bahasa Inggris: Bahasa Inggris EPT
- Bahasa Ibu: Bahasa Cina EPT, Bahasa Melayu EPT, Bahasa Tamil EPT
- Pendidikan Jasmani: *proficiency test* Pendidikan Jasmani
- Seni (Art): *NIE Art focused interview*
- Musik: *NIE music audition*

Tahap 7: *Compulsory school stint*

Jika kandidat dinyatakan lulus *interview* dan EPT, pelamar akan dipekerjakan sebagai *untrained contract teacher* dan ditempatkan di sebuah sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman terjun mengajar langsung bagi kandidat. Proses ini penting bagi MOE untuk mengetahui seberapa cocok kandidat tersebut sebagai pengajar dan juga untuk memastikan minat kita pada profesi pendidik.

Tahap 8: *NIE enrolment*

Setelah selesai *compulsory school stint*, jika dianggap sesuai untuk mengajar, kandidat akan menjalani program pelatihan di NIE. Penjelasan lebih lanjut mengenai program-program NIE akan disampaikan di bagian 5.2.2.

5.2.2 Proses Pembinaan Guru

Guru yang baru direkrut oleh MOE dikategorikan ke dalam tiga kualifikasi: lulusan ***Bachelor (Degree holders)***, lulusan 'A' tingkat atau Diploma, dan lulusan 'O' Level. Setelah diterima, masing-masing calon guru akan menjalani proses pelatihan yang berbeda dari NIE sesuai dengan kualifikasi mereka. Berikut adalah informasi mengenai masing-masing program pelatihan berdasarkan kualifikasi pendidikan pengajar.

a. *Degree Holders*

Semua guru baru yang merupakan lulusan universitas diwajibkan untuk menjalani pelatihan *Postgraduate Diploma in Education* (PGDE). Semua peserta PGDE menjalani pelatihan selama 1 tahun, kecuali guru Pendidikan Jasmani (*Physical Education* , PE) menjalani pelatihan selama 2 tahun (lihat Tabel 5.4).

Tabel 5.4: Masa Pelatihan *Postgraduate Diploma in Education* (PGDE)

Programme	Length of Training	Teaching Level	Bond
PGDE	1 year	Primary / Secondary / Junior College	3 years
PGDE (PE)	2 years		

Program *Postgraduate Diploma in Education* (PGDE) diselenggarakan oleh *National Institute of Education* (NIE) [73]. Program ini berada di bawah pengawasan *Sub Dean for Postgraduate Diploma in Education* (SD/PGDE) dan bertujuan mempersiapkan lulusan universitas untuk memulai karir mengajar di tingkat *primary*, *secondary*, dan *Junior College*, atau menjadi guru *Physical Education* [74]. Hal-hal yang dipelajari selama pelatihan PGDE mencakup empat komponen sebagai berikut [75]:

Studi Kependidikan (*Education Studies*)

Studi Kependidikan berisi konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama dalam pendidikan yang sangat penting bagi para guru untuk memberikan pengajaran yang efektif dan pelatihan yang reflektif. Para guru juga akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari lebih dalam beberapa aspek signifikan dalam pendidikan.

Studi Kurikulum (*Curriculum Studies*)

Studi Kurikulum memberikan spesialisasi dalam metodologi pengajaran di tingkat dasar, menengah, maupun *Junior College*. Pelatihan yang diberikan telah didesain sedemikian rupa agar guru mendapatkan keterampilan pedagogi dalam mengajarkan mata pelajaran spesifik di sistem persekolahan di Singapura di masing-masing tingkat sekolah, baik itu dasar, menengah, maupun *Junior College*. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai Studi Kurikulum di masing-masing tingkat sekolah (dasar, menengah, *Junior College*).

o PGDE (*Primary*)

Mata pelajaran yang diambil di tingkat PGDE (*Primary*) (*General*) Curriculum Studies adalah:

Pengajaran Bahasa Inggris (*The Teaching of English Language*)

Pengajaran Matematika (*The Teaching of Mathematics*)

Pengajaran Studi Sosial (*The Teaching of Social Studies*)

Pengajaran Sains (*The Teaching of Science*)

Mata pelajaran yang diambil di tingkat PGDE (*Primary*) (*Mother Tongue*) Curriculum Studies adalah:

CS1: Pengajaran Bahasa Cina/Melayu/Tamil (*The Teaching of Chinese/Malay/Tamil Language*)

CS2: Pengajaran Pendidikan Moral (*The Teaching of Moral Education*) (Bahasa Cina/Melayu/Tamil)

Mata pelajaran yang diambil di tingkat PGDE (*Primary*) (*Teaching of Art or Music*) Curriculum Studies hanya satu mata pelajaran, yaitu Seni (*Art*) atau Musik. Calon Guru yang mengambil jalur *Teaching of Art* di tingkat pendidikan dasar diwajibkan untuk mengambil modul *Subject Knowledge* yang berhubungan dengan area *Art Curriculum Studies* untuk menguatkan pengetahuan guru pada bidang keilmuan yang mereka ajarkan.

Mata pelajaran yang diambil di tingkat PGDE (*Primary*) (*Physical Education*) adalah Pengajaran Pendidikan Jasmani (*Teaching of Physical Education*) sebagai Curriculum Studies year 1 (CS1) selama 2 tahun program pelatihan. Di tahun ke-2, guru Pendidikan Jasmani akan mengambil mata pelajaran Curriculum Studies yang lain sebagai CS2.

o PGDE (*Secondary*)

PGDE (*Secondary*) mengajarkan spesialisasi metodologi dalam pengajaran dua mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah. Bagi guru yang mengambil spesialisasi Bahasa Ibu, mereka akan mengambil mata pelajaran Curriculum Studies sebagai berikut:

CS1: Pengajaran Bahasa Cina/Melayu/Tamil (*The Teaching of Chinese/Malay/Tamil Language*)

CS2: Pengajaran Bahasa Cina/Melayu/Tamil (*The Teaching of Chinese/Malay/Tamil*)

Sastera

o PGDE (Junior College)

PGDE (Junior College) mengajarkan spesialisasi metodologi dalam pengajaran 1 mata pelajaran di tingkat Junior College dan satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Menengah. Mata pelajaran yang diambil di tingkat Junior College haruslah sejalan dengan mata pelajaran yang diambil di tingkat Sekolah Menengah, dengan pengecualian Ekonomi dan General Paper.

Practicum

Practicum terdiri dari kumpulan modul-modul yang wajib diambil oleh seluruh peserta PGDE.

Language Enhancement and Academic Discourse Skills (LEADS)

Language Enhancement and Academic Discourse Skills (LEADS) bertujuan untuk membantu guru-guru baru meningkatkan kemampuan berbahasa mereka saat mengajar, baik lisan maupun tulisan.

Selain keempat komponen di atas, terdapat beberapa pelajaran tambahan untuk bidang studi tertentu. Guru yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Jasmani di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah diwajibkan untuk mengambil komponen ke-5 berupa materi Pendidikan Jasmani yang disebut sebagai Academic Subject. Guru yang mengambil mata pelajaran General di tingkat Junior College diwajibkan untuk mengambil komponen ke-5 yang disebut sebagai Knowledge Skills. Knowledge Skills ini adalah modul pelatihan yang bertujuan membantu mengembangkan nilai, pengetahuan dan ketrampilan pada tingkat guru Junior College.

Biaya pelatihan PGDE dibayar sepenuhnya oleh MOE dan calon guru akan tetap menerima gaji bulanan secara penuh selama program PGDE berlangsung. Setelah menyelesaikan program PGDE, calon guru tersebut akan diikat kontrak kerja dengan MOE selama 3 tahun. Calon yang gagal dalam program NIE atau tidak menyelesaikan ikatan kerja 3 tahun diharuskan membayar liquidated damages ke MOE.

b. A-Level / Diploma Holders

Bachelor of Arts (Edun) / Bachelor of Science (Edun)

Kandidat yang memiliki kualifikasi A Level atau Diploma, melanjutkan pendidikan mereka ke jalur *Bachelor of Arts (Education)* atau *Bachelor of Science (Education)* [76]. Kedua program ini adalah program studi 4 tahun di tingkat perguruan tinggi dengan pilihan jalur seni atau sains. MOE akan membiayai biaya kuliah program *BA/BSc in Education* selama 4 tahun. Sebagai gantinya, setelah lulus, kandidat wajib menjalankan program ikatan kerja dengan MOE selama 4 tahun.

Program *BA (Education)/BSc (Education)* terdiri dari 9 bidang yaitu:

1. *Education Studies*
2. *Curriculum Studies*
3. *Subject Knowledge*
4. *Essential Course*
5. *Practicum*
6. *Language Enhancement and Academic Discourse Skills*
7. *Group Endeavours in Service Learning*
8. *Academic Subjects*
9. *General Electives*

Selain mengikuti program studi yang sudah disediakan, kandidat diperbolehkan mengambil maksimal 3 mata pelajaran yang ditawarkan untuk program Master untuk mempermudah transisi apabila ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran yang ditawarkan di antaranya Studi Olah Raga dan Latihan (*Exercise & Sports Studies*), Studi Sosial (*Social Studies*), Linguistik Terapan, Matematika Untuk Guru, Life Sciences, dan lain-lain. Mahasiswa yang berprestasi memiliki kemungkinan untuk diberi kesempatan mengikuti *NTU-NIE Teaching Scholars Programme* di mana kandidat mendapatkan kesempatan untuk magang mengajar di luar negeri. Setelah lulus dari program ini, kandidat akan mendapatkan titel *Bachelor of Arts (Education)* atau *Bachelor of Science (Education)* dan memiliki kualifikasi profesional untuk mengajar. Lulusan yang berprestasi bahkan mendapatkan kesempatan beasiswa untuk mengambil program Master segera setelah kelulusan.

Proses pendaftaran dibuka di bulan Februari dan Maret setiap tahunnya. Kandidat harus mendaftar melalui program pendaftaran online mahasiswa baru Nanyang Technological University dengan pilihan jurusan berupa Arts (Education) atau Science (Education). Setelah menyelesaikan proses aplikasi online, kandidat diharuskan untuk juga melengkapi aplikasi mengajar di website MOE Teach Online untuk pilihan program mengajar Arts (Education) dan Science (Education).

Diploma in Education

National Institute of Education (NIE) juga menawarkan program Diploma in Education selama 2 tahun bagi kandidat yang memiliki paling tidak salah satu kualifikasi berikut ini [77]:

- 1) Diploma dengan status lulus 5 mata pelajaran O Level termasuk Bahasa Inggris dan Matematika, atau
- 2) Lulus 2 mata pelajaran A atau H2 tingkat dan 2 mata pelajaran AO atau H1 tingkat (termasuk kategori General Paper atau Knowledge & Inquiry), dan jika diminta, lulus 5 mata pelajaran O Level termasuk Bahasa Inggris dan Matematika, atau
- 3) International Baccalaureate Diploma dengan nilai baik dan jika diminta, lulus 5 mata pelajaran O Level termasuk English dan Mathematics.

Durasi belajar dan ikatan kerja program studi Diploma in Education dapat dilihat di Tabel 5.5. Program *Diploma in Education* mengajarkan sebagian bidang studi yang diajarkan di program *Bachelor of Arts and Science in Education*, antara lain:

Education Studies

Curriculum Studies

Subject Knowledge

Practicum

Language Enhancement and Academic Discourse Skills

Academic Subject (hanya untuk Pendidikan Jasmani saja)

Tabel 5.5: Durasi belajar dan ikatan kerja program studi Diploma in Education

Programme	Length of Training	Teaching Level	Bond
Diploma in Art Education	2 years	Secondary	3 years
Diploma in Music Education			
Diploma in Physical Education		Primary	
Diploma in Education (Malay Language)		Primary / Secondary	
Diploma in Education (Tamil Language)			

Biaya pendidikan Diploma in Education ditanggung sepenuhnya oleh MOE dan kandidat akan menerima gaji bulanan termasuk bonus akhir tahun selama pelatihan berlangsung. Begitu masa studi usai, kandidat akan menjalani ikatan kerja selama 3 tahun dengan MOE. Trainee yang gagal dalam program NIE atau tidak menyelesaikan ikatan kerja 3 tahun diharuskan membayar liquidated damages ke MOE. Keterangan lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat di website NIE Diploma in Education [78].

c. *O Level Holders*

Art & Music Teacher Training Scheme

Kandidat yang memiliki kualifikasi O Level dan berkeinginan menjadi guru seni atau musik di tingkat Sekolah Menengah direkomendasikan untuk mendaftar dalam program Art & Music Teacher Training Scheme. Program ini berupa pendidikan diploma 4 tahun di mana kandidat menjalani pelatihan selama 3 tahun di Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) dan menghabiskan 1 tahun terakhir di National Institute of Education (NIE). Mata pelajaran yang diberikan dalam 3 tahun pertama program studi dapat dilihat di Tabel 5.6. Di akhir program studi, kandidat mendapatkan 2 ijazah sekaligus, yang pertama Diploma in Art (Teaching) atau Diploma in Music (Teaching) dari NAFA, dan yang kedua, Diploma in Art Education atau Diploma in Music Education dari NIE. Setelah menyelesaikan studi, kandidat akan dikenai ikatan kerja 5 tahun

dengan MOE untuk mengajar musik atau seni di tingkat secondary termasuk membina kegiatan ekstrakurikuler.

Tabel 5.6: Struktur Program Studi

Tahun	Musik	Seni
Tahun ke 1 hingga ke 3	<p>Dasar-dasar Musik</p> <p>Ketrampilan Pertunjukan (<i>Performance Skills</i>)</p> <p><i>Percussion Ensemble</i></p> <p>Pengajaran Instrumen Musik (<i>Instrumental Teaching</i>)</p> <p>Harmoni</p> <p><i>Aural and Sight-Singing</i></p> <p>Bentuk dan Analisis (<i>Form and Analysis</i>)</p> <p>Komposisi</p> <p>Musik dan Gerakan (<i>Music and Movement</i>)</p> <p>Teknologi Musik</p> <p>Sejarah Musik</p>	<p>Ketrampilan Menggambar</p> <p>Keramik</p> <p>Seni Cetak (<i>Printmaking Art</i>)</p> <p>Fotografi Digital</p> <p>Desktop Publishing</p> <p>Seni Lukis</p> <p>Seni Patung</p> <p>Perancangan Web</p> <p>Anatomi</p> <p>Sejarah Seni</p>
Tahun ke 4	Pendidikan Pedagogi di NIE untuk mengajar di Sekolah Menengah	Pendidikan Pedagogi di NIE untuk mengajar di Sekolah Menengah

Agar dapat diterima di dalam program *Art & Music Teacher Training Scheme*, kandidat diseleksi menurut kriteria-kriteria sebagai berikut:

Setidaknya lulus pada 5 pelajaran O Level termasuk *English as a First Language*.

Music admission: Memiliki nilai yang baik (setidaknya *Grade 6 Practical and Grade 5 Theory*) dalam ujian musik yang diselenggarakan lembaga yang diakui oleh MOE atau lulus ujian *O Level Music*. Mereka yang aktif dalam grup musik dan memainkan alat musik juga dipersilahkan untuk mendaftar. Kandidat akan diterima apabila lolos interview MOE dan audisi musik dari NAFA.

Art admission: Memiliki nilai yang baik dalam mata pelajaran seni pada tingkat O Level. Mereka yang memiliki kualifikasi dan portfolio

seni dari lembaga eksternal juga dipersilakan untuk mendaftar. Pelamar yang terpilih akan diminta untuk mempresentasikan portfolio seni mereka pada saat interview. Kandidat akan diterima apabila lolos interview MOE dan ujian menggambar dari NAFA.

Khusus bagi kandidat laki-laki, wajib untuk melaporkan bahwa mereka sudah menyelesaikan *National Service* (program wajib militer) atau sudah diberi izin resmi untuk menunda *National Service*.

Chinese Language Teacher Specialisation Scheme

Selain program *Art & Music Teacher Training Scheme*, MOE juga membuka peluang *Chinese Language Teacher Specialisation Scheme* untuk mengajar Bahasa Cina (*Chinese Language*, CL) di tingkat Sekolah Dasar. Kandidat akan menempuh program Diploma 4 tahun di mana kandidat akan menempuh pendidikan 3 tahun di *Ngee Ann Polytechnic* (NP) dan 1 tahun terakhir di *National Institute of Education* (NIE). Dua tahun pertama berisi mata kuliah wajib seputar bahasa, budaya, sejarah, dan Sastra Cina. Di tahun ketiga, kandidat akan diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah di NIE dan menjalani praktikum mengajar di bawah koordinasi NIE. Di tahun terakhir, kandidat akan mendapatkan kesempatan belajar di *Huazhong Normal University*, China. Setelah menyelesaikan program studi yang ada, kandidat akan mendapatkan *Diploma in Chinese Studies (Teaching)* dari NP dan *Diploma in Education (Chinese Language Specialization)* dari NIE [79].

Di luar pendidikan formal melalui program NIE, MOE juga memberi kesempatan pengembangan diri dalam bentuk lain. Salah satunya melalui *Professional Development Packages and Leave Scheme*, di mana MOE menawarkan beberapa jenis beasiswa, pinjaman dana pendidikan, dan kesempatan cuti untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, terutama dalam studi kurikulum, kebijakan dan administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan, dan psikologi pendidikan. *Program Teachers' Work Attachment* juga disediakan untuk memberikan kesempatan magang di institusi eksternal untuk mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, guru-guru juga diberi kesempatan untuk menghadiri kursus dan konferensi untuk mengembangkan wawasan professional mereka.

Beberapa macam pelatihan juga diberikan kepada *Education Officers* yang berpotensi sangat baik untuk menyiapkan mereka mengisi posisi kepemimpinan, termasuk program *Management and Leadership in Schools* dan program *Leaders in Education*.

DAFTAR REFERENSI

- [1] C.B. Goh and S. Gopinathan, “The Development of Education in Singapore since 1965,” Background paper prepared for the Asia Education Study Tour for African Policy Makers, June 18 – 30, 2006 [Online]. Available: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1121703274255/1439264-1153425508901/Development_Edu_Singapore_draft.pdf
- [2] QS World University Ranking, 2012 [Online]. Available: <http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012>
- [3] The Learning Curve, Pearson [Online]. Available: <http://thelearningcurve.pearson.com>
- [4] Education in Singapore, Ministry of Education [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/about/files/moe-corporate-brochure.pdf>
- [5] K. Schwab, “The Global Competitiveness Report 2013-2014 Full Edition,” World Economic Forum [Online]. Available: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

- [6] World Data on Education, 7th Edition, 2010/2011 [Online]. Available: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Singapore.pdf.
- [7] Ministry of Education – Organizational Structure [Online]. Available: <http://www.moe.edu.sg/about/org-structure/>
- [8] Ministry of Education – Statutory Boards [Online]. Available: <http://www.moe.edu.sg/about/>
- [9] Council for Private Education [Online]. Available: <http://www.cpe.gov.sg/about-us/about-cpe>
- [10] Singapore Examinations and Assessment Board [Online]. Available: <http://www.seab.gov.sg/aboutUs/aboutSEAB.html>
- [11] Special Education in Singapore [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/special-education/>
- [12] National Research Foundation [Online]. Available: <http://www.nrf.gov.sg/about-nrf/national-research-foundation-singapore>
- [13] Economic Development Board [Online]. Available: <http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/about-edb.html>
- [14] National Library Board [Online]. Available: <http://www.nlb.gov.sg/About/AboutNLB.aspx>
- [15] Landscape of Singapore Education System [Online]. Available: <http://www.moe.edu.sg/education/landscape/>
- [16] Compulsory Education in Singapore [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/initiatives/compulsory-education/>
- [17] Primary School Education Booklet [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/primary/files/primary-school-education-booklet.pdf>
- [18] Post-Secondary Education Brochure [Online]. Available:

- <http://www.moe.edu.sg/education/post-secondary/files/post-secondary-brochure.pdf>
- [19] Financial Assistance and Bursary Schemes [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/initiatives/financial-assistance/>
 - [20] EduSave [Online]. Available: <http://www.moe.edu.sg/initiatives/edusave>
 - [21] Financial Assistance for Singaporean Students [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/committee-of-supply-debate/files/supporting-singaporean-students.pdf>
 - [22] Kindergarten Curriculum [Online]. Available: <http://moe.gov.sg/education/preschool/files/kindergarten-curriculum-framework-guide-for-parents.pdf>
 - [23] Attorney-General's Chambers – Compulsory Education Act [Online]. Available: <http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%2245ae5cd5-4eb4-41fd-a649-69cb72d46f55%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0>
 - [24] Mode of Operations of Primary Schools in Academic Year 2015 [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/initiatives/single-session/index.php>
 - [25] Primary School Registration Required Documents [Online]. Available: <http://moe.gov.sg/education/admissions/primary-one-registration/required-documents/>
 - [26] Primary School Registration Phases [Online]. Available: <http://moe.gov.sg/education/admissions/primary-one-registration/phases/>
 - [27] Primary School Curriculum [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/primary/curriculum/>

- [28] Secondary School Booklet [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/secondary/files/secondary-school-education-booklet.pdf>
- [29] Flowchart of Direct School Admissions at Secondary tingkat [Online]. Available: <http://moe.gov.sg/education/admissions/dsa-sec/flowchart/>
- [30] Direct School Admissions – Participating Secondary Schools [Online]. Available: <http://moe.gov.sg/education/admissions/dsa-sec/participating-schools>
- [31] Secondary Express Course Curriculum [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/secondary/express/>
- [32] Secondary Normal Course Curriculum [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/secondary/normal/>
- [33] Schools Offering Higher Mother Tongue [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/secondary/language-programmes/files/schools-offering-hmtl.pdf>
- [34] Art Elective Programme at Secondary Schools [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/secondary/other/art-elective-programme/>
- [35] GCE A-Level Curriculum [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/pre-u/curriculum/>
- [36] Post-Secondary Education Brochure [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/post-secondary/files/post-secondary-brochure.pdf>
- [37] Post-Secondary Education [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/education/post-secondary/>
- [38] Primary School Leaving Examination (PSLE) [Online]. Available: <http://www.seab.gov.sg/psle/2014subjectInfo.html>

- [39] International PSLE Examination Centres [Online]. Available: <http://www.seab.gov.sg/iPSLE/AppointedExamCtrs.pdf>
- [40] International PSLE Subject Information 2014 [Online]. Available: <http://www.seab.gov.sg/iPSLE/2014subjectInfo.html>
- [41] Singapore-Cambridge GCE Normal (Technical) tingkat Syllabus [Online]. Available: http://www.seab.gov.sg/nLevel/syllabusSchool_nt.html
- [42] Singapore-Cambridge GCE Normal (Academic) tingkat Syllabus [Online]. Available: http://www.seab.gov.sg/nLevel/syllabusSchool_na.html
- [43] Singapore-Cambridge GCE Ordinary tingkat Syllabus [Online]. Available: <http://www.seab.gov.sg/oLevel/syllabusSchool.html>
- [44] Singapore-Cambridge GCE Advanced tingkat Syllabus [Online]. Available: http://www.seab.gov.sg/aLevel/syllabusSchool_Info.html
- [45] Minister Speech at the Opening of ITE East [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2002/sp04072002.htm>
- [46] ITE Certificates [Online]. Available: https://www.ite.edu.sg/about_ite/TQW_Archived_Issues/Tqw_63/63_p01.html
- [47] Progression Opportunities for ITE Graduates [Online]. Available: <https://gra.ite.edu.sg/ite/gra/learning.aspx>
- [48] NUS Special Undergraduate Programmes [Online]. Available: <http://www.nus.edu.sg/registrar/edu/UG/special-undergrad-prog.html>
- [49] NTU Undergradauate Programmes [Online]. Available: <http://www.ntu.edu.sg/academics/Pages/UndergraduateProgrammes.aspx>
- [50] International Baccalaureate [Online]. Available: <http://www.ibo>

org

- [51] Singapore Workforce Development Agency [Online]. Available: <http://www.wda.gov.sg>
- [52] Academy of Singapore Teachers [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/about/org-structure/academy/>
- [53] Ministry of Education – Schools Division [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/about/org-structure/sd/>
- [54] Ministry of Education – Higher Education Division [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/about/org-structure/hed/>
- [55] Nanyang Polytechnic [Online]. Available: <http://www.nyp.edu.sg/>
- [56] Ngee Ann Polytechnic [Online]. Available: <http://www.np.edu.sg/Pages/default.aspx>
- [57] Republic Polytechnic [Online]. Available: <http://www.rp.edu.sg/>
- [58] Singapore Polytechnic [Online]. Available: <http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-spws>
- [59] Temasek Polytechnic [Online]. Available: <http://www.tp.edu.sg/>
- [60] Institute of Technical Education [Online]. Available: <https://www.ite.edu.sg/>
- [61] Science Centre Singapore [Online]. Available: <http://www.science.edu.sg/Pages/SCBHome.aspx>
- [62] Institute of Southeast Asian Studies [Online]. Available: <http://www.iseas.edu.sg/>
- [63] Council for Private Education Singapore [Online]. Available: <http://www.cpe.gov.sg/>
- [64] Ministry of Education – Internal Audit Branch [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/about/org-structure/iab/>

- [65] Ministry of Education [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/about/>
- [66] Ministry of Education – Career Tracks [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-info/>
- [67] TEACH Framework [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/media/press/2011/03/new-teach-framework-to-enhance-quality-teaching-force.php>
- [68] Teacher Salary [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-info/salary/>
- [69] Central Provident Fund [Online]. Available: www.cpf.gov.sg
- [70] Application Process for Applications without Teaching Qualifications [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/ut-applicationprocess/>
- [71] Application Window [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/ut-applicationwindows/>
- [72] MOE Career Website [Online]. Available:
- [73] Postgraduate Diploma in Education (PGDE) [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/postgraduate-diploma-education/>
- [74] Postgraduate Diploma in Education (PGDE) Programmes [Online]. Available: <http://www.nie.edu.sg/studynie/initial-teacher-preparation-programme/post-graduate-diploma-education-programmes>
- [75] Postgraduate Diploma in Education Handbook 2014-2015 [Online]. Available: http://www.nie.edu.sg/files/ote/Handbooks/Postgraduate-Diploma-in-Education_2014-2015.pdf
- [76] Bachelor of Arts/Science in Education [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/babsc/>

- [77] Diploma in Education [Online]. Available: <http://www.moe.gov.sg/careers/teach/diploma-education/>
- [78] NIE Diploma Programmes [Online]. Available: <http://www.nie.edu.sg/study-nie/admissions/teacher-education-undergraduate-studies/diploma-programmes>
- [79] Diploma in Chinese Studies [Online]. Available: http://www.np.edu.sg/hms/courses/CHS/Pages/chs_en.aspx

GLOSSARY

CCA	Co-Curricular Activities
CI	Centralised Institute
ECDA	Early Childhood Development Agency
EPT	Entrance Proficiency Tests
GCE	General Certificate of Education
GEP	Gifted Education Programme
GP	General Paper
HMTL	Higher Mother Tongue Language
IB	International Baccalaureate
ITE	Institute of Technical Education
JAE	Joint Admission Exercise
JC	Junior College
KI	Knowledge & Inquiry
MOE	Ministry of Education
MTL	Mother Tongue Language
MTLL	Mother Tongue Language and Literature
NIE	National Institute of Education
Nitec	National ITE Certificate
PGDE	Post Graduate Diploma in Education
PSLE	Primary School Leaving Examination
PW	Project Work
SBGE	School-Based Gifted Education
SEAB	Singapore Examination and Assessment Board

WSQ Workforce Skills Qualifications
Singapore-Cambridge General Certificate of Education (GCE)

‘N(T)’ Level Normal (Technical) Level

‘N(A)’ tingkat Normal (Academic) Level

‘O’ Level Ordinary Level

‘A’ Level Advanced Level

-o0o-

XV

Sistem Pendidikan di Thailand



Sumber foto Wat Arun: 9holidayscouk.wordpress.com

Oleh:
Dr. Ir. Yunardi, M.Sc.
Atase Pendidikan di Bangkok

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Thailand

Thailand, negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa ini, memiliki sistem pendidikan yang mirip dengan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 (lima) tahun dimana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 di Indonesia, sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi Politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi ‘long-life learning’ atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit dll. Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti di Indonesia, namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas.

Penjaminan mutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui ujian nasional. Akan tetapi, hasil ujian nasional di Thailand tidak memutuskan seorang siswa lulus atau tidak dari jenjang sekolah tersebut. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian nasional hanya untuk mengetahui capaian akademik siswa dari seluruh propinsi, yang dijadikan sebagai acuan kebijakan perbaikan kualitas pendidikan.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara terpusat dan terbuka sehingga calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik

yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang dan potensial. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sajana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut bahkan sampai doktor.

Salah satu reformasi pendidikan di Thailand yang menarik adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut One Tablet Per Child atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 juta USD untuk membeli sebanyak 900 ribu komputer tablet pada tahun 2012 untuk didistribusikan kepada siswa kelas 1 SD di seluruh Thailand. Pada tahun 2013, Pemerintah Thailand mendistribusikan sebanyak 1.63 juta tablet bagi siswa kelas 1 SD dan siswa kelas 1 SMP di seluruh Thailand.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	791
DAFTAR ISI	793
1. Pendahuluan	795
2. Kurikulum Pendidikan Dasar Thailand	801
3. Evaluasi Pendidikan di Thailand	811
4. Standar Pendidikan dan Penjaminan Mutu	819
5. Pengembangan dan Pembinaan Guru	823
6. Pendanaan Pendidikan	835
7. Penutup	841
DAFTAR REFERENSI	843

1

Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum

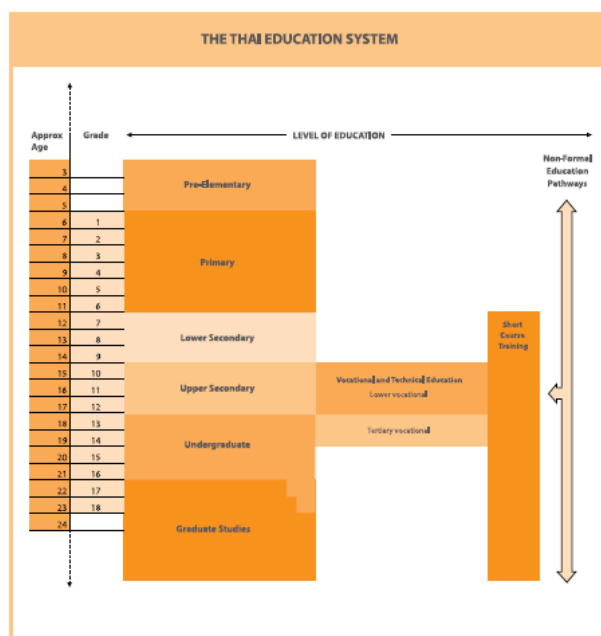
Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja Rama IX, Raja Bhumibol Adulyadej, sebagai Kepala Negara. Kepala Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Thailand dibagi ke dalam 76 daerah pemerintahan (propinsi) yang dikenal dengan sebutan changwats dan 2 (dua) Daerah Khusus Bangkok dan Pattaya. Propinsi selanjutnya dibagi ke dalam sejumlah distrik (setara dengan kabupaten) dan sub-distrik (setara dengan kecamatan). Populasi penduduk Thailand sebagian besar terdiri dari suku Thai dan sejumlah suku minoritas seperti Cina, Akha, Lisu, Karen, Hmong, suku-suku pegunungan di daerah utara Thailand dan Melayu di Thailand selatan.

Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup:

1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas.

2. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat
3. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal.

Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas. Gambar 1.1 menunjukkan struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun Anuban atau taman kanak-kanak, 6 tahun Prathom (sekolah dasar), 6 tahun Mattayom (sekolah menengah pertama dan atas), pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Thailand menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk mulai sekolah di Prathom 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut Anuban (TK) sebelum masuk SD, namun sebagian besar orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk masuk TK.



Gambar 1.1 Struktur Pendidikan di Thailand (Ministry of Education, 2008b)

1.2 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Lebih dari 75 % anak-anak usia 3-5 tahun mendapatkan pendidikan usia dini. Walaupun pada hakikatnya pendidikan usia dini disediakan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah dasar negeri, Kementerian Pendidikan secara aktif mendorong sekolah-sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk dapat memainkan peranan yang signifikan untuk ikut terlibat dalam pendidikan usai dini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini terlihat sekali pendidikan usia dini yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta. Hal ini tampak jelas di Bangkok dan sekitarnya, ditandai dengan tumbuhnya sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh swasta.

Pendidikan dasar di Thailand dilaksanakan selama 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar (Prathom 1-6), diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama (Mattayom 1-3) dan 3 tahun sekolah menengah atas (Mattayom 4-6). Sejak tahun 2003, wajib belajar telah diperluas sampai 9 tahun (6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama), namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai Mattayom 6, atau setara dengan tamat SMU.

Secara umum sekolah Prathom terpisah dari sekolah Mattayom, namun di beberapa tempat di Thailand di jumpai sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari Prathom 1 sampai dengan Mattayom 6. Dalam hal sekolah menengah umumnya, pendidikan Mattayom 1-6 berada di dalam satu sekolah, akan tetapi dapat dijumpai pendidikan Mattayom yang dilayani oleh dua sekolah yang terpisah, yaitu sekolah yang melayani Mattayom 1-3 dan sekolah yang melayani Mattayom 4-6.

Kurikulum nasional memuat 8 mata pelajaran inti yaitu: Bahasa Thai, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Agama dan Budaya, Kesehatan dan Olah raga, Seni, Karir dan Teknologi, dan Bahasa Asing. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran. Dengan diterapkannya wajib belajar, angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat sekolah dasar cukup tinggi mencapai 98.3 persen untuk populasi anak berumur

6-11 tahun (2010). Sementara APK untuk sekolah menengah pertama pada tahun 2010 menunjukkan lebih besar dari 90 persen, namun pada tingkat menengah atas hanya berkisar sebesar 60 persen (Unesco, 2011).

1.3 Pendidikan Vokasi dan Teknik

Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan tiga tingkatan: tingkat menengah atas (setara dengan SMK di Indonesia) dengan masa studi 3 tahun, tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkat diploma. Pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada technical college, misalnya Minburi Technical College dll. Namun saat ini sebagian besar technical college di Thailand hanya menawarkan program 5 tahun yang terdiri dari 3 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun diploma, sehingga siswa umumnya menghabiskan masa 5 tahun hingga selesai dari college seperti ini. Hanya beberapa college yang menawarkan program tingkat sarjana. Program studi yang ditawarkan di technical college dapat dikategorikan menjadi 8 konsentrasi yaitu: perdagangan dan industri, pertanian, ekonomi, bisnis dan pariwisata, seni dan kerajinan, tekstil dan pemasaran. Yang menarik dari pendidikan vokasi di Thailand adalah peluang bagi mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan sertifikat keahlian sangat terbuka.

1.4 Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di universitas, institut teknik, sekolah tinggi (college) profesi dan teknik dan universitas pendidikan. Pendidikan tinggi di Thailand dapat dibagi menjadi dua institusi. Yang pertama, institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, seperti universitas negeri dan swasta, institusi profesi/teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi (college) pendidikan guru. Yang kedua institusi-institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain, seperti sekolah tinggi seni Thai klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan, sekolah tinggi keperawatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, dll.

Perubahan-perubahan yang mendasar pada pendidikan tinggi terlihat dari meningkatnya jumlah universitas swasta dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal universitas negeri, perubahan terlihat pada:

1. Universitas-universitas negeri telah menjadi lebih independen
2. Institusi yang dulunya dikategorikan sebagai Rajabhat (universitas yang berkonsentrasi menghasilkan guru), sekarang telah berubah menjadi universitas komprehensif sehingga menawarkan program-program lain selain pendidikan
3. Sebanyak 35 Rajamangala Institutes of Technology yang tersebar di seluruh Thailand sekarang dibentuk menjadi 9 universitas regional, tanpa merubah nama institusinya. Artinya, setiap regional Rajamangala Institutes of Technology memiliki beberapa kampus.

Perkembangan lain yang sangat mendasar pada pendidikan tinggi Thailand terlihat dengan lahirnya universitas riset. Sejak tahun 2009 Komisi Pendidikan Tinggi Thailand telah menetapkan 9 universitas negeri sebagai universitas riset, dalam rangka meningkatkan kualitas universitas di Thailand terutama dalam bidang riset. Universitas-universitas ini melalui pendanaan riset dari pemerintah Thailand diharapkan dapat memainkan peranan dalam membuat Thailand sebagai pusat pendidikan, riset dan pengembangan ilmu. Universitas-universitas ini mendidik calon peneliti yang berfokus kepada penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan sosial di Thailand. Ke sembilan universitas yang dimaksud adalah Chulalongkorn University, Kasetsart University, Chiang Mai University, Khon Kaen University, Thammasat University, Mahidol University, Prince of Songkla University, Suranaree University of Technology dan King Mongkut's University of Technology Thonburi.

Saat ini lebih dari 2,2 juta mahasiswa belajar di universitas negeri dan swasta di Thailand. Angka partisipasi kasar tingkat universitas telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini dari rata-rata 26% menjadi 40%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesempatan kuliah akibat penambahan universitas swasta. Saat ini ada 78 universitas negeri dan 89 universitas swasta di Thailand.

2

Kurikulum Pendidikan Dasar Thailand

2.1 Gambaran Umum

Sejak tahun 2002 Kementerian Pendidikan Thailand telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar 2001. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 2001 selama kurun 6 tahun telah mencatat kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan Kurikulum 2001. Sebagai contoh, Kurikulum 2001 memberikan kesempatan desentralisasi otoritas pendidikan, memberikan kesempatan komunitas lokal dan sekolah untuk berpartisipasi dan memainkan peranan penting untuk mempersiapkan kurikulum sehingga memenuhi keinginan mereka. Kelemahan Kurikulum 2001 berkaitan dengan penerapan, proses pelaksanaan, kesulitan guru dan praktisi dalam mempersiapkan kurikulum sekolahnya. Banyak sekolah sangat berambisi membuat konten pembelajaran dan keluaran yang diharapkan namun pada saat ujian dan penilaian tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas anak didik dalam menyerap pengetahuan dasar dan ketrampilan yang diharapkan cukup mengecewakan.

Atas dasar temuan-temuan di atas, Kantor Komisi Pendidikan Dasar (Office of Basic Education Commission, OBEC) di bawah supervisi Komisi Pendidikan Dasar mengambil tindakan untuk merevisi Kurikulum Pendidikan Dasar 2001 untuk mempersiapkan Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008. Kurikulum Inti Pendidikan Dasar (KIPD) 2008 dirancang dengan memberikan penekanan kepada

kesesuaian. Peningkatan-peningkatan dibuat dalam tujuan dan proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor dinas dan sekolah. Asas desentralisasi masih tetap diutamakan di dalam KIPD 2008, dengan memberikan kesempatan kepada komunitas lokal dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Kegiatan belajar-mengajar yang diterapkan untuk seluruh anak didik Thailand pada pendidikan dasar diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik dalam penguasaan pengetahuan dasar dan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Oleh karena itu siswa harus dibekali dengan semangat untuk mencari pengetahuan guna mengembangkan diri secara berkesinambungan.

2.2 Visi Kurikulum Inti 2008

Kurikulum Inti pendidikan Dasar 2008 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama negara sehingga mendapatkan pengembangan yang seimbang di seluruh aspek – kekuatan fisik, ilmu pengetahuan dan moralitas. Anak didik diharapkan sadar terhadap komitmen dan tanggung-jawabnya sebagai warga negara Thailand juga sebagai anggota komunitas dunia. Terikat bentuk pemerintahan demokrasi di bawah konstitusi monarki, anak didik harus dibekali dengan pengetahuan dasar dan ketrampilan-ketrampilan penting dan karakter yang baik bagi studi lanjut, kecakapan hidup dan belajar sepanjang hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang berpusat kepada anak didik perlu dilaksanakan, yang berlandaskan pada kenyataan bahwa setiap mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri tertinggi.

2.3 Prinsip-prinsip Kurikulum Inti 2008

Prinsip-prinsip penting yang mendasari Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran utama pengembangan kurikulum ini adalah untuk mencapai persatuan nasional; standar pembelajaran dan tujuan pembelajaran dirancang dengan harapan agar siswa mendapatkan pengetahuan,

- ketrampilan, karakter dan moral sebagai landasan bagi kebangsaan dan nilai-nilai universal.
2. Memberikan peluang pendidikan untuk semua, karena setiap warga negara berhak memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan kualitas tinggi.
 3. Memberikan peluang desentralisasi otoritas dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat.
 4. Struktur kurikulum cukup fleksibel dalam hal isi, alokasi waktu dan manajemen pembelajaran.
 5. Pendekatan yang berpusat kepada siswa (student-centered) sangat diharapkan.
 6. Ditujukan untuk seluruh jenis pendidikan – formal, non-formal dan informal, mencakupi seluruh kelompok target dan memungkinkan perpindahan hasil pembelajaran dan pengalaman.

2.4 Sasaran Kurikulum Inti 2008

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara optimal dalam hal moral, pemahaman, kenyamanan, dan potensi untuk melanjutkan studi dan menjalani kehidupan. Sasaran-sasaran berikut diharapkan dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan pendidikan dasar:

1. Moralitas, etika, nilai-nilai yang diinginkan, harga diri, disiplin diri, ketaatan terhadap ajaran Buddha atau menurut kepercayaan seseorang dan prinsip-prinsip Ekonomi Kecukupan;
2. Pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi know-how, dan kecakapan hidup;
3. Kesehatan fisik dan mental yang baik, kebersihan dan preferensi untuk latihan fisik
4. Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional, dan
5. Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya Thailand dan

kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan pola pikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan co-eksistensi yang harmonis.

2.5 Kompetensi Kunci Siswa

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar bertujuan menanamkan kepada peserta didik lima kompetensi kunci berikut:

1. Kemampuan Komunikasi

Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirimkan informasi, kemampuan dan ketrampilan berbahasa dalam mengungkapkan pikiran, pengetahuan dan pemahaman, perasaan dan pendapat untuk bertukar informasi dan pengalaman, yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat; kemampuan negosiasi untuk memecahkan atau mengurangi masalah dan konflik; kemampuan untuk membedakan dan memilih apakah akan menerima atau menghindari informasi melalui penalaran yang tepat dan penilaian yang tepat; dan kemampuan untuk memilih metode komunikasi yang efisien, mengingat kemungkinan efek negatif terhadap diri sendiri dan masyarakat.

2. Kemampuan Berfikir

Siswa diharapkan memiliki kemampuan berfikir analitis, sintesis, konstruktif, berpikir kritis dan sistematis yang mengarah kepada penelaahan pengetahuan atau informasi guna pengambilan keputusan yang bijaksana bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

3. Kemampuan Pemecahan Masalah

Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mereduksi masalah dan hambatan, berdasarkan alasan yang tepat, prinsip-prinsip moral dan informasi yang akurat; kemampuan untuk mengapresiasi hubungan dan perubahan-perubahan dalam berbagai situasi sosial; kemampuan mencari dan menerapkan pengetahuan untuk mencegah dan memecahkan permasalahan; dan kemampuan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana, dengan mengantisipasi kemungkinan efek negatif terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan.

4. Kemampuan Menerapkan Kecakapan Hidup

Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai proses dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar mandiri; belajar terus menerus, bekerja, dan harmonisasi sosial melalui penguatan hubungan interpersonal yang menyenangkan; kemampuan mereduksi masalah dan konflik melalui cara-cara yang tepat; kemampuan untuk penyesuaian diri untuk mengikuti perubahan sosial dan lingkungan; dan kemampuan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan yang dapat memberikan efek buruk kepada dirinya sendiri dan juga orang lain.

5. Kemampuan Menerapkan Teknologi

Siswa diharapkan memiliki kemampuan memilih dan menerapkan teknologi yang berbeda; memiliki keterampilan dalam penerapan proses teknologi untuk pengembangan diri sendiri dan masyarakat dalam hal pembelajaran, komunikasi, pekerjaan dan pemecahan masalah melalui cara-cara yang konstruktif, tepat, bersesuaian dan beretika.

2.6 Karakter anak didik yang diharapkan

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar berfokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter yang diinginkan seperti berikut ini:

1. Cinta kepada bangsa, agama dan Raja
2. Kejujuran dan integritas
3. Kedisiplinan diri
4. Antusiasme untuk belajar
5. Kepatuhan terhadap prinsip Filsafat Kemandirian Ekonomi
6. Dedikasi dan komitmen untuk bekerja
7. Menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand

2.7 Standar Pembelajaran

Perhatian terhadap prinsip-prinsip perkembangan kecerdasan otak dan multi intelengensia diperlukan untuk mencapai pengembangan peserta didik yang seimbang.

Oleh karena itu, Kurikulum Inti Pendidikan Dasar telah

mencanangkan delapan bidang pembelajaran sebagai berikut:

1. Bahasa Thailand
2. Matematika
3. Sains
4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya
5. Pendidikan Jasmani dan kesehatan
6. Seni
7. Okupasi dan Teknologi
8. Bahasa Asing

Untuk setiap mata pelajaran, standar baku berperan sebagai target yang ingin dicapai dalam mengembangkan kualitas peserta didik. Standar ini menentukan apa yang peserta didik harus tahu dan harus mampu lakukan. Standar ini juga menunjukkan nilai-nilai moral dan etika serta karakter yang diinginkan setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, standar pembelajaran berperan sebagai mekanisme penting dalam memajukan sistem pendidikan secara keseluruhan, karena standar ini memberikan informasi kepada kita tentang isi pelajaran dan metoda pengajaran dan evaluasi. Standar juga berfungsi sebagai instrumen untuk penjaminan mutu dan diadopsi baik sebagai evaluasi penjaminan mutu internal dan maupun eksternal, yang telah dipraktekkan pada layanan pendidikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai kualitas seperti yang ditentukan dalam standar yang bersangkutan.

2.8 Indikator

Indikator memberikan petunjuk apa saja yang harus diketahui dan yang harus mampu dipraktekkan oleh siswa, termasuk karakter yang diharapkan setiap jenjang pendidikan. Indikator merefleksikan standar pembelajaran, oleh karena itu indikator dapat dimanfaatkan untuk menetapkan isi, menentukan satuan pembelajaran, dan mengatur kegiatan belajar-mengajar. Indikator juga berperan sebagai kriteria evaluasi agar dapat memverifikasi kualitas siswa.

Indikator Tingkat Kelas menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan wajib (Pendidikan Dasar Kelas 1-Pendidikan Menengah Kelas 3)

Key Stage Indikator menentukan tujuan yang harus dicapai untuk pendidikan menengah atas (Pendidikan Menengah Kelas 4-6, yaitu atau Kelas 10-12).

Untuk pemahaman yang sama dan interpretasi yang benar, kurikulum mengatur berbagai kode untuk standar dan indikator, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kode untuk Standar dan Indikator

Sc 1.1 Gr 1/2	
Sc	Bidang mata pelajaran Sains
1.1	Bidang Pelajaran Pertama, Standar 1
Gr1/2	Indikator 2 untuk Kelas 1
F 2.2 Gr 10-12/3	
F	Bidang mata pelajaran Bahasa Asing
2.2	Bidang Pelajaran kedua, Standar 2
Gr 10-12/3	Indikator 3 untuk pendidikan menengah atas (kelas 4-6 SMA atau kelas 10-12)

2.9 Alokasi Waktu Belajar

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar menetapkan kerangka kerja untuk struktur waktu belajar minimal untuk delapan bidang pelajaran dan kegiatan belajar. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan alokasi waktu, tergantung pada kesiapan dan prioritas mereka, dengan menyesuaikan menurut konteks dan situasi peserta didik sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar (Kelas 1-6)
Waktu belajar dialokasikan secara tahunan, dengan kondisi tidak lebih dari lima jam setiap hari.
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Kelas 1-3 SMP atau Kelas 7-9)
Waktu belajar dialokasikan atas dasar semester; dengan kondisi tidak melebihi enam jam setiap hari, bobot mata pelajaran tentu saja dihitung dalam kredit, kriterianya adalah bahwa 40 jam per

semester adalah setara dengan satu kredit (K).

3. Jenjang Sekolah Menengah Atas (Kelas 1-3 SMA atau Kelas 10-12)
Waktu belajar dialokasikan atas dasar semester; dengan kondisi tidak kurang dari enam jam setiap hari, bobot mata pelajaran tentu saja dihitung dalam kredit, kriterianya adalah bahwa 40 jam per semester adalah setara dengan satu kredit (K).

2.10 Penetapan Struktur Waktu Belajar dan Waktu Tambahan

Tabel 2.2 menunjukkan alokasi waktu pelajaran untuk Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008, dan waktu tambahan yang dilakukan oleh sekolah tergantung prioritas dan kesiapan masing-masing sekolah serta jumlah waktu belajar untuk setiap jenjang pendidikan. Berkenaan dengan tambahan waktu yang dapat dilakukan oleh sekolah, untuk sekolah dasar waktu tambahan yang diperlukan disesuaikan namun jumlah waktu belajar harus sesuai seperti yang tertera pada Tabel 2.2 dan siswa harus mendapatkan kualitas yang ditetapkan sesuai standar dan indikator pembelajaran. Untuk sekolah dasar kelas 1-3, waktu belajar tambahan dapat dimasukkan dalam bidang pelajaran bahasa Thailand dan matematika.

Struktur waktu belajar bagi sekolah menengah harus seperti yang ditentukan dan harus memenuhi semua kriteria dan persyaratan kelulusan. Mengenai waktu belajar tambahan baik untuk tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah, pelajaran tambahan atau kegiatan pengembangan pelajaran dapat diatur, dengan pertimbangan terhadap

Tabel 2.2 Kurikulum Inti Pendidikan Dasar dan alokasi waktu belajar setiap jenjang

Bidang pelajaran/ Kegiatan	Waktu Belajar (jam)											Sek. Men. Atas
	Sekolah Dasar					Sekolah Menengah Pertama						
	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	KI 6	KI 7	KI 8	KI 9			
Bidang pelajaran												
Bahasa Thai	200	200	200	160	160	160	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)		
Matematika	200	200	200	160	160	160	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)		
Sains	80	80	80	80	80	80	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)		
IPS, Agama dan Budaya	120	120	120	120	120	120	160 (4K)	160 (4K)	160 (4K)	320 (8K)		
Sejarah	40	40	40	40	40	40	40 (1K)	40 (1K)	40 (1K)	80 (2K)		
Agama, Moral dan Etika, PKN, Budaya dan Kehidupan Sosial	80	80	80	80	80	80	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)		
Penjaskes	80	80	80	80	80	80	80 (2K)	80 (2K)	80 (2K)	120 (3K)		
Seni	80	80	80	80	80	80	80 (2K)	80 (2K)	80 (2K)	120 (3K)		
Okupasi dan teknologi	40	40	40	40	40	40	80 (2K)	80 (2K)	80 (2K)	120 (3K)		

Bidang pelajaran/ Kegiatan	Waktu Belajar (jam)											Sek. Men. Atas
	Sekolah Dasar					Sekolah Menengah Pertama						
	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	KI 6	KI 7	KI 8	KI 9	KI 10-12		
Bidang pelajaran												
Bahasa Asing	40	40	40	40	40	40	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)		
Total Waktu Belajar (jenjang pendidikan)	840	840	840	840	840	840	880 (22K)	880 (22K)	880 (22K)	1.640 (41K)		
Aktifitas pengembangan Belajar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360		
*Pelajaran/ Aktifitas tambahan yg boleh diberikan sekolah tergantung prioritas dan kesiapan	Tidak lebih dari 40 jam per tahun					Tidak lebih dari 200 jam per tahun					Tidak kurang dari 1.600 jam	
Total waktu belajar	Tidak lebih dari 1.000 jam per tahun					Tidak lebih dari 1.200 jam per tahun					Tidak kurang dari 3.600 jam untuk 3 tahun	

3

Evaluasi Pendidikan di Thailand

3.1 Ujian Nasional Untuk Prathom - Mattayom

Thailand menerapkan dua bentuk Ujian Nasional bagi pendidikan jenjang Prathom (SD) sampai dengan Mattayom (SMP dan SMA), tergantung pada jenis pendidikannya. Untuk pendidikan formal, setiap siswa Prathom 6, Mattayom 3 dan Mattayom 6 diwajibkan mengikuti Ordinary National Exam Test (ONET), sedangkan siswa yang mengikuti pendidikan non-formal yang setara dengan Mattayom 3 dan Mattayom 6 diwajibkan mengikuti Non-formal National Education Test (N-NET). Selain dua Ujian Nasional di atas, dikenal juga Ujian Nasional General Aptitude Test (GAT) dan Professional and Academic Aptitude Test (PAT) yang dikhususkan bagi siswa Mattayom 6.

ONET bertujuan mengevaluasi kemampuan akademik siswa Mattayom 3 dan Mattayom 6 sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 2001 dan mengevaluasi kemampuan akademik siswa Prathom 6 sesuai dengan Kurikulum Umum Pendidikan Dasar tahun 2008. Ujian Nasional ONET menguji siswa untuk 8 (delapan) mata pelajaran utama berikut:

1. Bahasa Thai
2. Matematika
3. Sains
4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya
5. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

6. Seni
7. Karir dan Teknologi
8. Bahasa Asing

Berkenaan dengan N-NET, ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan akademik siswa pendidikan non-formal yang setara dengan Mattayom 3 (setara dengan Paket B di Indonesia) dan Mattayom 6 (setara dengan Paket C di Indonesia) sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Non-Formal tahun 2008. Selain mengevaluasi kemampuan akademik, ujian ini juga menilai kemampuan dan ketrampilan siswa guna studi lanjut setelah menyelesaikan pendidikan di setiap tingkatan. Ujian N-NET mengukur kemampuan akademik siswa dengan format pilihan berganda untuk 5 (lima) mata pelajaran utama berikut ini:

1. Keterampilan Belajar
2. Dasar-dasar Pengetahuan Umum
3. Dasar-dasar Pengetahuan Kerja
4. Kecakapan Hidup
5. Perkembangan Sosial

Sejak tahun 2009, di Thailand dilaksanakan ujian nasional yang dikenal dengan istilah GAT/PAT untuk siswa Mattayom 6. Hasil dari ujian GAT/PAT dapat digunakan oleh peserta sebagai salah satu syarat penerimaan universitas di Thailand, lembaga pendidikan tinggi lainnya, serta untuk melamar kerja jika yang bersangkutan memutuskan tidak meneruskan pendidikan lanjut. Ujian ini dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan Oktober.

Ujian Nasional baik ONET maupun NNET dan GAT/PAT dilaksanakan oleh the National Institute of Educational Testing Services (NIETS) setahun sekali. NIETS merupakan sebuah organisasi publik independen yang tidak berkaitan secara langsung dengan Kementerian Pendidikan Thailand. Badan ini bertanggung-jawab dalam pembuatan soal, pelaksanaan dan evaluasi ujian nasional di Thailand. Tabel 3.1 menunjukkan mata pelajaran yang diuji pada ujian nasional di berbagai tingkatan serta waktu dan bulan pelaksanaannya.

Hasil Ujian Nasional tidak menyatakan seorang siswa lulus atau tidak lulus. Ujian Nasional hanya memberikan hasil yang dicapai oleh

siswa. Kelulusan siswa dinyatakan melalui ujian sekolah. Artinya selain ujian nasional, siswa juga harus mengikuti ujian sekolah yang akan menyatakan siswa tersebut lulus atau tidak lulus dari sekolah tersebut. Siswa yang tidak lulus ujian sekolah, mereka tidak dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ada beberapa pilihan bagi siswa yang tidak lulus, antara lain belajar mandiri lalu mengulang lagi ujian sekolah, mengulang satu atau dua semester di kelas yang sama lalu kembali mengikuti ujian sekolah, sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Penerimaan siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya, misalnya lulusan Prathom (SD) ingin masuk ke Mattayom, tidak semata-mata ditentukan dari hasil Ujian Nasional melainkan juga ditentukan oleh hasil ujian sekolah. Antara satu sekolah dengan sekolah lainnya menerapkan kebijakan yang berbeda dalam penerimaan siswa dari jenjang sebelumnya. Setiap sekolah memberikan alokasi penerimaan dengan persentase tertentu bagi calon siswa yang tinggal di daerah sekitar sekolah. Untuk kasus seperti ini penerimaan dilakukan melalui undian tanpa melihat tinggi rendahnya nilai Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah. Sejumlah persentase tertentu diberikan kepada calon siswa yang berasal dari luar daerah di mana sekolah berada. Dalam hal ini, sekolah akan memberikan persyaratan penerimaan berdasarkan nilai Ujian

Tabel 3.1 Mata Pelajaran dan Jumlah Soal yang Diuji pada Ujian Nasional

No	Ujian	Mata Pelajaran	Jumlah soal	Waktu (menit)	Pelaksanaan Ujian	Total soal/total waktu
1	O-NET untuk Pratom 6	1. Bahasa Thai	25	50	Februari	233 soal/6 jam 40 menit
		2. Ilmu Sosial	50	50		
		3. Bahasa Inggris	40	50		
		4. Matematika	20	50		
		5. Sains	32	50		
		6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	23	30		
		7. Seni	20	30		
		8. Ketrampilan	23	30		
	O-NET untuk Mattayom 3	1. Bahasa Thai	52	90	Februari	347 soal/9 ½ jam
		2. Ilmu Sosial	50	90		
		3. Bahasa Inggris	50	90		
		4. Matematika	30	90		
		5. Sains	45	90		
		6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	38	40		
		7. Seni	38	40		
		8. Ketrampilan	44	40		

No	Ujian	Mata Pelajaran	Jumlah soal	Waktu (menit)	Pelaksanaan Ujian	Total soal/total waktu
	O-NET untuk Mattayom 3	1. Bahasa Thai	80	120	501 soal/12 jam	
		2. Matematika	80	120		
		3. Sains	90	120		
		4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya	40	120		
		5. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	90	120		
		6. Seni	40	40		
		7. Karir dan Teknologi	37	40		
		8. Bahasa Asing	44	40		
2	N-NET					
3	GAT	1. Membaca, Menulis, Berfikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah	20	90	Oktober dan Maret	
		2. Ketrampilan komunikasi bahasa Inggris	60	90		

No	Ujian	Mata Pelajaran	Jumlah soal	Waktu (menit)	Pelaksanaan Ujian	Total soal/total waktu
4	PAT	Matematika	50	180	October, and March	
		Sains	100	180		
		Rekayasa	70	180		
		Arsitek	33	180		
		Profesi mengajar	150	180		
		Seni rupa	100	180		
		Bahasa Asing				
		Perancis	100	180		
		Jerman	100	180		
		Jepang	100	180		
		Cina	100	180		
		Arab	100	180		
		Pali	100	180		
		Ilmu Sosial	50	90		
		Bahasa Inggris	80	90		
		Matematika	30	90		
		Fisika	25	90		
		Kimia	50	90		
		Biologi	100	90		

Sekolah dan Ujian Nasional. Masing-masing hasil ujian nasional dan sekolah diberi bobot guna menentukan nilai yang diterima di sekolah tersebut. Secara umum, bobot yang diberikan lebih tinggi kepada hasil ujian sekolah daripada kepada hasil ujian nasional.

3.2 Ujian Masuk Universitas

Bagi siswa Mattayom 6 (kelas 3 SMA), mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk universitas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama semasa masih berada di semester ke 2 di Mattayom 6, yaitu pada bulan November dan satu lagi setelah selesai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada bulan Maret. Perlu dicatat hingga saat ini, tahun akademik di Thailand dimulai dari Mei sampai Oktober untuk semester 1 dan November sampai Maret untuk semester 2. Namun dalam dua tahun ke depan, tahun akademik ini akan berubah mengikuti tahun akademik yang berlaku di ASEAN. Ujian masuk universitas ini dilaksanakan serentak di seluruh negeri pada hari yang sama dengan soal yang sama. Mata pelajaran yang diuji sama seperti yang diuji pada ujian nasional sehingga memakan waktu total sekitar 5 (lima) hari.

Ada dua sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas di Thailand. Yang pertama adalah sistem penerimaan melalui Ujian Masuk Nasional. Sistem ini memungkinkan seorang calon melamar sampai 3 (tiga) jurusan di satu atau lebih universitas, sehingga total yang dipilih adalah tiga jurusan. Calon mengikuti ujian masuk universitas secara nasional seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, dengan rata-rata 7 mata pelajaran yang diuji. Nilai dari ujian masuk nasional ini akan digunakan sebagai landasan untuk penerimaan di jurusan yang dilamar. Setiap jurusan biasanya menerapkan passing grade yang berbeda untuk diterima di jurusan masing-masing. Jika jumlah calon yang memiliki nilai di atas passing grade melebihi kuota yang disediakan, maka calon akan dijarang berdasarkan rangking nilai hasil ujian atau kombinasi ujian saringan masuk nasional dan ujian nasional Mattayom 6. Akan tetapi, lulus dari Ujian Masuk Universitas secara nasional tidak menjamin calon mahasiswa langsung diterima di Fakultas/Jurusan yang dilamar, melainkan memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk ikut saringan berikutnya, yaitu

wawancara di fakultas/jurusan yang dilamar. Sama seperti pada Ujian Nasional di sekolah Prathom dan Mattayom, Ujian Saringan Masuk Universitas secara nasional juga dilaksanakan oleh NIETS.

Metoda kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui Sistem Penerimaan (Admission System). Sejumlah fakultas di sejumlah universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri tidak melalui system ujian masuk nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Fakultas ini, misalnya International College seperti Mahidol University International College, hanya meminta hasil nilai Bahasa Inggris dari Ujian Masuk Nasional, lalu calon mahasiswa mengikuti ujian secara langsung di Fakultas tersebut. Kelulusan ditentukan langsung oleh fakultas yang bersangkutan.

4

Standar Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pembentukan standar pendidikan bertujuan untuk menentukan kualitas tertentu dalam pelayanan pendidikan, seperti kualitas peserta didik yang diinginkan, kurikulum, dan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas, institusi pendidikan diharapkan mengembangkan keunggulan dalam domain kegiatan rutin mereka dan tugas-tugas administratif, sehingga kualitas pendidikan akan berkembang. Peningkatan kualitas pendidikan akan bermanfaat secara langsung kepada penerima layanan, termasuk siswa dan orang tua, serta penerima tidak langsung, seperti pengusaha, individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan dari semua jenis, dua tugas utama yang harus dilakukan adalah pengembangan standar pendidikan dan pengembangan penjaminan mutu. Saat ini ada tiga jenis standar: standar pendidikan nasional, standar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal.

4.1 Standar Pendidikan Nasional

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan nasional. Dengan demikian, susunan standar yang dirumuskan oleh Kantor tersebut melalui kerjasama dengan kantor-kantor yang bertanggung jawab terhadap pendidikan

dasar, kejuruan, dan pendidikan tinggi serta Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu (Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA). Dengan persetujuan dari Dewan Menteri pada tanggal 26 Desember 2004, lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan nasional, yang terdiri dari tiga kategori:

- I. Memenuhi karakteristik rakyat Thailand, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat dunia, terdiri lima indikator: 1) kesehatan fisik dan mental; 2) pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalani hidup yang bermakna dan pembangunan sosial; 3) keterampilan dalam belajar dan penyesuaian diri ; 4) keterampilan sosial; dan 5) kejujuran, pola fikir, dan kesadaran sebagai warga negara Thailand dan warga negara dunia.
- II. Pedoman bagi penyediaan pendidikan terdiri dari tiga indikator: 1) pengembangan kurikulum dan diversifikasi suasana yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka miliki; 2) Pengembangan tenaga administrasi, guru, dosen, pegawai dan tenaga kependidikan secara sistematis dan efektif, dan 3) menjalankan pengelolaan berbasis sekolah.
- III. Pedoman untuk menciptakan masyarakat belajar/masyarakat berpengetahuan terdiri dari tiga indikator: 1) penyediaan layanan akademik dan terjalannya kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat sehingga dapat mengubah institusi pendidikan menjadi masyarakat belajar/masyarakat berpengetahuan; 2) penelitian dan studi, promosi dan dukungan bagi sumber-sumber dan mekanisme belajar mengajar; dan 3) pengembangan dan pengelolaan ilmu pengetahuan bagi kepentingan semua strata dan komponen masyarakat.

Standar pendidikan nasional juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan mekanisme standar penilaian penjaminan mutu internal dan eksternal. Pada saat ini, semua lembaga terkait telah mengembangkan standar pendidikan yang relevan .

4.2 Penjaminan Mutu Internal

Sejak tahun 2003, Kementerian Pendidikan Thailand telah menetapkan peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem, kriteria, dan metode untuk penjaminan mutu internal bagi institusi pendidikan dasar dan tinggi. Sebagai dasar bagi penjaminan mutu eksternal, semua institusi pendidikan diwajibkan mengikuti pedoman standar penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh lembaga mengawasi mereka. Institusi pendidikan juga diharuskan menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari pengendalian, audit, dan penilaian.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya ini, sejumlah kegiatan telah dilakukan seperti; mengembangkan personil, menerapkan proyek percontohan, menyediakan dukungan keuangan, pelaksanaan, pemantauan, dan pendampinga; dan penyebaran dokumen, media dan peralatan.

4.3 Penjaminan Mutu Eksternal

Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu (Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA) yang berperan sebagai institusi independen yang bertanggungjawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat desa. Pengumuman pembukaan kantor ini diterbitkan dalam Lembaran Negara, Vol.117.

Penjaminan mutu terhadap semua institusi pendidikan dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada institusi – institusi terkait dan diumumkan secara luas kepada masyarakat umum. Penilaian penjaminan mutu eksternal dilaksanakan menggunakan pendekatan “Model Penilaian Kesepakatan” atau Assessment Model Amicable yang dilakukan oleh penilai eksternal terlatih yang direkrut organisasi swasta, profesional atau akademis dengan kualifikasi yang memenuhi syarat sebagai penilai penjamin mutu eksternal. ONESQA mengawasi penilaian penjaminan mutu eksternal

untuk pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang mencakup standar-standar yang berkaitan dengan prestasi pendidikan (keluaran); “input/proses”; dan efisiensi dalam administrasi dan kepemimpinan. Standar-standar yang berbeda diterapkan dalam penilaian penjaminan mutu eksternal antara yang diberlakukan pada pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Pada periode evaluasi putaran pertama, kurun 2001-2005, ONESQA telah melakukan evaluasi penjaminan mutu eksternal terhadap 35,159 sekolah dasar dan menengah. Perlu dicatat bahwa penjaminan mutu eksternal pada masa itu merupakan hal yang baru bagi sekolah-sekolah. Akibatnya, 65% dari sekolah yang dievaluasi masuk ke dalam katagori yang tidak dapat memenuhi nilai standar ambang terendah. Putaran kedua dilaksanakan dalam kurun 2006-2010. Pada periode kedua, evaluasi lebih menekankan pada verifikasi standard dan kualitas seluruh sekolah di seluruh negeri guna meyakini apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan setelah hasil evaluasi putaran pertama. Sampai pertengahan 2010, total sudah sebanyak 39,712 sekolah dasar dan menengah yang dievaluasi oleh ONESQA.

Kerja keras ONESQA untuk mengevaluasi penjaminan mutu eksternal semua sekolah dasar dan menengah mendapat pujian dan pengakuan dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena ONESQA telah mampu melakukan evaluasi terhadap semua sekolah sesuai seperti yang ditargetkan dan sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Selain itu, ONESQA juga dinilai sangat transparan dalam penilaian dan penyebaran hasil evaluasi kepada publik. Oleh karena itu, Pemerintah Thailand telah memanfaatkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh ONESQA sebagai bahan dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan nasional. Konsep kebijakan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Kesepuluh juga menggunakan informasi dan data dari ONESQA. Semua ini menunjukkan keberhasilan ONESQA dalam mengembangkan misinya sebagai institusi independen untuk mengevaluasi penjaminan mutu eksternal sekolah-sekolah di Thailand.

5

Pengembangan dan Pembinaan Guru

Guru dan tenaga administrasi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam reformasi proses pendidikan dan mereka merupakan agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan guru dan staf pendukung pendidikan menjadi masalah krusial dalam reformasi pendidikan di Thailand. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan status dan standar profesi guru.

5.1 Pengembangan Pendidikan Guru

Sama seperti di Negara-negara lain, Fakultas Pendidikan di Thailand biasanya menawarkan program sarjana 4 tahun. Sejak tahun 2005, sejumlah Fakultas Pendidikan ditugaskan menjalankan program sarjana 5 tahun. Program ini merekrut calon-calon mahasiswa yang pintar dan berbudi baik untuk dipersiapkan menjadi guru. Pada waktu itu, mahasiswa tahun pertama pada program ini diberikan beasiswa sebesar 2,039 USD per orang. Setelah selesai program, yang terdiri dari 3,5 tahun kuliah dan 1,5 tahun praktek mengajar, lulusan diharapkan menerima gaji lebih tinggi dari sarjana biasa. Dosen-dosen pada program ini bekerja sama sangat baik dengan sekolah-sekolah yang akan dilibatkan untuk praktek mahasiswa. Dosen-dosen langsung berperan sebagai mentor selama mahasiswa melakukan praktek mengajar di sekolah-sekolah.

Office of Basic Education Commission (setara dengan Direktorat Pendidikan Dasar) Kementerian Pendidikan Thailand telah mengevaluasi program sarjana 5 tahun untuk mempersiapkan guru dan menyimpulkan bahwa program seperti ini mampu menarik siswa pintar untuk belajar di bidang pendidikan sehingga dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas di masa mendatang. Karena saringan yang cukup ketat, dipastikan bahwa penerima beasiswa merupakan mahasiswa yang sangat potensial untuk menjadi guru yang berkualitas. Oleh karena itu, sejumlah dekan Fakultas Pendidikan mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Guru agar program ini diteruskan.

5.2 Kualifikasi dan Perekrutan Guru

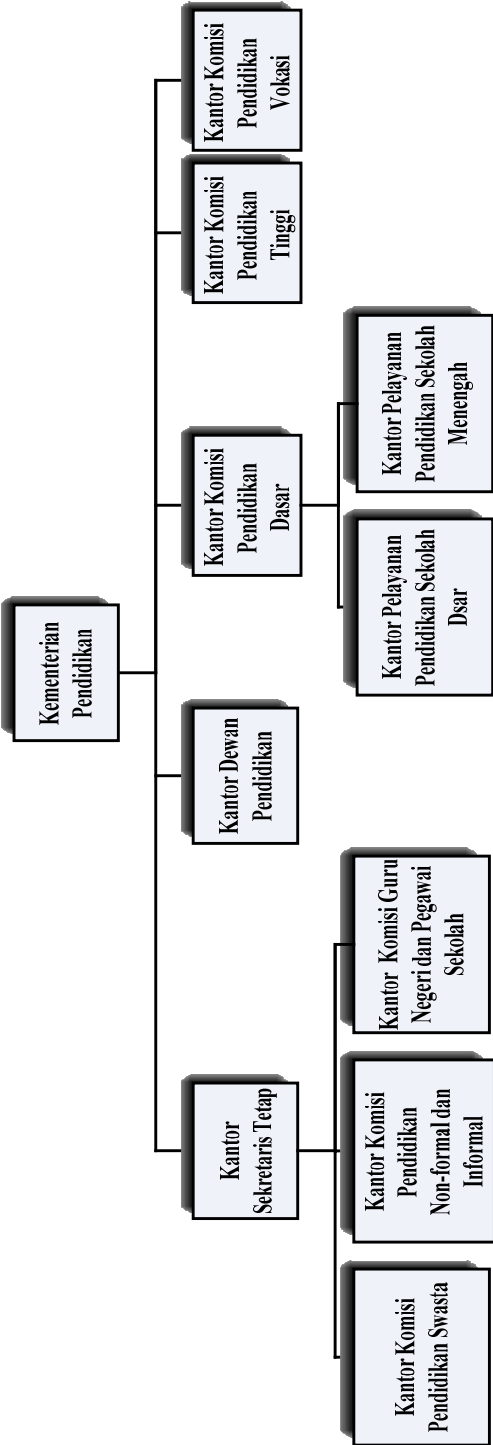
Gambar 5.1 menunjukkan struktur organisasi Kementerian Pendidikan Thailand. Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah bertanggung-jawab mengevaluasi

kebutuhan guru dan merekrut guru secara nasional setiap tahun. Kantor ini yang akan memberikan ujian seleksi penerimaan guru secara nasional. Dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan guru berlaku aturan-aturan berikut yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat:

1. Seluruh proses ujian masuk harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus transparan dan dapat diverifikasi.
2. Ujian harus dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah
3. Komite Ujian dapat memutuskan institusi pendidikan mana yang bertanggung-jawab untuk menyusun soal, mendistribusikan, mengumpulkan dan mengevaluasi jawaban.
4. Pengumuman ujian penerimaan guru harus dilaksanakan ke masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan. Pengumuman harus secara jelas mencantumkan hal-hal berikut:
 - Posisi dan gaji yang ditawarkan
 - Jumlah yang akan diterima
 - Deskripsi Pekerjaan
 - Kualifikasi umum dan khusus

- Prosedur aplikasi, biaya dan jadwal ujian
 - Dokumen dan identitas yang diperlukan
 - Kriteria kelulusan
 - Persyaratan lainnya
6. Waktu penerimaan lamaran tidak boleh kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum ujian dimulai.
 7. Jika pelaksanaan ujian harus dilakukan di beberapa wilayah pada hari yang sama, maka setiap pelamar hanya bisa ikut ujian di satu wilayah saja. Jika nama yang bersangkutan muncul di wilayah lain, maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi.
 8. Seorang pelamar dinyatakan lulus jika peserta mendapatkan nilai lebih dari 60% untuk setiap bagian yang diuji.

Ada sejumlah aturan lainnya yang pada hakikatnya mengarahkan agar pelaksanaan ujian penerimaan guru dilaksanakan secara jujur, terbuka dan transparan. Perlu dicatat bahwa sistem penerimaan guru masih deikendalikan secara terpusat, walaupun pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Kualifikasi guru yang diterima di sekolah-sekolah di Thailand minimum harus memiliki pendidikan sarjana 4 tahun dan maksimum memiliki pendidikan doktor.



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Thailand

5.3 Pelatihan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah

Dengan perubahan paradigma pendidikan dari situasi yang berpusat kepada guru (teacher-centered) ke yang berpusat kepada siswa (learner-centered), maka seorang guru berfungsi sebagai fasilitator agar siswa mandiri dalam berfikir, bertindak dan memecahkan masalah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Berdasarkan reformasi pendidikan sekarang ini, guru-guru Thailand didorong dan didukung untuk mendapatkan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelatihan-pelatihan berikut merupakan aktifitas yang khusus disiapkan bagi guru dan pegawai sekolah.

1. Pengembangan Program Pendidikan Lima Tahun Pra-Tugas

Program ini menghendaki calon guru menyelesaikan sarjana lima tahun sebelum bertugas menjadi guru atau diterima menjadi guru, yang terdiri dari 4 (empat) tahun kuliah dan 1 (satu) tahun pelatihan mengajar di sekolah yang telah ditentukan. Lulusan dari luar jurusan pendidikan guru yang akan menjadi guru harus mengikuti program bersertifikat 1 tahun sebelum disertifikasi untuk menjadi guru.

2. Pelatihan bagi guru tetap Bahasa Inggris

Sejumlah instansi, termasuk Kantor Komisi Pendidikan Vokasi melaksanakan aktifitas pelatihan untuk guru Bahasa Inggris di bawah pengawasan instansi tersebut. Sementara pada Kantor Komisi Pendidikan Dasar, guru-guru di bawah direktorat ini dilatih berdasarkan Rencana Strategis Reformasi Proses Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Percepatan Kemampuan Kompetitif Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Menteri pada tahun 2006. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Menurut Rencana Strategis ini, Lembaga Bahasa Inggris yang didirikan oleh Kantor Komisi Pendidikan Dasar bertanggung-jawab menetapkan kriteria pelatihan guru Bahasa Inggris melalui kerja sama dengan institusi lain, terutama dengan English Resource and Instructional Centres (ERIC) di seluruh wilayah Thailand dan British Council serta American University Alumni (AUA), dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah.

Aktifitas pelatihan berfokus pada 5 (lima) katagori standar nasional kemampuan guru Bahasa Inggris yang mencakup kompetensi

linguistik, kompetensi komunikasi, pengetahuan teori pengajaran bahasa asing, kemampuan mengorganisasikan pembelajaran konsisten dengan silabus, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Lembaga Bahasa Inggris bertujuan melatih seluruh guru Bahasa Inggris di Thailand sampai mereka mencapai katagori Advanced Level. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sama dengan dinas pendidikan di seluruh wilayah Thailand. Rata-rata setiap tahun lembaga ini memberikan pelatihan kepada sekitar 30-40 ribu guru bahasa Inggris.

3. Pelatihan Guru Tetap Matematika dan Sains

Institut Promosi Pengajaran Sains dan Teknologi, sebuah lembaga independen di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan guru, supervisor dan tenaga administrasi dalam bidang sains, matematika dan teknologi informasi.

4. Penyelesaian Sarjana Pendidikan Bagi Guru Tetap.

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, sertifikasi profesi mengajar diwajibkan bagi seorang guru tetap dan direktur sekolah dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut calon harus memiliki kualifikasi minimum sarjana dalam bidang pendidikan. Universitas Rajabhat (sejenis universitas pendidikan di Indonesia) telah melaksanakan program khusus ini bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana sejak tahun 2003. Berdasarkan laporan dari kementerian Pendidikan sejak tahun 2008 seluruh guru di Thailand telah memenuhi kualifikasi minimum sarjana.

5. Program Sertifikat dan Pasca-Sarjana Pendidikan

Guru-guru yang kualifikasi sarjananya bukan dari bidang pendidikan didorong untuk mengikuti program bersertifikat atau pasca sarjana pendidikan.

6. Program bersertifikat bagi Tenaga Administrasi

Tenaga Administrasi Kependidikan harus memiliki sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus memiliki kualifikasi sarjana atau Post-Graduate Certificate dalam bidang

Administrasi Pendidikan jika sarjananya bukan berasal dari bidang pendidikan. Universitas Pendidikan Rajabhat memiliki program sertifikasi bagi tenaga-tenaga administrasi sekolah. Program ini dilaksanakan di sekolah terkait atau di kota dimana sekolah tersebut berada. Sehingga tenaga-tenaga administrasi dari berbagai sekolah di satu daerah dapat mengikuti program sertifikat ini tanpa harus meninggalkan tempat kerja.

7. Program Master bagi tenaga administrasi

Tenaga administrasi pendidikan yang memiliki gelar sarjana didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana dalam bidangnya.

5.4 Remunerasi dan Promosi

Dalam upaya menarik calon-calon unggul untuk menjadi guru dan agar mereka tetap bertahan, Kementerian Pendidikan telah menetapkan skala penggajian baru. Skala penggajian baru mengatur gaji guru berdasarkan katagori guru dan tingkat promosi mulai dari 1-24. Berdasarkan kualifikasinya guru diklasifikasikan menjadi Asisten Guru, Guru, Guru Ahli, Guru dengan keahlian khusus, Guru Spesialis, dan Spesialis Senior, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1. Seorang guru baru dengan kualifikasi sarjana dari program pendidikan akan diterima menjadi guru dengan kualifikasi Asisten Guru. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan bersertifikat dan mendapat promosi beberapa tingkat, guru tersebut dapat mengusulkan menjadi katagori Guru dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Jika memenuhi persyaratan dan dinaikkan klasifikasinya maka yang bersangkutan akan mendapatkan kenaikan gaji. Misalnya Asisten Guru yang berada pada tingkat promosi 7 dengan gaji sebesar 16,190 bath mengusulkan untuk menjadi katagori Guru dan diterima, maka yang bersangkutan akan berada pada posisi Guru dengan tingkat promosi 7 dengan gaji 18,690 bath. Demikian seterusnya untuk katagori-katagori yang lain.

Selain gaji, guru juga menerima tunjangan yang besarnya tergantung dari klasifikasi guru. Besaran tunjangan berkisar antara 3,500 sampai dengan 13,000 bath per bulan untuk katagori guru ahli sampai spesialis

senior. Sedangkan Asisten Guru dan Guru tidak menerima tunjangan tambahan selain gaji. Promosi gaji didasarkan pada evaluasi kinerja guru, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana sekolah itu berada. Evaluasi kinerja guru dilaksanakan 2 kali setahun yaitu selama periode 1 Oktober s/d 31 Maret dan periode 1 April s/d 30 September. Kriteria Promosi Gaji mencakup dua aspek, yaitu aspek capaian akademik dan aspek perilaku dan kinerja. Penilaian terhadap capaian akademik meliputi kualitas, kuantitas, akurasi, ketepatan, kedisiplinan, kemahiran, kerja sama tim, kreatifitas, fleksibilitas dan kemampuan riset. Sedangkan aspek perilaku dan kinerja mencakup penilaian terhadap absensi, kehadiran dalam menjalankan tugas, kehadiran pada upacara-upacara peringatan hari nasional dan pameran ilmiah.

Calon guru pertama kali diterima di sekolah selalu diangkat dengan kategori Asisten Guru, kecuali bagi guru yang mempunyai pengalaman mengajar. Gaji awal Asisten Guru ditentukan oleh kualifikasi akademik ketika melamar.

Tabel 5.1 Klasifikasi Gaji Guru di Thailand

Tingkat Promosi	Katagori Guru					
	Asisten Guru	Guru	Guru Ahli	Guru dengan keahlian khusus	Guru Spesialis	Spesialis Senior
	Gaji per bulan, Bath					
1	11920	11920	14660	14660	27090	31820
1.5	12240	12240	15050	15050	27840	32680
2	12530	12530	15430	15430	28590	33570
2.5	12840	13860	15800	15800	29330	34440
3	13160	14220	16190	16190	30090	35340
3.5	13570	15440	17970	16640	30850	36240
4	13770	15840	19460	17100	31630	38180
4.5	15300	16260	16650	17560	32390	39180
5	14660	16670	20470	18010	33150	41190
5.5	15050	17070	20960	18480	33920	42220
6	15430	17710	21460	18950	34690	44280

Tingkat Promosi	Katagori Guru					
	Asisten Guru	Guru	Guru Ahli	Guru dengan keahlian khusus	Guru Spesialis	Spesialis Senior
	Gaji per bulan, Bath					
6.5	15800	18270	21950	19410	35480	45310
7	16190	18690	22460	19860	36780	46350
7.5	16570	19100	22940	22050	38190	47390
8	16920	19920	23450	23280	40420	48550
8.5	17310	20320	23940	23910	42020	49480
9	17690	20750	24440	24510	43590	50530
9.5	19100	21150	24930	25190	44350	21590
10	19510	21570	25440	25740	45120	52630
10.5		22000	25930	26350	45900	53690
11		22450	26450	26970	46670	54750
11.5		22890	26980	27580	47450	55800
12		23360	27500	28190	48220	56860
12.5		23810	28050	28810	49000	57940
13		24290	28590	29420	49880	59000
13.5		24750	29140	30020	50550	60060
14		25240	29690	30620	51850	61140
14.5		25730	30280	31250	53450	62200
15		26210	30850	31870		63270
15.5		26710	31440	32510		64340
16		27210	32060	33140		65440
16.5		27710	32650	33800		66680
17		28210	33260	34470		67750
17.5		28710	33850	35120		
18		29190	34430	35800		
18.5		29700	35050	36660		
19		30190	35640	37320		
19.5		30710		37980		
20		31190		38620		

Tingkat Promosi	Katagori Guru					
	Asisten Guru	Guru	Guru Ahli	Guru dengan keahlian khusus	Guru Spesialis	Spesialis Senior
	Gaji per bulan, Bath					
20.5				39280		
21				40590		
21.5				41230		
22				42020		
22.5				42790		
23				43570		
23.5				44350		
24				45120		

Tabel 5.2 Tunjangan Guru Thailand

Katagori Guru	Besar Tunjangan per bulan, Bath
Spesialis Senior	13,000
Guru Spesialis	9,900
Guru dengan keahlian khusus	5,600
Guru Ahli	3,500
Guru	-
Asisten Guru	-

Gaji Asisten Guru paling rendah dengan kualifikasi sarjana pendidikan 4 tahun yaitu sebesar 11,920 Bath per bulan dan paling tinggi yang berasal dari program doktor dengan besaran 19,100 Bath, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.3. Jika dihubungkan antara Tabel 5.3 dengan Tabel 5.1, maka asisten guru dengan kualifikasi sarjana dengan pendidikan 4 tahun berada pada tingkat promosi 1 dan asisten guru dengan kualifikasi doktor sudah langsung berada pada tingkat promosi 9.5.

Tabel 5.3 Gaji awal guru Thailand berdasarkan kualifikasi akademik

No	Kualifikasi	Katagori Guru	Gaji per bulan, Bath	
			Tunjangan	Gaji
1	Doktor	Asisten Guru	-	19,100
2	Master	Asisten Guru	-	16,570
3	Master yang disamakan	Asisten Guru	-	15,430
4	Sarjana dari program pendidikan 6 tahun	Asisten Guru	-	15,430
5	Sarjana dari program pendidikan 5 tahun	Asisten Guru	-	12,530
6	Sarjana dari program pendidikan 4 tahun ditambah dengan diploma/ pelatihan 1 tahun	Asisten Guru	-	12,530
7	Sarjana dari program pendidikan 4 tahun	Asisten Guru	-	11,920

Seluruh data-data adalah berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada Desember 2012. Informasi yang diperoleh menyatakan bahwa akan ada kenaikan gaji guru dalam waktu dekat yang akan diumumkan pada awal tahun 2014.

Selain bentuk promosi gaji dan tunjangan di atas, guru-guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan kualifikasi akademiknya ke jenjang lebih tinggi melalui studi lanjut master atau doktor. Kementerian Pendidikan menyediakan beasiswa bagi guru- guru yang memenuhi syarat untuk melanjutkan studi ke jenjang master dan doktor. Saat ini, Thailand mengalami kekurangan guru yang berkualitas dalam bidang sains dan matematika, sehingga perekrutan guru dan penugasan guru ke studi lanjut dalam bidang ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah.

6

Pendanaan Pendidikan

Pada tahun 2012, anggaran belanja Pemerintah Thailand sebesar 2,4 trilliun Bath atau setara dengan 800 trilliun rupiah. Anggaran terbesar dialokasikan pada Kementerian Pendidikan yaitu sekitar 19.18 % dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Dengan demikian ada perbedaan mendasar dalam hal persentase alokasi anggaran pendidikan antara Indonesia dan Thailand. Pada anggaran belanja negara Indonesia dialokasikan sebesar 20 % bagi pendidikan, termasuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara hampir 20% alokasi anggaran di Thailand jatuh kepada Kementerian Pendidikan.

6.1 Pendanaan Sekolah Negeri dan Swasta

Pembiayaan sekolah negeri seluruhnya berasal dari Pemerintah. Sekolah-sekolah mengusulkan kebutuhan pembiayaan kepada Dinas Pendidikan Wilayah, yang selanjutnya setelah dikompilasi oleh Dinas akan diteruskan Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar atau Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah tergantung jenjang sekolahnya. Setelah Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini melakukan kompilasi dari seluruh wilayah, usulan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.2. Selanjutnya usulan ini disampaikan pada sidang kabinet. Persetujuan besaran usulan anggaran dari setiap kementerian baru akan

sah setelah mendapat persetujuan dari parlemen Thailand. Dalam hal ini proses pengusulan anggaran pada hakikatnya sama persis seperti di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendanaan, pembiayaan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Dengan demikian siswa dapat menikmati sekolah gratis selama 12 tahun akademik, 6 tahun pada Prathom, dan 6 tahun Mattayom atau sekolah vokasi. Pemahaman sekolah gratis menyatakan bahwa orang tua sama sekali tidak ditarik biaya apapun untuk kebutuhan anaknya di sekolah. Bahkan dengan biaya sekolah gratis ini, siswa mendapatkan berbagai keuntungan tambahan dari Pemerintah seperti yang akan dijelaskan pada paragraf berikut.

Pada tingkat Prathom atau Sekolah Dasar, selain sekolah gratis, selama 6 tahun sekolah, siswa akan mendapatkan susu dan makan siang gratis yang disediakan oleh sekolah melalui pendanaan dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, siswa juga akan mendapatkan bantuan buku teks dan alat tulis gratis yang didistribusikan oleh sekolah kepada murid-murid.

Baju seragam, sepatu dan tas biasanya dibeli lebih dahulu oleh orang tua, lalu pada akhir semester diganti biayanya oleh sekolah, setelah sekolah menagih kepada Dinas pendidikan Wilayah. Pemerintah membiayai operasional dan pengadaan serta perawatan sekolah mencakup pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), buku perpustakaan, perbaikan, pengadaan alat kantor dan laboratorium. Secara sukarela beberapa sekolah meminta kontribusi dari orang tua untuk kegiatan ekstra-kurikuler dan pengadaan guru asing, namun sifatnya tidak memaksa.

Yang menarik pada reformasi pendidikan di Thailand adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut One Tablet Per Child atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 juta

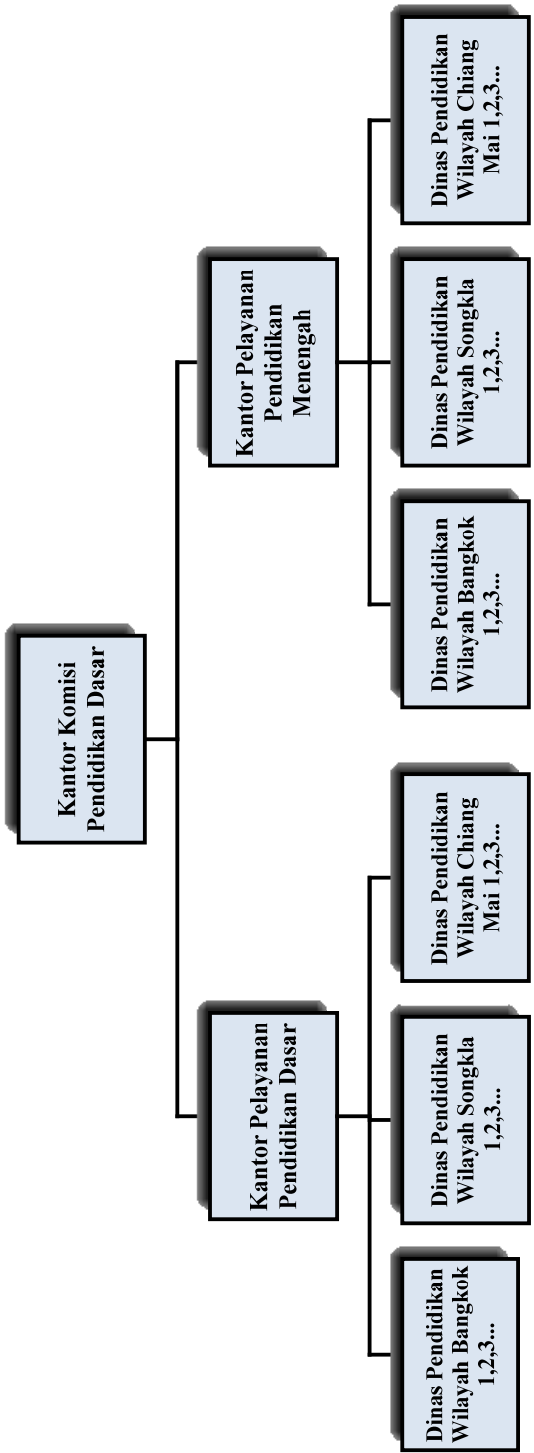
USD untuk membeli sebanyak 900 ribu komputer tablet untuk keperluan pendidikan. Sampai awal tahun 2013 sebanyak 868.886 tablet telah dibagikan kepada siswa Prothom 1 atau kelas 1 SD di seluruh Thailand, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Proyek ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian ICT Thailand.



Gambar 6.1 Pembelajaran menggunakan tablet pada siswa Prathom 1 di Thailand

Dalam pembelian komputer tablet ini, Pemerintah Thailand melakukan perbandingan harga dan spesifikasi teknis dari sejumlah pabrik. Akhirnya Pemerintah memutuskan untuk membeli komputer tablet ini dari sebuah perusahaan Cina seharga 2460 Bath per unit (setara 750 ribu rupiah) dengan sistem operasi Google Android 4 Ice Cream sandwich dan spesifikasi tablet 1 GB RAM, kapasitas penyimpanan 8GB. Harga tersebut telah termasuk materi pendidikan yang dimasukkan ke dalam tablet. Perlu dicatat bahwa komputer tablet ini bukan saja dibagikan kepada siswa-siswa Prathom 1 sekolah negeri, tetapi juga kepada siswa-siswa Prathom 1 di sekolah swasta.

Berkenaan dengan pendanaan sekolah swasta, di Thailand terdapat 3 jenis sekolah swasta, sebagai berikut: A) sekolah swasta yang mendapat 70 persen subsidi dari Pemerintah, dimana sekolah menetapkan SPP tertinggi sesuai dengan aturan Pemerintah; B) sekolah swasta yang sama sekali tidak menerima subsidi dari pemerintah, dimana sekolah menentukan besarnya SPP yang ditarik dari siswa dan C) sekolah swasta yang mendapat subsidi 100 persen dari Pemerintah, misalnya sekolah yang didirikan oleh organisasi keagamaan, atau sekolah bagi anak-anak kurang beruntung secara fisik. Tabel 6.1 menunjukkan bentuk



Gambar 6.2 Struktur Organisasi Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah

kontribusi pemerintah Thailand untuk sekolah swasta yang masing-masing menerima subsidi 70 dan 100 persen.

Tabel 6.1 Bentuk Subsidi Pemerintah Thailand terhadap sekolah swasta

Bentuk Subsidi Pemerintah Thailand kepada sekolah swasta	
Buku teks	Kategori C
Peralatan pendidikan	Buku teks
Seragam (jika diusulkan)	Peralatan pendidikan
Aktifitas ekstra kurikuler	Seragam
Susu (hanya untuk Prathom)	Aktifitas ekstra kurikuler
Makan siang (jika diusulkan)	Susu (hanya untuk Prathom)
	Makan siang
	Komputer/peralatan laboratorium
	Biaya konstruksi dan pemeliharaan

6.2 Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan

Masyarakat dan orang tua berperan aktif dalam pendidikan baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Di mata hukum Thailand, sekolah dianggap sebagai sebuah badan hukum, karenanya diperlukan komite sekolah. Komite sekolah di Thailand pada dasarnya mirip dengan komite sekolah di Indonesia. Namun dalam hal komposisi sedikit berbeda. Komite sekolah di Thailand terdiri dari:

1. Pakar akademik sebagai penasihat
2. Direktur/kepala sekolah
3. Wakil guru
4. Wakil siswa
5. Wakil masyarakat
6. Asosiasi orang tua

Seluruh anggota komite sekolah terlibat dalam berbagai permasalahan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mereka mengajukan gagasan atau usulan misalnya penambahan guru. Mereka juga dapat memberikan keputusan, menjalankan pengumpulan dana untuk pengembangan sekolah dan mencari dana dari sumber- sumber lain.

7

Penutup

Sistem pendidikan yang diterapkan di Thailand pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Persamaan ini memberikan peluang yang cukup besar untuk saling berbagi pengalaman dan bekerja sama. Penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan melalui ujian nasional. Namun hasil ujian nasional di Thailand bukan memutuskan lulus atau tidaknya seorang siswa. Kelulusan siswa ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi secara terbuka dimana calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sajana dengan lama pendidikan 4 tahun. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai bentuk program mulai dari pelatihan dan studi lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Proses pengusulan dana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah pada hakikatnya sama seperti di Indonesia. APBN Thailand memberikan alokasi mendekati 20 persen kepada Kementerian Pendidikan. Dengan dana yang besar ini memungkinkan sekolah dan siswa mendapat

berbagai keuntungan. Sekolah gratis berlaku sampai sekolah menengah atas. Siswa mendapat berbagai bantuan seperti buku teks, alat tulis, susu, makan siang, baju seragam, dll. Dalam upaya memperkenalkan ICT sejak dini, kepada anak kelas 1 SD di Thailand dibagikan komputer tablet, berikut dengan program- program pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

1. Chantira Tantipongsanuruk (2013), “Personal Communication”
2. Ministry of Education (2008a), “ The Basic Education Core Curriculum” Bangkok, Thailand
3. Ministry of Education (2008b), “ Towards a Learning Society in Thailand: an Introduction to Education in Thailand” Bangkok, Thailand
4. Office of Education Council (2008), Education in Thailand”, Ministry of Education, Bangkok, Thailand
5. Office of Education Council (2013), “Curriculum Development of Thai Basic Education”, Ministry of Education, Bangkok, Thailand
6. Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA (2010) “Annual Report 2010”, ONESQA, Bangkok, Thailand.
7. Siribodhi, T (2011), “Basic Education Curriculum in Thailand: Content and Reform”, SEAMEO Secretariat, Bangkok, Thailand
8. Unesco (2011)”Education Profiles”, Unesco Bangkok, <http://www.unescobkk.org/education/resources/resources/education-system-profiles/thailand/basic-education/>

-o0o-

XVI

Sistem Pendidikan di Tiongkok



Sumber foto Tembok Besar Cina: The Guardian

Oleh:
Chaerun Anwar, S.Pd., M.Pd.
Atase Pendidikan di Beijing

EXECUTIVE SUMMARY

Sistem Pendidikan di Tiongkok

Dinamika pendidikan di Tiongkok sejarahnya panjang dan rumit. Sistem yang ada sekarang merupakan produk campuran dari berbagai filsafat klasik dan modern yang dipengaruhi oleh beragam agama, psikologi sosial, budaya, politik, ekonomi sejak era kekaisaran sampai penguasa Komunis sekarang. Pendidikan diorganisir sejak Dinasti Han tahun 206 SM – 220 M di mana banyak literatur Konfusiunisme yang dijadikan filosofis masyarakat Tiongkok dikumpulkan dan disusun kembali. Filsuf Hsun Tzu yang terkenal dengan ajarannya “Belajar terus sampai mati dan hanya kematianlah yang menghentikannya”, menjadi semboyan Kementerian Pendidikan Tiongkok sekarang.

Pendidikan dasar menengah Tiongkok menganut pola 6+3+3 (Pendidikan Dasar 6 tahun, Pendidikan Menengah Pertama 3 tahun, dan Pendidikan Menengah Atas 3 tahun), dengan tujuan pendidikan nasional yaitu: i) Peningkatan kualitas tenaga kerja secara berkelanjutan; ii) Peningkatan dan penguatan daya saing nasional; iii) Perubahan paradigma ‘negara besar secara populasi’ menuju ‘negara adi daya’ melalui sistem pendidikan maju.

Pendidikan tinggi mengalami 2 kali reformasi baik dalam kurikulum, perbaikan sarana prasarana maupun sasaran output lulusan. Program 211 yang diluncurkan tahun 1990 memilih 100 universitas dengan dana 15 milyar yuan untuk dipersiapkan sebagai *pilot project* menjadikan universitas bertaraf internasional. Program 985 yang diluncurkan pada

tahun 1998 bertujuan untuk mempersiapkan 34 universitas sebagai *World Class University*.

Pendanaan pendidikan Tiongkok mengalami berbagai uji coba dan penyesuaian, terakhir dipilih metoda Sentralisasi berencana dimana wilayah timur Tiongkok didorong untuk mendanai pendidikan dari dana non budgeter, dana masyarakat dan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), sementara untuk wilayah tengah dan barat yang dikategorikan daerah belum maju dan belum makmur pendanaan pendidikannya didanai dana budgeter namun tetap memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah melakukan income generating dari sektor dunia usaha.

Ujian nasional diselenggarakan pada jenjang SMP yang hasilnya dapat digunakan untuk seleksi masuk SMA. Ujian nasional SMA dapat dijadikan sebagai dasar penyeleksian calon mahasiswa di perguruan tinggi, dan ujian nasional S1 yang hasilnya digunakan untuk masuk pasca sarjana di perguruan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan selain menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tiongkok juga diperankan secara aktif oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial (untuk pendidikan Vokasi), serta Pemerintah Daerah.

Pembinaan Profesi guru dilakukan berjenjang dan terencana dalam bentuk *Preservice* dan *Inservice Education* yang dilaksanakan oleh universitas keguruan serta lembaga diklat. Guru walaupun berstatus bukan sebagai pegawai negeri namun memiliki jenjang kepangkatan yang berdampak pada gaji. Perekrutan guru sangat selektif dengan mempertimbangkan pada kualifikasi guru sesuai undang-undang guru. Sertifikasi profesi guru dilakukan setiap 4 tahun sekali yang memungkinkan guru memperoleh perbaikan penghasilan dan perpanjangan kontrak kerja.

Peran masyarakat dalam pendidikan sangat besar, karena menurut sejarahnya lembaga pendidikan secara tradisi didirikan oleh kelompok masyarakat. Organisasi *Jiazhang Jiaoshi* (organisasi Orang tua Murid dan Guru/OMG) adalah sarana diskusi yang membahas banyak hal dalam institusi pendidikan dari jenjang SD sampai perguruan tinggi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	847
DAFTAR ISI	849
1. Sistem Pendidikan Tiongkok	851
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	871
3. Evaluasi Pendidikan	877
4. Pembinaan Profesi Guru	887
5. Sistem Pendanaan Pendidikan	909
6. Peranan Masyarakat dalam Pendidikan	925
DAFTAR REFERENSI	929

1

Sistem Pendidikan Tiongkok

1.1 Pendahuluan

Kurikulum pendidikan dasar sampai menengah Tiongkok mengalami perubahan kurikulum sebanyak 7 kali sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Perubahan kurikulum merupakan tuntutan yang dibutuhkan agar Tiongkok menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi dan pasar kerja domestik maupun global. Pada perubahan kurikulum ketujuh-kali-nya tahun 2007, pemerintah sangat terbuka terhadap hasil penelitian di bidang pendidikan dan masukan dari praktisi pendidikan, pengusaha dan orang tua serta masyarakat peduli pendidikan baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat nasional.

Reformasi kurikulum dimulai melalui survey studi secara nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dengan subyek pengamatan pada 16.000 siswa, 2000 guru dan kepala sekolah di 9 provinsi yang mewakili peta demografi Tiongkok. Selain itu, juga dilakukan studi komparatif dengan kurikulum di negara Inggris, Amerika, Kanada, Australia, Korea Selatan, Thailand, Rusia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, Jepang, India, Brasil dan Mesir. Upaya studi komparatif ini dilakukan untuk memperoleh wawasan yang luas untuk para penyusun kurikulum dalam peningkatan kualitas kurikulum pendidikan dasar-menengah. Studi komparatif ini diyakini sebagai upaya yang sangat bermakna untuk memfasilitasi pemahaman yang benar terhadap sistem pendidikan di dunia dan keterkaitannya

dengan sosial ekonomi dunia. Studi ini juga memperluas wawasan para pengambil kebijakan akan kampanye di seluruh belahan dunia tentang EFA (*Education for All*) yang mencakup kualitas pendidikan di semua unit pendidikan.

Perumus kurikulum pendidikan dasar menengah Tiongkok dipimpin oleh *Directorate General Basic Education*, yang anggotanya terdiri dari:

1. *China National Institute of Education Research*
2. *International Center of Teacher Education*
3. *Department of Textbook Development, National Center for Curriculum and Textbook Development, Ministry of Education*
4. *Center of Curriculum and Textbook Development at China National Institute of Educational Research*
5. *Center for Cognitive Sciences and Learning, Beijing Normal University*
6. *International Center of Teacher Education, and Department of Curriculum and Instruction East China Normal University.*
7. *Beijing Normal University*
8. *Huadong Normal University*
9. *Huanan Normal University*
10. *Nanjing Normal University*
11. *Huazhong Normal University*
12. *Dongbei Normal University*
13. *Xibei Normal University*
14. *Zhejiang Normal University*
15. *Shaanxi Normal University*
16. *Capital Normal University*
17. *Hunan Normal University*
18. *Liaoning Normal University*
19. *Tianjin Normal University*

1.2 Struktur Pendidikan Tiongkok

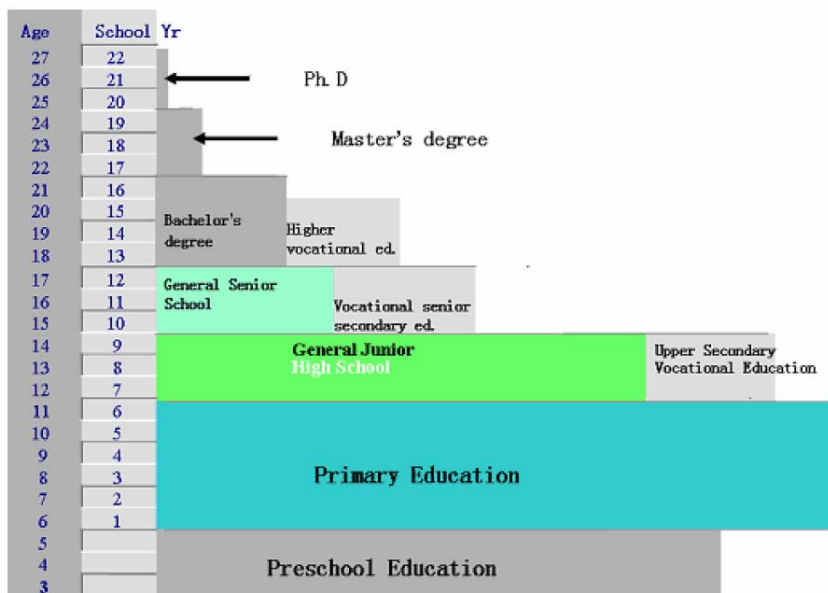
Pendidikan dasar Tiongkok terdiri dari 3 tahun PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun pendidikan menengah atas. Ada pula

pendidikan tinggi setingkat akademi 2-3 tahun, pendidikan tinggi kejuruan teknik 4 tahun, pendidikan gelar sarjana 4 tahun, pendidikan gelar magister 2-3 tahun, dan pendidikan doktor 3 tahun.

Tujuan pendidikan nasional Tiongkok adalah untuk mempersiapkan pelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, dan estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya kelak agar menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik dan berbudaya serta memiliki karakter yang kuat dan disiplin

Dibawah pengawasan *State Council*, Kementerian Pendidikan bertanggung-jawab untuk semua perencanaan dan penyusunan kebijakan umum tentang pendidikan, di mana administrasi pendidikan dasar didesentralisasikan ke Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten/Desa. Sedangkan administrasi dan pengawasan pendidikan tinggi dilakukan di tingkat nasional dan provinsi.

Wajib belajar di Tiongkok berlangsung selama 9 tahun, di mana anak-anak memasuki Sekolah Dasar (SD) pada usia 6 tahun. Sebelum memasuki masa sekolah dasar, anak-anak dapat memperoleh pendidikan PAUD untuk beberapa tahun. Wajib belajar terdiri dari 6 tahun SD dan 3



Gambar 1.1 Struktur pendidikan di Cina

tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, siswa menempuh ujian nasional untuk memasuki pendidikan menengah atas yang terdiri 3 kategori, yaitu:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum, merupakan sekolah menengah atas yang mempersiapkan siswanya memasuki jenjang pendidikan tinggi.
2. SMA Spesialis/Teknik, sekolah menengah atas yang mempersiapkan siswanya dengan keterampilan dan diklat khusus dibidang teknik yang siap terjun di dunia kerja. Lulusan sekolah ini diperbolehkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. SMA Vokasi/Profesional, sekolah menengah atas yang mempersiapkan siswanya dengan keterampilan dan diklat khusus di bidang vokasi yang siap terjun di dunia kerja.

Tabel 1.1 Deskripsi Tipe-tipe Sekolah di Tiongkok

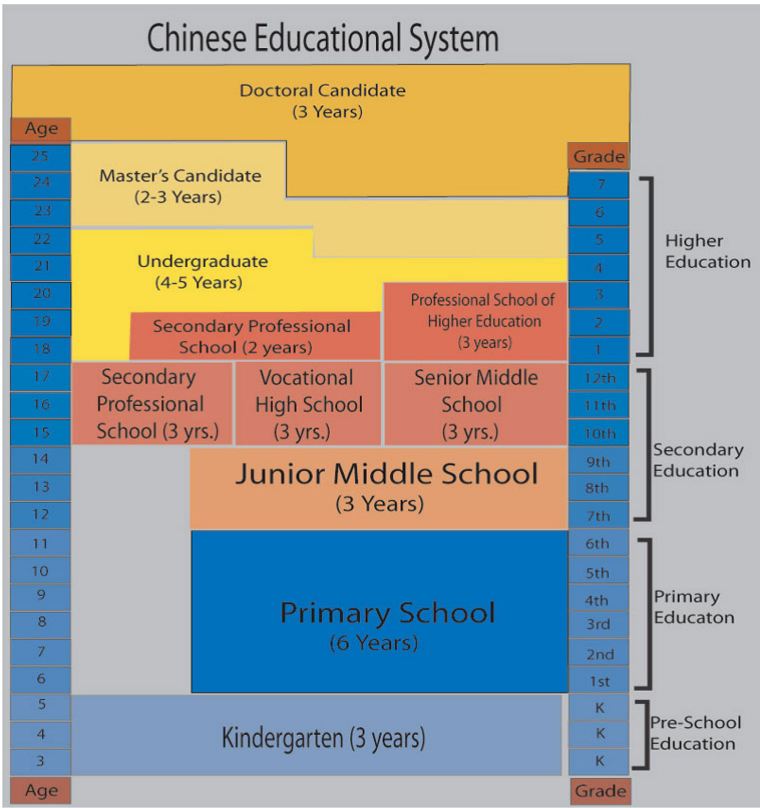
No	Tipe Sekolah	Lama Belajar	Usia	Ijazah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3 tahun	Usia 3-5 tahun	-
2	Pendidikan Dasar	6 tahun	Usia 6 – 12 tahun	-
3	Pendidikan Menengah Pertama	3 tahun	Usia 12 – 15 tahun	-
4	Pendidikan Menengah Atas	3 tahun	Usia 15-18 tahun	Diberikan Ijazah SMA
6	Pendidikan Menengah Atas Spesialisasi	3 tahun	Usia 15 – 19 tahun	Diberikan Ijazah SMK

Pendidikan menengah terbagi dalam dua kategori yaitu pendidikan menengah umum dan vokasi/teknik. Kedua kategori tersebut mencakup dua tahapan yaitu tahapan pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah umum membekali siswanya dengan pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sedangkan pendidikan menengah kejuruan dan teknik dibekali

dengan keterampilan kerja. Kelulusan pendidikan menengah ditentukan oleh ujian pada akhir masa sekolah. Sedangkan akses melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi bergantung dari hasil ujian dan ujian masuk perguruan tinggi. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci di Bab 2.

Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi seperti universitas (misalnya: bidang umum dan teknik), Institusi spesialisasi (misalnya: kedokteran, pertanian, bahasa asing, dsb.), Universitas vokasi (misalnya: diklat guru) dan Akademi. Ujian masuk ke pendidikan tinggi di Tiongkok sangat kompetitif.

Gelar sarjana selain diberikan oleh universitas dan institusi spesialisasi, juga diberikan oleh universitas vokasi. Universitas vokasi dan akademi spesialisasi menyelenggarakan pendidikan lanjutan dan memberikan diploma pada lulusannya. Gelar Magister dan Doktor diberikan oleh universitas dan beberapa institusi spesialisasi.



Gambar 1.2 Sistem pendidikan di Cina

Data statistik jumlah sekolah, staf pengajar dan siswa di Tiongkok dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 1.2. Statistik Jumlah Sekolah, Staf Pengajar, Siswa dan *Gross Enrollment Rate*

Jumlah	Sekolah	Staf Pengajar	Siswa	Gross Enrollment Rate
Pendidikan Tinggi	2,273	1,050,164	20,949,645	21%
Menengah Atas	31,561	2,060,383	39,900,939	52,7%
Menengah Bawah	62,486	3,471,839	62,149,442	95%
Pendidikan Primer	366,213	5,592,453	108,640,655	106,4%
Pendidikan Pra-sekolah	124,404	721,609	21,790,290	41,4%

1.3 Dasar Hukum Pendidikan Tiongkok

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah dihasilkan produk hukum yang memayungi pelaksanaan pendidikan di Tiongkok. Pemerintah menggunakan produk hukum ini untuk mengalokasikan dana pendidikan, perencanaan pendidikan, evaluasi penyelenggaraan pendidikan, pengaturan kebijakan pendidikan, pelayanan informasi, dan pengawasan pelayanan pendidikan. Produk hukum yang dimaksud adalah seperti:

1. *School Act*
2. *Educational Examination Act*
3. *Educational Investment Act*
4. *Lifelong Learning Act*
5. *Compulsory Education Law*
6. *Education Law*
7. *Teacher Act*
8. *Higher Education Act*
9. *Academic Degrees Regulations*
10. *Private and Non-Governmental Education Promotion Act*
11. *National Act on Language and Scrip System*
12. *Regulation on China-Foreign Joint Education Institutions and Programmes*

Beberapa peraturan perundangan merupakan hasil dari diskusi mendalam antara pemerintah pusat dengan para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, ahli, dosen universitas, dan guru sekolah.

1.4 Perkembangan Pendidikan Swasta

Pendirian pendidikan swasta dimungkinkan di Tiongkok berdasarkan pada peraturan perundangan “*the Private and Non Governmental Education Act of the People’s Republic of Tiongkok and the Regulations on Implementation of the Act*”. Pihak swasta dapat berperan dengan memberikan sumbangan fasilitas, dana, manajemen dalam pengelolaan pendidikan dan memberi pilihan pendidikan lain yang bisa dijadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

1.5 Sistem Penganggaran Pendidikan

Tiongkok telah melaksanakan pembangunan sistem pendidikan dengan mengalokasikan dana investasi yang besar pada sektor pendidikan seperti membantu siswa memperoleh layanan pendidikan yang sama. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan memberikan skema bantuan berupa pinjaman pendidikan yang dibayar setelah memperoleh pekerjaan tetap dengan gaji minimal 1000 yuan per-bulan, biaya pendampingan, beasiswa, subsidi pendidikan, pembebasan biaya sekolah, dan pengurangan biaya sekolah. Pada tahun 2013, sekitar 23.878.200.000,- Yuan disediakan untuk 11,02 juta mahasiswa dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi. Sistem pendanaan pendidikan secara rinci akan dibahas pada Bab 4.

1.6 Sistem Manajemen Sekolah

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar dipimpin oleh *State Council* yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di mana manajemen

pelaksanaannya dibagi ke pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota/kecamatan. Pengaturan manajemen pelaksanaan wajib belajar ini juga meliputi sistem pendanaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sistem administrasi pendidikan tinggi dilakukan di pemerintah pusat dan provinsi, dimana pemerintah provinsi memiliki tanggung-jawab terbesar dalam manajemen pendidikan tinggi.

Sistem administrasi pendidikan teknik dan kejuruan secara keseluruhan merupakan tanggung jawab *State Council*, namun tanggung jawab terbesar terletak pada pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan sektor swasta, industri, pengusaha, dan perusahaan dengan harapan bahwa pendidikan keahlian yang diajarkan berorientasi pada keterampilan dasar yang sesuai dengan dunia usaha dan pasar kerja.

1.7 Kurikulum Pendidikan

Di negara yang memiliki populasi besar seperti Tiongkok adalah tidak mudah mengorganisasi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar sampai menengah, namun demikian Tiongkok sukses memaksa 85% penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan wajib belajar di tahun 2000 dan meningkat mencapai 93% di tahun 2004.

1.7.1 Tujuan

Untuk memenuhi tuntutan “peradaban berbasis pengetahuan” (*knowledge-driven civilization*) sebagai jawaban terhadap tantangan di abad 21, pemerintah Tiongkok mengubah tujuan kurikulum sesuai harapan masyarakat Tiongkok. Contoh dari perubahan tujuan kurikulum adalah dengan menciptakan generasi berwawasan luas, yang memungkinkan setiap individu untuk menemukan, menggali dan memperkaya potensi kreatif-nya, serta menemukan kelebihan individualnya.

Hal ini berarti melampaui pandangan instrumen pendidikan yang selama ini tunduk kepada tujuan tertentu (dalam hal keterampilan, kemampuan atau potensi ekonomi) menjadi ke arah yang menekankan

pengembangan manusia seutuhnya (paradigma belajar menjadi). Menurut pakar pendidikan Tiongkok, pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan manusia adalah proses yang sangat individual dan pada saat yang sama proses membangun interaksi sosial. Prinsip dasar pendidikan di Tiongkok adalah pendidikan harus berkontribusi pada pengembangan serba masing-masing individu-pikiran dan tubuh, kecerdasan, kepekaan, rasa estetika, tanggung-jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual (dalam pengertian nilai-nilai konfusianisme).

Pendidikan di Tiongkok selama dua dekade terakhir telah dipandu oleh prinsip dasar, yang diusulkan oleh Deng Xiaoping, bahwa pendidikan harus berorientasi modernisasi, ke dunia luar, dan ke masa depan. Tujuan pendidikan adalah “mengaktifkan siswa untuk belajar dengan cara yang aktif dan hidup serta berkembang secara moral, intelektual, dan fisik dengan cara pengembangan semua potensi dan untuk mempersiapkan generasi baru yang memiliki cita-cita, kebajikan moral yang dididik dalam disiplin”. Tujuan pendidikan, hakikatnya terdiri dari dua elemen penting yaitu: 1) penekanan pada “pengembangan semua potensi peserta didik”, dan 2) pergeseran fokus dari “pengetahuan dasar dan pengembangan keterampilan dasar”, nilai-nilai atau pengembangan sikap serta dari akuisisi doktrin politik-ideologis ke pendekatan holistik humanistik untuk pembangunan manusia seutuhnya.

Secara rinci tujuan kurikulum yang dijabarkan di atas tertuang dalam falsafah *Su-Shi-Jiao-Yu* yang merupakan perwujudan pendidikan berorientasi kualitas. Berikut tujuan kurikulum yang dimaksud:

1. Mengembangkan rasa patriotisme, kolektivisme, cinta sosialisme, dan pelestarian tradisi budaya nasional;
2. Mengembangkan kesadaran/rasa demokrasi sosialis dan taat aturan hukum serta mematuhi hukum dan norma-norma sosial;
3. Mengembangkan cara pandang hidup sehat dan bertumpu pada nilai-nilai kehidupan;
4. Mengembangkan rasa tanggung-jawab sosial dan kewajiban untuk melayani rakyat;
5. Membudayakan semangat kreatifitas, kemampuan praktek,

- kompetensi ilmiah dan humanistik dan kesadaran lingkungan;
6. Mengembangkan dasar pengetahuan, keterampilan dan pendekatan untuk belajar sepanjang hayat; dan
 7. Mengembangkan tubuh yang sehat, kualitas psikologis yang solid, apresiasi estetika dan cara-cara hidup sehat.

Tujuan kurikulum untuk tingkat SMA juga menambahkan hal berikut:

1. Mengembangkan kemampuan untuk belajar mandiri, kesadaran kejuruan/kerja, kewirausahaan, perencanaan karir;
2. Memahami diri sendiri dan menghargai orang lain, belajar untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, pengembangan semangat tim/bekerja-sama; dan
3. Memahami keanekaragaman budaya, dan keterbukaan pikiran terhadap dunia luar.

Kurikulum pendidikan dasar memiliki 3 tujuan dimensional, yaitu:

1. Sesuai pilihan konten pendidikan, termasuk pengetahuan dasar dan keterampilan dasar, mencerminkan pembangunan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan-teknologi dan keragaman budaya, dan yang berkaitan dengan pengalaman pembelajar;
2. Mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan di semua kurikulum atau bidang pelajaran; dan
3. Memperhatikan proses dan pendekatan pembelajaran, mendorong pengembangan aktif, strategi pembelajaran yang saling bergantung.

Secara ringkas tujuan dimensional kurikulum pendidikan dasar adalah untuk merancang kurikulum pada dimensi: pengetahuan dan keterampilan, proses dan pendekatan, dan afektif atau sikap dan nilai-nilai.

Pencapaian tujuan kurikulum pendidikan dasar akan selalu diubah ke arah yang berbasis disiplin akademik dan kurikulum perguruan tinggi.

1.7.2 Struktur Kurikulum berbasis Keanekaragaman dan Fleksibilitas dalam Pendidikan

Batang tubuh kurikulum pendidikan dasar di Tiongkok tergambar dalam struktur kurikulumnya. Pada awal tahun 1980-an, negara-negara di Asia dan Pasifik melakukan penerapan “kurikulum terintegrasi” dan pembelajaran tematik interdisipliner terutama dalam ilmu pendidikan, ilmu lingkungan dan pendidikan kesehatan. Di seluruh dunia telah terjadi kecenderungan kurikulum yang lebih terintegrasi dalam pendidikan dasar.

Struktur Kurikulum bisa ditafsirkan sesuai dengan bagaimana kurikulum didefinisikan. Jika kurikulum dipahami sebagai proses merancang pengaturan instruksional di mana peserta didik diaktifkan untuk memperoleh pengalaman, maka struktur kurikulum menyiratkan “elemen penting atau keterkaitan pengaturan instruksional yang dirancang”. Jika kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran instruksi plus “kurikulum tersembunyi” untuk belajar di luar mata pelajaran formal, maka “struktur kurikulum” berarti pilihan mata pelajaran dan keterkaitan mata pelajaran, atau organisasi dan koordinasi komponen kurikulum.

Struktur kurikulum Tiongkok memuat 3 hal yaitu:

- Peningkatan Kurikulum seimbang
 - Keseimbangan yang lebih baik antara kurikulum berbasis disiplin, kurikulum terpadu dan “kurikulum berbasis praktek yang komprehensif”.

Skema kurikulum mempertahankan sejumlah kurikulum berbasis disiplin, terutama untuk SMA, termasuk bahasa Tiongkok, matematika, dan bahasa asing; dan sebagai alternatif: fisika, kimia dan biologi untuk sains. Upaya yang dilakukan adalah untuk membangun keunggulan kurikulum berbasis disiplin (misalnya logika dan integritas dalam mengorganisir pengetahuan, profesionalisme dan keilmiah sistemik untuk akuisisi belajar efektif). Sementara itu, mata pelajaran berbasis disiplin dalam kurikulum diseimbangkan dengan keterampilan kognitif dan nilai-nilai dimensi konten pendidikan dan

mengalihkan fokus dari akuisisi pengetahuan untuk pembangunan manusia secara holistik. Selain itu, pengetahuan disiplin lebih terkait dengan pengalaman siswa dan kehidupan atau praktek sosial.

Kurikulum terpadu diterapkan di sekolah dasar dengan materi karakter dan kehidupan, kebajikan moral dan masyarakat, seni dan sains. Di SMP dan SMA kurikulum terpadu terdapat pada materi Sejarah dan Masyarakat, sains dan seni.

Kurikulum Praktek Komprehensif, yang merupakan kurikulum eksperimental, berpusat pada kegiatan siswa dan terkait dengan kehidupan sosial. Subjek ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan pendidikan sekolah, pengalaman pribadi pelajar dan kehidupan masyarakat, dan untuk mengembangkan pelajar dalam pemecahan masalah, kreativitas dan praktek kompetensi. Ketiga jenis kurikulum tersebut telah menunjukkan kelebihanannya masing-masing dan membantu mengatasi kekurangan pada kurikulum berbasis disiplin.

- Keseimbangan yang lebih baik dalam proporsi pengaturan jam belajar untuk berbagai jenis kurikulum

Jumlah jam pelajaran mingguan dan total jumlah jam pembelajaran diupayakan untuk mengurangi beban belajar siswa dalam pendidikan wajib belajar 9 tahun. Tabel 1.3 menggambarkan perbandingan jam pelajaran mingguan murid Tiongkok dan hari kehadiran sekolah tahunan dengan jam belajar di beberapa negara yang berbeda.

Tabel 1.3 Perbandingan Jam Belajar Mingguan dan Hari Kehadiran Sekolah Beberapa Negara dengan Tiongkok

Item Negara	Total jumlah jam belajar perminggu (kelas 1 s.d 9)	Jumlah Hari belajar per-tahun (5 hari seminggu)
Tiongkok	264	Pendidikan dasar: 195 hari, Pendidikan menengah: 200 hari

Korea Selatan	270	-
Jepang	256	200 hari
Taiwan	287 s.d 293	-
Hongkong	318 s.d 324	-
Rusia	271	204 hari
Jerman	268	156 hari
Indonesia	212	190 hari

Distribusi waktu pembelajaran, proporsi masing-masing mata pelajaran dapat dilihat pada Tabel 1.4. Gambar 1.3 menunjukkan persentase jam pelajaran untuk mata pelajaran pada total kelas 1-9 dalam program wajib belajar 9 tahun di Tiongkok.

- Keseimbangan yang lebih baik dalam kurikulum untuk kelompok usia yang berbeda pada pendidikan wajib belajar 9 tahun

Dalam struktur kurikulum yang seimbang, perhatian perlu diberikan untuk bobot yang diberikan kepada subyek yang berbeda dan proporsi jam kelas untuk setiap mata pelajaran. Perhatian juga diperlukan dalam hal desain kurikulum untuk karakteristik fisik-psikologis pelajar pada usia yang berbeda.

Tabel 1.4 Distribusi Proporsi per Mata Pelajaran

Mata Pelajaran	Persentase	Persen
Moral (pembangunan karakter)	7 s.d 9%	
Bahasa Tiongkok	20 s.d 22%	
Matematika	13 s.d 15%	
Bahasa Asing	6 s.d 8%	
Seni (Musik, Seni rupa)	9 s.d 11%	
Pendidikan Jasmani	10 s.d 11%	
Praktek (muatan lokal)	16 s.d 20%	

- Peningkatan Kurikulum terpadu
Kurikulum di Tiongkok berdasarkan pada disiplin ilmu berbasis konten dan terkotak tanpa interaksi antara domain pembelajaran. Salah satu tujuan dari kurikulum pendidikan dasar adalah untuk

meningkatkan integrasi konten kurikulum yang relevan dan mempromosikan pembelajaran antar-disiplin.

Peningkatan integrasi dalam struktur kurikulum pendidikan dasar dilakukan melalui cara berikut:

- Kurikulum sekolah dasar (terdiri dari mata pelajaran terpadu): Untuk kelas rendah (kelas 1 s.d 4), mata pelajaran terdiri dari pendidikan Karakter Moral dan Kehidupan, Bahasa Tiongkok (sebagai bahasa ibu), Matematika, Pendidikan Jasmani, Seni (atau Musik, Seni Rupa). Sedangkan untuk kelas atas (kelas 5 s.d 6), mata pelajaran terdiri dari pendidikan Karakter Moral dan Masyarakat, Bahasa Tiongkok & Sastra, Matematika, Sains, Bahasa Asing, Kegiatan Praktek Komprehensif, Pendidikan Jasmani, Seni (atau Musik, Seni Rupa). Kurikulum SMP terdiri dari kedua mata pelajaran berbasis disiplin dan terintegrasi, termasuk Agama dan Karakter Moral, Sastra dan Bahasa Tiongkok, Matematika, Bahasa Asing, Sains (Fisika, Kimia, Biologi), Sejarah dan Masyarakat (Sejarah, Geografi), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni (Musik, Seni rupa) dan Kegiatan Praktek Komprehensif. Pemerintah daerah dan sekolah didorong untuk memilih mata pelajaran yang terintegrasi dan menawarkan lebih banyak pilihan.

Menawarkan mata pelajaran (mapel) baru atau “Kegiatan Praktek Komprehensif”. Mapel ini telah terintegrasi dengan teknologi informasi sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan sekolah dasar dan menengah. Mapel ini membutuhkan pembelajaran berbasis penelitian, layanan sosial dan praktek masyarakat, pekerjaan produktif dan pendidikan teknis. Mapel tersebut wajib bagi sekolah dasar, baik kelas rendah maupun atas. Mapel terpadu menuntut pembelajaran praktek yang berpusat pada kegiatan yang dirancang bersama oleh guru dan peserta didik sesuai dengan kepentingan murid, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Guru dan pelajar harus berkontribusi dalam kegiatan kurikulum yang telah dirancang.

National Course Schedule of Nine-year Compulsory Education												
	Grades									Nine-year Percentage(%)		
	One	Two	Three	Four	Five	Six	Seven	Eight	Nine			
	Moral	Moral	Moral	Moral	Moral	Moral	Moral	Moral	Moral	7-9%		
			Science	Science	Science	Science	History(History/Geography)			3-4%		
			Science	Science	Science	Science	Science(Biology /Physics /Chemistry)			7-9%		
	Chinese	Chinese	Chinese	Chinese	Chinese	Chinese	Chinese	Chinese	Chinese	20-22%		
	Math	Math	Math	Math	Math	Math	Math	Math	Math	13-15%		
			English	English	English	English	English	English	English	6-8%		
	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	10-11%		
							PE & Health	PE & Health	PE & Health	9-11%		
	Arts (Music / Art)											
	Research Activities											
	Local/ School-based									16-20%		
Total Periods a Week	26	26	30	30	30	30	34	34	34	274		
Total Periods a school year	910	910	1050	1050	1050	1050	1190	1190	1122	9522		

Gambar 1.3 Persentase jam pelajaran untuk mata pelajaran pada kelas 1 – 9

- Meningkatkan keterpaduan dalam pengajaran mapel tertentu. Hal ini dilakukan melalui: a) pengembangan hubungan atau keterkaitan antara unsur-unsur pengetahuan dalam subjek dan seluruh mata pelajaran yang berbeda, b) pengembangan keterkaitan antara kelas belajar-mengajar dan pengalaman murid sendiri serta kehidupan masyarakat, dan c) penyelenggaraan kegiatan pembelajaran terpadu di setiap mata pelajaran.
- **Peningkatan Kurikulum Pilihan**
Diberlakukannya kurikulum pilihan dalam struktur kurikulum Tiongkok bertujuan untuk menanggapi kesenjangan besar antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara wilayah timur dan barat, antara etnis mayoritas dan minoritas, dan antar sekolah dalam wilayah atau kota yang sama, dalam hal perencanaan kurikulum, implementasi dan manajemen. Struktur kurikulum sebelumnya dalam pendidikan dasar sangat sentralistik, ditandai dengan keseragaman hal yang berbanding terbalik dengan kebutuhan belajar murid dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang beragam. Peningkatan “kurikulum pilihan” berarti menawarkan mata pelajaran yang lebih elektif dan memfasilitasi otonomi yang lebih luas dalam adaptasi kurikulum dengan konteks lokal atau spesifik dan partisipasi yang lebih aktif dalam kurikulum terutama pada proses pengambilan keputusan oleh otoritas lokal, sekolah, guru dan murid.
Peningkatan pilihan dalam struktur kurikulum bisa dilihat dari berikut ini:
 - Pada sisi murid: a) siswa memiliki pilihan mata pelajaran yang lebih luas dalam kurikulum lokal dan berbasis sekolah, kebebasan yang lebih besar untuk mapel pilihan terdapat kurikulum SMA, b) Siswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kurikulum sekolah pada mata pelajaran yang mereka pilih;
 - Pada sisi guru: a) Guru memiliki pilihan yang lebih luas dalam melaksanakan standar kurikulum dan kebutuhan peserta didik, b) Guru memiliki partisipasi yang lebih aktif dalam pengembangan kurikulum terutama mata pelajaran berbasis

sekolah, dan c) Guru memiliki kebebasan pendekatan untuk mengajar serta memiliki otonomi yang lebih besar dalam menterjemahkan kurikulum “standar” dan “struktur” ke dalam praktek pengajaran di kelas.

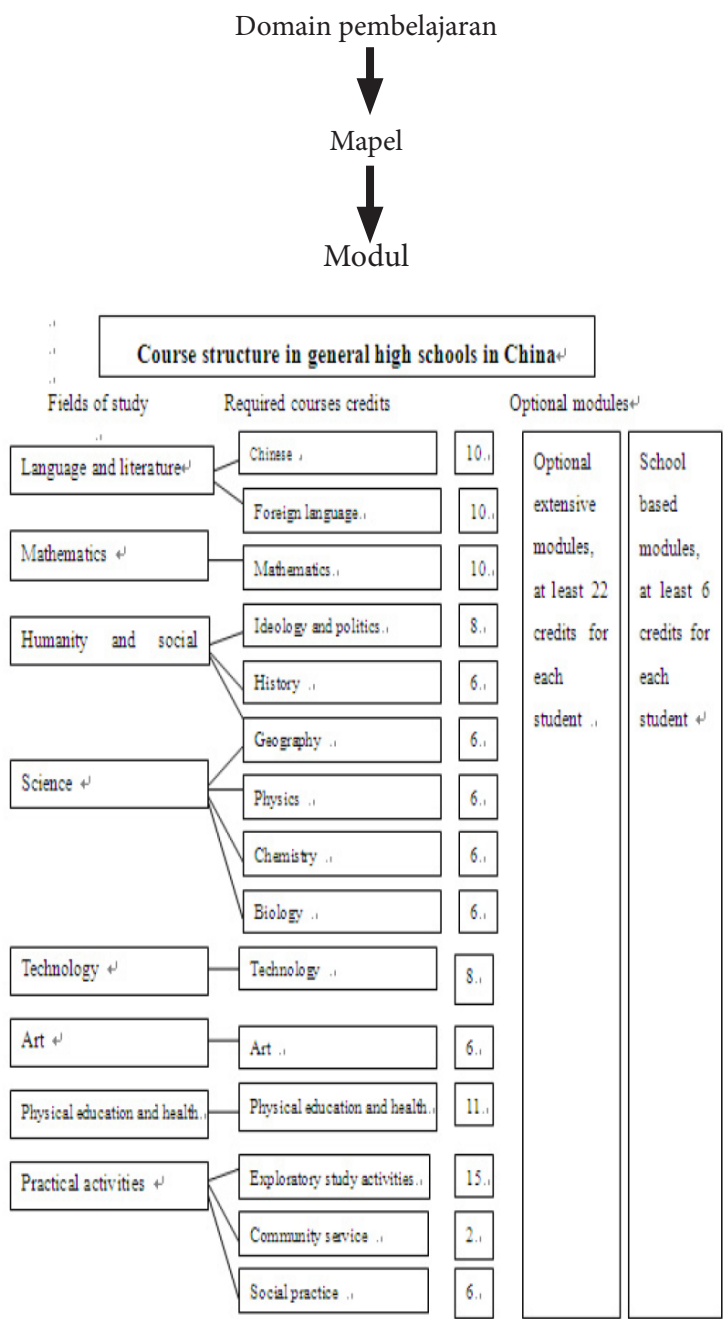
- Pemerintah setempat dan sekolah memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, implementasi dan manajemen dengan konteks lokal atau sekolah-spesifik berdasarkan kebutuhan pengembangan peserta didik.

1.8 Organisasi Isi Kurikulum

Kerangka organisasi isi kurikulum didefinisikan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendidikan: Berdasarkan karakteristik perkembangan fisik-psikologis peserta didik pada usia yang berbeda, standar isi yang ditetapkan dalam jangka waktu nilai dan tingkat pendidikan. Sebagai contoh, standar kurikulum matematika ditetapkan pada tiga tingkat masing-masing untuk kelas 1-3, 4-6, dan 7-9; Bahasa Tiongkok dan Sastra pada empat tingkat untuk kelas 1-2, 3-4, 5-6 dan 7 -9; dan Sains untuk kelas 3-6 dan 7-9.
2. Domain Belajar: hal ini terkait erat tetapi berbeda dari “isi pengajaran”, istilah yang sering digunakan dalam skema kurikulum sebelumnya. Sebuah domain belajar mendefinisikan kerangka kerja dan ruang lingkup isi kurikulum dari sudut pandang belajar siswa. Sebagai contoh, standar Matematika meliputi empat domain pembelajaran: “angka dan aljabar”, “ruang dan grafis”; “statistik dan probabilitas”, dan “praktek dan aplikasi yang komprehensif”.
3. Tema Belajar: yang memberikan fokus topikal dan lingkup desain konten dan organisasi. Misalnya, standar kurikulum “Sejarah dan Masyarakat” mengusulkan enam tema pembelajaran termasuk “Kami Tumbuh di Masyarakat”, “Ekonomi, Politik dan Budaya Sekitar Kita”, “Sejarah Tiongkok dan Kebudayaan”, “Dunia Sejarah dan Budaya” dan “Pertanyaan sosial: Keterampilan dan Pendekatan”.

Struktur kurikulum SMA terdiri dari domain belajar, subjek dan modul, seperti skema di bawah ini,



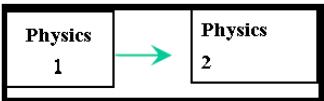
Gambar 1.4 Alur dan struktur kurikulum SMA di Tiongkok

Gambar 1.5, 1.6 dan 1.7 adalah contoh-contoh isi kurikulum mapel Fisika, Biologi dan Sejarah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

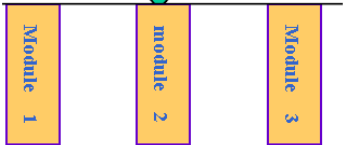
Physics

- Description of motion
 - Interaction and Law for Motion
- Mechanical Energy and Energy
 - Projectile Motion and Circumference Movements
 - Strengthens and weakness of Traditional Mechanics

Compulsory



Electives



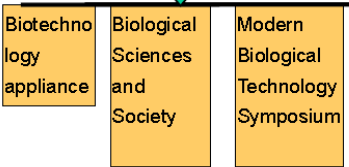
Gambar 1.5 Kurikulum Mapel Fisika.

Biology

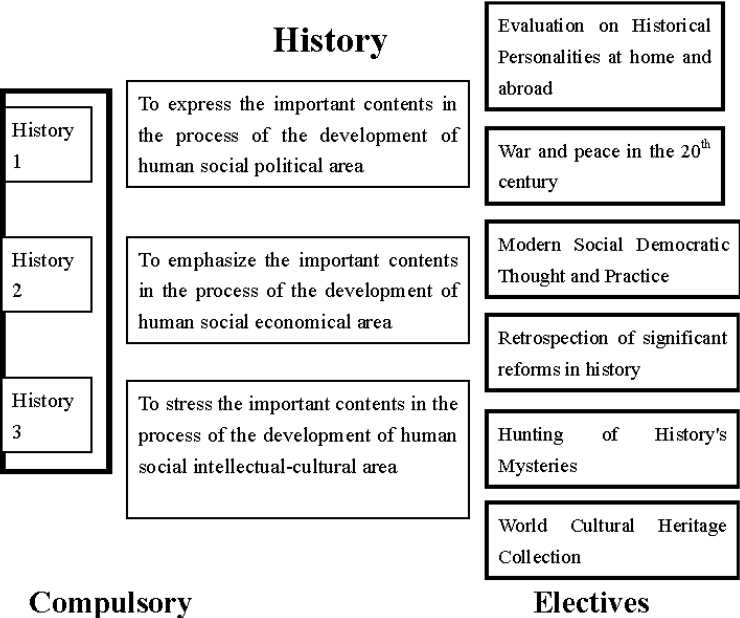
Compulsory



Electives



Gambar 1.6 Kurikulum Mapel Biologi



Gambar 1.7 Kurikulum Mapel Sejarah

2

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

2.1 Mekanisme Penjaminan Mutu

Berdasarkan Rencana Pendidikan Nasional jangka Menengah dan Jangka Panjang tahun 2010-2020, Pendidikan di Cina menitik-beratkan pada pengawasan dan penilaian dari pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penilaian dilakukan baik secara otonomi oleh masing-masing unit sekolah maupun secara nasional.

Tujuan pendidikan nasional jangka panjang, melalui pengawasan dan penilaian adalah dengan kebijakan membuka kerjasama melalui internasionalisasi satuan pendidikan dan membuka diri terhadap sistem penilaian yang berlaku secara internasional untuk mengakomodasi kebutuhan pasar tenaga kerja bertaraf internasional.

Skema berikut ini adalah ilustrasi sistem pendidikan di Cina.

Wajib belajar 9 tahun diberlakukan pada tingkat SD dan SMP dengan membebaskan iuran sekolah serta tidak diberlakukan Ujian Nasional bagi lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Proses penerimaan siswa baru di SMP dilakukan dengan sistem regionalisasi yaitu semua siswa yang berada di wilayah *Xicheng* (misalnya) akan langsung diterima di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, sedangkan siswa yang mendaftarkan diri lintas wilayah akan diberlakukan tes masuk ke SMP tersebut.

Ukuran kelulusan dan keberhasilan belajar siswa SD untuk melanjutkan ke jenjang SMP adalah nilai raport selama belajar di SD dengan nilai terendah 80 pada setiap mata pelajaran utama yaitu: Bahasa Mandarin, Matematika dan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya (Olah raga, IPS, IPA, Musik, dan Komputer) diberlakukan standar kelulusan 70.

Soal-soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester merujuk kepada kisi-kisi yang telah dibuat oleh *Test Center* (Pusat Penilaian) yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Namun demikian, soal-soal ujian tetap dibuat oleh kelompok kerja guru yang berasal dari beberapa sekolah berbeda (1 kluster biasanya terdiri dari 3 atau 4 sekolah).

Siswa SMP akan menempuh dua jenis ujian untuk sebagai syarat kelulusan. Ujian tersebut adalah:

1. Ujian *Huikao* yang merupakan ujian sekolah di mana mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran yang tidak termasuk dalam ujian nasional. Mata pelajaran tersebut antara lain:
 - Olah raga
 - IPS (Geografi, Sejarah, Ilmu Politik)
 - IPA (Kimia, Fisika, dan Biologi)
 - Musik
 - Komputer
2. Ujian Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan untuk 3 mata pelajaran utama yaitu:
 - Bahasa Mandarin
 - Bahasa Inggris
 - Matematika

Hasil Ujian Nasional SMP digunakan untuk seleksi masuk SMA, di mana setiap SMA menentukan skor dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten untuk kemudian didaftarkan dalam bursa penerimaan siswa. Nilai terendah untuk mata pelajaran yang *Huikao* adalah 70 dan nilai terendah dalam Ujian Nasional adalah 80.

Dalam pendidikan SMA, siswa dijuruskan semenjak kelas 2 SMA.

Ujian *Gaokao/ College Entrance Test* dan *Huikao* untuk SMA adalah sebagai berikut:

1. Ujian *Gaokao*:

- Matematika
- Bahasa Inggris
- Bahasa Mandarin
- IPA Terpadu (untuk jurusan IPA)
- IPS Terpadu (untuk jurusan IPS)

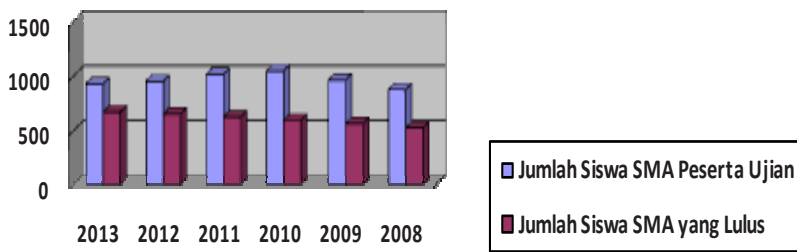
Standar kelulusan bagi ujian *Gaokao* adalah 70 dengan deskripsi nilai *Gaokao* sebagai berikut:

- Tidak lulus, nilai 0 s.d. 60.
- Lulus dan bisa melanjutkan ke program vokasi non gelar (1-3 tahun), nilai 61 s.d. 75.
- Lulus dan bisa melanjutkan ke program pendidikan gelar, nilai 76 s.d. 100.

Persentase kelulusan SMA di Cina adalah 72,04 % untuk tahun 2013. Sebagian besar siswa yang tidak puas dengan hasil *Gaokao*-nya dapat mengulang kembali di tahun berikutnya untuk memperoleh skor yang diharapkan agar bisa masuk ke perguruan tinggi (PT) yang diinginkan.

Bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus *Gaokao*, mereka masih tetap bisa menamatkan pendidikannya di jenjang SMA dan tidak perlu mengulang dengan persyaratan membuat laporan atau tugas akhir yang ditentukan oleh sekolah. Siswa tersebut akan diberikan surat tanda tamat belajar (*Xuwei*) setelah menyelesaikan tugas akhir, namun seumur hidup tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari SMA.

Gambar 2.1 adalah diagram yang menunjukkan tingkat kelulusan siswa SMA setiap tahunnya:



Gambar 2.1 Diagram perbandingan antara jumlah peserta ujian SMA dengan jumlah peserta yang lulus

Tabel 2.1 Persentase Jumlah Siswa yang Lulus

Tahun	Jumlah Peserta Ujian Nasional	Jumlah siswa yang Lulus	Persentase
2013	9.300.000	6.700.000	72,04%
2012	9.500.000	6.500.000	68,42%
2011	10.200.000	6.300.000	61,76%
2010	10.500.000	5.900.000	56,19%
2009	11.000.000	5.600.000	50,91%

Tabel 2.2 adalah daftar skor untuk masuk perguruan tinggi di Cina. Nilai maksimum *Gaokao* yang dapat diperoleh siswa adalah 750. Namun demikian, biasanya pendaftar perguruan tinggi favorit (seperti Tsinghua University dan Peking University) yang memenuhi persyaratan dasar berupa nilai *Gaokao* melebihi perkiraan sebelumnya. Dalam kasus ini, pihak perguruan tinggi diperbolehkan memberikan tes untuk menyaring kembali pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dasar *Gaokao* tersebut.

Tabel 2.2 Skor untuk Masuk Perguruan Tinggi di Cina

Batas Nilai tahun 2013			2012		2011		2010	
	IPS	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA
Universitas Nasional								
(Key University)	524	484	524	494	532	501	515	502
Universitas kelas 1								
(First Class University)	481	435	474	441	489	459	472	455
Universitas kelas 2								
(Second Class University)	443	396	439	401	458	432	439	430

2. Ujian *Huikao* SMA, mata pelajaran yang diujikan adalah sebagai berikut:
- Komputer
 - Seni
 - Olahraga

Bila siswa terbukti melakukan tindakan mencontek pada saat ujian, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti *Gaokao* pada tahun berikutnya dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) siswa tersebut akan diberi tanda untuk mengindikasikan bahwa yang bersangkutan berbuat curang di saat Ujian Nasional.

2.2 Institusi Penjamin Mutu

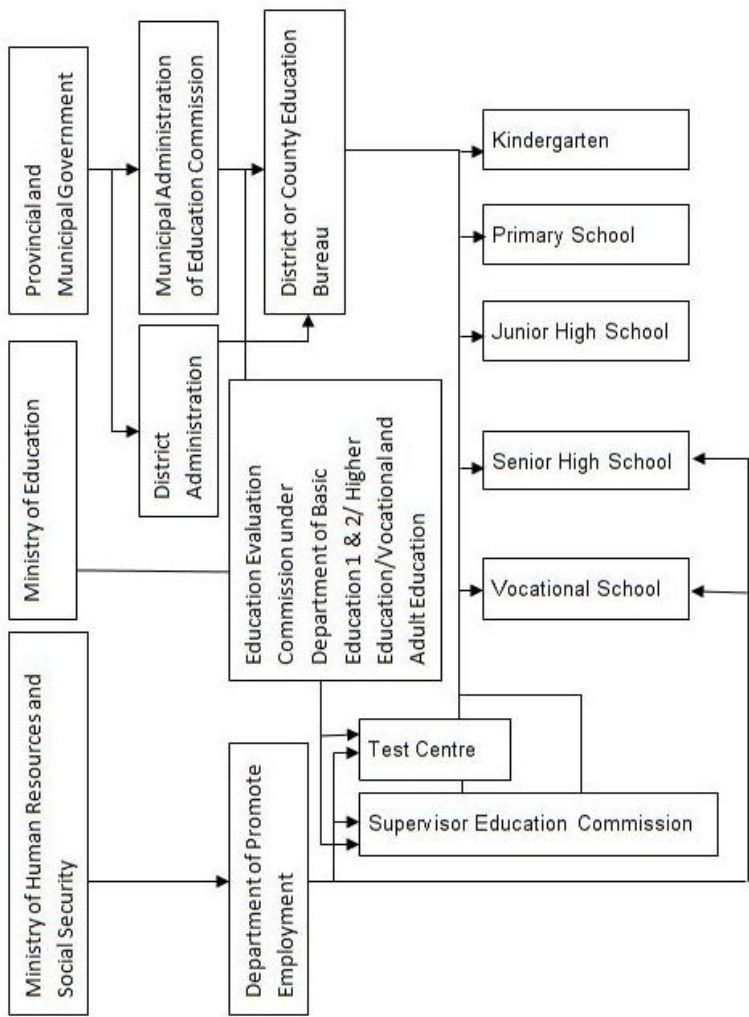
Institusi yang bertugas membuat penilaian pendidikan adalah *Test Center* (TC) di bawah Komisi Penilaian Pendidikan di setiap departemen dalam Kementerian Pendidikan. TC berada di setiap dinas pendidikan Provinsi, kota dan kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, TC berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Pendidikan. TC berwenang membuat kisi-kisi ujian/penilaian, membuat soal dan menyeleksi soal yang dibuat oleh guru atau Kelompok Kerja Guru serta memberikan pelatihan kepada guru bagaimana membuat perangkat penilaian.

Kisi-kisi Soal Ujian Nasional (*Gaokao*) dirancang oleh TC. Kemudian kelompok kerja guru membuat soal sesuai kisi-kisi yang diberikan untuk selanjutnya diseleksi dan dijadikan soal *Gaokao* yang akan digunakan di masing-masing kabupaten dan kota.

Untuk Soal Ujian Sekolah (*Huikao*), TC akan memberikan kisi-kisi pencapaian target belajar yang kemudian diberikan ke setiap sekolah. Guru-guru dari 1 kluster (wilayah) akan menyusun soal *Huikao* bersama-sama yang tetap akan dikontrol oleh TC melalui seleksi soal yang diperbolehkan untuk digunakan dalam ujian *Huikao*.

Soal ujian baik *Gaokao* dan *Huikao* terdiri dari pilihan ganda, dan esai dengan komposisi 45 pilihan ganda dan 10 esai untuk 2 jam waktu ujian.

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial juga turut berperan dalam penjaminan mutu pendidikan melalui Departemen Promosi Pekerja. Departemen tersebut menugaskan tim untuk bekerja di TC dalam penyusunan kisi-kisi dan penyeleksian soal yang disusun oleh para guru. Di samping itu, Departemen Promosi Pekerja juga membantu sekolah menyediakan instruktur bidang keahlian dan jurusan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



Gambar 2.2 Skema Penjaminan Mutu di Cina

3

Evaluasi Pendidikan

3.1 Ujian Masuk Sekolah Menengah Atas

Ujian Masuk Sekolah Menengah Atas (UMSMA) adalah seleksi berupa tes tertulis yang ditujukan bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya dari SMP menuju ke SMA. Pada dasarnya, soal ujian yang diujikan dalam UMSMA ditentukan dan disusun oleh pemerintah propinsi. Tapi pada beberapa tahun terakhir, pemerintah propinsi banyak memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mengeluarkan soal ujian secara mandiri. Walaupun demikian, hak untuk materi dan standar pelajaran yang akan diujikan disusun dan ditentukan oleh pemerintah propinsi. Standar dari materi yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi akan disesuaikan dengan standar pendidikan dan target kemajuan pendidikan setiap propinsi terkait.

Pendaftaran untuk mengikuti UMSMA dibuka pada bulan Mei. Mata pelajaran yang akan diujikan dalam UMSMA biasanya berbeda untuk setiap propinsi. Pada umumnya mata pelajaran yang diujikan adalah: Matematika, Sastra, Bahasa Inggris, Olahraga, Kimia dan Fisika (contoh dari UMSMA di Beijing). Pembagian nilai untuk setiap mata pelajaran adalah sebagai berikut: Matematika 120, Sastra 120, Bahasa Inggris 120, Fisika 100, Kimia 80, Olahraga 40. Total poin maksimum adalah 580. Ujian diadakan pada bulan Juni atau Juli, tergantung pada kebijakan setiap sekolah.

Persaingan UMSMA untuk para pelajar sangatlah ketat. Setiap pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di SMA yang berkualitas biasanya harus meraih nilai yang sangat tinggi. Sebagai contoh di Beijing, untuk memiliki kelayakan dalam memilih sekolah terbaik (*Beijing High School No.4*), nilai yang dibutuhkan adalah 560. Peringkat kedua dihuni oleh *The High School Affiliated to Renmin University of Cina*, dimana nilai yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah ini adalah 550. Peringkat ketiga ditempati oleh *The Experimental High School Attached to Beijing Normal University* dan nilai yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah tersebut adalah 545. Tabel 3.1 adalah urutan 5 SMA terbaik di Beijing.

Hasil tes diumumkan satu bulan setelah tes, tergantung kebijakan setiap sekolah. Para pelajar dapat melihat nilainya di www.bjeeea.cn.

Tabel 3.1 Lima SMA Terbaik di Beijing

No	Nama Sekolah	Nilai yang dibutuhkan
1	Beijing High School No.4	560
2	The High School Affiliated to Renmin University of China	550
3	The Experimental High School Attached to Beijing Normal University	540
4	Beijing High School No.2	535
5	The High School Affiliated to Peking University	530

3.2 Ujian Akhir Sekolah

Ujian Akhir Sekolah (UAS) Cina adalah ujian yang harus diikuti oleh seluruh pelajar untuk mendapatkan ijazah kelulusan resmi dari SMA di Cina. Walaupun nilai dari UAS tidak akan mempengaruhi hasil dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Cina (UMPTC), tetapi jika sang siswa yang berkaitan tidak lulus dalam UAS, maka siswa tersebut otomatis tidak akan memiliki kelayakan untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi, walau ia sudah dinyatakan lulus dalam tes UMPTC. Satu hal yang perlu dicatat adalah walaupun standar materi yang ditetapkan oleh UAS ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pembuatan soal, pengurusan teknis

ujian dan pengumuman nilai ini dilaksanakan secara mandiri oleh pihak sekolah masing-masing.

UAS merupakan satu dari dua beban berat yang harus dipikul oleh para pelajar di Cina (selain UMPTC) dalam usaha meraih pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada awal tahun 1980an, mahasiswa acapkali terbebani dalam mempersiapkan UAS dan UMPTC karena kedua ujian tersebut memiliki materi yang kadang berbeda dan kedua ujian tersebut juga diselenggarakan dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, semenjak revolusi UMPTC pada tahun 1990, materi-materi yang diuji pada UAN biasanya tidak akan terlalu sulit, sehingga konsentrasi para pelajar tidak terpecah dan pelajar memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan UMPTC.

Materi yang diujikan dalam UAS bersifat menyeluruh. Mata pelajaran yang diujikan dalam UAS antara lain: Matematika, Sejarah, Geografi, Sastra, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi dan lainnya. Materi yang diujikan dalam UAS biasanya tidak terlalu sulit dan hanya menguji dasar-dasar dari pelajaran terkait, sehingga tidak terlalu membebani para pelajar. Sistem yang digunakan untuk ujian UAS adalah “3+3+4”, 3 materi wajib yaitu: matematika, sastra dan bahasa Inggris, 3 materi pilihan (pilihan berkisar dari pelajaran IPA/IPS), 4 adalah ujian penelitian eksperimental (seperti penelitian biologi, fisika, kimia dan komputer). Pembagian nilai dibagi menjadi 4 jenis yaitu: A (sangat baik), B (baik), C (cukup) dan D (gagal). Nilai diumumkan pihak sekolah melalui internet. Untuk menjamin penilaian berlangsung dengan cermat, tepat dan adil, pemerintah telah membentuk komisi pengurusan UAN untuk setiap propinsi, kabupaten kota, desa untuk mengirim perwakilannya masing-masing ke setiap sekolah. Komisi ini akan memeriksa hasil UAS para siswa yang sudah terlebih dahulu dinilai oleh pihak sekolah masing-masing. Adapun nilai UAS tersebut tidak akan mempengaruhi nilai dari UMPTC.

Tujuan utama diselenggarakannya UAS adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin agar seluruh pelajar yang lulus SMA berada dalam standar tertentu.
2. Untuk menjamin agar standarisasi setiap sekolah di Cina berada di tingkat yang sama, mengingat adanya perbedaan kualitas pendidikan

- dan tenaga pengajar di sekolah daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.
3. Sebagai salah satu tolak ukur untuk pedoman pemerintah dalam penyusunan peringkat dan ranking nasional setiap sekolah. Sekolah yang baik memiliki pelajar dengan tingkat kelulusan yang tinggi dan nilai rata-rata UAS yang tinggi pula.
 4. Mengingat materi yang diujikan dalam UAS bersifat menyeluruh, UAS diharapkan bisa menjadi penyeimbang agar konsentrasi para pelajar tidak hanya tertuju pada beberapa materi pelajaran yang akan diujikan di UMPTC.

3.3 Ujian Masuk Perguruan Tinggi di Cina

Ujian Masuk Perguruan Tinggi di Cina (*National Matriculation Test*) adalah ujian yang wajib dan juga satu-satunya cara bagi seluruh pelajar di Cina untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Metode ujian ini ialah ujian tertulis. Standarisasi metode dan soal ujian ditentukan oleh pemerintah langsung agar proses ujian ini dapat berjalan seadil-adilnya. UMPTC adalah salah satu ujian terpenting dalam perjalanan jenjang pendidikan untuk seluruh mahasiswa di Cina karena UMPTC ini yang akan menentukan nasib, masa depan dan juga karir para generasi muda di Cina. Perlu dicatat pula, bahwa ujian ini diadakan secara mandiri dan tidak berdampak pada hasil ujian akhir nasional untuk setiap pelajar SMA.

UMPTC digelar secara serempak pada tanggal 7-9 Juni setiap tahunnya. Beberapa sekolah minoritas menggelar UMPTC dua kali, ditambah dengan ujian pada bulan Januari, atau biasa disebut Ujian Masuk Musim Semi. Sejak kebijakan pemerintah pada tahun 2003, setiap UMPTC harus dilakukan serempak pada tanggal 7-9 Juni dengan pembagian ujian sebagai berikut: Tanggal 7, pukul 9:00-11:30 ujian sastra Cina, pukul 15:00-17:00 ujian matematika. Tanggal 8, pukul 9:00-11:30 ujian ilmu pengetahuan sosial/ilmu pengetahuan alam, pukul 15:00-17:00 ujian bahasa asing Inggris/Jepang/Rusia/Perancis/Jerman/Spanyol). Beberapa sekolah juga menyertakan ujian listening untuk bahasa asing terkait. Ujian di beberapa universitas, seperti di Shanghai

dan propinsi Jiangsu, biasa berlangsung dari tanggal 8-9 Juni saja.

Tabel 3.2 Daftar 10 Universitas Terbaik di Cina untuk tahun 2011

No	Nama	Propinsi	Jenis	Nilai
1	Peking University	Beijing	Comprehensive	100
2	Tsinghua University	Beijing	Science	96,18
3	Zhejiang University	Zhejiang	Comprehensive	56,12
4	Fudan University	Shanghai	Comprehensive	55,57
5	Nanking University	Jiangsu	Comprehensive	42,91
6	Shanghai Jiaotong University	Shanghai	Comprehensive	42,52
7	Wuhan University	Hubei	Comprehensive	39,37
8	Renmin University of China	Beijing	Comprehensive	36,61
9	Huazhong University of Science and Technology	Hubei	Science	34,56
10	Sun Yat Sen University	Guangdong	Comprehensive	33,77

Sistem 3+X adalah sistem yang paling sering diterapkan oleh beberapa universitas di Cina, seperti di: Beijing, Tianjin, Fujian, dan 22 propinsi lainnya. Total nilai yang diberikan adalah: Sastra Cina 150, Matematika 150, Bahasa asing 150, dan ilmu pengetahuan sosial/ilmu pengetahuan alam 300. Dengan demikian, nilai maksimal adalah 750. Beberapa universitas menerapkan sistem yang berbeda, seperti di Shanghai yang memakai sistem *4+basic comprehensive*. Ujian yang diujikan di Shanghai adalah: sastra Cina, matematika, bahasa Inggris, dan satu pelajaran pilihan (ilmu politik, fisika, biologi, kimia, sejarah, atau geografi), dimana setiap subjek ujian bernilai 150, sehingga poin maksimal yang dapat diperoleh adalah 600.

Setelah pelajar selesai mengikuti UMPTC dan memperoleh hasil, barulah pelajar tersebut wajib mengisi universitas dan jurusan yang diinginkan. Total ada 4 pilihan universitas yang dapat dipilih menurut kelasnya, yaitu: universitas top (seperti Peking University, Tsinghua University), universitas kelas 1 (seperti Beijing Normal University, Jimei University), universitas kelas 2 (institut dan universitas swasta) dan

universitas kelas diploma (sekelas D3). Pelajar yang ingin mendaftar ke Universitas top seperti Peking University biasanya membutuhkan nilai yang sangat tinggi, sehingga hanya mahasiswa unggulan yang dapat mendaftar ke universitas tersebut.

Tabel 3.3 Daftar Batas Nilai UMPTT untuk Universitas-Universitas di Beijing tahun 2011

Universitas di Beijing	Batas Nilai tahun 2011			2010		2009		2008	
		IPS	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA
	Univ. Top	524	484	524	494	532	501	515	502
	Univ. kelas 1	481	435	474	441	489	459	472	455
	Univ. kelas 2	443	396	439	401	458	432	439	430

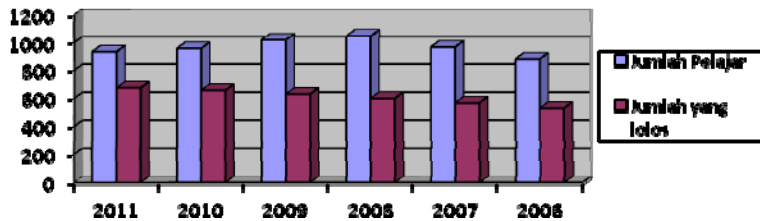
Tabel 3.4 Daftar Batas Nilai UMPTT untuk Universitas-Universitas di Shanghai tahun 2011

Universitas di Shanghai	Batas Nilai tahun 2011			2010		2009		2008	
		IPS	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA
	Universitas Top	468	462	464	465	471	455	471	467
	Universitas kelas 1	412	393	404	400	429	389	428	399

Satu hal juga yang perlu dicatat pada sistem UMPTC adalah setiap pelajar harus hati-hati dalam memilih ke-4 pilihannya. Pada umumnya kesempatan diterima hanya pada pilihan pertama karena kesempatan diterima di universitas pilihan kedua hanya terjadi jika universitas tersebut masih kekurangan stok mahasiswa yang mengisi universitas terkait pada pilihan pertamanya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah faktor “favorable score” yang diberikan menurut kebijakan universitas masing-masing. Setiap universitas akan memberikan keringanan dan tambahan nilai di UMPTC bagi para pelajar dari ras minoritas, pelajar dari daerah miskin dan pelajar dari propinsi universitas terkait.

Sedangkan untuk pelajar asing di Cina yang ingin mengikuti UMPTC, ketentuan dan syarat yang harus diikuti berbeda dengan

pelajar lokal. Umumnya, setiap universitas di Cina hanya membutuhkan nilai tes kemampuan bahasa Mandarin (atau lebih dikenal dengan nama HSK) dengan nilai 3-6. Beberapa universitas top seperti: Peking University, Tsinghua University, Renmin University membutuhkan tes masuk lain yakni “Ujian Masuk Perguruan Tinggi di Cina untuk Pelajar Asing”. Materi pelajaran yang diuji meliputi: Matematika, bahasa Inggris, sastra Mandarin, dan IPA/IPS. Tetapi, mengingat kemampuan bahasa pelajar asing dan pengetahuan akan Cina yang masih terbatas,



Gambar 3.1 Histogram dari jumlah pelajar yang mengikuti dan lulus hasil tes UMPTT pada tahun 2006 – 2011

materi pelajaran yang diujikan pada ujian ini umumnya lebih mudah dibandingkan dengan materi yang diujikan untuk pelajar lokal Cina.

Menurut riset dari Kementerian Pendidikan RRC, jumlah pelajar yang mengikuti UMPTC semakin berkurang dalam 3 tahun terakhir dikarenakan banyaknya pelajar yang memilih untuk kuliah di luar negeri. Di satu pihak, persentasi mahasiswa yang berhasil masuk universitas setelah mengikuti UMPTC meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2006, tercatat 8,8 juta murid mengikuti tes dan hanya 5,3 juta murid yang berhasil lolos. Tahun 2007, tercatat 11 juta murid mengikuti tes dan hanya 5,6 juta murid yang lolos. Tahun 2008, tercatat 10,5 juta murid mengikuti tes dan hanya 5,9 juta murid yang lolos. Tahun 2009, tercatat 10,2 juta murid mengikuti tes dan hanya 6,3 juta murid yang berhasil. Tahun 2010, 9,5 juta murid mengikuti tes dan 6,5 juta murid yang lulus. Pada tahun 2011, tercatat 9,3 juta murid mengikuti tes dan 6,7 murid berhasil masuk ke universitas.

3.4 Ujian Masuk Pasca Sarjana di Cina

Ujian Masuk Pasca Sarjana di Cina (UMPSC) adalah ujian yang perlu diikuti oleh lulusan sarjana (S-1) yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, Program Master (S2) atau Program Doktor (S3). Jenis Program S2 dan S3 di Cina biasanya dibagi menjadi 2 jenis yaitu untuk full time program dan part time program.

Adapun syarat-syarat bagi para pelajar di Cina yang ingin mengikuti tes UMPSC ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk program S2: memiliki ijazah resmi lulusan S1.
2. Untuk program S3: memiliki jurusan yang terkait atau pengalaman kerja di bidang jurusan yang akan dipilihnya sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pihak universitas.
3. Lulus tes kesehatan yang ditetapkan universitas terkait.
4. Umur di bawah 40 tahun.
5. Surat rekomendasi dari para pakar atau dari pihak universitas.

Setelah diterima kelayakannya untuk melamar program S2 atau S3, pelamar harus mengikuti tes UMPSC. Adapun mata pelajaran untuk tes UMPSC yang harus diikuti oleh sang pelamar adalah sebagai berikut: Bahasa Inggris, Ilmu Politik dan tes pengetahuan makro dan mikro sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. UMPSC biasanya diselenggarakan 2 kali dalam setahun, yakni: bulan Januari pada semester genap dan bulan Juli pada semester ganjil melalui internet. Hasil tes akan diumumkan sebulan sesudahnya melalui internet. Penerimaan program S2 atau S3 untuk mahasiswa asing di universitas Cina tidak terlalu ketat. Mahasiswa asing tidak perlu mengikuti UMPSC untuk menempuh pendidikan lebih tinggi di universitas terkait. Mereka hanya harus mengikuti tes bahasa Mandarin (atau dikenal dengan nama HSK), tes wawancara dan memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait.

Menurut data yang didapat dari website Baidu, jurusan untuk program S2 dan S3 yang tersedia di Cina saat ini berjumlah 381 jurusan. Total perguruan tinggi yang memiliki program S2 berjumlah 752, di antaranya 414 universitas dan 334 research institute. Untuk program S3, tersedia 359 perguruan tinggi yang menyediakan jenjang pendidikan tersebut dengan rincian 216 universitas dan 143 research institute. Dari

tahun 1978-2001, Cina tercatat telah memiliki 900 ribu pelajar lulusan S2 dan 170 ribu pelajar lulusan S3.

Bagi para pelajar yang ingin menempuh pendidikan pasca sarjana dan mengikuti UMPSC, ada beberapa hal yang biasanya dijadikan dasar pedoman, yaitu:

1. Memilih universitas sesuai jurusan yang diinginkan.
2. Memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat.
3. Memilih jurusan sesuai kebutuhan kerja dan pasar.
4. Memilih jurusan menurut tingkat keberhasilan pada UMPSC.

Dari data riset yang juga dikumpulkan oleh pihak Baidu, tingkat keberhasilan para pelajar dalam menempuh tes UMPSC bisa diurutkan sebagai berikut:

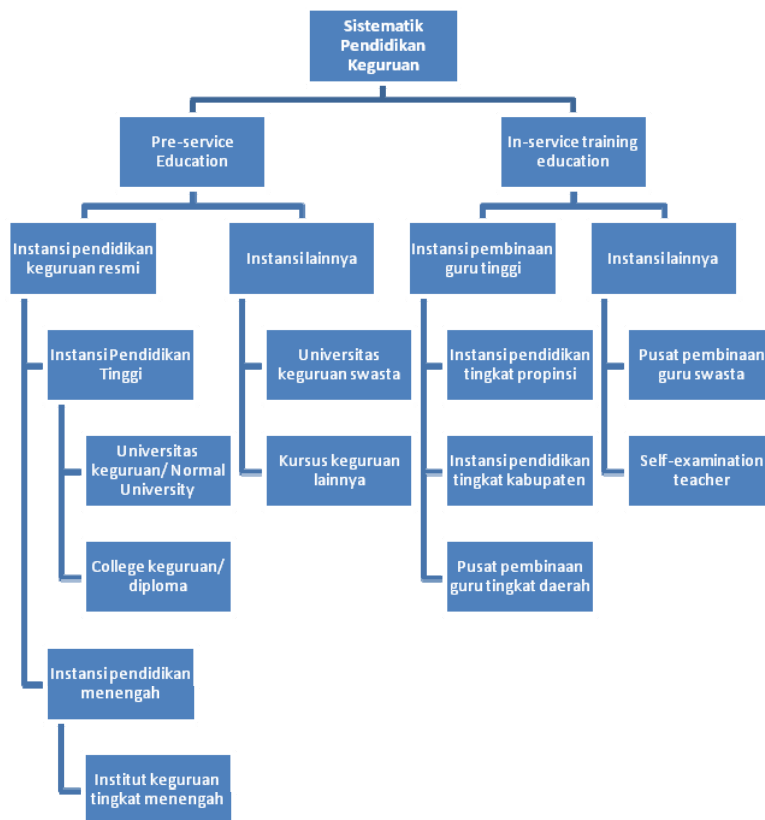
1. Menempuh S1 atau S2 di universitas yang sama, dan jurusan yang sama.
2. Menempuh S1 atau S2 di universitas yang sama, tetapi dengan jurusan yang berbeda.
3. Menempuh S1 atau S2 di universitas yang berbeda, tetapi dengan jurusan yang sama.
4. Menempuh S1 atau S2 di universitas yang berbeda, dan jurusan yang berbeda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang waktu pendaftaran, proses dan syarat-syarat pendaftaran UMPSC, peminat dapat mengunjungi website resmi dari UMPSC, <http://yz.chsi.com.cn>.

4

Pembinaan Profesi Guru

4.1 Kondisi Pendidikan Keguruan Di Tiongkok



Gambar 4.1 Struktur Pendidikan Keguruan di Tiongkok

Di Tiongkok, guru atau para pengajar mendapat tempat yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan keguruan di Tiongkok meningkat. Budaya Confisius sendiri berperan penting dalam membentuk karakteristik orang.

Tiongkok yang menghormati para guru. Sehingga tidak mengherankan apabila guru mendapatkan posisi dan strata yang penting dan mendapatkan kehormatan di negeri tirai bambu tersebut.

Pendidikan guru adalah salah satu elemen penting dari sistem pendidikan sosialis di Tiongkok. Pendidikan guru menjadi salah satu tulang punggung dalam kemajuan pendidikan di Tiongkok selama 50 tahun terakhir. Perhatian lebih telah ditunjukkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kualitas dan mutu guru yang bertaraf internasional. Tiongkok telah berhasil membangun sistem pendidikan yang dewasa di berbagai level dan berbagai tipe untuk pendidikan keguruan. Sistem tersebut juga sangat cocok dengan situasi dan kondisi para guru di negara tersebut. Di Tiongkok juga sudah tersedia institusi pelatihan guru dan sistem regulasi lain yang bertaraf internasional.

Pendidikan guru di Tiongkok ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni: *pre-service education* dan *in-service training*. Di dalam *pre-service training*, terdapat program 4 tahun di institusi pelatihan guru (termasuk program universitas keguruan dan institut) dan program 3 tahun (termasuk program *training colleges* dan sekolah pelatihan guru menengah). Instansi pendidikan ini memberikan pelatihan yang layak terhadap guru-guru untuk level-level sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Universitas dan yang lainnya. *In-service training* juga menyediakan instansi khusus untuk pelatihan guru-guru di pendidikan sekolah.

Program pelatihan para guru juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Banyaknya program-program yang disediakan, seperti: TV Program, Kelas Malam, Ujian *Online* dan masih banyak lagi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu guru-guru di Tiongkok.

Tabel 4.1 adalah data statistik yang didapat pada tahun 2013 mengenai instansi keguruan di Tiongkok.

Melalui reformasi yang terus digalang oleh pemerintah Tiongkok, kualitas dan mutu pendidikan keguruan di Tiongkok terus meningkat setiap tahun. Tercatat dari tahun 1999 sampai tahun 2013, jumlah institut atau universitas keguruan di Tiongkok meningkat dari 87 instansi menjadi 94 instansi, sedangkan sekolah spesialis keguruan dikurangi dan digabung dari 110 menjadi 48 instansi saja. Lulusan dari pendidikan keguruan ini juga meningkat jumlahnya, dari 53 ribu di tahun 1999 menjadi 240 ribu di tahun 2013.

Jumlah guru yang meningkat secara signifikan dari tahun 1996 ke tahun 2013 juga menjadi salah satu tolok ukur akan kemajuan kualitas, mutu dan juga minat rakyat Tiongkok terhadap pendidikan keguruan. Total guru di Tiongkok pada tahun 2013 berjumlah 10,4 juta orang. Di antaranya, guru sekolah dasar berjumlah 5 juta orang, guru sekolah menengah pertama berjumlah 3,4 juta orang dan guru sekolah menengah atas berjumlah 1,3 juta orang.

Tabel 4.1 Statistik dari Instansi-Instansi Pendidikan Keguruan di Tiongkok

	Jumlah Instansi	Rekrutmen	Murid Baru	Murid yang lulus	Jumlah Guru
Institut atau Universitas keguruan	229	693.600	251.100	196.800	76.600
Instansi keguruan menengah	875	921.100	319.300	3.058.000	6.340
Instansi pendidikan resmi lainnya	190	212.000	82.200	66.200	18.700
Pusat pembinaan guru	2.087	371.000	121.600	168.200	46.300

4.1.1 Pendidikan *Pre-Service*

Pendidikan *pre-service* modern di Tiongkok dimulai pada tahun 1952, ketika PKC mulai mereformasi sistem pendidikan keguruan di Tiongkok untuk pertama kalinya. Selain itu pemerintah juga mengadakan pelatihan untuk guru-guru secara besar-besaran. Reformasi untuk sistem pendidikan keguruan tercatat dilakukan pemerintah Tiongkok sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1952, 1960, 1976 dan yang terakhir pada tahun 1980.

Pada tahun 1952, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan *pre-service* dalam bentuk *draft* resmi untuk yang pertama kalinya. Di dalam *draft* tersebut terdapat ringkasan dari mata pelajaran yang harus diikuti, jumlah murid, jurusan yang dibuka dan hal-hal administratif lainnya.

Pada tahun 1960–1978, revolusi budaya yang besar menghancurkan sistem pendidikan Tiongkok saat itu. UMPTC dan program kuliah dihentikan. Segenap warga diajak terjun ke kancah politik untuk merevisi ideologi mereka saat itu. Dunia pendidikan Tiongkok memasuki era paling suram semenjak era Republik.

Pada tahun 1978, barulah sistem UMPTC dipulihkan dan pendidikan modern Tiongkok yang sempat berhenti selama kurun waktu nyaris 20 tahun kembali bergulir. Lewat reformasi yang digalakkan oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mengeluarkan kebijakan pengembangan pendidikan menuju era pendidikan modern dalam upayanya mengejar ketinggalan dari negara barat. Pada tahun 2008, Chairman Hu Jintao menetapkan moto “pengembangan pendidikan berkelanjutan” yang mengajak Tiongkok untuk berkonsentrasi membenahi pendidikan dalam upaya untuk memajukan bangsa. Jumlah murid pun terus bertambah setiap tahunnya.

- Mata Kuliah

Pada tahun 1980, pemerintah mengumumkan reformasi untuk mata kuliah yang akan diangkat dalam program *pre-service education*, reformasi tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Seluruh sistem materi pelajaran *pre-service education* di Tiongkok harus mengedepankan pendidikan ideologi, menjunjung tinggi

teori Marxis dan teori Maoism serta berada di bawah garis pembangunan sosialis komunis pemerintah.

- Masa belajar *pre-service education* di seluruh institut dan perguruan tinggi Tiongkok adalah 3 sampai 4 tahun, tergantung dengan jurusan masing-masing.
- Materi pelajaran wajib dan menjadi subyek kunci dalam *pre-service education* antara lain: sastra, matematika, ilmu politik dan pendidikan budaya.
- Lembaga Pendidikan *Pre-service* di Tiongkok
Pendidikan *Pre-service* adalah pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah Tiongkok untuk proses pelatihan dan seleksi seorang guru. Lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengatur program *Pre-service education* di Tiongkok dibagi menjadi 2, yaitu: institut atau universitas keguruan, dan instansi pendidikan resmi lainnya. Instansi atau universitas keguruan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu: instansi keguruan tinggi dan instansi keguruan menengah. Instansi keguruan tinggi meliputi 4 instansi, yaitu: universitas keguruan, institut atau college keguruan, sekolah keguruan untuk kejuruan, sekolah spesialis diploma keguruan dan sekolah spesialis diploma keguruan untuk kejuruan. Sedangkan instansi keguruan menengah dibagi menjadi 2, yaitu: sekolah keguruan menengah umum dan sekolah keguruan menengah luar biasa. Instansi pendidikan resmi lainnya di Tiongkok meliputi 2 instansi, yaitu: kursus keguruan umum dan kursus keguruan untuk kejuruan.

Tabel 4.2 adalah daftar nama universitas dan nilai universitas keguruan terbaik di Tiongkok. Daftar tersebut adalah peringkat universitas berdasar penilaian dari pendidikan keguruan, bukan pada pendidikan keseluruhannya.

Tabel 4.2 Daftar Universitas Keguruan Terbaik di Tiongkok

Peringkat	Nama	Nilai
1	Beijing Normal University	A++
2	Huadong Normal University	A++
4	Huanan Normal University	A++
6	Nanjing Normal University	A++
8	Huazhong Normal University	A++
10	Dongbei Normal University	A+
11	Xibei Normal University	A+
12	Zhejiang Normal University	A+
13	Shaanxi Normal University	A+
14	Capital Normal University	A+
15	Hunan Normal University	A+
16	Liaoning Normal University	A
20	Tianjin Normal University	A

- Perkembangan dan Prospek

Berdasarkan situasi pendidikan di Cina pada saat ini dan situasi perkembangan pendidikan di dunia, para pakar di Cina menggambarkan kerangka perkembangan dan prospek pendidikan keguruan di Cina sebagai berikut :

- Kesenjangan daerah barat dan timur akan semakin berkurang
Dikarenakan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang sangat padat dan juga kesenjangan yang terjadi antara daerah barat dengan daerah timur, tingkat pendidikan keguruan di setiap daerah Cina juga sangat berbeda. Banyak kualitas pendidikan keguruan di wilayah barat yang masih di bawah rata-rata. Di masa depan, pemerintah akan lebih berkonsentrasi untuk menyeimbangkan dan mengatasi kesenjangan ini, bukan terus memajukan kualitas pendidikan keguruan di daerah timur sesuai fokus yang terdahulu.
- Metode dalam pendidikan pengajaran akan semakin terbuka dan bervariasi

Metode pengajaran yang dulu diajarkan oleh Cina adalah meniru metode pengajaran Uni Soviet. Seiring dengan runtuhnya Uni

Soviet dan menanjaknya Amerika Serikat, metode pengajaran yang diajarkan oleh Cina sedikit banyak meniru metode dari Amerika Serikat. Akan tetapi, seiring dengan semakin pesatnya kemajuan yang dicapai Cina dalam segala aspek, Cina mulai mengembangkan metode pengajaran yang cocok dengan budaya dan adat istiadat negara itu sendiri. Para pakar memperkirakan, metode yang digunakan ke depannya akan semakin terbuka dan semakin bervariasi.

- Guru-guru akan semakin profesional
Profesi guru adalah profesi khusus yang membutuhkan teori, etika moral tinggi dan keterampilan khusus untuk mengajar. Saat ini pemerintah sedang fokus dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan para guru yang ada. Kualifikasi untuk para guru pun semakin ketat setiap tahunnya. Syarat dan ketentuan yang dibutuhkan terus meningkat, sehingga guru-guru yang mengajar adalah guru yang memiliki tingkat kualitas dan potensi yang besar.
- Ideologi dan pengertian akan pendidikan terus direformasi
Sejak tahun 1960, belajar seumur hidup telah menjadi tren pendidikan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, integrasi Cina dalam teori dan praktek pendidikan guru terus dieksplorasi. Pengertian dan ideologi bahwa lulusan sarjana keguruan lebih rendah daripada sarjana biasa akan berubah. Seiring dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang melindungi dan juga memberikan keuntungan tersendiri terhadap lulusan jurusan keguruan, masyarakat pelan-pelan akan mulai menghargai strata dari pendidikan keguruan.
- Mata kuliah dan kurikulum semakin terorganisir
Dilihat dari kurikulum pendidikan, pendidikan keguruan Cina memiliki subyek utama dengan proporsi 15%, sementara subyek pilihan melampaui lebih dari 60-70%. Selain itu, fokus pelajaran sebelumnya hanya terfokus pada pendidikan ideologi dan pendidikan budaya, sedikit sekali pelajaran sains yang diperhatikan selain matematika. Kesempatan magang yang diperoleh pun dirasa sangat kurang. Hal ini pula

yang menyebabkan mengapa pendidikan keguruan menjadi kehilangan pasarnya dalam beberapa tahun belakangan ini.

Pemerintah merasa perlu untuk mereformasi kurikulum pelajaran yang ada. Dengan mengikuti perkembangan zaman, pemerintah merasa harus memasukkan pelajaran sains dan teknologi agar para guru mendapatkan kualifikasi yang cukup untuk menjadi seorang guru. Selain itu, proporsi subyek utama pun akan semakin besar, sehingga kurikulum semakin terorganisir. Nantinya mata kuliah dan kurikulum akan semakin terpusat dan menonjolkan kelebihan dan karakteristik pendidikan keguruan itu sendiri.

4.1.2 Pendidikan *In-Service*

Pendidikan *in-service* adalah pendidikan yang wajib dilakukan oleh setiap guru untuk mempertahankan jenjang karirnya. Lewat pendidikan *in-service* pulalah, guru baru bisa mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Oleh karena itu, peran yang dimainkan instansi yang mengurus *in-service education* sangatlah besar.

Sebagai catatan, pendidikan *in-service* adalah program yang wajib diambil oleh para guru. Akan tetapi, terlepas guru terkait mengikuti program pendidikan *in-service* atau tidak, mereka tetap harus mengikuti evaluasi akhir tahun untuk mempertahankan statusnya sebagai guru.

4.1.3 Fungsi Pendidikan *In-Service*

Fungsi dari pendidikan *in-service* di Cina adalah:

1. Sebagai bentuk dari evaluasi guru setiap tahun dan untuk mempertahankan kualifikasi seorang guru,
2. Sebagai salah satu sarana dari guru untuk mendapatkan promosi pangkat,
3. Sebagai salah satu sarana dari guru untuk mendapatkan promosi gaji, dan
4. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan keguruan di Cina.
 - Institusi Penyelenggara

Lembaga yang menangani pendidikan *in-service* di Cina dibagi menjadi 2, yaitu instansi pembinaan guru tinggi dan instansi lainnya. Instansi pembinaan guru tinggi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu instansi pembinaan guru tinggi tingkat propinsi, tingkat kabupaten dan tingkat daerah. Instansi lainnya dibagi menjadi 2, yaitu pusat pembinaan guru swasta, dan *self-examination center*. Seluruh lembaga tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan telah mendapatkan izin resmi dalam membuka kelas kurikulum dengan tujuan pembinaan guru. Sehingga dari segi kualitas, instansi tersebut memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Kualifikasi, kurikulum dan mata pelajaran yang diatur dalam sistem pembinaan guru diatur oleh sekolah dengan pengawasan dari Dewan Negara di Cina. Beberapa lembaga bahkan memiliki program kerjasama internasional dengan cara mengirim gurunya keluar negeri untuk mengambil kredit dalam salah satu kurikulum pembinaan tersebut.

- Waktu dan mata kuliah

Meskipun dalam program pendidikan *in-service*, para guru masih harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Oleh karena itu, waktu yang dipilih untuk pembinaan adalah hari Sabtu dan Minggu. Kredit yang dapat diambil juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing. Pada akhir tahun belakangan ini, pemerintah lebih banyak memberikan otonomi kepada instansi pembinaan guru dalam hal administratif pembinaan guru. Sehingga instansi terkait juga lebih bebas dalam mengatur waktu dan mata kuliah yang ingin diambil oleh para guru.

Secara keseluruhan, mata kuliah yang harus diambil kurang lebih sama dengan mata kuliah di *pre-service education*, di mana pembinaan, pelajaran ideologi dan moral menjadi subyek yang paling penting. Kemudian disusul dengan ilmu politik, bahasa dan sastra, psikologi dan pelajaran umum lainnya. Secara keseluruhan, selain penekanan pelajaran ideologi yang menekankan teori Marxisme dan teori Maoism, kurikulum

pelajaran pembinaan guru di Cina tidak jauh berbeda dengan standar internasional lainnya.

- Biaya pembinaan

Terkait pembiayaan pembinaan para guru dalam pendidikan *in-service* di Cina, pemerintah membagi program sebagai berikut:

- Program Gratis

Program gratis ini wajib diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar resmi di lembaga pendidikan pemerintah. Setiap tahun pemerintah menetapkan kredit minimal yang harus diikuti oleh para guru menurut subyek pengajarannya masing-masing. Anggaran biaya program gratis ini didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- Program Ekstra

Program ekstra adalah program yang tidak wajib diikuti oleh para guru. Biaya yang dikenakan dalam program ekstra ini juga harus ditanggung oleh para guru secara individu. Dalam beberapa kasus, biaya program ekstra ini terkadang ditanggung oleh instansi tempat guru mengajar atau perusahaan terkait. Dengan mengikuti program ekstra, para guru akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam proses kenaikan strata, pangkat atau kenaikan gaji. Dalam beberapa tahun belakangan, program ekstra banyak disesuaikan dengan program keguruan internasional. Sehingga beberapa program ekstra di Cina dikaitkan dan memiliki kerja sama dengan instansi pendidikan luar negeri. Hal ini memungkinkan para guru untuk dikirim ke luar negeri dalam proses pembinaan lebih lanjut.

4.1.4 Rekrutmen Guru

Rekrutmen guru di Cina resmi dilakukan oleh pemerintah, meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah banyak memberikan otonomi kepada setiap sekolah. Akan tetapi, beberapa hal utama seperti masalah kualifikasi dan masalah gaji masih ditangani secara langsung

oleh pemerintah pusat. Berikut ini adalah beberapa info utama mengenai rekrutmen guru di Cina:

- Kualifikasi Guru

Bagi rakyat Cina yang memiliki keinginan dan niat luhur untuk menjadi seorang guru, bisa mengajukan pendaftaran dengan syarat memenuhi batas umur yang ditentukan dan juga kualifikasi lainnya seperti yang tertulis di “*Teacher’s Law*”. Seperti diatur dalam *Teacher’s Law*, Untuk memperoleh kualifikasi sebagai seorang guru, para calon harus memiliki catatan resmi terkait mengenai:

- Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru TK, calon guru minimal harus merupakan lulusan dari sekolah keguruan TK atau tingkat di atasnya.
- Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru SD, calon guru minimal harus merupakan lulusan dari sekolah keguruan tingkat dasar atau tingkat di atasnya.
- Untuk memperoleh kualifikasi untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama, atau guru untuk kursus pengetahuan umum dan program khusus di sekolah kejuruan dasar, calon guru minimal harus merupakan lulusan dari sekolah keguruan tingkat atas dari pendidikan keguruan dalam sistem perguruan tinggi atau universitas.
- Untuk memperoleh kualifikasi untuk menjadi seorang guru di sebuah sekolah menengah atas, atau guru untuk kursus pengetahuan umum dan program khusus di sekolah kejuruan menengah, calon guru minimal harus merupakan lulusan dari sebuah perguruan tinggi resmi atau dari pendidikan keguruan selama 4 tahun dalam sistem perguruan tinggi atau universitas. Adapun kualifikasi dan penetapan standar untuk menjadi guru di sekolah menengah kejuruan tingkat menengah dan atas atau sekolah teknik akan diatur oleh departemen administratif terkait di bagian pendidikan.
- Untuk memperoleh kualifikasi untuk guru di sebuah lembaga pendidikan tinggi, calon guru minimal harus menyelesaikan program sarjana atau program pasca sarjana sesuai dengan peraturan terkait.

- Untuk memperoleh kualifikasi bagi seorang guru untuk pendidikan orang dewasa, calon guru minimal harus merupakan lulusan dari lembaga pendidikan tinggi, tergantung pada tingkat dan standar dari kategori pendidikan orang dewasa terkait.

Setiap warga yang tidak memiliki catatan resmi untuk kualifikasi guru sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, harus mengikuti ujian kualifikasi guru untuk memperoleh kualifikasi resmi. Sistem ujian kualifikasi guru nasional akan ditentukan oleh Dewan Negara.

Tabel 4.3 Kualifikasi Guru pada Tiap Jenjang Pendidikan di Cina

Strata Pendidikan	Kualifikasi
Pendidikan TK	lulusan dari sekolah keguruan TK atau tingkat di atasnya
Pendidikan SD	lulusan dari sekolah keguruan tingkat dasar atau tingkat di atasnya
Pendidikan SMP	lulusan dari sekolah keguruan tingkat atas atau dari pendidikan keguruan dalam sistem perguruan tinggi atau universitas
Pendidikan SMA, SMK	lulusan dari sebuah perguruan tinggi resmi atau dari pendidikan keguruan selama 4 tahun dalam sistem perguruan tinggi atau universitas; Adapun kualifikasi dan penetapan standar untuk menjadi guru di sekolah menengah kejuruan tingkat menengah dan atas atau sekolah teknik akan diatur oleh departemen administratif terkait di bagian pendidikan.
Pendidikan Tinggi	menyelesaikan program sarjana atau program pasca sarjana mereka sesuai dengan peraturan terkait
Pendidikan orang dewasa	lulusan dari lembaga pendidikan tinggi, tergantung pada tingkat dan standar dari kategori pendidikan orang dewasa terkait

Sementara untuk proses registrasi, para pelamar harus mempersiapkan dan menyediakan beberapa formulir terkait di bawah ini:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli beserta fotokopinya;
- Ijasah dan gelar jurusan keguruan beserta fotokopinya;
- Mengisi formulir “Identifikasi moral dan ideologi individual”;

- formulir tersebut bisa diminta dari pemerintah tingkat kecamatan;
- Mengisi formulir “Kualifikasi resmi guru Cina”;
 - Sertifikat pemeriksaan fisik asli dan fotokopi, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh lembaga perekrutan guru pada tingkat daerah; dan
 - Sertifikat kemampuan bahasa Mandarin asli dan fotokopinya.

Proses rekrutmen dan kualifikasi seorang guru dilakukan setahun 2 kali, yaitu pada waktu musim semi dan musim gugur.

- Badan Perekrut guru

Badan yang bertanggung-jawab atas perekrutan guru diatur dalam Teacher’s Law mengenai masalah kualifikasi dan ketenagakerjaan sebagai berikut:

Negara akan menetapkan sistem kualifikasi bagi para guru. Semua warga negara Cina yang mematuhi konstitusi dan hukum, dan memiliki minat dalam bidang pendidikan, serta memiliki karakter, ideologis dan moral yang sehat, memiliki catatan kualifikasi dari sekolah resmi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini atau yang telah lulus dalam ujian kualifikasi guru nasional, memiliki pendidikan dan kemampuan mengajar yang baik, dan setelah lolos kualifikasi lainnya, berhak untuk memperoleh kualifikasi untuk menjadi seorang guru.

Setiap Warga yang tidak memiliki catatan resmi untuk kualifikasi guru sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, harus mengikuti ujian kualifikasi guru untuk memperoleh kualifikasi resmi sebagai seorang guru. Sistem ujian kualifikasi guru nasional akan ditentukan oleh Dewan Negara.

Departemen administrasi pendidikan di bawah Dewan Negara akan bekerja melakukan langkah-langkah transisi kualifikasi bagi para guru yang sebelum berlakunya Undang-undang ini, telah mengajar di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, tetapi tidak memiliki catatan dari sekolah formal sebagai diatur dalam Undang-undang ini.

Kualifikasi bagi guru di sekolah dasar dan menengah harus dievaluasi dan disetujui oleh departemen administrasi dari pemerintah daerah setempat atau di atas tingkat kabupaten. Kualifikasi bagi para

guru di sekolah menengah kejuruan dan sekolah teknik harus dievaluasi dan disetujui oleh departemen berkompeten yang terkait, di bawah naungan departemen administrasi pendidikan dari pemerintah daerah setempat pada atau di atas tingkat kabupaten. Kualifikasi untuk guru reguler lembaga pendidikan tinggi harus dievaluasi dan disetujui oleh departemen administrasi pendidikan di bawah Dewan Negara, atau provinsi, daerah otonom, atau kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat, atau dengan sekolah yang telah disahkan oleh departemen tersebut.

Jika seorang warga negara yang memiliki catatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau yang telah lulus kualifikasi ujian nasional keguruan, meminta departemen terkait untuk mengevaluasi dan menyetujui kualifikasi bagi para guru tersebut, departemen terkait harus memberikan evaluasi dan persetujuan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini. Para guru baru harus menjalani periode percobaan terlebih dahulu, sebelum memiliki kualifikasi resmi menjadi seorang guru.

Mereka yang telah kehilangan hak-hak politik atau sedang menjalani pidana penjara atau hukuman yang lebih berat atas kejahatan yang disengaja tidak akan diperbolehkan untuk mendapat kualifikasi guru; dan mereka yang telah memperoleh kualifikasi guru akan kehilangan kualifikasi tersebut.

Para lulusan sekolah keguruan di berbagai tingkatan harus terlibat dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan yang relevan dari negara. Negara harus melembagakan sistem gelar profesional bagi guru. Langkah-langkah khusus akan dikelola dan diimplementasikan oleh Dewan Negara.

Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya secara bertahap akan menetapkan sistem pengangkatan bagi guru. Pengangkatan guru harus berdasarkan pada prinsip kesetaraan antara kedua belah pihak. Sekolah dan guru akan menandatangani kontrak perjanjian yang akan mendefinisikan hak kewajiban dan tanggung-jawab masing-masing. Langkah-langkah untuk menerapkan sistem pendaftaran bagi para guru harus dirumuskan oleh departemen administrasi pendidikan di bawah

Dewan Negara.

- Gaji dan Tunjangan guru

Gaji guru juga diatur oleh pemerintah dengan mengikuti landasan dari Teacher's Law, seperti di bawah ini:

Rata-rata gaji guru tidak akan lebih rendah atau mungkin lebih tinggi dari pegawai negeri dan harus dinaikkan secara bertahap. Sebuah sistem untuk promosi dan sistem kenaikan gaji yang teratur harus ditetapkan, dan langkah-langkah khusus itu harus dirumuskan oleh Dewan Negara.

Guru sekolah dasar, menengah dan sekolah kejuruan harus menikmati tunjangan yang sepadan dengan kontribusi waktu pengajaran mereka dan langkah-langkah khusus harus dirumuskan oleh departemen administrasi pendidikan dan departemen terkait lainnya di bawah Dewan Negara.

Pemerintah daerah setempat di berbagai tingkatan harus memberikan subsidi untuk guru dan para lulusan dari sekolah menengah kejuruan atau dari sekolah teknik tinggi yang bersedia untuk melibatkan diri dalam pendidikan dan pengajaran di daerah yang dihuni oleh etnis minoritas nasional atau di daerah terpencil dan miskin.

Pemerintah daerah setempat di berbagai tingkat dan departemen terkait di bawah Dewan Negara harus memberikan prioritas dan perlakuan istimewa untuk prosedur konstruksi, penyewaan dan penjualan rumah untuk para guru di daerah perkotaan.

Pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan harus memberikan kenyamanan bagi guru sekolah dasar dan menengah di daerah pedesaan dalam memecahkan masalah tempat tinggalnya.

Guru akan mendapat perlakuan yang sama seperti pegawai negeri dalam perawatan medis. Mereka harus diberikan cek up kesehatan rutin dan harus menikmati izin istirahat dan penyembuhan yang diatur dalam prosedur yang seharusnya. Lembaga medis akan memberikan kemudahan dalam perawatan medis bagi para guru. Setelah pensiun atau berhenti bekerja, guru akan menikmati keuntungan materi seperti yang telah ditentukan oleh negara.

Pemerintah setempat atau di atas tingkat kabupaten dapat meningkatkan rasio pensiun untuk pensiunan guru sekolah dasar dan menengah yang telah lama bergerak dan berkontribusi di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pemerintah di berbagai tingkatan harus mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan keuntungan material dari guru yang digaji menggunakan dana setempat dan secara bertahap memastikan bahwa guru tersebut menerima gaji yang sama seperti guru yang digaji dan disubsidi oleh negara. Untuk langkah dan prosedur secara spesifik harus dirumuskan oleh pemerintah di berbagai tingkatan tergantung kepada kondisi setempat. Sedangkan, keuntungan material guru dari sekolah swasta akan diatur menurut ketentuan sekolah itu sendiri.

Guru yang telah memberi kontribusi dan hasil yang signifikan dalam pendidikan dan pengajaran, baik dalam pelatihan personil, dalam penelitian ilmiah, pendidikan reformasi, pembangunan sekolah, pelayanan sosial dan pekerjaan terkait program studi wajib diberikan penghargaan oleh sekolah yang mempekerjakan. Guru yang telah membuat kontribusi yang signifikan harus diberikan penghargaan tertentu oleh pemerintah setempat di berbagai tingkatan dan departemen terkait yang diatur oleh dewan negara. Guru yang telah membuat kontribusi yang besar harus diberikan gelar kehormatan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari negara.

Negara harus mendorong dan mendukung baik individu maupun organisasi-organisasi sosial untuk mendonasikan uang kepada yayasan yang didirikan menurut “the Private and Non Governmental Education Act of the People’s Republic of Cina and the Regulations on Implementation of the Act”. Dana dari yayasan ini akan disumbangkan kepada para guru sebagai bentuk penghargaan.

Dikarenakan kondisi kemajuan pendidikan di Cina yang beraneka ragam dan juga tingkat kesenjangan yang tinggi, oleh karena itu gaji guru pun sangat bervariasi untuk setiap daerah. Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah terus meningkatkan gaji dan tarif hidup guru seiring dengan kemajuan perkembangan ekonomi di negaranya. Khususnya, untuk guru yang rela untuk mengajar di daerah barat,

tunjangan yang diberikan juga semakin besar setiap tahunnya.

- Pangkat dan Karir guru

Berikut di bawah adalah jenjang karir dan pangkat guru untuk setiap levelnya masing-masing.

Pangkat guru untuk pendidikan TK (dari pangkat terendah menuju pangkat tertinggi):

- Guru pendidikan dasar grade 3
- Guru pendidikan dasar grade 2
- Guru pendidikan dasar grade 1 (sekretaris)
- Guru pendidikan dasar tingkat tinggi
- Guru pendidikan menengah tingkat dasar
- Guru pendidikan dasar spesial

Pangkat guru untuk pendidikan SD (dari pangkat terendah menuju pangkat tertinggi):

- Guru pendidikan SD biasa
- Guru pendidikan SD grade 2
- Guru pendidikan SD grade 1
- Guru pendidikan SD tingkat tinggi
- Guru pendidikan menengah tingkat menengah
- Guru pendidikan SD spesial

Pangkat guru untuk pendidikan menengah kejuruan (dari pangkat terendah menuju pangkat tertinggi):

- Guru pendidikan SMK biasa
- Asisten guru pendidikan SMK
- Guru pendidikan SMK tingkat tinggi
- Guru pendidikan SMK spesial

Pangkat guru untuk pendidikan SMP (dari pangkat terendah menuju pangkat tertinggi):

- Guru pendidikan menengah biasa
- Guru pendidikan menengah grade 2
- Guru pendidikan menengah grade 1
- Guru pendidikan menengah tingkat tinggi
- Guru pendidikan menengah tingkat sekretaris

- Guru pendidikan menengah spesial

Pangkat guru untuk pendidikan tinggi/universitas (dari pangkat terendah menuju pangkat tertinggi):

- Asisten dosen
- Lecturer
- Associate Professor
- Professor

Untuk dapat naik pangkat, setiap guru harus memenuhi kredit tertentu terlebih dahulu, kredit tersebut dapat diperoleh melalui banyak jalur. Di antaranya adalah melalui: pengalaman selama mengajar, nilai tinggi dalam evaluasi sekolah, lolos dalam ujian kenaikan pangkat dan juga keikutsertaan akan pembinaan guru. Biasanya untuk dapat naik satu pangkat, seorang guru memerlukan paling sedikit 2 tahun, dan bisa mencapai 5 tahun untuk tingkat tertentu.

Sekolah atau lembaga pendidikan lainnya harus melakukan penilaian terhadap kesadaran politik para guru dan tingkat ideologi, tingkat profesionalitas, etos kerja dan performa mereka. Departemen administrasi pendidikan akan membimbing dan mengawasi penilaian untuk para guru.

Penilaian dilakukan dengan cara objektif, adil dan akurat. Dalam proses penilaian, pendapat dari guru, rekan-rekan dan siswa harus dipertimbangkan. Hasil penilaian akan menjadi patokan dalam pengangkatan guru dan pembayaran gaji serta penjatuhan hukuman yang terkait.

Dalam jenjang karir guru di Cina, kepala sekolah bukanlah pangkat teratas. Bagi seorang guru pada pendidikan tertentu, misalnya professor dalam pendidikan universitas, mereka tidak bisa mengalami kenaikan pangkat lagi dalam stratanya. Jika yang bersangkutan berkenan ingin menjadi kepala sekolah, keputusan pusat akan diambil oleh pemerintah daerah yang diberi tugas oleh pemerintah dalam menangani instansi pendidikan terkait.

4.1.5 Pengembangan Profesi Guru

Guru adalah kekuatan utama perubahan pendidikan yang signifikan dan berperan aktif dalam reformasi kurikulum. Dalam memfasilitasi dan melaksanakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik dan proses belajar-mengajar, peran guru tidak berkurang, tetapi diintensifkan dalam bentuk yang berbeda.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan kurikulum di Cina adalah “untuk mengubah implementasi kurikulum dari penekanan berlebihan pada pembelajaran reseptif, dari menghafal dan pengulangan, ke bentuk yang berpartisipasi aktif, praktikum mandiri, dan mengembangkan peserta didik dalam hal mengumpulkan dan mengolah informasi, memperoleh pengetahuan baru, memecahkan masalah dan melakukan komunikasi”.

Sementara itu perubahan dalam “proses belajar mengajar” menjadi fokus dari kurikulum, di mana guru diberi tugas untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan mandiri, untuk berinteraksi secara aktif dengan murid dan berkembang bersama mereka, untuk menghormati kepribadian murid dan perbedaan individu dalam kebutuhan belajar yang beragam, untuk menciptakan lingkungan pendidikan dengan partisipasi aktif peserta didik dan kapasitas dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajari, dan akhirnya untuk memfasilitasi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi sebagai manusia seutuhnya.

Dalam mencapai tujuan kurikulum tersebut, guru diharapkan menjadi peserta aktif selama proses perubahan kurikulum, menjadi penyambung lidah dari filosofi dan prinsip-prinsip kurikulum tersebut, untuk menjadi pelaksana yang efektif dalam perubahan kurikulum yang direncanakan, dan menjadi evaluator prestasi peserta didik.

Guru juga berkewajiban untuk menggunakan teknologi informasi sebagai alat pembelajaran dan mengintegrasikan teknologi dengan pedagogi dalam proses belajar mengajar untuk perubahan dalam isi pengajaran, gaya belajar dan interaksi guru-murid.

Pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dengan demikian telah menjadi prasyarat dan kata kunci dalam proses pelaksanaan kurikulum. Praktek-praktek inovatif yang sukses dalam membangun

kapasitas guru untuk pelaksanaan kurikulum meliputi:

- Pelatihan guru di tingkat lokal dan nasional
Kementerian Pendidikan membuat kebijakan yaitu seorang guru harus melalui pelatihan sebelum menduduki jabatannya atau pekerjaan. Tanpa melalui pelatihan yang dibutuhkan, guru tidak diperkenankan menduduki jabatannya atau pekerjaan tersebut.
- Mengembangkan sistem kelembagaan Sekolah Berbasis Proyek Pengajaran-Penelitian (*School-based research-teaching*)

Sistem kelembagaan ini telah memainkan peran besar dalam membimbing guru untuk merefleksikan diri pada praktek pengajaran mereka, untuk memecahkan masalah melalui penelitian, dan untuk pengembangan guru melalui pembelajaran profesional.

Penelitian tindakan berbasis sekolah guru bertujuan untuk membuat lembaga pusat praktek guru profesional dan perubahan kurikulum. Melalui upaya individu maupun kolektif, penelitian berbasis sekolah telah menyebabkan perubahan besar dan perbaikan dalam pelaksanaan kurikulum, pengembangan profesi guru, dan rekonstruksi budaya sekolah seperti:

- mengubah kehidupan profesional guru;
 - meningkatkan hubungan guru-mitra;
 - mengubah budaya sekolah dan etos kerja dari berpusat ke guru menjadi berpusat ke siswa, dan
 - mengubah struktur organisasi sekolah untuk membuat sekolah sebagai sebuah organisasi yang benar-benar belajar dan menjadi komunitas belajar
- Pengorganisasian Jaringan Penelitian Guru berbasis Internet dan Pelatihan Jarak jauh
Dalam memanfaatkan potensi besar teknologi informasi-komunikasi sebagai alat belajar mengajar, sebagai sumber daya pendidikan, dan sebagai alat perubahan pendidikan, pemerintah Cina melakukan investasi besar dalam menerapkan Sekolah Pedesaan Jarak Jauh Modern dengan total investasi sebesar satu miliar Yuan RMB (setara dengan lebih dari USD \$ 14.000.000) untuk melengkapi 6 sekolah pedesaan dengan CD pembelajaran, pengajaran sistem satelit, dan ruang komputer, sehingga dapat

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Selain menggunakan peralatan canggih untuk melakukan pendidikan dan pelatihan jarak jauh guru berbasis internet Kementerian Pendidikan juga melalui pusat Kurikulum Pendidikan Dasar mengembangkan buku teks berbasis web gratis dalam membimbing guru dalam pengembangan profesional guru.

Lokakarya Pelatihan Jarak Jauh memfasilitasi pendistribusian bahan ajar sesuai dengan kurikulum, melalui *on-line* modul presentasi dan interaksi *off-line* untuk dialog dan diskusi serta tukar menukar rencana pelajaran secara elektronik.

Internet memudahkan pelatihan guru secara online dan memberikan kesempatan pada guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Hasil dari survei kuesioner untuk evaluasi pelatihan online tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari 90%. Selama jangka pelatihan pendek yaitu 15 hari lebih dari 10.000 peserta mempublikasikan 870,000 makalah, tingkat kunjungan halaman situs web pelatihan dalam sehari melampaui 1 juta pengunjung.

5

Sistem Pendanaan Pendidikan

Sistem pendidikan modern di Tiongkok dimulai ketika bangsa asing mulai masuk dan menjajah berbagai wilayah di negara tirai bambu tersebut. Pendidikan di Tiongkok mengalami perubahan yang cukup ekstrim sejak saat itu. Walaupun elemen-elemen budaya barat dan filosofi pendidikannya banyak dimasukkan ke struktural sistem pendidikan Tiongkok, secara keseluruhan mental pendidikan dan filosofi pendidikan Tiongkok yang kuno masih tetap diadopsi oleh pemerintah sampai sekarang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha dalam menjaga budaya dan kekayaan peradaban negeri yang sudah berusia sekitar ribuan tahun tersebut.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Diperkirakan lebih dari 160.000 pelajar dari Asia Tenggara yang menempuh studi di negeri tirai bambu tersebut dan sekitar 6.000 mahasiswa asal Indonesia belajar di sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok. Selain kemajuan yang diraih Tiongkok, alasan mahasiswa asing belajar disana adalah biaya kuliah yang lebih murah dibandingkan biaya kuliah di Inggris, Amerika, Australia maupun Singapura. Jurusan yang banyak diambil mahasiswa asing adalah bahasa Mandarin, ekonomi, manajemen dan ilmu kedokteran Tiongkok. Munculnya tren “studi ke Tiongkok” tidak lepas dari usaha dan berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan baik berupa moril maupun aliran dana yang terus-menerus untuk memperbaiki kualitas

pendidikan di Tiongkok dan memberikan imej pendidikan yang baik dalam skala internasional.

Tiongkok adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara beranut sosialis komunis, umumnya sistem dan metode pendanaan pendidikan dikendalikan dan diatur oleh pemerintah pusat dalam suatu konsep pasar ekonomi berencana. Pengeluaran pendidikan sebagian besar berasal dari cadangan devisa negara.

Dengan populasi murid terbesar di dunia dan keanekaragaman juga rumitnya kondisi setiap propinsi yang berbeda-beda, metode pendanaan pendidikan di Tiongkok mengalami banyak dinamika dan revolusi dalam tahap-tahap tertentu. Pemerintah terus mencari metode pendanaan terbaik yang cocok dengan kondisi negara tersebut. Metode tersebut selain harus dicocokkan dengan kondisi dan situasi pendidikan negara, juga tidak boleh bertentangan dengan ideologi sosialis yang dianut partai komunis di negara tersebut.

Maka dari itu, melihat dari keanekaragaman budaya, adat istiadat dan kemajuan masing-masing propinsi, terkadang kita harus memandang Negara Tiongkok sebagai satu benua dan bukan satu negara. Oleh karena itu, masalah yang dialami oleh metode pendanaan pendidikan di Tiongkok pun berbeda dengan negara-negara lain pada umumnya. Revolusi metode pendanaan pendidikan di Tiongkok bisa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: Tahap Sentralisasi Terpusat, Tahap Desentralisasi dan Tahap Sentralisasi Berencana.

5.1 Metode Pendanaan Sentralisasi Terpusat

Metode Pendanaan Sentralisasi Terpusat diterapkan dari tahun 1949 sampai tahun 1980. Ketika Tiongkok resmi berdiri pada bulan Oktober 1949, pemerintah menggerakkan sistem sentralisasi terpusat dengan metode pasar ekonomi berencana dalam pembenahan dan pembangunan ekonomi dalam negeri. Metode pendanaan yang digunakan adalah metode pendanaan terpusat. Sampai pada awal tahun 1980, sistem pendanaan terpusat ini tetap dianut oleh Tiongkok

dalam mengalirkan dananya dari pemerintah pusat sampai ke sekolah, universitas dan institusi pendidikan lainnya.

Pendidikan modern di Tiongkok pada umumnya tidak berbeda jauh dengan pendidikan modern di Indonesia. Pendidikan yang ditempuh biasa dimulai dari taman kanak-kanak (dengan durasi 2 tahun), pendidikan dasar (dengan durasi 6 tahun), pendidikan menengah (dibagi SMP & SMA, dengan masing-masing dengan durasi 3 tahun) dan dilanjutkan pada pendidikan tinggi (pendidikan universitas yang meliputi pendidikan S1, S2, S3 dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan grade yang ditempuh dan jurusan yang dipilih).

Prosedur pendistribusian dana dalam metode ini adalah dengan cara mengalirkan dana dari pusat, ke propinsi, kabupaten, kelurahan sampai ke universitas. Besarnya dana yang dialirkan mengikuti referensi yang didapat dari perencanaan perkembangan universitas berdasarkan sistem ekonomi berencana.

Pada tahap sentralisasi pusat, sampai pada awal 1980, sistem ini dinilai berhasil dan cocok dengan keadaan politik dan ekonomi Tiongkok. Namun pada awal tahun 1980-an, sistem ini dinilai sudah tidak cocok dengan perkembangan di Tiongkok dan perlahan-lahan mulai menekan perkembangan pendidikan Tiongkok. Sistem ekonomi berencana dinilai telah membunuh ide dan inovasi yang dibutuhkan Tiongkok dalam persaingan pendidikan pasar global.

Selain itu, walaupun ekonomi di Tiongkok mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi tunjangan dan aliran dana pemerintah di bidang pendidikan tergolong masih sangat sedikit. Tercatat pada tahun 1980, pemerintah hanya mengalirkan dana ke bagian pendidikan sebesar 9,3% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Banyak instansi pendidikan yang harus bergantung pada pemungutan pajak atau subsidi lainnya untuk terus dapat bertahan di Tiongkok.

5.2 Metode Pendanaan Desentralisasi

Metode Pendanaan Desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1980 sampai tahun 1990an. Pada awal tahun 1980, seiring dengan reformasi

“Open Door Policy” yang digalakkan oleh Deng Xiaoping, sistem ekonomi Tiongkok mulai berubah dari sistem ekonomi terencana menjadi sistem ekonomi pasar ala sosialis. Sistem pendanaan pendidikan yang dianut pun berubah seiring dengan reformasi tersebut. Tiongkok memasuki era baru dalam metode pendanaan dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan. Metode pendanaan pendidikan di Tiongkok beralih dari metode sentralisasi terpusat menjadi metode desentralisasi.

Di dalam metode pendanaan desentralisasi ini, pemerintah Tiongkok memberikan otonomi dan kebebasan yang lebih kepada pemerintah propinsi, daerah, kabupaten dan komunitas lokal lainnya dalam mengatur dan mengelola instansi pendidikan di daerahnya masing-masing. Melihat dari luas wilayah yang berbeda dan keanekaragaman pada masing-masing wilayah di Tiongkok, tidak salah jika para pakar berpendapat bahwa Tiongkok adalah “eksperimen metode pendanaan desentralisasi terkompleks dan terbesar di dunia.”

Pada masa desentralisasi ini, ada beberapa perubahan mendasar dalam metode pendanaan di bidang pendidikan, yaitu: pemerintah mulai melepaskan sedikit beban dari pembangunan pendidikan sekolah ke masing-masing wilayah. Pemerintah mempercayai desa untuk mengeluarkan dana dalam membiayai pendidikan SD di wilayahnya masing-masing, mempercayai pemerintah kecamatan untuk mengurus pendidikan SMP di wilayahnya masing-masing dan mempercayai pemerintah kabupaten untuk mengurus pendidikan SMA di wilayahnya masing-masing.

Menurut data statistik yang dikumpulkan dari penduduk Tiongkok, sumber dari aliran dana pendidikan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: “dana dari pemerintah” dan “dana non-pemerintah”. Dana non-pemerintah dibagi menjadi: “dana dalam budget” dan “dana luar budget”. Dana dalam budget adalah aliran dana segar yang langsung dialirkan pemerintah ke setiap daerah. Sedangkan yang termasuk dalam kategori dana luar budget, adalah: “biaya pendidikan tambahan”, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembangunan *enterprise-operated school* dan juga potongan pajak yang diberikan kepada *enterprise-operated school*.

Meskipun begitu, mayoritas dana yang tergolong dalam dana luar budget didapat dari “biaya pendidikan tambahan”. Biaya pendidikan tambahan sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: Yang pertama, Biaya pendidikan tambahan untuk kota, dikenakan melalui pajak produksi, bisnis dan pajak lainnya untuk rakyat yang tinggal di daerah kota. Rating dari pajak tersebut adalah 1% pada tahun 1986, meningkat menjadi 2% di tahun 1990 dan 3% di tahun 1992. Yang kedua, Biaya pendidikan tambahan untuk desa, dikenakan melalui pajak pertanian, UKM di daerah desa dan lainnya. Yang ketiga, Biaya pendidikan tambahan untuk komunitas lokal, dikenakan mulai tahun 1995 dari pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan bertaraf hiburan semacam pariwisata, kuliner dan lainnya.

Walaupun, biaya pendidikan tambahan diambil oleh pemerintah daerah dan dikelompokkan oleh statistik resmi sebagai biaya dana luar budget pemerintah, tetapi di lain pihak, dana yang didapat dari biaya pendidikan tambahan lebih dipandang sebagai suatu pajak yang berasal dari sumber dana rakyat. Dengan alasan inilah, para pakar lebih memandang biaya pendidikan tambahan sebagai bentuk dari donasi rakyat. Terlebih lagi, pada kasus pemungutan biaya pendidikan tambahan di daerah desa adalah salah satu sumber dana terbesar terhadap berdirinya suatu sekolah di desa terkait. Pada kasus di desa-desa yang kurang maju dan terbelakang, beban biaya pendidikan tambahan ini sangat memberatkan rakyat dan memberikan penderitaan dengan standar tertentu di desa tersebut.

Tiongkok menyusun sistem data dalam pendanaan pendidikan mulai tahun 1997. Berdasarkan data yang didapat dari “*Tiongkok Educational Finance Statistical Yearbook*”, para pakar mencoba menghitung aliran dana ke pembangunan sekolah dasar dari tahun 1997 – 2005. Tabel berikut menunjukkan bahwa pada tahun 1997, setengah dari dana yang mengalir dalam pembangunan sekolah dasar berasal dari “dana dalam budget” pemerintah. Sedangkan “dana luar budget” yang termasuk dalam “biaya pendidikan tambahan” berjumlah $\frac{1}{4}$, dan sisanya berasal dari donasi sosial dan donasi lainnya. Meskipun dana yang dialirkan pemerintah terdiri dari dana dalam budget dan dana luar budget, tetapi definisi dari dana luar budget di Tiongkok berbeda dengan negara lain.

Kebanyakan dana luar budget berasal dari biaya pendidikan tambahan yang berasal dari pajak dan pungutan biaya yang dibebankan pada rakyat.

Sebagai negara yang sebesar satu benua dan memiliki budaya, adat istiadat yang beranekaragam, perkembangan ekonomi Tiongkok yang melesat pada awal 1990an menciptakan ketimpangan dan kesenjangan di beberapa propinsi dan daerah. Pada akhirnya, Tiongkok pun terpecah dan terbagi menjadi 3 daerah, yaitu: “daerah timur” sebagai perwakilan dari daerah yang maju atau daerah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah semenjak “*open-door policy*”; “daerah tengah” sebagai perwakilan dari daerah yang relatif kurang maju; dan “daerah barat” sebagai perwakilan dari daerah miskin, daerah ras minoritas dan yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Karena metode pendanaan desentralisasi, perkembangan dan aliran dana ke setiap daerah menjadi tidak seimbang. Propinsi dan daerah yang lebih miskin tidak memiliki cukup dana dan sumber daya untuk mengelola kualitas dan mutu pendidikan di daerahnya. Kesenjangan dan ketimpangan sosial pun meningkat. Akibatnya, terdapat perbedaan kualitas pendidikan antara daerah barat dan daerah timur. Para pakar menilai, kesenjangan ini tidak lepas dari metode pendanaan desentralisasi yang dinilai sudah tidak cocok untuk diterapkan di negara sebesar Tiongkok.

Tabel 5.1 Proporsi Sumber Pendanaan Pendidikan di Tiongkok

Tahun	Dana pemerintah		Dana non-pemerintah			Sumber lain
	Dana dalam budget	Dana luar budget	Sekolah swasta	Donasi sosial	Iuran sekolah	
1997	53.4%	23%	1.4%	9.4%	9.2%	3.7%
1998	55.6%	20.6%	1.6%	6.4%	9.6%	6.3%
1999	59.1%	18.5%	1.7%	4.4%	9.3%	7%
2000	62.1%	16.4%	1.9%	3.4%	9.2%	7%
2001	67.2%	13.2%	2%	2.8%	8.4%	6.5%
2002	72.3%	8.1%	2.2%	2.3%	8%	7.2%
2003	73.5%	7.1%	2.7%	1.6%	8.2%	7%

2004	74.9%	6.7%	2.5%	1.4%	8%	6.4%
2005	76%	6.2%	2.7%	1.3%	7.5%	6.3%

Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk meninggalkan metode pendanaan desentralisasi yang sudah memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan pendidikan Tiongkok di sepuluh tahun terakhir dan melakukan reformasi metode pendanaan. Pemerintah beralih ke metode pendanaan sentralisasi seperti sebelum tahun 1980. Tetapi sentralisasi yang akan diterapkan pemerintah kali ini bukanlah metode pendanaan sentralisasi terpusat seperti sebelumnya, melainkan metode pendanaan sentralisasi berencana.

5.3 Metode Pendanaan Sentralisasi Berencana

Metode Pendanaan Sentralisasi Berencana dilaksanakan dari tahun 1990an sampai Sekarang. Pada awal masa reformasi “*Open Door Policy*”, yaitu pada tahun 1980-1990, sistem ekonomi pasar ala sosialis belum sepenuhnya memperbaiki metode pendanaan pendidikan Tiongkok. Ketika Tiongkok menerapkan sistem pendanaan ala kapitalis, aliran dana untuk pendidikan banyak terkonsentrasi di daerah-daerah kota. Beberapa universitas di daerah kota mendapatkan aliran dana yang banyak, tetapi universitas dan institut di daerah pedesaan banyak yang terabaikan. Kondisi ini kemudian menyebabkan masalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan daerah yang kurang maju. Bahkan proyek 211 dan proyek 985 yang diluncurkan kemudian juga belum memberikan kontribusi yang cukup positif dalam menanggulangi kesenjangan pendidikan tersebut.

Pemerintah pusat menetapkan goal pada awal 1990an, bahwa program wajib belajar 9 tahun harus berjalan secara komprehensif di seluruh sekolah di Tiongkok pada tahun 2000. Para pakar kemudian menyadari bahwa perkembangan pendidikan di Tiongkok berjalan tidak seimbang, dan oleh karena itu kebijakan untuk setiap daerah atau propinsi harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi masing-masing.

Pada tahun 1993, *survey* membuktikan hanya daerah timur dengan populasi sekitar 31% dari rakyat Tiongkok yang mendapatkan pendidikan layak. Di antaranya, kota Beijing, Tianjin dan Shanghai telah berhasil menjalankan program wajib belajar 9 tahun di tahun 1994. Sedangkan propinsi di daerah timur lainnya diharapkan dapat merealisasikan tujuan tersebut pada tahun 1997. Daerah tengah Tiongkok yang dihuni sekitar 53% dari populasi rakyat Tiongkok telah berhasil menjalankan wajib belajar untuk pendidikan SD dan diharapkan dapat merealisasikan wajib belajar untuk pendidikan SMP pada tahun 2000. Daerah barat yang dihuni oleh ras minoritas dan termasuk daerah yang sangat miskin diharapkan bisa merealisasikan program wajib belajar 9 tahunnya setelah tahun 2000. Bahkan, daerah yang sangat miskin dan terbelakang, mungkin saja baru bisa menyelesaikan program wajib belajar 3 tahun di atas tahun 2005.

Yang menjadi masalah terbesar dalam pengalokasian dana adalah daerah tengah dan daerah timur tidak mendapatkan bantuan dana yang cukup dari pemerintah. Sementara pajak yang dipungut dalam ketentuan “dana luar budget” dinilai sangat memberatkan rakyat dan tidak memberikan hasil yang cukup signifikan. Sementara di lain pihak, pemerintah memiliki agenda untuk merealisasikan program wajib belajar 9 tahun di seluruh sekolah Tiongkok pada tahun 2000.

Pada tahun 1993, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan “Reformasi pendidikan di Tiongkok menyambut abad ke-21”. Di pernyataan tersebut, pemerintah mengubah arah haluan dan konsentrasi sistem pendanaan untuk pendidikan di Tiongkok, dari yang tadinya berkonsentrasi dalam perbaikan kualitas pendidikan menjadi berkonsentrasi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Tiongkok.

Pada tahun 1995, pemerintah meluncurkan proyek “Wajib Belajar di daerah yang miskin” dengan mengalirkan “dana dalam budget” yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Proyek dengan jangka waktu 5 tahun ini terfokus di “daerah tengah” pada tahun 1995 – 1997, dan kemudian mulai dialokasikan pada “daerah barat” pada tahun 1998 – 2000. Proyek tersebut tercatat sebagai proyek dengan dana investasi

terbesar dalam sejarah Tiongkok. Menurut data yang dilansir, total dana yang dikucurkan dalam proyek tersebut berjumlah 12,5 miliar yuan, di antaranya 3,9 miliar yuan dialirkan oleh pemerintah pusat, 5,9 miliar yuan dialirkan oleh pemerintah propinsi, pemerintah setingkat propinsi, dan pemerintah daerah lainnya.

Tiongkok kemudian mengumumkan bahwa pada tahun 2000, target mereka dalam merealisasikan program wajib belajar 9 tahun sudah tercapai secara garis besar. Tetapi, beberapa daerah yang tergolong sangat miskin masih membutuhkan konsolidasi lebih lanjut untuk implementasi selanjutnya. Target berikutnya yang ditetapkan pemerintah adalah bahwa pada tahun 2011, persentase pelajar yang mengikuti pendidikan SMP akan ditingkatkan sebanyak 90%, dan persentase pelajar yang mengikuti pendidikan SMA akan ditingkatkan di atas 60% dalam 5 tahun ke depan. Sementara untuk “daerah timur” yang dihuni oleh 15% populasi rakyat di Tiongkok, agenda kerja pemerintah masih terpusat untuk meningkatkan porsi pelajar untuk pendidikan SD dan pendidikan SMP.

Dengan alasan itulah, Departemen Pendidikan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan proyek “wajib belajar di daerah yang miskin” periode ke-2 pada bulan Desember tahun 2000. Semua sekolah yang berasal dari 522 daerah kecamatan di daerah miskin menjadi sasaran dari proyek tersebut dimana 90% sekolah tersebut berasal dari “daerah barat”. Pemerintah pusat tercatat mengalirkan 5 miliar yuan dalam proyek periode ke-2 tersebut.

Selain itu, pemerintah membentuk beberapa komisi baru untuk mengatasi masalah ini, seperti: Education Fund, beasiswa untuk pelajar yang kurang mampu, pengiriman guru dan lain-lain. Sehingga metode pendanaan yang mengalir tidak hanya bergantung kepada pusat dan setiap universitas memiliki kebebasan untuk mencari dana tambahan melalui program-programnya masing-masing. Bahkan, pemerintah mengucurkan dana tambahan yang tidak sedikit kepada universitas, jika program tersebut dinilai cukup baik dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pada tahun tersebut. Usaha pemerintah ini sangat signifikan dalam menanggulangi kesenjangan yang terjadi di sektor pendidikan.

Secara keseluruhan perubahan metode pendanaan bisa disimpulkan menjadi reformasi dari metode pendanaan desentralisasi menuju metode pendanaan sentralisasi berencana.

Pertanyaannya adalah berapa total dana yang dialirkan pemerintah dalam membiayai program wajib belajar tersebut. Tidak ada jawaban dan pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal ini dan besar dana yang dialirkannya pun berbeda-beda untuk setiap propinsi dan daerah, dinilai dari kemajuan daerah tersebut. Beberapa data tidak resmi menyatakan bahwa total dana yang dialirkan pada tahun 2006 berjumlah 50 miliar yuan secara keseluruhan dan meningkat 3 kali lipat menjadi 150 miliar yuan pada tahun 2008. Walaupun begitu, statistik tidak menunjukkan berapa proporsi dana yang dialirkan untuk program wajib belajar 9 tahun.

Metode Pendanaan Sentralisasi Berencana --- Pemindahan tanggung jawab pendanaan pendidikan dari tingkat desa dan kecamatan ke tingkat kabupaten

Selain aliran “dana dalam budget” dari pemerintah yang terus meningkat dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan perkembangan pendidikan di Tiongkok, ada satu lagi reformasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perubahan dari metode pendanaan desentralisasi menjadi metode pendanaan sentralisasi berencana, yakni pemindahan tanggung jawab pendanaan pendidikan dari tingkat desa, kecamatan ke tingkat kabupaten.

Pemindahan tanggung-jawab pendanaan pendidikan dari tingkat desa, kecamatan ke tingkat kabupaten ini dimulai pada tahun 2001. Kebijakan ini memberikan beban dan tanggung-jawab yang lebih besar terhadap pemerintah kabupaten dalam mengatur dan mengurus perkembangan pendidikan, alokasi sumber daya pendidikan dan administrasi sistem sekolah. Jika suatu kabupaten gagal untuk memenuhi biaya pendidikan yang ditetapkan pemerintah, pemerintah propinsi dan pusat baru memberikan bantuan. Kekurangan dana untuk infrastruktur dan administrasi akan ditanggung oleh pemerintah pusat sedangkan kekurangan gaji dan penghasilan guru akan ditanggung oleh pemerintah propinsi.

Pemindahan tanggung-jawab ini juga menandakan bahwa kabupaten akan menjadi salah satu bagian pemerintahan untuk mengurus metode pendanaan pendidikan. Selain itu, untuk lebih meringankan beban para petani di daerah desa, pemerintah mulai menghapus biaya “dana pendidikan tambahan” yang dikenakan kepada rakyat desa. Sebagai gantinya, pemerintah meningkatkan subsidi “dana dalam budget” untuk menutupi kerugian dalam pembangunan SD di desa. Sedangkan, untuk SMP dan SMA, pemerintah kabupaten memainkan peran yang lebih penting dibandingkan sebelumnya.

Pada tahun 2006, pemerintah Tiongkok menyempurnakan sistem pembagian tanggung-jawab dalam metode pendanaan sentralisasi berencana. Aliran dana dalam bentuk “dana dalam budget” ke 3 daerah Tiongkok (daerah barat, tengah dan timur) dikelompokkan secara lebih spesifik. Besarnya aliran dana pun menjadi terencana dan disesuaikan menurut kondisi perkembangan dan situasi setiap daerah.

Untuk pengeluaran gaji dan penghasilan para guru, yang merupakan pengeluaran terbesar dalam kategori “dana dalam budget”, tanggung-jawab diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah setingkat propinsi. Untuk pengeluaran dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung sekolah, renovasi gedung, pemerintah akan mengeluarkan setengah biaya di daerah barat dan tengah. Untuk daerah timur, pemerintah sama sekali tidak membantu dan menyerahkan semua biayanya ke pemerintah daerah. Untuk bantuan pembelian buku-buku dan alat tulis pelajaran, pemerintah memberikan subsidi penuh untuk sekolah-sekolah di daerah barat dan tengah, dan memberikan sedikit bantuan untuk sekolah-sekolah di daerah timur.

Tabel 5.2 dan 5.3 menunjukkan kondisi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Tiongkok. Yang pertama adalah, perbandingan kesenjangan murid di sekolah dasar di wilayah desa dengan wilayah kota. Dan tabel yang kedua adalah, perbandingan kesenjangan murid di sekolah dasar di propinsi maju dengan propinsi terbelakang. Dari tabel tersebut, kita dapat menyimpulkan 2 hal, yaitu: Pertama, metode pendanaan sentralisasi berencana terbukti dapat menekan dan mengurangi angka kesenjangan

yang terjadi di Tiongkok. Kedua, kesenjangan antar daerah (kota & desa) lebih besar tingkatnya dibanding kesenjangan antar propinsi.

Tabel 5.2 Kesenjangan Murid di Sekolah Dasar Wilayah Desa dengan Wilayah Kota

Tahun	Tingkat Kesenjangan total			Tingkat kesenjangan berdasar "dana dari pemerintah"		
	Theil Index	Di dalam grup	Di luar grup	Theil Index	Di dalam grup	Di luar grup
1997	0.096	0.068	0.028	0.137	0.099	0.038
1998	0.102	0.07	0.032	0.134	0.097	0.036
1999	0.112	0.077	0.035	0.127	0.094	0.033
2000	0.117	0.081	0.036	0.121	0.091	0.03
2001	0.117	0.078	0.039	0.112	0.082	0.03
2002	0.114	0.08	0.035	0.096	0.075	0.022
2003	0.126	0.088	0.038	0.105	0.082	0.022
2004	0.121	0.091	0.03	0.1	0.083	0.019
2005	0.109	0.083	0.025	0.073	0.062	0.01

Kesimpulannya, dalam metode pendanaan berencana ini, pemerintah terfokus dalam memajukan pendidikan sekolah di seluruh propinsi. Pemerintah kabupaten memainkan peran yang lebih dan mengambil tanggung-jawab ekstra dalam pembangunan pendidikan sekolah di daerahnya. Sementara itu, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi memainkan peran yang lebih penting dalam meninjau situasi dan keadaan masing-masing daerah dan kemudian memberikan aliran dana yang lebih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kebijakan metode pendanaan berencana ini terbukti berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan yang terjadi dan dirasa para pakar lebih cocok dengan perkembangan pendidikan Tiongkok di era modern sekarang ini.

Tabel 5.3 Kesenjangan Murid di Sekolah Dasar Provinsi Maju dengan Provinsi Terbelakang

Tahun	Tingkat Kesenjangan total			Tingkat kesenjangan berdasar "dana dari pemerintah"		
	Theil Index	Di dalam grup	Di luar grup	Theil Index	Di dalam grup	Di luar grup
1997	0.081	0.048	0.033	0.115	0.076	0.039
1998	0.084	0.047	0.037	0.112	0.071	0.041
1999	0.093	0.048	0.045	0.108	0.07	0.038
2000	0.099	0.05	0.049	0.104	0.068	0.036
2001	0.099	0.052	0.046	0.095	0.063	0.032
2002	0.099	0.053	0.046	0.086	0.058	0.028
2003	0.111	0.057	0.054	0.096	0.06	0.036
2004	0.109	0.059	0.05	0.093	0.059	0.034
2005	0.099	0.057	0.042	0.066	0.043	0.023

5.3.1 Anggaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Peningkatan anggaran pemerintah di bidang pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Baik itu dilihat dari segi APBN maupun dari segi GNP atau GDP. Peningkatan ini juga membuktikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Tiongkok. Walaupun jika dilihat dari segi persentasinya, jumlah ini belum memenuhi harapan dan standar di dunia, yakni 4,5%. Tetapi jika dilihat dari prospek ke depan, Tiongkok dinilai para pakar akan dapat mencapai target tersebut dalam kurun waktu 2-3 tahun dimulai dari tahun 2010. Anggaran yang semakin meningkat juga merupakan suatu bukti bahwa metode sentralisasi berencana yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal tahun 1990an memang berpusat pada pertambahan “biaya dalam budget”.

Peningkatan anggaran ini juga membuktikan usaha pemerintah Tiongkok dalam mengurangi “dana luar budget” yang biasanya menjadi beban bagi rakyat khususnya untuk rakyat yang tinggal di daerah tengah dan daerah timur Tiongkok. Dengan semakin meningkatnya “dana dalam

budget”, pemerintah berharap agar kesenjangan dan ketidakseimbangan antar kualitas dan mutu pendidikan di setiap daerah Tiongkok akan dapat dikurangi dan diselesaikan.

Tabel 5.4 adalah statistik dari perkembangan anggaran pemerintah yang dikucurkan di bidang pendidikan.

Tabel 5.4 Statistik Anggaran Pendidikan di Tiongkok dari Tahun 1970 hingga 2014 (Prediksi)

Tahun	Anggaran Pemerintah		
	GNP (%)	GDP (%)	APBN (%)
1970	1,3	-	4,3
1975	1,7	-	6,3
1980	2,5	-	9,3
1985	2,5	-	12,2
1990	2,3	-	12,8
1995	2,3	-	12,6
2000	2,6	3,19	25,7
2008	3,1	3,48	26,5
2013	5,2	4,02	31,1
2014 (prediksi)	6,5	5,9	32

Peningkatan yang signifikan itu juga akan mengantar Tiongkok dari 30 negara yang persentasi anggaran pendidikannya paling rendah di dunia (peringkat 15, dilansir pada data tahun 1994) menuju ke negara kelas menengah untuk anggaran pendidikan dengan persentasi GDP sebagai indikator. Selain itu pemerintah akan berkonsentrasi agar aliran dana ini bisa tersebar secara seimbang, dan tidak hanya terpusat pada sekolah atau universitas yang berada di daerah maju saja.

5.3.2 Masalah dalam metode pendanaan pendidikan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mereformasi metode pendanaan pendidikannya memang terus membaik dan menunjukkan tren yang semakin positif, akan tetapi metode pendanaan yang sekarang mereka anut masih jauh dari kata sempurna. Berikut

adalah beberapa masalah yang timbul dan menjadi polemik pemerintah Tiongkok dalam mengatasi masalah pendanaan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Tiongkok :

Pertama, kekuasaan pemerintah daerah di bidang pendidikan meningkat, namun sistem pendanaan masih dikuasai dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Walaupun pemerintah telah memberikan sedikit otonomi kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah kadang tidak mendapatkan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan standar pendidikan minimal di daerah masing-masing. Kebanyakan aliran dana masih berkonsentrasi di daerah yang maju, sehingga subsidi dan kucuran dana yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu dan standar sekolah di daerah pedesaan dan daerah kurang mampu masih sangat memprihatinkan.

Kedua, kucuran dana ke daerah pedesaan masih kurang dengan yang diharapkan. Khususnya, pendanaan untuk gaji seorang guru. Kebanyakan dari guru yang berkualitas di Tiongkok masih enggan untuk mengajar di daerah pedesaan dan daerah yang kurang maju. Karena itu, terkadang pemerintah mengucurkan dana lebih untuk membayar para pengajar yang rela untuk dialokasikan ke daerah pedesaan dan daerah yang kurang maju. Akan tetapi, kucuran dana tersebut kadang belum sepadan dengan harapan guru, sehingga kebanyakan dari para guru masih memilih untuk bertahan di daerah perkotaan.

Ketiga, aliran dana untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antar daerah di Tiongkok masih jauh dari sempurna. Terkait dengan kondisi kesenjangan yang cukup tinggi di daerah Tiongkok, aliran dana yang dibutuhkan setiap daerah dalam menjamin standar minimal kualitas pendidikan jelas berbeda. Tetapi dikarenakan sistem ekonomi dan metode pendanaan untuk pendidikan di Tiongkok masih memakai sistem yang lama, sehingga aliran dana yang turun ke setiap daerah kadang tidak seimbang dengan kondisi daerah tersebut. Hal ini diakibatkan karena belum sempurnanya komisi setiap daerah yang mengurus pendanaan di bidang pendidikan.

Akhirnya, dalam mengatasi kesenjangan antara penduduk kota dengan penduduk desa dan penduduk daerah yang kurang mampu

adalah kebijakan pemerintah yang diumumkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kesenjangan yang terjadi tidak hanya di bagian pendidikan, melainkan meliputi banyak elemen di keseluruhan pembangunan suatu daerah. Kucuran dana ke daerah pedesaan seringkali terpusat dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam daerah tersebut, sedangkan kucuran dana ke bagian pendidikan masih belum sepadan dengan kucuran dana bagian lainnya.

6

Peranan Masyarakat dalam Pendidikan

Pendidikan mulai diformalkan melalui kelompok belajar masyarakat pada zaman dinasti Qing 960 M yang dimotori oleh kaum terpelajar di masa itu. Mereka membangun kelompok belajar di rumah masing-masing dan mengajarkan kesusasteraan konfusianisme. Dua kali dalam setahun di setiap bulan Februari dan September dilakukan Ujian Nasional yang diikuti oleh murid-murid kelompok belajar tersebut untuk memperebutkan jabatan sebagai pejabat kekaisaran di tingkat Provinsi dan Pusat. Sebanyak 10 siswa terbaik setiap provinsi kemudian akan berangkat ke Beijing untuk mengikuti Ujian Nasional dan kemudian dipilih 100 orang terbaik yang akan mengisi posisi-posisi penting sebagai pegawai kerajaan.

Pada tahun 1644-1878 didirikan Institut Konfusius yang menggantikan kelompok-kelompok belajar di Beijing yang kemudian diikuti oleh setiap propinsi. Di kota kabupaten dan kecamatan kelompok belajar masih hidup sampai awal Tiongkok Modern, untuk beberapa tempat di wilayah barat laut Tiongkok kelompok belajar ini masih tetap hidup hingga sekarang.

Kelompok belajar ini secara tradisional tidak memungut bayaran. Kebutuhan sarana prasarana belajar disediakan oleh Guru pemilik kelompok belajar. Para siswa yang belajar dalam kelompok tersebut awalnya merupakan putra putri bangsawan. Dalam perkembangan selanjutnya kelompok belajar menerima siswa dari kalangan rakyat

jelata dan sebagai tanda terima kasih atas pendidikan yang diberikan guru, maka orang tua siswa memberikan hasil bumi atau kerajinan tangan kepada guru dan bahkan rela menjadi pembantu di rumah guru demi memperoleh pendidikan.

Di masa Tiongkok Modern yang diawali dengan didirikannya Peking University pada tahun 1898 di Beijing, sampai tahun 1950 pendidikan dilangsungkan secara gratis. Namun setelah itu, didorong oleh desakan untuk memodernisasi dan internasionalisasi pendidikan serta membuka diri terhadap dunia luar maka dilakukan pungutan iuran (*tuition fee*).

Di jenjang Sekolah Dasar dan SMP siswa dibebaskan dari iuran sekolah, namun penyediaan buku pelajaran dan alat tulis untuk keperluan peserta didik harus disediakan sendiri. Sekolah diperbolehkan memungut iuran dari orang tua siswa untuk keperluan studi tur ke luar kota setelah ujian semester dilaksanakan.

Sekolah juga diperbolehkan meminjamkan lahan/bangunannya kepada masyarakat sekitar untuk dijadikan tempat usaha seperti toko atau kantor, uang rental tersebut

digunakan untuk kepentingan modernisasi peralatan sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru, Uang hasil rental tersebut dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang diawasi oleh pengawas sekolah.

Di jenjang SMA, siswa diharuskan membayar sejumlah iuran yang besarnya bervariasi berdasarkan kondisi daerah dan wilayah di Tiongkok. Di Beijing misalnya, iuran per siswa adalah sebesar antara 2000 sampai dengan 4000 yuan per-tahun. Tentunya biaya tersebut jauh dari cukup untuk operasional sekolah, Pemerintah daerah mensubsidi setiap siswa-nya sebesar 4000 sampai 6000 yuan pertahun-nya.

Di jenjang perguruan tinggi, pemerintah memberikan subsidi sebesar 6000 sampai 8000 yuan per tahun untuk setiap mahasiswa ilmu sosial, dan subsidi sebesar 8000 sampai 10.000 yuan per tahun untuk mahasiswa Ilmu sains dan teknik

Bentuk dari pengabdian perguruan tinggi atau sekolah terhadap masyarakat adalah dengan menyediakan pendidikan kursus atau sekolah musim panas selama 2 bulan kepada masyarakat tanpa dipungut

biaya apapun. Biasanya peserta program ini adalah para warga negara senior dan masyarakat yang membutuhkan keterampilan tertentu untuk menambah penghasilan melalui keterampilan yang dipelajarinya.

Organisasi Orang tua murid dan Guru (*Jiazhang Jiaoshi*) dibentuk sebagai alat komunikasi antar guru dan orang tua murid melalui pertemuan yang diselenggarakan setelah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, 4 kali dalam setahun dengan tujuan untuk membahas kesulitan kesulitan siswa dalam mengikuti pelajaran serta mengkomunikasikan kegiatan kegiatan sekolah kepada orang tua siswa.

Jiazhang Jiaoshi juga terdapat di jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi, hanya frekuensi pertemuannya lebih sedikit bila diperguruan tinggi. Biasanya hanya 2 kali saja dalam setahun yaitu yang disebut dengan pertemuan musim semi (*Chunji Huiyi*) dan pertemuan musim gugur (*Qiuji Huiyi*). Pertemuan ini membahas program studi dan konsultasi antara dosen pembimbing dengan orang tua mahasiswa mengenai kemajuan belajar mahasiswa.

DAFTAR REFERENSI

1. Gao Xia. 2006. Comparative Research on Education Reform and Curriculum Change: Re-design of Instructional Time in Compulsory Education. Reference report. (in Chinese).
2. Ministry of Education China. 2004. China 2003-2007 Action Plan for Revitalizing Education: A Learning Guidebook. Beijing: Education Sciences Press. (in Chinese)
3. Ministry of Education China. China Educational Statistic Yearbook, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998. Beijing: The People's Education Publishing House. (in Chinese)
4. UNESCO. 2005. Education for All Global Monitoring Report 2005 - The Quality Imperative, UNESCO Publishing House.
5. Wang Dinghua. 2006. The Development of Basic Education in Rural China: Issues and Problems. A presentation to the International Forum on Contemporary Rural Development in China.
6. Wang Wenjing. 2006. New Curriculum and Teacher Professional Development. Reference report. (in Chinese).
7. Yu Xing-guo. 2006. The Status Quo of School Teachers and Teacher Education in Rural China, a report to FAO. (in Chinese).
8. Ministry of Education China. 2008. Country Report on Teacher Development in Primary and Secondary Education in China. (in Chinese).

9. Sumber Gambar 1.1 dan Tabel 1.2: Yang Jin, Zhōngguó jīchǔ jiàoyù“, Jiàoyù guójì yántǎo huì shàng jièshào, 2005 Nián 5 yuè, Jiàoyù bù
10. Sumber Gambar 1.3 dan Tabel 1.4: J.Yang & Wu Gòujiàn xīn kèchéng, jiāngsū jiàoyù chūbǎn shè, 2010 nián, dì 93 yè.
11. Sumber Tabel 3.1 dan 3.2: data www.wenku.baidu.com.
12. Sumber Tabel 3.3 dan 3.4: www.eol.cn.
13. Sumber Gambar 3.3: www.baike.baidu.com.
14. Sumber Tabel 4.1: www.edu.cn.
15. Sumber Tabel 5.1, 5.2 dan 5.3: China Educational Finance Statistics Yearbook 1998 – 2006
16. Sumber Tabel 5.4: www.knoema.com

-o0o-